PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA BARAT

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017-2022

PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA BARAT

PAPUA BARAT 2017

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017-2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017-2022

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dasar dan pedoman bagi pembangunan daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program dalam satu periode yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana kepala daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PPU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2010 Nomor 73);

24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 – 2033;
25. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Papua Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Papua Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Papua Barat sesuai ketetapan perundang-undangan.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRPB menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Unit Satuan Kerja, dan Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen Nasional untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen nasional untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) Tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 1 (satu) Tahun.
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
16. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
17. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya yang baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
23. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

24. Target adalah batas atau besaran atau status atau ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Dalam hal ini target adalah berdasarkan indikator yang ditetapkan.
25. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan.
26. Instansi vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen di daerah.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
28. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) Tahun.
29. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) Tahun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.

(2) RPJMD memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program OPD, lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:

a. pedoman pemerintah daerah dalam menyusun RKPD; dan
b. pedoman bagi OPD dalam menyusun Renstra OPD.

Pasal 3

(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD setiap tahun.

Pasal 4

(1) Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua Barat adalah Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat.

(2) Untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Provinsi Papua Barat mengusung 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah, meliputi:

a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*) serta otonomi khusus yang efektif;

b. mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;

c. meningkatkan kualitas pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan;

d. meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar;

e. meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata;

f. membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat;

g. memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial; dan

h. memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusifitas daerah.

Pasal 5

(1) OPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan ke dalam Renstra OPD.

(2) Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Dokumen RPJMD yang merupakan satu kesatuan dokumen Perencanaan Pembangunan yang tidak dapat terpisahkan.

(3) Dalam menyusun Renstra OPD dan Renja OPD. OPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 6

Sistematika penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah.

c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berisi Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan.

d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Berisi Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis.

e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM DAERAH

Berisi Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.

h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisi Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

i. BAB IX PENUTUP

Berisi Pedoman dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 7

Isi beserta uraian RPJMD Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang periode pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur bersama DPRPB dapat menyempurnakan RPJMD.

Pasal 9

OPD berkewajiban melaksanakan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 dengan kepala OPD sebagai penanggungjawab.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Perubahan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.

(2) Perubahan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pada:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan, bahwa proses perumusan dokumen RPJMD sudah tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, mekanisme dan tata cara pedoman penyusunan RPJMD;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan, bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai sebagaimana substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

c. terjadinya perubahan mendasar akibat peristiwa di luar kemampuan manusia, antara lain bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,

konflik sosial budaya, instabilitas keamanan, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), dan perubahan kebijakan nasional; dan

d. dokumen RPJMD dimaksud dapat merugikan kepentingan nasional, apabila perumusan kebijakannya bertentangan dengan kebijakan nasional.

(3) Perubahan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Dalam hal terjadinya perubahan yang bersifat parsial terhadap dokumen RPJMD, dan tidak mempengaruhi terhadap perubahan capaian sasaran serta, tidak mengubah target capaian sasaran akhir periode RPJMD, maka perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 20 November 2017

GUBERNUR PAPUA BARAT,

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

NURHAEDAH, S.H
PEMBINA TINGKAT 1
NIP. 19591231 199403 2 013

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (4/300/2017)

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017-2022

SAMBUTAN
GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

Shalom,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabrakatuh,

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Tepat pada tanggal 12 Mei 2017, saya bersama saudara Wakil Gubernur Bapak Mohamad Lakotani, S.H, M.Si diperkenankan Tuhan untuk memimpin Provinsi Papua Barat selama lima tahun kedepan, berkat kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat Provinsi Papua Barat pada proses pemilihan kepala daerah yang telah lalu. Hal ini merupakan langkah awal bagi kami untuk ikut serta membawa Papua Barat menjadi Provinsi yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat sebagaimana yang telah kami janjikan pada kampanye kami.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jJngka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai koridor pelaksanaan pembangunan selama lima tahun kedepan.

Berkat partisipasi kita sekalian, seluruh stakeholder terkait di Provinsi Papua Barat dalam

memberikan pembobotan serta berperan aktif mengawal proses penyusunan, maka Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini dapat selesai tepat pada waktunya. Harapan kami bahwa dengan dokumen ini, kita sama-sama dapat mengawal proses pembangunan selama lima tahun ke depan di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhir sambutan ini, saya memberikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh tim penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini yang telah bekerja keras meluangkan tenaga dan waktu secara maksimal dalam penyusunan, serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan dokumen ini. akhirnya, Tuhan memberkati niat tulus kita bersama untuk "Membangun Papua Barat dengan Hati, Mempersatukan dengan Kasih, Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat"

Tuhan memberkati kita sekalian

Manokwari, 12 November 2017

Gubernur Provinsi Papua Barat,

Dr. Ir. Dominggus Mandacan

Foto: Ed Marthin, 2017

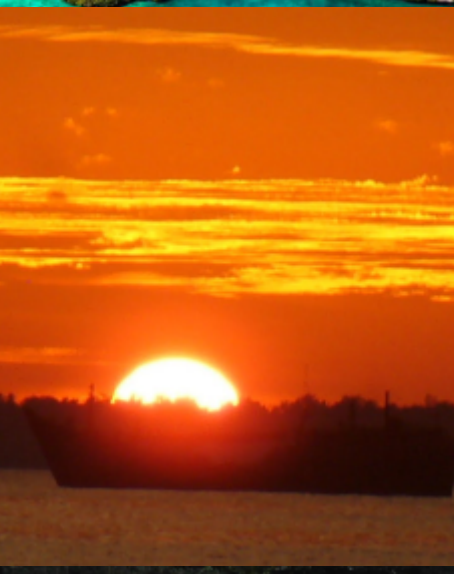

Foto: Billy, 2017

DAFTAR ISI

SAMBUTAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT i
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR xiv

BAB I PENDAHULUAN I.1
1.1. LATAR BELAKANG I.1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN I.6
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN I.9
1.3.1. Keterhubungan RPJMD dan RPJPD I.10
1.3.2. Keterhubungan RPJMD dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 I.11
1.3.3. Keterhubungan RPJMD Provinsi Papua Barat dengan RPJMD Provinsi Papua I.13
1.3.4. Keterhubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah I.13
1.3.5. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra OPD I.14
1.3.6. Keterhubungan RPJMD dengan RKPD I.15
1.4. MAKSUDA DAN TUJUAN I.16
1.4.1. Maksud I.16
1.4.2. Tujuan I.16
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN I.17

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II.1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah II.1
2.1.1.1. Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi II.1
2.1.1.2. Kondisi Topografi II.6
2.1.1.3. Kondisi Geologi II.10
2.1.1.4. Kondisi Hidrologi II.14
2.1.1.5. Kondisi Klimatologi II.22
2.1.1.6. Karakteristik Tanah II.30
2.1.1.7. Penggunaan Lahan II.38
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah II.43
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana II.54
2.1.4. Kondisi Demografi II.71
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II.76
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II.76
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi II.76
2.2.1.2. Struktur Ekonomi II.81
2.2.1.3. Inflasi II.87
2.2.1.4. PDRB Per Kapita II.91
2.2.1.5. Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan Bank Dunia II.93
2.2.1.6. Persentase Penduduk Miskin II.95
2.2.1.7. Tindak Pidana yang Tertangani II.98

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II.99
2.2.2.1. Angka Melek Huruf II.99
2.2.2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah II.100
2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar II.102
2.2.2.4. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan II.104
2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni II.107
2.2.2.6. Angka Kematian Bayi II.109
2.2.2.7. Angka Harapan Hidup II.110
2.2.2.8. Rasio Penduduk yang Bekerja II.111
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga II.113
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM II.114
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib II.114
2.3.1.1. Pendidikan II.114
2.3.1.2. Kesehatan II.119
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II.129
2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II.132
2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat II.136
2.3.1.6. Sosial II.139
2.3.1.7. Tenaga Kerja II.140
2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak II.143
2.3.1.9. Pertanahan II.144
2.3.1.10. Lingkungan Hidup II.145
2.3.1.11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II.146
2.3.1.12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II.147
2.3.1.13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II.149
2.3.1.14. Perhubungan II.150
2.3.1.15. Komunikasi dan Informatika II.164
2.3.1.16. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah II.167
2.3.1.17. Penanaman Modal II.169
2.3.1.18. Kepemudaan dan Olahraga II.171
2.3.1.19. Statistik II.173
2.3.1.20. Persandian II.175
2.3.1.21. Kebudayaan II.176
2.3.1.22. Perpustakaan II.179
2.3.1.23. Kearsipan II.180
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan II.181
2.3.2.1. Kelautdan dan Perikanan II.181
2.3.2.2. Pariwisata II.207
2.3.2.3. Pertanian II.213
2.3.2.4. Kehutanan II.250
2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral II.254
2.3.2.6. Perdagangan II.265
2.3.2.7. Perindustrian II.268
2.3.2.8. Transmigrasi II.274

Foto: Ed Marthin, 2017

Foto: Yansyah, 2017

Foto: Billy, 2017

Foto: Billy, 2017

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH II.276
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II.276
2.4.1.1. Pengeluaran Per Kapita Per Bulan II.276
2.4.1.2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan II.278
2.4.1.3. Produktivitas Total Daerah II.280
2.4.1.4. Nilai Tukar Petani II.281
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur II.284
2.4.2.1. Sarana Transportasi II.284
2.4.2.2. Fasilitas Jasa Perbankan II.287
2.4.2.3. Fasilitas Akomodasi dan Rumah Makan II.287
2.4.2.4. Ketersediaan Listrik, Air Bersih, dan Sarana Komunikasi II.288
2.4.2.5. Sistem Perkotaan II.290
2.4.2.6. Luas Wilayah Produktif dan Industri II.292
2.4.2.7. Luas Wilayah Kebanjiran dan Kekeringan II.294
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi II.294
2.4.3.1. Angka Kriminalitas II.295
2.4.3.2. Pajak dan Retribusi Daerah II.296
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia II.297
2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja II.298
2.4.4.2. Kapasitas Aparatur Pemerintahan II.298
2.4.4.3. Rasio Ketergantungan II.300

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III.1
3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU III.3
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD III.3
3.1.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah III.3
3.1.1.2. Realisasi Belanja Daerah III.8
3.1.1.3. Realisasi Pembiayaan Daerah III.12
3.1.2. Neraca Daerah III.14
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU III.21
3.2.1. Proporsi Realisasi Belanja Daerah III.26
3.2.1.1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja III.26
3.2.1.2. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur III.27
3.2.2. Analisis Pembiayaan III.30
3.3. KERANGKA PENDANAAN III.33
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah III.33
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan III.36

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH IV.1
4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT IV.1

4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar IV.2
4.1.1.1. Urusan Bidang Pendidikan IV.2
4.1.1.2. Urusan Bidang Kesehatan IV.3
4.1.1.3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV.4
4.1.1.4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman IV.5
4.1.1.5. Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat IV.5
4.1.1.6. Urusan Bidang Sosial IV.6
4.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar IV.7
4.1.2.1. Urusan Bidang Tenaga Kerja IV.7
4.1.2.2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak IV.8
4.1.2.3. Urusan Bidang Pangan IV.9
4.1.2.4. Urusan Bidang Pertanahan IV.10
4.1.2.5. Urusan Bidang Lingkungan Hidup IV.10
4.1.2.6. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil IV.10
4.1.2.7. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa IV.11
4.1.2.8. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana IV.11
4.1.2.9. Urusan Bidang Perhubungan IV.12
4.1.2.10. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika IV.12
4.1.2.11. Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah IV.12
4.1.2.12. Urusan Bidang Penanaman Modal IV.12
4.1.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga IV.13
4.1.2.14. Urusan Bidang Statistik IV.13
4.1.2.15. Urusan Bidang Persandian IV.13
4.1.2.16. Urusan Bidang Kebudayaan IV.14
4.1.3. Urusan Pilihan IV.14
4.1.3.1. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan IV.14
4.1.3.2. Urusan Bidang Pariwisata IV.16
4.1.3.3. Urusan Bidang Pertanian IV.17
4.1.3.4. Urusan Bidang Kehutanan IV.18
4.1.3.5. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral IV.19
4.1.3.6. Urusan Bidang Perdagangan IV.20
4.1.3.7. Urusan Bidang Perindustrisn IV.20
4.1.3.8. Urusan Bidang Ketransmigrasian IV.21

Foto: Yansyah, 2017

Foto: Windesi, 2017

Foto: Windesi, 2017

Foto: Billy, 2017

4.1.4. Urusan Pemerintahan Penunjang IV.21
4.1.4.1. Urusan Bidang Pemerintahan Umum IV.21
4.1.4.2. Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian IV.22
4.1.4.3. Urusan Bidang Keuangan Daerah IV.22
4.1.4.4. Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah IV.22
4.1.4.5. Urusan Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah IV.23
4.2. ISU STRATEGIS PROVINSI PAPUA BARAT IV.23
4.2.1. Isu Strategis Internasional IV.23
4.2.2. Isu Kebijakan Nasional IV.25
4.2.2.1. Kebijakan Otonomi Khusus IV.25
4.2.2.2. Pembangunan Wilayah Tertinggal IV.28
4.2.2.3. Pembangunan Kawasan Perbatasan IV.28
4.2.3. Isu Pembangunan Wilayah Papua IV.29
4.2.3.1. Pembangunan Jalan Trans Papua dan Papua Barat IV.29
4.2.3.2. Pembangunan Pada Tanah Ulayat IV.30
4.2.4. Isu Strategis Wilayah Papua Barat IV.30
4.2.4.1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan IV.30
4.2.4.2. Pengembangan Wilayah dan Kewilayahan (Pemekaran Wilayah) IV.32
4.2.4.3. Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi IV.33
4.2.4.4. Tapa Batas Antar Wilayah Papua Barat IV.34
4.2.4.5. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Papua Barat IV.35
4.2.4.6. Pengembangan Perumahan Layak Huni IV.36
4.2.4.7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Papua Barat IV.36
4.2.4.8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Papua Barat IV.36
4.2.4.9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup IV.36
4.2.4.10. Pengelolaan Hutan IV.37
4.2.4.11. Pembangunan Sektor Maritim Papua Barat IV.37
4.2.4.12. Kawasan Ekonomi Khusus Sorong IV.39
4.2.4.13. Kawasan Industri (KI) Petrokimia Teluk Bintuni IV.40

4.2.4.14. Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Lokal yang Bernilai Tambah di Sektor/subsektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan IV.41
4.2.4.15. Program Afirmasi Pendidikan IV.45

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN V.1
5.1. VISI V.1
5.2. MISI V.2
5.3. TUJUAN DAN SASARAN V.4
5.3.1. Tujuan dan Sasaran pada Misi 1 V.5
5.3.2. Tujuan dan Sasaran pada Misi 2 V.7
5.3.3. Tujuan dan Sasaran pada Misi 3 V.8
5.3.4. Tujuan dan Sasaran pada Misi 4 V.9
5.3.5. Tujuan dan Sasaran pada Misi 5 V.10
5.3.6. Tujuan dan Sasaran pada Misi 6 V.11
5.3.7. Tujuan dan Sasaran pada Misi 7 V.12
5.3.8. Tujuan dan Sasaran pada Misi 8 V.13
5.4. SINKRONISASI SASARAN DAN TARGET KINERJA RPJMD TAHUN 2017-2022 DENGAN RPJPD TAHUN 2012-2025 SERTA RPJMD TAHUN 2014-2019 V.22
5.4.1. Sinkronisasi Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 Dengan Sasaran RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025 V.22
5.4.2. Sinkronisasi Target Kinerja RPJMD Provinsi Papua Barat Dengan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional V.25

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI.1
6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH VI.1
6.1.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Pertama VI.1
6.1.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Kedua VI.14
6.1.3. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Ketiga VI.19
6.1.4. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Keempat VI.28
6.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kelima VI.33
6.1.6. Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Keenam VI.40
6.1.7. Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Ketujuh VI.46

Foto: Paiki, 2017

6.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kedelapan VI.59

6.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI.62

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII.1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VII.1

BAB IX PENUTUP IX.1

Foto: Paiki, 2017

Foto: Paiki, 2017

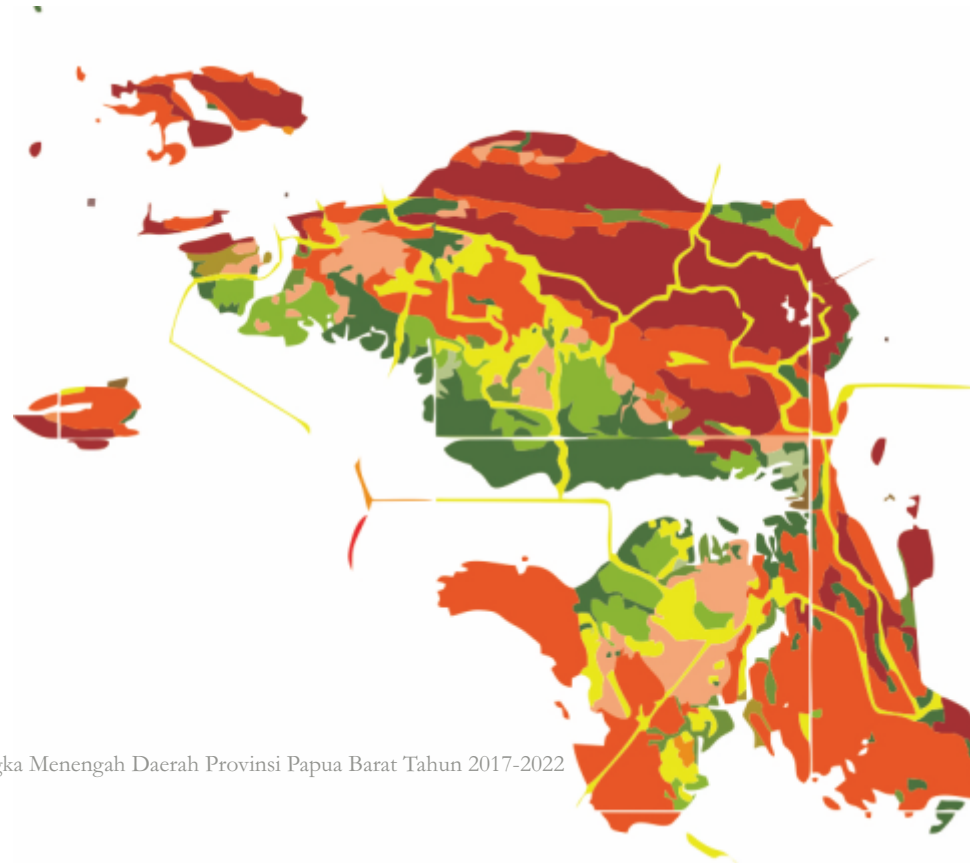

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022	I.5
Gambar 1.2	Alur Keterhubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	I.9
Gambar 1.3	Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025	I.10
Gambar 1.4	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 dan RPJMN Tahun 2015-2019	I.12
Gambar 1.5	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 dan RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033	I.14
Gambar 1.6	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022	I.15
Gambar 1.7	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	I.16
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administratif Provinsi Papua Barat, 2017	II.2
Gambar 2.2	Persentase Luas Wilayah Menurut Kondisi Topografi, 2017	II.7
Gambar 2.3	Peta Topografi Provinsi Papua Barat, 2017	II.8
Gambar 2.4	Peta Kelerengan Provinsi Papua Barat, 2017	II.10
Gambar 2.5	Peta Provinsi Geologi Provinsi Papua Barat, 2017	II.11
Gambar 2.6	Peta Geologi Provinsi Papua Barat, 2017	II.12
Gambar 2.7	Jumlah Kejadian Gempa di Provinsi Papua Barat, 2014	II.13
Gambar 2.8	Jumlah Kejadian Gempa di Provinsi Papua Barat, 2009-2014	II.14
Gambar 2.9	Peta Jaringan Sungai di Provinsi Papua Barat, 2017	II.15
Gambar 2.10	Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Papua Barat, 2017	II.19
Gambar 2.11	Peta Pembagian Wilayah Sungai di Provinsi Papua Barat, 2017	II.20
Gambar 2.12	Peta Sebaran Danau di Provinsi Papua Barat, 2017	II.21
Gambar 2.13	Peta Air Tanah di Provinsi Papua Barat, 2017	II.22

Foto: Windesi, 2017

Gambar 2.14	Kondisi Tekanan Udara di Provinsi Papua Barat, 2014	II.27
Gambar 2.15	Persentase Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah, 2017	II.31
Gambar 2.16	Peta Jenis Tanah di Provinsi Papua Barat, 2017	II.36
Gambar 2.17	Persentase Luas Wilayah Menurut Tekstur Tanah, 2017	II.37
Gambar 2.18	Peta Tekstur Tanah di Provinsi Papua Barat, 2017	II.37
Gambar 2.19	Persentase Luas Wilayah Menurut Drainase Tanah, 2017	II.38
Gambar 2.20	Peta Ketersediaan Lahan di Provinsi Papua Barat, 2014	II.40
Gambar 2.21	Peta Penggunaan Lahan di Provinsi Papua Barat, 2014	II.42
Gambar 2.22	Peta Kawasan Permukiman dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Permukiman di Provinsi Papua Barat, 2014	II.43
Gambar 2.23	Peta Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Papua Barat, 2017	II.56
Gambar 2.24	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Papua Barat, 2010-2015	II.72
Gambar 2.25	Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat, 2015	II.75
Gambar 2.26	Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB AHK Provinsi Papua Barat, 2011-2016	II.76
Gambar 2.27	Perbandingan Pertumbuhan Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Lain dan Nasional, 2016	II.78
Gambar 2.28	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Menurut Sektor, 2016	II.80
Gambar 2.29	Kontribusi PDRB Menurut Sektor di Provinsi Papua Barat, 2016	II.84
Gambar 2.30	Perkembangan Kontribusi Sektor Primern, Sekunder, dan Tersier di Provinsi Papua Barat, 2011-2016	II.86
Gambar 2.31	Laju Inflasi di Provinsi Papua Barat, 2011-2016	II.87
Gambar 2.32	Laju Inflasi Bulanan Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2016	II.89
Gambar 2.33	Perkembangan Distribusi Pengeluaran Menurut Bank Dunia Provinsi Papua Barat, 2012-2016	II.95
Gambar 2.34	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.96

Foto: Billy, 2017

Foto: Billy, 2017

Foto: Billy, 2017

Gambar 2.35	Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Provinsi, 2016	II.97
Gambar 2.36	Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat (unit), 2015	II.120
Gambar 2.37	Jumlah Puskesmas di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat (unit), 2015	II.121
Gambar 2.38	Jumlah Kasus HIV yang Dilaporkan per Provinsi Tahun 1987 sampai dengan September 2014	II.127
Gambar 2.39	Sepuluh Provinsi dengan *AIDS Case Rate* Tertinggi Tahun 1987 sampai dengan September 2014 (kasus)	II.128
Gambar 2.40	Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan 2014	II.129
Gambar 2.41	Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan, 2014	II.131
Gambar 2.42	Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama (%), 2015	II.134
Gambar 2.43	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar (%), 2015	II.136
Gambar 2.44	Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.138
Gambar 2.45	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan/Memakai Alat KB di Papua Barat (%), 2011-2015	II.150
Gambar 2.46	Peta Jaringan Jalan Provinsi Papua Barat	II.151
Gambar 2.47	Persentase Kendaraan Bermotor di Papua Barat (%), 2014	II.155
Gambar 2.48	Peta Arahan Transportasi Laut	II.159
Gambar 2.49	Peta Arahan Transportasi Udara di Provinsi Papua Barat	II.162
Gambar 2.50	Persentase Banyaknya Surat Pos Yang dikirim Menurut Sifat Pengiriman, 2014	II.166
Gambar 2.51	Alur Kebudayaan Papua Barat yang Diakui Nasional dan Internasional	II.178
Gambar 2.52	Peta Gelombang dan Arus Laut di Provinsi Papua Barat, 2017	II.183
Gambar 2.53	Peta Sebaran Salinitas Rerata Tahunan di Provinsi Papua Barat, 2017	II.184
Gambar 2.54	Peta Sebaran Suhu Permukaan Laut Rerata Tahunan di Provinsi Papua Barat, 2017	II.185
Gambar 2.55	Peta Sebaran Oksigen Terlarut Rerata Tahunan di Provinsi Papua Barat, 2017	II.185

Foto: Windesi, 2017

Foto: Windesi, 2017

Foto: Billy, 2017

Foto: Billy, 2017

Gambar 2.56	Peta Kawasan Lindung Laut di Provinsi Papua Barat, 2017	II.187
Gambar 2.57	Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Laut di Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.198
Gambar 2.58	Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Provinsi (ton), 2015	II.199
Gambar 2.59	Volume Produksi Perikanan Tangkap Laut Terbesar Menurut Jenis (ton), 2013	II.200
Gambar 2.60	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut Terbesar Menurut Jenis (Rp 000), 2013	II.200
Gambar 2.61	Persentase Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Kab/Kota (%), 2015	II.202
Gambar 2.62	Jumlah Alat Tangkap Menurut Jenis (unit), 2014	II.204
Gambar 2.63	Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum di Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.206
Gambar 2.64	Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.208
Gambar 2.65	Jumlah Tamu Asing dan Domestik yang Menginap, 2010-2014	II.211
Gambar 2.66	Jumlah Hotel Menurut Kelas di Provinsi Papua Barat, 2009-2015	II.213
Gambar 2.67	Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.216
Gambar 2.68	Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Ladang Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.218
Gambar 2.69	Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.220
Gambar 2.70	Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kedelai Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.221
Gambar 2.71	Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Tanah Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.223
Gambar 2.72	Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Hijau Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.224
Gambar 2.73	Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Kayu Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.226

Gambar 2.74	Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Jalar Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.227
Gambar 2.75	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kelapa di Provinsi Papua Barat, 2011-2014	II.233
Gambar 2.76	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat, 2011-2014	II.234
Gambar 2.77	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kopi di Provinsi Papua Barat, 2011-2014	II.235
Gambar 2.78	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Cengkeh di Provinsi Papua Barat, 2011-2014	II.236
Gambar 2.79	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kakao di Provinsi Papua Barat, 2011-2014	II.237
Gambar 2.80	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Pala di Provinsi Papua Barat, 2011-2014	II.238
Gambar 2.81	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Jambu Mete di Provinsi Papua Barat, 2011-2014	II.239
Gambar 2.82	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Sagu di Provinsi Papua Barat, 2011-2014	II.240
Gambar 2.83	Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor, 2011-2016	II.266
Gambar 2.84	Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, 2011-2016	II.269
Gambar 2.85	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.277
Gambar 2.86	Persentase Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan, 2015	II.299
Gambar 3.1	Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat 2012-2016	III.6
Gambar 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012-2016	III.7
Gambar 3.3	Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012-2016	III.11
Gambar 5.1	Kerangka Pemikiran (*Logical Framework*) Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022	V.4

Foto: Billy, 2017

Foto: Windesi, 2017

Foto: Billy, 2017

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Daratan Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten, 2017	II.4
Tabel 2.2	Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Papua Barat, 2015	II.5
Tabel 2.3	Kampung Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografi, 2014	II.5
Tabel 2.4	Ketinggian Wilayah Menurut Kabupaten/Kota, 2017	II.8
Tabel 2.5	Banyaknya Kampung Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Topografi, 2014	II.9
Tabel 2.6	Luas Wilayah Menurut Kondisi Kelerengan, 2017	II.10
Tabel 2.7	Pembagian Satuan Wilayah Sungai (DAS) di Papua Barat, 2017	II.16
Tabel 2.8	Luas dan Penyebaran Danau di Provinsi Papua Barat, 2017	II.20
Tabel 2.9	Distribusi Luas Areal Air Tanah (*Ground Water*) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2017	II.22
Tabel 2.10	Suhu Udara Minimum, Maksimum, dan Rerata di Provinsi Papua Barat (°C), 2014	II.23
Tabel 2.11	Suhu Udara Maksimum, Minimum, dan Rerata Menurut Kabupaten/Kota (°C), 2010-2014	II.25
Tabel 2.12	Rerata Kelembaban Udara Menurut Kabupaten/Kota (%), 2010-2014	II.26
Tabel 2.13	Rerata Tekanan Udara Menurut Kabupaten/Kota (mbps), 2010-2014	II.27
Tabel 2.14	Kecepatan Angin Maksimum dan Rerata di Papua Barat (knot), 2014	II.28
Tabel 2.15	Rerata Penyinaran Matahari di Kabupaten/Kota (%), 2010-2014	II.28
Tabel 2.16	Banyaknya Curah Hujan Menurut Kabupaten/Kota (mm), 2010-2014	II.29
Tabel 2.17	Banyaknya Hari Hujan Menurut Kabupaten/Kota (Hari), 2010-2014	II.30
Tabel 2.18	Kondisi Penggunaan Lahan di Provinsi Papua Barat, 2014	II.41
Tabel 2.19	Luas Lahan Permukiman di Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota (Ha), 2014	II.43
Tabel 2.20	Rencana Pengelolaan Kawasan di SWP I	II.46
Tabel 2.21	Rencana Pengelolaan Kawasan di SWP II	II.48
Tabel 2.22	Rencana Pengelolaan Kawasan di SWP III	II.51
Tabel 2.22	Rencana Pengelolaan Kawasan di SWP IV	II.52
Tabel 2.23	Sebaran Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Papua Barat, 2017	II.54

Tabel 2.24	Kelas Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2014	II.57
Tabel 2.25	Jumlah Paparan Risiko Bencana di Provinsi Papua Barat, 2015	II.61
Tabel 2.26	Matriks Kajian Risiko Multi Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2015	II.63
Tabel 2.27	Jumlah dan Kepadatan Penduduk per km^2 Menurut Kabupaten/Kota, 2015	II.73
Tabel 2.28	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota, 2015	II.74
Tabel 2.29	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha (%), 2011-2016	II.79
Tabel 2.30	Konstribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Barat (%), 2011-2016	II.81
Tabel 2.31	Perkembangan PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota (Rp Milyar), 2012-2015	II.85
Tabel 2.32	Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong, 2014-2016	II.90
Tabel 2.33	PDRB Per Kapita Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Konstan, 2012-2016	II.92
Tabel 2.34	PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota (Rp), 2011-2015	II.92
Tabel 2.35	Angka Gini Rasio menurut Status Wilayah di Provinsi Papua Barat, 2012-2016	II.94
Tabel 2.36	Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.96
Tabel 2.37	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.98
Tabel 2.38	Jumlah Tindak Pidana dan Perkara Pidana yang Diselesaikan di Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.99
Tabel 2.39	Tabel Angka Melek Huruf menurut Kabupaten Kota, 2009-2013	II.100
Tabel 2.40	Rerata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (tahun), 2011-2016	II.101
Tabel 2.41	Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Papua Barat (%), 2010-2014	II.102
Tabel 2.42	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (%), 2014	II.103
Tabel 2.43	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Papua Barat, 2010-2014	II.104

Foto: Paiki, 2017

Foto: Windesi, 2017

Foto: Windesi, 2017

Foto: Windesi, 2017

Tabel 2.44	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Papua Barat, 2014	II.106
Tabel 2.45	Angka Partisipasi Murni Provinsi Papua Barat (%), 2010-2015	II.107
Tabel 2.46	Angka Partisipasi Murni menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (%), 2015	II.108
Tabel 2.47	Persentase Wanita Berumur 10 Tahun Atau Lebih Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup dan Meninggal di Provinsi Papua Barat (%), 2010-2014	II.109
Tabel 2.48	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat (tahun), 2011-2016	II.110
Tabel 2.49	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Barat (%), 2010-2014	II.112
Tabel 2.50	Jumlah Sekolah menurut Level Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat (unit), 2014	II.115
Tabel 2.51	Rasio Guru terhadap Ketersediaan Sekolah di Provisi Papua Barat (orang/sekolah), 20111-2015	II.116
Tabel 2.52	Rasio Penduduk Usia Sekolah terhadap Ketersediaan Sekolah di Provinsi Papua Barat (orang/sekoah), 2011-2015	II.117
Tabel 2.53	Rasio Murid terhadap Ketersediaan Sekolah di Provinsi Papua Barat (orang/sekolah), 2011-2015	II.117
Tabel 2.54	Rasio Murid terhadap Guru di Provinsi Papua Barat (murid/guru), 2011-2015	II.118
Tabel 2.55	Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah (%), 2011-2015	II.119
Tabel 2.56	Jumlah dan Jenis Dokter Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat (orang), 2014	II.122
Tabel 2.57	Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat, 2014	II.123
Tabel 2.58	Persentase Balita Menurut Provinsi dan Penolong Kelahiran Terakhir Provinsi Papua Barat (%), 2011-2015	II.124
Tabel 2.59	Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Provinsi Papua Barat (%), 2015	II.125
Tabel 2.60	Jumlah Kasus Penyakit dan Jenis Penyakit Provinsi Papua Barat, 2014	II.126

Tabel 2.61	Jumlah Kasus Baru AIDS dan Kasus Kumulatif AIDS, 2014	II.128
Tabel 2.62	Panjang Jalan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Menurut Kondisi Jalan 2014 (Km)	II.130
Tabel 2.63	Panjang Jalan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Permukaan Jalan (km), 2014	II.131
Tabel 2.64	Persentase Jenis Kepemilikan Rumah Provinsi Papua Barat (%), 2011-2014	II.132
Tabel 2.65	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai (%), 2011-2015	II.133
Tabel 2.66	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap (%), 2011-2014	II.133
Tabel 2.67	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding (%), 2011-2014	II.134
Tabel 2.68	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Untuk Minum (%), 2015	II.135
Tabel 2.69	Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Papua Barat (kasus), 2012-2015	II.137
Tabel 2.70	Persentase Penduduk Menurut Jenis Agama, 2015	II.139
Tabel 2.71	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Provinsi Papua Barat dan Nasional, 2010-2016	II.142
Tabel 2.72	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.144
Tabel 2.73	Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup menurut Kabupate/Kota Provinsi Papua Barat (jumlah daerah), 2014	II.145
Tabel 2.74	Jaringan Jalan Arteri Primer di Provinsi Papua Barat	II.151
Tabel 2.75	Jaringan Jalan Kolektor Primer di Provinsi Papua Barat	II.152
Tabel 2.76	Jumlah Kendaraan Bermotor di Papua Barat (unit), 2011-2014	II.154
Tabel 2.77	Rute Pelayaran Domestik dan Pelayaran Lokal di Papua Barat	II.156
Tabel 2.78	Total Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang dari Pelayaran Dalam Negeri di 3 Pelabuhan yang Diusahakan di Papua Barat (orang), 2010-2014	II.158
Tabel 2.79	Rute Penerbangan Domestik Di Provinsi Papua Barat	II.160

Foto: Marisan, 2017

Foto: Billy, 2017

Foto: Billy, 2017

Foto: Billy, 2017

Tabel 2.80	Rute Penerbangan Lokal di Provinsi Papua Barat	II.161
Tabel 2.81	Rencana Bandar Udara di Provinsi Papua Barat	II.162
Tabel 2.82	Jumlah dan Penumpang Pesawat di Provinsi Papua Barat (orang), 2010-2014	II.163
Tabel 2.83	Banyaknya kantor Pos dan Giro Menurut Jenisnya, 2010-2014	II.165
Tabel 2.84	Banyaknya Surat Pos Yang dikirim Menurut Sifat Pengiriman, 2010-2014	II.165
Tabel 2.85	Jumlah Sambungan telepon menurut Jenis Sambungan	II.166
Tabel 2.86	Jumlah Koperasi Provinsi Papua Barat (unit), 2009-2013	II.167
Tabel 2.87	Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (unit), 2013	II.168
Tabel 2.88	Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi menurut Jenis di Papua Barat, 2011-2013	II.169
Tabel 2.89	Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.170
Tabel 2.90	Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Papua Barat, 2011-2015	II.170
Tabel 2.91	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Lapangan Olah Raga di Provinsi Papua Barat	II.173
Tabel 2.92	Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2011-2016	II.175
Tabel 2.93	Jumlah Wisata Budaya di Provinsi Papua barat (obyek), 2009-2013	II.179
Tabel 2.94	Jumlah Koleksi Perpustakaan Berdasarkan jenisnya, 2011	II.180
Tabel 2.95	Kisaran Nilai Kondisi Fisik, Kimia, dan Biologi Perairan Papua Barat	II.186
Tabel 2.96	Potensi SDI di Perairan Provinsi Papua Barat Menurut WPPNRI	II.197
Tabel 2.97	Kabupaten/Kota Produsen Terbesar Perikanan Laut Di Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.201
Tabel 2.98	Jumlah Perahu Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis (unit), 2015	II.202
Tabel 2.99	Jumlah Pelabuhan Perikanan di Provinsi Papua Barat	II.205
Tabel 2.100	Kawasan Pariwisata di Provinsi Papua Barat	II.208

Tabel 2.101	Lama Tamu Asing Menginap Menurut Jenis Hotel (Hari), 2009-2014	II.212
Tabel 2.102	Luas Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan (ha), 2015	II.214
Tabel 2.103	Luas Lahan Tegal, Ladang, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota (ha), 2015	II.215
Tabel 2.104	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015	II.217
Tabel 2.105	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Ladang Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015	II.219
Tabel 2.106	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015	II.220
Tabel 2.107	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kedelai Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015	II.222
Tabel 2.108	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Tanah Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015	II.223
Tabel 2.109	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Hijau Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015	II.225
Tabel 2.110	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Kayu Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015	II.226
Tabel 2.111	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Jalar Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015	II.228
Tabel 2.112	Perkembangan Luas Panen dan Produksi Sayuran di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis, 2011-2014	II.230
Tabel 2.113	Perkembangan Produksi Buah di Provinsi Papua Barat, 2011-2014	II.231
Tabel 2.114	Perkembangan Produksi Tanaman Obat di Provinsi Papua Barat (ton), 2011-2014	II.232
Tabel 2.115	Perkembangan Populasi Ternak Besar dan Kecil di Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota (ekor), 2011-2014	II.243
Tabel 2.116	Perkembangan Populasi Ternak Unggas di Provinsi Papua Barat Menurur Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak (ekor), 2011-2014	II.243

Foto: Paiki, 2017

Foto: Windesi, 2017

Foto: Billy, 2017

Tabel 2.117	Pemotongan Ternak Besar dan Kecil di Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak (ekor), 2011-2014	II.244
Tabel 2.118	Perkembangan Produksi Daging Ternak Besar dan Kecil di Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota (kg), 2011-2014	II.245
Tabel 2.119	Perkembangan Produksi Daging Ternak Unggas di Provinsi Papua Barat Menurur Kabupaten/Kota (ekor), 2011-2014	II.246
Tabel 2.120	Perkembangan Produksi Telur di Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak (kg), 2011-2014	II.247
Tabel 2.121	Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten/Kota (ha), 2015	II.250
Tabel 2.122	Perusahaan Penerima Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Papua Barat	II.251
Tabel 2.123	Perusahaan Penerima Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Provinsi Papua Barat	II.253
Tabel 2.124	Perkembangan Produksi Kayu Olahan Menurut Kabupaten/Kota (m^3), 2010-2013	II.254
Tabel 2.125	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kabupaten/Kota, 2015	II.257
Tabel 2.126	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2015	II.258
Tabel 2.127	Rencana Pengembangan Kelistrikan di Provinsi Papua Barat	II.259
Tabel 2.128	Potensi Mineral Logam dan Non Logam di Provinsi Papua Barat	II.262
Tabel 2.129	Banyaknya Kampung yang Memiliki Sarana Perdagangan Menurut Kabupaten/Kota (unit), 2014	II.266
Tabel 2.130	Nilai Ekspor Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2015	II.267
Tabel 2.131	Negara Tujuan Ekspor Provinsi Papua Barat, 2015	II.267
Tabel 2.132	Perkembangan Industri Besar/Sedang Menurut Jenis di Provinsi Papua Barat (unit), 2011-2014	II.270
Tabel 2.133	Perkembangan Industri Besar/Sedang Menurut Jenis di Provinsi Papua Barat (unit), 2011-2014	II.270
Tabel 2.134	Jumlah Industri Besar/Sedang Menurut Jenis dan Status Kepemilikan Modal di Provinsi Papua Barat (unit), 2014	II.271

Tabel 2.135	Jumlah Industri Besar/Sedang Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Modal di Provinsi Papua Barat (unit), 2014	II.271
Tabel 2.136	Jumlah Tenaga Kerja di Industri Besar/Sedang Menurut Jenis Industri di Provinsi Papua Barat (orang), 2014	II.272
Tabel 2.137	Jumlah Tenaga Kerja di Industri Besar/Sedang Menurut Jenis Industri di Provinsi Papua Barat (orang), 2014	II.272
Tabel 2.138	Banyaknya Desa Menurut Keberadaan dan Jenis Indsutri Kecil dan Mikro di Provinsi Papua Barat (unit), 2014	II.273
Tabel 2.139	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Per bulan Menurut Kabupaten/Kota (Rp), 2011-2015	II.278
Tabel 2.140	Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan di Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.279
Tabel 2.141	Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan di Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.279
Tabel 2.142	Produktivitas Sektor dan Produktivitas Total Daerah (Rp Juta), 2011-2015	II.280
Tabel 2.143	Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Papua Barat Menurut Subsektor, 2012-2015	II.283
Tabel 2.144	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Barat, 2011-2014	II.285
Tabel 2.145	Jumlah Penumpang dan Barang yang terangkut melalui Pelabuhan di Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.286
Tabel 2.146	Jumlah Penumpang dan Barang yang terangkut melalui Bandar Udara di Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.287
Tabel 2.147	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih, dan Sumber Air Minum Layak (%), 2015	II.289
Tabel 2.148	Persentase Penduduk yang Memiliki HP dan Mengakses Internet, 2015	II.290
Tabel 2.149	Angka Kriminalitas di Provinsi Papua Barat, 2012-2015	II.296
Tabel 2.150	Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, 2015	II.297
Tabel 2.151	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2015	II.298
Tabel 2.152	Perkembangan Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua Barat, 2011-2015	II.301

Foto: Billy, 2017

Foto: Marthin, 2017

Foto: Billy, 2017

Foto: Paiki, 2017

Tabel 2.153	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016	II.302
Tabel 3.1	Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 -2016 (Rp juta)	III.4
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012-2016	III.7
Tabel 3.3	Perkembangan Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 (Rp juta)	III.10
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012-2016	III.11
Tabel 3.5	Perkembangan Rencana dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 -2016 (Rp juta)	III.13
Tabel 3.6	Perkembangan Neraca Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012-2016	III.16
Tabel 3.7	Analisis Rasio Neraca Daerah Provinsi Papua Barat	III.20
Tabel 3.8	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016	III.26
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2012-2016	III.28
Tabel 3.10	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016	III.30
Tabel 3.11	Realisasi Pembiayaan Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016	III.31
Tabel 3.12	Surplus/Defisit Riil APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016	III.32
Tabel 3.13	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017-2022	III.34
Tabel 3.14	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017-2022	III.36
Tabel 3.15	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022	III.37
Tabel 4.1	Tabel Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat	IV.29
Tabel 4.2	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkata Pengangguran di Provinsi Papua Barat Dalam RPJMN 2015-2019 (%)	IV.41

Tabel 4.3	Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota untuk Memperkuat Pusat Pertumbuhan di Provinsi Papua Barat	IV.43
Tabel 4.4	Pokok Penting Isu Strategis Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022	IV.47
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi dan Misi Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022	V.2
Tabel 5.2	Indikator Makro Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022	V.5
Tabel 5.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran beserta Indikator, dan Target Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022	V.14
Tabel 5.4	Sinkronisasi Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025 dengan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022	V.22
Tabel 5.5	Harmonisasi Target Sasaran RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 Dengan Sasaran Pokok RPJMN Tahun 2015-2019	V.25
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Pertama	VI.6
Tabel 6.2	Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kedua	VI.16
Tabel 6.3	Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Ketiga	VI.22
Tabel 6.4	Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Keempat	VI.29
Tabel 6.5	Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kelima	VI.36
Tabel 6.6	Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Keenam	VI.42
Tabel 6.7	Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Ketujuh	VI.51
Tabel 6.8	Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kedelapan	VI.60
Tabel 6.9	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022	VI.68
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022 Provinsi Papua Barat	VII.3
Tabel 7.2	Alokasi Pendanaan Menurut Urusan Pemerintahan dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022	VII.7
Tabel 7.3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022	VII.9
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022	VIII.2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022	VIII.9

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah Provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah, salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi; (1) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Sementara itu, dokumen rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) yang merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun.

Dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang tersebut juga telah dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan mempertimbangkan RPJM Nasional serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 260 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Selanjutnya,

sesuai dengan ketentuan dalam pasal 263 ayat 3 (tiga), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Kemudian, berdasarkan waktu penetepan pelaksanaan dokumen RPJMD, pasal 264 ayat (1), RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dimana pada ayat (4) dinyatakan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

RPJMD menekankan pentingnya menterjemahkan visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, proses penyusunan RPJMD sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut;

1. **Pendekatan politik** yang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah;
2. **Pendekatan teknokratik** dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu;
3. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. **Pendekatan atas-bawah *(top down)* dan bawah-atas *(bottom up)*** dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung.

Selain itu, proses penyusunan RPJMD sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut;

1. **Pendekatan holistik** dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. **Pendekatan integratif** dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. **Pendekatan spasial** dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Sesuai dengan uraian di atas, RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Papua Barat Periode 2017-2022, yaitu **Dominggus Mandacan** dan **Mohammad Lakotani** yang dilantik pada tanggal 12 Mei 2017. Penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut akan diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 khususnya terkait dengan arah pengembangan wilayah Papua dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat 2012-2025.

Dalam konteks otonomi khusus, periode lima tahun ke depan akan memasuki tahap akhir pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua Barat pada 2021 sehingga perlu akselerasi agenda-agenda kebijakan pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Sebagaimana esensi kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan dalam rangka penghormatan hak-hak dasar bagi Orang Asli Papua (OAP) yang mencakup unsur-unsur adat, agama, dan perempuan, arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 juga akan mengedepankan perlindungan, keberpihakan, pemberdayaan, dan penghormatan bagi Orang Asli Papua (OAP). Dengan belum optimalnya ketersediaan regulasi sektoral dalam pelaksanaan otonomi khusus di

Provinsi Papua Barat, maka penyusunan regulasi yang berkaitan dengan kebijakan otonomi khusus (Perdasus dan Perdasi) akan menjadi prioritas utama dalam awal periode RPJMD Tahun 2017-2022.

Ketersediaan Perdasus dan Perdasi yang menjadi naungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan kebijakan Otonomi Khusus disertai dengan peningkatan sistem pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaannya akan mendorong percepatan tercapainya tujuan pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat. Bidang prioritas yang menjadi agenda kebijakan Otonomi Khusus mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur, dan *affirmative action* bagi OAP. Pada tahap akhir pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Provinsi Papua Barat diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya OAP serta meningkatkan pelayanan publik secara maksimal. Oleh karena itu, penetapan strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 salah satunya diarahkan untuk mencapai hal tersebut.

Pencanangan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi pada tanggal 19 Oktober 2015 tidak terlepas dari keanekaragaman hayati yang tinggi di wilayah Provinsi Papua Barat. Untuk mendukung hal tersebut, maka pembangunan daerah yang dilakukan harus berwawasan terhadap lingkungan. Pembangunan tersebut dilakukan secara optimal namun tidak merusak lingkungan sehingga kelestarian alam tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal dari kekayaan keanekaragaman hayati tersebut.

Dokumen RPJMD ini selanjutnya juga dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Proses serta tahapan penyusunan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini.

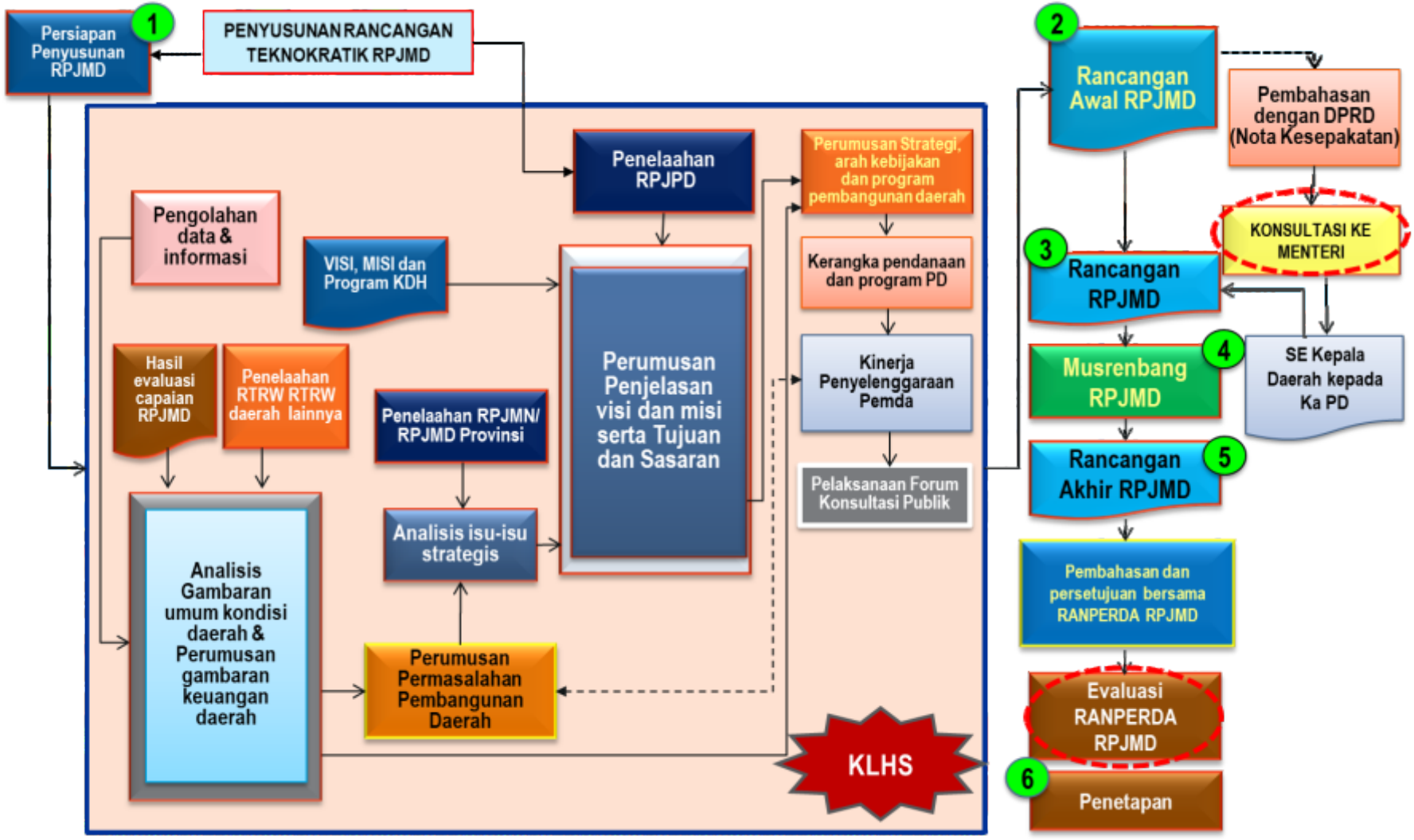

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022
Sumber: Kemendagri, 2017

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2012-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 73);

24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 – 2033;
25. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 91).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya disajikan dalam Gambar 1.2 berikut ini:

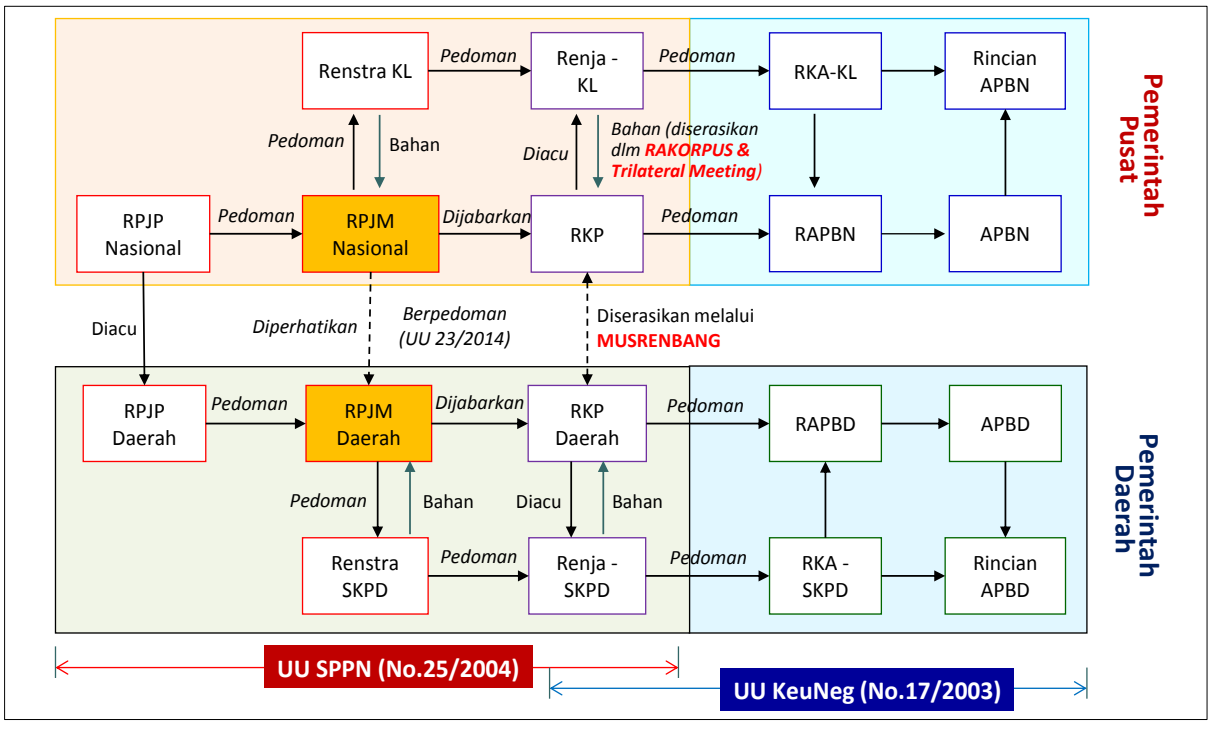

Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Sumber: Bappenas, 2017

1.3.1. Keterhubungan RPJMD dan RPJPD

Sebagai satu kesatuan perencanaan daerah yang utuh, RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 merupakan irisan sebagai salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Barat. Amanat RPJMD Periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025, adalah dengan arahan pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan Provinsi Papua Barat yang berdaya saing, yaitu Provinsi Papua Barat 2021 yang memiliki SDM dan perekonomian yang mampu beradaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal untuk meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik dengan tetap terbuka pada persaingan regional, nasional, dan global. Berikut ini adalah pentahapan agenda pembangunan daerah Provinsi Papua Barat dalam RPJPD Provinsi Papua Barat selama periode 2006-2025 dalam Gambar 1.3.

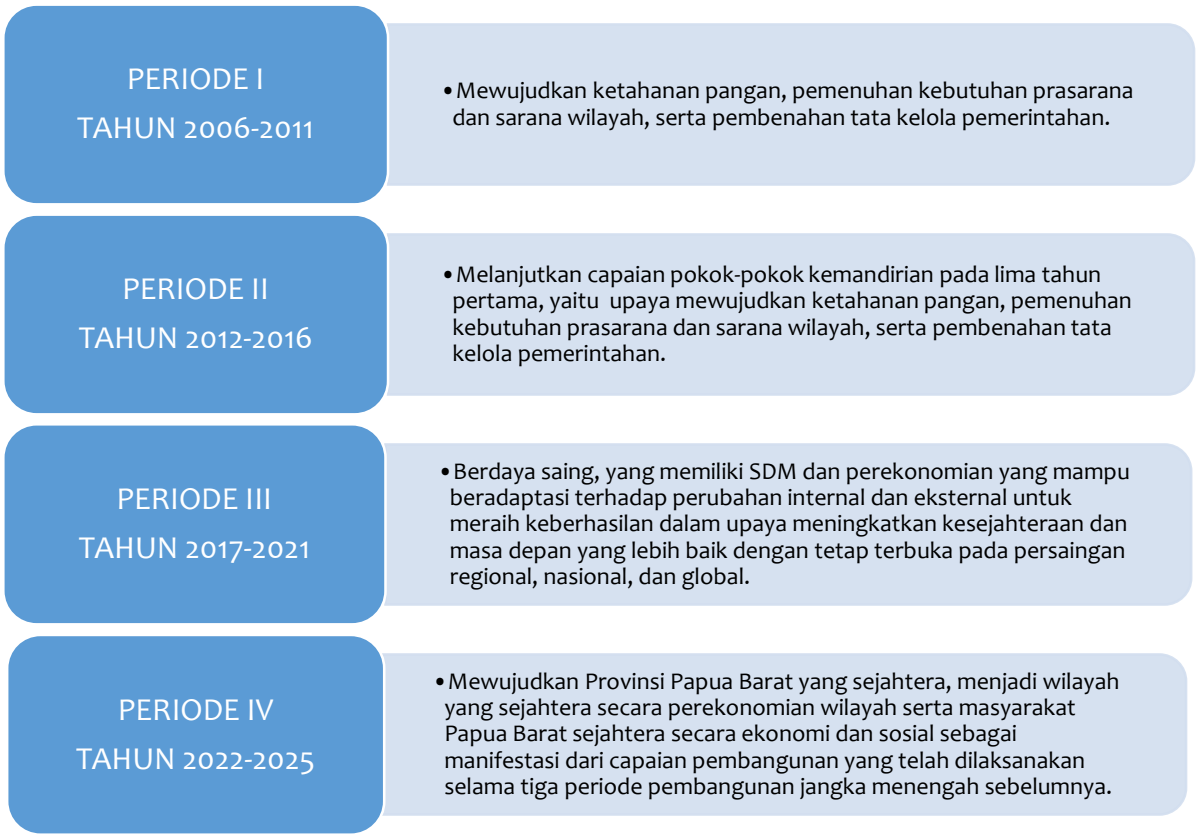

Gambar 1.3 Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025

Sumber: Perda Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025

RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 merupakan RPJMD ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat masa bakti tahun 2017-2022, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025.

1.3.2. Keterhubungan RPJMD dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019

Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 memperhatikan sembilan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan kebijakan pembangunan nasional. Prioritas pembangunan nasional 2015-2019 yang dinamai dengan NAWA CITA, antara lain:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

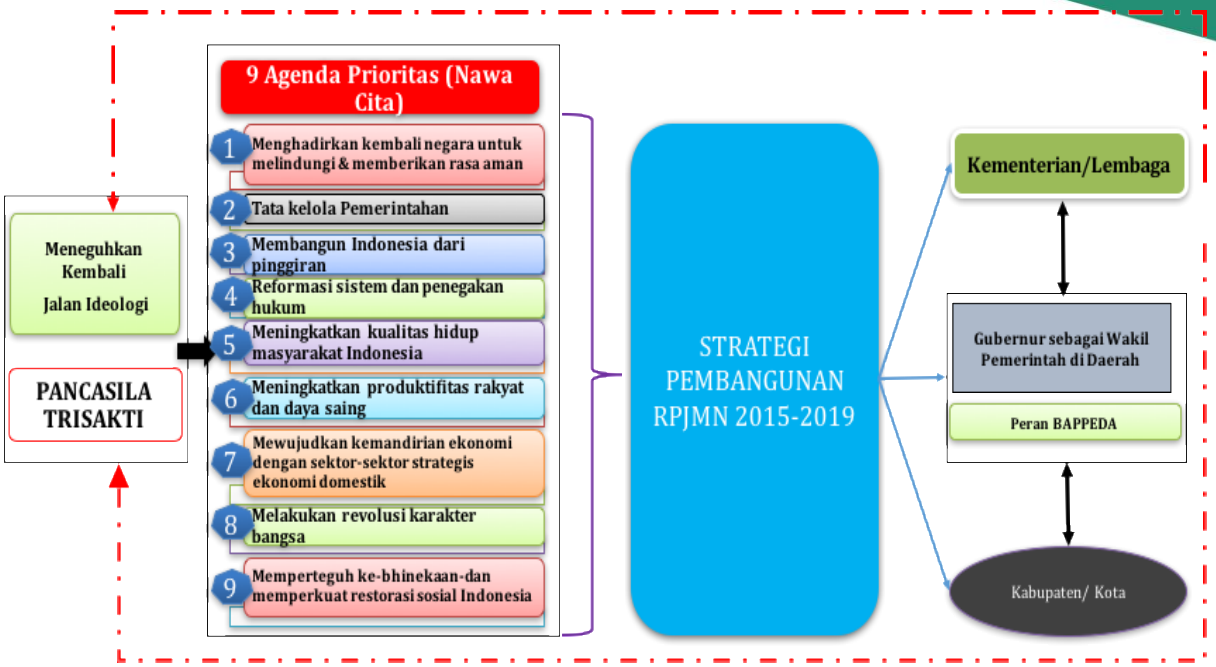

Gambar 1.4 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 dan RPJMN Tahun 2015-2019
Sumber: Bappenas, 2017

Secara khusus, keterhubungan antara RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 dengan RPJMN Tahun 2015-2019 tertuang dalam Buku III yang menjelaskan mengenai agenda pembangunan wilayah. Seperti tertuang dalam dokumen tersebut, arah pembangunan wilayah Pulau Papua adalah sebagai berikut: (a) Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan; (b) Percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan parawisata bahari; (c) Percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati; (d) Percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi dan tembaga; (e) Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon; (f) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat; serta (g) Pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung masyarakat adat, melalui percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Papua yang mandiri, produktif dan berkepribadian. Dengan penetapan arah pembangunan tersebut, arah kebijakan misi pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran

tema pengembangan wilayah Papua khususnya Provinsi Papua Barat.

1.3.3. Keterhubungan RPJMD Provinsi Papua Barat dengan RPJMD Provinsi Papua

Proses penyusunan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 juga memperhatikan RPJMD daerah sekitar yang terdekat, dalam hal ini Provinsi Papua yang merupakan wilayah yang paling berdekatan dan berada dalam satu wilayah kepulauan dengan Provinsi Papua Barat. Visi RPJMD Provinsi Papua adalah "Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera". Misi yang dituangkan berkaitan dengan Visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan Suasana Aman, Tentram dan Nyaman bagi seluruh masyarakat di Papua dalam kedaulatan NKRI;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berakhlak Mulia;
4. Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal;
5. Percepatan Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antara Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Beberapa kata kunci utama yang ada pada misi tersebut di atas adalah: keamanan; tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); peningkatan SDM; pembangunan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal; dan pembangunan infrastruktur serta konektivitas.

1.3.4. Keterhubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah/daerah di Provinsi Papua Barat. RPJMD Provinsi Papua Barat

Tahun 2017-2022 juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus.

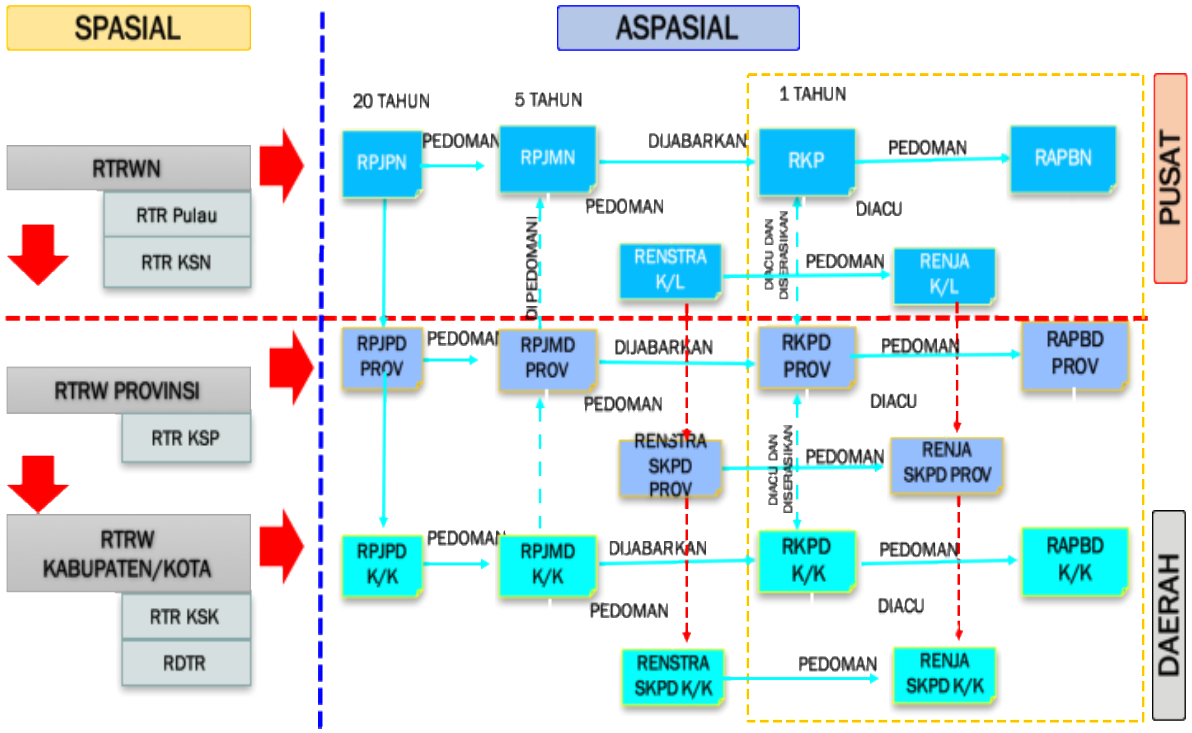

Gambar 1.5 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 dan RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033
Sumber: Kemendagri, 2017

1.3.5. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra OPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berwawasan lima tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat. Renstra OPD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan OPD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis OPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja OPD (Renja OPD) dan Rencana Kerja Anggaran OPD (RKA-OPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

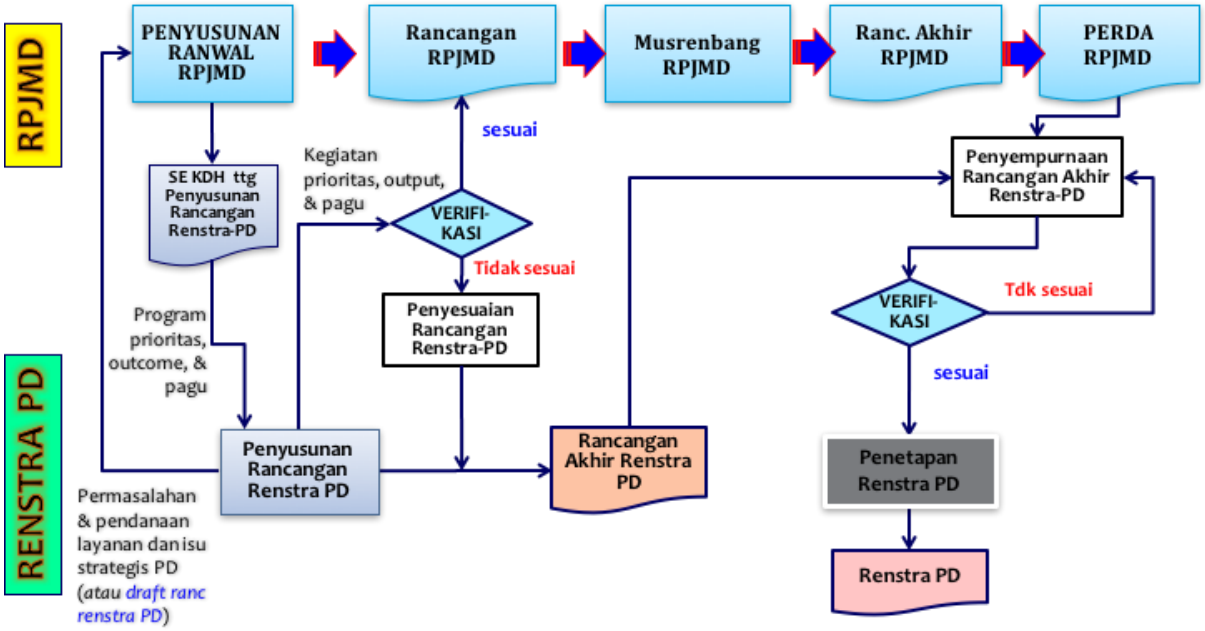

Gambar 1.6 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
Sumber: Kemendagri, 2017

1.3.6. Keterhubungan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung, distrik, kabupaten/kota hingga provinsi. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

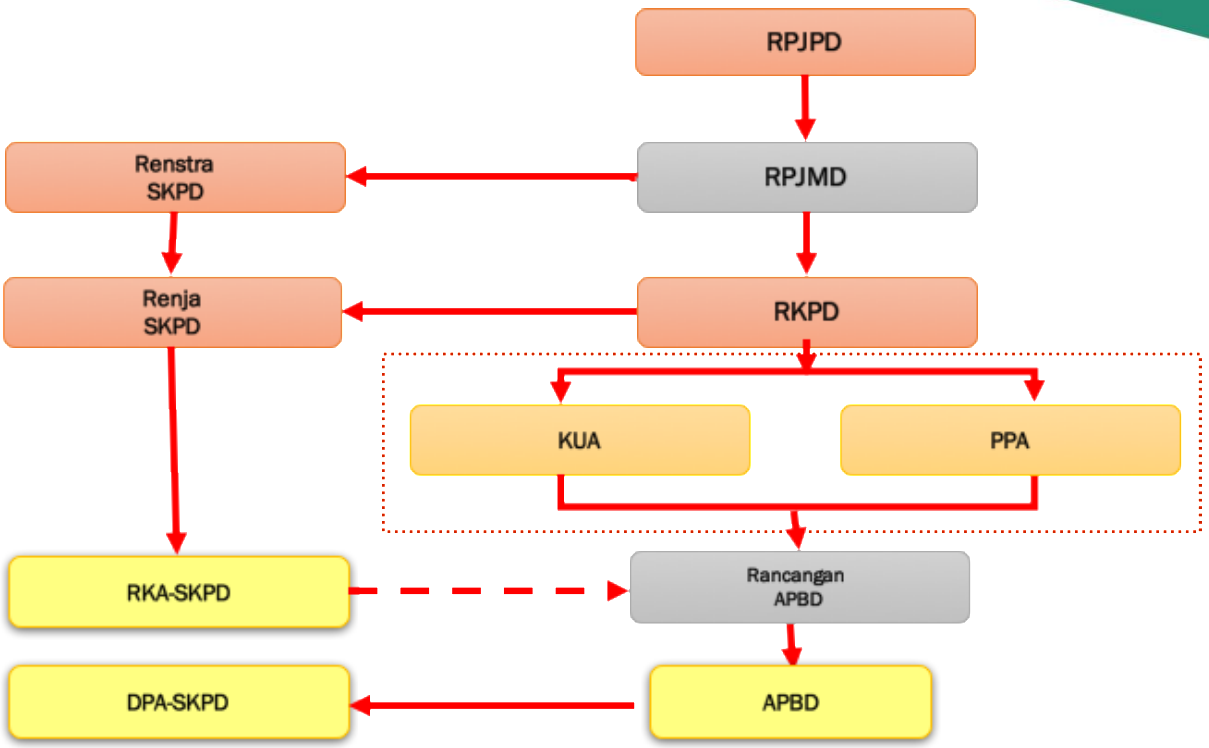

Gambar 1.7 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Sumber: Kemendagri, 2017

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun, pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Provinsi Papua Barat sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa bakti 2017-2022, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan harmonis.

1.4.2. Tujuan

Tujuan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 disusun adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah lima tahun ke depan;

2. Sebagai pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyusun Renstra OPD periode 2017-2022;
3. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan lima tahun ke depan;
4. Menterjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2017-2022, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing OPD tahun 2017-2022;
5. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2017-2022;
6. Menetapkan indikator kinerja daerah Provinsi Papua Barat sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Provinsi Papua Barat periode 2017-2022;
7. Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2017-2022;
8. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
9. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala OPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
10. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Papua Barat;
11. Menjadi pedoman DPRD Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dewan perwakilan rakyat dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut adalah sistematika penulisan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022;

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB IX Penutup

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, Provinsi Papua Barat terletak di antara 0°-4,3° Lintang Selatan dan 129,2°-135,2° Bujur Timur. Provinsi Papua Barat merupakan wilayah pemekaran Provinsi Papua yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Walaupun pemekaran Provinsi Papua Barat sempat ditangguhkan, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, pemekaran Provinsi Papua Barat kembali diaktifkan.

Sejak saat diterbitkannya Inpres tersebut, Provinsi Papua Barat secara perlahan terbentuk menjadi provinsi definitif melalui pembentukan sistem pemerintahan, walaupun payung hukumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah memiliki wilayah yang jelas, aparatur pemerintahan, anggaran, anggota DPRD, pada akhirnya Provinsi Papua Barat terbentuk menjadi provinsi secara penuh setelah dilantiknya gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 24 Juli 2006.

Selanjutnya nama Provinsi Irian Jaya Barat diubah menjadi Papua Barat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat. Pembentukan Provinsi Papua Barat sebagai daerah otonom yang dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali

pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Selain pertimbangan rentang kendali pemerintahan, hal lain yang menjadi pertimbangan penting adalah dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Mendasarkan pada SIPD Papua Barat 2017, luas wilayah daratan Provinsi Papua Barat adalah seluas 97.024,27 km^2 dengan ibukota provinsi berada di Kabupaten Manokwari. Batas wilayah Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Samudera Pasifik;
- Sebelah selatan : Laut Banda dan Provinsi Maluku;
- Sebelah timur : Provinsi Papua; dan
- Sebelah barat : Laut Seram dan Provinsi Maluku.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, pada mulanya jumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, dan Kota Sorong. Dengan adanya percepatan pembentukan Provinsi Papua Barat menjadi provinsi definitif penuh dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2006, jumlah kabupaten/kota bertambah menjadi sebanyak 9 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, dan Kota Sorong.

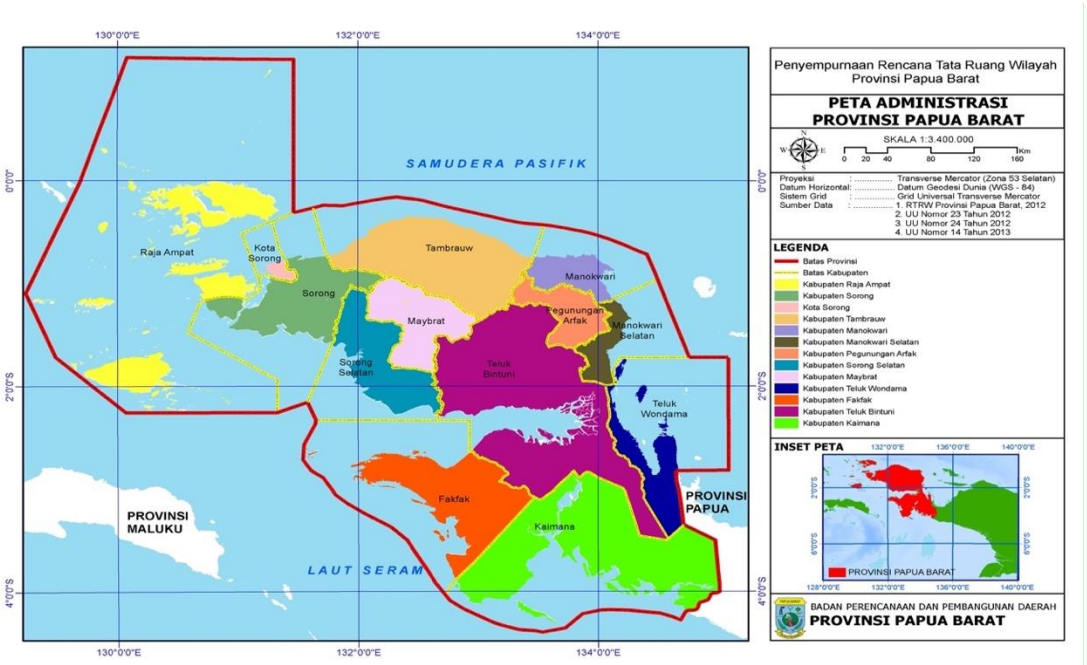

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Sejalan dengan adanya perkembangan waktu dan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, jumlah kabupaten bertambah pada tahun 2008 dengan dimekarkannya Kabupaten Tambrauw yang wilayahnya merupakan gabungan dari Kabupaten Sorong dan Manokwari. Pada tahun 2009, Kabupaten Sorong Selatan dimekarkan dengan terbentuknya Kabupaten Maybrat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat. Selanjutnya pada tahun 2012, terjadi pemekaran di Kabupaten Manokwari dengan pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak. Hingga tahun 2016, jumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat berjumlah 13 kabupaten/kota yang terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota yaitu: Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong (Gambar 2.1).

Kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Teluk Bintuni dengan luasan mencapai 20.840,83 km^2 (20,91%). Kabupaten Kaimana berada pada posisi kedua dengan luas wilayah mencapai 16.241,84 km^2 (16,30%). Pada posisi ketiga dan keempat ditempati oleh Kabupaten Fakfak dan Tambrauw dengan wilayah masing-masing seluas 11.036,48 km^2 (11,07%) dan 11.529,18 km^2 (11,57%). Sementara itu, Kota Sorong

merupakan wilayah dengan luasan terkecil di Provinsi Papua Barat yaitu seluas 656,64 km^2 (0,66%).

Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten, 2017

No.	Kabupaten/Kota	Luas (km^2)	Persentase (%)
1.	Fakfak	11,036.48	11.07
2.	Kaimana	16,241.84	16.30
3.	Teluk Wondama	3,959.53	3.97
4.	Teluk Bintuni	20,840.83	20.91
5.	Manokwari	3,186.28	3.20
6.	Sorong Selatan	6,594.31	6.62
7.	Sorong	6,544.23	6.57
8.	Raja Ampat	8,034.44	8.06
9.	Tambrauw	11,529.18	11.57
10.	Maybrat	5,461.69	5.48
11.	Manokwari Selatan	2,812.44	2.82
12.	Pegunungan Arfak	2,773.74	2.78
13.	Kota Sorong	656.64	0.66
Papua Barat		**99,671.63**	**100,00**

Sumber: SIPD Papua Barat 2017

Dari 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat, secara keseluruhan terdapat 218 distrik yang terdiri dari 1.742 kampung dan 95 kelurahan (kondisi hingga akhir tahun 2015). Wilayah yang memiliki jumlah distrik terbanyak adalah Kabupaten Teluk Bintuni, Raja Ampat, dan Maybrat dengan jumlah masing-masing sebanyak 24 distrik, sedangkan kabupaten dengan jumlah distrik terkecil adalah Kabupaten Manokwari Selatan. Dengan adanya beberapa daerah otonom baru di Provinsi Papua Barat, jumlah distrik di masa mendatang akan terus meningkat seiring dengan adanya penataan pemerintahan dan perkembangan wilayah yang menuntut akselerasi pelayanan kepada masyarakat. Pada tingkat kabupaten, pemekaran wilayah juga terlihat dengan adanya ratusan kampung persiapan di beberapa kabupaten dimana kampung tersebut nantinya akan menjadi kampung definitif. Rincian jumlah distrik, kampung dan kelurahan menurut kabupaten di Provinsi Papua Barat ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Papua Barat, 2015

No.	Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten	Distrik	Kampung/Kelurahan	
				Kampung	Kelurahan
1.	Fakfak	Fakfak	17	142	7
2.	Kaimana	Kaimana	7	84	2
3.	Teluk Wondama	Rasiey	13	75	1
4.	Teluk Bintuni	Bintuni	24	115	2
5.	Manokwari	Manokwari	9	164	9
6.	Sorong Selatan	Teminabuan	15	121	2
7.	Sorong	Aimas	30	226	26
8.	Raja Ampat	Waisai	24	117	4
9.	Tambrauw	Fef	29	216	-
10.	Maybrat	Aifat	24	259	1
11.	Manokwari Selatan	Ransiki	6	57	-
12.	Pegunungan Arfak	Ullong	10	166	-
13.	Kota Sorong	Sorong	10	-	41
Papua Barat			**218**	**1.742**	**95**

Sumber: SIPD Papua Barat 2017

Kampung berdasarkan karakteristik geografis dapat dikelompokan ke dalam beberapa kategori. Jumlah kampung yang berada di tepi laut di Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 adalah sebanyak 543 kampung, sedangkan jumlah kampung yang tidak memiliki wilayah laut adalah sebanyak 1.024 kampung. Dengan wilayah yang berupa kepulauan, Kabupaten Raja Ampat memiliki jumlah kampung terbanyak yang berada di tepi laut yaitu sebanyak 116 kampung dari total kampung yang berjumlah 121 kampung. Dengan tidak adanya wilayah laut yang dimiliki Kabupaten Maybrat dan Pegunungan Arfak, maka kedua wilayah tersebut tidak memiliki kampung yang berada di tepi laut.

Tabel 2.3 Kampung Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografi, 2014

No.	Kabupaten/Kota	Letak Geografis Kampung	
		Tepi Laut	Bukan Tepi Laut
1.	Fakfak	90	33
2.	Kaimana	59	27
3.	Teluk Wondama	60	17
4.	Teluk Bintuni	26	212
5.	Manokwari	66	94
6.	Sorong Selatan	23	98
7.	Sorong	41	100
8.	Raja Ampat	116	5
9.	Tambrauw	26	50
10.	Maybrat	-	157

No.	Kabupaten/Kota	Letak Geografis Kampung	
		Tepi Laut	Bukan Tepi Laut
11.	Manokwari Selatan	19	38
12.	Pegunungan Arfak	-	179
13.	Kota Sorong	17	14
Papua Barat		**543**	**1.024**

Sumber: SIPD Papua Barat 2017

Posisi strategis Provinsi Papua Barat di Indonesia bahkan di dunia adalah posisinya yang penting dalam konteks kekayaan keanekaragaman hayati laut dunia. Seperti telah diketahui, wilayah Provinsi Papua Barat khususnya Kabupaten Raja Ampat terletak di pusat segitiga karang dunia (*coral triangle*) yang merupakan wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Provinsi Papua Barat memiliki berbagai jenis kekayaan laut baik spesies ikan, moluska, dan hewan karang. Dengan kekayaan sumberdaya laut yang tinggi, Provinsi Papua Barat memiliki berbagai jenis ekosistem yang mendukung tumbuh hidupnya berbagai biota laut diantaranya ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Selain itu, Provinsi Papua Barat juga memiliki batas wilayah langsung dengan negara di wilayah Pasifik sehingga penting menjadi penanda kedaulatan Indonesia baik dalam aspek pertahanan maupun pemanfaatan sumberdaya kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam era pemerintahan dibawah Presiden Joko Widodo, posisi Papua Barat khususnya Kota Sorong menjadi sangat strategis karena merupakan gerbang tol laut di wilayah timur Indonesia sebagaimana tertuang dalam program strategis nasional.

Secara umum, kondisi wilayah Provinsi Papua Barat meliputi wilayah pedalaman/terpencil (pegunungan), pesisir, dan kepulauan. Wilayah pedalaman/terpencil (pegunungan) di Provinsi Papua Barat diantaranya berada di Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Teluk Bintuni, dan Tambrauw, sedangkan wilayah yang memiliki kawasan pesisir adalah Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, Manokwari, Tambrauw, Raja Ampat, dan Kota Sorong. Sementara itu, wilayah dengan kondisi berupa kepulauan di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Raja Ampat.

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Provinsi Papua Barat sangat bervariasi, dari wilayah dataran rendah hingga pegunungan. Sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat termasuk dalam wilayah

perbukitan (kelas ketinggian 100-1.000 m) dengan luas mencapai 47.741 km² (49,21%). Luas wilayah yang termasuk dalam daerah dataran rendah (0-100 m) adalah seluas 38.560 km² (39,74%), sedangkan wilayah yang termasuk dalam daerah pegunungan (>1.000 m) adalah seluas (11,05%). Berdasarkan hasil interpretasi *Shutle Radar Topografi Mission - National Aeronautics and Space Administration* (NASA) pada tahun 2011 seperti dikutip dari RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033, Provinsi Papua Barat terletak pada ketinggian 0-2.940 mdpl.

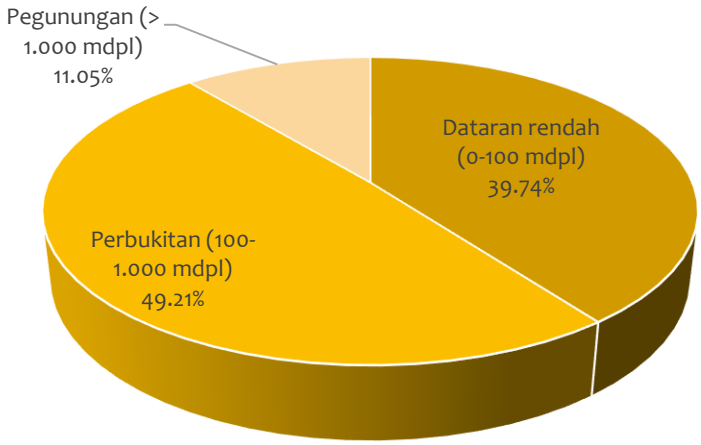

Gambar 2.2 Persentase Luas Wilayah Menurut Kondisi Topografi, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Jika dirinci menurut kabupaten/kota, terdapat dua wilayah di Provinsi Papua Barat yang tidak memiliki wilayah pantai yaitu Kabupaten Maybrat dan Pegunungan Arfak. Berdasarkan Tabel 2.4, diketahui bahwa wilayah tertinggi di Provinsi Papua Barat berada di Kabupaten Manokwari dengan ketinggian 2.940 mdpl. Wilayah dengan dataran rendah yang cukup luas tersebar di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan. Daerah perbukitan pada umumnya tersebar di Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Maybrat. Sedangkan Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Tambrauw merupakan kawasan yang didominasi oleh pegunungan. Secara rinci, ketinggian masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat ditampilkan pada Tabel 2.4.

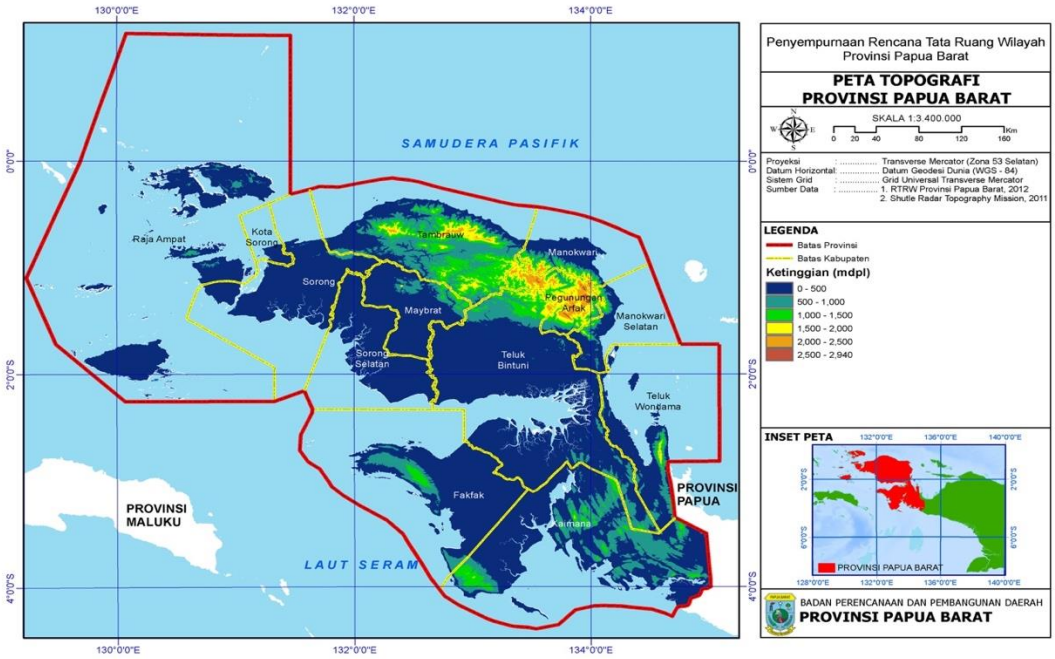

Gambar 2.3 Peta Topografi Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Tabel 2.4 Ketinggian Wilayah Menurut Kabupaten/Kota, 2017

No.	Kabupaten/Kota	Ketinggian (mdpl)
1.	Fakfak	0 - 1.444
2.	Kaimana	0 - 1.663
3.	Teluk Wondama	0 - 2.172
4.	Teluk Bintuni	0 - 2.389
5.	Manokwari	0 - 2.940
6.	Sorong Selatan	0 - 540
7.	Sorong	0 - 921
8.	Raja Ampat	0 - 1.173
9.	Tambrauw	0 - 2.483
10.	Maybrat	5 - 1.772
11.	Manokwari Selatan	0 - 2.682
12.	Pegunungan Arfak	135 - 2.882
13.	Kota Sorong	0 - 439

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Berdasarkan kondisi topografi kampung, sebagian kampung di Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 berada di wilayah dataran dengan jumlah sebanyak 971 kampung. Sementara itu, jumlah kampung yang berada pada wilayah lembah adalah sebanyak 155 kampung, sedangkan kampung yang berada di lereng/puncak berjumlah 441 kampung.

Tabel 2.5 Banyaknya Kampung Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Topografi, 2014

No.	Kabupaten/Kota	Kondisi Topografi		
		Lereng/ Puncak	Lembah	Dataran
1.	Fakfak	82	4	37
2.	Kaimana	29	15	42
3.	Teluk Wondama	67	7	3
4.	Teluk Bintuni	37	5	196
5.	Manokwari	18	3	139
6.	Sorong Selatan	10	13	98
7.	Sorong	14	21	106
8.	Raja Ampat	-	1	120
9.	Tambrauw	15	19	42
10.	Maybrat	16	39	102
11.	Manokwari Selatan	5	12	40
12.	Pegunungan Arfak	142	16	21
13.	Kota Sorong	6	-	25
Papua Barat		**441**	**155**	**971**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Ditinjau dari segi kelerengan, sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat memiliki kelas lereng >40% (bergunung curam dan bergunung sangat curam). Kondisi tersebut menjadi kendala utama bagi pemanfaatan lahan baik untuk pengembangan sarana dan prasarana fisik, sistem transportasi darat maupun bagi pengembangan budidaya pertanian terutama untuk tanaman pangan. Sehingga dominasi pemanfaatan lahan diarahkan pada hutan konservasi di samping untuk mencegah terjadinya bahaya erosi dan longsor. Luas wilayah dengan kelerengan antara 40-60% (bergunung curam) seluas 31.245 km^2 (32,20%) dan kelerengan >60% (bergunung sangat curam) seluas 25.566 km^2 (26,35%). Sementara itu, wilayah yang memiliki kelerengan <3% (datar) adalah seluas 20.686 km^2 (21,32%).

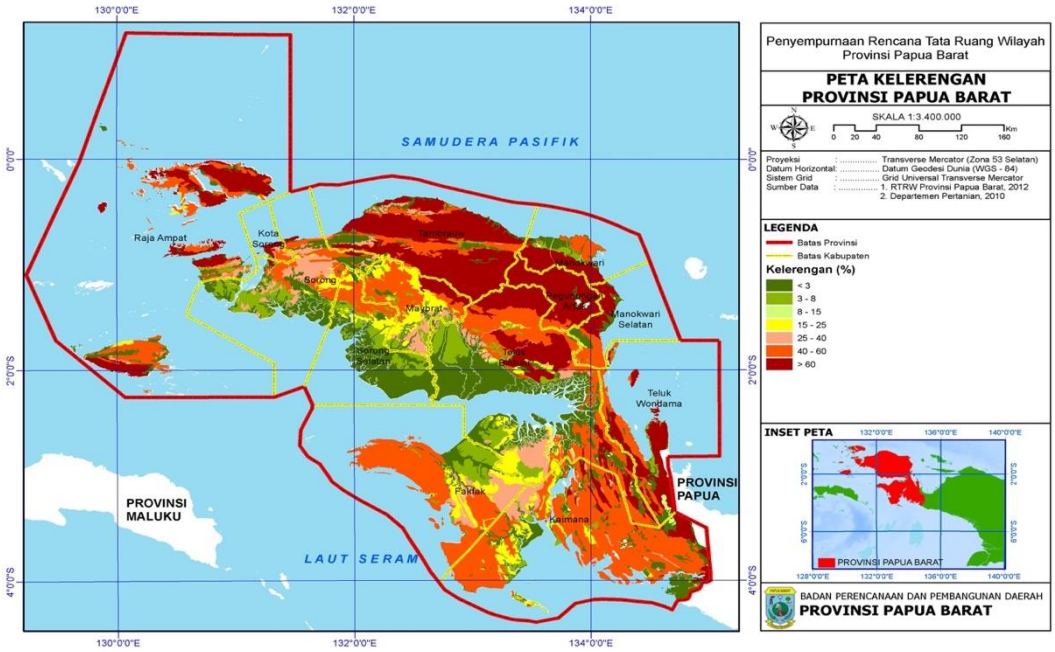

Gambar 2.4 Peta Kelerengan Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Tabel 2.6 Luas Wilayah Menurut Kondisi Kelerengan, 2017

Kelas Lereng (%)	Deskripsi	Luas (km²)
< 3	Datar	20.686,00
3 - 8	Bergelombang/agak landai	7.366,00
8 - 15	Bergelombang/landai	268,00
15 - 25	Berbukit	5.611,00
25 - 40	Bergunung	6.281,00
40 - 60	Bergunung curam	31.245,00
> 60	Bergunung sangat curam	25.566,00

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Kondisi geologi Pulau Papua pada dasarnya memiliki kesamaan dengan kondisi geologi umum yang dijumpai di Indonesia bagian timur. Daerah ini merupakan daerah interaksi antara dua lempeng besar yaitu Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik. Daratan Papua New Guinea dan Pegunungan Central Range, secara umum diasumsikan sebagai lokasi tipe dari busur kepulauan oseanik aktif–tumbukan kontinen (Dewey dan Bird, 1970). Pegunungan Central Range merupakan sabuk yang memanjang sampai 1.300 km, lebar 150 km dengan topografi yang kasar dan sejumlah puncak setinggi lebih dari 3.000 m. Sebagian besar daerah ini adalah lapisan batuan berumur Kenozoikum dan

Mesozoikum yang tersesarkan dan terlipat, yang diendapkan pada tepian kontinen aktif Australia.

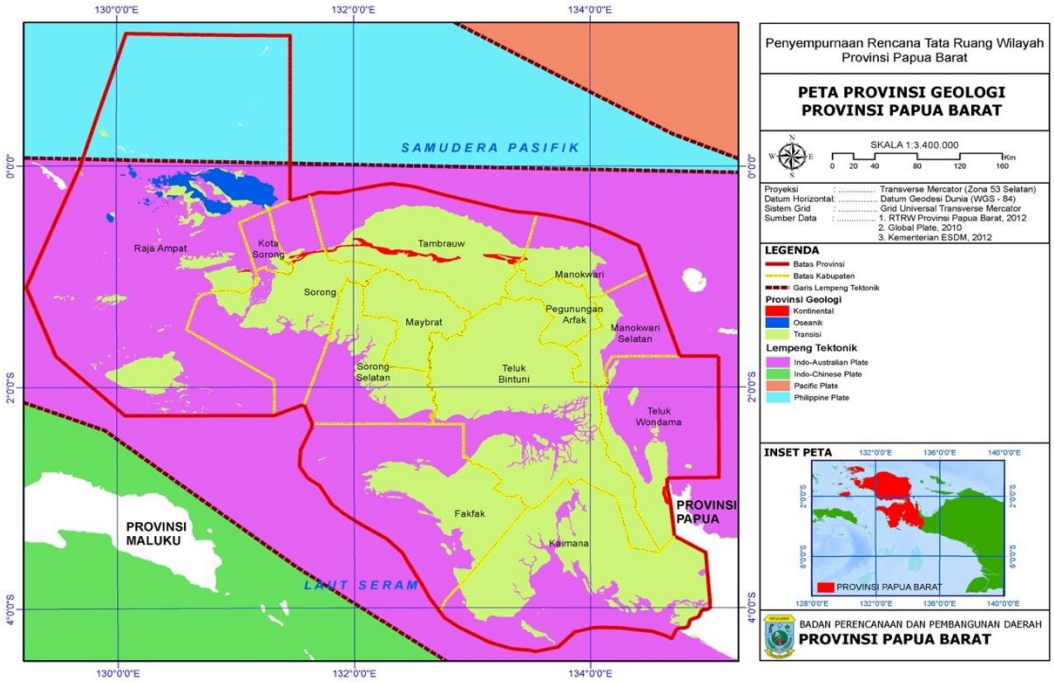

Gambar 2.5 Peta Provinsi Geologi Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Evolusi tektonik Pulau Papua menunjukkan bahwa geologi Pulau Papua sangat kompleks karena melibatkan interaksi antara dua lempeng tektonik, yaitu lempeng Australia dan Lempeng Pasifik. Menurut Sapiie (2000), pada umumnya geologi Pulau Papua dapat dibagi ke dalam tiga provinsi geologi besar, yaitu Provinsi Kontinental, Oseanik, dan Transisi. Setiap provinsi geologi memiliki karakteristiknya sendiri dalam sejarah stratigrafik, magmatik dan tektonik. Provinsi Kontinental terdiri atas sedimen yang terpisah dari kraton Australia. Provinsi Oseanik terdiri atas batuan Ofiolit (*ophiolite rock*) dan kompleks volkanik busur-kepulauan (*island-arc volcanics complex*) sebagai bagian dari lempeng Pasifik. Provinsi Transisi adalah suatu zone yang terdiri atas deformasi tinggi dan batuan metamorfik regional sebagai produk dari interaksi antara kedua lempeng.

Menurut Dow *et al*. (2005), ciri dominan dari perkembangan geologi Papua merupakan dikotomi antara sejarah tektonik dari batuan mantap kraton Australia dan lempeng Pasifik di satu sisi, dan periode tektonik intens dari zona deformasi di sisi lainnya (*New Guinea Mobile Belt*). Dari paparan di sepanjang tepi utara dan dari eksplorasi

permukaan bawah (*sub-surface*) di sebelah selatan, serta pencatatan lengkap sejarah geologi hingga saat ini menunjukkan, bahwa batuan dari kraton Australia pada sebagian besar wilayah ini dicirikan oleh sedimentasi palung (*shelf sedimentation*). Hanya sebagian kecil yang dipengaruhi oleh proses tektonik dari zaman Paleozoik awal hingga Tersier Akhir. Batuan lempeng Pasifik yang terpaparkan di Pulau Papua berumur lebih muda. Terlepas dari batuan mantel sesar naik yang kemungkinan berumur Mesozoik dan beberapa kerak samudera Jurasik, lempeng Pasifik ini terdiri atas volkanik busur-kepulauan dan sub-ordinat kerak samudera berumur Palaeogen. Batuan lempeng Pasifik pada umumnya letak-datar terpatah hanya oleh beberapa patahan.

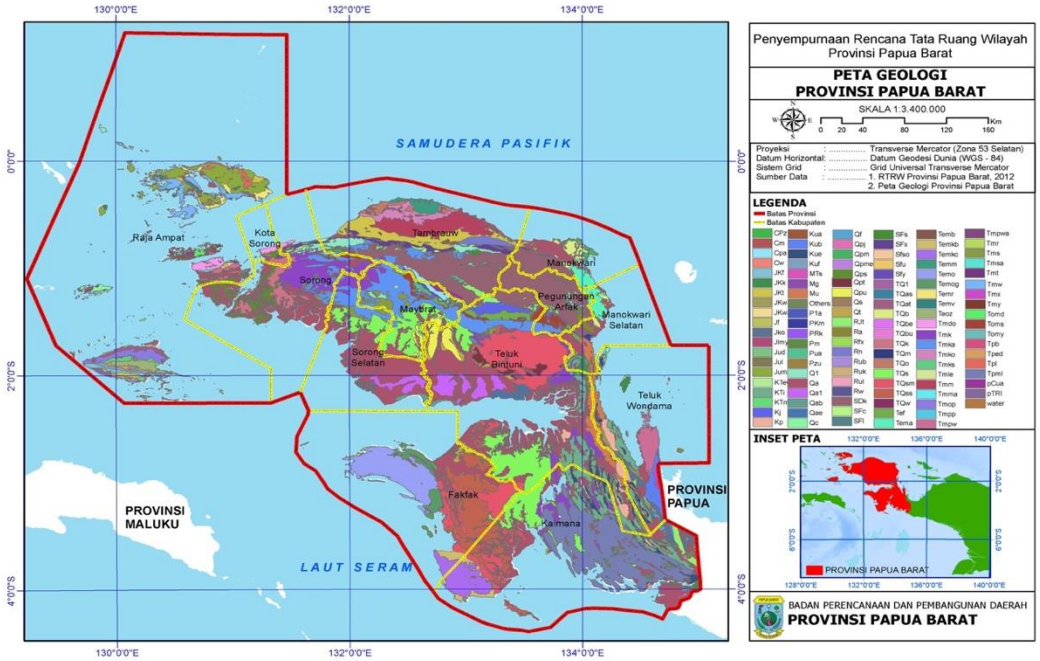

Gambar 2.6 Peta Geologi Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Zona deformasi yang berada di sebelah Timur adalah bagian dari *New Guinea Mobile Belt* (Sabuk Mobil New Guinea) dan merupakan campuran dari batuan kraton Australia dan lempeng Pasifik. Walaupun pencatatannya terpisah-pisah, terdapat bukti bahwa batuannya berasal dari tektonik utama pada episode Paleozoik Pertengahan dan Oligosen maupun episode beku dalam Paleozoik Pertengahan, Triasik, Kretasius, dan Miosen Pertengahan. Akan tetapi, sebaran paling luas dari aktivitas tektonik dan volkanik dimulai pada Miosen Akhir dan berlanjut hingga sekarang; ini disebut *Melanesian Orogeny* (Dow and Sukamto, 1984).

Wilayah Provinsi Papua Barat sangat berpotensi terhadap gempa tektonik dan kemungkinan diikuti oleh gelombang tsunami. Terdapat sejumlah lipatan dan sesar naik sebagai akibat dari interaksi (tubrukan) antara kedua lempeng tektonik, seperti Sesar Sorong (SFZ), Sesar Ransiki (RFZ), Sesar Lungguru (LFZ) dan Sesar Tarera-Aiduna (TAFZ). Kenyataan menunjukkan pula, bahwa hampir setiap bulan terjadi beberapa kali gempa di Provinsi Papua Barat dan sekitarnya. Pada tahun 2014 di Provinsi Papua Barat dan sekitarnya telah terjadi gempa sebanyak 239 kali dengan kejadian gempa terbanyak terjadi pada bulan Maret yaitu 45 kejadian. Kabupaten Tambrauw mengalami kejadian gempa terbanyak sepanjang tahun 2014 dibanding kabupaten lainnya, hal ini disebabkan Kabupaten Tambrauw dilalui oleh garis patahan (sesar). Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Wondama merupakan wilayah yang tidak mengalami gempa sepanjang tahun 2014.

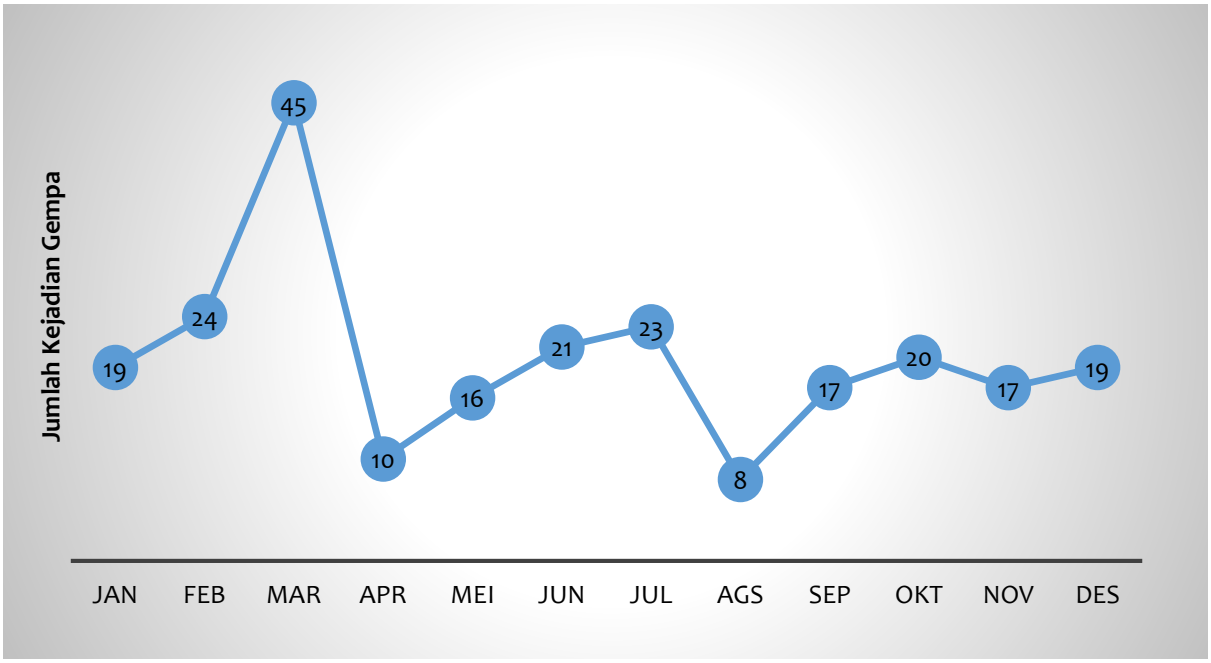

Gambar 2.7 Jumlah Kejadian Gempa di Provinsi Papua Barat, 2014
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

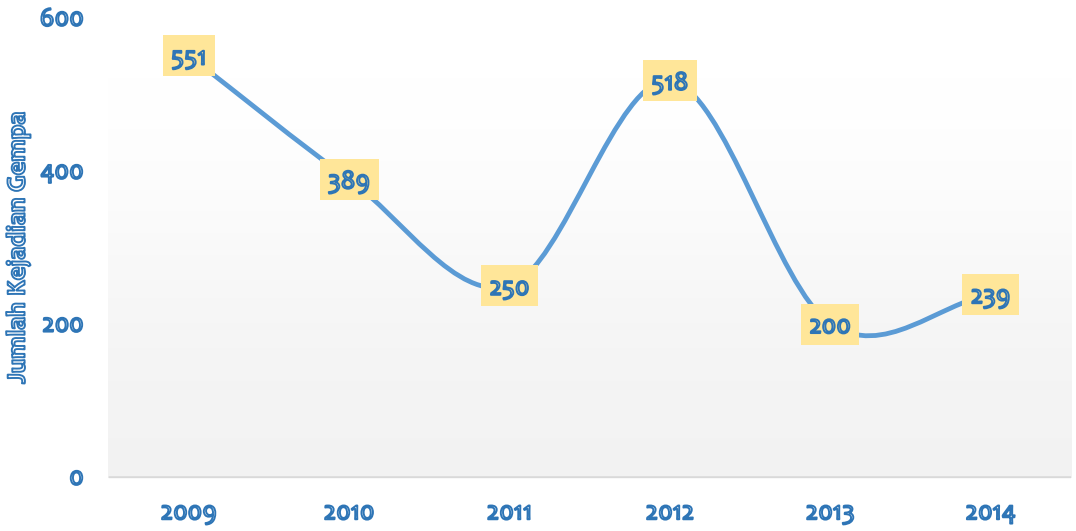

Gambar 2.8 Jumlah Kejadian Gempa di Provinsi Papua Barat, 2009-2014
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Selama periode 2009-2014, jumlah kejadian gempa tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebanyak 551 kejadian dan kejadian terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 200 kejadian. Pada umumnya kejadian gempa tertinggi terjadi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Agustus. Kabupaten Tambrauw merupakan wilayah yang mengalami kejadian gempa terbanyak sepanjang tahun 2009-2014 dibanding kabupaten lainnya. Hal ini disebabkan Kabupaten Tambrauw dilalui oleh garis patahan (sesar). Beberapa kabupaten yang mengalami kejadian gempa dengan frekuensi tinggi antara lain Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat. Sementara itu, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Sorong Selatan mengalami kejadian gempa sangat sedikit pada periode tersebut.

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Provinsi Papua Barat memiliki banyak sungai yang terdiri dari sungai-sungai kecil dan besar. Sungai-sungai besar tersebut merupakan induk dari beberapa sungai kecil. Kapasitas air di sungai-sungai besar di Provinsi Papua Barat relatif terjaga sehingga tidak mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Secara umum, apabila ditinjau dari kondisi fisik, sungai yang terdapat di Provinsi Papua Barat masih menunjukkan kondisi fisik air sungai yang alami. Kondisi ini sangat ditunjang dengan adanya vegetasi yang tumbuh di

sepanjang aliran sungai sebagai daerah tangkapan air hujan. Tinjauan terhadap sumberdaya air sangat urgen sifatnya dilakukan guna memahami potensi, bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya air. Keberadaan sungai yang wilayah alirannya (DAS) di lebih dari satu wilayah administratif menjadikan sungai harus diatur dengan sistem yang spesifik. Wilayah Provinsi Papua Barat dilewati beberapa sungai besar yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten/kota.

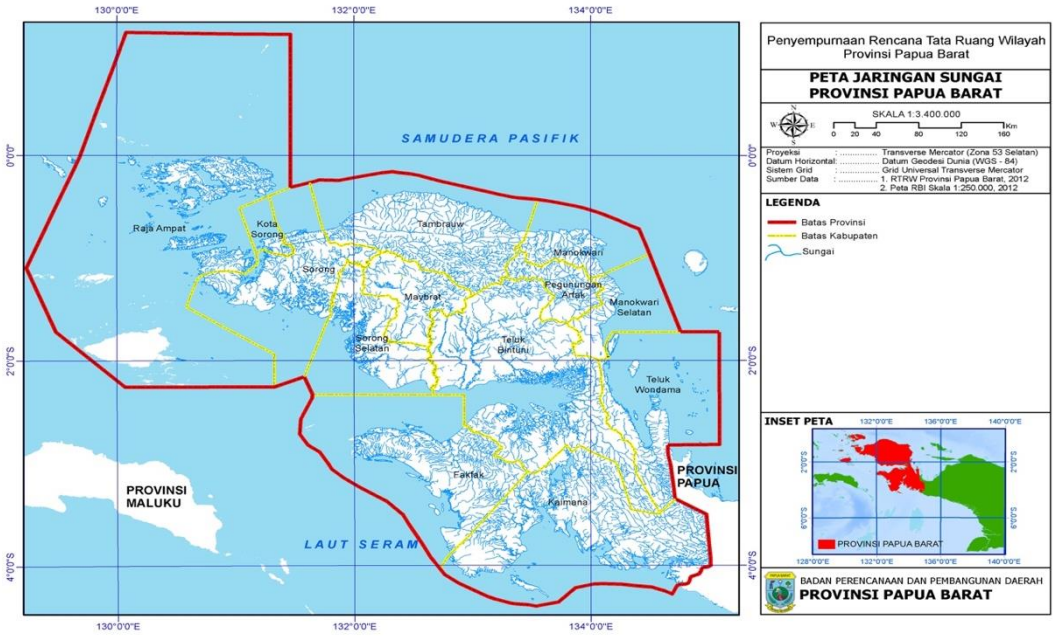

Gambar 2.9 Peta Jaringan Sungai di Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Di Provinsi Papua Barat terdapat beberapa sungai yang membentuk beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebagian besar DAS yang terbentuk adalah pada kabupaten-kabupaten di Wilayah Pengembangan Sorong. Sungai-sungai yang termasuk dalam kategori panjang adalah Sungai Muturi (428 km), Sungai Kamundan (425 km), Sungai Beraur (360 km), dan Sungai Warsamsan (320 km), sedangkan sungai-sungai yang termasuk kategori terlebar adalah Sungai Kaibus (80-2.700 m), Sungai Minika (40-2.200 m), Sungai Karabra (40-1300 m), Sungai Seramuk (45-1250 m), dan Sungai Kamundan (140-1.200 m). Beberapa sungai yang memiliki kecepatan arus paling deras antara lain adalah Sungai Seramuk (3,06 km/jam), Sungai Kaibus (3,06 km/jam), Sungai Beraur (2,95 km/jam), Sungai Aifat (2,88 km/jam), dan Sungai Karabra (2,88 km/jam). Sungai-sungai tersebut terletak pada Wilayah Pengembangan Sorong.

Tabel 2.7 Pembagian Satuan Wilayah Sungai (DAS) di Papua Barat, 2017

No.	DAS	Luas (Km^2)	Wilayah Administrasi	Wilayah Sungai
1.	Adi	155,18	Kaimana	Omba
2.	Andai	257,65	Tambrauw, Manokwari	Kamundan – Sebyar
3.	Angrameos	21,43	Teluk Wondama	Omba
4.	Animenru	69,49	Sorong Selatan	Kamundan – Sebyar
5.	Armasa	2.756,20	Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana	Kamundan - Sebyar
6.	Arui	232,35	Manokwari	Kamundan - Sebyar
7.	Arupi	114,00	Tambrauw	Kamundan - Sebyar
8.	Batangpele	13,57	Raja Ampat	Kamundan - Sebyar
9.	Batanta	451,19	Raja Ampat	Kamundan - Sebyar
10.	Baue	173,75	Teluk Wondama	Omba
11.	Bedidi	2.569,20	Fakfak	Omba
12.	Beraur	1.386,17	Kota Sorong, Sorong	Kamundan - Sebyar
13.	Bomberai	1.668,32	Teluk Bintuni, Kaimana, Fakfak	Omba
14.	Deer	147,25	Raja Ampat	Kamundan - Sebyar
15.	Dramai	71,53	Kaimana	Omba
16.	Fakfak	1.173,83	Fakfak	Omba
17.	Gag	60,96	Raja Ampat	Kamundan - Sebyar
18.	Gajah Besar	120,79	Sorong, Tambrauw	Kamundan - Sebyar
19.	Gaman	192,19	Raja Ampat	Kamundan - Sebyar
20.	Jakati	893,53	Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Kamundan - Sebyar
21.	Kabare	411,20	Raja Ampat	Kamundan - Sebyar
22.	Kabuai	0,03	Teluk Wondama	Omba
23.	Kaibus	580,15	Maybrat, Sorong Selatan	Kamundan - Sebyar
24.	Kais	2.934,84	Maybrat, Sorong Selatan	Kamundan - Sebyar
25.	Kaitero	944,79	Teluk Bintuni, Kaimana	Omba, Kamundan - Sebyar
26.	Kajuni	932,70	Fakfak	Omba
27.	Kamrau	5.021,88	Teluk Bintuni, Kaimana, Fakfak	Omba, Kamundan - Sebyar
28.	Kamundan	5.865,79	Maybrat, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Tambrauw	Kamundan - Sebyar
29.	Karabra	4.393,32	Maybrat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw	Kamundan - Sebyar
30.	Karas	46,76	Fakfak	Omba
31.	Karawatu	1,31	Kaimana	Omba
32.	Karufa	1.328,42	Kaimana	Omba
33.	Kasi	979,74	Pegunungan Arfak, Tambrauw, Manokwari	Kamundan - Sebyar
34.	Kasuari	1.662,54	Teluk Bintuni, Fakfak	Omba, Kamundan - Sebyar
35.	Kawe	45,69	Raja Ampat	Kamundan - Sebyar
36.	Kayawat	169,41	Raja Ampat	Kamundan - Sebyar
37.	Kayumerah	24,28	Kaimana	Omba
38.	Klabetur	89,67	Sorong	Kamundan - Sebyar
39.	Kladjari	200,22	Sorong	Kamundan - Sebyar
40.	Klasegun	325,06	Sorong	Kamundan - Sebyar
41.	Klasop	1.024,24	Sorong	Kamundan - Sebyar

No.	DAS	Luas (Km²)	Wilayah Administrasi	Wilayah Sungai
42.	Kuwoni	0,02	Teluk Wondama	Omba
43.	Kwoor	1.460,59	Tambrauw	Kamundan - Sebyar
44.	Laenutum	2.054,42	Kaimana	Omba
45.	Lengguru	2.515,37	Teluk Bintuni, Kaimana	Omba
46.	Magote	713,25	Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
47.	Mandi	353,67	Tambrauw	Kamundan - Sebyar
48.	Manggeni	212,08	Tambrauw	Kamundan - Sebyar
49.	Mangoapi	373,61	Pegunungan Arfak, Manokwari	Kamundan - Sebyar
50.	Maniai	17,36	Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
51.	Maon	401,45	Tambrauw	Kamundan - Sebyar
52.	Mar	110,50	Tambrauw	Kamundan - Sebyar
53.	Maralol	199,42	Raja Ampat, Sorong	Kamundan - Sebyar
54.	Maransabadi	5,19	Teluk Wondama	Omba
55.	Mega	352,50	Sorong, Tambrauw	Kamundan - Sebyar
56.	Metamani	760,72	Sorong Selatan	Kamundan - Sebyar
57.	Mioswaar	109,40	Teluk Wondama	Kamundan - Sebyar
58.	Misool	2.090,19	Raja Ampat	Kamundan - Sebyar
59.	Moari	125,49	Manokwari Selatan	Kamundan - Sebyar
60.	Momi	316,26	Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak	Kamundan - Sebyar
61.	Muturi	2167,77	Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
62.	Namatote	38,84	Kaimana	Omba
63.	Nuni	230,62	Manokwari	Kamundan - Sebyar
64.	Nusawammer	827,60	Manokwari Selatan, Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
65.	Nusawulan	1.618,25	Kaimana, Fakfak	Omba
66.	Ogar	18,22	Fakfak	Omba
67.	Omba	4.238,39	Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana	Omba
68.	Otaweri	794,38	Teluk Bintuni, Fakfak	Omba, Kamundan - Sebyar
69.	Pambemuk	7,25	Raja Ampat	Kamundan - Sebyar
70.	Pami	216,47	Manokwari	Kamundan - Sebyar
71.	Panjang	12,42	Fakfak	Omba
72.	Prafi	675,58	Pegunungan Arfak, Manokwari	Kamundan - Sebyar
73.	Ransiki	427,70	Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Manokwari	Kamundan - Sebyar
74.	Roon	54,79	Teluk Wondama	Omba
75.	Rorebo	0,04	Teluk Wondama	Omba
76.	Rouw	0,94	Teluk Wondama	Omba
77.	Rumberpon	100,37	Teluk Wondama	Kamundan - Sebyar
78.	Sajem	151,15	Sorong Selatan	Kamundan - Sebyar
79.	Salakula	12,73	Kaimana	Omba
80.	Salawati	1.143,22	Raja Ampat, Sorong	Kamundan - Sebyar
81.	Sausapor	166,10	Tambrauw	Kamundan - Sebyar
82.	Sebyar	6.487,81	Pegunungan Arfak, Maybrat, Teluk Bintuni, Tambrauw	Kamundan - Sebyar
83.	Sekak	733,65	Maybrat, Sorong Selatan	Kamundan - Sebyar
84.	Seremuk	578,30	Sorong, Sorong Selatan	Kamundan - Sebyar

No.	DAS	Luas (Km²)	Wilayah Administrasi	Wilayah Sungai
85.	Sianiri Kecil	3,81	Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
86.	Sigaroi	355,50	Sorong Selatan	Kamundan - Sebyar
87.	Sobiei	481,21	Teluk Wondama	Omba
88.	Sorong	623,40	Kota Sorong, Sorong	Kamundan - Sebyar
89.	Tarof	683,49	Sorong Selatan	Kamundan - Sebyar
90.	Urat	5,39	Fakfak	Omba
91.	Uruai	3.080,84	Kaimana, Fakfak	Omba
92.	Wagura	814,34	Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
93.	Waigeo	2.026,12	Raja Ampat	Kamundan - Sebyar
94.	Waijan	322,04	Raja Ampat	Kamundan - Sebyar
95.	Wakre	68,44	Raja Ampat	Kamundan - Sebyar
96.	Warbiadi	93,44	Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak	Kamundan - Sebyar
97.	Waren	608,86	Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Kamundan - Sebyar
98.	Wariagar	3.873,27	Pegunungan Arfak, Maybrat, Teluk Bintuni, Tambrauw	Kamundan - Sebyar
99.	Waribari	194,92	Raja Ampat	Kamundan - Sebyar
100.	Warjori	1.634,55	Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Manokwari	Kamundan - Sebyar
101.	Warkuani	69,46	Manokwari Selatan	Kamundan - Sebyar
102.	Waromge	1.035,92	Maybrat, Sorong Selatan	Kamundan - Sebyar
103.	Warsamson	1.595,11	Kota Sorong, Sorong, Tambrauw	Kamundan - Sebyar
104.	Wasian	3.922,79	Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
105.	Wassawui	499,50	Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Manokwari	Kamundan - Sebyar
106.	Wekareng	124,68	Tambrauw	Kamundan - Sebyar
107.	Wepei	168,82	Tambrauw	Kamundan - Sebyar
108.	Wesan	205,86	Tambrauw	Kamundan - Sebyar
109.	Wesauni	284,61	Tambrauw	Kamundan - Sebyar
110.	Windesi	385,51	Teluk Wondama	Kamundan - Sebyar
111.	Wondiboy	247,03	Teluk Wondama	Omba
112.	Wosimi	1.887,61	Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana	Omba
113.	Wowey	128,87	Tambrauw	Kamundan - Sebyar
114.	Woworoma	65,43	Teluk Wondama, Kaimana	Omba
115.	Yensner	107,13	Raja Ampat	Kamundan - Sebyar

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

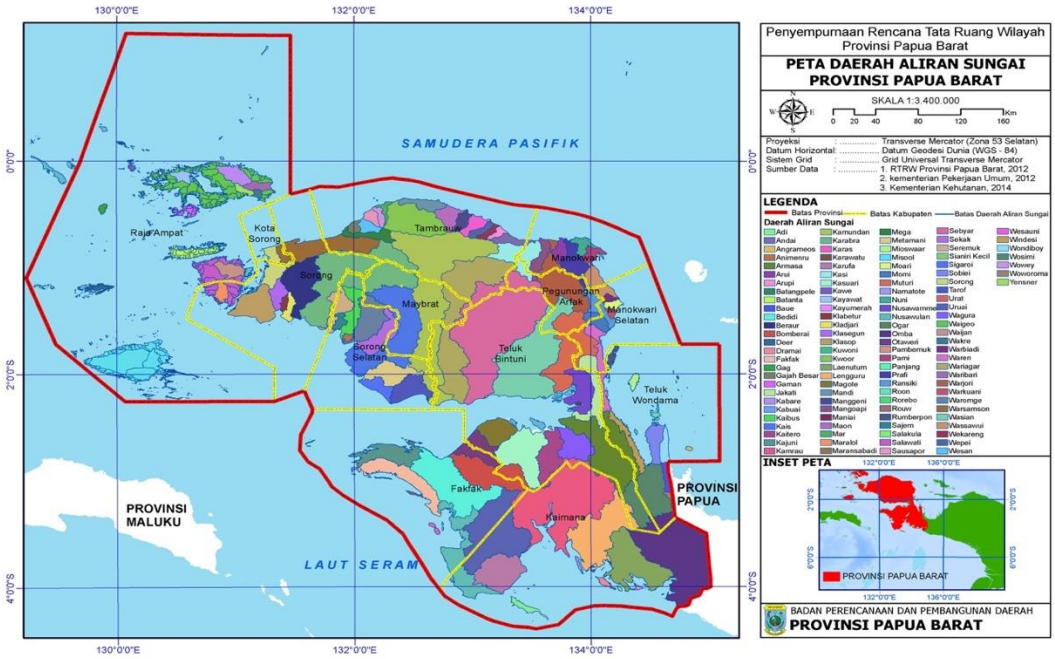

Gambar 2.10 Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Secara garis besar, daerah tangkapan sungai (*catchment area*) di Provinsi Papua Barat dapat dibagi ke dalam 2 (dua) Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu: (1) SWS Kamundan–Sebyar dengan luas wilayah ±78.375,08 km^2 yang meliputi Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Maybrat; dan (2) SWS Omba dengan luas wilayah ±18.649,19 km^2 yang meliputi Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama. Peta pembagian wilayah sungai di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Gambar 2.11.

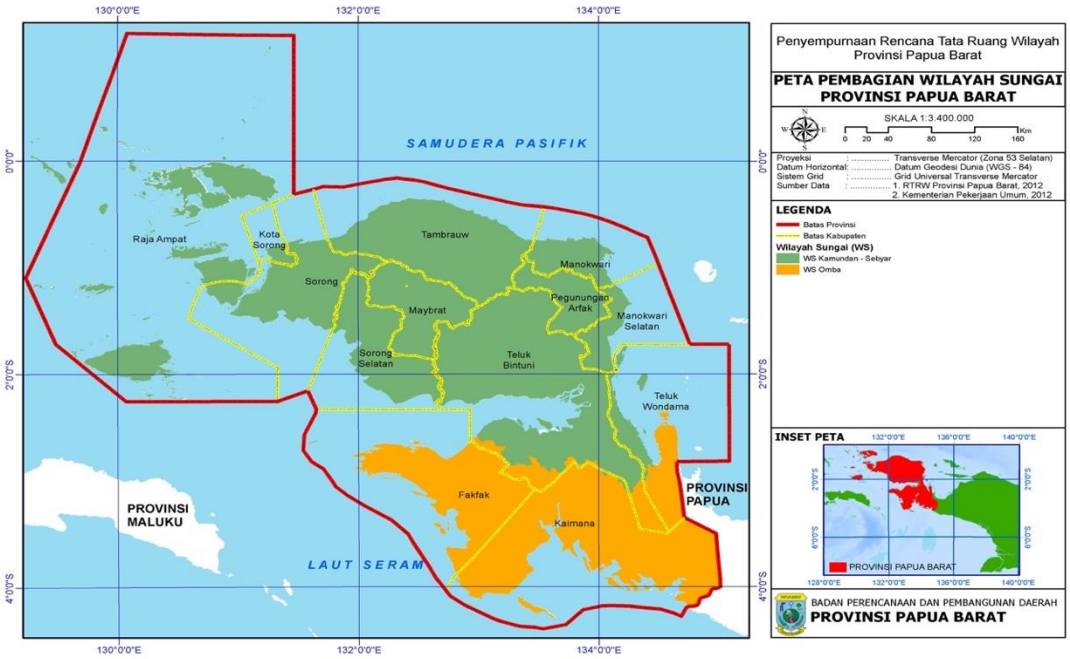

Gambar 2.11 Peta Pembagian Wilayah Sungai di Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Selain sungai, danau juga merupakan sumber air permukaan potensial. Di Provinsi Papua Barat terdapat 24 danau besar dan kecil yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Secara umum, danau-danau besar di Provinsi Papua Barat berada di Kabupaten Kaimana dengan danau terluas adalah Danau Jamur dengan luas mencapai 3.533,34 Ha. Danau lain yang termasuk dalam kategori luas di Kabupaten Kaimana adalah Danau Laamora (2.445,14 Ha), Danau Kamakawulo (2.320,42 Ha), Danau Daiwasu (2.196,77 Ha), dan Danau Manami (919,75 Ha). Danau lain yang berukuran di atas 1.000 Ha di Provinsi Papua Barat diantaranya adalah Danau Angga Gigi (2.124,87 Ha) dan Danau Angga Gita (2.237,23 Ha) di Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Danau Tanemot di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu seluas 1.723,61 Ha. Rincian mengenai luas dan penyebaran danau di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Luas dan Penyebaran Danau di Provinsi Papua Barat, 2017

Nama Danau	Luas (Ha)	Kabupaten	Nama Danau	Luas (Ha)	Kabupaten
Warwaki	3,49	Raja Ampat	Tanemot	1.723,61	Teluk Bintuni
Bakdi	1,49	Raja Ampat	Tawajo	11,14	Teluk Bintuni
Awai	15,11	Raja Ampat	Ayot	42,35	Teluk Bintuni
Kapar	2,41	Raja Ampat	Ambuar	37,25	Teluk Wondama
Yahabyab	8,55	Raja Ampat	Kinumisumar	2,80	Fakfak
Wasidori	14,39	Manokwari	Oyas	1,15	Fakfak

Nama Danau	Luas (Ha)	Kabupaten	Nama Danau	Luas (Ha)	Kabupaten
Kabori	25,84	Manokwari	Kuniki	3,52	Fakfak
Anggi Gigi	2.124,87	Pegunungan Arfak	Daiwasu	2.196,77	Kaimana
Anggi Gita	2.237,23	Pegunungan Arfak	Laamora	2.445,14	Kaimana
Ayamaru	542,52	Maybrat	Kamakawulo	2.320,42	Kaimana
Aitinyo	18,56	Maybrat	Jamur	3.533,34	Kaimana
Makiri	661,62	Teluk Bintuni	Manami	919,75	Kaimana

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

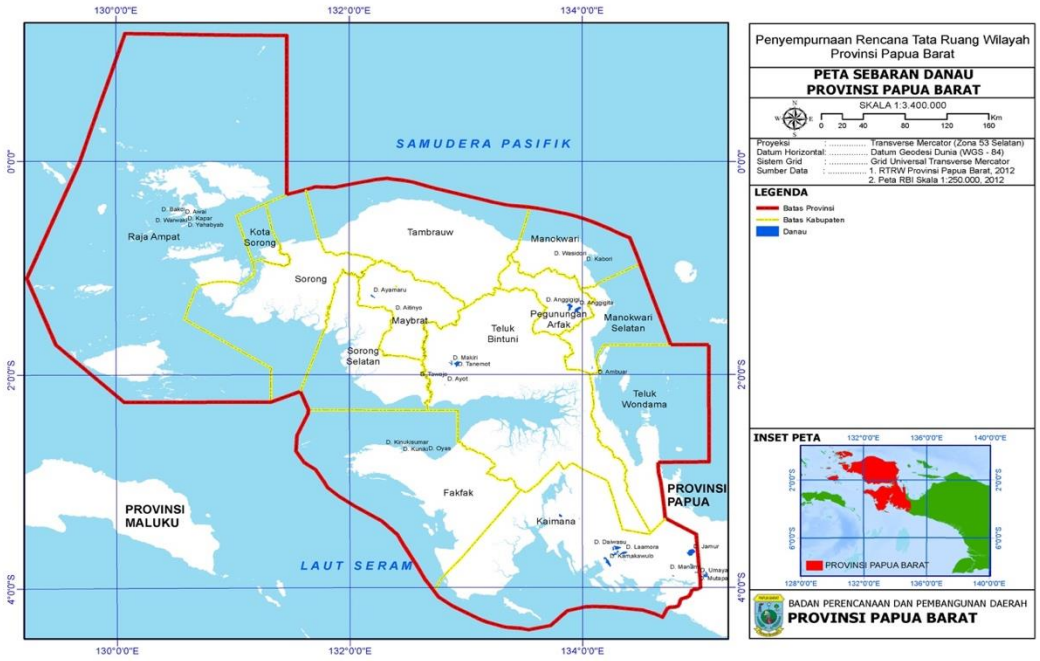

Gambar 2.12 Peta Sebaran Danau di Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Selain potensi air permukaan yang berada di sungai dan danau, Provinsi Papua Barat juga memiliki potensi air tanah yang cukup tinggi. Air tanah mengandung dua pengertian. *Pertama,* air tanah yang terkandung dalam tanah hingga batas kedalaman perakaran pada umumnya tanaman atau pada solum tanah dan disebut sebagai kandungan lengas tanah atau *soil moisture*. *Kedua*, air tanah di bawah permukaan bumi pada kedalaman lebih dari yang tersebut di atas, dan disebut sebagai *ground water* atau air aquifer. Di Provinsi Papua Barat, potensi air tanah dangkal yang cukup signifikan terdapat di Kabupaten Sorong Selatan hingga mencapai 40%. Penyebaran lokasi air tanah Di Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 2.9.

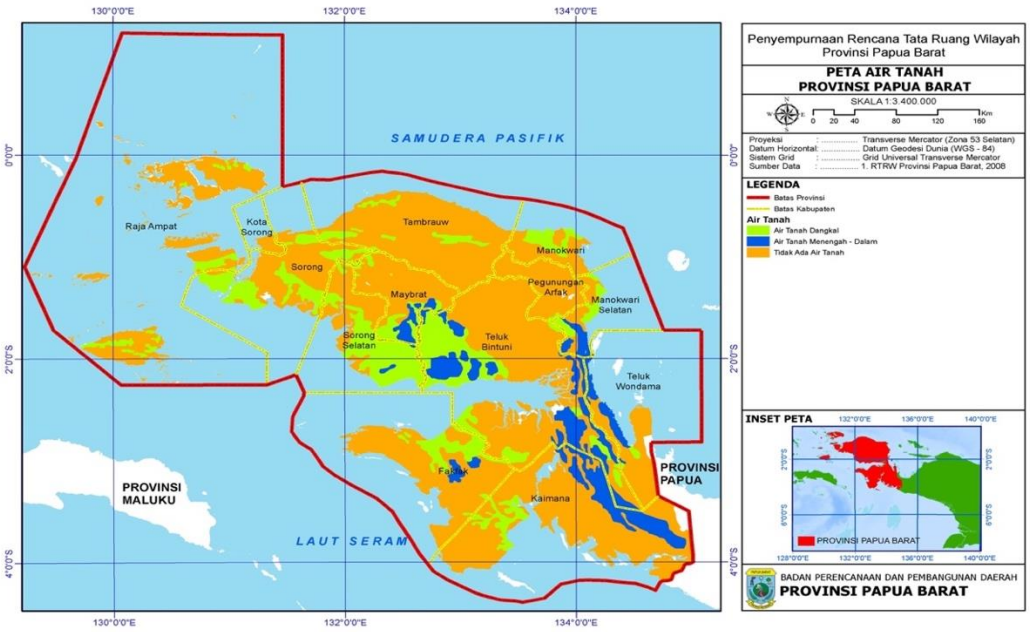

Gambar 2.13 Peta Air Tanah di Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Tabel 2.9 Distribusi Luas Areal Air Tanah (*Ground Water*) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2017

No.	Kabupaten	Luas (Km²)	Air Tanah Dangkal (Km²)	Air Tanah Menengah – Dalam (Km²)	Tanpa Air Tanah (Km²)
1.	Fakfak	11.036,48	1.557,58	356,89	9.122,00
2.	Kaimana	16.241,84	982,99	2.615,05	12.643,79
3.	Teluk Wondama	3.959,53	111,44	729,28	3.118,81
4.	Teluk Bintuni	20.840,83	4.088,51	3.709,02	13.043,30
5.	Manokwari	4.452,76	788,55	0,00	3.664,21
6.	Sorong Selatan	3.946,94	3.498,37	91,87	356,70
7.	Sorong	5.969,13	2.979,36	0,00	2.989,77
8.	Raja Ampat	8.034,44	1.000,87	0,00	7.033,57
9.	Tambrauw	10.837,81	631,46	0,00	10.206,35
10.	Maybrat	5.461,69	972,01	612,64	3.877,04
11.	Kota Sorong	656,64	13,75	0,00	642,89
12.	Manokwari Selatan	2.812,44	611,79	564,31	1.636,34
13.	Pegunungan Arfak	2.773,74	57,08	2,93	2.713,73

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Secara umum kondisi iklim tropis lembab dan panas merupakan kondisi iklim yang ada di Provinsi Papua Barat. Selama periode 2010-2014, suhu udara rerata di Provinsi Papua Barat cenderung stabil yaitu berkisar antara 27,0-27,4°C. Suhu udara maksimum di Provinsi

Papua Barat selama peridoe tersebut terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 32°C, dimana hal yang sama juga terjadi untuk suhu udara minimum terendah yang hanya sebesar 23,1°C pada tahun 2011. Jika dirinci menurut bulan pada tahun 2014, suhu udara rerata di Provinsi Papua Barat terjadi pada bulan Oktober yang mencapai 27,84°C, sedangkan suhu udara rerata terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 26,60°C. Suhu udara minimum tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 24,47°C, sedangkan suhu minimum terendah terjadi pada bulan September yaitu sebesar 23,66°C. Pada kondisi suhu udara maksimum, suhu tertinggi terjadi pada Oktober yaitu sebesar 32,43°C dan suhu udara maksimum terendah terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 30,88°C.

Tabel 2.10 Suhu Udara Minimum, Maksimum, dan Rerata di Provinsi Papua Barat (°C), 2014

Bulan	Suhu Minimum	Suhu Maksimum	Suhu Rerata
Januari	24,12	30,97	27,38
Februari	23,99	30,88	27,42
Maret	24,18	31,28	27,61
April	24,41	31,51	27,74
Mei	24,40	31,56	27,62
Juni	24,37	31,69	27,49
Juli	23,79	31,18	27,17
Agustus	23,67	30,92	26,60
September	23,66	31,36	26,91
Oktober	24,10	32,43	27,84
November	24,29	31,95	27,54
Desember	24,47	31,76	27,47

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Pada tingkat kabupaten/kota, suhu udara maksimal tertinggi selama periode 2010-2013 berada di Kabupaten Manokwari, sedangkan pada tahun 2014 ditempati Kabupaten Teluk Bintuni. Pada tahun 2010, suhu udara maksimal tertinggi adalah sebesar 34,40°C, kemudian pada tahun 2011 sebesar 33,20°C, dan pada tahun 2013 sebesar 32,60°C. Pada tahun 2014, suhu udara maksimal tertinggi adalah sebesar 32,50°C. Pada kondisi suhu udara minimum, suhu udara minimal terendah pada tahun 2010 dan 2011 berada di Kabupaten Manokwari dan Teluk Bintuni yaitu masing-masing sebesar 22,40°C dan 22,62°C. Selama periode 2012-2014, kondisi suhu udara minimal terendah berada di Kabupaten Fakfak yaitu berturut-turut sebesar 22,90°C, 22,40°C, dan 21,60°C. Pada kondisi suhu udara rerata, suhu tertinggi pada tahun 2010 berada di Kabupaten Sorong dan Tambrauw yaitu masing-

masing sebesar 27,30°C, kemudian pada tahun 2011 berada di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu sebesar 27,92°C. Selanjutnya pada tahun 2012-2014, suhu udara rerata tertinggi terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni dan Manokwari yaitu berturut-turut sebesar 27,23°C; 27,33°C; dan 27,50°C.

Tabel 2.11 Suhu Udara Maksimum, Minimum, dan Rerata Menurut Kabupaten/Kota (°C), 2010-2014

No.	Kabupaten/Kota	2010			2011			2012			2013			2014		
		Mak	Min	Rerata	Mak	Min	Rerata	Mak	Min	Rerata	Mak	Min	Rerata	Mak	Min	Rerata
1.	Fakfak	30,00	23,20	26,60	22,70	29,30	26,00	29,70	22,90	26.30	29.00	22.40	-	30.90	21.60	26.00
2.	Kaimana	30,70	23,10	27,20	30,60	23,40	26,70	29,00	26,00	27.10	-	-	27.20	30.90	23.40	27.10
3.	Teluk Wondama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Teluk Bintuni	34,40	22,40	27,28	33,20	22,62	27,92	31,78	23,93	27.23	32.00	23.56	27.33	32.50	24.00	27.50
5.	Manokwari	34,40	22,40	27,28	33,20	22,62	27,91	31,80	23,92	27.23	32.60	23.00	27.33	31.50	23.90	27.50
6.	Sorong Selatan	31,23	24,23	26,97	30,50	23,90	26,80	31,10	24,10	26.90	31.26	24.26	27.11	28.59	25.08	27.18
7.	Sorong	31,60	23,10	27,30	30,50	23,90	26,80	31,10	24,10	26.80	31.26	24.26	27.11	28.59	25.08	27.18
8.	Raja Ampat	31,20	24,40	27,00	30,70	23,60	26,40	31,30	24,10	26.30	31.50	24.25	27.10	28.59	25.08	27.18
9.	Tambrauw	31,60	23,10	27,30	30,50	23,90	26,80	31,10	24,10	26.80	31.26	24.26	27.11	28.59	25.08	27.18
10.	Maybrat	31,23	24,23	26,97	30,50	23,90	26,80	31,10	24,10	26.90	31.30	24.30	27.10	28.59	25.08	27.18
11.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kota Sorong	31,23	24,23	26,97	30,50	23,90	26,80	31,35	24,10	27.76	31.26	24.26	27.11	28.59	25.08	27.18

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2015

Kelembaban udara di Provinsi Papua Barat memiliki kecenderungan stabil. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.12 yang menunjukkan bahwa secara umum kelembaban udara di beberapa wilayah kabupaten/kota berkisar antara 82-86%. Selama periode 2010-2014, kelembaban udara tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 91,10% di Kabupaten Fakfak, sedangkan kelembaban terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 82,67% di Kabupaten Kaimana.

Tabel 2.12 Rerata Kelembaban Udara Menurut Kabupaten/Kota (%), 2010-2014

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Fakfak	85,60	85,80	86,80	91,10	84,80
2.	Kaimana	8450	82,67	83,50	84,50	83,25
3.	Teluk Wondama	-	-	-	-	-
4.	Teluk Bintuni	83,58	85,75	83,67	83,25	82,83
5.	Manokwari	83,58	85,75	83,67	83,25	82,80
6.	Sorong Selatan	85,00	86,00	86,00	86,25	86,25
7.	Sorong	85,33	86,00	86,00	86,25	86,25
8.	Raja Ampat	85,00	86,00	86,00	86,50	86,25
9.	Tambrauw	85,33	86,00	86,00	86,25	86,25
10.	Maybrat	85,00	86,00	86,00	86,00	86,25
11.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	-
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-
13.	Kota Sorong	85,00	86,00	85,92	86,25	86,25

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2015

Dalam kurun waktu tahun 2010-2014, kondisi tekanan udara di Provinsi Papua Barat cenderung stabil yaitu berkisar antara 1.008,2-1.009 mbps. Jika dilihat tekanan udara bulanan pada tahun 2014, tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan Agustus yang mencapai 1.010,3 mbps, sedangkan tekanan udara terendah terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 1.007,9 mbps. Pada tingkat kabupaten/kota, tekanan udara tertinggi dalam periode 2010-2014 secara umum berada di Kabupaten Sorong Selatan, sedangkan tekanan udara terendah berada di Kabupaten Fakfak. Pada periode tersebut, tekanan udara tertinggi di Kabupaten Sorong Selatan mencapai 1010,20 mbps dan tekanan udara terendah di Kabupaten Fakfak sebesar 993,03 mbps.

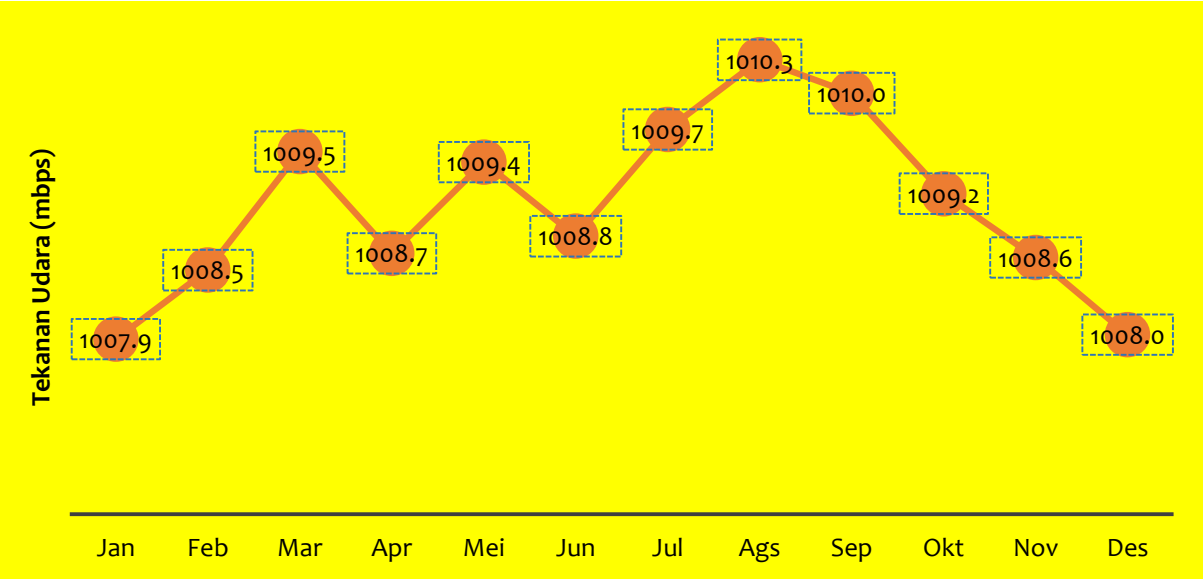

Gambar 2.14 Kondisi Tekanan Udara di Provinsi Papua Barat, 2014
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Tabel 2.13 Rerata Tekanan Udara Menurut Kabupaten/Kota (mbps), 2010-2014

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Fakfak	993,35	993,03	993,12	993,45	994,80
2.	Kaimana	1.009,10	1.008,40	1.008,50	1.009,20	1.008,40
3.	Teluk Wondama	-	-	-	-	-
4.	Teluk Bintuni	1.008,56	1.007,94	1.004,48	1.008,40	1.008,62
5.	Manokwari	1.008,56	1.007,94	1.004,48	1.008,40	1.008,62
6.	Sorong Selatan	1.008,66	1.008,50	1.008,80	1.010,20	1.009,00
7.	Sorong	1.008,90	1.008,50	1.008,40	1.008,70	1.008,95
8.	Raja Ampat	1.008,66	1.008,00	1.008,80	1.008,70	1.008,95
9.	Tambrauw	-	-	-	-	1.008,95
10.	Maybrat	1.008,66	1.008,50	1.008,80	1.010,20	1.008,95
11.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	-
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-
13.	Kota Sorong	1.008,72	1.008,50	1.008,40	1.007,90	1.008,95

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2015

Kecepatan angin rerata di Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 2010-2014 setiap tahunnya mengalami peningkatan dari sebesar 2,5 knot pada tahun 2010 menjadi sebesar 3,3 knot pada tahun 2014. Hal yang sama juga terjadi pada kecepatan angin maksimum yang mengalami peningkatan dari sebesar 7,3 knot pada tahun 2010 menjadi sebesar 7,8 knot pada tahun 2014. Jika dirinci menurut bulan pada tahun 2014, kecepatan angin rerata tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 4,27 knot dan kecepatan angin rerata

terendah terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 2,61 knot. Pola yang sama juga terjadi pada kecepatan angin maksimum dimana kecepatan tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 8,99 knot dan kecepatan terendah pada bulan Mei yaitu sebesar 6,79 knot.

Tabel 2.14 Kecepatan Angin Maksimum dan Rerata di Papua Barat (knot), 2014

Bulan	Kecepatan Minimum	Kecepatan Rerata
Januari	7,79	3,41
Februari	8,99	4,27
Maret	8,56	3,94
April	7,45	3,02
Mei	6,79	2,61
Juni	7,12	2,81
Juli	8,47	3,95
Agustus	7,31	3,31
September	8,64	3,67
Oktober	7,86	3,54
November	7,20	2,98
Desember	7,41	2,68

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Berdasarkan penyinaran matahari, pada tahun 2010-2013, durasi penyinaran tertinggi berada di Kabupaten Fakfak. Pada tahun 2010, durasi penyinaran di Kabupaten Fakfak adalah sebesar 135,74%, kemudian meningkat selam dua tahun berturut-turut mencapai 357,00%. Pada tahun 2013, walaupun masih menempati urutan pertama dalam durasi penyinaran matahari, terjadi penurunan durasi penyinaran di Kabupaten Fakfak hingga hanya menjadi sebesar 91,32%. Pada tahun 2014, durasi penyinaran tertinggi berada di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu sebesar 57,14%, diikuti Kabupaten Manokwari sebesar 57,10. Rincian mengenai rata-rata penyinaran matahari menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat selama periode 2010-2014 ditampilkan pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15 Rerata Penyinaran Matahari di Kabupaten/Kota (%), 2010-2014

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Fakfak	135,74	139,31	357,00	91,32	30,70
2.	Kaimana	25,00	26,39	31,25	50,04	-
3.	Teluk Wondama	-	-	-	-	-
4.	Teluk Bintuni	60,58	46,00	48,33	47,83	57,14
5.	Manokwari	60,58	46,00	48,33	47,83	57,10
6.	Sorong Selatan	59,67	41,88	48,00	45,78	54,58

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
7.	Sorong	59,70	41,88	48,00	45,78	54,58
8.	Raja Ampat	59,60	53,90	48,00	46,00	54,58
9.	Tambrauw	59,70	41,88	48,00	45,78	54,58
10.	Maybrat	59,67	41,88	48,00	45,80	54,58
11.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	-
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-
13.	Kota Sorong	59,67	41,88	48,02	45,78	54,58

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2015

Dalam kurun waktu 2010-2014, curah hujan tahunan di Provinsi Papua Barat cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010, curah hujan tahunan di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 1.941,8 mm, kemudian meningkat menjadi sebesar 2.144,6 mm pada tahun 2011. Namun dalam periode 2012-2014, curah hujan terus mengalami penurunan setiap tahun hingga menjadi hanya sebesar 1.127,16 mm. Jika dirinci menurut bulan pada tahun 2014, curah hujan bulanan tertinggi di Provinsi Papua Barat terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 319,15 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Maret dan April yang masing-masing sebesar 0,00 mm. Pada tingkat kabupaten/kota, curah hujan tertinggi dalam kurun waktu 2010-2013 berada di Kabupaten Fakfak, sedangkan pada tahun 2014 ditempati Kabupaten Teluk Bintuni dan Manokwari. Sementara itu, jumlah hari hujan tertinggi di tahun 2014 berada di Kabupaten Teluk Bintuni yang mencapai 290 hari. Kondisi pada tahun 2014 tersebut berbeda jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya dimana jumlah hari hujan tertinggi ditempati beberapa kabupaten seperti Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat, dan Maybrat.

Tabel 2.16 Banyaknya Curah Hujan Menurut Kabupaten/Kota (mm), 2010-2014

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Fakfak	3.530,30	3.811,30	4.790,40	4.072,70	2.522,20
2.	Kaimana	2.856,00	2.571,00	3.123,00	2.856,00	2.105,00
3.	Teluk Wondama	-	-	-	-	-
4.	Teluk Bintuni	1.581,00	2.680,50	3.289,90	3.419,10	2.824,60
5.	Manokwari	1.581,00	2.680,50	3.289,90	3.419,10	2.824,60
6.	Sorong Selatan	3.127,10	3.786,50	3.085,20	3.349,00	2.453,00
7.	Sorong	2.543,00	3.786,50	3.085,00	3.349,00	2.453,00
8.	Raja Ampat	3.025,90	3.468,50	3.085,20	3.349,00	2.453,00
9.	Tambrauw	3.025,90	3.468,50	3.085,20	3.349,00	2.453,00

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
10.	Maybrat	3.127,10	3.786,50	3.085,20	3.349,00	2.453,00
11.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	-
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-
13.	Kota Sorong	2.543,00	3.786,50	3.085,00	3.349,00	2.453,00

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2015

Tabel 2.17 Banyaknya Hari Hujan Menurut Kabupaten/Kota (Hari), 2010-2014

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Fakfak	227	239	231	267	233
2.	Kaimana	181	179	196	181	243
3.	Teluk Wondama	-	-	-	-	-
4.	Teluk Bintuni	219	246	256	251	290
5.	Manokwari	219	246	256	251	-
6.	Sorong Selatan	263	258	252	260	210
7.	Sorong	251	258	252	260	210
8.	Raja Ampat	262	258	252	274	210
9.	Tambrauw	251	258	252	260	210
10.	Maybrat	263	258	252	274	210
11.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	-
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-
13.	Kota Sorong	254	258	250	264	210

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2015

2.1.1.6. Karakteristik Tanah

Jenis tanah yang ditemukan di Provinsi Papua Barat berdasarkan sistem taksonomi tanah USDA terdiri atas: Histosols, Entisols, Inceptisols, Alfisols, Mollisols, Ultisols, dan Oxisols. Dari ketujuh ordo tanah yang ditemukan di Provinsi Papua Barat, luasan terbesar ditempati oleh Ordo Inceptisols dengan luasan 38.724,70 km^2 (39,91%), diikuti Ordo Mollisols seluas 26.088,09 km^2 (26,89%), dan Ordo Alfisols seluas 14.224,21 km^2 (14,66%). Melihat kondisi demikian, Provinsi Papua Barat mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan sektor pertanian, mengingat tanah dengan Ordo Inceptisols, Mollisols, dan Alfisols merupakan jenis tanah yang subur.

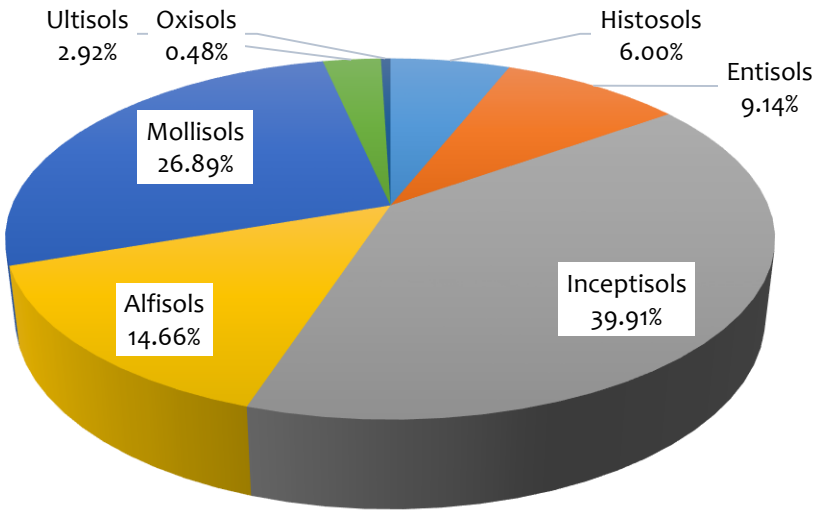

Gambar 2.15 Persentase Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

a. Histosol

Tanah yang termasuk ordo Histosol merupakan tanah-tanah dengan kandungan bahan organik lebih dari 20% (untuk tanah bertekstur pasir) atau lebih dari 30% (untuk tanah bertekstur liat). Histosols merupakan tanah yang terbentuk dari bahan organik, pada landform gambut dengan relief agak cekung sehingga selalu tergenang. Vegetasi yang dijumpai umumnya masih merupakan hutan rawa. Histosols terbentuk bila produksi dan penimbunan bahan organik lebih besar dari mineralisasinya. Keadaan demikian umumnya ditemukan terutama di daerah depresi (rawa belakang) yang merupakan bagian dari sistem aluvial tertutup dengan bentuk "menjari". Tempat-tempat demikian biasanya selalu digenangi air sehingga sirkulasi oksigen sangat terhambat, oleh karena itu dekomposisi bahan organik terhambat dan terjadilah bahan organik.

Dalam klasifikasi tanah menurut Soepraptohardjo (1961a; 1961b), Histosols mencakup tanah-tanah yang disebut: Organosols. Pada umumnya masyarakat di berbagai daerah menyebutnya sebagai tanah gambut, tanah rawang, atau tanah sepuk/sepok. Histosol mempunyai daya memegang air sangat tinggi, baik atas volume maupun berat tanah. Walaupun demikian kebanyakan tertahan dalam pori-pori kasar (air gravitasi) atau dalam pori-pori yang sangat halus sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Tingkat kesuburan jenis tanah ini relatif rendah dan pemanfaatannya sangat terbatas untuk

komoditas tertentu. Pengelolaan tanah gambut untuk usaha pertanian sebaiknya diarahkan pada gambut dangkal (<2 m) sedangkan pada gambut dalam (>2 m) sebaiknya diusahakan/dipertahankan sebagai kawasan lindung atau konservasi.

Histosols di Provinsi Papua Barat terdapat pada fisiografi dataran alluvial, depresi alluvial, dan gambut ombrogen (ketebalan gambut >2 m). Penyebaran Histosols di Provinsi Papua Barat terbanyak ditemukan di pesisir selatan, meliputi Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana. Secara umum pemanfaatan tanah gambut di Indonesia masih sangat terbatas diantaranya digunakan untuk budidaya tanaman penghasil minuman seperti lidah buaya (khususnya pada gambut dangkal), sedangkan di Provinsi Papua Barat jenis tanah ini belum termanfaatkan dengan optimal. Luasan jenis tanah Histosol di Provinsi Papua Barat adalah seluas 5.822,01 km^2 (6,00%).

b. Entisol

Tanah yang termasuk ordo Entisol merupakan tanah-tanah yang masih sangat muda yaitu baru tingkat permulaan dalam perkembangan. Entisols merupakan tanah-tanah yang belum mempunyai perkembangan struktur dengan susunan horison AC atau AR dan bersolum tipis. Tanah berkembang dari bahan aluvium sungai, aluvium marin, batu gamping, dan bahan volkan. Penyebaran tanah ini terdapat pada landform aluvial, marin, karst, tektonik/struktural, dan volkan tua. Pada landform aluvial, bahan induk tanah berupa endapan liat dan pasir, landform marin berupa endapan pasir.

Penyebaran jenis tanah ini terdapat di seluruh Provinsi Papua Barat dengan luasan 8.872,85 km^2 atau menempati 9,14% dari luasan daratan Provinsi Papua Barat. Penyebaran jenis entisol terbesar berada di Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Tambrauw. Entisol yang berkembang di sepanjang kanan kiri sungai dan sekitar rawa mempunyai potensi untuk pengembangan budidaya pertanian. Sedangkan Entisol yang berkembang pada daerah kering biasanya sering dihadapkan pada kendala terbatasnya air, lapisan dangkal, dan banyaknya endapan garam di permukaan tanah, akibat akumulasi garam yang terbawa dari dalam tanah melalui air kapiler. Garam-garam tersebut jelas merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman.

c. Inceptisol

Tanah yang termasuk ordo Inceptisol merupakan tanah muda, tetapi lebih berkembang daripada Entisol. Kata Inceptisol berasal dari kata Inceptum yang berarti permulaan. Umumnya mempunyai horison kambik. Tanah ini belum berkembang lanjut, sehingga kebanyakan dari tanah ini cukup subur. Inceptisol adalah tanah-tanah yang telah mengalami perkembangan morfologi, yang ditunjukkan oleh perubahan warna, bentukan struktur, dan adanya akumulasi liat di dalam horison B tetapi belum memenuhi syarat sebagai horison argilik.

Inceptisol di Provinsi Papua Barat merupakan jenis tanah yang mempunyai luasan paling besar yaitu 38.724,70 km^2 atau menempati 39,91% dari luasan daratan Provinsi Papua Barat. Inceptisol banyak ditemukan pada daerah dengan landform marin, aluvial, karst, tektonik/struktural, dan volkan. Penyebaran jenis tanah ini berada di seluruh kabupaten, namun demikian sebaran terbesar terdapat di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Tambraw, Fakfak, Teluk Wondama, dan Raja Ampat. Inceptisol di Indonesia banyak digunakan untuk pertanaman padi sawah (Goeswono, 1985 *dalam* Munir, 1996), dan pada daerah berlereng jenis tanah ini banyak dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman tahunan/perkebunan seperti kopi, teh, coklat, kemiri, sagu dan komoditas perkebunan lainnya.

d. Alfisol

Tanah yang termasuk ordo Alfisol merupakan tanah-tanah yang terdapat penimbunan liat di horison bawah (terdapat horison argilik) dan mempunyai kejenuhan basa tinggi yaitu lebih dari 35% pada kedalaman 180 cm dari permukaan tanah. Liat yang tertimbun di horison bawah ini berasal dari horison di atasnya dan tercuci kebawah bersama dengan gerakan air. Padanan dengan sistem klasifikasi yang lama adalah termasuk tanah Mediteran Merah Kuning, Latosol, kadang-kadang juga Podzolik Merah Kuning.

Di Provinsi Papua Barat, Alfisol sebagian besar dapat ditemukan pada landform tektonik/angkatan dan di beberapa tempat tanah ini berkembang dari bahan marl, batu pasir, serpih, dan basalt. Tanah Alfisol banyak mengandung bahan organik dan kaya akan basa-basa. Penyebaran jenis tanah ini sebagian besar terdapat di Kabupaten Sorong, Teluk Bintuni, Fakfak, Raja Ampat, dan Maybrat. Tanah Alfisol adalah merupakan tanah yang

subur, pengelolaannya di Indonesia banyak digunakan untuk pertanian, rumput ternak, maupun hutan. Sarief (1986 dalam Munir 1996) menyebutkan bahwa Alfisol di Indonesia juga banyak yang diusahakan menjadi persawahan (padi) baik tadah hujan maupun berpengairan, perkebunan (buah-buahan), dan tegalan.

e. Mollisol

Tanah yang termasuk ordo Mollisol merupakan tanah dengan tebal epipedon lebih dari 18 cm yang berwarna hitam (gelap), kandungan bahan organik lebih dari 1%, kejenuhan basa lebih dari 50%. Agregasi tanah baik, sehingga tanah tidak keras bila kering. Kata Mollisol berasal dari kata Mollis yang berarti lunak. Mollisol adalah tanah dengan epipedon mollik, namun demikian tidak semua tanah yang mempunyai epipedon mollik diklasifikasikan sebagai Mollisol. Sebagai contoh pada tanah Vertisol juga kadang ditemukan epipedon Mollik tetapi sifat Molliknya kurang nyata, karena pengaruh sifat plastis dan mengembang-mengkerut dari Vertisol. Demikian pula tanah yang memiliki epipedon yang memenuhi syarat sebagai epipedon Mollik tetapi terbentuk sebagai akibat pengapuran, tidak dapat diklasifikasikan sebagai Mollisol.

Mollisol mempunyai tingkat kesuburan yang baik, karena kandungan bahan organik dan kapasitas tukar kation yang tinggi, sehingga kaya kation-kation seperti Ca, Mg, K, dan lain-lain. Walaupun demikian karena tanah ini banyak terbentuk pada daerah dengan iklim kering dengan curah hujan yang rendah, maka intensitas pengelolaannya relatif masih rendah yaitu pengusahaan tanaman pangan hanya dilakukan pada musim hujan saja. Pada daerah-daerah yang mempunyai sistem pengairan yang baik maka pengusahaan tanaman pangan dapat dilakukan sepanjang musim.

Mollisol di Papua Barat menempati luasan terbesar nomor dua setelah Inceptisols yaitu 26.088,09 km^2 atau menempati 26,89% dari luasan daratan Provinsi Papua Barat dan banyak ditemukan pada landform karst. Penyebaran jenis tanah ini terdapat hampir di semua kabupaten di Provinsi Papua Barat kecuali Kota Sorong, sebaran terluas terdapat di Kabupaten Kaimana, diikuti Fakfak, Maybrat, dan Teluk Bintuni.

f. Ultisol

Tanah yang termasuk ordo Ultisol merupakan tanah-tanah yang terjadi penimbunan liat di horison bawah, bersifat masam, kejenuhan basa pada kedalaman 180 cm dari

permukaan tanah kurang dari 35%. Kendala umum yang dihadapi pada tanah Ultisol adalah pH tanah rendah, unsur N dan P kurang tersedia, kekurangan unsur Ca, Mg, K, dan Mo kandungan Mn dan Fe berlebih, serta kelarutan Al monomerik yang tinggi, sehingga merupakan faktor utama penghambat pertumbuhan tanaman (Hakim *et al*, 1986). Blamey, 1983; Kerven, *et al*., 1989; *dalam* Hairiah (1992) menyebutkan bahwa jenis-jenis Al monomerik sperti Al^{3+}, $Al(OH)^{+}_{2}$, $Al(OH)^{2+}$, $Al(OH)^{o}_{3}$, dan $Al(SO4)^{+}$ umumnya merupakan racun/pembatas utama terhadap pertumbuhan tanaman dan mempunyai aktifitas yang lebih tinggi pada pH yang lebih rendah. Di Provinsi Papua Barat, ultisol banyak ditemukan pada daerah dengan landform alluvial dan tektonik/struktural. Luasan Ultisol di Provinsi Papua Barat relatif sangat kecil yaitu 2.828,64 km^2 atau menempati luasan 2,92% dari luas daratan Provinsi Papua Barat. Penyebaran tanah ini sebagian besar terdapat di Kabupaten Kaimana dan Fakfak.

Walaupun tingkat kesuburan Ultisols rendah dan banyak masalah, namun dengan pengelolaan yang baik seperti pemberian bahan kapur dan bahan organik maka pengusahaan pertanian tanaman pangan pada jenis tanah ini masih dapat memberikan harapan. Di luar Provinsi Papua Barat terutama di Pulau Jawa dan Sumatra pada daerah-daerah tertentu, jenis tanah ini sudah banyak digunakan untuk pengembangan tanaman tahunan seperti karet dan kelapa sawit.

g. Oxisol

Tanah yang termasuk ordo Oxisol merupakan tanah tua sehingga mineral mudah lapuk tinggal sedikit. Kandungan liat tinggi tetapi tidak aktif sehingga kapasitas tukar kation (KTK) rendah, yaitu kurang dari 16 me/100 g liat. Banyak mengandung oksida-oksida besi atau oksida Al. Padanan dengan sistem klasifikasi lama adalah termasuk tanah Latosol (Latosol Merah & Latosol Merah Kuning), Lateritik, atau Podzolik Merah Kuning.

Di Provinsi Papua Barat, Oxisol banyak ditemukan pada daerah dengan landform volkanik yang berumur tua atau tanah yang terbentuk dari bahan-bahan sedimen tua. Umumnya Oxisol berada pada kondisi iklim yang cukup basah untuk merombak hasil pelapukan yang menghasilkan konsentrasi residu seskuioksida dan mineral liat kaolinit. Tanah ini dicirikan oleh adanya horison oksik pada kedalaman kurang dari 1,5 m atau mempunyai horison kandik yang jumlah mineral mudah lapuk memenuhi syarat horison oksik, dan tidak mempunyai horison spodik atau argilik di atas horison oksik.

Oxisol di Provinsi Papua Barat menempati luasan paling rendah yaitu 463,77 km^2 atau menempati 0,46% dari luasan daratan Provinsi Papua Barat. Penyebaran tanah ini sebagian besar terdapat di Kabupaten Raja Ampat. Di luar Pulau Papua, pada umumnya pemanfaatan Oxisol banyak digunakan untuk perladangan, pertanian subsisten, penggembalaan dengan intensitas rendah, dan perkebunan yang intensif seperti tebu, nenas, pisang dan kopi. Dengan pengelolaan tanah yang baik seperti pemupukan, pengapuran, dan pengairan maka tanah ini mempunyai prospek untuk kegiatan persawahan.

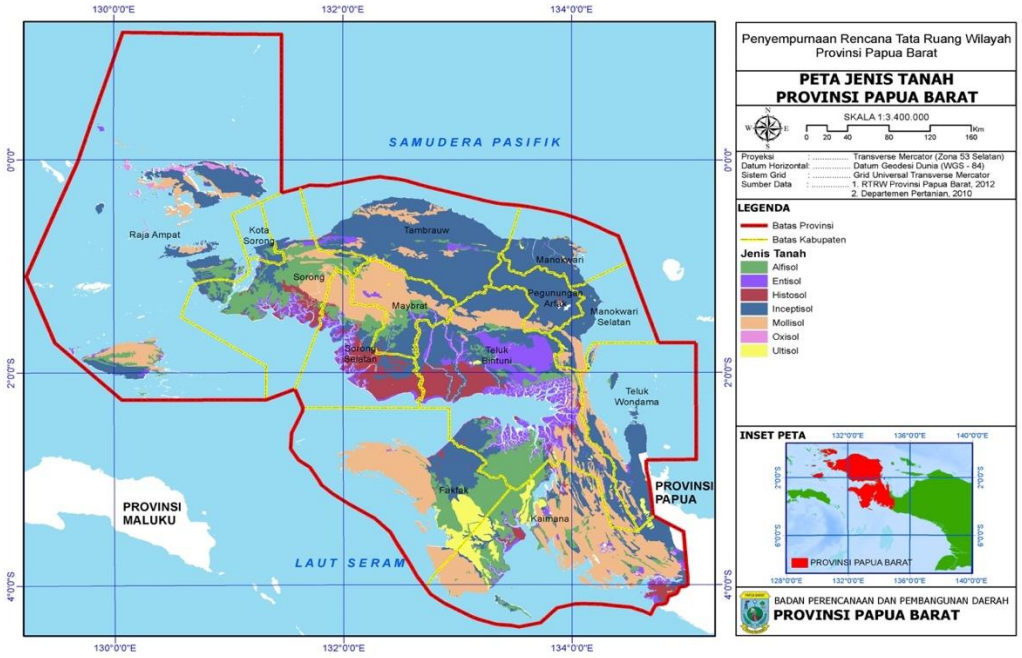

Gambar 2.16 Peta Jenis Tanah di Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Tekstur tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang digunakan secara praktis untuk memprediksi potensi penggunaan tanah. Tanah bertekstur halus (dominan liat) memiliki permukaan yang lebih halus dibanding dengan tanah bertekstur kasar (dominan pasir) sehingga tanah yang bertekstur halus memiliki kapasitas adsorpsi unsur–unsur hara yang lebih besar dan umumnya lebih subur dibandingkan dengan tanah bertekstur kasar. Tanah bertekstur kasar lebih porus dan laju infiltrasinya lebih cepat. Walaupun demikian tanah bertekstur halus memiliki kapasitas memegang air lebih besar dari pada tanah pasir karna memiliki permukaan yang lebih luas.

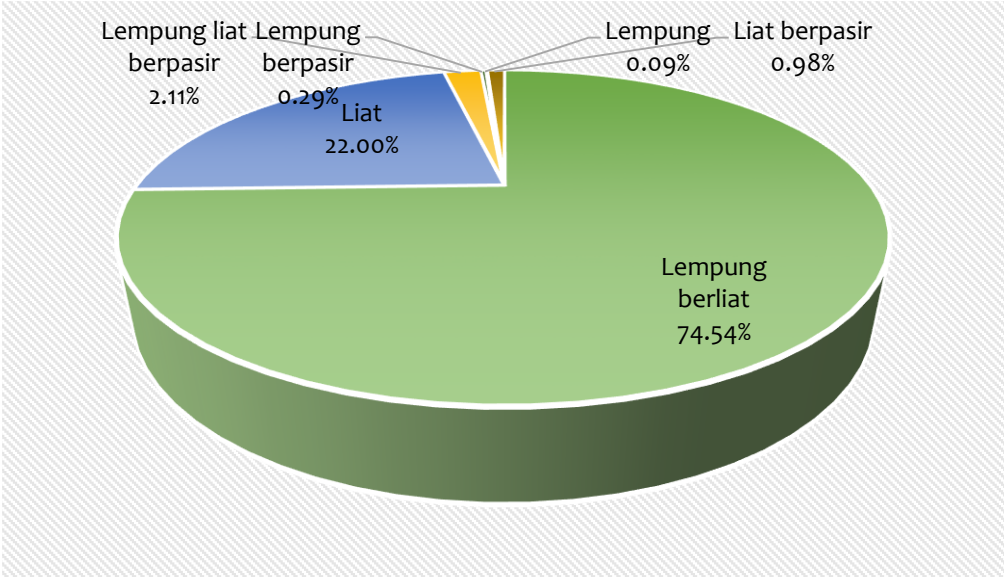

Gambar 2.17 Persentase Luas Wilayah Menurut Tekstur Tanah, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

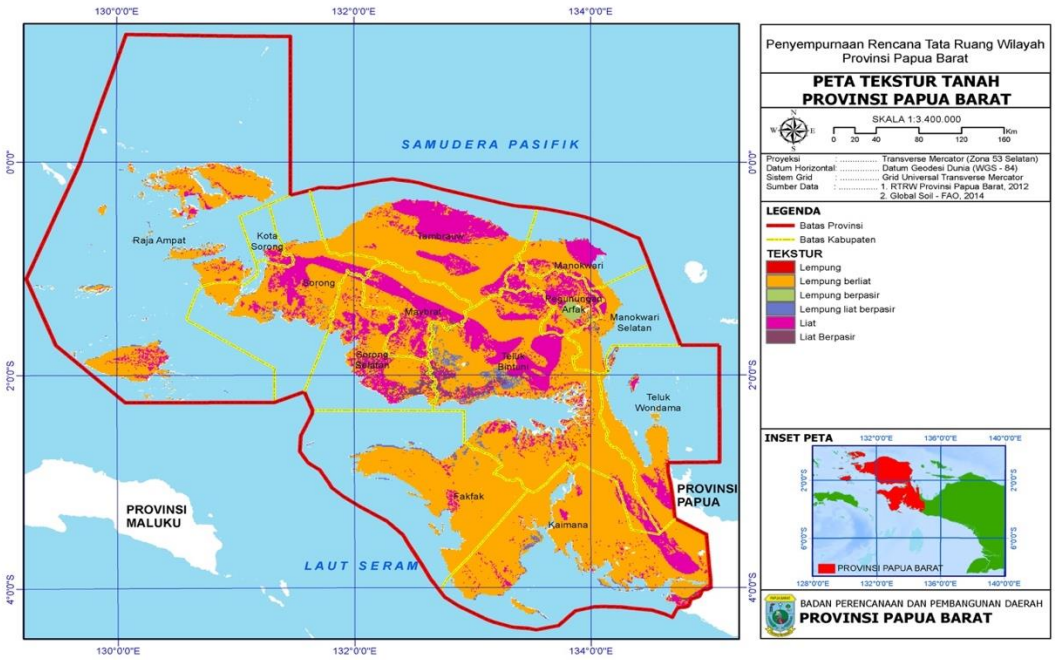

Gambar 2.18 Peta Tekstur Tanah di Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Terdapat 6 jenis tekstur tanah yang tersebar di Provinsi Papua Barat, yaitu lempung berliat, liat, lempung liat berpasir, lempung berpasir, lempung, dan liat berpasir. Lempung berliat dan liat mendominasi tekstur tanah di Provinsi Papua Barat dan tersebar di seluruh Kabupaten/ Kota. Luas tanah dengan tekstur lempung berliat adalah sebesar 72.322,11 km^2 (74,54%), sedangkan tanah dengan tekstur liat adalah seluas 21.346,29 km^2 (22,00%).

Sementara itu, tekstur tanah dengan luasan terkecil adalah tanah lempung dengan luas hanya 83,86 km² (0,09%).

Drainase tanah merupakan salah satu parameter penentu dalam penilaian kualitas/karakteristik lahan. Drainse tanah merupakan cerminan terhadap kondisi tata air baik di dalam tanah maupun di permukaan tanah. Drainase tanah penting diperhatikan sebab drainase tanah mempengaruhi lingkungan perakaran tanaman yaitu keadaan air dan udara tanah. Tanaman pada umumnya tumbuh dan berkembang dengan baik apabila drainase tanah baik, namun demikian ada juga tanaman yang toleran terhadap drainase tanah yang jelek. Tanah dapat mempunyai drainase baik atau jelek tergantung pada kondisi internal dalam tanah seperti tekstur tanah, struktur tanah dan ada tidaknya lapisan kedap dalam tanah serta kemiringan lereng. Secara umum Provinsi Papua Barat didominasi oleh tanah yang memiliki drainase baik dengan luas mencapai 78.866,39 km² (81,29%).

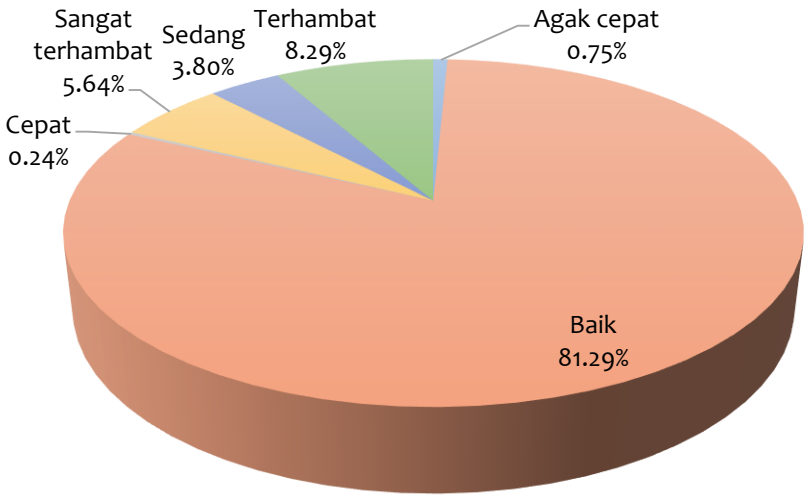

Gambar 2.19 Persentase Luas Wilayah Menurut Drainase Tanah, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Ketersediaan tanah atau lahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Guna Lahan sebagai suatu rencana dasar memberikan gambaran potensi lahan dan arahan bagi kawasan yang dapat dikembangkan/dibudidayakan atau karena limitasinya tidak dapat dikembangkan sama sekali berdasarkan faktor-faktor fisik dasar. Penggunaan lahan

sekarang (eksisting) memberi gambaran sejauh mana jenis dan tingkat pemanfaatan lahan yang telah dilakukan baik yang bersifat budidaya maupun bukan budidaya.

Ketersediaan tanah pada dasarnya tidak dilepaskan dengan status atau penguasaannya sekarang. Status tanah sekarang pada dasarnya sangat menentukan mudah dan dapat tidaknya suatu bidang tanah dikuasai atau dialihkan penguasaannya oleh pihak ketiga untuk kegiatan tertentu. Dalam hal ini, di wilayah Provinsi Papua Barat perlu diperhatikan adanya berbagai jenis status (penguasaan) tanah sebagai berikut:

a. Tanah negara bebas
b. Tanah negara yang dibebani, di dalamnya termasuk:
    - Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan HPHH
    - Hutan Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA)
    - Hutan Suaka Alam (HSA)
    - Hutan Lindung
    - Hutan Produksi
    - Kontrak Karya
    - Kuasa Pertambangan
c. Tanah negara yang telah diperuntukkan
d. Tanah negara yang dikuasai penduduk
e. Tanah negara yang dikuasai instansi
f. Hak Milik Adat
g. Hak Guna Usaha
h. Hak Pakai
i. Hak Pengelolaan
j. Hak Guna Bangunan
k. Hak Milik

Permasalahan yang mencolok adalah sering terjadi ketidaksesuaian antara arahan rencana tata ruang pada suatu lokasi dengan status atau penguasaan tanahnya sekarang terutama untuk tanah negara yang dibebani, yang pada umumnya mencakup areal yang sangat luas seperti HPH, konsesi, kuasa pertambangan kontrak karya. Misalnya pada kasus TGHK yang tumpang tindih dengan kuasa pertambangan atau Hak Penguasaan Hutan (HPH). Hal ini dapat menjadi masalah jika dikaitkan dengan fungsi kawasan yang ingin

dipertahankan (misalnya fungsi hidro-orologis). Pola kepemilikan lahan di Provinsi Papua terdiri atas tanah negara dan tanah ulayat. Tanah hak ulayat merupakan status tanah secara adat dan dikuasai oleh kepala adat atau Ondoafi. Pada dasarnya status tanah dalam hukum adat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Tanah *Milik*, yaitu tanah yang dimiliki oleh perseorangan atau keluarga secara hukum adat sah karena mendapat warisaan dari orang tua, tanah yang diberikan sebagai ganti rugi, dan atau merupakan hasil rampasan perang yang diperoleh pada zaman dahulu.
- Tanah *Milik dengan Hak Pakai*, yaitu tanah milik masyarakat yang diberikan kepada orang luar dengan seizin kepala adat untuk digarap sesuai dengan pejanjian dan dalam batas waktu tertentu.

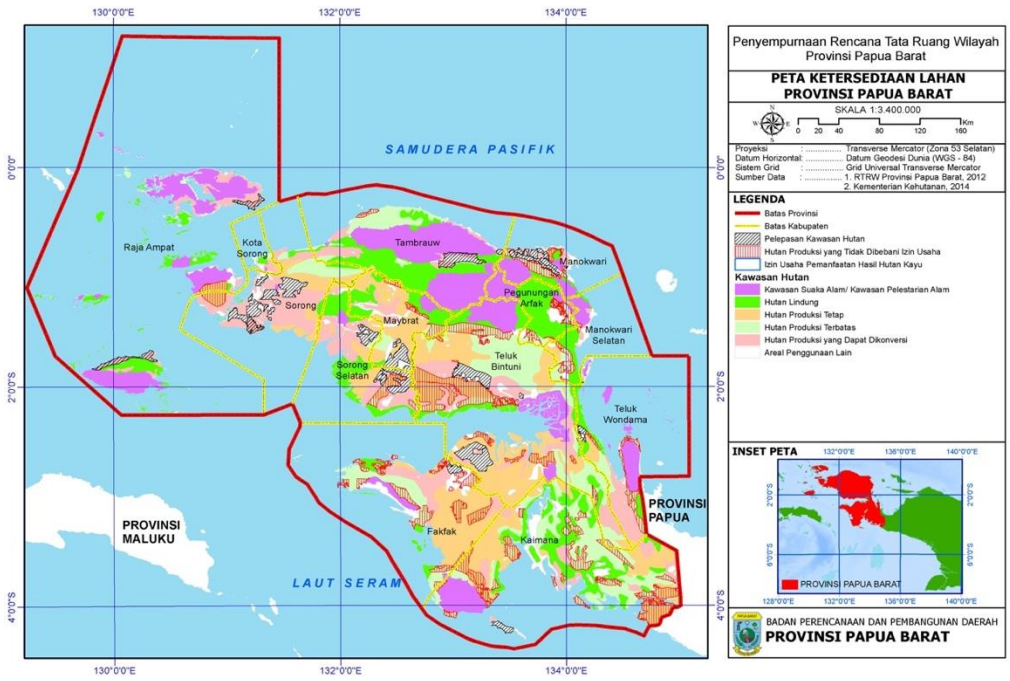

Gambar 2.20 Peta Ketersediaan Lahan di Provinsi Papua Barat, 2014
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Pada umumnya Tanah Milik dan Tanah Milik dengan Hak Pakai tidak dapat diperjualbelikan dan dipindah tangankan dengan bebas pada masyarakat luar. Setiap keluarga akan selalu mempertahankan tanah dan kampung mereka masing-masing karena tanah dan kampung merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat mereka. Hal ini dikarenakan cara hidup masyarakat yang masih berharap dan menggantungkan diri pada

persediaan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Disamping itu juga mengingat besarnya pengorbanan nenek moyang atau leluhur mereka saat memperoleh tanah tersebut pada jaman dahulu. Oleh sebab itu, Tanah Ulayat ini tidak mudah dengan begitu saja untuk dilepas tanpa seizin kepala adat.

Tabel 2.18 Kondisi Penggunaan Lahan di Provinsi Papua Barat, 2014

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Km^2)
1.	Hutan Lahan Kering Primer	71.792,39
2.	Hutan Lahan Kering Sekunder	14.168,92
3.	Hutan Lahan Basah Primer	3.251,11
4.	Hutan Lahan Basah Sekunder	1.627,28
5.	Perkebunan Campuran	425,97
6.	Perkebunan	630,37
7.	Ladang	540,09
8.	Tanaman Campuran	485,96
9.	Permukiman	322,22
10.	Padang Rumput/Alang-Alang	9,66
11.	Semak dan Belukar	2.135,22
12.	Danau	202,23
13.	Lahan Terbuka	1.181,43
14.	Pertambangan	21,19
15.	Rawa	41,63
16.	Rumput Rawa	67,78
17.	Sawah	120,84
Jumlah		**97.024,27**

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Berdasarkan Tabel 2.18, diketahui bahwa sebagian besar lahan di Provinsi Papua Barat didominasi hutan. Jenis hutan dengan luasan tertinggi adalah hutan lahan kering primer yaitu seluas 71.792,39 km^2, diikuti hutan lahan basah primer seluas 14.168,92 km^2, dan hutan lahan basah primer seluas 3.251,11 km^2. Lahan yang digunakan untuk kegiatan di sektor pertanian diantaranya adalah untuk perkebunan campuran seluas 425,97 km^2, perkebunan seluas 630,37 km^2, ladang seluas 540,09 km^2, tanaman campuran seluas 485,96 km^2, dan sawah seluas 120,84 km^2. Tabel 2.18 juga menunjukkan bahwa penggunaan lahan untuk permukiman di Provinsi Papua Barat masih relatif kecil yaitu hanya seluas 322,22 km^2.

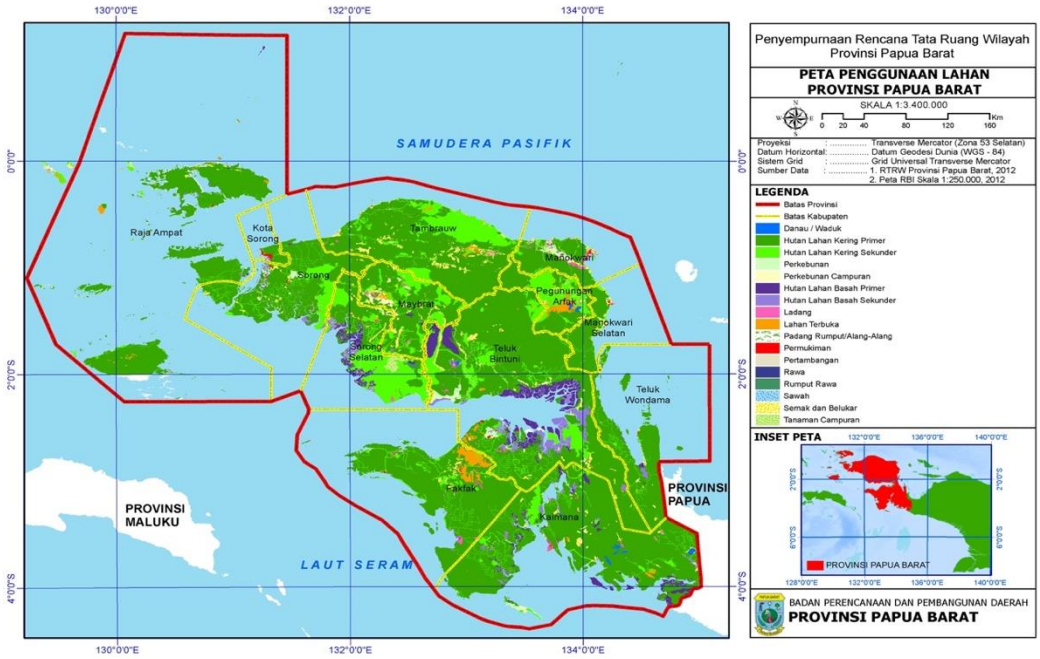

Gambar 2.21 Peta Penggunaan Lahan di Provinsi Papua Barat, 2014
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Berdasarkan data penggunaan lahan pada tahun 2012, luas areal terbangun/permukiman di Provinsi Papua Barat sekitar 32.222 Ha atau 0,3% dari luas wilayah. Kabupaten Sorong, Manokwari dan Kota Sorong merupakan wilayah-wilayah yang memiliki fungsi guna lahan kampung/perumahan yang tertinggi. Wilayah-wilayah tersebut selama ini memang telah tumbuh menjadi sentra-sentra kegiatan perkotaan di Provinsi Papua Barat terutama untuk Kota Sorong. Kota ini merupakan pintu gerbang bagi Provinsi Papua Barat sehingga menjadikan kegiatan jasa, perdagangan dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat perkotaan terkonsentrasi pada wilayah ini. Sementara itu, Manokwari adalah kabupaten yang menjadi ibukota dari Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2013, Kementerian Kehutanan melakukan pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi seluas 1.078,36 Ha yang tersebar di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Sebaran luas lahan permukiman dan pelepasan kawasan hutan untuk permukiman disajikan pada Gambar 2.22 dan Tabel 2.19.

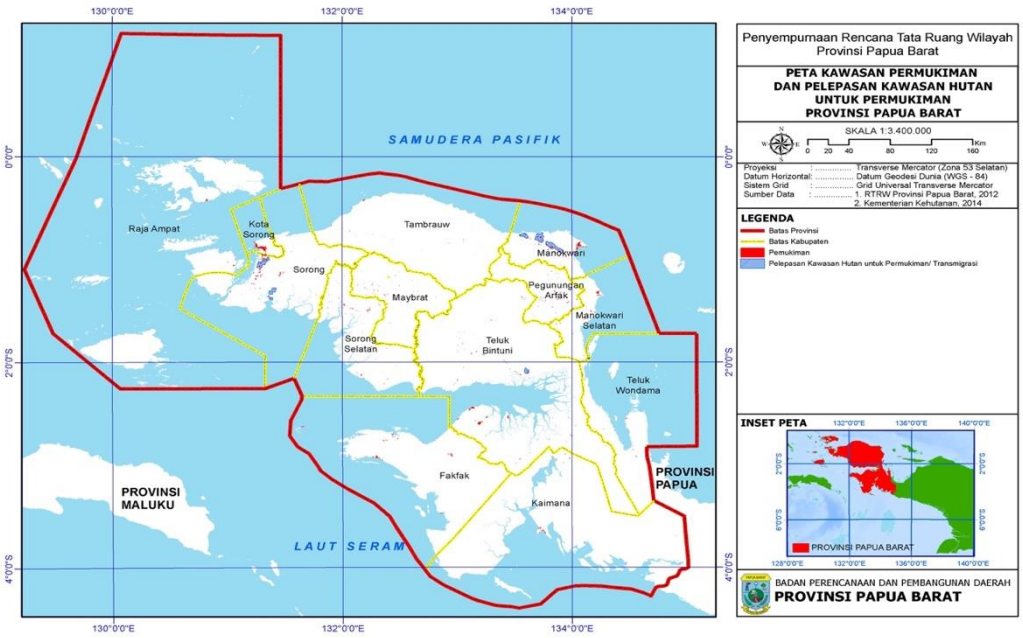

Gambar 2.22 Peta Kawasan Permukiman dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Permukiman di Provinsi Papua Barat, 2014
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Tabel 2.19 Luas Lahan Permukiman di Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota (Ha), 2014

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1.	Fakfak	2.579,05
2.	Kaimana	1.496,69
3.	Teluk Wondama	887,35
4.	Teluk Bintuni	4.764,80
5.	Manokwari	5.211,00
6.	Sorong Selatan	2.051,18
7.	Sorong	4.487,55
8.	Raja Ampat	1.345,44
9.	Tambrauw	576,58
10.	Maybrat	1.178,85
11.	Kota Sorong	3.866,67
12.	Manokwari Selatan	1.975,97
13.	Pegunungan Arfak	1.800,86
Papua Barat		**32.222**

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah, penataan ruang menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat kondisi

geografis, potensi sektor pertanian secara keseluruhan, potensi pariwisata, dan potensi sumberdaya mineral yang luar biasa di Provinsi Papua Barat. Pembangunan Provinsi Papua Barat harus memanfaatkan berbagai sumberdaya potensial yang tersedia dimana nantinya perencanaan pembangunan Provinsi Papua Barat harus lebih menekankan pada sektor-sektor unggulan tersebut.

Hal yang harus diupayakan dalam pengembangan wilayah adalah pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatkan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas mengingat ada beberapa kawasan di Provinsi Papua Barat yang masih tertinggal. Pengembangan dan pemerataan infrastruktur di wilayah ini mutlak diutamakan. Hal ini karena masih rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur dasar di semua wilayah yang akan berdampak pada terbatasnya kemampuan penduduk setempat dalam mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Implementasi pembangunan di Provinsi Papua Barat pada masa mendatang diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Struktur tata ruang eksisting di Provinsi Papua Barat meliputi sistem perkotaan dalam lingkup kabupaten dan sistem jaringan prasarana yang dalam hal ini adalah jaringan jalan. Dalam lingkup sistem perkotaan, fungsi wilayah merupakan indikator tingkat pelayanan wilayah yang menunjukkan seberapa besar peran suatu wilayah dalam mengikat wilayah sekitarnya. Fungsi wilayah yang dimaksud adalah merupakan pusat kegiatan suatu wilayah yang menjadi barometer perkembangan sebuah wilayah.

Sebagai sebuah provinsi yang baru terbentuk, fungsi wilayah eksisting tentu masih berkaitan dengan fungsi wilayah sebelum Provinsi Papua Barat terbentuk. Dalam hal ini, Kota Sorong merupakan simpul kegiatan khususnya yang ada di Provinsi Papua Barat. Hal ini juga terlihat dari transportasi eksisting dimana Kota Sorong memiliki simpul transportasi yang sangat strategis. Selain sebagai gerbang tranportasi Papua Barat, Kota Sorong juga merupakan pusat kegiatan jasa dan perdagangan. Kondisi ini telah ada sejak jaman pendudukan Belanda. Di sekitar Kota Sorong banyak terdapat kegiatan pertambangan di mana pengolahan dan perdagangannya terkonsentrasi di Kota Sorong.

Wilayah yang juga tergolong wilayah dengan tingkat layanan tinggi di Papua Barat adalah Kabupaten Manokwari. Wilayah Kabupaten Manokwari merupakan ibukota dari Papua Barat, sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai ibukota, tentunya memiliki

berbagai jenis layanan yang memadai. Wilayah yang termasuk ke dalam kategori rendah adalah kabupaten-kabupaten baru hasil dari pemekaran wilayah. Sebagai wilayah otonomi baru, fungsi-fungsi layanan yang semestinya ada kemungkinan besar belum berdiri. Secara umum kondisi tata ruang di wilayah perencanaan masih sangat sederhana, sehingga dapat mempermudah pengarahan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan. Pola struktur ruang pada saat ini masih linier yaitu mengikuti pola jaringan jalan utama.

Mendasarkan pada RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033, struktur ruang wilayah Provinsi Papua Barat disusun menjadi 4 SWP (Satuan Wilayah Pengembangan). Pembagian SWP nantinya juga diikuti dengan pengembangan pusat-pusat hierarki dan penyediaan jaringan infrastruktur terutama transportasi. Dengan demikian akan tercipta keterkaitan antar SWP yang terintegratif di wilayah Provinsi Papua Barat. Pembagian Satuan Wilayah Pengembangan untuk Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

1. **SWP 1 meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Wondama (administrasi, industri, pertanian, perikanan tangkap dan budidaya, dan kehutanan), pusat pengembangan di Kabupaten Manokwari.**

Satuan wilayah pembangunan 1 meliputi wilayah–wilayah Provinsi Papua Barat bagian utara, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Wondama, dan sebagian Kabupaten Tambrauw. SWP ini memiliki areal laut yang berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Kepulauan Biak Numfor (Provinsi Papua). Produksi perikanan tangkap di wilayah SWP 1 ini merupakan salah satu yang tertinggi meski masih di bawah wilayah lain seperti Kota Sorong. Kekayaan perairan Teluk Wondama potensial untuk dikembangkan budidaya laut (teripang, dsb). Wilayah SWP 1 ini juga merupakan salah satu wilayah di Papua Barat yang kaya dengan kepemilikan sumberdaya hutan yang melimpah.

Daerah SWP 1 telah memiliki beberapa jenis industri pengolahan. Dari segi unit usaha, jumlah industri yang ada di wilayah ini paling tinggi. Meski demikian, dari jumlah nilai produksi, di bawah wilayah lain seperti Kota Sorong. Hal ini karena jenis industri yang ada di wilayah SWP 1 ini cenderung berupa usaha mikro, kecil, dan menengah. Di Kabupaten Manokwari telah berkembang kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan sangat potensial untuk terus dikembangkan. Komoditas unggulan antara lain padi, kedelai,

jagung dan buah-buahan. Saat ini kebutuhan pangan khususnya beras yang diproduksi di Provinsi Papua Barat belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehingga harus diimpor dari luar daerah. Oleh karena itu upaya peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi mutlak diperlukan dengan sasaran utama pencapaian swasembada. Di dalam wilayah SWP 1 ini terdapat Kabupaten Manokwari yang ditetapkan sebagai ibukota bagi Provinsi Papua Barat sehingga pengembangan SWP 1 akan diarahkan juga pada fungsi administrasi pemerintahan. Selain itu dengan kecenderungan yang telah ada di wilayah ini, SWP 1 juga diarahkan untuk pengembangan industri berskala kecil, perikanan tangkap dan budidaya, pertanian dan kehutanan.

Tabel 2.20 Rencana Pengelolaan Kawasan di SWP I

Kawasan	Rencana Pengelolaan
Kawasan Pengembangan Tanaman Hortikultura Dataran Tinggi Anggi	❖ Membuka akses pengembangan baik dari segi produksi, konsumsi, dan dan distribusi; ❖ Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan tanaman hortikultura; ❖ Mempersiapkan sumberdaya manusia pelaku usaha (petani) untuk pengembangan tanaman hortikultura; ❖ Menciptakan daya dukung masyarakat terhadap penggunaan produk hortikultura daerah;
Kawasan Pengembangan Wisata Bahari Wondama	❖ Penyediaan sistem informasi terpadu tentang kepariwisataan; ❖ Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan pariwisata bahari; ❖ Pengembangan obyek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal; ❖ Peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata bahari;
Kawasan Pengembangan Peternakan Sapi Kebar	❖ Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kawasan; pengembangan peternakan sapi. ❖ Menyediakan infrastruktur industri peternakan melalui penyediaan lahan dan pengairan untuk memproduksi hijauan makanan ternak; ❖ Mengembangkan informasi pasar, baik pasar input maupun pasar output serta menjamin harga produk secara regular;

Kawasan	Rencana Pengelolaan
	❖ Pemetaan potensi padang penggembalaan dan tanaman hijau pakan pada setiap wilayah yang memungkinkan;

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

2. SWP 2 meliputi Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Teluk Bintuni (industri pertambangan dan penggalian, perkebunan, kehutanan, pertanian, industri perikanan, perdagangan dan jasa), pusat pengembangan di Kota Sorong

Wilayah SWP 2 meliputi wilayah–wilayah Provinsi Papua Barat bagian barat laut, yaitu Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten teluk Bintuni, dan sebagian Kabupaten Tambrauw. Wilayah Sorong dikenal sebagai areal pertambangan sejak jaman penjajahan Belanda. Kegiatan pertambangan dan penggalian yang ada di wilayah ini merupakan penghasil tambang terbesar bagi Papua Barat. Usaha pertambangan banyak tersebar di wilayah Kabupaten Sorong dan usaha industri pengolahannya berada di sekitar areal Kota Sorong. Hutan di wilayah SWP 2 terutama di Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Teluk Bintuni sangat luas. Selain kehutanan, perkebunan juga cukup menonjol dibandingkan dengan wilayah lain, misalnya dalam komoditi kelapa dan coklat.

Wilayah SWP 2 juga memiliki potensi tinggi pada kegiatan pertambangan. Di Kabupaten Teluk Bintuni terdapat kegiatan pertambangan besar yang dilakukan oleh LNG Tangguh sejak tahun 2009 dan telah memberikan konstribusi yang cukup tinggi pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Dalam RTRWN, Kabupaten Teluk Bintuni dijadikan sebagai kawasan andalan pengembangan mangrove. Keberadaan Mangrove di Kabupaten Teluk Bintuni yang merupakan bagian wilayah rentan dan harus dilindungi, menjadikan wilayah ini penting dari aspek konservasi. Untuk mencegah aglomerasi di Kabupaten Teluk Bintuni yang dikhawatirkan dapat menurunkan daya dukung lingkungan Kawasan Mangrove Bintuni, maka Pemerintah Provinsi Papua Barat mengupayakan pengelolan kerjasama antar kabupaten, strategi penyebaran dan pemerataan pertumbuhan di pusat-pusat pertumbuhan.

Kawasan Teluk Bintuni kaya akan berbagai potensi Sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, seperti hasil hutan, laut dan migas. Keberadaan ekosistem

Mangrove yang luas dan masih relatif utuh menyebabkan karakter ekosistem Teluk Bintuni rentan secara ekologis sekaligus penting baik dari sisi ekologi maupun ekonomi. Potensi ekonomi Teluk Bintuni telah diketahui sejak lama. Hutan Mangrove Bintuni telah mendukung keberadaan sejumlah industri dam memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar, antara lain dari kayu *chips* dan sektor perikanan. Berbagai potensi tersebut kemudian menarik perhatian investor untuk memanfaatkan sumberdaya alamnya. Investasi tersebut antara lain ditanamkan memanfaatkan minyak dan gas. Berbagai kegiatan ekonomi tersebut telah menyebabkan berbagai tekanan lingkungan pada kawasan Teluk Bintuni. Dalam RTRWN Teluk Bintuni ditetapkan sebagai kawasan andalan, dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan.

Wilayah SWP 2 ini juga dikenal sebagai pintu gerbang atau simpul transportasi di Provinsi Papua Barat. Kota Sorong merupakan pintu gerbang Provinsi Papua Barat (PKN). Berdasarkan fungsi sebagai pintu gerbang, Kota Sorong ditetapkan sebagai kawasan andalan dalam RTRWN. Arus transportasi dari wilayah-wilayah lain (dari arah Indonesia barat) memasuki Provinsi Papua Barat melalui Kota Sorong. Demikian juga sebaliknya, arus dari Provinsi Papua Barat ke wilayah-wilayah lain melalui Kota Sorong, sehingga Kota Sorong merupakan penghubung antara Provinsi Papua Barat dengan provinsi-provinsi lain diseluruh Indonesia dan khususnya dengan wilayah Kawasan Timur Indonesia.

Hal tersebut menjadikan wilayah SWP 2 terutama areal Kota Sorong sebagai daerah dengan kegiatan jasa dan perdagangan yang paling menonjol di Provinsi Papua Barat. Ini tak lepas dari maraknya kegiatan pertambangan di wilayah ini, menjadikan pembangunan sarana perhubungan dilakukan untuk mengangkut hasil tambang ke wilayah lain. Fasilitas pelabuhan baik udara dan laut yang ada di Kota Sorong merupakan yang terbesar. Untuk itu wilayah SWP 2 akan dikembangkan untuk fungsi-fungsi industri, pertambangan dan penggalian, perkebunan, kehutanan, perdagangan dan jasa.

Tabel 2.21 Rencana Pengelolaan Kawasan di SWP II

Kawasan	Rencana Pengelolaan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong	❖ Menggali dan menumbuhkan potensi yang dapat dikembangkan untuk menunjang kawasan ekonomi khusus, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam;

Kawasan	Rencana Pengelolaan
	❖ Menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka mempersiapkan kawasan ekonomi khusus; ❖ Mempersiapkan sumberdaya manusia yang kreatif untuk pengembangan kawasan; ❖ Mempersiapkan kawasan industri yang dapat meningkatkan; perekonomian wilayah dan nasional. ❖ Menciptakan produk dengan memanfaatkan bahan baku lokal sehingga memiliki nilai ekonomi dan daya saing yang tinggi; ❖ Menyediakan dan mempersiapkan sentra-sentra pemasaran produk, baik lokal, nasional maupun internasional; ❖ Memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat lokal dengan bantuan pemberian kredit atau dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar;
Kawasan Andalan Sorong dan sekitarnya	❖ Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan memenuhi pelayanan kebutuhan masyarakat; ❖ Mengembangkan Kota Sorong sebagai Kota Pantai (Water Front City) dengan basis pengembangan kawasan pelabuhan guna mendukung kelancaran perdagangan regional, nasional dan internasional, serta tersedianya *public space*; ❖ Penguatan unit-unit usaha dan lembaga ekonomi masyarakat; ❖ Menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak guna mendorong percepatan pembangunan; ❖ Peningkatan produksi industri yang berbahan baku lokal, perluasan persebaran industri melalui sentra–sentranya serta menumbuhkembangkan usaha dan wirausaha baru industri kecil dan menengah; ❖ Penguatan institusi pasar dilaksanakan melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha yang kompetitif sehingga meningkatkan daya saing daerah; ❖ Peningkatan pemenuhan kebutuhan energi; ❖ Membangun jaringan transportasi yang menghubungkan ke pusat-pusat

Kawasan	Rencana Pengelolaan
	pertumbuhan wilayah (intra dan antar wilayah Provinsi Papua Barat) untuk memperlancar hubungan Sorong dengan kawasan lainnnya; ❖ Pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan limbah perkotaan terpadu;
Kawasan Pengembangan Bioetanol Sorong Selatan	❖ Persiapan lokasi pengembangan bioetanol, baik bahan baku maupun industri; ❖ Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan bioetanol; ❖ Pemberdayaan Masyarakat (petani) pemiliki areal bahan baku; ❖ Menyediakan dan mempersiapkan pasar sebagai sentra penjualan bioetanol (rumah tangga maupun industri); ❖ Membangun minat masyarakat terhadap penggunaan bioetanol sebagai pengganti bahan bakar minyak;
Kawasan Pengembangan Minyak dan Gas Bintuni	❖ Mendata potensi sumber minyak dan gas di sekitar wilayah kawasan; ❖ Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengembangan kawasan;
Kawasan Andalan Teluk Bintuni	❖ Pengembangan model pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan sesuai dengan karakteristik kawasan Teluk Bintuni (misalnya teknik *silvo fishery*); ❖ Pengembangan prasarana dan sarana untuk kegiatan pertanian; ❖ Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan; ❖ Pengembangan transportasi multimoda (darat dan laut); meningkatkan aksesibilitas wilayah; ❖ Pengelolaan lingkungan hidup (Rehabilitasi mangrove, dsb) untuk mencegah menurunnya daya dukung lingkungan; ❖ Pengembangan kapasitas aparat dalam pengelolaan, monitoring dan evaluasi;

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

3. SWP 3 di Kabupaten Raja Ampat (wilayah konservasi, ekowisata (bahari) dan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya)

Wilayah SWP 3 terdiri dari wilayah yang termasuk Kabupaten Raja Ampat. Wilayah ini berupa kepulauan dan terletak di Provinsi Papua Barat paling timur, berbatasan dengan

Kepulauan Maluku. Kepulauan Raja Ampat merupakan kepulauan yang memiliki bentang lahan laut yang sangat khas, terutama dengan kekayaan terumbu karangnya. Daerah ini memiliki jenis-jenis spesies coral yang sangat bervariasi, dari segi jumlah mencapai 75% dari seluruh jenis spesies coral yang ada di dunia. Hal ini menjadikan wilayah Kepulauan Raja Ampat menjadi salah satu wilayah kelautan yang terkaya di dunia.

Selain memiliki kekayaan laut dari segi jenis spesies coral, kawasan ini juga kaya akan berbagai jenis ikan. Saat ini, karena kekayaan lautnya ini, mulai datang wisatawan terutama dari luar negeri. Dengan karakternya yang sangat khas maka pengembangan wilayah SWP 3 diarahkan pada fungsi wilayah konservasi dan budidaya ekowisata bahari. Areal dengan kekayaan seperti Kabupaten Raja Ampat, dari segi lingkungan tak hanya krusial bagi wilayah sekitarnya namun juga untuk dunia. Wilayah ini dikembangkan kegiatan ekowisata, juga akan dikembangkan sebagai areal perikanan tangkap namun tetap harus mengingat pada koridor ekologi dan keberlanjutan.

Tabel 2.22 Rencana Pengelolaan Kawasan di SWP III

Kawasan	Rencana Pengelolaan
Kawasan Pariwisata Bahari Raja Ampat	❖ Membangun sistem informasi dan komunikasi yang memadai; ❖ Meningkatkan ketersediaan sarana publik yang menciptakan pelayanan dan keamanan; ❖ Pengembangan obyek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal; ❖ Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya konservasi ekosistem pesisir dan laut; ❖ Menjaring dan membangun kerjasama dengan pihak luar dalam pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan;
Kawasan Pengembangan Minapolitan Raja Ampat	❖ Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan minapolitan, termasuk lokasi/daerah yang dijadikan pusat pengembangan; ❖ Pengembangan sistem kelembagaan pengembangan kawasan minapolitan; ❖ Penarikan minat investasi untuk mendorong pengembangan kawasan; ❖ Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta;

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

4. SWP 4 meliputi Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana (industri, perikanan tangkap, kehutanan), pusat pengembangan di Kabupaten Fakfak

Kawasan SWP 4 terdiri dari wilayah yang termasuk dalam Kabupaten Fakfak, Kota Fakfak, dan Kabupaten Kaimana. Wilayah ini berada di daerah paling selatan dari Provinsi Papua Barat. Wilayah SWP 4 berhadapan langsung dengan areal perairan Laut Arafura. Di wilayah ini juga terdapat Teluk Triton yang memiliki bentang lahan laut khas dan merupakan daerah kelautan yang kaya. Potensi perikanan yang dimiliki wilayah ini pun tergolong tinggi. Produksi beberapa jenis komoditas ikan seperti kakap putih, tenggiri, dan udang windu yang berasal dari wilayah SWP 4 ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Papua Barat.

Di SWP ini, terdapat kawasan yang sejak lama diidentifikasi sebagai kawasan yang potensial untuk pertanian, perkebunan dan peternakan, yakni Bomberay. Dalam RTRWN, Bomberay (Fakfak) termasuk bagian Kawasan Andalan Fakfak dan sekitarnya. Untuk menunjang pengembangan kawasan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengusulkan pembangunan pelabuhan Kokas yang menjadi pelabuhan *feeder* bagi Pelabuhan utama di Kota Sorong. Sebagaimana wilayah lain di Papua Barat, wilayah SWP 4 ini juga sama seperti SWP 1, kaya akan hutan. Produksi dari kehutanan di wilayah relatif cukup tinggi. Dengan potensi kelautan dan kehutan yang tinggi dapat mendorong pada potensi tumbuhnya kegiatan industri di wilayah SWP 4 ini. Kegiatan industri akan menjadi *forward linkages* dari kegiatan perikanan dan kehutanan yang tumbuh di wilayah ini.Untuk itu maka pengembangan SWP 4 akan diarahkan pada fungsi industri, perikanan, tangkap, dan kehutanan.

Tabel 2.22 Rencana Pengelolaan Kawasan di SWP IV

Kawasan	Rencana Pengelolaan
Kawasan Pengembangan Peternakan Sapi Bomberai	❖ Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kawasan pengembangan peternakan sapi; ❖ Menyediakan infrastruktur industri peternakan melalui penyediaan lahan dan pengairan untuk memproduksi hijauan makanan ternak;

Kawasan	Rencana Pengelolaan
	❖ Mengembangkan informasi pasar, baik pasar input maupun pasar output serta menjamin harga produk secara regular; ❖ Pemetaan potensi padang pengembalaan dan tanaman hijauan pakan pada setiap wilayah yang memungkinkan;
Kawasan Pengembangan Agropolitan Fakfak	❖ Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta Membudidayakan komoditi unggulan yang menjadi rencana pengembangan agropolitan; ❖ Pembangunan sarana dan prasarana agribisnis yang menunjang kawasan agropolitanPenyuluhan dan pendampingan bagi masyarakat; ❖ Penguatan kelembagaan kelompok tani maupun koperasi; ❖ Diversifikasi produk untuk menunjang pengolahan produk sehingga mampu menciptakan nilai tambah; ❖ Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sekitar kawasan;
Kawasan Andalan Fakfak dan sekitarnya	❖ Pembangunan prasarana dan sarana yang menunjang kawasan agropolitan (Pengembangan pelabuhan di Kokas, pengembangan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan outlet, dsb); ❖ Pengembangan sentra pertanian, peternakan, industri dan pertambangan; ❖ Peningkatan akses pasar produk-produk pertanian, peternakan dan perikanan; ❖ Sebagai pusat pengembangan kegiatan budidaya perikanan; ❖ Pusat pengembangan agrobisnis; ❖ Pusat koleksi dan distribusi; ❖ Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta/investor; ❖ Pendampingan pertanian bagi masyarakat;
Kawasan Pengembangan Wisata Bahari Kaimana	❖ Penyediaan sistem informasi terpadu tentang kepariwisataan; ❖ Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan pariwisata bahari; ❖ Pengembangan obyek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal; ❖ Peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata bahari;

Kawasan	Rencana Pengelolaan
	❖ Membangun hubungan kerjasama (kemitraan) dengan pihak luar untuk pengembangan potensi wisata bahari;

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Pembagian setiap kawasan menjadi satu SWP tertentu dilihat berdasarkan hirarki fungsional yang lebih bersifat horizontal. Hal ini dimaksudkan untuk mengupayakan pengembangan ruang yang terdesentralisasi pada sumberdaya alam setempat serta terciptanya keseimbangan pertumbuhan yang proporsional sehingga mendorong terciptanya satuan ruang yang lebih efisien. Struktur ruang yang terbentuk berdasarkan SWP yang ditentukan akan menjadi acuan dalam penentuan kawasan strategis provinsi, dimana setiap kawasan strategis terbagi menurut pusat-pusat hirarki yang sesuai dengan wilayah di Provinsi Papua Barat.

Pola Ruang di Provinsi Papua Barat masih sangat terbatas. Data mengenai lahan antara satu dan yang lainnya kerap menunjukkan perbedaan. Faktor kondisi fisik Provinsi Papua Barat yang berbukit dengan banyak pulau menyebabkan pencatatan penggunaan lahan relatif lebih sulit dilakukan. Terlebih adanya kabupaten-kabupaten bentukan baru menyebabkan pencatatan data penggunaan lahan harus dilakukan ulang. Pola ruang yang ada berdasarkan data masih didominasi oleh hutan, sehingga untuk pengembangan kawasan budidaya masih sangat terbuka. Pola penggunaan lahan masih berpola perkampungan dengan didominasi oleh kebun campuran, hal ini dapat dijadikan potensi pengembangan dengan mengalih fungsikan perkebunan yang kurang produktif menjadi lahan yang dilihat dari sisi ekonomisnya menjadi lebih tinggi.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Karakteristik bencana yang ada di Provinsi Papua Barat adalah gempa bumi dan tsunami, hal ini disebabkan terdapat sejumlah lipatan dan dan sesar naik sebagai akibat dari interaksi (tubrukan) antara kedua lempeng tektonik. Di samping itu bencana longsor, banjir, dan peregerakan tanah juga sering ditemui dibeberapa wilayah di Provinsi Papua Barat. Mendasarkan pada RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033, sebaran kawasan rawan bencana di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23 Sebaran Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Papua Barat, 2017

Kabupaten/Kota	Jenis Bencana
Fakfak	- Rawan gempa - Rawan pergerakan tanah - Rawan banjir - Rawan tsunami
Kaimana	- Rawan longsor (Sebagian wilayah Distrik Kaimana, Distrik Teluk Etna dan Distrik Buruway) - Rawan banjir (Distrik Kaimana dan Distrik Buruway) - Rawan kekeringan (menyebar di masing-masing distrik) - Rawan angin topan (menyebar di masing-masing distrik) - Rawan abrasi (Sepanjang pesisir pantai Kabupaten Kaimana) - Rawan gelombang pasang (Sepanjang pesisir pantai Kabupaten Kaimana)
Manokwari	- Rawan gempa bumi - Rawan tsunami
Maybrat	- Rawan bencana alam geologi - Rawan pergerakan tanah - Rawan gempa
Raja Ampat	- Rawan longsor (Waigeo Utara sampai tengah, Batanta Selatan, Kawasan Salawati Utara dan Kawasan Misool Selatan) - Rawan gelombang pasang dan rawan banjir (Waisai, Waigeo Selatan, Salawati Tengah dan beberapa kawasan di Misool)
Sorong Selatan	- Rawan gempa bumi (Distrik Sawiat, Distrik Seremuk, Distrik Moswaren, Distrik Wayer, Distrik Teminabuan, Distrik Kais, Distrik Inanwatan, Distrik Kokoda dan sebagian kecil wilayah Distrik Seremuk) - Rawan longsor (Distrik Sawiat)
Manokwari Selatan	- Rawan banjir (Kampung Muari, Margomulyo, Masabui, Sidomulyo, Wakwandi (Distrik Oransbari), Wariki, Sabri, Tobo, Ransiki Kota (Distrik Ransiki), Gayabaru, Dembek, Aryawemoho (Distrik Momi Waren), dan Umoisi (Distrik Dataran Isim)
Teluk Wondama	- Rawan longsor (Distrik Windesi,Distrik Rasiei, Distrik Wondiboi, Distrik Wasior dan Distrik Teluk Duairi) - Rawan banjir (Distrik Teluk Duairi,Distrik Wasior, Distrik Wondiboy, Distrik Rasiei, Distrik Naikere dan Distrik Windesi)
Pegunungan Arfak	- Rawan longsor (Distrik Minyambouw) - Rawan banjir (Distrik Minyambouw)
Tambrauw	- Rawan gempa (Distrik Abun, Distrik Miyah, Distrik Abun barat, Distrik Kwoor, Distrik Syujak, Distrik Feef, Distrik Miyah, Distrik Saosapor, Distrik Yembun) - Rawan tsunami (Distrik Sausapor, Distrik Kwoor dan Distrik Abun)
Kota Sorong	- Rawan intrusi air laut (sepanjang pantai Sorong) - Rawan gelombang pasang (sepanjang pantai Sorong) - Rawan banjir
Sorong	- Rawan gempa bumi - Rawan tsunami
Teluk Bintuni	- Rawan banjir - Rawan erosi

Kabupaten/Kota	Jenis Bencana
	- Rawan pergerakan tanah - Rawan gempa

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

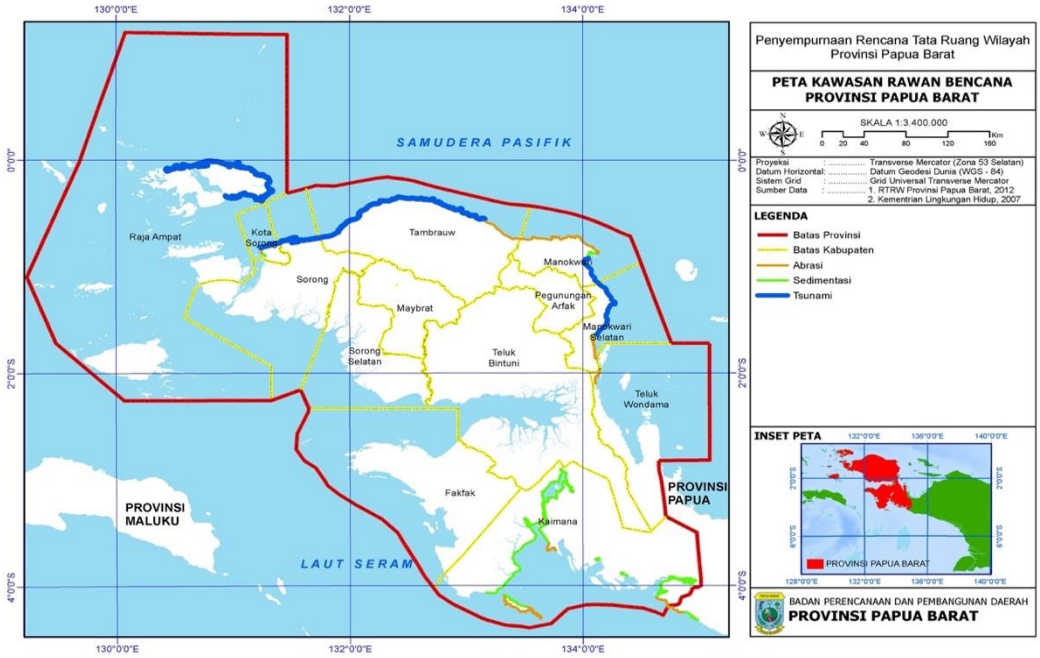

Gambar 2.23 Peta Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2014, Provinsi Papua Barat termasuk provinsi yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori tinggi dengan keseluruhan skor sebesar 154. Dengan kelas risiko bencana yang tinggi, kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih dalam kapasitas sedang dengan skor sebesar 0,46 (BNPB, 2016). Di masa mendatang dengan terbentuknya pemerintahan baru, diharapkan kapasitas daerah dalam penanggulangan semakin optimal dengan peningkatan skor kapasitas daerah dan penurunan nilai indeks risiko bencana. Jika dirinci menurut kabupaten, wilayah dengan kelas risiko tinggi di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Manokwari, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kota Sorong. Kelas risiko sedang berada di Kabupaten Kaimana, Tambrauw, Fakfak, dan Maybrat. Nilai skor dan kelas risiko bencana di Provinsi Papua Barat ditunjukkan pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24 Kelas Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2014

No.	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Risiko	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
1.	Fakfak	105	Sedang	Banjir	22	Tinggi
				Gempa bumi	7	Sedang
				Tsunami	10	Sedang
				Tanah longsor	17	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	20	Tinggi
				Kebakaran lahan dan hutan	17	Tinggi
				Cuaca ekstrim	7	Sedang
				Kekeringan	6	Sedang
2.	Kaimana	122	Sedang	Banjir	36	Tinggi
				Gempa bumi	14	Sedang
				Tsunami	5	Sedang
				Tanah longsor	17	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	20	Tinggi
				Kebakaran lahan dan hutan	17	Tinggi
				Cuaca ekstrim	7	Sedang
				Kekeringan	6	Sedang
3.	Teluk Wondama	147	Tinggi	Banjir	31	Tinggi
				Gempa bumi	22	Tinggi
				Tsunami	19	Tinggi
				Tanah longsor	25	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	17	Tinggi
				Kebakaran lahan dan hutan	17	Tinggi
				Cuaca ekstrim	4	Rendah
				Kekeringan	13	Tinggi
4.	Teluk Bintuni	167	Tinggi	Banjir	36	Tinggi
				Gempa bumi	22	Tinggi
				Tsunami	10	Sedang
				Tanah longsor	24	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	24	Tinggi
				Kebakaran lahan dan hutan	24	Tinggi
				Cuaca ekstrim	4	Rendah
				Kekeringan	24	Tinggi
5.	Manokwari	205	Tinggi	Banjir	22	Tinggi
				Gempa bumi	32	Tinggi
				Tsunami	24	Tinggi

No.	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Risiko	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
				Tanah longsor	24	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	36	Tinggi
				Kebakaran lahan dan hutan	36	Tinggi
				Cuaca ekstrim	7	Sedang
				Kekeringan	24	Tinggi
6.	Sorong Selatan	179	Tinggi	Banjir	36	Tinggi
				Gempa bumi	22	Tinggi
				Tsunami	13	Sedang
				Tanah longsor	36	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	18	Tinggi
				Kebakaran lahan dan hutan	24	Tinggi
				Cuaca ekstrim	7	Sedang
				Kekeringan	24	Tinggi
7.	Sorong	183	Tinggi	Banjir	36	Tinggi
				Gempa bumi	32	Tinggi
				Tsunami	24	Tinggi
				Tanah longsor	24	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	24	Tinggi
				Kebakaran lahan dan hutan	24	Tinggi
				Cuaca ekstrim	7	Sedang
				Kekeringan	12	Sedang
8.	Raja Ampat	201	Tinggi	Banjir	17	Tinggi
				Gempa bumi	32	Tinggi
				Tsunami	14	Sedang
				Tanah longsor	36	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	36	Tinggi
				Kebakaran lahan dan hutan	24	Tinggi
				Cuaca ekstrim	5	Sedang
				Kekeringan	36	Tinggi
9.	Tambrauw	118	Sedang	Banjir	14	Sedang
				Gempa bumi	22	Tinggi
				Tsunami	14	Sedang
				Tanah longsor	17	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	20	Tinggi

No.	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Risiko	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
				Kebakaran lahan dan hutan	7	Tinggi
				Cuaca ekstrim	4	Rendah
				Kekeringan	10	Sedang
10.	Maybrat	88	Sedang	Banjir	12	Sedang
				Gempa bumi	14	Sedang
				Tsunami	-	-
				Tanah longsor	25	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	-	-
				Kebakaran lahan dan hutan	17	Tinggi
				Cuaca ekstrim	7	Sedang
				Kekeringan	13	Sedang
11.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	-
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-
13.	Kota Sorong	183	Tinggi	Banjir	34	Tinggi
				Gempa bumi	32	Tinggi
				Tsunami	16	Sedang
				Tanah longsor	24	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	24	Tinggi
				Kebakaran lahan dan hutan	36	Tinggi
				Cuaca ekstrim	5	Sedang
				Kekeringan	12	Sedang
Papua Barat		**154**	**Tinggi**	-	-	-

Sumber: BNPB, 2014

Pada kasus bencana banjir, wilayah dengan kelas risiko tinggi adalah Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, dan Kota Sorong, sedangkan yang termasuk dalam kelas risiko sedang adalah Kabupaten Tambrauw dan Maybrat (Tabel 2.24). Wilayah dengan skor tertinggi untuk bencana banjir adalah Kabupaten Kaimana, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, dan Sorong. Seperti ditunjukkan pada Tabel 2.23, wilayah rawan banjir di Kabupaten Kaimana adalah Distrik Kaimana dan Buruway. Di Kabupaten Teluk Bintuni, daerah yang berpotensi menjadi kawasan rawan banjir adalah daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan terutama yang berada dekat dengan aliran Sungai Kamundan.

Wilayah Provinsi Papua Barat sangat berpotensi terhadap gempa tektonik dan kemungkinan diikuti oleh tsunami. Wilayah dengan kelas risiko tinggi untuk gempa bumi

adalah Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, dan Kota Sorong, sedangkan Kabupaten Fakfak, Kaimana, dan Maybrat memiliki kelas risiko bencana sedang. Di Provinsi Papua Barat, terdapat sejumlah lipatan dan sesar naik sebagai akibat dari interaksi (tubrukan) antara kedua lempeng tektonik, seperti Sesar Sorong (SFZ), Sesar Ransiki (RFZ), Sesar Lungguru (LFZ) dan Sesar Tarera-Aiduna (TAFZ). Wilayah rawan gempa di Kabupaten Sorong Selatan diantaranya berada di Distrik Sawiat, Seremuk, Moswaren, Wayer, Teminabuan, Kais, Inanwatan, Kokoda dan sebagian kecil wilayah Distrik Seremuk, sedangkan wilayah rawan gempa di Kabupaten Tambrauw adalah Distrik Abun, Miyah, Abun Barat, Kwoor, Syujak, Fef, Miyah, Sausapor, dan Yembun. Sementara itu, wilayah dengan kelas risiko bencana tsunami tinggi adalah Kabupaten Teluk Wondama, Manokwari, dan Sorong.

Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh. Kelas risiko bencana tanah longsor tinggi berada di seluruh kabupaten/kota dengan skor tertinggi ditempati Kabupaten Raja Ampat dan Sorong Selatan yaitu masing-masing sebesar 36.

BNPB (2014) mendefinisikan gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang terjadi karena efek terjadinya siklon tropis yang memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi, disertai hujan deras. Tabel 2.24 menunjukkan bahwa seluruh wilayah kabupaten/kota yang memiliki wilayah laut di Provinsi Papua Barat memiliki kelas risiko tinggi. Dengan sebagian besar wilayah yang berupa kawasan hutan, maka kelas risiko bencana kebakaran lahan dan hutan di seluruh kabupaten/kota termasuk ke dalam kategori tinggi dengan skor tertinggi ditempati Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong dengan skor masing-masing sebesar 36. Bencana kebakaran lahan dan hutan juga dapat terjadi dikarenakan oleh kegiatan budidaya yang dilakukan manusia. Pembukaan lahan hutan untuk kegiatan pertanian juga menjadi salah satu penyebab bencana karena

pembukaan tersebut dilakukan dengan pembakaran untuk meminimalisasi biaya dan hasilnya sangat cepat. Pada kasus bencana kekeringan, kelas risiko tinggi berada di Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, dan Raja Ampat (Tabel 2.24).

Tabel 2.25 Jumlah Paparan Risiko Bencana di Provinsi Papua Barat, 2015

No.	Jenis Bencana	Sosial (Jiwa)	Fisik (Rp Juta)	Ekonomi (Rp Juta)	Lingkungan (ha)
1.	Gempa bumi	576.481	11.079.332	710.213	-
2.	Tsunami	62.573	2.680.884	1.236	8.877
3.	Erupsi gunung api	-	-	-	-
4.	Banjir	447.892	707.978	176.780	705.743
5.	Tanah longsor	144.013	2.176.081	57.696	3.229.221
6.	Kekeringan	807.117	-	36.626	4.744.689
7.	Kebakaran lahan dan hutan	-	-	5.129	3.715.836
8.	Cuaca ekstrim	666.430	58.384	107	-
9.	Gelombang ekstrim dan abrasi	97.092	2.617.878	1.940	45.193
10.	Banjir bandang	55.097	396.349	31.469	129.018

Sumber: BNPB, 2016

BNPB pada tahun 2015 telah melakukan kajian mengenai risiko bencana dengan menggunakan metode indeks kerentanan bencana. Indeks tersebut terdiri dari kerentanan sosial (parameter kepadatan penduduk dan kelompok rentan), kerentanan fisik (parameter rumah, fasilitas umum, dan fasilitas krisis), kerentanan ekonomi (parameter PDRB dan lahan produktif), dan kerentanan lingkungan (parameter hutan lindung, hutan bakau/mangrove, semak belukar, dan rawa). Mendasarkan pada analisis pada kajian tersebut, dampak kerentanan sosial terbesar di Provinsi Papua Barat adalah pada jenis bencana kekeringan yang mencapai 807.117 jiwa, disusul pada cuaca ekstrim sebanyak 666.430 jiwa, dan gempa bumi sebanyak 576.481 jiwa. Dampak kerentanan fisik terbesar di Provinsi Papua Barat diakibatkan oleh bencana gempa bumi yang mencapai Rp 11,01 triliun, disusul tsunami sebesar Rp 2,68 triliun, dan gelombang ekstrim dan abrasi sebesar Rp 2,62 triliun. Dari sisi kerentanan ekonomi, dampak terbesar juga berasal dari bencana gempa bumi yang mencapai Rp 710,21 miliar, diikuti banjir sebesar Rp 176,78 miliar, dan tanah longsor sebesar Rp 57,70 miliar. Terhadap kerentanan lingkungan, dampak terbesar berasal dari bencana kekeringan dengan luasan terdampak mencapai

4.744.689 Ha, diikuti kebakaran lahan dan hutan seluas 3.715.836 Ha, dan tanah longsor seluas 3.229.221 Ha (Tabel 2.25).

Tabel 2.26 Matriks Kajian Risiko Multi Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2015

No.	Kabupaten/ Kota	Jenis Bencana	Sosial (Jiwa)			Fisik (Rp Juta)			Ekonomi (Rp Juta)			Lingkungan (ha)		
			Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1.	Fakfak	Gempa bumi	72,826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tsunami	6,441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Erupsi gunung api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir	1,873	1,440	622	-		9,943	-	464	106	-	55,270	5,388
		Tanah longsor	-	8	32,443	-	195	226,485	-	-	4,049	-	1,671	150,073
		Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kebakaran lahan dan hutan	-	-	-	-	-	-	-	220	102	-	485,122	25,708
		Cuaca ekstrim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gelombang ekstrim dan abrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir bandang	63	483	1,194	-	3,027	17,481	-	71	481	-	920	5,684
2.	Kaimana	Gempa bumi	47,655	2,637	3,022	-	12,770	50,553	-	-	1,211	-	-	-
		Tsunami	4,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Erupsi gunung api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir	8,194	5,240	4,534	-	-	49,141	-	547	329	-	60,978	21,740
		Tanah longsor	460	674	17,580	-	13,774	185,756	-	8	2,514	-	28,274	604,123
		Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kebakaran lahan dan hutan	-	-	-	-	-	-	-	130	56	-	645	14

No.	Kabupaten/ Kota	Jenis Bencana	Sosial (Jiwa)			Fisik (Rp Juta)			Ekonomi (Rp Juta)			Lingkungan (ha)		
			Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
		Cuaca ekstrim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gelombang ekstrim dan abrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir bandang	49	344	806	-	2,011	8,848	-	58	152	-	3,365	19,986
3.	Teluk Wondama	Gempa bumi	5,644	16,258	7,796	-	201,680	75,871	-	2,288	548	-	-	-
		Tsunami	931	1,912	1,280	-	3,964	6,284	-	8	10	-	111	729
		Erupsi gunung api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir	12,811	3,487	479	-	-	1,792	-	203	-	-	15,535	2,564
		Tanah longsor	1,092		5,261	-		77,048	-		892	-	1,673	349,272
		Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kebakaran lahan dan hutan	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	234,210	305
		Cuaca ekstrim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gelombang ekstrim dan abrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir bandang	6	52	224	-	707	4,747	-	53	324	-	2,165	10,030
4.	Teluk Bintuni	Gempa bumi	52,187	6,864	-	-	68,461		-	1,644		-		
		Tsunami	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Erupsi gunung api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir	15,634	16,015	3,586	-	-	67,289	-	23,724	4,760	-	221,244	62,766

No.	Kabupaten/ Kota	Jenis Bencana	Sosial (Jiwa)			Fisik (Rp Juta)			Ekonomi (Rp Juta)			Lingkungan (ha)		
			Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
		Tanah longsor	131	3,948	3,399	-	25,756	75,143	-	300	1,017	-	52,583	308,361
		Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kebakaran lahan dan hutan	-	-	-	-	-	-	-	56,972	104	-	642,919	21,853
		Cuaca ekstrim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gelombang ekstrim dan abrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir bandang	22	300	855	-	3,371	12,701	-	347	1,237	-	1,930	10,157
5.	Manokwari	Gempa bumi	291	37,152	120,708	-	146,326	3,305,886	-	3,508	315,846	-	-	-
		Tsunami	4,026	4,115	14,978	-	7,839	2,246,127	-	28	486	-	17	253
		Erupsi gunung api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir	71,566	22,300	3,554	-	-	25,045	-	74,626	13,873	-	2,648	346
		Tanah longsor		669	20,551	-	7,321	132,695	-	601	10,006	-	1,670	84,363
		Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kebakaran lahan dan hutan	-	-	-	-	-	-	-	82,713	2,519	-	59,395	9,292
		Cuaca ekstrim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gelombang ekstrim dan abrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir bandang	1,723	4,170	7,729	-	13,464	46,467	-	2,542	10,389	-	497	3,990

No.	Kabupaten/ Kota	Jenis Bencana	Sosial (Jiwa)			Fisik (Rp Juta)			Ekonomi (Rp Juta)			Lingkungan (ha)		
			Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
6.	Sorong Selatan	Gempa bumi	39,259	3,641	1	-	98,443	151	-	26,558	243	-	-	-
		Tsunami	115	177	1,161	-	1,251	6,644	-	-	-	-	395	1,890
		Erupsi gunung api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir	16,952	16,150	2,456	-	-	41,511	-	7,442	699	-	103,326	30,967
		Tanah longsor	64	10	554	-	101	28,987	-		3,011	-	68	7,304
		Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kebakaran lahan dan hutan	-	-	-	-	-	-	-	692	-	-	146,040	1,187
		Cuaca ekstrim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gelombang ekstrim dan abrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir bandang	19	201	476	-	3,099	12,338	-	497	2,082	-	575	2,377
7.	Sorong	Gempa bumi	8,753	33,300	264,006	-	375,101	4,005,910	-	129,480	53,335	-		
		Tsunami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Erupsi gunung api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tanah longsor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kebakaran lahan dan hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kabupaten/ Kota	Jenis Bencana	Sosial (Jiwa)			Fisik (Rp Juta)			Ekonomi (Rp Juta)			Lingkungan (ha)		
			Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
		Cuaca ekstrim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gelombang ekstrim dan abrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir bandang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Raja Ampat	Gempa bumi	23,530	10,605	9,881	-	75,457	454,484	-	1,450	527	-	-	-
		Tsunami	1,156	1,270	4,443	-	8,478	284,909	-	-	41	-	219	3,670
		Erupsi gunung api		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir	8,416	5,036	2,573	-	-	24,708	-	438	162	-	20,223	4,053
		Tanah longsor	3,319	3,275	4,725	-	25,473	92,292	-	-	-	-	34,615	226,778
		Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kebakaran lahan dan hutan	-	-	-	-	-	-	-	23	25	-	308	17,715
		Cuaca ekstrim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gelombang ekstrim dan abrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir bandang	23	76	182	-	1,019	5,317	-	20	5	-	2,313	10,701
9.	Tambrauw	Gempa bumi	628	516	12,382	-	23,272	1,011,819	-	261	34,784	-	-	-
		Tsunami	116	73	226	-	708	5,671	-	8	-	-	24	142
		Erupsi gunung api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir	1,648	1,634	147	-	-	5,095	-	2,108	446	-	7,077	1,311

No.	Kabupaten/ Kota	Jenis Bencana	Sosial (Jiwa)			Fisik (Rp Juta)			Ekonomi (Rp Juta)			Lingkungan (ha)		
			Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
		Tanah longsor	-	-	7,593	-		382,307	-		18,842	-	542	872,849
		Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kebakaran lahan dan hutan	-	-	-	-	-	-	-	1,050	15	-	494,387	19,394
		Cuaca ekstrim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gelombang ekstrim dan abrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir bandang	27	108	383	-	3,793	18,895	-	424	1,667	-	2,174	18,491
10.	Maybrat	Gempa bumi	26,936	10,157	278	-	281,516	4,140	-	14,935	122	-	-	-
		Tsunami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Erupsi gunung api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir	8,886	1,855	183	-		2,036	-	1,282	137	-	5,525	1,005
		Tanah longsor	96	17	2,694	-	370	66,535	-	5	1,222	-	71	25,871
		Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kebakaran lahan dan hutan	-	-	-	-	-	-	-	882	-	-	117,438	-
		Cuaca ekstrim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gelombang ekstrim dan abrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir bandang	28	198	505	-	505	9,532	-	102	578	-	623	4,020

No.	Kabupaten/ Kota	Jenis Bencana	Sosial (Jiwa)			Fisik (Rp Juta)			Ekonomi (Rp Juta)			Lingkungan (ha)		
			Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
11.	Manokwari Selatan	Gempa bumi	5,774	9,654	6,380	-	65,938	406,199	-	2,141	116,883	-	-	-
		Tsunami	279	141	723	-	671	7	-	5	555	-	14	245
		Erupsi gunung api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir	5,862	1,827	110	-		3,979	-	23,239	98	-	4,508	290
		Tanah longsor	-	1,295	9,174	-	11,457	127,468	-	2,241	502	-	7,044	123,517
		Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kebakaran lahan dan hutan	-	-	-	-	-	-	-	9,301	1,075	-	83,513	16,355
		Cuaca ekstrim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gelombang ekstrim dan abrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir bandang	80	368	1,170	-	5,021	22,022	-	477	2,142	-	662	4,397
12.	Pegunungan Arfak	Gempa bumi	6,854	11,186	10,057	-	223,179	192,190	-	2,598	1,854	-	-	-
		Tsunami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Erupsi gunung api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir	1,847	1,029	787	-		5,249	-	269	345	-	142	21
		Tanah longsor		4,871	17,425	-	30,297	382,259	-	1,181	3,299	-	3,958	265,421
		Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kebakaran lahan dan hutan	-	-	-	-	-	-	-	249	45	-	121,058	39,457

No.	Kabupaten/ Kota	Jenis Bencana	Sosial (Jiwa)			Fisik (Rp Juta)			Ekonomi (Rp Juta)			Lingkungan (ha)		
			Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
		Cuaca ekstrim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gelombang ekstrim dan abrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir bandang	134	555	1,596	-	4,905	23,639	-	127	937	-	348	6,156
13.	Kota Sorong	Gempa bumi	8,753	33,300	264,006	-	375,101	4,005,910	-	129,480	53,335	-	-	-
		Tsunami	11,034	9,193	22,881	-	18,542	82,717	-	-	96	-	164	1,004
		Erupsi gunung api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir	62,425	89,688	47,046	-		472,188	-	18,593	2,891	-	62,966	15,852
		Tanah longsor	26	308	7,539	-	1,180	283,183	-	33	7,974	-	25	79,095
		Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kebakaran lahan dan hutan	-	-	-	-	-	-	-	94,338	1,188	-	211,785	1,741
		Cuaca ekstrim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gelombang ekstrim dan abrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banjir bandang	1,745	7,352	25,770	-	27,978	143,876	-	1,110	5,644	-	3,061	14,396

Sumber: BNPB, 2016

2.1.4. Kondisi Demografi

Penduduk sebagai aktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Penduduk dibagi atas kelompok–kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian.

Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah sebanyak 871.510 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat selama periode 2010-2015 adalah sebesar 2,67 persen per tahun. Selama periode tersebut, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 2.88 persen, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2015 yang hanya sebesar 2,55 persen. Dengan luas wilayah sebesar 99.671,63 km^2, maka kepadatan penduduk di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 8,74 jiwa per km^2.

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat yang cukup tinggi salah satunya disebabkan oleh banyaknya migrasi penduduk yang masuk ke wilayah Papua Barat (imigrasi) yang biasanya didorong oleh perkembangan kegiatan perekonomian wilayah. Meskipun jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut perlu mendapat perhatian untuk dapat dilakukan pengendalian yang sesuai. Kondisi Provinsi Papua Barat dengan infrastruktur yang masih terbatas akan menyulitkan jika jumlah penduduk meningkat pesat dimana dikhawatirkan kebutuhan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan penunjang kehidupan lainnya tidak mencukupi kebutuhan penduduk. Hal ini pada gilirannya akan mempersulit kehidupan masyarakat Provinsi Papua Barat sendiri. Untuk itu, diperlukan pendidikan keluarga berencana kepada masyarakat Provinsi Papua Barat melalui koordinasi dengan instansi terkait di seluruh kabupaten/kota dengan harapan menekan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang rendah merupakan langkah jangka panjang untuk membentuk SDM yang berkualitas sehingga mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Dengan penduduk yang masih sedikit dan bertambah tidak terlalu pesat, program peningkatan kualitas SDM dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

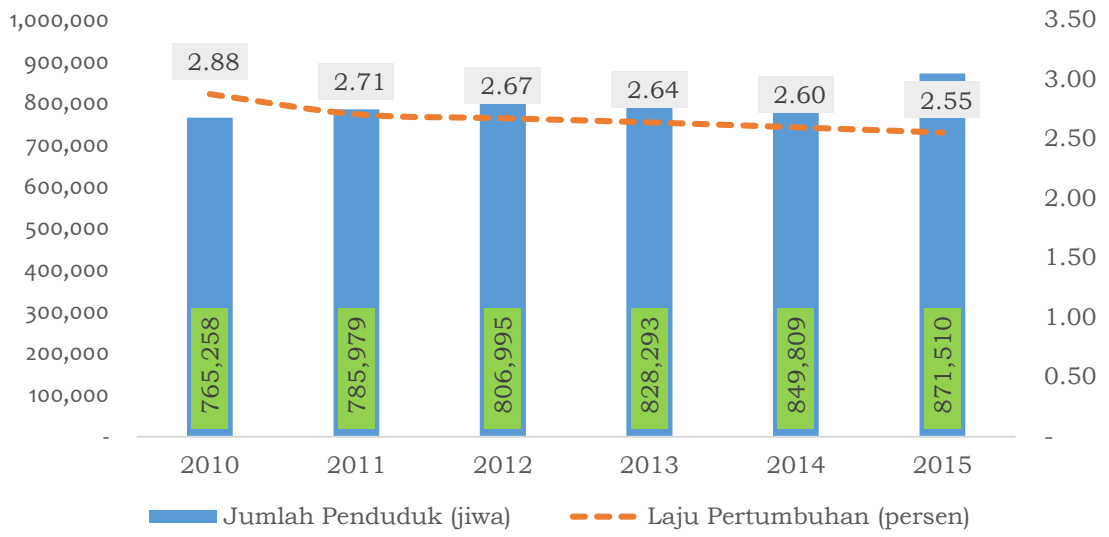

Gambar 2.24 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Papua Barat, 2010-2015
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017 (diolah)

Wilayah yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah Kota Sorong yaitu sebanyak 225.588 jiwa (25,88%), diikuti Kabupaten Manokwari sebanyak 158.326 jiwa (18,17%), dan Kabupaten Sorong sebanyak 80.695 jiwa (9,26%). Sementara itu, tiga kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terendah berturut-turut adalah Kabupaten Tambrauw yaitu sebanyak 13.615 jiwa (1,56%), Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 21.907 jiwa (2,51%), dan Pegunungan Arfak sebanyak 28.271 jiwa (3,24%). Tingginya jumlah penduduk di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari disebabkan kedua wilayah tersebut memiliki sarana transportasi dan aksesibilitas yang paling memadai, infrastruktur yang cukup bagus, memiliki variasi aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, keadaan sosial ekonomi yang lebih baik dibanding kabupaten yang lain. Selama ini, Kota Sorong dikenal sebagai pelabuhan ramai di kawasan Indonesia timur yang menjadi pintu masuk arus barang dan jasa di Provinsi Papua Barat sehingga terjadi arus migrasi penduduk yang tinggi. Sedangkan pada kasus Kabupaten Manokwari, posisinya sebagai ibukota provinsi mendorong peningkatan migrasi penduduk yang didorong meningkatnya administrasi kegiatan pemerintahan.

Jika dilihat dari kepadatan penduduk, wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kota Sorong yaitu sebesar 344 jiwa per km^2, disusul oleh Kabupaten

Manokwari sebesar 50 jiwa per km², dan Kabupaten Sorong sebesar 12 jiwa per km². Sedangkan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terendah diurutkan dari yang paling kecil adalah Kabupaten Tambrauw yaitu sebesar 1,18 jiwa per km², Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 2,84 jiwa per km², dan Kabupaten Kaimana sebesar 3,33 jiwa per km². Dengan kepadatan penduduk yang masih rendah pada beberapa, hal tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak wilayah di beberapa kabupaten yang dapat dikembangkan untuk kegiatan yang mendukung penduduk terutama berkaitan dengan aspek ekonomi.

Tabel 2.27 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per km² Menurut Kabupaten/Kota, 2015

No.	Kabupaten	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km²)	Persentase (%)
1.	Fakfak	73.468	6,66	8,43
2.	Kaimana	54.165	3,33	6,22
3.	Teluk Wondama	29.791	7,52	3,42
4.	Teluk Bintuni	59.196	2,84	6,79
5.	Manokwari	158.326	49,69	18,17
6.	Sorong Selatan	43.036	6,53	4,94
7.	Sorong	80.695	12,33	9,26
8.	Raja Ampat	45.923	5,72	5,27
9.	Tambrauw	13.615	1,18	1,56
10.	Maybrat	37.529	6,87	4,31
11.	Manokwari Selatan	21.907	7,79	2,51
12.	Pegunungan Arfak	28.271	10,19	3,24
13.	Kota Sorong	225.588	343,55	25,88
Papua Barat		**871.510**	**8,74**	**100,00**

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2016

Karakteristik penduduk yang menjadi indikator penting adalah struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk tersebut berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah sebanyak 459.271 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 412.239 jiwa. Rasio jenis kelamin di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 111 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Provinsi Papua Barat terdapat 111 penduduk laki-laki. Pada umumnya, jumlah penduduk laki-laki di beberapa kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan, namun di Kabupaten

Pegununungan Arfak terjadi sebaliknya dimana penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Tabel 2.28 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota, 2015

No.	Kabupaten	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin (L/P)
1.	Fakfak	38.891	34.577	73.468	1,12
2.	Kaimana	29.184	24.981	54.165	1,17
3.	Teluk Wondama	15.970	13.821	29.791	1,16
4.	Teluk Bintuni	32.697	26.499	59.196	1,23
5.	Manokwari	83.980	74.346	158.326	1,13
6.	Sorong Selatan	22.409	20.627	43.036	1,09
7.	Sorong	42.708	37.987	80.695	1,12
8.	Raja Ampat	24.406	21.517	45.923	1,13
9.	Tambrauw	7.021	6.594	13.615	1,06
10.	Maybrat	19.025	18.504	37.529	1,03
11.	Manokwari Selatan	11.386	10.521	21.907	1,08
12.	Pegunungan Arfak	14.076	14.195	28.271	0,99
13.	Kota Sorong	117.518	108.070	225.588	1,09
Papua Barat		**459.271**	**412.239**	**871.510**	**1,11**

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2016

Berdasarkan kelompok umur pada tahun 2015, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat paling banyak berada pada kelompok umur 0- 4 tahun yaitu sebanyak 97.779 jiwa, diikuti kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 92.889 jiwa, dan kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 87.328 jiwa. Terkait dengan struktur penduduk, piramida penduduk Provinsi Papua Barat termasuk dalam kategori *expansive* dimana sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok umur muda. Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan penduduk Provinsi Papua Barat memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua.

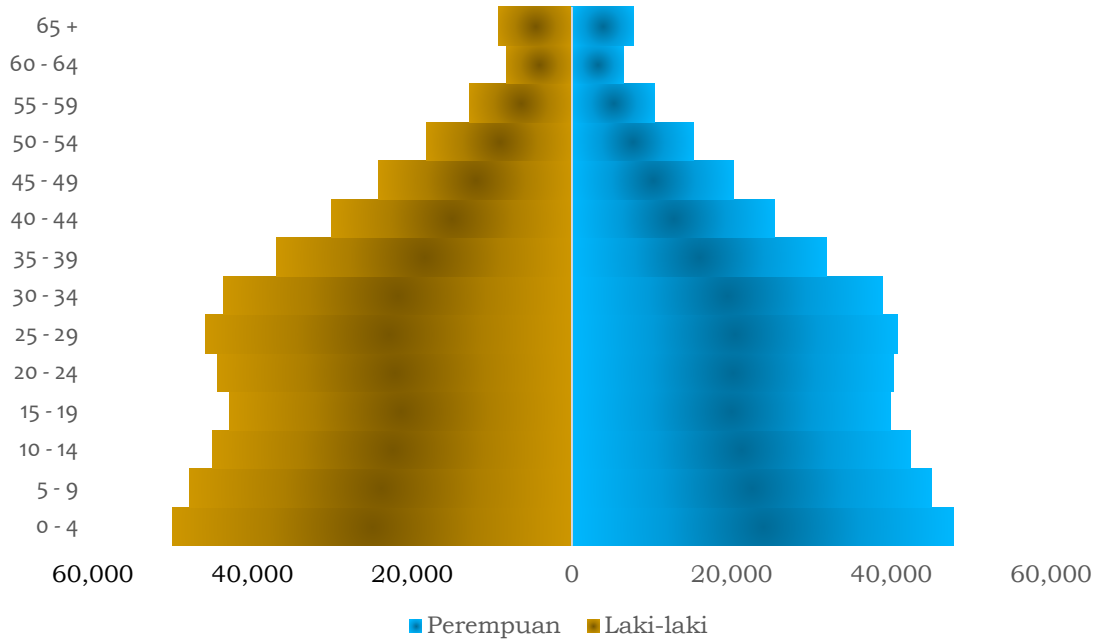

Gambar 2.25 Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat, 2015
Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2016 (diolah)

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Kondisi ini juga sering disebut sebagai *population boom*. Kondisi tersebut pada masa yang akan datang akan memiliki dua implikasi, jika dapat penduduk dekelola dengan baik sehingga menjadi SDM produktif akan sangat potensial untuk menjadi penggerak ekonomi wilayah dan sebaliknya jika tidak dapat terkelola dengan baik maka akan menjadi penyebab berbagai problem ekonomi dan sosial wilayah.

Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal

yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

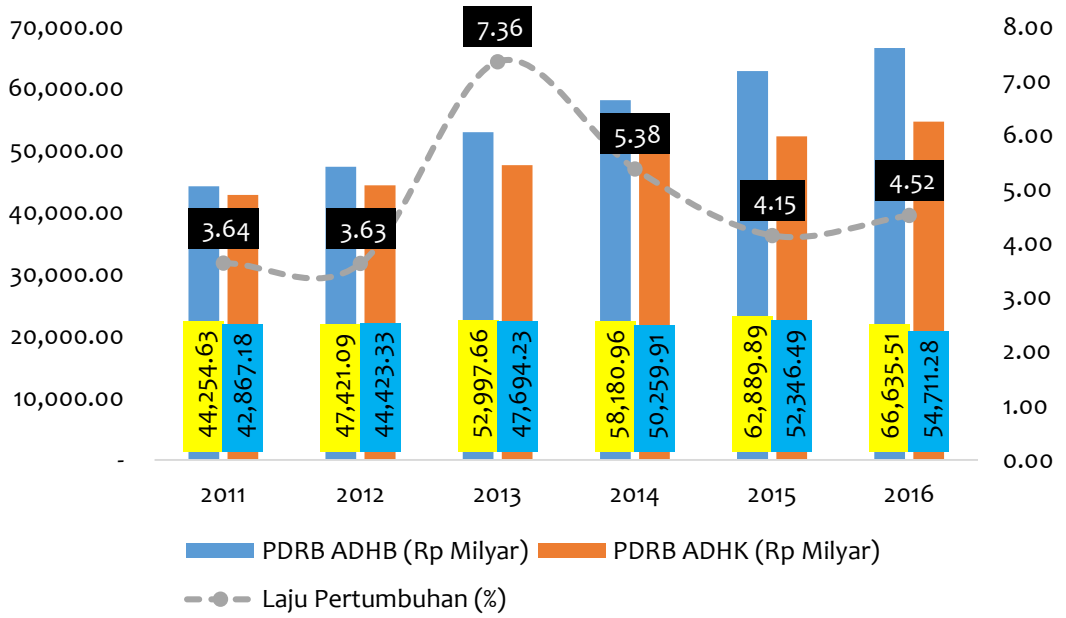

Gambar 2.26 Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB AHK Provinsi Papua Barat, 2011-2016
Sumber: SIPD Papua Barat, 2017 (diolah)

Selama periode 2011-2016, PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Papua Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahun dari Rp 44,25 triliun pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp 66,64 triliun pada tahun 2016. Hal yang sama juga terjadi pada perhitungan PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2011, PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp 42,87 triliun dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp 54,71 triliun. Dengan adanya peningkatan PDRB AHK setiap tahun selama periode 2011-2016, maka perekonomian di Provinsi Papua Barat juga mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat selama periode tersebut adalah sebesar 4,78% per tahun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang tumbuh sebesar 7,36%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011 yang hanya sebesar 3,64%. Pada tahun 2016, merupakan titik balik dimana pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan sedikit peningkatan yaitu 4,52%.

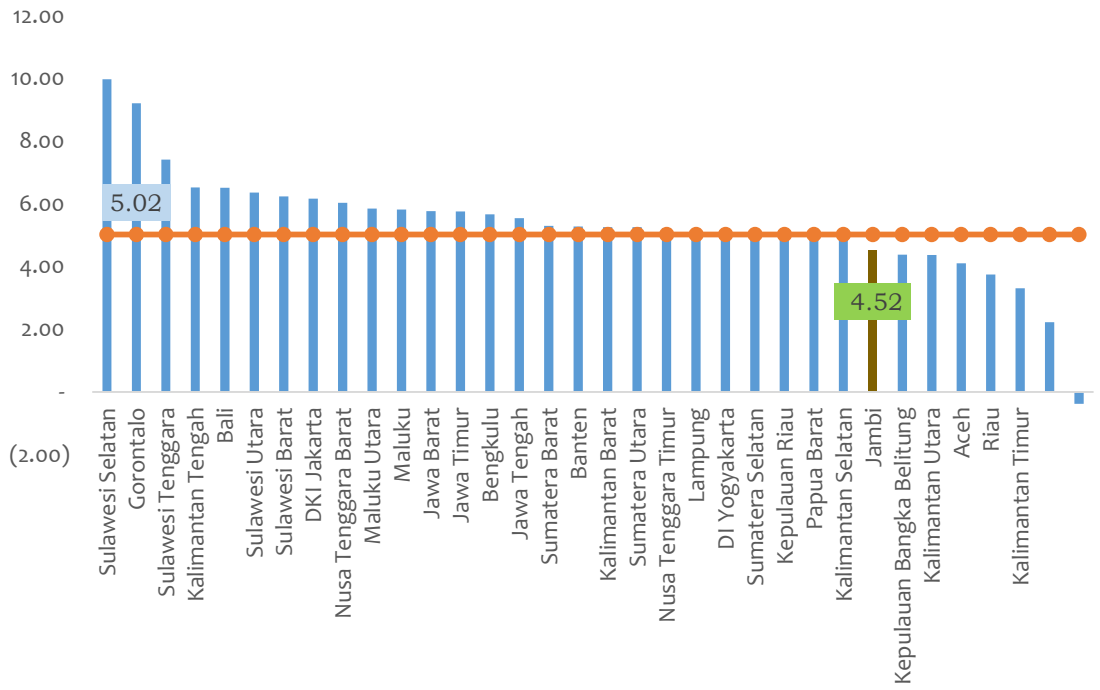

Gambar 2.27 Perbandingan Pertumbuhan Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Lain dan Nasional, 2016
Sumber: BPS, 2016 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat sempat melebihi pertumbuhan nasional pada tahun 2013 dan 2014. Tahun pertama yaitu pada 2013, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat sebesar 7,36%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,56%. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat sebesar 5,38%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain, pertumbuahan ekonomi Provinsi Papua Barat pada tahun 2016 berada pada peringkat 27 dan berselisih jauh dari Provinsi Papua yang berada di peringkat kedua dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 9.21%. Mendasarkan pada sasaran pertumbuhan ekonomi provinsi Papua Barat yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, terlihat bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat belum sesuai dengan target RPJM pada tahun 2015 sebesar 7,9% dan tahun 2016 sebesar 10,3%.

Tabel 2.29 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha (%), 2011-2016

Lapangan Usaha	Tahun						Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(6.27)	4.42	6.37	4.97	2.60	2.10	2.37
Pertambangan dan Penggalian	0.24	(4.07)	1.14	0.88	1.21	0.79	0.03
Industri Pengolahan	4.21	2.89	8.46	3.94	2.12	3.28	4.15
Pengadaan Listrik dan Gas	11.45	12.61	9.23	6.63	(4.89)	4.53	6.59
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.96	5.14	4.81	5.15	5.35	3.32	4.12
Konstruksi	15.75	13.04	15.56	12.45	9.73	9.77	12.72
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.05	5.32	7.57	8.07	6.86	9.06	8.32
Transportasi dan Pergudangan	6.65	13.79	12.83	12.75	8.47	7.98	10.41
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.41	5.22	4.62	5.61	6.76	7.67	5.38
Informasi dan Komuniksi	0.91	16.55	9.34	11.35	7.56	9.77	9.25
Jasa Keuangan dan Asuransi	8.16	16.78	23.66	9.62	9.70	2.47	11.73
Real Estate	7.08	12.76	5.96	9.00	7.59	8.41	8.47
Jasa Perusahaan	1.86	5.19	7.66	7.81	7.16	5.45	5.86
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.54	12.65	9.46	8.23	8.34	8.28	9.42
Jasa Pendidikan	3.27	4.45	10.30	10.03	7.28	6.19	6.92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.78	7.37	0.82	5.76	6.33	6.48	5.76
Jasa Lainnya	3.62	3.41	9.24	6.84	6.36	7.38	6.14
PDRB	**3.64**	**3.63**	**7.36**	**5.38**	**4.15**	**4.52**	**4.78**

Sumber: SIPD Papua Barat, 2017

Jika dirinci menurut lapangan usaha, selama periode 2011-2016, dari 17 lapangan usaha yang ada di Provinsi Papua Barat, semua sektor tersebut memiliki pertumbuhan rata-rata yang positif. Sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut adalah sektor konstruksi yang tumbuh cukup signifikan yaitu sebesar 12,72% per tahun, diikuti oleh sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,73% per tahun, dan sektor

transportasi dan pergudangan sebesar 10,41% per tahun. Hanya ketiga sektor tersebut di Provinsi Papua Barat yang memiliki rata-rata pertumbuhan di atas 10% per tahun. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, terlihat bahwa gejolak pergerakan perekonomian Provinsi Papua Barat masih didominasi oleh sektor migas. Penurunan yang sangat signifikan sempat terjadi selama pertengahan 2012 hingga pertengahan 2013, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat tertinggal jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak lama setelah itu, lonjakan tajam sempat terjadi di akhir tahun 2013, menyebabkan *booming* pertumbuhan ekonomi jauh melebihi pertumbuhan nasional, hingga akhirnya terkoreksi pada periode setelahnya. Selama kurun waktu dua tahun terakhir pergerakan sektor migas terbilang cukup stabil, berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat tanpa migas terbilang relatif stabil, tanpa gejolak yang signifikan, tumbuh seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional.

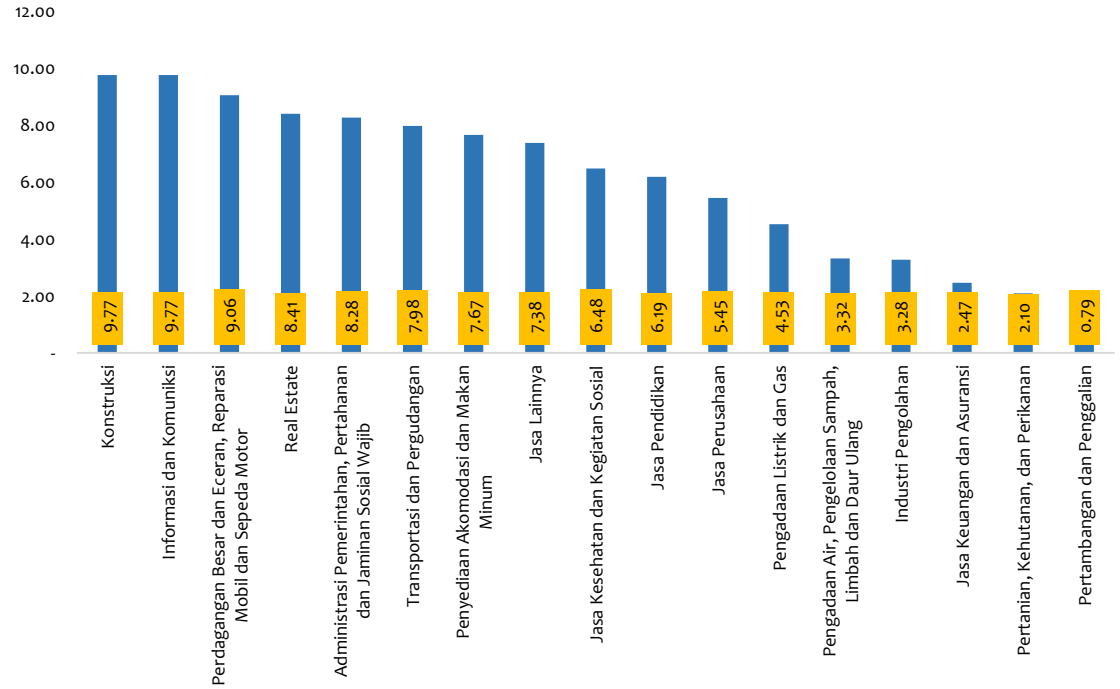

Gambar 2.28 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Menurut Sektor, 2016
Sumber: SIPD Papua Barat, 2017 (diolah)

Pada tahun 2016, sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah sektor konstruksi dan informasi dan komunikasi yang tumbuh masing-masing sebesar 9,77%, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobul dan sepeda motor yang

tumbuh sebesar 9,06%. Sedangkan tiga sektor yang memiliki pertumbuhan terendah pada tahun 2016 dimana pertumbuhannya <3% adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 0,79%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,10%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 2,47%.

2.2.1.2. Struktur Ekonomi

Beragamnya kegiatan perekonomian yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat telah memberikan warna pada struktur perekonomian suatu wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

Tabel 2.30 Konstribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Barat (%), 2011-2016

Lapangan Usaha	Tahun						Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.82	10.69	10.77	10.67	10.78	10.87	10.93
Pertambangan dan Penggalian	27.13	26.24	24.29	22.88	20.77	19.49	23.47
Industri Pengolahan	32.70	32.88	32.64	32.98	30.16	28.72	31.68
Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11
Konstruksi	7.76	8.67	9.46	10.18	12.82	13.94	10.47

Lapangan Usaha	Tahun						Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.99	5.45	5.54	5.55	5.78	6.14	5.58
Transportasi dan Pergudangan	1.78	1.83	2.01	2.11	2.44	2.65	2.14
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.50	0.50	0.51	0.49	0.56	0.59	0.53
Informasi dan Komuniksi	1.41	1.37	1.54	1.57	1.46	1.48	1.47
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.96	1.00	1.13	1.30	1.51	1.59	1.25
Real Estate	0.91	0.94	1.03	1.01	1.11	1.16	1.03
Jasa Perusahaan	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.62	7.00	7.61	7.76	8.98	9.71	7.95
Jasa Pendidikan	2.20	2.19	2.21	2.27	2.39	2.39	2.28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.72	0.74	0.77	0.72	0.72	0.74	0.74
Jasa Lainnya	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.27	0.26
PDRB	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber: SIPD Papua Barat, 2017

Dalam kurun waktu 2011-2016, perekonomian Provinsi Papua Barat didominasi oleh lima kelompok lapangan usaha dominan yang peringkatnya setiap tahun bergantian satu sama lain. Penyumbang PDRB terbesar di Provinsi Papua Barat adalah sektor indutri pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 26,40% per tahun. Subsektor industri pengolahan migas masih mendominasi dibandingkan industri pengolahan non-migas, dengan pemeran utama adalah industri perminyakan di Kabupaten Sorong, dan industri Liquid Natural Gas (LNG) di Kabupaten Teluk Bintuni. Walaupun masih menjadi penyumbang terbesar perekonomian Provinsi Papua Barat, kontribusi sektor industri pengolahan dalam dua tahun terakhir terus mengalami penurunan dari sebesar 32,98% pada tahun 2014 menjadi sebesar 28,72% pada tahun 2016. Penurunan tersebut tentunya disebabkan oleh menurunnya harga minyak dan gas di pasar internasional sehingga hal tersebut tentunya berpengaruh langsung terhadap perekonomian Provinsi Papua Barat mengingat dominannya sektor migas dalam perekonomian.

Kelompok lapangan usaha kedua yang menjadi andalan adalah pertambangan dan penggalian, meskipun kontribusinya terhadap PDRB terus menurun secara berkala. Rata-rata kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam periode 2011-2016 adalah

sebesar 19,13%. Kontribusi tertinggi dari kelompok lapangan usaha ini tercatat pada tahun 2011 sebesar 27,13% dan terus turun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 19,49%. Kelompok lapangan usaha berikutnya yang juga menjadi andalan Provinsi Papua Barat adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan dan konstruksi. Rata-rata kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selama periode 2011-2016 yaitu sebesar 10,93% per tahun. Melihat perkembangannya dalam peridoe tersebut, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah sebesar 11,82%, kemudian turun menjadi 10,69% pada tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2013, kontribusinya mengalami peningkatan menjadi sebesar 10,77%, dan pada tahun 2014 turun kembali menjadi sebesar 10,67%. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, walaupun besaran kontribusinya dilampaui oleh sektor konstruksi, kontribusi sektor pertanian mengalami peningkatan menjadi sebesar 10,87% pada tahun 2016.

Kelompok lapangan usaha lain yang perlu diperhitungkan karena kontribusinya terhadap PDRB yang terus naik setiap tahunnya adalah sektor konstruksi dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Dalam kurun waktu 2011-2016, kontribusi sektor konstruksi terus meningkat dari sebesar 7,76% pada tahun 2011 menjadi sebesar 13,94% pada tahun 2016 dimana sektor konstruksi mulai tahun 2013 menjadi kontributor terbesar ketiga dalam perekonomian menggeser posisi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meningkatnya kontribusi sektor konstruksi di Provinsi Papua Barat salah satunya disebabkan gencarnya pemerintah pusat membangun berbagai infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung konektivitas wilayah. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib juga mengalami peningkatan kontribusi setiap tahun dari sebesar 6,62% pada tahun 2011 menjadi sebesar 9,71% pada tahun 2016.

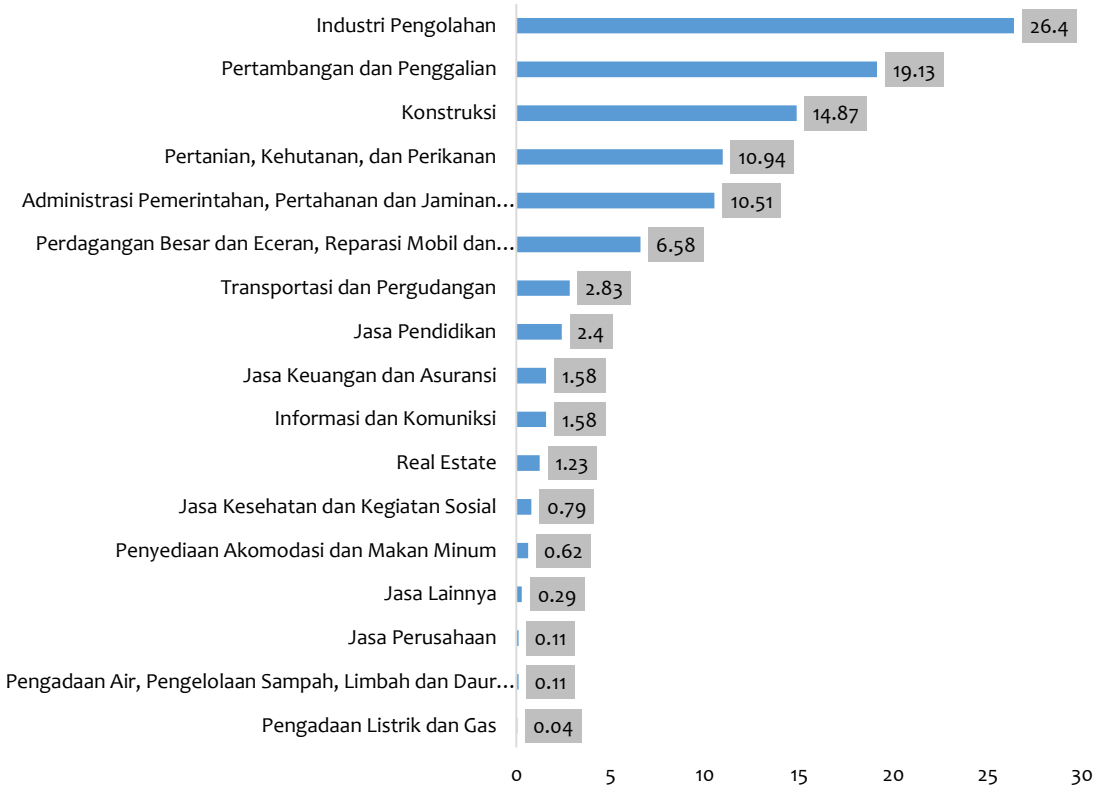

Gambar 2.29 Kontribusi PDRB Menurut Sektor di Provinsi Papua Barat, 2016
Sumber: SIPD Papua Barat, 2017 (diolah)

Apabila ditelusuri kabupaten/kota mana saja di Provinsi Papua Barat yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Propinsi dapat dilihat dalam Tabel 2.31. Terlihat bahwa Kabupaten Teluk Bintuni menyumbang PDRB terbesar dibanding kabupaten/kota lain di Papua Barat, yakni sebesar lebih dari 40% dari total PDRB setiap tahunnya dan naik sebesar 11,8% selama periode 2012 hingga 2015. Kabupaten/kota kedua dengan jumlah kontribusi rata-rata 15% setiap tahunnya adalah Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Disisi lain, Kabupaten Pegunungan Arfak menyumbang kontribusi terkecil dibanding 12 kabupaten/kota lain di Papua Barat, yaitu hanya 0,21% dari total PDRB Provinsi Papua Barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyumbang terbesar PDRB di Provinsi Papua Barat oleh kabupaten/kota setiap tahunnya sama, didominasi oleh Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong.

Tabel 2.31 Perkembangan PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota (Rp Milyar), 2012-2015

No.	Kabupaten	2012	2013	2014	2015
1.	Fakfak	2.085,89	2.205,22	2.172,53	2.819,16
2.	Kaimana	1.273,14	1.371,38	1.447,17	1.501,30
3.	Teluk Wondama	718,56	770,41	811,21	840,21
4.	Teluk Bintuni	20.043,65	21.128,50	21.626,16	22.407,33
5.	Manokwari	4.223,72	4.674,74	5.077,65	5.450,72
6.	Sorong Selatan	838,36	894,93	959,09	1.020,16
7.	Sorong	7.228,14	7.238,66	7.457,20	7.644,01
8.	Raja Ampat	1.827,69	1.916,24	2.036,10	2.083,06
9.	Tambrauw	99,84	105,77	112,40	119,99
10.	Maybrat	312,61	329,02	349,63	369,13
11.	Manokwari Selatan	411,08	433,43	458,76	479,01
12.	Pegunungan Arfak	92,72	96,81	105,45	112,34
13.	Kota Sorong	5.837,36	6.527,73	7.317,72	8.063,48

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Dalam rangka melihat dominasi ada tidaknya transformasi/perubahan struktur ekonomi, tujuh belas lapangan usaha dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Lapangan Usaha Primer

   Lapangan usaha primer yaitu lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

2. Lapangan Usaha Sekunder

   Lapangan usaha sekunder yaitu lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha industri pengolahan; lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta lapangan usaha konstruksi.

3. Lapangan Usaha Tersier

Lapangan usaha tersier yaitu lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Dalam klasifikasi PDRB yang terbaru lapangan usaha tersier terbagi menjadi sebelas lapangan usaha. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha *real estat*; lapangan usaha jasa perusahaan; lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha jasa pendidikan; lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta lapangan usaha jasa lainnya.

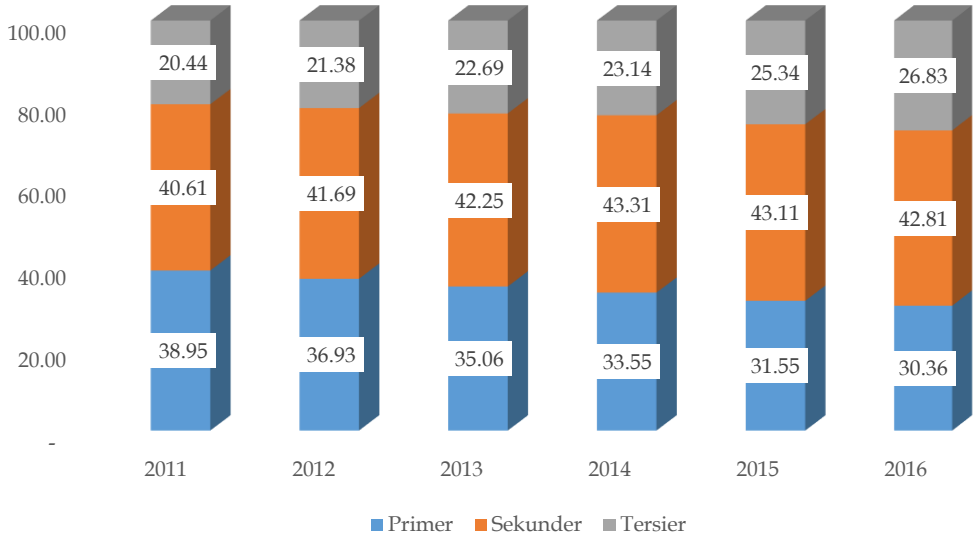

Gambar 2.30 Perkembangan Kontribusi Sektor Primern, Sekunder, dan Tersier di Provinsi Papua Barat, 2011-2016
Sumber: BPS, 2016 (diolah)

Gambar 2.30 menunjukkan bahwa tidak terjadi pergeseran struktur perekonomian di Provinsi Papua Barat selama periode 2011-2016 dimana sektor sekunder tetap mendominasi. Pada tahun 2011, kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Provinsi Papua Barat adalah sebesar 38,95% dan terus mengalami penurunan setiap tahun hingga hanya menjadi sebesar 30,36% pada tahun 2016. Berbeda dengan sektor primer, sektor sekunder dan tersier justru mengalami peningkatan kontribusi setiap tahun. Pada tahun 2011, kontribusi sektor sekunder adalah sebesar 40,61% dan meningkat menjadi 42,81% pada

tahun 2016, sedangkan sektor sekunder meningkat dari sebesar 20,44% pada tahun 2011 menjadi sebesar 26,83% pada tahun 2016.

2.2.1.3. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Menurut Bank Indonesia (2016), inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply* (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

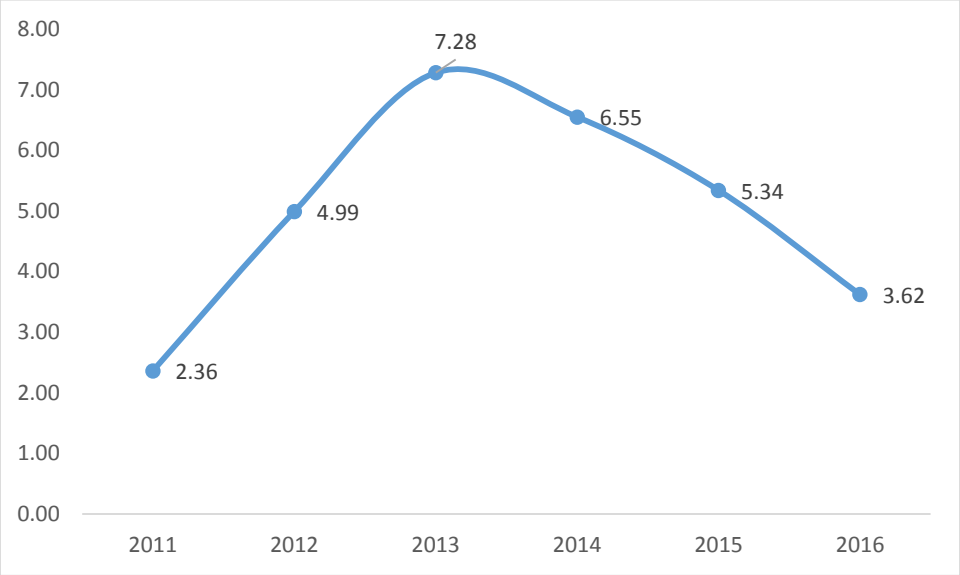

Gambar 2.31 Laju Inflasi di Provinsi Papua Barat, 2011-2016
Sumber: SIPD Papua Barat, 2017 (diolah)

Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh *output* riil yang melebihi *output* potensialnya atau permintaan total (*agregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini

tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

Menurut tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori yaitu inflasi ringan (< 10 persen per tahun), inflasi sedang (10-30 persen per tahun), inflasi berat (30-100 persen per tahun), dan inflasi sangat berat/hiperinflasi (> 100 persen per tahun). Salah satu penyebab inflasi di Provinsi Papua Barat selain faktor ekspektasi inflasi tahunan yang terjadi pada saat menjelang hari keagamaan, juga disebabkan oleh sisi *supply* (*cost push inflation*) dimana terjadi *negative supply shocks* akibat terganggunya distribusi karena infrastruktur jalan yang belum merata di seluruh wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan data BPS Provinsi Papua Barat, inflasi selama periode 2011-2016 di Provinsi Papua Barat masih dapat dikendalikan dan masih berada pada kisaran satu digit. Selama periode 2011-2016, rata-rata laju inflasi di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 5,2% per tahun. Laju inflasi tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2013 yang hampir mencapai dua digit yaitu sebesar 7,28%, sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 yang hanya sebesar 3,62%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kenaikan harga barang dan jasa di Provinsi Papua Barat belum terlalu mengganggu aktivitas perekonomian dan belum menunjukkan adanya gejala penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

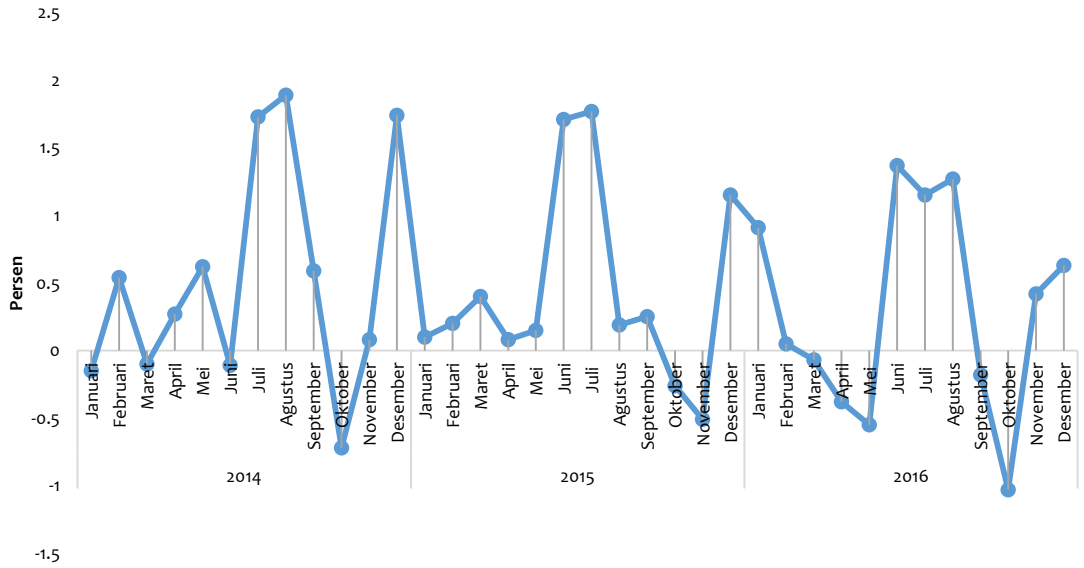

Gambar 2.32 Laju Inflasi Bulanan Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2016
Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional BI, 2017

Gambar 2.32 menunjukkan laju inflasi bulanan yang terjadi di Provinsi Papua Barat selama periode 2014-2016. Secara umum terlihat bahwa terjadi pengulangan tren setiap triwulan di setiap tahunnya walaupun tidak 100% sama. Pada triwulan pertama dan kedua tingkat inflasi terkontrol antara -0,5% hingga 0,5%, walaupun terjadi penyimpangan pada bulan Januari 2017 dimana tingkat inflasi pada bulan tersebut adalah sebesar 0,91%. Memasuki triwulan ketiga, inflasi cenderung tinggi dan mencapai puncaknya pada bulan Juli atau Agustus, yaitu sebesar 1,89% di bulan Agustus 2014 dan 1,77% di bulan Juli 2015. Diprediksi hal tersebut merupakan *seasonal effect* akibat hari raya lebaran yang menyebabkan rata-rata harga barang dan jasa naik. Memasuki awal triwulan keempat terjadi deflasi yang cukup tinggi di ketiga tahun tersebut, dimana tingkat inflasi turun pada level lebih dari -0,5% dan mencapai titik terendah pada Oktober 2016 di level -1,03%. Hingga akhirnya pada bulan Desember tingkat inflasi kembali naik di atas 0,5%.

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose*-COICOP), yaitu: kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan dan olah raga, dan kelompok transportasi dan komunikasi. Apabila laju inflasi dipantau memalui kelompok pengeluaran, terlihat bahwa sektor yang paling dominan mendorong tingkat inflasi di Provinsi Papua barat adalah sektor kesehatan. Berada pada level 5,6% atau

sekitar 1% diatas tingkat inflasi umum di bulan Mei 2016, inflasi pada sektor ini naik hingga 100% (*y-o-y*) sekaligus mencatat level tertinggi dibanding kelompok pengeluaran yang lain. Kelompok pengeluaran yang juga mengalami gejolak yang cukup dramatis selama periode berjalan adalah kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Sempat berkontraksi hingga mencapai titik terendah pada 5,6% dibawah nol, kelompok ini mengalami kenaikan secara cepat selama bulan Juli-Agustus menyentuh level 1,58% dan bertahan pada tingkat yang relatif stabil hingga akhir periode.

Kelompok pegeluaran untuk makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mengalami trend yang menurun hingga 2% pada bulan Mei 2017. Hal yang kontras terjadi pada kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan gas yang mengalami kenaikan dengan besaran dan periode yang sama. Kelompok lain yang mengalami fluktuasi selama periode berjalan adalah kelompok bahan makanan dan transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Keduanya berpotongan di tingkat inflasi yang sama pada akhir periode Mei 2017 pada level hampir menyentuh 4%. Sedangkan kelompok pengeluaran lain, sandang, relatif stabil berada di bawah tingkat inflasi umum di Provinsi Papua Barat. Pengukuran laju inflasi di Provinsi Papua Barat berlokasi di dua tempat, yaitu di Manokwari dan Kota Sorong. Apabila dilihat dari wilayah penyumbangnya, terlihat bahwa penyumbang inflasi terbesar di wilayah Papua Barat adalah Kota Sorong dengan rata-rata tingkat inflasi bulanannya adalah sebesar 0,43% atau 6,63% tahunan. Apabila dilihat dari periodenya, tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 di Kota Sorong sebesar 8,16%, sebaliknya di periode yang sama di Manokwari mengalami tingkat inflasi terendah selama tiga tahun terahir senilai 4,63%. Apabila diamati dari sisi bulan, terlihat bahwa rata-rata inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli hingga Agustus atau berkisar antara 1%-1,5%. Sedangkan rata-rata inflasi terendah terjadi pada bulan Oktober atau rata-rata sebesar -0,58%.

Tabel 2.32 Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong, 2014-2016

Periode	Kabupaten Manokwari			Kota Sorong			Papua Barat		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Januari	-0,07	-0,11	0,32	-0,17	0,17	1,11	-0,15	0,1	0,91
Februari	0,29	0,04	-0,11	0,63	0,26	0,1	0,54	0,2	0,05
Maret	-0,35	0,84	0,13	-0,02	0,27	-0,14	-0,1	0,4	-0,07
April	-0,09	-0,69	-0,17	0,39	0,33	-0,44	0,27	0,08	-0,38
Mei	0,69	0,04	0,64	0,6	0,19	-0,92	0,62	0,15	-0,55
Juni	0,36	1,14	1,77	-0,26	1,9	1,24	-0,11	1,71	1,37

Periode	Kabupaten Manokwari			Kota Sorong			Papua Barat		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Juli	0,91	1,03	1,16	2	2,01	1,15	1,73	1,77	1,15
Agustus	1,82	-1,68	1,27	1,92	0,78	1,27	1,89	0,19	1,27
September	-0,22	0,38	-0,67	0,83	0,21	-0,02	0,59	0,25	-0,18
Oktober	0,41	-0,43	-0,82	-1,08	-0,21	-1,1	-0,72	-0,26	-1,03
November	0,07	0,22	0,93	0,09	-0,74	0,25	0,08	-0,51	0,42
Desember	1,76	2,02	1,18	1,74	0,88	0,45	1,74	1,15	0,63

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

2.2.1.4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *per capita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah. maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.

Tren PDRB per kapita di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 2.33, terlihat bahwa PDRB per kapita Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2012, PDRB per kapita Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp 55,04 juta, kemudian meningkat menjadi Rp 63,98 juta pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi Rp 68,46 juta. Selanjutnya pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi Rp 72,16 juta, dan terus meningkat hingga pada tahun 2016 menjadi Rp 74,87 juta. Namun peningkatan PDRB per kapita ini tidak diiringi dengan peningkatan laju pertumbuhan dari PDRB per kapita itu sendiri. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan PDRB per kapita mencapai 8,89%, kemudian turun menjadi 7% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 lajur pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Papua Barat kembali turun menjadi 5,40% dan pada tahun 2016 pun juga menunjukkan adanya tren penurunan menjadi 3,76%. Peningkatan dari PDRB per kapita Provinsi Papua Barat pada setiap tahunnya merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian di Provinsi Papua Barat. Peningkatan

PDRB per kapita tersebut disebabkan pertumbuhan PDRB ADHB lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.33 PDRB Per Kapita Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Konstan, 2012-2016

Rincian	2012	2013	2014	2015
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp Miliar)	44.423,33	52.997,66	58.180,96	62.889,89
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	807,00	828,29	849,81	871,50
PDRB Per Kapita (Rp Juta)	**55,04**	**63,98**	**68,46**	**72,16**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017 (diolah)

Melihat wilayah yang berkontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni, maka tidak heran apabila PDRB per kapita tertinggi di Provinsi Papua Barat berada di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong. Tingginya PDRB per kapita pada dua wilayah tersebut disebabkan adanya tambang minyak di Kabupaten Sorong dan tambang *Liquid Natural Gas* (LNG) di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan tambang LNG ini diperkirakan memiliki kandungan gas alam cair yang besar dan termasuk tiga produsen LNG terbesar di Indonesia. Kontributor minyak dan gas (migas) terbesar Provinsi Papua Barat adalah pertambangan LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni. Walaupun pada tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Teluk Bintuni sempat menurun, namun kembali naik secara signifikan menjadi Rp 378.527.849,85 pada tahun 2015 dan tetap menjadikan Kabupaten Teluk Bintuni menjadi kabupaten dengan PDRB per kapita tertinggi di Provinsi Papua Barat. Secara keseluruhan PDRB Kota Sorong dan 11 kabupaten lain yang ada di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan, yang artinya peningkatan penduduk di Provinsi Papua Barat juga diiringi dengan peningkatan pendapatannya.

Tabel 2.34 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota (Rp), 2011-2015

No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
1.	Fakfak	30.381.743,84	31.586.100,31	30.095.137,76	38.372.724,18
2.	Kaimana	25.885.748,50	27.288.210,05	27.579.410,36	27.717.332,23
3.	Teluk Wondama	26.162.220,94	27.513.625,28	27.878.637,71	28.203.638,68
4.	Teluk Bintuni	366.559.930,87	379.046.285,70	373.367.028,07	378.527.849,85
5.	Manokwari	29.247.018,85	31.663.929,12	32.908.527,12	34.211.148,21
6.	Sorong Selatan	21.150.606,45	22.141.767,19	22.820.293,61	23.704.977,23
7.	Sorong	97.806.355,79	95.915.385,79	94.884.352,84	94.727.275,54

No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
8.	Raja Ampat	42.171.856,96	43.565.877,71	44.937.186,05	45.359.926,40
9.	Tambrauw	7.580.479,45	15.496.617,87	8.327.798,77	8.813.676,09
10.	Maybrat	9.034.175,23	9.331.911,12	9.552.711,67	9.836.076,10
11.	Manokwari Selatan	20.526.838,69	21.210.276,15	21.556.606,52	21.865.705,03
12.	Pegunungan Arfak	3.583.661,27	3.661.192,89	3.818.728,27	3.973.814,16
13.	Kota Sorong	28.751.755,06	31.361.819,21	33.444.984,21	35.744.311,31

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017 (diolah)

2.2.1.5. Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan Bank Dunia

Pengukuran tingkat pemerataan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu koefisien gini dan tingkat kemerataan pendapatan menurut Bank Dunia. Koefisien gini atau rasio gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan degan kumulatif penduduk. Nilai rasio gini antara 0 hingga 1. Apabila nilai rasio Gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila rasio Gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Rasio Gini dibagi dalam tiga kategori: (a) *Gini Ratio* >0,5 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, (b) *Gini Ratio* 0,3–0,5 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidak merataan sedang, dan (c) *Gini Ratio* <0,3 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidak merataan rendah.

Sedangkan, Bank Dunia menggolongkan penduduk menjadi tiga kelas yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan sedang, 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40% penduduk berpendapatan rendah, kemudian didefinisikan intensitas kemiskinannya dengan kriteria (a) Bila menerima kurang dari 12% dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan tinggi, (b) Bila menerima 12–17% dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan sedang, dan (c) Bila menerima lebih dari 17% dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan rendah.

Tabel 2.35 Angka Gini Rasio menurut Status Wilayah di Provinsi Papua Barat, 2012-2016

Status Wilayah	2012	2013	2014	2015	2016
Perkotaan	0,420	0,391	0,437	0,343	0,326
Pedesaan	0,362	0,388	0,391	0,476	0,376
Papua Barat	**0,425**	**0,431**	**0,439**	**0,440**	**0,373**

Sumber: SIPD Papua Barat, 2017 (diolah)

Tabel 2.35 menunjukkan ukuran ketimpangan dengan pendekatan nilai rasio gini. Jika mengacu pada nilai rasio gini, tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi di Provinsi Papua Barat 2012-2016 masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang pada posisi antara 0,3 hingga 0,5. Pada tahun 2012-2016 tren rasio gini Provinsi Papua Barat menunjukkan tren ke arah peningkatan, yang artinya terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif semakin meningkat di Provinsi Papua Barat. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, pada tahun 2016 terjadi penurunan indeks gini sebesar 0,06 dibandingkan pada tahun 2015. Pada Tabel 2.35, terlihat bahwa pada tahun 2013 terjadi peningkatan indeks gini sebesar 0,06 dari 0,425 menjadi 0,431. Kemudian pada tahun 2014 kembali meningkat sebesar 0,008 menjadi 0,439 dan terus meningkat hingga 0,440 pada tahun 2015, dan terjadi penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,373. Tren indeks gini pun berbeda pada wilayah perkotaan dan pedesaan setiap tahunnya. Pada tahun 2012-2014, gini rasio daerah perkotaan jauh lebih tinggi daripada daerah pedesaan. Sedangkan pada tahun 2015-2016, gini rasio daerah perkotaan lebih rendah daripada daerah pedesaan. Indeks gini Provinsi Papua Barat pada tahun 2012-2015 berada di atas indeks gini nasional. Namun, penurunan indeks gini pada tahun 2016 membuat Provinsi Papua Barat berada di bawah indeks gini nasional, yang artinya tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi di Provinsi Papua Barat lebih baik dibandingkan dengan nasional.

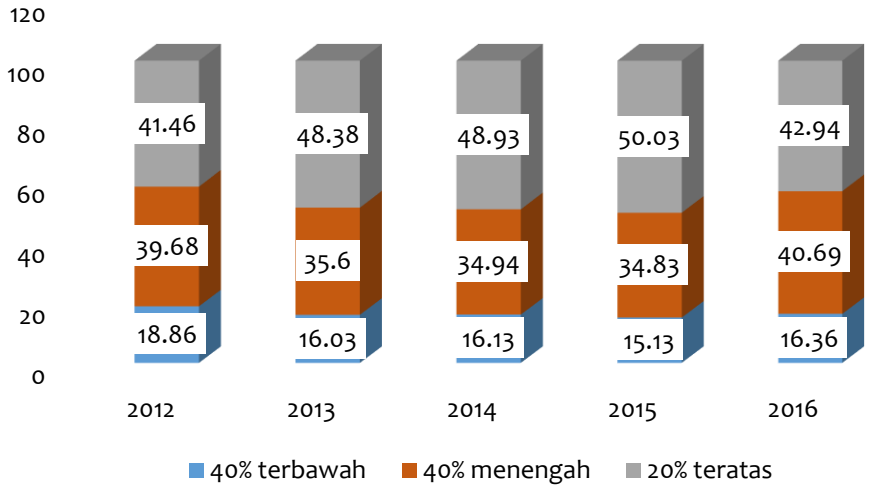

Gambar 2.33 Perkembangan Distribusi Pengeluaran Menurut Bank Dunia Provinsi Papua Barat, 2012-2016
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017 (diolah)

Apabila dilihat dari tingkat pemerataan Bank Dunia, pada tahun 2012 di Provinsi Papua Barat masih dalam ketimpangan kategori rendah. Hal ini dapat dilihat dari proporsi pengeluaran dari kelompok penduduk 40% terbawah terhadap total pengeluaran penduduk masih di atas 17 persen. Namun, sejak tahun 2013 hingga 2016, proporsi pengeluaran penduduk pada kelompok 40% terbawah mulai mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya yang mulai berada di bawah 17%, yang menandai pergeseran ketimpangan pendapatan dari ketimpangan kategori rendah menjadi ketimpangan kategori sedang. Namun pada tahun 2016 terlihat adanya indikasi pengurangan ketimpangan pendapatan.

2.2.1.6. Persentase Penduduk Miskin

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya di Provinsi Papua Barat, namun telah menjadi permasalahan dunia. Penduduk dikatakan termasuk dalam kategori miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Selama periode 2011-2015, garis kemiskinan di Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, garis kemiskinan di Provinsi Papua Barat sebesar Rp318.796, kemudian pada 2012

meningkat menjadi Rp333.485. Pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi Rp363.929, kemudian menjadi Rp 397.662 pada tahun 2014 dan terus meningkat hingga tahun 2015 sebesar Rp 441.569. Rata-rata kenaikan garis kemiskinan tahun 2011-2015 sebesar 9,81 persen.

Tabel 2.36 Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Papua Barat, 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Garis Kemiskinan (Rp/bulan)	318.796	333.485	363.929	397.662	441.569

Sumber: SIPD Papua Barat, 2017

Perkembangan penduduk miskin di Provinsi Papua Barat pun menunjukkan hasil yang menggembirakan. Secara umum angka kemiskinan di Papua Barat pada tahun 2012-2015 menunjukkan tren ke arah penurunan, namun sempat terjadi peningkatan pada tahun 2014 sebesar 0,46% dibandingkan tahun 2013. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2014, angka kemiskinan di Papua kembali menurun menjadi 25,82% pada tahun 2015 dan terus menurun hingga 24,88% pada tahun 2016.

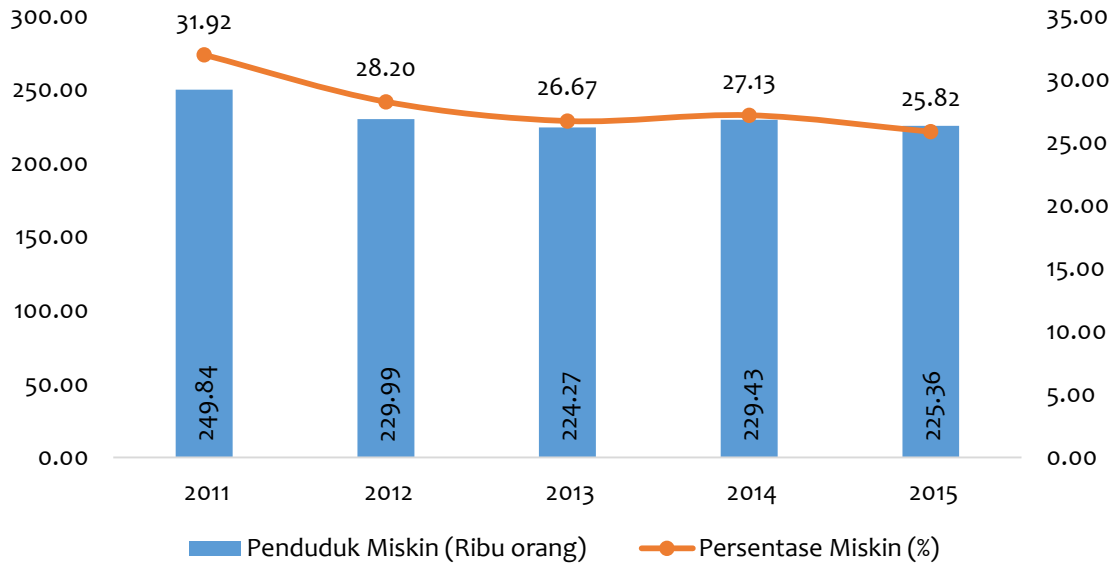

Gambar 2.34 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat, 2011-2015
Sumber: SIPD Papua Barat, 2017 (diolah)

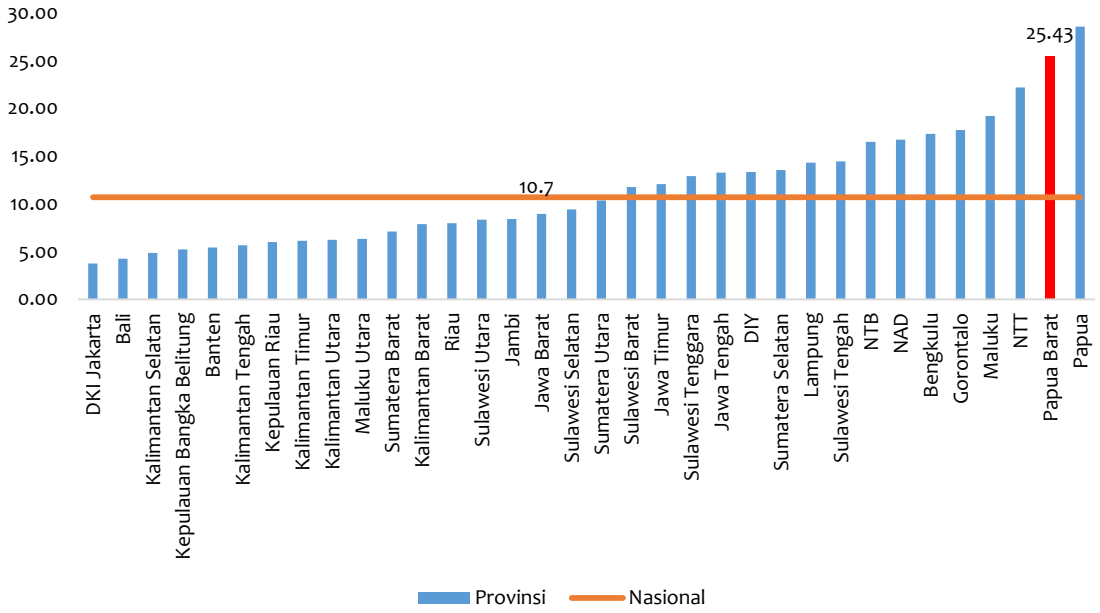

Gambar 2.35 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Provinsi, 2016
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017 (diolah)

Selama periode 2011-2016 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan dari sebanyak 249.84 ribu orang pada tahun 2011 menjadi sebanyak 225.36 ribu orang pada tahun 2015. Walaupun terjadi penurunan persentase penduduk miskin, hal tersebut ternyata tetap menempatkan Provinsi Papua Barat pada posisi kedua setelah Provinsi Papua sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, yang diukur dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap*-P1) dan Indeks Keparahan (*Poverty Severity Index*-P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2011-2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua Barat menunjukkan adanya penurunan dari 8,78 pada tahun 2011 menjadi 6,20 pada tahun 2015. Hal ini menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekat pada garis kemiskinan. Hasil yang cukup menggembirakan terlihat pada tahun 2015, terjadi kenaikan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan menjadi 6,24, yang menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin jauh dari garis kemiskinan. Hasil yang berlawanan ditunjukkan pada Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2011-2014 terjadi penurunan indeks dari 3,43 menjadi 2,65, kemudian turun kembali menjadi 2,16 pada tahun 2013. Pada tahun 2014 kembali turun menjadi 2,05. Penurunan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa keparahan kemiskinan di Provinsi Papua Barat semakin berkurang. Namun, pada tahun 2015 terjadi kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,28 menjadi 2,33, yang menandakan bahwa keparahan kemiskinan di Provinsi Papua Barat memiliki kecenderungan untuk meningkat.

Tabel 2.37 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Papua Barat, 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	8,78	7,23	6,35	6,20	6,24
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	3,43	2,65	2,16	2,05	2,33

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

2.2.1.7. Tindak Pidana yang Tertangani

Berdasarkan Tabel 2.38, angka kriminalitas terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, jumlah tindak pidana di Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 1.825 perkara, kemudian meningkat menjadi 2.262 perkara, selanjutnya turun menjadi 2.039 perkara pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi sebanyak 2.281 perkara. Dari tindak pidana tersebut, jumlah tindak pidana yang diselesaikan oleh kepolisian di wilayah Polda Papua Barat cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, jumlah tindak pidana yang diselesaikan adalah sebanyak 268 perkara (14,68%), kemudian meningkat menjadi 1.619 perkara (71,57%). Dengan jumlah tindak pidana yang turun, jumlah perkara yang diselesaikan juga mengalami penurunan menjadi sebanyak 1.476 pekara (72,39%). Pada tahun 2015, persentase tindak pidana yang diselesaikan sebanyak 551 perkara (24,16%).

Dengan meningkatnya jumlah tindak pidana, pemerintah perlu bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk terus menggalakkan keamanan dan terus melakukan sosialisasi untuk pencegahan tindak kejahatan.

Tabel 2.38 Jumlah Tindak Pidana dan Perkara Pidana yang Diselesaikan di Provinsi Papua Barat, 2011-2015

Tahun	Perkara Pidana	Perkara Pidana Diselesaikan	Persentase (%)
2012	1,825	268	14.68
2013	2,262	1,619	71.57
2014	2,039	1,476	72.39
2015	2,281	551	24.16

Sumber: Papua Barat Dalam Angka, 2016 (diolah)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pendidikan adalah berkurangnya penduduk yang buta huruf. Angka melek huruf (*literacy rate*) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Selama periode 2009-2013, perkembangan penduduk yang melek huruf menunjukkan hasil yang menggemberikan dengan adanya persentase peningkatan penduduk yang melek huruf dari 92,34% pada tahun 2009 menjadi 94,14% pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat sekitar 5,86% penduduk Provinsi Papua Barat yang berumur 15 tahun ke atas yang masih masih belum/tidak dapat membaca dan menulis.

Tabel 2.39 Tabel Angka Melek Huruf menurut Kabupaten Kota, 2009-2013

No.	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Fakfak	97,18	97,46	98,13	98,47	99,12
2.	Kaimana	95,49	95,50	96,91	96,99	97,49
3.	Teluk Wondama	83,13	84,05	84,18	85,12	85,79
4.	Teluk Bintuni	82,98	85,90	87,05	87,38	87,41
5.	Manokwari	85,67	87,79	88,77	89,03	89,98
6.	Sorong Selatan	88,20	88,32	88,43	88,45	88,56
7.	Sorong	91,40	91,69	91,76	91,84	92,09
8.	Raja Ampat	92,77	93,62	94,13	94,34	94,86
9.	Tambrauw	76,38	77,15	77,33	77,38	77,72
10.	Maybrat	89,80	90,73	90,87	91,22	91,41
11.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	77,45
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	74,89
13.	Kota Sorong	99,12	99,13	99,14	99,69	99,71
Papua Barat		**92,34**	**93,19**	**93,39**	**93,74**	**94,14**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2014

Apabila dirinci menurut kabupaten/kota, pada tahun 2013 persentase melek huruf terbesar berada di Kota Sorong sebesar 99,71% dan terendah berada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Terlihat pada tabel di atas bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk yang melek huruf di setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Sedangkan penduduk yang buta huruf diduga didominasi oleh kelompok tersulit dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun ke atas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan faktor eksternal seperti terbatasnya ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka.

2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). RLS pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Pada penghitungan metode baru menurut BPS, RLS adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh

suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Rata-rata lama sekolah sangat dipengaruhi oleh partisipasi sekolah untuk semua kelompok umur, sehingga bila angka partisipasi sekolah di Papua Barat rendah maka kemungkinan besar rata-rata lama sekolahnya juga akan rendah.

Angka rata-rata lama sekolah di Papua Barat mengalami tren positif atau meningkat dari tahun ke tahun, walaupun peningkatan ini relatif lambat. Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah Provinsi Papua Barat sebesar 6,82 tahun, kemudian meningkat sebesar 6,87 tahun pada tahun 2012, kembali meningkat pada tahun 2013 sebesar 6,91 tahun. Peningkatan pun terus terjadi pada tahun 2014 sebesar 6,96 tahun, tahun 2015 sebesar 7,01 tahun dan pada tahun 2016 sebesar 7,06 tahun, yang artinya rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP.

Tabel 2.40 Rerata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (tahun), 2011-2016

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fakfak	7,95	7,96	7,97	8,09	8,12	8,22
Kaimana	6,91	7,13	7,36	7,61	7,65	7,83
Teluk Wondama	6,33	6,36	6,43	6,50	6,52	6,57
Teluk Bintuni	6,84	6,98	7,28	7,44	7,45	7,57
Manokwari	7,37	7,47	7,58	7,70	7,75	7,85
Sorong Selatan	6,39	6,50	6,64	6,75	6,84	6,95
Sorong	6,51	6,79	7,06	7,14	7,46	7,57
Raja Ampat	6,52	6,58	7,16	7,32	7,39	7,53
Tambrauw	4,15	4,27	4,40	4,53	4,61	4,70
Maybrat	5,89	5,91	5,92	5,96	6,22	6,33
Manokwari Selatan	-	-	6,12	6,20	6,21	6,32
Pegunungan Arfak	-	-	4,79	4,85	4,86	4,90
Kota Sorong	10,36	10,59	10,82	10,86	10,87	10,91
Papua Barat	**6,82**	**6,87**	**6,91**	**6,96**	**7,01**	**7,06**

Sumber: BPS, 2017 (diolah)

Pada tahun 2011-2016 Kota Sorong menjadi kota dengan rata-rata lama sekolah tertinggi sebesar 10,36 tahun pada tahun 2011, 10,59 tahun pada tahun 2012, 10,82 tahun pada tahun 2013, 10,86 tahun pada tahun 2014, 10,87 tahun pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 sebesar 10,91 tahun. Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah Kota Sorong melebihi rata-rata lama sekolah provinsi sebesar 3,85 tahun. Sedangkan rata-rata lama

sekolah terendah berada di Kabupaten Tambrauw sebesar 4,15 tahun pada tahun 2011, 4,27 tahun pada tahun 2012, 4,40 tahun pada tahun 2013, 4,53 tahun pada tahun 2014, 4,61 tahun pada tahun 2015, dan 4,70 tahun pada tahun 2016.

Peningkatan angka rata-rata lama sekolah ini merupakan kabar baik bagi pemerintah, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Kesadaran ini pun perlu ditingkatkan kembali melihat bahwa pertumbuhan RLS di Provinsi Papua Barat yang bergerak secara pelan, dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan formal dan terus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya.

2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Peningkatan APK menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan.

Tabel 2.41 Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Papua Barat (%), 2010-2014

Uraian		2010	2011	2012	2013	2014
1.	SD/MI	115,00	104,57	105,21	105,27	109,35
2.	SMP/MTs	66,68	87,63	90,95	87,71	87,86
3.	SMA/MA	72,07	66,74	70,48	73,15	83,11
4.	Perguruan Tinggi	16,80	23,21	25,99	32,34	34,97

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

APK untuk jenjang pendidikan SD selama periode 2010-2014 memiliki tren yang cenderung meningkat, walaupun pada tahun 2011 sempat menurun mencapai 104,57% dari

tahun 2010 sebesar 115%. Namun pada tahun 2012 kembali meningkat sebesar 105,21% hingga pada tahun 2014 mencapai 109,35%. Hal tersebut berarti terdapat penduduk di luar usia sekolah SD (7-12 tahun) yang masih bersekolah SD dimana terlihat dari angka APK SD yang nilainya lebih besar dari 100%. Untuk jenjang pendidikan SMP selama periode 2010-2014 memiliki tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010-2012 mengalami peningkatan dari 66,68% menjadi 90,95%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 87,71% dan kembali meningkat menjadi 87,86% pada tahun 2014, yang artinya persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMP berapapun usianya di antara penduduk berumur 13-15 tahun hanya sebesar 87,86%.

Kemudian untuk APK jenjang SMA selama periode 2010-2014 memiliki tren yang cenderung meningkat, walaupun pada tahun 2011 sempat megalami penurunan menjadi 66,74% dibandingkan tahun 2010 sebesar 72,07%. Namun kembali meningkat hingga sebesar 83,11% pada tahun 2014, yang artinya persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMA berapapun usianya di antara penduduk berumur 16-18 tahun sebesar 73,18%. Sedangakan untuk APK jenjang perguruan tinggi selama periode 2010-2014 memiliki tren positif atau meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 APK jenjang perguruan tinggi sebesar 16,8% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 34,97%, yang artinya persentase penduduk yang sedang bersekolah di Perguruan Tinggi penduduk di atas usia 18 tahun sebesar 34,97%. Pada tahun 2014 APK tertinggi berada di jenjang SD sebesar 109,35% dan APK terendah berada di jenjang perguruan tinggi. Hal ini mengindikasikan banyakna anak di Provinsi Papua Barat yang tidak meneruskan pendidikannya hingga perguruan tinggi.

Tabel 2.42 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (%), 2014

Kabupaten/Kota	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Perguruan Tinggi
Fakfak	106,51	92,77	102,14	30,50
Kaimana	116,77	80,93	88,25	6,06
Teluk Wondama	121,08	78,77	58,14	20,41
Teluk Bintuni	112,52	81,29	69,78	8,17
Manokwari	104,51	83,56	77,00	56,09
Sorong Selatan	102,50	93,90	82,23	26,79
Sorong	107,41	85,09	98,03	27,05
Raja Ampat	119,03	72,69	71,56	2,82
Tambrauw	108,74	86,81	57,00	0,71

Kabupaten/Kota	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Perguruan Tinggi
Maybrat	112,39	107,35	80,81	8,75
Kota Sorong	110,63	94,49	88,50	42,16
Papua Barat	**109,36**	**87,86**	**83,12**	**34,98**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Apabila dilihat menurut kabupaten/kota pada tahun 2014, APK untuk jenjang SD tertinggi berada di Kabupaten Teluk Wondama sebesar 121,08% dan terendah berada di Kabupaten Sorong Selatan sebesar 102,50%. Untuk APK jenjang SMP tertinggi berada di Kabupaten Maybrat sebesar 107,35% dan terendah berada di Kabupaten Raja Ampat sebesar 72,69%. Sedangkan APK untuk jenjang SMA tertinggi berada di Kabupaten Fakfak sebesar 102,14% dan terendah berada di Kabupaten Tambrauw sebesar 57%. Kemudian APK jenjang perguruan tinggi terbesar berada di Kabupaten Manokwari sebesae 56,09% dan terendah berada di Kabupaten Tambrauw sebesar 0,71%. Dari tabel tersebut terlihat bahwa APK terbesar berada pada jenjang sekolah terendah yaitu SD dan terus menurun hingga jenjang perguruan tinggi.

2.2.2.4. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas. Kualitas pendidikan penduduk diketahui dari tingkat pendidikan yang ditamatkan dengan diidentifikasi melalui ijazah/ STTB tertinggi yang dimiliki. Indikator ini dapat pula digunakan untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengetahui level tertinggi pendidikan antar waktu dan antar wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan maka menggambarkan semakin baik pula kualitas pendidikan manusianya. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya persentase penduduk yang berpendidikan tinggi (SMA ke atas). Biasanya terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin kecil persentase penduduk yang lulus pada level pendidikan tersebut.

Tabel 2.43 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Papua Barat, 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Tidak mempunyai ijazah	26,24	25,81	19,47	24,70	23,20

2.	SD/MI	23,32	22,99	23,82	23,46	22,05
3.	SLTP/MTs	17,49	17,14	19,46	18,33	18,08
4.	SMA/MA	19,42	19,37	21,67	19,65	20,34
5.	SMK	5,17	5,92	5,36	4,61	5,42
6.	Diploma I/II	0,79	0,79	0,67	0,5	0,56
7.	Akademi/Diploma III	1,95	1,74	1,99	1,85	1,64
8.	Diploma IV/Universitas/S2/S3	5,62	6,23	7,56	6,9	8,69
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Berdasarkan tingkat pendidikannya, dapat dilihat selama periode 2010-2014 masyarakat yang tidak mengeyam pendidikan di Provinsi Papua Barat memiliki porsi terbanyak. Walaupun masyarakat yang tidak mempunyai ijazah sekolah ini memiliki tren yang cenderung menurun, namun penurunan ini cenderung lambat dan tetap menyumbang persentase tertinggi di Provinsi Papua Barat. Terlihat pada tabel pada tahun 2010 hingga 2012 terjadi penurunan dari 26,24% menjadi 19,47%, namun pada tahun 2013 sempat meningkat menjadi 24,70% dan pada tahun 2014 kembali menurun menjadi 23,20%. Sedangkan masyakarat yang meiliki ijazah SD memiliki pola yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011 terjadi penurunan dari 23,32% menjadi 22,99%. Kemudian meningkat hingga pada tahun 2013 mencapai 23,46% dan kembali menurun pada tahun 2014 menjadi 22,05%. Pola yang berbeda ditunjukkan pada jenjang SMP yang memiliki tren yang cenderung menurun, walaupun pada tahun 2012 sempat mengalami kenaikan sebesar 19,46%, namun kembali turun hingga 18,08% pada tahun 2014.

Untuk jenjang SMA memiliki tren yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2011 mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2010 dari 19,42% menjadi 19,37%. Kemudian naik menjadi 21,67% pada tahun 2012, turun kembali pada tahun 2013 menjadi 19,65%, dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 20,34%. Pola yang berkebalikan ditunjukkan pada jenjang SMK. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan bila dibandingkan pada tahun 2010 dari 5,17% menjadi 5,92%. Kemudian turun menjadi 4,61% pada tahun 2013 dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 5,42%. Sedangkan pada jenjang Diploma I/II memiliki tren yang cenderung menurun, dari 0,79% pada tahun 2010 menjadi 0,56% pada tahun 2014. Tren yang hampir sama juga ditunjukkan pada jenjang Akademi/Diploma III, walaupun pada tahun 2012 sempat mengalami kenaikan menjadi 1,99%, namun kembali menurun hingga pada tahun 2014 menjadi 1,64%. Hal yang berbeda terjadi pada jenjang Diploma IV

yang memiliki tren yang cenderung meningkat, walaupun pada tahun 2013 sempat mengalami penurunan menjadi 6,9%, namun pada tahun 2-14 kembali meningkat menjadi 8,69%.

Tabel 2.44 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Papua Barat, 2014

Kabupaten/Kota	Tidak mempunyai ijazah	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	Diploma I/II	Akademi/Diploma III	Diploma IV/Universitas/S2/S3
Fakfak	19,13	22,36	20,60	20,51	4,68	1,11	1,84	9,77
Kaimana	32,12	20,05	19,79	17,55	3,70	0,69	1,45	4,65
Teluk Wondama	27,28	29,53	14,38	14,54	3,95	1,09	2,30	6,92
Teluk Bintuni	26,87	23,74	20,11	17,93	3,83	0,52	1,23	5,78
Manokwari	20,84	18,47	16,62	24,47	5,56	0,42	1,82	11,79
Sorong Selatan	25,78	29,71	15,64	16,05	1,93	1,47	1,27	8,15
Sorong	25,83	25,46	21,22	14,98	6,03	0,37	0,39	5,72
Raja Ampat	29,98	30,35	16,15	13,34	3,10	0,38	1,36	5,33
Tambrauw	44,70	28,52	12,32	10,85	0,99	0,17	0,57	1,87
Maybrat	39,96	24,29	14,90	10,80	0,80	0,26	1,73	7,26
Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Sorong	12,19	18,05	19,50	27,01	10,42	0,35	2,27	10,20

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Apabila dilihat menurut kabupaten/kota pada tahun 2014, masyarakat yang tidak mempunyai ijazah tertinggi berada di Kabupaten Tambrauw sebebsar 44,70% dan terendah berada di Kota Sorong sebesar 12,19%. Kepemilikan ijazah untuk jenjang SD tertinggi berada di Kabupaten Raja Ampat sebesar 30,35% dan terendah berada di Kota Sorong sebesar 18,05%. Untuk kepemilikan ijazah jenjang SMP tertinggi berada di Kabupaten Sorong sebesar 21,22% dan terendah berada di Kabupaten Tambrauw sebesar 12,32%. Sedangkan kepemilikan ijazah untuk jenjang SMA tertinggi berada di Kota Sorong sebesar 27,01% dan terendah berada di Kabupaten Tambrauw sebeesar 10,85%. Kemudian kepemilikan ijazah jenjang SMK terbesar berada di Kota Sorong sebesae 10,42% dan terendah berada di Kabupaten Maybrat sebesar 0,80%.

Untuk jenjang Diploma I/II tertinggi berada di Kabupaten Sorong Selatan sebesar 1,47% dan terendah berada di Kabupaten Tambrauw sebesar 0,17%. Sedangkan kepemilikan ijazah jenjang Akademi/Diploma III terbesar berada di Kabupaten Teluk Wondama sebesar 2,30% dan terendah berada di Kabupaten Sorong sebesar 0,39%. Untuk kepemilikan ijazah jenjang Diploma IV terbesar berada di Kabupaten Manokwari sebesar 11,79% dan terendah

berada di Kabupaten Tambrauw 1,87%. Dalam persebaran kepemilikan ijazah di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat terdapat dua kabupaten yang belum tersedia datanya, yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Dengan masih banyaknya persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah dan hanya bersekolah SD/MI di Provinsi Papua Barat, maka pemerintah provinsu harus meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan pendidikan lanjut di perguruan tinggi. Jumlah lulusan perguruan tinggi yang ada sekarang dirasakan belum cukup memadai mengingat Provinsi Papua Barat memiliki sumberdaya alam yang tinggi. Sebagai wilayah dengan potensi pariwisata yang tinggi, Provinsi Papua Barat membutuhkan kualitas sumberdaya manusia yang baik, sehingga ke depannya, penduduk yang memiliki ijazah pendidikan tinggi diharapkan mampu menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM juga menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan cara membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Misal APM SD merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Tabel 2.45 Angka Partisipasi Murni Provinsi Papua Barat (%), 2010-2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/MI	91,91	88,28	88,97	89,94	92,76	92,9
2.	SMP/MT	49,65	57,66	59,76	60,99	68,18	68,29
3.	SMA	43,93	47,88	46,46	54,2	62,29	62,4
4.	Perguruan Tinggi	7,36	13,86	15,75	20,1	24,19	20,55

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

APM untuk jenjang pendidikan SD selama periode 2010-2015 memiliki tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010 APM untuk jenjang SD sebesar 91,91% kemudian

menurun pada tahun 2011 menjadi 88,28%. Kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 88,97% dan terus meningkat hingga tahun 2015 menjadi 92,9%, artinya dari 100 orang yang berusia 7-12 tahun, terdapat sekitar 92 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SD. Untuk APM jenjang SMP selama periode 2010-2015 memiliki tren positif atau meningkat dari tahun ke tahun, tercatat pada tahun 2010 APM Provinsi Papua Barat sebesar 49,65% dan terus meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi 68,29%, yang artinya dari 100 orang yang berusia 13-15 tahun, terdapat sekitar 68 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP. Kemudian, pada jenjang SMA selama periode 2010-2015 memiliki tren yang cenderung meningkat, walaupun pada tahun 2012 sempat mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2011, yaitu 47,88% menjadi 46,46%. Namun setelah penurunan tersebut, APM untuk jenjang SMP terus meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi 62,4%, yang artinya setiap 100 orang yang berusia 16-18 tahun, terdapat sekitar 62 orang bersekolah pada jenjang pendikan SMA.

Kemudian untuk APM jenjang perguruan tinggi selama periode 2010-2015 memiliki tren yang cenderung meningkat, hal ini dapa dilihat dari kenaikan APM dari tahun 2010-2014 dari 7,36% menjadi 24,19%, walaupun pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan APM menjadi 20,55%, yang artinya setiap 100 orang yang berusia di atas 18 tahun terdapat sekitar 20 orang bersekolah pada jenjang pendidikan perguruan tinggi. Selain itu dapat dilihat pula tren APM yang semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah pula APM di Provinsi Papua Barat, dapat dilihat bahwa APM tertinggi berada di jenjang SD sebesar 92,9% dan APM terendah berada di jenjang Perguruan Tinggi sebesar 20,55%.

Tabel 2.46 Angka Partisipasi Murni menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (%), 2015

Kabupaten/Kota	SD/MI	SLTP/MTs	SMA	Perguruan Tinggi
Fakfak	91,15	69,56	52,79	11,2
Kaimana	95,94	48,28	48,61	2,57
Teluk Wondama	94,71	47,89	49,59	3,18
Teluk Bintuni	94,85	59,63	55,01	5,87
Manokwari	97,61	69,34	69,22	29,42
Sorong Selatan	96,2	61,41	47,13	22,12
Sorong	91,92	88,49	71,26	18,42
Raja Ampat	95,86	68,72	61,17	4,53
Tambrauw	93,38	69,3	43,48	0
Maybrat	86,75	71,83	64,16	18,36
Manokwari Selatan	93,42	62,35	67,71	8,88

Kabupaten/Kota	SD/MI	SLTP/MTs	SMA	Perguruan Tinggi
Pegunungan Arfak	89,09	30,7	6,88	0
Kota Sorong	89,46	75,55	72,91	31,81

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Apabila dilihat menurut kabupaten/kota pada tahun 2015, APM untuk jenjang SD tertinggi berada di Kabupaten Manokwari sebesar 97,61% dan terendah berada di Kabupaten Maybrat sebesar 86,75%. Untuk APM jenjang SMP tertinggi berada di Kabupaten Sorong sebesar 88,49% dan terendah berada di Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 30,7%. Sedangkan APM untuk jenjang SMA tertinggi berada di Kota Sorong sebesar 72,91% dan terendah berada di Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 6,88%. Kemudian APM jenjang perguruan tinggi terbesar berada di Kota Sorong sebesar 31,81% dan terendah berada di Kabupaten Tambrauw dan Pegunungan Arfak.

2.2.2.6. Angka Kematian Bayi

Indikator penting terkait dengan kesehatan adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi berpengaruh kepada penghitungan angka harapan hidup waktu lahir (e_0) yang digunakan dalam salah satu dimensi pada indeks komposit penyusun indeks pembangunan manusia ditilik dari sisi kesehatan. Angka kematian bayi dapat didekati dari data jumlah anak yang lahir hidup dengan jumlah anak yang masih hidup, namun data tersebut belum tersedia di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan data BPS Provinsi Papua Barat (2017), pada tahun 2014 persentase wanita berumur 10 tahun ke atas yang memiliki jumlah anak lahir hidup sebanyak 1 anak adalah sebesar 20,95%, anak lahir hidup sebanyak 2 orang sebesar 23,46%, anak lahir hidup sebanyak ≥3 orang sebesar 47,93%, sedangkan yang belum memiliki anak sebesar 7,65%. Sementara itu, persentase wanita yang telah memiliki anak dan belum meninggal hingga tahun 2015 adalah sebesar 82,92%, meninggal sebanyak 1 orang sebesar 10,49%, meninggal sebanyak 2 orang sebesar 3,92%, dan meninggal ≥3 orang sebesar 2,67%.

Tabel 2.47 Persentase Wanita Berumur 10 Tahun Atau Lebih Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup dan Meninggal di Provinsi Papua Barat (%), 2010-2014

Tahun	Jumlah Anak Lahir (orang)			
	0	1	2	≥3
2010	10,37	20,97	21,01	47,66
2011	9,71	20,08	23,90	46,31

2012	9,03	20,66	24,40	45,92
2013	8,30	20,13	22,46	49,11
2014	7,65	20,95	23,46	47,93

Tahun	Jumlah Anak Meninggal (orang)			
	0	1	2	≥3
2010	85,29	9,24	3,25	2,23
2011	85,72	9,12	2,43	2,71
2012	83,99	10,02	3,73	2,26
2013	81,62	11,26	4,03	3,08
2014	82,92	10,49	3,92	2,67

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

2.2.2.7. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selam hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semainkin tinggi AHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Secara umum, angka harapan hidup di kabupaten/kota di Papua Barat mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 angka harapan hidup Provinsi Papua Barat sebesar 64,75 tahun, kemudian meningkat sebesar 64,9 tahun pada tahun 2012, kembali meningkat pada tahun 2014 sebesar 65,1 tahun dan pada tahun 2016 angka harapan hidup Provinsi Papua Barat mencapai 65,3 tahun, yang artinya rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat dapat menjalani hidup hingga 65 tahun. Angka harapan hidup tertinggi tertinggi berada di Kota Sorong sebsar 69,4 tahun dan angka harapan terendah berada di Teluk Wondama sebesar 59 tahun.

Tabel 2.48 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat (tahun), 2011-2016

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fakfak	67,28	67,4	67,4	67,6	67,7	67,8
Kaimana	62,66	62,9	63,2	63,6	63,6	63,8
Teluk Wondama	57,52	57,8	58	58,4	58,7	59
Teluk Bintuni	57,69	57,9	58,1	58,4	59,1	59,5
Manokwari	67,08	67,2	67,3	67,6	67,7	67,8
Sorong Selatan	64,8	65	65,1	65,3	65,4	65,5
Sorong	64,76	64,9	65	65,2	65,3	65,4
Raja Ampat	63,78	63,8	63,8	64,1	64,1	64,2
Tambrauw	58,35	58,4	58,5	58,7	59	59,2

Maybrat	64,34	64,4	64,4	64,7	64,7	64,7
Manokwari Selatan	66,14	66,3	66,4	66,7	66,7	66,8
Pegunungan Arfak	66,04	66,2	66,3	66,5	66,5	66,6
Kota Sorong	67,69	67,8	68	69	69	69,4
Papua Barat	**64,75**	**64,9**	**65,1**	**65,1**	**65,2**	**65,3**

Sumber: BPS, 2017 (diolah)

Perkembangan angka harapan hidup per tahun di Papua Barat tercatat tidak melebihi dari satu tahun dalam satu periode jangka waktu satu tahun. Hal ini berarti bahwa kondisi angka ke-matian bayi (*infant mortality rate*) di Papua Barat termasuk dalam kategori *Hardrock*, artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi, implikasinya adalah angka harapan hidup yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk mengalami kemajuan. Hal ini terlihat dari perkembangan angka harapan hidup yang tidak melebihi satu digit dalam kurun waktu satu tahun. Kondisi tersebut juga terjadi untuk kondisi nasional, penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat.

2.2.2.8. Rasio Penduduk yang Bekerja

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah persentase penduduk yang bekerja. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakan perekonomian daerah tersebut. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial karena manyangkut banyak hal. Dimensi ekonomi yang dimaksud adalah bahwa tanpa adanya pekerjaan sebagai sumber penghasilan rumah tangga, akan mengancam kelangsungan hidup anggota rumah tangganya. Sedangkan dimensi sosial yang dimaksud adalah bahwa makin banyaknya anggota masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau makin banyaknya penganggur akan menjadi potensi untuk melakukan tindak kejahatan atau tindakan lain yang akan mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak

pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Persentase penduduk yang bekerja ini dapat dilihat dengan perhitungan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dimana angkatan kerja yang sudah bekerja dibandingkan dengan seluruh angkatan kerja. Angkatan kerja (*labour force*) adalah penduduk usia yang bekerja atau bekerja namun sementara tidak bekerja, termasuk di dalamnya pengangguran. Dengan menggunakan TPAK maka akan terlihat rasio angkatan kerja yang sudah bekerja dibandingkan dengan yan belum bekerja.

Tabel 2.49 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Barat (%), 2010-2014

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Fakfak	54,00	70,69	65,33	61,20	62,31
Kaimana	72,35	72,51	76,04	68,81	69,05
Teluk Wondama	76,50	72,53	70,08	68,82	80,08
Teluk Bintuni	75,40	73,70	69,96	71,12	69,69
Manokwari	78,78	70,03	74,02	71,88	73,51
Sorong Selatan	66,50	72,10	72,74	72,71	71,90
Sorong	70,21	73,35	62,57	62,88	68,59
Raja Ampat	62,29	72,39	64,60	65,99	65,55
Tambrauw	77,84	74,17	82,93	70,58	62,31
Maybrat	76,00	71,09	63,48	-	-
Manokwari Selatan	-	-	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-
Kota Sorong	62,07	68,58	59,00	-	-
Papua Barat	**69,29**	**70,78**	**67,12**	**66,41**	**68,30**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Selama periode 2010-2014, TPAK Provinsi Papua Barat memiliki tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010 TPAK Provinsi Papua Barat sebesar 62,29%, kemudian naik menjadi 70,78% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi 67,12% dan terus menurun hingga 66,41% pada tahun 2013. Selanjutnya, meningkat pada tahun 2014 menjadi 68,30%, yang artinya pada tahun 2014 terdapat 68,30% angkatan kerja di Provinsi Papua Barat yang memiliki pekerjaan. Cukup disayangkan beberapa tahun terakhir terdapat 4 kabupaten/kota yang belum ada data TPAK, yaitu Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong. Menurut data terakhir, Kabupaten Teluk Wondama merupakan kabupaten penyumbang terbesar nilai TPAK di Provinsi Papua Barat.

Tren TPAK Provinsi Papua Barat yang cukup fluktuatif ini mungkin salah satunya disebakan beberapa lapangan pekerjaan memiliki spesifikaisi khusus untuk para pencari kerja, sehingga pemerintah provinsi harus memfasilitasi para angkatan kerja yang belum bekerja ini dengan keterampilan agar angkatan kerja ini dapat sesuai dengan spesifikasi pekerja yang dicari di Provinsi Papua Barat.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Provinsi Papua Barat memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya yang cukup besar dengan potensi budaya dan nilai-nilai tradisi yang telah mengakar. Kebijakan pembangunan seni dan kebudayaan diarahkan dalam rangka memperkuat, mengembangkan, dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat daerah, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau tidak sesuai dengan budaya lokal. Provinsi Papua Barat memiliki keindahan destinasi wisata alam yang luar biasa dengan multikulturalisme penduduk yang tinggal di daerah ini. Multikulturalisme yang ada di Provinsi Papua Barat dapat dilihat dari keragaman suku yang berjumlah 67 suku dan keragaman bahasa yang mencapai 310 bahasa yang menghasilkan beranekaragam kebudayaan. Daya tarik wisata budaya ini berpotensi menjadi salah satu keunggulan lokal yang mampu membuat Provinsi Papua Barat sebagai destinasi wisata tujuan utama turis asing dan domestik. Namun keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala pengembangan seni budaya.

Peran pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai pelaksana pembangunan yang nantinya diharapkan menciptakan iklim yang nyaman agar pelaku usaha di bidang kebudayaan dan pariwisata dapat berkembang secara efektif dan efisien. Terkait dengan sektor pariwisata secara khusus, sektor tersebut diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena memiliki *multiplier effect* yang tinggi. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk menarik minat pengunjung. Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Di bidang kepemudaaan dan olah raga, pemerintah terus melakukan peningkatan fasilitas dan pembina terhadap pemuda dan cabang olah raga, mulai dari pembinaan pelatih dan fasilitasi kegiatan olah raga hingga pengembangan kapasitas SDM pemuda. Jumlah lapangan olah raga pada tahun 2014 sebanyak 1.174 lapangan yang terdiri dari 328 lapangan sepak bola, 664 lapangan voli, 86 lapangan bulu tangkis, 31 lapangan basket, 20 lapangan tenis, 42 lapangan futsal, dan 3 kolam renang. Namun, tidak semua kabupaten/kota memiliki lapangan ini. Belum meratanya ketersediaan lapangan olah raga di masing-masing kabupaten/kota merupakan salah satu kendala bagi perkembangan atlet-atlet Papua Barat.

Keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala bagi pengembangan seni budaya dan olah raga, misalnya belum ada gedung kantor, gedung kesenian dan olah raga yang representatif. Jadi, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, fasilitas serta sarana prasarana di bidang kepemudaan dan olah raga menjadi sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan di masa mendatang.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan komponen strategis dalam upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah sebagaimana tertuang dalam buku III RPJMN 2015-2019 melalui transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satu upaya nyata dalam rangka menciptakan cita-cita tersebut adalah melalui peningkatan kualitas kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas (*skilled labour*) merupakan modal utama untuk merintis terbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri.

Jumlah Sekolah

Sekolah merupakan salah satu fasilitas pendidikan yang akan menunjang kualitas dan mutu masyarakat. Tersedianya sekolah yang mampu menjangkau dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi prioritas utama. Distribusi penyebaran sekolah diharapkan mampu meningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Secara total terdapat

1.576 sekolah di Provinsi Papua Barat dalam berbagai jenjang pendidikan dari TK hingga Perguruan Tinggi, dengan persebaran 289 TK/RA/BA, 835 sekolah dasar, 233 SMP/MTs, 102 SMU/MA, 39 SMK, 29 akademi/perguruan tinggi, 3 sekolah luar biasa, 19 pondok pesantren, 21 madrasah diniyah, serta 6 seminari dan sejenisnya.

Tabel 2.50 Jumlah Sekolah menurut Level Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat (unit), 2014

Kabupaten/Kota	TK/RA/BA	SD/MI	SMP/MTs	SMU/MA	SMK	Akademi/ Perguruan Tinggi	Sekolah Luar Biasa	Pondok Pesantren	Madrasah Diniyah	Seminari/ Sejenisnya
Fakfak	34	99	18	7	3	5	-	1	1	1
Kaimana	18	72	13	1	3	-	-	1	2	-
Teluk Wondama	12	48	9	2	2	-	-	-	-	-
Teluk Bintuni	55	70	30	10	2	1	-	1	1	-
Manokwari	34	70	24	10	4	5	1	7	7	1
Sorong Selatan	13	69	16	5	6	3	1	1	1	-
Sorong	31	100	33	23	5	2	-	6	6	2
Raja Ampat	39	98	29	16	2	-	-	-	1	-
Tambrauw	5	41	11	3	1	-	-	-	-	-
Maybrat	7	53	12	2	1	-	-	-	-	-
Manokwari Selatan	11	33	7	5	1	4	-	-	1	-
Pegunungan Arfak	12	53	12	3	-	-	-	-	-	-
Kota Sorong	18	29	19	15	9	9	1	2	1	2
Papua Barat	**289**	**835**	**233**	**102**	**39**	**29**	**3**	**19**	**21**	**6**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2014

Selain itu, persebaran jumlah sekolah pada setiap level pendidikan pun tidak merata. Terlihat bahwa jumlah sekolah terbanyak berada pada level sekolah dasar sebanyak 835 sekolah dan sekolah luar biasa menjadi jumlah sekolah paling sedikit di Provinsi Papua Barat sebanyak 3 sekolah. Ketidakmerataan ini juga memiliki kecenderungan tren jumlah sekolah yang menurun apabila dilihat berdasarkan jenjang pendidikannya. Hal ini berarti semakin tinggi jenjang atau level pendidikannya, maka jumlah sekolah akan cenderung semakin sedikit. Tak hanya pada level pendidikan, persebaran sekolah di masing-masing kabupaten/kota jjuga masih belum merata. Jumlah sekolah paling banyak terdapat di Kota Sorong sebanyak 208 sekolah dalam berbagai level pendidikan, sedangkan jumlah paling

sedikit terdapat di Kabupaten Tambrauw sebanyak 61 sekolah dalam berbagai level pendidikan.

Rasio Guru terhadap Ketersediaan Sekolah

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio jumlah ketersediaan sekolah dengan jumlah tenaga pendidik pada sekolah tersebut. Banyak sedikitnya jumlah tenaga pendidik pada sebuah sekolah sangat penting mengingat bahwa para pengajar atau tenaga pendidik inilah yang bertanggung jawab atas mutu pendidikan pada sekolah tersebut. Tren rasio ketersediaan sekolah dan tenaga pendidik/guru di Provinsi Papua Barat cenderung fluktuatif. Pada jenjang TK, tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 3, kemudian kembali turun tahun 2013 menjadi 2, dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 3. Kemudian pada jenjang SD/MI pada tahun 2011 hingga 2014 mengalami peningkatan hingga mencapai 9, namun pada tahun 2015 turun menjadi 8.

Tabel 2.51 Rasio Guru terhadap Ketersediaan Sekolah di Provisi Papua Barat (orang/sekolah), 20111-2015

Tahun	TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	Perguruan Tinggi
2011	2	5	11	13	14	41
2012	3	5	9	11	10	41
2013	2	5	11	12	15	54
2014	2	9	12	12	13	60
2015	3	8	14	18	25	37

Sumber: Statistik Indonesia, 2016

Tren yang hampir serupa juga terjadi pada jenjang pendidikan yang lain. Hal ini menandakan bahwa kualitas pelayanan pendidikan di Provinsi Papua Barat tidak stabil karena jumlah guru yang mengajar di sekolah tidak stabil jumlahnya, kadang tinggi kadang rendah. Rasio tertinggi berapa pada tahun 2014 pada jenjang perguruan tinggi sebesar 60, yang artinya dalam setiap satu perguruan tinggi terdapat guru/tenaga pendidik sebesar 60 orang. Kemudian rasio terendah terdapat pada jenjang TK sebesar 2, yang artinya setiap satu TK memiliki 2 guru.

Rasio Penduduk Usia Sekolah terhadap Ketersediaan Sekolah

Rasio penduduk usia sekolah terhadap ketersediaan sekolah adalah rasio yang menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah yang dapat ditampung per satu sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa banyak jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan yang harus difasilitasi apabila semua penduduk usia sekolah memutuskan untuk bersekolah. Rasio tertinggi di Provinsi Papua Barat terdapat pada jenjang pendidikan perguruan tinggi sebesar 5.285 penduduk/sekolah pada tahun 2012, yang artinya satu perguruan tinggi harus dapat menampung 5.285 murid apabila semua penduduk usia sekolah jenjang perguruan tinggi memutuskan untuk bersekolah.

Tabel 2.52 Rasio Penduduk Usia Sekolah terhadap Ketersediaan Sekolah di Provinsi Papua Barat (orang/sekoah), 2011-2015

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK	Perguruan Tinggi
2011	139	699	434	4.450
2012	132	563	364	5.285
2013	128	566	357	4.303
2014	125	502	304	3.478
2015	139	502	268	3.340

Sumber: Statistik Indonesia, 2016

Apabila dilihat dari rasio murid terhadap ketersediaan sekolah yang sudah ada di Provinsi Papua Barat, posisi tertinggi masih berada pada jenjang pendidikan perguruan tinggi dengan rasio sebesar 1.052 murid/sekolah pada tahun 2012. Rasio penduduk usia sekolah terhadap ketersediaan sekolah dan rasio murid terdahap ketersediaan sekolah pada setiap jenjang pendidikan menunjukkan perlu ditingkatkannya fasilitas pendidikan, yaitu pembangunan sekolah pada setiap jenjang pendidikan terutama jenjang perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan beban perguruan tinggi yang harus menampung ribuan murid apabila semua penduduk usia sekolah ingin melanjutkan pendidikannya hingga jenjang ini.

Tabel 2.53 Rasio Murid terhadap Ketersediaan Sekolah di Provinsi Papua Barat (orang/sekolah), 2011-2015

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK	Perguruan Tinggi
2011	131	203	284	815
2012	126	175	245	1.052
2013	123	188	257	1.033
2014	121	169	243	1.032

2015	135	161	215	1.001

Sumber: Statistik Indonesia, 2016

Rasio Murid terhadap Guru

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio murid terhadap guru. Semakin kecil rasio ini menandakan bahwa pelayanan pendidikan di daerah tersebut semakin baik. Tren yang sama ditunjukkan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK yang memiki tren yang cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualiatas pelayanan pendidikan karena jumlah guru yang menanggung sejumlah murid menjadi semakin banyak. Pada tahun 2015 rasio SD/MI mencapai 18 murid/guru, kemudian SMP/MTs mencapai 12 murid/guru, dan SMA/SMK mencapai 11 murid/guru. Namun tren yang berbeda ditunjukkan pada jenjang perguruan tinggi yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012 hungga 2014 sempat terjadi penurunan dari 26 menjadi 17 murid/guru, namun kenaikan kembali terjadi pada tahun 2015 hingga 27 murid/guru. Hal ini menunjukkan penurunan pelayanan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi karena sedikitnya guru yang ada menyebabkan setiap guru harus bertanggung jawab atas 27 muridnya.

Tabel 2.54 Rasio Murid terhadap Guru di Provinsi Papua Barat (murid/guru), 2011-2015

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK	Perguruan Tinggi
2011	27	19	21	20
2012	27	19	23	26
2013	27	17	20	19
2014	13	15	20	17
2015	18	12	11	27

Sumber: Statistik Indonesia, 2016

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Indikator ini mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar. APS dikelompokkan dalam empat level pendidikan sesuai dengan kelompok usianya, yaitu SD/MI (7-12 tahun), SMP/MTs (13-15 tahun), SMA/SMK (16-18 tahun), dan Perguruan Tinggi (19-24 tahun). APS di Provinsi Papua Barat memiliki tren positif pada setiap level pendidikan, yang artinya terdapat peningkatan persentase APS dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 APS SD/MI sebesar 94,38% kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2015

menjadi 96,74%. APS SMP/MTs juga meningkat dari 88,59% menjadi 96,58% pada tahun 2015. APS SMA/SMK dari 65,40% meningkat menjadi 79,99% pada tahun 2015, dan APS perguruan tinggi meningkat dari 18,31% menjadi 29,96 persen. Terlihat dari jumlah persentase APS ini bahwa APS terbesar berada pada level SD/MI, yang artinya penduduk usia antara 7 hingga 9 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD/MI sebesar 96,74% dan terdapat 3,26 persen pendudk usia 7 hingga 9 tahun yang tidak bersekolah pada tahun 2015.

Tabel 2.55 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah (%), 2011-2015

APS Penduduk Usia Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
APS SD/MI (7-12 tahun)	94.38	95.56	95.58	96.65	96.74
APS SMP/MTs (13-15 tahun)	88.59	91.65	92.81	96.28	96.58
APS SMA/SMK (16-18 tahun)	65.40	67.18	72.04	79.87	79.99
APS Perguruan Tinggi (19-24 tahun)	18.31	19.90	24	29.66	29.96

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Walaupun terjadi peningkatan pada masing-masing kategori APS tiap tahunnya, namun peningkatan ini tidak diiringi dengan peningkatan APS apabila dilihat dari level pendidikannya. Terlihat bahwa semakin tinggi level pendidikannya, maka APSnya akan semakin menurun. Bahkan APS perguruan tinggi pada tahun 2015 tidak mencapai 50% dan hanya mencapai 29,96%, yang artinya 70,04% penduduk usia antara 19 hingga 24 tahun memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.

Apabila dilihat dari kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, APS SD/MI dan APS SMP/MTs tidak terdapat perbedaan yang menonjol antar kabupaten/kota. Hal ini disebabkan jumlah sekolah dasar yang telah tersebar hampir merata di semua kabupaten/kota., serta adanya program wajib belajar 9 tahun. Sedangkan untuk APS SMA/SMK dan APS perguruan tinggi masih didominasi di Kota Sorong dan Manokwari.

2.3.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam suatu pembangunan, hal ini juga sesuai dengan amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang hak setiap orang untuk memperoleh akses dan pelayanan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan suatu investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tercapai kualitas SDM dengan derajat kesehatan yang lebih baik. Keberhasilan dalam melakukan

pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan menjangkau pelayaan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata. Hal ini tercantum dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Untuk mencapainya, dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

Fasilitas Kesehatan

Tersedianya fasilitas kesehatan dan pelayanan yang mampu menjangkau dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat merupakan prioritas utama dalam pembangunan kesehatan. Salah satu fasilitasnya adalah rumah sakit. Semakin meratasanya distribusi rumah sakit di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat diharapkan mampu meningkatkan derjat kesehatan masyarakat. Berdasarkan Gambar 2.36 terlihat bahwa pada tahun 2015 belum semua kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat memiliki rumah sakit.

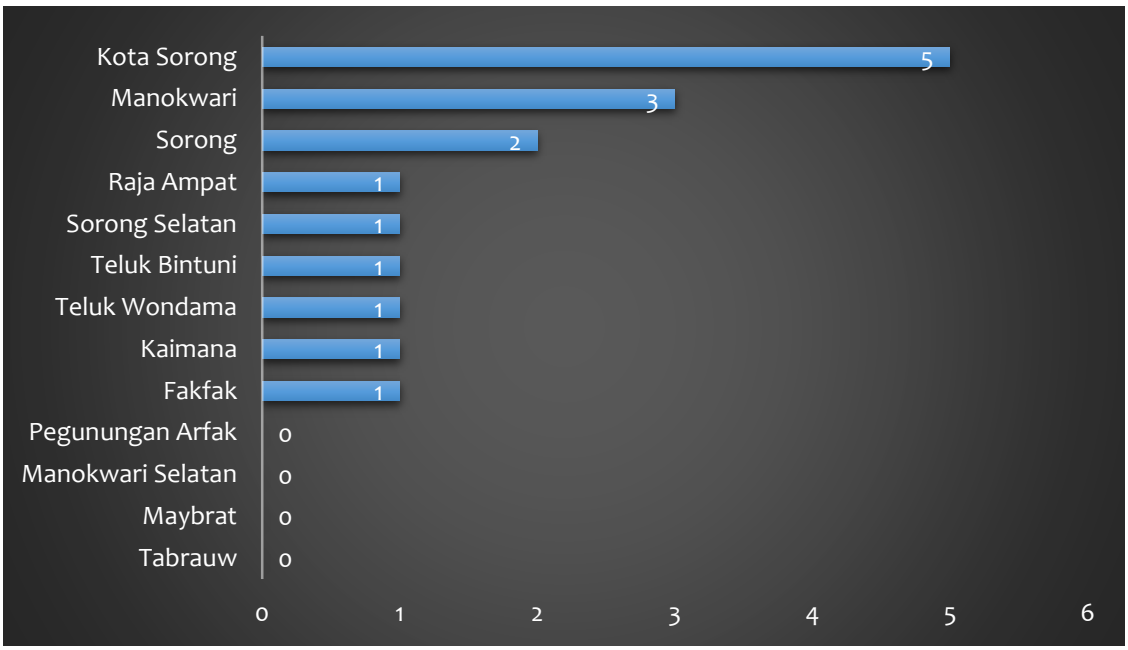

Gambar 2.36 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat (unit), 2015
Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2016 (diolah)

Pada tahun 2015 terdapat 16 rumah sakit di Provinsi Papua Barat, yang terdiri dari 5 rumah sakit di Kota Sorong, 3 rumah sakit di Kabupaten Manokwari, 2 rumah sakit di

Kabupaten Sorong, dan masing-masing satu rumah sakit di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Fakfak. Terdapa empat Kabupaten yang tidak memiliki fasilitas rumah sakit sama sekali, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tambrauw. Keempat kabupten ini merupakan kabupaten-kabupaten yang baru dimekarkan.

Selain rumah sakit, fasilitas kesehhatan lainnya yang iku berperan penting adalah puskesmas. Berbeda dengan rumah sakit, puskesmas sudah menyebar di sluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2015, total jumlah puskemas di Provinsi Papua Barat terdapat 151 puskemas, dengan jumlah puskesmas terbanyak berada di Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 20 puskesmas dan jumlah puskesmas paling sedikit berada di Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 4 puskesmas.

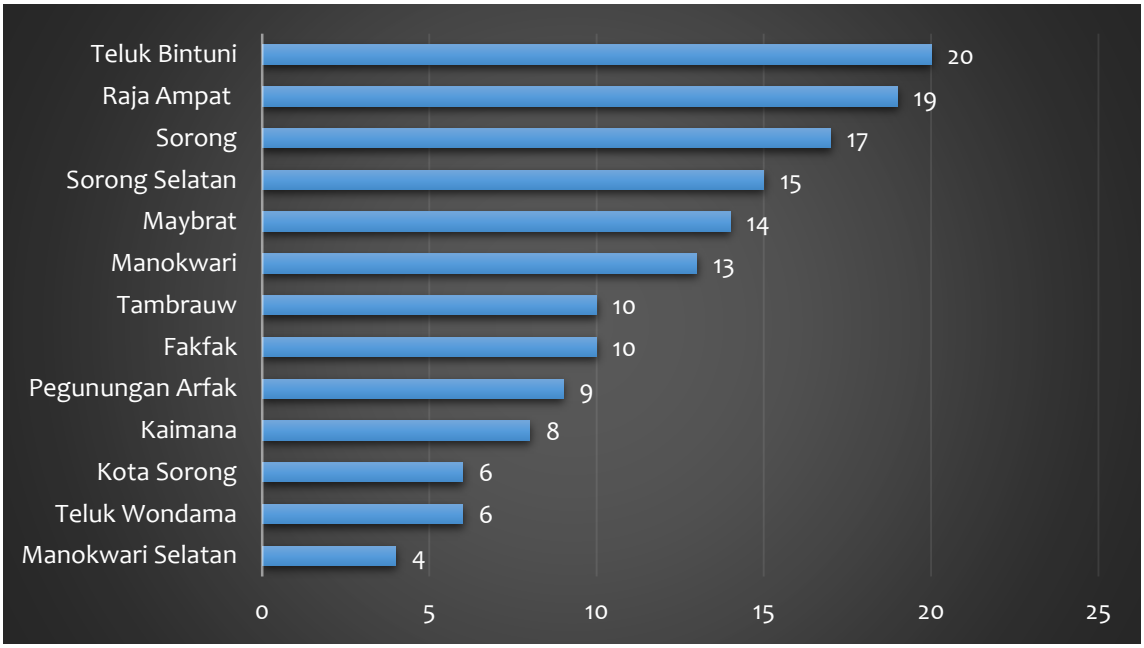

Gambar 2.37 Jumlah Puskesmas di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat (unit), 2015
Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2016 (diolah)

Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan atau tenaga medis merupakan salah satu indikator penting, setelah tersedianya fasilitas kesehatan. Tenaga medis inilah yang nantinya akan melakukan pengobatan dan penanganan medis. Namun, persebaran tenaga medis ini belum merata di Provinsi Papua Barat, terutama di kabupaten-kabupaten

pemerakaran.Tercatat sebanyak 236 dokter di Provinsi Papua Barat, yang terdiri dari 67 dokter ahli, 141 dokter umum, dan 28 dokter gigi. Dari ketiga kategori tersebut, jumlah dokter terbanyak berada di Kota Sorong sebanya 127 dokter. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal karena tenaga medis cenderung lebih terkonsentrasi di kabupaten/kota yang sudah ramai dan memiliki fasilitas yang lebih memadai. Sedangkan untuk daerah yang memiliki akses yang relatif lebih sulit jarang sekali dapat ditemui tenaga medis walaupun fasilitas seperti puskesman sudah tersedia.

Tabel 2.56 Jumlah dan Jenis Dokter Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat (orang), 2014

Kabupaten/Kota	Dokter Ahli	Dokter Umum	Dokter Gigi	Jumlah
Fakfak	1	19	5	25
Kaimana	0	10	2	12
Teluk Wondama	-	6	2	8
Teluk Bintuni	4	38	4	46
Manokwari	-	16	3	19
Sorong Selatan	-	-	-	-
Sorong	-	-	-	-
Raja Ampat	4	23	3	30
Tambrauw	-	-	-	-
Maybrat	-	-	-	-
Manokwari Selatan	-	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	-	-
Kota Sorong	58	55	14	127
Papua Barat	**67**	**141**	**28**	**236**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (Data Rumah Sakit), 2014

Keterbatasan tenaga medis ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, mengingat jumlah dokter tersebut sudah termasuk dokter dengan status pegawai tidak tetap. Mereka hanya memiliki masa bakti sekitar 6 bulan, dan setelah masa bakti itu berakhir mereka dapat kembali ke daerahnya masing masing. Jumlah dokter di Provinsi Papua Barat ini akan mencerminkan tingkat pelayanan kesehatan yang ada. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter. Semakin besar rasio tersebut, maka semakin banyak penduduk yang harus dilayani, yang artinya akan semakin besar penduduk yang tidak akan terlayani. Rasio ini berasumsi bahwa setiap penduduk yang memiliki keluhan kesehatan akan tertangani oleh dokter dan semua

penduduk memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kesempatan pengobatan dari dokter tanpa memperhatikan faktor-faktor lain, seperti kondisi ekonomi.

Pada tahun 2014 terlihat bahwa rasio jumlah penduduk terhadap dokter sangat tinggi. Secara umum, rasio di Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 sebesar 3.601, yang artinya sekitar 3.601 penduduk akan diobati oleh 1 dokter. Rasio terbesar berada di Kabupaten Kaimana yaitu 4.373 penduduk/dokter. Adapula kabupaten yang tidak tercakup layanan tenaga medis, seperti Kabupaten Tambrauw. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan oleh dokter, maka penduduk di beberapa kabupaten ini harus menuju kabupaten yang memiliki fasilitas tenaga medis.

Tabel 2.57 Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat, 2014

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Dokter (orang)	Rasio Penduduk/Dokter
Fakfak	72.189	25	2.888
Kaimana	52.473	12	4.373
Teluk Wondama	29.098	8	3.637
Teluk Bintuni	57.992	46	1.261
Manokwari	154.296	19	8.121
Sorong Selatan	42.028	-	-
Sorong	78.698	-	-
Raja Ampat	45.310	30	1.510
Tambrauw	13.497	-	-
Maybrat	36.601	-	-
Manokwari Selatan	21.282	-	-
Pegunungan Arfak	27.616	-	-
Kota Sorong	218.799	127	1.723
Papua Barat	**849.809**	**236**	**3.601**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (Data Rumah Sakit), 2014

Penolong Kelahiran

Indikator penting terkait dengan kesehatan adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi ini akan berpengaruh kepada perhitungan angka harapan hidup waktu lahir. Sementara itu, slaah satu aspek penentu besar kecilnya angka kematian bayi adalah penolong kelahiran. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubunganya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik dibandingkan

yang ditolong oleh dukun, keluarga atau lainnya. Penolong kelahiran tidak hanya terkait dengan angka kematian bayi saja, namun juga angka kematian ibu sebagai risiko proses kelahiran. Dalam proses kelahiran bayi tidak dapat dipisahkan antara kemungkinan keselamatan ibu atau anak yang dilahirkan. Keduanya harus diselamatkan dalam risiko besar sebuah kelahiran. Provinsi Papua Barat sebagian besar kelahiran bayi dibantu oleh bidan sebesar 47,02%, persentase ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 51,84%. Penolong kelahiran dokter meningkat dari 17,8% menjadi 25% pada tahun 2015. Secara umum masyarakat masih dominan menggunakan jasa penolong kelahiran yang terlatih, seperti dokter dan bidan.

Fenomena kelahiran dengan menggunakan jasa dukun juga masih terjadi di Provinsi Papua Barat dengan persentase sebesar 13,56 persen. Hal ini terjadi di daerah-daerah yang memang tidak terjangkau oleh tenaga kesehatan. Namun dengan proporsi persentase penolong kelahiran yang masih didominasi oleh tenaga kesehatan yang ahli menandakan bahwa pemahaman masyarakat untuk menggunaka jasa tenaga kesehatan tertalit masih baik, sehingga resiko kematian bayi maupun ibu dapat ditekan. Hal ini tentunya akan menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu.

Tabel 2.58 Persentase Balita Menurut Provinsi dan Penolong Kelahiran Terakhir Provinsi Papua Barat (%), 2011-2015

Penolong Kelahiran	2011	2012	2013	2014	2015
Dokter	11,75	17,15	16,67	17,8	25,00
Bidan	37,74	53,87	49,75	51,84	47,02
Tenaga Medis Lain	3,29	4,97	3,04	3,64	5,28
Dukun	11,76	14,64	18,35	15,43	13,56
Famili	32,59	8,86	11,59	10,88	5,28
Lainnya	2,87	0,5	0,59	0,41	7,81

Sumber: Statistik Indonesia, 2016 (diolah)

Upaya yang mungkin untuk meningkatkan angka persalinan oleh tenaga medis adalah dengan meningkatkan jumlah bidan dan menempatkan mereka di puskesmas/pustu di distrik/kampung-kampung. Alternatif lainnya adalah dengan melatih tenaga-tenaga dukun bersalin agar lebih terampil menolong persalinan dengan menggunakan peralatan yang lebih bersih dan higienis. Dengan pelatihan ini diharapkan tingkat kematian ibu dan anak dalam proses persalinan dapat diminimalisir.

Imunisasi Balita

Indikator imunisasi balita digunakan untuk menggambarkan tingkat pelayanan imunisasi lengkap terhadap balita. Pemberian imunisasi pada balita sangat perlu dalam menjaga kekebalan pada tubuh balita dari berbagai macam penyakit. Imunisasi yang diberikan pada balita di antaranya adalah imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B. Pemberian imunisasi merupakan salah satu cara untuk mencegah balita terkena penyakit atau meninggal karena penyakit tersebut.

Pada tahun 2015 persentase balita yang mendapatkan imunisasi cukup tinggi di masing-masing jenis, yaitu imunisasi BCG sebesar 81,83%, imunisasi DPT sebesar 73,53%, imunisasi campak sebesar 65,73 persen, dan imunisasi hepatitis b sebesar 69,98%.

Tabel 2.59 Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Provinsi Papua Barat (%), 2015

Kabupaten/Kota	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B
Fakfak	97,77	94,14	98,35	86,59	90,62
Kaimana	83,5	73,79	83,60	62,55	73,91
Teluk Wondama	77,97	59,93	75,13	51,82	57,58
Teluk Bintuni	89,13	83,53	89,23	76,91	83,94
Manokwari	83,17	65,80	76,00	60,03	58,21
Sorong Selatan	83,02	82,39	80,79	74,42	69,59
Sorong	90,38	89,41	96,04	76,71	89,28
Raja Ampat	79,23	65,21	74,24	56,47	58,46
Tambrauw	71,51	63,22	73,46	46,83	60,93
Maybrat	92,53	82,30	97,26	64,66	79,57
Manokwari Selatan	45,01	35,77	47,62	29,91	32,72
Pegunungan Arfak	16,75	17,99	16,75	14,62	13,32
Kota Sorong	79,56	75,66	80,07	70,15	74,40
Papua Barat	**81,83**	**73,53**	**80,44**	**65,73**	**69,98**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Tingkat kesadaran tertinggi terdapat pada jenis imunisasi BCG, sedangkan terendah terdapat pada imunisasi campak. Kesadaran untuk melakukan imunisasi ini sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua. Perlu diketahui juga bahwa kelima jenis imunisasi ini merupakan imunisasi yang harus dilakukan dan bukan memilih salah salah satu jenis imunisasi saja, yang disebut imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar lengkap adalah pemberian lima vaksin imunisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk bayi dibawah satu tahun. Imunisasi lengkap tersebut yaitu: (1) Hepa titis-B, umur pemberian

kurang dari 7 hari sebanyak satu kali; (2) BCG, umur pemberian satu bulan sebanyak satu kali; (3) DPT, umur pemberian dua bulan, tiga bulan, dan empat bulan sebanyak 3 kali; (4) Polio, umur pemberian satu, dua, tiga, dan empat bulan sebanyak empat kali; (5) Campak, umur pemberian sembilan bulan sebanyak satu kali.

Jumlah Kasus Penyakit

Indikator lain yang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat selain fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah indikator eksternal. Indikator eksternal yang dimaksud adalah jenis penyakit yang ada di wilayah tersebut, sehingga apabila sudah diketahu penyakit yang ada di daerah tersebut tenaga medis akan dengan mudah dapat mengatasinya atau memberikan penyuluhan sebagai salah satu tindak pencegahan agar tidak terjangkit. Terdapat 8 jenis penyakit di Provinsi Papua Barat, yaitu malaria, TB paru, kusta, dan DBD.

Tabel 2.60 Jumlah Kasus Penyakit dan Jenis Penyakit Provinsi Papua Barat, 2014

Malaria	TB Paru	Kusta	DBD
82.487	577	633	77

Sumber: Statistik Indonesia, 2016 (diolah)

Pada tahun 2014, kasus penyakit terbanyak disumbang oleh malaria sebanyak 82.487 kasus, hal ini dikarenakan Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi endemik malaria, sehingga tidak heran apabila kasus malaria merupakan slaah satu jenis penyakit yang diperhatikan di Provinsi Papua Barat. Kemudian, kusta sebanyak 633 kasus, TB Paru sebanayak 577 kasus, dan DBD sebanyak 77 kasus. Jika dibandingkan secara nasional, Provinsi Papua Barat memiliki angka API kedua terbanyak yaitu sebesar 31,29. Sedangkan Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Bali telah berhasil menuntaskan permasalahan ini dan ditunjukkan dengan angka API nol. API merupakan jumlah kasus positif malaria per 1.000 penduduk dalam satu tahun.

***Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV-AIDS)**

HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* adalah sejenis virus yang menyerang sel darah putih sehingga menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Akibat dari penurunan

kekebalan ini maka tubuh menjadi sangat mudah terkena berbagai penyakit infeksi (infeksi oportunistik) yang sering berakibat fatal. Pengidap HIV perlu mendapatkan penanganan dengan *Antiretroviral* (ARV) untuk menurunkan jumlah virus HIV di dalam tubuh supaya tidak masuk dalam stadium AIDS, sedangkan pengidap AIDS memerlukan pengobatan ARV untuk mencegah terjadinya infeksi oportunistik dengan berbagai komposisinya. Dalam upaya mengendalikan penyebarannya, Pemerintah telah bekerjasama dengan berbagai lembaga terkait di dalam dan luar negeri. Berikut merupakan data jumlah kasus HIV AIDS yang dipantau melalui Aplikasi Sistem Informasi HIV-AIDS dan IMS (SIHA).

Secara nasional jumlah kasus HIV terus meningkat dengan laju yang lebih progresif dibandingkan kasus AIDS. Tercatat 859 kasus terjadi di tahun 1987 dan terus meningkat hingga lebih dari 200 persen selama kurun waktu 20 tahun. Jumlah ini sempat dapat ditekan laju pertumbuhannya sebelum akhirnya menembus angka 29.037 kasus pada tahun 2013. Menuju akhir 2014, jumlahnya berhasil kembali dikontrol dengan penurunan sebanyak 7.000 kasus. Sebaliknya, laju peningkatan kasus AIDS cenderung lebih lambat meskipun dengan trend yang juga positif hingga mencapai titik puncak pada tahun 2012. Berhasilnya program pengendalian AIDS terlihat dari jumlah kasus yang terus menurun secara signifikan hingga mendekati awal tahun 2014.

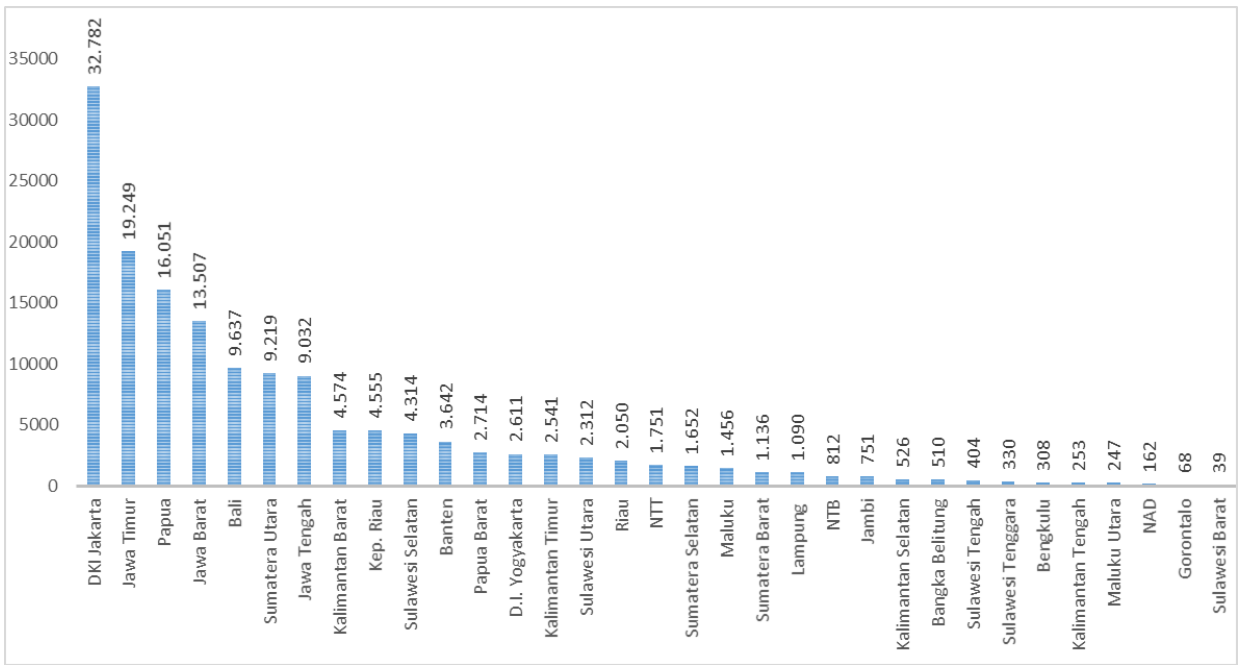

Gambar 2.38 Jumlah Kasus HIV yang Dilaporkan per Provinsi Tahun 1987 sampai dengan September 2014
Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Dari gambar di atas terlihat bahwa jumlah kasus HIV di Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 2.714 kasus. Angka ini terbilang rendah apabila dibandingkan dengan provinsi tetagga, Provinsi Papua, yang dilaporkan memiliki jumlah kasus HIV sebanyak 16.051 dan sekaligus menempati ranking ketiga terbanyak. Meskipun demikian, angka ini belum dapat merepresentasikan jumlah penderita yang sebenarnya karena dimungkinkan bahwa ada penderita yang tidak melaporkan diri. Sedangkan untuk kasus AIDS, pada tahun 2014 terdapat 13 kasus baru di Provinsi Papua Barat dengan kasus kumulatif sebesar 1.734 kasus.

Tabel 2.61 Jumlah Kasus Baru AIDS dan Kasus Kumulatif AIDS, 2014

Kasus Baru	Kasus Kumulatif
13	1.734

Sumber: Statistik Indonesia, 2016

Selain itu, kasus AIDS dapat dilihat dengan menggunakan *AIDS Case Rate* atau angka kejadian kasus AIDS. *AIDS Case Rate* adalah jumlah kasus AIDS per 100.000 penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Dalam data tersebut tercatat bahwa Provinsi Papua mendukuki angka AIDS *Case Rate* sebesar 322,9, jauh di atas rata-rata nasional yaitu senilai 19,1. Dalam Gambar tersebut tidak tercatat posisi Provinsi Papua Barat dalam peringkat sepuluh besar.

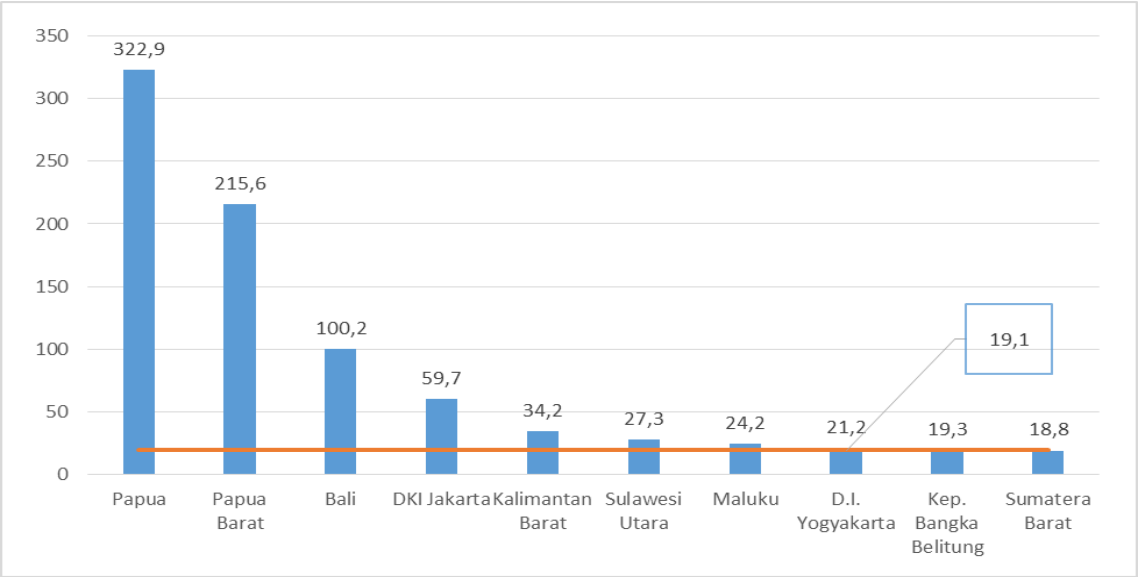

Gambar 2.39 Sepuluh Provinsi dengan *AIDS Case Rate* Tertinggi Tahun 1987 sampai dengan September 2014 (kasus)
Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kondisi jalan dan infrastruktur lainnya. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Kondisi Jalan

Pembangunan jalan merupakan salah satu aspek penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan membuka aksesibilitas antar wilayah di Provinsi Papua Barat. Jalan merupakan salah satu urat nadi yang mendorong peningkatan perekonomian masyarakat Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2014 panjang jalan Provinsi Papua Barat berdasarkan kondisi jalan mencapai 7.672,53 km, 2.649,71 km atau 34,53% dalam kondisi baik, 1.980,60 km atau 25,81% dalam kondisi sedang, 1.654,97 km atau 21,57% dalam kondisi rusak, dan 1.387,25 km atau 18,08% dalam kondisi rusak berat.

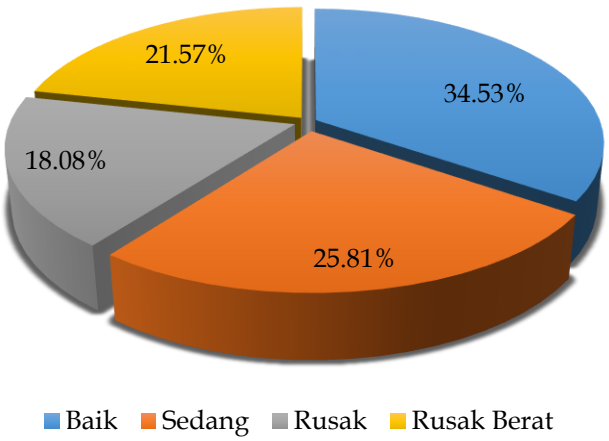

Gambar 2.40 Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan 2014
Sumber: Statistik Transportasi Provinsi Papua Barat, 2015 (diolah)

Apabila dilihat per kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari merupakan kabupaten yang memiliki kondisi jalan baik terpanjang di Papua Barat pada tahun 2014. Panjang jalan

Kabupaten Manokwari mencapai 484,40 km. Sedangkan Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kabupaten dengan kondisi jalan rusak berat terpanjang di Papua Barat pada tahun 2014. Panjang jalan Kabupaten Teluk Bintuni mencapai 574,04 km yang mengalami rusak berat. Kemudian jalan terpanjang berada di Kabupaten Sorong dengan panjang mencapai 1.524,19 km dan jalan terpendek berada di Teluk Wondama dengan panjang 38,93 km.

Tabel 2.62 Panjang Jalan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Menurut Kondisi Jalan 2014 (Km)

Kabupaten/Kota		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
1.	Fakfak	237,79	270,17	76,83	3,38	**588,17**
2.	Kaimana	202,15	10,45	173,98	172,90	**559,48**
3.	Teluk Wondama	35,95	0	1,06	1,92	**38,93**
4.	Teluk Bintuni	76,10	97,64	312,15	574,04	**1.059,93**
5.	Manokwari	484,40	389,59	271,28	245,83	**1.391,10**
6.	Sorong Selatan	268,28	101,45	36,00	125,90	**531,63**
7.	Sorong	360,52	510,71	414,99	237,97	**1.524,19**
8.	Raja Ampat	163,95	18,66	38,11	23,03	**243,75**
9.	Tambrauw	279,00	382,00	23,00	0	**684,00**
10.	Maybrat	349,27	62,77	37,00	270,00	**719,04**
11.	Kota Sorong	192,29	137,16	2,85	0	**332,30**
Jumlah		**2.649,70**	**1.980,60**	**1.387,25**	**1.654,97**	**7.672,52**

Sumber: Statistik Transportasi Provinsi Papua Barat, 2015

Bila dirinci menurut jenis permukaan, 35,80% atau sepanjang 2.601,78 km jalan di Papua Barat berpermukaan kerikil, 30,41% atau sepanjang 2.210,38 km jalan berpermukaan aspal, 28,79% atau sepanjang 2.092,20 km berpermukaan tanah, dan 5,01% atau sepanjang 363,95 km berpermukaan lainnya atau tidak dirinci.

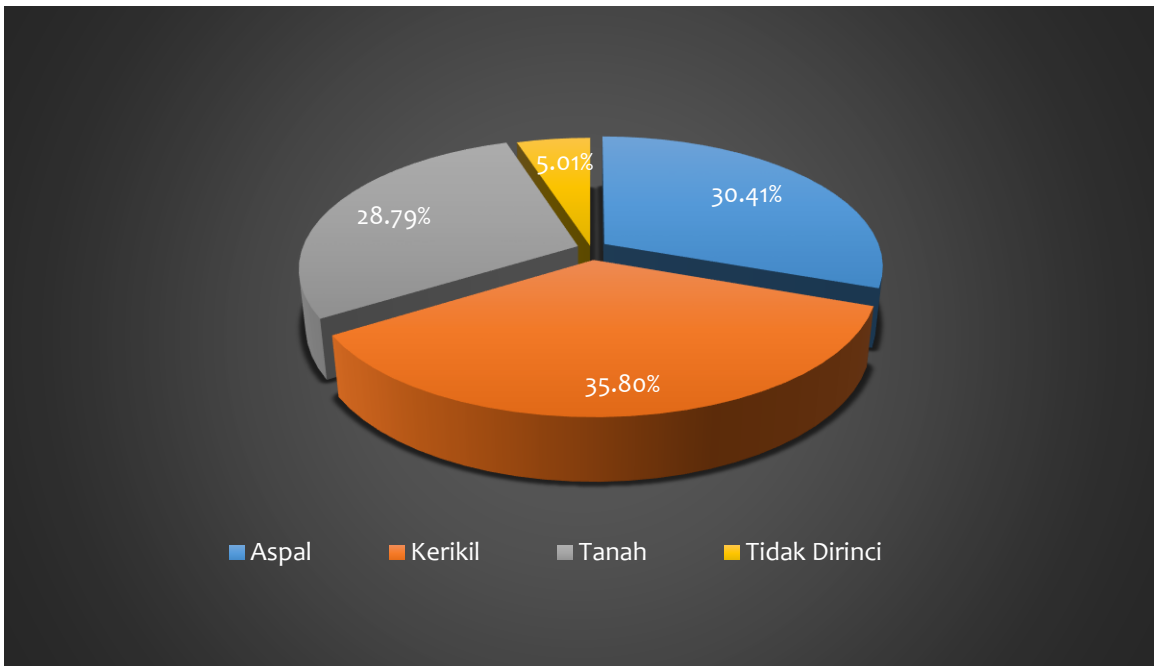

Gambar 2.41 Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan, 2014
Sumber: Statistik Transportasi Provinsi Papua Barat, 2015 (diolah)

Pada jenis permukaan jalan di Papua Barat tahun 2014, aspal terpanjang berada di Kabupaten Manokwari sepanjang 523,08 km dan aspal terpendek berada di Teluk Wondama sepanjang 27,61 km. Kemudian, jalan dengan jenis permukaan kerikil terpanjang berada di Kabupaten Tambrauw sepanjang 501 km dan jalan dengan jenis permukaan kerikil tependek berada di Kabupaten Teluk Wondama sepanjang 0,92 km. Sedangkan jalan dengan jenis permukaan tanah terpanjang berada di Kabupaten Teluk Bintuni sepanjang 514,65 km dan jalan dengan jenis permukaan tanah terpendek berada di Kabupaten Raja Ampat sepanjang 11 km.

Tabel 2.63 Panjang Jalan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Permukaan Jalan (km), 2014

Kabupaten/Kota		Aspal	Kerikil	Tanah	Tidak Dirinci	Jumlah
1.	Fakfak	335,09	138,40	112,99	1,69	**588,17**
2.	Kaimana	149,94	101,65	257,91	50,00	**559,49**
3.	Teluk Wondama	27,61	0,92	12,21	1,20	**41,94**
4.	Teluk Bintuni	80,01	273,13	514,65	192,14	**1.059,93**
5.	Manokwari	523,08	449,09	417,84	1,10	**1.391,11**
6.	Sorong Selatan	144,13	228,60	103,80	55,10	**531,63**
7.	Sorong	229,22	469,38	386,55	31,81	**1.116,96**
8.	Raja Ampat	32,71	169,13	11,00	30,91	**243,75**
9.	Tambrauw	159,00	501,00	24,00	0	**684,00**
10.	Maybrat	209,71	269,33	240,00	0	**719,04**

11.	Kota Sorong	319,89	1,15	11,26	0	**332,30**
Jumlah		**2.210,38**	**2.601,78**	**2.092,20**	**363,95**	**7.268,32**

Sumber: Statistik Transportasi Provinsi Papua Barat, 2015

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan dan kawasan pemukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat. Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya, karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal dan ini berhubungan dengan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Perumahan

Berdasarkan data BPS Provinsi Papua Barat (2015), sebagian besar rumah merupakan milik sendiri dengan persentase pada tahun 2014 mencapai 70,88%. Angka ini mengalami sedikit penurunan apabila dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 72,46%. Kemudian sewa berada pada posisi kedua sebesar 10,09%, angka ini juga lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 10,20%.

Tabel 2.64 Persentase Jenis Kepemilikan Rumah Provinsi Papua Barat (%), 2011-2014

Jenis Kepemilikan	2011	2012	2013	2014
Milik Sendiri	67,23	66,79	72,46	70,88
Kontrak	2,57	2,65	2,15	2,29
Sewa	10,63	11,65	10,20	10,09
Bebas Sewa	4,98	4,54	3,05	4,37
Dinas	6,31	6,21	5,75	4,83
Rumah Milik Orang Tua/Sanak/Saudara	7,80	7,83	5,98	7,25
Lainnya	0,48	0,34	0,41	0,29

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2015

Kemudian apabila dilihat dari luas lantai sebagian besar luas lantai rumah di Provinsi Papua Barat memiliki luas lantai > 20 m^2. Dengan persentase luas terbanyak berada pada

luas antara 20-49 m², sebesar 47,59%. Persentase ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 49,07%. Namun apabila dilihat kembali semua kategori mengalami penurunan persentase pada tahun 2015, kecuali luas lantai 50-99 m² yang mengalami kenaikan dari 34,63% pada tahun 2014 menjadi 36,19%.

Tabel 2.65 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai (%), 2011-2015

Luas Lantai (m²)	2011	2012	2013	2014	2015
<= 19	37,80	5,33	5,18	5,50	4,94
20-49	48,63	56,58	49,56	49,07	47,59
50-99	10,53	30,19	34,66	34,63	36,19
100-149	1,60	5,05	7,40	7,36	7,42
150+	1,44	2,85	3,20	3,44	3,86

Sumber: Statistik Indonesia, 2016

Apabila dilihat dari jenis atap rumah, sebagian besar atap rumah di Provinsi Papua Barat terbuat dari seng. Tren penggunaan seng sebagai atap rumah meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2014 mencapai 94,07%. Persentase terendah berada pada penggunaan sirap sebagai atap rumah sebesar 0,31% pada tahun 2014.

Tabel 2.66 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap (%), 2011-2014

Jenis Atap	2011	2012	2013	2014
Beton	1,41	1,93	1,51	1,46
Genteng	1,20	0,97	0,79	0,41
Sirap	0,59	0,31	0,29	0,31
Seng	91,62	92,98	92,51	94,07
Ijuk/Lainnya	3,42	3,25	3,13	2,02
Lainnya	1,77	0,56	1,77	1,73

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat, 2015

Berdasarkan dinding rumah, masyarakat di Provinsi Papua Barat sudah menggunakan dinding berjenis tembok atau menggunakan batu bata. Penggunaan tembok sebagai dinding rumah ini meningkat dari tahun ke tahun dari 54,12% menjadi 58,37% pada tahun 2015. Kemudian masih ada masyarakat yang menggunakan dinding berbahab bambu yaitu sebesar 0,34% pada tahun 2015. Apabila dilihat dari kepemilikan rumah, luas lantai, jenis atap yang digunakan, serta jenis dinding yang digunakan dapat dikatakan bahwa kulaitas perumahan di Provinsi Papua Barat ini sudah makin membaik dari tahun ke tahun.

Tabel 2.67 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding (%), 2011-2014

Jenis Dinding	2011	2012	2013	2014
Tembok	54,12	56,00	58,27	58,37
Kayu	41,25	39,89	38,64	39,32
Bambu	0,58	0,43	0,35	0,34
Lainnya	4,04	3,68	2,74	1,97

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat, 2015

Sumber Penerangan

Berdasarkan data BPS Provinsi Papua Barat (2015), sebagian besar rumah tangga di Provinsi Papua Barat sudah menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utamanya, yaitu sebesar 76%. Sedangkan yang menggunakan listrik non PLN sebagai sumber utama penerangannya sebesar 13% dan yang menggunakan penerangan bukan listrik sebagai sumber penerangannya hanya sebesar 11%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan listrik yang diinisiasi oleh pemerintah telah tersebar merata di sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat.

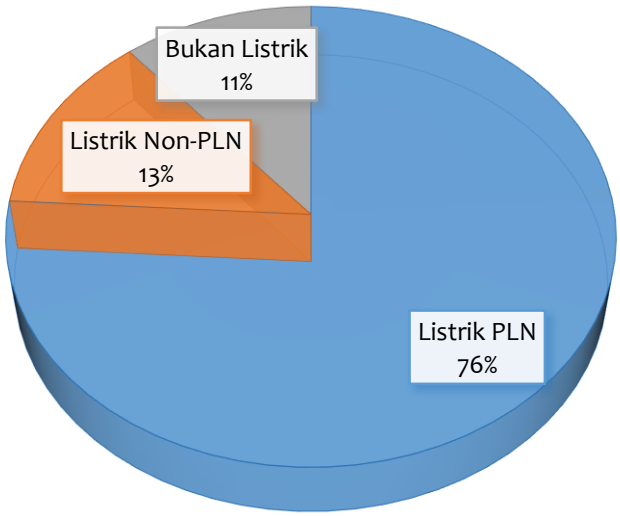

Gambar 2.42 Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama (%), 2015
Sumber: Statistik Indonesia, 2016

Sumber Air Minum

Fasilitas air minum bersih adalah faktor yang sangat menentukan, karena air minum selalu dikonsumsi oleh masyarakat tiap harinya. Dalam satu hari seseorang membutuhkan air minum rata-rata 1,5 liter (sekitar 8 gelas), yang artinya jika satu rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota (ayah, ibu, dan 2 orang anak) maka dalam satu hari rumah tangga tersebut

membutuhkan sedikitnya 6 liter air untuk keperluan minum. Jika kondisi air yang diminum tersebut tidak mempunyai syarat cukup air bersih, maka akan mengakibatkan gangguan kesehatan bagi peminumnya. Dalam publikasi Statistik Kesra BPS disebutkan bahwa yang dimaksud air bersih adalah air minum yang bersumber dari air kemasan, air ledeng, air bor/pompa, air sumur terlindung, dan mata air terlindung yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan limbah terdekat.

Sumber air minum yang digunakan rumah tangga di Provinsi Papua Barat adalah air ledeng, air pompa, air dalam kemasan, sumur telindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan , dan lainnya. Persentasi sumber air minum terbesar di Provinsi Papua Barat berasal dari air dalam kemasan dengan persentase sebesar 36,47%. Kemudian, sumur terlidung sebesar 14,38%, air hujan sebesar 12,48%, mata air terlindung sebesar 8,12%, air permukaan sebesar 7,53%, mata air tak telindung sebesar 7,03%, air ledeng sebesar 6,36%, sumur tak terlindung sebesar 4,51%, air pompa sebesar 3,08% dan lainnya sebesar 0,03%.

Tabel 2.68 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Untuk Minum (%), 2015

Uraian	Persentase (%)
Ledeng	6,36
Pompa	3,08
Air Dalam Kemasan	36,47
Sumur Terlindung	14,38
Sumur Tak Terlindung	4,51
Mata Air Terlindung	8,12
Mata Air Tak Terlindung	7,03
Air Permukaan	7,53
Air Hujan	12,48
Lainnya	0,03

Sumber: Statistik Indonesia, 2016

Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Sistem pembuangan kotoran/tinja manusia juga sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan penyakit khususnya penyakit saluran pencernaan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan.Berdasarkan penggunaan fasilitas toilet di provinsi Papua Barat, sebagian besar toilet yang digunakan adalah milik sendiri, yaitu sebesar 67%. Kemudian penggunaan toilet secara bersama sebesar 17%, toilet umum

sebesar 8%, tidak menggunakan toilet sebesar 6%, dan MCK komunal sebesar 2%. Tingginya kepemilikan sendiri atas toilet menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai menyadari resiko penularan penyakit apabila masih menggunakan toilet bersama atau umum. Namun masih ada permsalahannya dengan ketersediaan toilet di Provinsi Papua Barat sebesar 6% yang masih perlu ditindaklanjuti kembali.

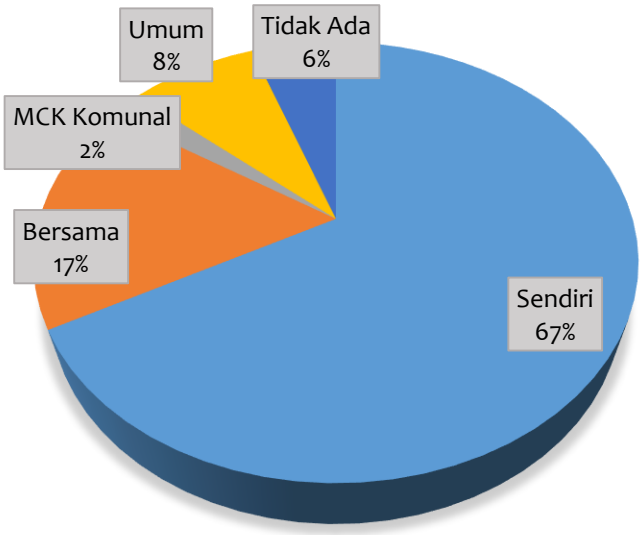

Gambar 2.43 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar (%), 2015
Sumber: Statistik Indonesia, 2016 (diolah)

2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu hal penting yang perlu dijaga untuk memperlancar pembanunan, hal ini tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004. Untuk menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, perlu adanya sebuah kelembagaan yang kuat dan tegas untuk menjaga hal tersebut. Untuk menciptakan kondisi tersebut maka perkembangan angka kriminalitas dnan iesiko tindak pidana kriminalitas harus terus dipantau.

Angka Kriminalitas dan Risiko Terkena Tindak Pidana

Angka kriminalitas merupakan angka yang biasa digunakan untuk menukur tindak kejahatan. Secara umum angka kriminalitas di Provinsi Papua Barat cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012 hingga 2014 terjadi kenaikan angka kriminalitas dari 1.825 kasus menjadi 3.159 kasus, namun pada tahun 2015 turun menjadi 2.262 kasus. Selain itu, untuk mengukur kriminalitas juga dapat dapat menggunakan risiko penduduk terkena tindak pidana. Risiko penduduk terkena tindak pidana merupakan indeks kemungkinan terjadi kriminalitas atau kejahatan per 100.000 penduduk dihitung dati total kriminalitas per jumlah penduduk per tahun. Perhitungan ini dapat digunakan untuk mengantisipasi jumlah kasus yang akan terjadi karena perhitungannya menggunakan jumlah aksus tindak kejahatan yang sudah terjadi dibagi dengan jumlah penduduk pada waktu yang sama. Di Provinsi Papua Barat hanya ada rasio untuk tahun 2015, yaitu sebesar 160. Hal ini berarti setiap 100.000 penduduk di Provinsi Papua Barat berisiko sekitar 60 orang terkena tindak kejahatan.

Tabel 2.69 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Papua Barat (kasus), 2012-2015

Provinsi	2012	2013	2014	2015
Papua Barat	1.825	2.262	3.159	2.262

Sumber: Kepolisian Negara Daerah Papua Barat, 2016

Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks demokrasi Indonesia (IDI) merupakan sebuah alat ukur empiris dan obyektif terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di tanah air. IDI merupakan pengukuran yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. Dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya, IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia yang terkait dengan realitas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika relasi antara negara dan masyarakat pada periode pasca reformasi (BPS Provinsi Papua Barat, 2016).

Dalam kurun waktu 2011-2015, perkembangan IDI Provinsi Papua Barat cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011, nilai IDI Provinsi Papua Barat adalah sebesar 61,78 poin, kemudian meningkat menjadi 65,70 poin pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013, nilai IDI mengalami penurunan menjadi 60,70 poin, dan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi sebesar 65,65 poin. Selama periode 2011-2014, IDI Provinsi Papua Barat termsuk dalam kategori sedang. Namun pada tahun 2015, nilai IDI Provinsi Papua Barat

turun jauh sebesar 5,65 poin menjadi sebesar 59,97 poin sehingga masuk dalam kategori buruk. Angka IDI sendiri sebenarnya merupakan indeks koomposit yang disusun dari tiga aspek yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Pada tahun 2015, nilai aspek kebebasan sipil adalah sebesar 92,33 pin, aspek hak-hak politik sebesar 39,48 poin, dan aspek lembaga demokrasi sebesar 51,81 poin. Dalam perkembangan pengukuran IDI di Provinsi Papua Barat, aspek kebebasan sipil merupakan aspek yang selalu masuk dalam kategori baik, sedangkan aspek lembaga demokrasi merupakan aspek yang berkontribusi besar dalam merosotnya IDI Provinsi Papua Barat pada tahun 2015.

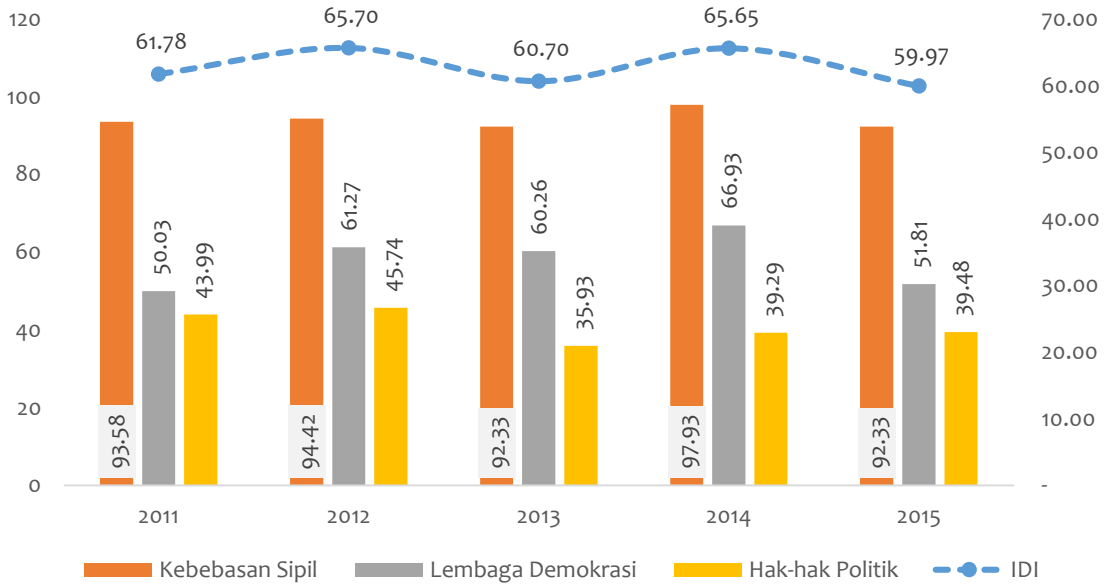

Gambar 2.44 Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Papua Barat, 2011-2015
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Menurut BPS Provinsi Papua Barat, salah satu faktor merosotnya IDI adalah aspek lembaga demokrasi yaitu peran birokrasi pemerintah yang turun cukup signifikan. Tahun 2014 nilai indeks variabel ini sempurna yakni 100,00 turun hampir 50% menjadi 44,50 pada tahun 2015. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut adalah belum tersedianya informasi APBD Pemprov Papua Barat yang dapat diakses oleh masyarakat. Dari 12 item struktur APBD yang harusnya ada pada website resmi pemerintah daerah, belum ada satupun yang dipublikasikan ke masyarakat luas. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat segera menindaklanjuti hal ini dengan menyediakan informasi APBD di website resmi Pemprov Papua Barat.

2.3.1.6. Sosial

Pembangunan bidang sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan sumberdaya manusia di bidang sosial yang sebaik-baiknya serta menciptakan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis. Ssejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini maka perkembangannya penyandang masalah kesejahteraan sosial turut berkembang baik secara kuantitas maupun kompleksitasnya dan tidak hanya berbentuk permasalahan kesejahteraan sosial kontemporer.

Perlindungan dan tingkat kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, bencana alam, dan bencana sosial. Penanganan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya fakir miskin, apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan terisolasi.

Agama dan Kepercayaan

Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya terutama kaum generasi muda. Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama. Pembangunan sektor agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa karena agama mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan.

Tabel 2.70 Persentase Penduduk Menurut Jenis Agama, 2015

Agama	Persentase (%)
Islam	33,149
Protestan	57,958
Katholik	8,521
Hindu	0,188

Budha	0,182
Lainnya	0,002

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2016

Pada tahun 2015, sebagian besar penduduk Provinsi Papua Barat memeluk agama protestan, yakni sebesar 57,96%. Kemudian pemeluk agama islam sebesar 33,15%, pemeluk agama katolik sebesar 8,52%, pemeluk agama hindu sebesar 0,19%, pemeluk agama budha sebesar 0,18%, dan lainnya sebesar 0,002%. Fasilitas tempat beribadatan yang ada di Provinsi Papua Barat sebanyak 2.886 gereja protestan, 507 masjid, 313 musala, 178 gereja katholik, 134 pura, dan 6 vihara.

2.3.1.7. Tenaga Kerja

Pembahasan mengenai aspek ketenagakerjaan menjadi salah satu ulasan utama bagi pengambilan kebijakan-kebijakan ekonomi, karena aspek ketenagkerjaan merupakan aspek pokok dalam kesejahteraan penduduk. Data ketenagakerjaan merupakan salah satu informasi penting yang diperlukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, dan tentu saja sangat erat kaitannya dengan tingkat pembangunan manusia di suatu daerah.

Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan tenaga kerja dapat menimbulkan meningkatnya jumlah pengangguran. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan masalah ketenagakerjaan, antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan tingkat kesempatan kerja (TKK).

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja dalam hal ini terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Dapat dilihat pada Tabel 2.71 tren TPAK di Provinsi Papua Barat cenderung menurun pada tahun 2011 hingga 2013, dari 70,78 persen menjadi 66,41 persen. Pada periode ini penurunan TPAK di Papua Barat diikuti dengan penurunan posisi TPAK Provinsi Papua Barat dibandingkan dengan TPAK nasional, yang awalnya Provinsi Papua Barat berada di atas nasional sebesar 4 persen. Kemudian menurun hingga pada tahun 2013 TPAK Provinsi Papua Barat berada di bawah TPAK nasional sebesar 0,36 persen.

Pada tahun 2013 hingga 2016 terjadi pergeseran tren yang awalnya cenderung menurun, pada periode ini justru memiliki tren yang cenderung meningkat dari 66,41 persen menjadi 70,05 persen. Tren pada periode ini berdampak positif, karena diikuti dengan peningkatan posisi TPAK Provinsi Papua Barat yang kembali berada di atas TPAK nasional. Pada tahun 2014 selisih TPAK Provinsi Papua Barat dan nasional sebesar 1,80 persen dan terus meningkat hingga pada tahun 2016 menjadi 3,71 persen. Untuk TPAk tertinggi di Provinsi Papua Barat terjadi pada tahun 2011 dengan TPAK sebesar 70,78 persen, sedangkan 29,22 persen dari penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang kegiatan utamanya selama referensi pencacahan adalah bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Tingginya nilai TPAK berimplikasi pada produktivitas yang tinggi karena banyakanya tenaga kerja yang bekerja. Walaupun TPAK pada tahun 2016 berada 0,73 persen dibawah TPAK tahun 2011, namun nilai TPAK ini terhitung cukup baik. Namun perlu diingat bahwa tingkat produktivitas juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan dari para pekerja itu sendiri. Hal ini dikarenakan apabila kualitas dari tenaga kerja harus seimbang dengan kuantitasnya agar dapat menghasilkan produktivitas yang diinginkan.

Sedangkan Pengangguran terbuka *(open unemployment)* didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidak bekerja, terdiri dari: (1) mereka yang mencari pekerjaan; (2) mereka yang mempersiapkan usaha; (3) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (4) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT mengindikasikan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik.

Tren TPT Provinsi Papua Barat pada periode 2011-2016 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011 hingga 2013 terjadi penurunan dari 8,94 persen menjadi 4,62 persen, kemudian meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi 8,08 persen, dan kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 7,46 persen. Apabila dibandingkan dengan nasional, TPT Provinsi Papua Barat berada di bawah posisi TPT nasional pada tahun 2012-2015, namun pada tahun 2016 terjadi perubahan posisi sebesar 1,85 persen di atas TPT nasional. TPAk tertinggi di Provinsi

Papua Barat terjadi pada tahun 2011 dengan TPAK sebesar 70,78 persen, sedangkan 29,22 persen dari penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang kegiatan utamanya selama referensi pencacahan adalah bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Tabel 2.71 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Provinsi Papua Barat dan Nasional, 2010-2016

Tahun	TPAK (%)		TPT (%)		TKK (%)	
	Papua Barat	Nasional	Papua Barat	Nasional	Papua Barat	Nasional
2011	70,78	66,78	8,94	7,48	91,06	92,52
2012	67,12	67,76	5,49	6,13	94,51	93,87
2013	66,41	66,77	4,62	6,17	95,38	93,83
2014	68,30	66,60	5,02	5,94	94,98	94,06
2015	68,68	65,76	8,08	6,18	91,92	93,82
2016	70,05	66,34	7,46	5,61	92,54	94,39

Sumber : BPS Nasional dan BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Kemudian kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi atau produksi. Dengan demikian pengertian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut timbul kebutuhan tenaga kerja. Mengingat data kesempatan kerja sulit diperoleh, maka untuk keperluan praktis digunakan pendekatan bahwa kesempatan kerja didefinisikan dengan banyaknya lapangan kerja yang terisi, yang tercermin dari persentase penduduk yang bekerja dari total seluruh angkatan kerja yang tersedia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), yaitu porsi penduduk yang termasuk angkatan kerja yang terserap dalam pasar kerja.

Tren TKK Provinsi Papua Barat pada tahun 2011 hingga 2016 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011 hingga 2013 terjadi peningkatan TKK dari 91,06 persen menjadi 95,38 persen. Kemudian pada tahun 2013 hingga 2015 terjadi penurunan dari 95,38 persen dari 91,92 persen dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 92,54 persen. Apabila dibandingkan dengan nasional, TKK Provinsi Papua Barat berada di atas posisi TKK nasional selama tahun 2012 hingga 2013, namun pada tahun 2014 hingga 2015 terjadi perubahan

posisi sebesar 0,92 persen dan1 ,85 di bawah TKK nasional. Tidak terjadi perubahan yang sangat besar mengingat angka TKK juga sudah cukup tinggi sekitar 92 hingga 94%. Tingginya kesempatan kerja ini dikarenakan sektor pertambangan dan migas yang menjadi salah satu lapangan usaha utama penduduk di Provinsi Papua Barat.

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provisi Papua Barat sudah diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001. Adanya perbedaan gender yang selama ini menjadi salah satu permasalahan yang sulit dituntaskan. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Tren IPG selama periode 2011 hingga 2015 selalu mengalamai kenaikan dari 81,34% pada tahun 2011 menjadi 81,99% pada tahun 2015. Namun angka IPG ini masih di bawah angka IPG nasional, pada tahun 2015 IPG nasional mencapai 91,03%. Tren yang serupa juga ditunjukkan oleh IPM yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, yang awalnya 59,9% pada tahun 2011 menjadi 61,73% pada tahun 2015. Kemudian dilihat dari sisi kesenjangan gender, terlihat bahwa rasio ang ditunjukkan memiliki tren yang menurun walaupun rasionya melebihi 100 persen. Hal ini berarti masih terjadi kesenjangan gender di Provinsi Papua Barat, yang cenderung menguntungkan kepada penduduk perempuan. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk meilai kesenjangan

gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding IPM. Selama kurun waktu 2011-2015 IPG Provinsi Papua Barat selalu menunjukkan posisi yag lebih tinggi dibandingkan IPM, walaupun persentase rasio menurun pada tiap tahunnya. Besaran rasio yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara IPG dengan IPM berada pada kisaran 132-136%.

Tabel 2.72 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Papua Barat, 2011-2015

Tahun	IPM	IPG	Rasio IPG terhadap IPM (%)
2011	59,9	81,34	135,79
2012	60,3	81,57	135,28
2013	60,91	81,72	134,17
2014	61,28	81,95	133,73
2015	61,73	81,99	132,82

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

2.3.1.9. Pertanahan

Pola kepemilikan lahan di Provinsi Papua Barat atas tanah negara dan tanah ulayat. Tanah hak ulayat merupakan status tanah secara adat dan dikuasai oleh kepala adat atau *ondoafi*. Pada umumnya di wilayah lingkaran hukum adat Papua dikenal dua sistem penguasaaan/kepemilikan tanah yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan individu. Kepemilikan komunal ini masih dapat dibedakan lagi mejadi kepemilikan berbasis marga kecil yaitu *clan* atau marga tertentu dan kepemilikan berbasis marga besar, yaitu kepemilikan berdasarkan kampung. Sedangkan kepemilikan individu bukan perorangan melainkan berdasar keturunan. Secara internal ada tata aturan yang mengatur ke dalam keluarga tentang pembagian hak dari penguasaan maupun pengelolaan tanah dan di sana diakui bagian setiap anggota sesuai dengan marganya. Namun kekuasaan kepemimpinan atas tanah secara sosial religi berada pada orang tertentu yang berasal dari garis keturunan tertua.

Pada dasarnya status tanah dalam hukum adat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Tanah *milik*, yaitu tanah yang dimiliki oleh perseorangan atau keluarga secara hukum adat sah karena mendapat warisaan dari orang tua, tanah yang diberikan sebagai ganti rugi, dan atau merupakan hasil rampasan perang yang diperoleh pada zaman dahulu.

- Tanah *milik dengan hak pakai*, yaitu tanah milik masyarakat yang diberikan kepada orang luar dengan seijin kepala adat untuk digarap sesuai dengan pejanjian dan dalam batas waktu tertentu.

Pada umumnya tanah milik dan tanah milik dengan hak pakai tidak dapat diperjualbelikan dan dipindah tangankan dengan bebas pada masyarakat luar. Setiap keluarga akan selalu mempertahankan tanah dan kampung mereka masing-masing karena tanah dan kampung merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat mereka. Hal ini dikarenakan cara hidup masyarakat yang masih berharap dan menggantungkan diri pada persediaan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Di samping itu juga, mengingat besarnya pengorbanan nenek moyang atau leluhur saat memperoleh tanah tersebut padazjaman dahulu. Oleh sebab itu, tanah ulayat ini tidak mudah dengan begitu saja untuk dilepas tanpa seizin kepala adat.

2.3.1.10. Lingkungan Hidup

Permasalahaan lingkungan hidup menjadi salah satu masalah prioritas setiap daerag bahkan setiap negara di dunia. Menurunnya kuliatas lingkungan hidup akan mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup yang lain. Sesuai degan UU No.32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka sudah saatnya melakukan-melakukan metode-metode yang nyata untuk lebih serius menangani masalah lingkungan hidup. Terlebih Provinsi Papua Barat sedang mencoba menjadi provinsi konservasi di Indonesia, hal ini membuat Provinsi Papua Barat menjadi lebih peka terhadap keadaan lingkungan hidup di sekitarnya. Parameter yang dapat digunakan untuk permasalahan ini adalah pencemaran yang terjadi di udara, tanah, maupun udara. Pada tahun 2014 terdapat 31 daerah yang tercemar airnya, 8 daerah yang tercemar tanahnya, dan 26 daerah yang tercemar udaranya. Namun 1.512 daerah tidak terkena pencemaran apapun.

Tabel 2.73 Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup menurut Kabupate/Kota Provinsi Papua Barat (jumlah daerah), 2014

Kabupaten/Kota		Pencemaran Air	Pencemaran Tanah	Pencemaran Udara	Tidak Ada Pencemaran
1.	Fakfak	1	-	-	122
2.	Kaimana	1	-	2	83

Kabupaten/Kota		Pencemaran Air	Pencemaran Tanah	Pencemaran Udara	Tidak Ada Pencemaran
3.	Teluk Wondama	4	-	-	73
4.	Teluk Bintuni	6	2	3	229
5.	Manokwari	4	-	7	150
6.	Sorong Selatan	7	5	-	114
7.	Sorong	2	-	5	134
8.	Raja Ampat	1	-	-	120
9.	Tambrauw	-	-	4	72
10.	Maybrat	-	-	-	157
11.	Manokwari Selatan	2	-	-	55
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	179
13.	Kota Sorong	3	1	5	24
Papua Barat		**31**	**8**	**26**	**1.512**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2015

Pencemaran yang terjadi ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, di anataranya fasilitas pembuangan yang minim atau kurangnya pengetahuan akan pentingnya lingkungan hidup. Untuk itu, dalam RTRW diberlakukan sistem prasarana permukiman dan pengelilaan lingkungan. Beberapa hal yang akan dibangun adalah prasarana pengelolaan lingkungan untuk mendukung kegiatan permukiman, penngembangan TPA, pengelolaan limbah rumah tangga sistem terpadu, pengelolaan limbah industri dan pertambangan, dan pengembangan sistem drainase konvensioal dan ekodrainase dengan pertimbangan kondisi tanag dantopografi. Semua ini dirancang untk mengurangi pencemaran lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat akibat limbah industri. Sehingga hal ini mendukung komitemen Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi.

2.3.1.11. Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil

Dalam mensukseskan program strategi nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil tolak ukurnya tidak hanya didukung pada regulasi semata. Dengan komitmen dan dukungan semua pihak, diharapkan masalah kependudukan dapat teratasi sehingga kebijakan pembangunan tepat sasaran. Untuk itulah diperlukannya penataan administrasi kependudukan. Hal ini merupakan salah satu urusan penting dalam tata pemerintahanan daerah maupun nasional. Dengan memiliki database yang lengkap dan akurat, nantinya para perumus kebijakan akan menggunakan database ini sebagai acuan perumusan dan perencanaan pembangunan agar tepat sasaran. Data yang dimaksud dalam hal ini adalah

data dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki oleh WNI. Penggunaan NIK nasional dan penerapan e-KTP membantu pemrosesan database kependudukan ini, dengan mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda ataupun KTP palsu. Sesungguhnya, peran provinsi dalam konteks urusan administrasi kependudukan adalah sebagai koordinator, pembina, dan pengawas di lingkup kabupaten/kota. Hal tersebut dikarenakan peran utama terkait pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengumpulan data kependudukan dalam urusan tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah di kabupaten/kota.

2.3.1.12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Menurut Undang–undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 12, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan kegiatan pembangunan masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi agar lebih mandiri dan sejahtera. Pembangunan ini bukan hanya meliputi individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

Pemberdayaan masyarakat di Provinsi Papua Barat dilakukan dengan memfasilitasi proses perencanaan dan pengambilan keputusan tingkat masyarakat melalui pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kegiatan pembangunan. Dalam pemberdayaan ini, masyarakat berkesempatan untuk turut aktif dalam menentukan kebutuhan dan desain kegiatan pembangunan. Program pemberdayaan masyarakat tersebut dengan mengharmonisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang disebut PNPM RESPEK (Program Nasional Pembedayaan Masyarakat Rencana Strategis Pembangunan Kampung). Hal ini dilatarbelakangi karena Provinsi Papua Barat merupakan daerah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas infrastuktur dan sumberdaya manusia, yaitu:

a. Mayoritas desa belum memiliki pusat kesehatan;
b. Pembangunan daerah selama kurang lebih 50 tahun tidak memperlihatkan perubahan yang berarti/signifikan;

c. Sepertiga anak-anak tidak duduk di bangku sekolah; dan
d. Skala tingkat kematian ibu dan anak lebih tinggi dibandingkan dengan skala nasional.

Pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah, dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan lembaga masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pemberdayaan masyarakat desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pembangunan desa dalam program serta kegiatan secara berkelanjutan dengan mendayagunakan SDM dan SDA yang ada. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk mendorong merumuskan kepentingan kolektif di desa yang berorientasi pada pendayagunaan sumberdaya lokal desa.

Dalam upaya memutus mata rantai ketimpangan pembangunan, maka dapat dilakukan dengan cara mendorong pembangunan dan peningkatan infrastuktur serta sumber daya manusia di desa, seperti peningkatan sarana dan prasarana desa seperti transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan perumahan; serta peningkatan makanan dan nutrisi, pendidikan dasar, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengalokasikan dana dari pemerintah pusat kepada desa dalam rangka pembangunan desa. Keberhasilan implementasi dana desa akan berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian desa.

Beberapa program yang dijalankan terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah program pembangunan sentra usaha industri TTG tenunan Papua, program pembangunan rumah tokoh masyarakat, program fasilitas pengembangan usaha, program pembangunan rumah masyarakat kampung, dan program pembangunan rumah penduduk miskin komunitas adat terpencil (KAT). Pendanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk urusan untuk pemberdayaan masyarakat dan desa ini cukup fluktuatif pada tahun 2011 Rp21.552.900.543. Pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Papua Barat memfokuskan membangun Kampung Wamesa dan usaha pada sektor pertanian dan peternakan. Kemudian pada tahun 2012 terjadi penurunan dana menjadi Rp20.994.760.000, pada tahun pemerintah fokus untuk mengembangankan daerah pesisir dan peternakan sapi di Sorong/Klamono. Selain itu

pemerintah juga fokus untuk membangun di Kabupaten Manokwari, yaitu 56 unit di Arfai II; 17 unit di Reremi, Fanindi, dan Pantura, 8 unit di Kabupaten Manokwari.

Kemudian pada tahun 2013 pendanaan meningkat menjadi Rp29.315.500.000. Fokus pemberdayaan pada tahun 2012 lebih kepada pengembangan dari daerah pesisir serta pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan *skill.* Pada tahun 2014, kembali menurun menjadi Rp21.265.000.000, pada tahun ini fokus pengembangan masih di daerah pesisi ditambah dengan industri rumah tangga, seperti pegolahan abon di Kabupaten Sorong. Pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi Rp 29.940.000.000, pada tahun ini fokus pemberdayaan ditunjukkan kepada nelayan. Selanjutnya pada tahun 2016, pendanaan kembali menurun sebesar Rp21.000.000.000. Pada tahun 2016, pendanaan masih berfokus pada pengemmbangan masyarakat dan desa yang berada di pesisir.

2.3.1.13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk merupakan salah satu hal terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan penduduk ini tidak dikendalikan makan akan terjadi ledakan penduduk, yang nantinya akan meningkatkan beban ekonomi di Provinsi Papua Barat. Selain itu pengendalian penduduk merupakan upaya mendasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu caranya adanya dengan program keluarga berencana (KB). Dengan mengikuti KB, diharapkan keluarga dapat merencanakan kehidupan yang lebih berkualitas dan sejahtera. KB juga akan mendorong pencapaian MDGs (AKI) dan mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melihat pencapaan pengendalian penduduk dapat dilihat mengggunakan indikator wanita yang sudah menikah dan sedang menggunakan KB. Pada Gambar 2.45 terlihat pada tahun 2011-2013 terjadi peningkatan penggunaan alat KB, dari 37,84% menjadi 42,91%. Kemudian menurun pada tahun 2013 menjadi 42,12% dan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 43,96%. Secara umum, terjadi peningkatan penggunaan alat KB di Papua Barat. Walaupun jka dibandingkan dengan penggunaan alat KB secara nasional, penggunaan alat KB di Papua Barat masih berada di bawahnya, seperti pada tahun 2015 Papua Barat berada 16,01% di bawah nasional. Perkembangan penggunaan alat yang cenderung meningkat ini merupakan suatu pertanda baik, bahwa adanya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kualitas SDM keluarganya.

Gambar 2.45 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan/Memakai Alat KB di Papua Barat (%), 2011-2015
Sumber: BPS, 2017

2.3.1.14. Perhubungan

Papua Barat merupakan provinsi termuda ketiga di Indonesia yang sedang giat melaksanakan pembangunan di semua sektor ekonomi. Untuk itu, sarana dan prasarana transportasi yang bagus merupakan syarat mutlak yang diperlukan dan menjadi salah satu fokus utama dari pembangunan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam buku III RPJMN 2015-2019 melalui pembangunan konektivitas di wilayah Provinsi Papua Barat. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik akan mempermudah masyarakat dalam mobilitas antar distrik, ibukota kabupaten maupun ibukota provinsi. Pembangunan ruas jalan akan menghubungkan seluruh kabupaten/kota yang selama ini belum terhubung dengan jalan darat.

Dalam RTRW Provinsi Papua Barat terdapat 5 (lima) ruas jalan yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu jalan Mameh-Windesi-Ambuni-Tandia; jalan Manokwari-Bintuni; jalan Sorong-Pelabuhan Arar; jalan lingkar Raja Ampat; dan jalan Susumuk-Bintuni.

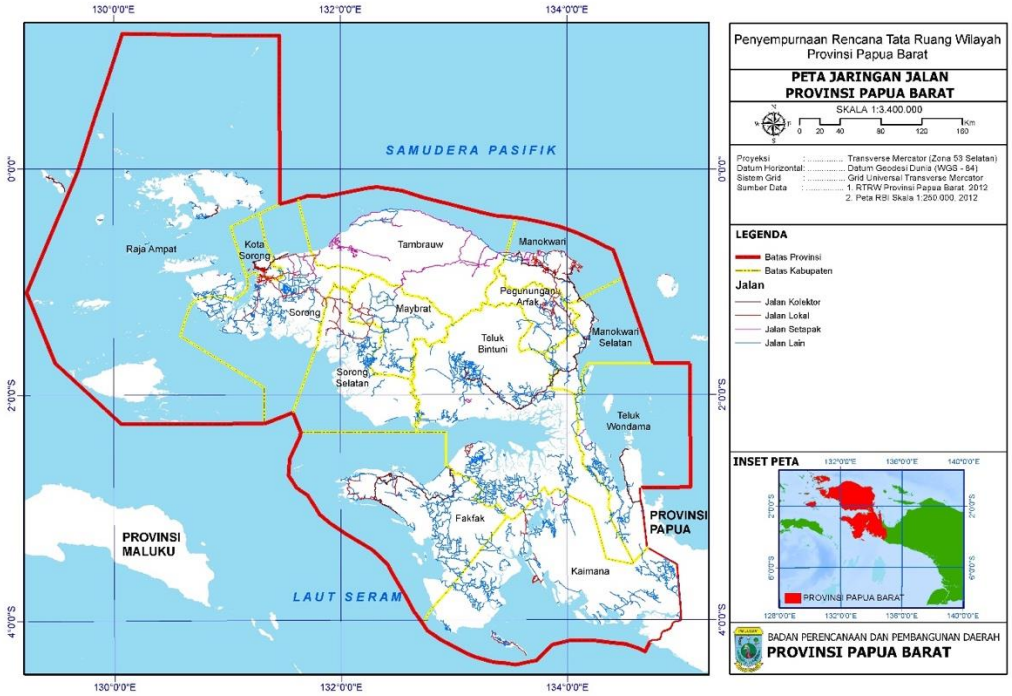

Gambar 2.46 Peta Jaringan Jalan Provinsi Papua Barat
Sumber : RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Selain pembangunan kelima ruas jalan utama, Provinsi Papua Barat juga melakukan beberapa rencana pembangunan dan pengembangan pada jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sesuai dengan Gambar 2.46 yang menunjukkan peta jaringan jalan di Provinsi Papua Barat. Jaringan jalan arteri primer per kabupaten di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 2.74, sedangkan rencana jaringan jalan kolektor primer di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.74 Jaringan Jalan Arteri Primer di Provinsi Papua Barat

No.	Kabupaten/Kota	Keterangan
1.	Kaimana	- Ruas jalan Yamor – Nabire - Ruas jalan Kaimana – Timika
2.	Manokwari	- Jalan lintas barat, Perkotaan Manokwari – Prafi – Masni – Sidey – Mubrani – Kebar – Senopi – Kabupaten Sorong
3.	Maybrat	- Ruas jalan Sorong - Ayamaru – Susumuk - Kukurkek – Ayawasi – Manokwari - Ruas jalan Susumuk – Ayata – Aisa – Bintuni
4.	Sorong Selatan	- Ruas jalan Klamono - batas Kabupaten Sorong Selatan – Kambuaya – Susumuk

No.	Kabupaten/Kota	Keterangan
5.	Manokwari Selatan	- Ruas jalan Distrik Ransiki - Distrik Momi Waren - Distrik Tahota
6.	Teluk Wondama	- Ruas jalan Manokwari – Wondama melalui Distrik Sougwepu - Distrik Nikiwar - Distrik Windesi - Distrik Kuri Wamesa - Distrik Naikere - Distrik Rasiei
7.	Tambrauw	- Jalan Trans Papua Barat : Kota Sorong - Ayamaru - Manokwari - dan terus ke Wilayah Timur
8te.	Kota Sorong	- Ruas jalan Basuki Rahmat - Ruas jalan Ahmad Yani - Ruas jalan Yos Sudarso
9.	Sorong	- Ruas jalan Kota Sorong – Klamono –Sorong Selatan
10.	Teluk Bintuni	- Ruas jalan strategis Manokwari – Manuri – Mameh – Bintuni

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Tabel 2.75 Jaringan Jalan Kolektor Primer di Provinsi Papua Barat

No.	Kabupaten/Kota	Keterangan
1.	Fakfak	- Jalan lingkar utara: Fakfak - Kramongmongga - Bomberai - Bintuni - Babo
2.	Kaimana	- Ruas jalan Kaimana - Inari – Tanusan – Fruata – Bomberay - Ruas jalan Inari – Ubia – Gaka – Karas - Ruas jalan Tanusan – Bofuwer – Kensi – Windesi - Ruas jalan Yamor–Kiruru–Timika - Ruas jalan Avona – Kwatisore - Ruas jalan Avona – Lobo - Ruas jalan Avona - Yamor - Ruas jalan Bofuwer – Kensi - Ruas jalan Bofuwer-Tanusan - Ruas jalan Kaimana–Sisir - Ruas jalan Kaimana–Tanggaromi - Ruas jalan Kaimana –Wondama - Ruas jalan Kiruru – Timika - Ruas jalan Kiruru – Yamor - Ruas jalan Yamor –Kwatisore, Yamor– Nabire
3.	Manokwari	- Jalan lintas selatan : distrik manokwari barat – manokwari selatan – tanah rubu – oransbari – ransiki – mumi waren – tahota - Jalan yang menghubungkan kabupaten manokwari dengan kabupaten sorong melalui ruas jalan di distrik ambarbaken
4.	Maybrat	- Ruas jalan Susumuk – Kisor – Aitinyo – Kamro - Ruas jalan Sabah – Fuog - Ruas jalan Kamro – Fuog

No.	Kabupaten/Kota	Keterangan
5.	Sorong Selatan	- Ruas jalan Kambuaya – Atanap - Ruas jalan Atanap – Wersar
6.	Manokwari Selatan	- Ruas jalan Mameh – Bintuni melalui Distrik Tahota - Ruas jalan Distrik Tahota – Distrik Didohu - Distrik Isim - Ruas jalan Distrik Membey - Distrik Ransiki - Ruas jalan Distrik Ransiki - Distrik Neney - Ruas jalan yang menghubungkan seluruh distrik di Kabupaten Manokwari Selatan
7.	Pegunungan Arfak	- Ruas jalan Kabupaten Manokwari – Pegunungan Arfak melalui Distrik Masni, Prafi, Warmare, Distrik Minyambouw, Distrik Taige, Distrik Anggi, Distrik Anggi Gida - Jalan lintas utara selatan : Distrik Tanah Rubuh – Minyambouw - Hingk – Anggi – Sururey – Didohu
8.	Teluk Wondama	- Ruas jalan Windesi – Babo – Fakfak - Ruas jalan Teluk Wondama – Kaimana
9.	Tambrauw	- Ruas jalan Kabupaten Sorong - Bamus Waiman - Ruas jalan Distrik Yembun – Mawor - Ruas jalan Distrik Fef - Ayapokiar - Distrik Miyah (terkoneksi langsung ke Jalan transpapua) - Ruas jalan Mega – Sausapor - Ruas jalan Distrik Sausapor – Syuwaw - Ruas jalan Distrik Kwoor – Waiben - Ruas jalan Distrik Abun - Kabupaten Manokwari
10.	Sorong	- Ruas jalan Kota Sorong – Malawor/Makbon – Mega/Moraid – dan seterusnya ke Kabupaten Tambrauw (sausapor – Kwor – Abun/Waiben), sampai ke Kota Manokwari

Sumber : RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Apabila semua ruas jalan penghubung ini selesai pada 2019, maka konektivitas di Provinsi Papua Barat akan membaik dan akan membantu dalam pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.

Transportasi Darat

Dengan berkembangnya jaringan jalan di Provinsi Papua Barat, maka aktivitas ekonomi di Provinsi Papua Barat pun akan bergantung pada transportasi darat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang cenderung semakin meningkat. Peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat

terhadap sarana transportasi yang memadai sejalan dengan mobilitas penduduk yang tinggi.

Pertumbuhan kendaraan di Provinsi Papua Barat cenderung tidak tetap, pada tahun 2012 terjadi peningkatan hingga tiga kali lipat sebanyak 116.841 unit dari 32.350 unit pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2013 terjadi penurunan yang sangat tajam menjadi 25.474 unit dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 28.435 unit. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan patokan untuk menentukan kepadatan kendaraan di Provinsi Papua Barat, karena ketersediaan data dari beberapa kabupaten/kota belum tersedia ketika laporan ini dibuat, maka hanya beberapa kabupaten/kota yang ditampilkan dalam tabel. Beberapa kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Raja Ampat, dan Kota Sorong.

Tabel 2.76 Jumlah Kendaraan Bermotor di Papua Barat (unit), 2011-2014

Tahun	Mobil Penumpang	Mobil Barang	Bis	Sepeda Motor	Jumlah
2011	1.108	3.230	1.485	26.527	32.350
2012	3.858	9.511	6.889	96.583	116.841
2013	2.351	1.201	213	21.709	25.474
2014	2.567	1.267	34	24.567	28.435

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2016

Pada tahun 2014, kendaraan sepeda motor masih mendominasi sebesar 24.567 unit atau 86,40 persen. Sedangkan untuk kendaraan mobil penumpang sebesar 2.567 unit atay 9,03 persen, kendaraan mobil barang sebesar 1.267 unit atau 4,46 persen, dan kendaraan bis sebesae 34 unit atau 0,12 persen.

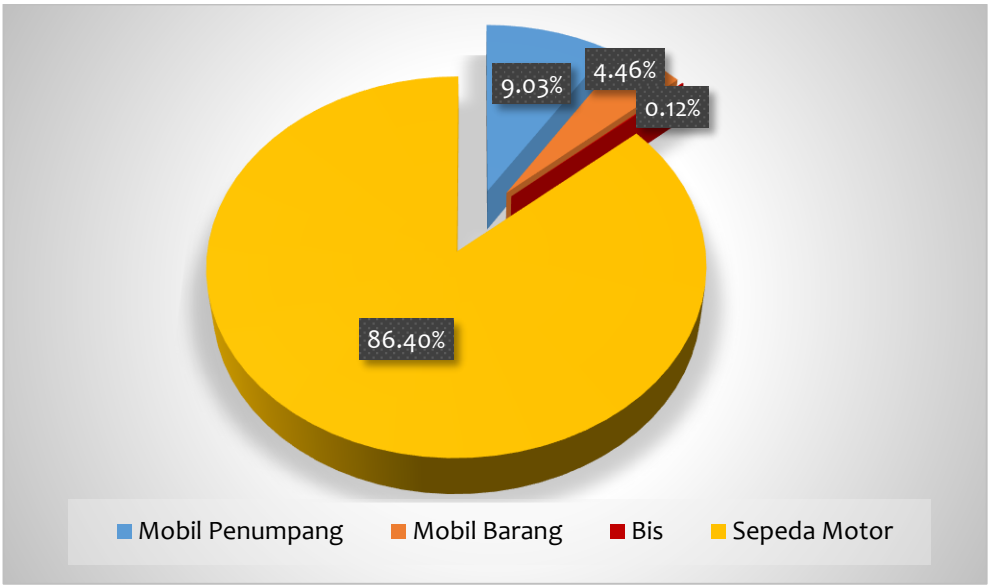

Gambar 2.47 Persentase Kendaraan Bermotor di Papua Barat (%), 2014
Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2016 (diolah)

Selain itu, adanya rencana untuk membangun jalur perkereta apian juga akan membantu transportasi di Provinsi Papua Barat Dengan adanya kereta api, mobilitas di Provinsi Papua Barat akan menjadi lebih cepat. Beberapa jalur perkeretaapian yang direncanakan antara lain akan berada di 3 kabupaten, yaitu Manokwari Selatan (jalur kereta api akan menghubungkan Manokwari-Nabire), Teluk Wondama (jalur kereta api akan menghubungkan Distrik Soug Wepu-Wamesa-Windesi-Kuri Wamesa-Naikere), dan Tambarauw (jalur kereta api akan menghubungkan Mega-Sausapor-Kwoor-Waiben).

Transportasi Laut

Jalur laut merupakan salah satu transportasi yang menggerakan perekonomian wilayah di Provinsi Papua Barat. Sebagian besar mobilitas orang dan barang di Provinsi Papua Barat masih menggunakan transportasi laut dikarenakan kondisi geografis wilayah. Provinsi Papua Barat memiliki 4 (empat) pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Fakfak, dan Pelabuhan Kaimana. Keempat pelabuhan utama ini digunakan sebagai pelabuhan komersil. Selain itu, terdapat pelabuhan kecil yang melayani pelayaran perintis di daerah kepulauan, pesisir pantai maupun sungai-sungai, yaitu perintis Waisor, Windesi, Oransbari, Saukorem, Sausapor, Saonek, Kalobo, Teminabuan, Inawatan, Bintuni, Babo, dan Kokas.Kemudian, rute domestik dan lokal pelayaran di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77 Rute Pelayaran Domestik dan Pelayaran Lokal di Papua Barat

No.	Nama Kapal	Rute Pelayaran
Pelayaran Domestik		
1.	KM Ciremai	Surabaya - Makassar - Bau-Bau - Sorong - Manokwari - Serui – Jayapura PP
2.	KM Dorolonda	Surabaya - Balikpapan - Pantoloan - Toli-Toli - Bitung - Ternate - Sorong - Manokwari - Nabire - Serui - Biak – Jayapura PP
3.	KM Dobonsolo	Surabaya - Makassar – Bau Bau - Sorong - Manokwari – Jayapura PP
4.	KM Labobar	Surabaya – Makassar - Sorong – Manokwari – Wasior – Nabire – Serui – Jayapura PP
5.	KM Nggapulu	Makassar – Bau Bau – P Buru – Ambon - Fakfak - Sorong – Manokwari – Wasior – Nabire – Serui – Biak - Jayapura PP
6.	KM Tatamailau	Manado – Morotai - Sorong – Fak Fak - Kaimana - Timika - Agats - Merauke PP
7.	KM Gunung Dempo	Jakarta – Surabaya – Makassar – Ambon – Sorong – Biak – Jayapura PP
8.	KM Tidar	Jakarta – Surabaya – Makassar – Bau Bau – Ambon – Banda – Tual – Dobo – Kaimana – Fak Fak PP
Pelayaran Lokal		
9.	KMP Komodo	Sorong – Saonek Waisai – Kabare PP, Sorong – Linmalas – Waigama PP, Sorong Foley – Harapan Jaya PP, Sorong – Seget – Seremuk – Konda – Teminabuan – Mugim – Kais – Inawatan – Kokoda PP, Biak – Numfor – Manokwari PP
10.	KM Kasuari Pasifik	Manokwari – Numfor – Biak PP
11.	KMP Napan Wainami	Manokwari – Wasior – Nabire PP
12.	KMP Graceia	Manokwari – Wasior PP
13.	KMP Mernati	Sorong – Sausapor – Werur – Wor – Saubeba – Wau – Waiben – Enbuan – Saukorem – Manokwari
14.	KMP Marina Express 3B	Sorong – Sausapor PP

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Rute-rute pelayaran pada Tabel 2.77 merupakan rute-rute kapal motor milik PELNI dan swasta. Selama periode 2010-2013, jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Fakfak mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 cenderung mengalami penurunan.Pada tahun 2010, kunjungan kapal di Pelabuhan Fakfak berjumlah 82, kemudian meningkat pada tahun 2011 menjadi 90. Selanjutnya pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 116 dan

pada tahun 2013 menjadi 126, namun pada tahun 2014 terjadi penurunan kunjungan kapal secara seignifikan mencapai 93 kapal menjadi 33.

Tren yang berbeda ditunjukkan pada jumlah pengunjung datang yang cenderung menurun, walaupun pada tahun 2013 sempat meningkat namun kembali turun pada tahun 2014. Pada tahun 2010, jumlah penumpang kapal adalah sebanyak 32.682 penumpang, kemudian menurun menjadi 32.449 penumpang pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012, jumlah penumpang berkurang menjadi 32.294 penumpang, namun pada tahun 2014 jumlah penumpang kapal mengalami peningkatan sebanyak 41.806 penumpang. Pada tahun 2014 terjadi penurunan kembali sebesar 16.252 penumpang menjadi 25.544 penumpang. Pengunjung pergi di Pelabuhan Fakfak mengalami tren yag hampir sama dengan kunjungan kapal. Pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan dari 30.903 penumpang menjadi 43.784 penumpang, namun mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 35.535 penumpang.

Pada jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Manokwari pada tahun 2010-2014 cenderung mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2013 sempat mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, kunjungan kapal di Pelabuhan Manokwari berjumlah 323, kemudian menurun pada tahun 2011 menjadi 214. Selanjutnya pada tahun 2012 kembali menurun menjadi 116. Pada tahun 2013 kunjungan kapal mengalami kenaikan hingga 100 kapal menjadi 126, namun pada tahun 2014 kembali menurun mencapai 182 kapal.

Tren yang berkebalikan ditunjukkan pada jumlah pengunjung yang datang. Pada tahun 2010, jumlah penumpang kapal adalah sebanyak 88.666 orang penumpang, kemudian meningkat menjadi 103.105 penumpang pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012, jumlah penumpang meningkat menjadi 115.212 penumpang, namun pada tahun 2014 jumlah penumpang kapal mengalami penurunan sebanyak 14.306 penumpang menjadi 100.906 penumpang. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan kembali menjadi 102.932 penumpang. Sedangkan, pengunjung pergi di Pelabuhan Manokwari mengalami tren yang cukup fuktuatif. Pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan dari 97.328 penumpang menjadi 118.030 penumpang, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan dari 118.030 penumpang menjadi 111.107 penumpang dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2013-2014 dari 111.107 penumpang menjadi 116.242 penumpang.

Selama periode 2010-2012, jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Kota Sorong mengalami peningkatan, namun pada tahun 2013-2014 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010, kunjungan kapal di Pelabuhan Kota Sorong berjumlah 264, kemudian meningkat pada tahun 2011 menjadi 313. Selanjutnya pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 368 dan pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 24 kapal menjadi 344. Tren penurunan ini pun berlanjut pada tahun 2014 mencapai 216 kapal.

Tren yang cukup fluktuatif juga terlihat pada jumlah pengunjung datang di Pelabuhan Kota Sorong. Pada tahun 2010 jumlah pengunjung datang sebanyak 115.839 orang, kemudian terjadi peningkatan menjadi 130.056 orang pada tahun 2011. Selanjutnya kembali meningkat menjadi 165.504 pada tahun 2012. Pada tahun 2013 terjadi penurunan jumlah pengunjung datag sebesar 13.416 orang menjadi 152.088 orang dan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 219.968 orang. Pengunjung pergi dari Pelabuhan Kota Sorong pun memiliki tren yang sama dengan pengunjung datang. Pada tahun 2010-2012 mengalami peningkatan dari 124.741 penumpang menjadi 180.024 penumpang, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan dari 180.024 penumpang menjadi 117.565 penumpang dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 162.853 penumpang.

Tabel 2.78 Total Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang dari Pelayaran Dalam Negeri di 3 Pelabuhan yang Diusahakan di Papua Barat (orang), 2010-2014

Pelabuhan	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Fakfak	Kunjungan Kapal	82	90	116	126	33
	Pengunjung Datang	32.682	32.449	32.294	41.806	25.544
	Pengunjung Pergi	30.903	32.477	35.762	43.784	35.535
Manokwari	Kunjungan Kapal	323	214	197	297	182
	Pengunjung Datang	88.666	103.105	115.212	100.906	102.932
	Pengunjung Pergi	97.328	118.03	111.107	115.076	116.242
Kota Sorong	Kunjungan Kapal	264	313	368	344	216
	Pengunjung Datang	115.839	130.056	165.504	152.088	219.968
	Pengunjung Pergi	124.741	155.617	180.024	117.565	162.853

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Pada Tabel 2.78 terlihat bahwa pada tahun 2014 jumlah kunjungan kapal terbangan berada di Pelabuhan Kota Sorong yang berjumlah 216 kapal, diikuti dengan jumlah pengunjung datang terbanyak sebesar 219.968 orang dan jumlah pengunjung pergi terbanyak sebesar 162.853 orang. Ketiga pelabuhan tersebut merupakan potret kegiatan

pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia di Provinsi Papua Barat. Adapun persebaran pelabuhan-pelabuhan baik skala besar maupun kecil serta rencana pelabuhan di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Gambar 2.48.

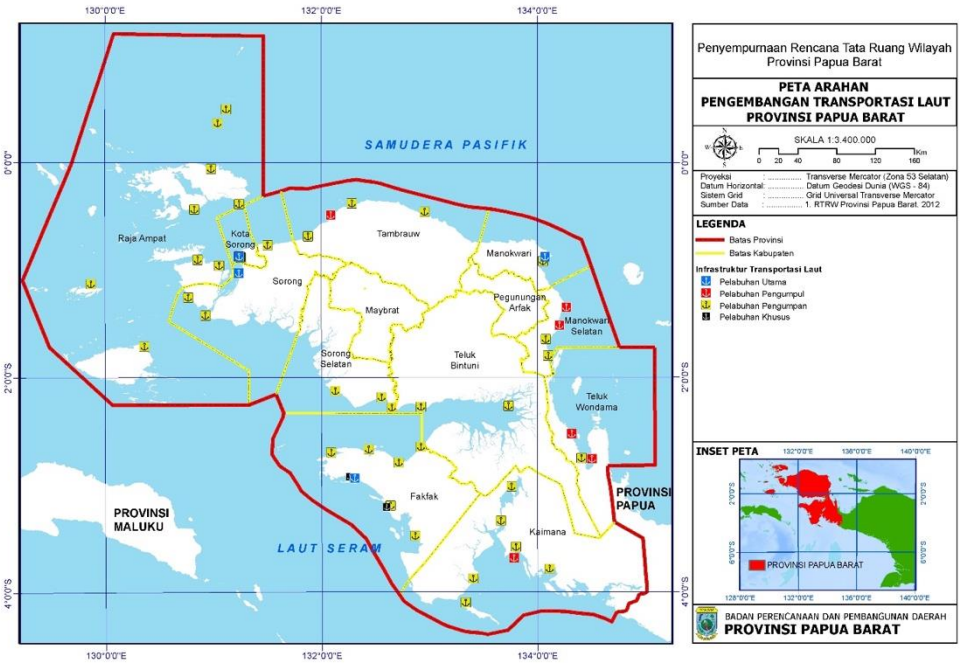

Gambar 2.48. Peta Arahan Transportasi Laut
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Adapun rencana pengembangan dan pembangunan 7 (tujuh) pelabuhan, yaitu pelabuhan Kaimana, pelabuhan Seget (Kabupaten Sorong), pelabuhan Teminabuan (Kabupaten Sorong Selatan), pelabuhan Saonek (Kabupaten Raja Ampat), pelabuhan Kokas (Kabupaten Fakfak), pelabuhan Ara (Kota Sorong), dan pelabuhan Fakfak. Selain itu, terdapat pula rencana pengembangan pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan, dan pelabuhan khusus di Papua Barat pengembangan pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan, dan pelabuhan khusus di Papua Barat. Sesuai dengan Gambar 2.48, pelabuhan utama terletak di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong. Sedangkan pelabuhan pengumpul berada di Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari Selatan (pelabuhan di Distrik Oransbari dan Distrik Momiwaren), Kabupaten Teluk Wondama (pelabuhan Wasior dan pelabuhan Windesi), Kabupaten Tambrauw (pelabuhan Sausapor), dan Kota Sorong (pelabuhan Arar).

Kemudian pelabuhan pengumpan berada di Kabupaten Fakfak (pelabuhan baru di Tanjung Seka pada Distrik Kokas); Kabupaten Kaimana (pelabuhan penyeberangan di

Distrik Kaimana, pelabuhan Werifi di Distrik Teluk Etna, pelabuhan Lobo di Distrik Kaimana, pelabuhan Kambala di Distrik Buruway, pelabuhan Pulau Adi di Distrik Burway, dan pelabuhan di Tanggaroni); Kabupaten Raja Ampat (pelabuhan Saonek, pelabuhan Waisai, pelabuhan Urbanisopen, pelabuhan Kabare, pelabuhan Yanbekwan, pelabuhan Waigama, pelabuhan Foley, pelabuhan Mikiran, dan pelabuhan Yenanas); Kabupaten Sorong Selatan (pelabuhan Teminabuan, pelabuhan Inanwatan, pelabuhan Atori); Kabupaten Teluk Wondama (pelabuhan Ambumi); Kabupate Tambrauw (pelabuhan Kwor dan pelabuhan Weiben); Kabupaten Sorong (pelabuhan di Seget, Sailolof, Segun, Wanurian, Klabot, Makbon, dan Mega); dan Kabupaten Teluk Bintuni (pelabuhan Bobo dan Bintuni).

Pelabuhan khusus terletak di Kabupaten FakfaK (pelabuhan laut peti kemas di Tanjung Kiat); Kabupaten Kaimana (pelabuhan khusus perikanan di Distrik Teluk Etna); Kabupaten Manokwari Selatan (pelabuhan Memey); Kabupaten Sorong (pelabuhan khusus perikanan dan pengalengan di Klalin I, pelabuhan khusus kayu lapis di Arar Distrik Mayamuk, pelabuhan khusus Petro Cina (kilang minyak) di MT. Kasim, dan pelabuhan khusus Kilang Minyak Pertamina di Kasim); Kota Sorong (terminal khusus barang/peti kemas di Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur, terminal khusus Minyak di Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong, terminal khusus di Kelurahan Raam Distrik Sorong Kepulauan, terminal khusus di Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan, dan terminal khusus di Kelurahan Doom Timur Distrik Sorong Kepulauan).

Transportasi Udara

Transportasi udara merupakan salah satu transportasi penting di Papua Barat, hal ini dikarenakan karakteristik wilayah yang cukup bergunung, curam, dan diliputi oleh hutan sehingga transportasi darat menjadi cukup sulit untuk mengakses beberapa daerah. Transportasi udara yang ada melayani 2 (dua) rute, yaitu rute domestik dengan rute lokal. Untuk rute penerbangan domestik dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.79 Rute Penerbangan Domestik Di Provinsi Papua Barat

Tujuan	Jumlah Maskapai (unit)	Intensititas Penerbangan (kali per Minggu
Jakarta (CGK)	3	7
Surabaya (SUB)	3	7
Makassar (UPG)	3	7

Tujuan	Jumlah Maskapai (unit)	Intensititas Penerbangan (kali per Minggu
Kendari (KDI)	2	7
Jogjakarta (JOG)	2	7
Denpasar (DPS)	1	7
Jayapura (DJJ)	2	7
Banjarmasin (BDJ)	1	4
Sorong (SOQ)	2	7

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Penerbangan rute lokal melayani beberapa wilayah di Papua Barat, yaitu Manokwari, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Kota Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Fakfak, Pengunungan Arfak dengan jadwal penerbangan hanya pada hari-hari tertentu saja. Rute penerbangan lokal di Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80 Rute Penerbangan Lokal di Provinsi Papua Barat

Bandara Asal	Bandara Tujuan	Jumlah Maskapai	Intensitas Penerbangan per Minggu
Manokwari (Rendani Airport)	- Wasior (Teluk Wondama) - Bintuni (Teluk Bintuni) - Kebar (Tambrauw) - Merdey (Teluk Bintuni - Kambuaya (Sorong Selatan - Kaimana - Irai (Pegunungan Arfak)	1	2
Bintuni (Stenkol Airport)	- Kota Sorong - Manokwari	1	2
Merdey (Jahabra Airport)	- Manokwari	1	2
Kebar (Kebar Airport)	- Manokwari	1	2
Kambuaya (Kambuaya Airport)	- Kota Sorong - Manokwari	1	2
Kota Sorong (Domine Eduard Osok)	- Kambuaya - Bintuni - Waisai (Raja Ampat) - Fakfak - Kaimana	1	2
Wasior (Wasior Airport)	- Manokwari	1	2
Waisai (Waisai Airport)	- Kota Sorong	1	2

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Selain rute penerbangan dan bandara yang sudah ada, terdapat rencana 5 (lima) bandara yang akan beroperasi, yaitu bandara Domine Eduard Osok (Kota Sorong), bandara Bintuni (Bintuni). Bandara Segun (Sorong), bandara Werur (Tambrauw), dan bandara Rendani (Manokwari. Adapun persebaran bandara-bandara baik skala penyebaran tersier maupun regional serta rencana bandara di Papua Barat dapat dilihat pada Gambar 2.49.

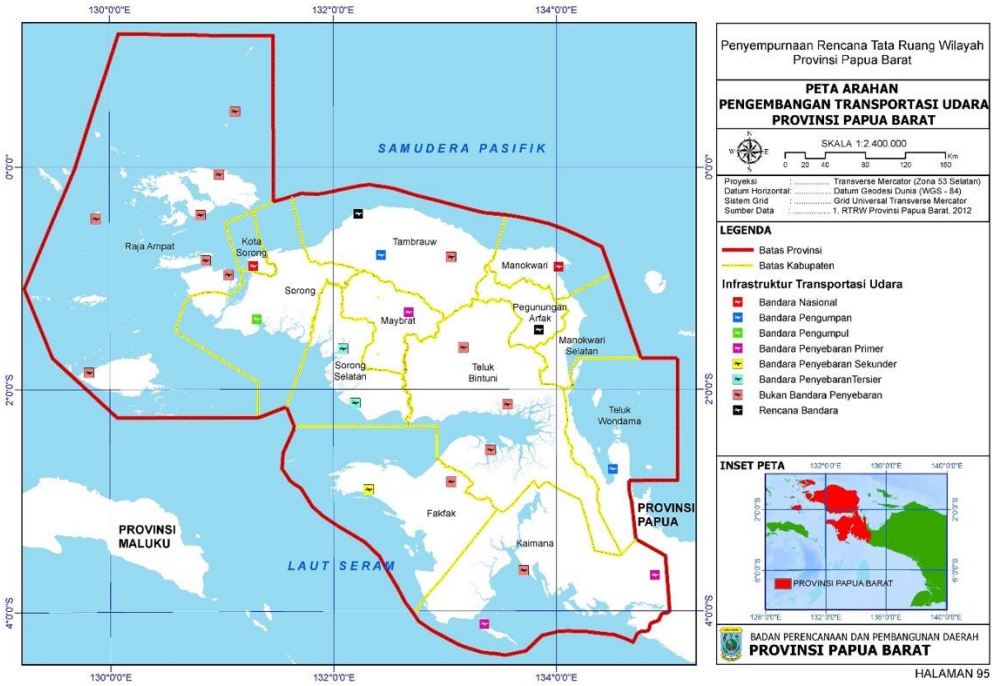

Gambar 2.49 Peta Arahan Transportasi Udara di Provinsi Papua Barat
Sumber : RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Adapun rencana pembangunan fasilitas transportasi udara yang akan dilakukan di Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81 Rencana Bandar Udara di Provinsi Papua Barat

No.	Kabupaten/Kota	Nama Bandar Udara
1.	Fakfak	- Bandara Siboru di Distrik Fakfak Barat untuk pelayanan regional
2.	Manokwari	- Bandara nasional Rendani
3.	Maybrat	- Bandara Kambuaya untuk pelayanan regional
4.	Raja Ampat	- Bandara Waisai (Distrik Waisai) - Bandara Waigama (Distrik Misool) - Bandara Kabare (Distrik Waigeo Utara)

		- Bandara Jefman (Distrik Salawati Utara) - Bandara Gag (Distrik Waigeo Barat Kepulauan) - Bandara Dorekar (Distrik Ayau)
5.	Sorong Selatan	- Bandara Teminabuan (Distrik Teminabuan) - Bandara Inanwatan (Distrik Inanwatan)
6.	Pegunungan Arfak	- Bandara Irai (Distrik Anggi) - Bandara Iranmeba (Distrik Didohu) - Bandara Testega (Distrik Testega) - Bandara Meidogda (Distrik Testega) - Bandara Catubouw (Distrik Catubouw) - Bandara Taige (Distrik Taige), - Bandara Minyambow (Distrik Minyambow)
7.	Teluk Wondama	- Bandara pengumpan Wasior
8.	Tambrauw	- Bandara perintis menjadi bandara pengumpan di Distrik Fef - Bandara Werur
9.	Kota Sorong	- Bandara Nasional Domine Eduard Osok
10.	Sorong	- Bandara pengumpul di Distrik Segun menjadi bandara internasional
11.	Teluk Bintuni	- Bandara bukan pusat penyebaran di Babo

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Selama periode 2010-2014 keberangkatan dan kedatangan pesawat di Papua Barat memiliki tren yang sama, yaitu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlah pesawat berangkat sebanyak 11.820 pesawat menjadi 14.409 pesawat pada tahun 2014. Hal serupa juga terjadi pada kedatangan pesawat yang awalnya 11.656 pesawat pada tahun 2010 meningkat menjadi 14.602 pesawat pada tahun 2014. Tren keberangkatan dan kedatangan pesawat ternyata berbeda dengan tren yang terjadi pada jumlah penumpang berangkat maupun pergi. Pada keberangkatan penumpang pada tahun 2010 berjumlah 349.183, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2011 menjadi 347.505 penumpang. Selanjutnya kembali meningkat pada tahun 2012 menjadi 513.301 dan kembali meningkat menjadi 612.397 penumpang pada tahun 2013, namun kembali terjadi penurunan jumlah penumpang pada tahun 2014 menjadi 609.132 penumpang.

Tabel 2.82 Jumlah dan Penumpang Pesawat di Provinsi Papua Barat (orang), 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Pesawat Berangkat	11.820	11.632	13.956	14.289	14.409
Pesawat Datang	11.656	11.614	13.818	14.289	14.602
Penumpang Berangkat	349.183	347.505	513.301	612.397	609.132

Penumpang Datang	334.727	333.428	485.541	569.770	564.076
Penumpang Transit	198.831	159.992	173.913	171.930	172.762

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Pada kedatangan penumpang, pada tahun 2010 berjumlah 334.727 penumpang, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2011 menjadi 333.428 penumpang. Pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 485.541 penupang dan terus meningkat menjadi 569.770 penumpang pada tahun 2013, namun penurunan terjadi kembali pada tahun 2014 menjadi 564.076 penumpang. Untuk jumlah penumpang transit di Papua Barat pada tahun 2010 sebesar 198.831 penumpang, namun menurun pada tahun 2011 menjadi 159.992 penumpang. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah penumpang transit menjadi 173.913 penumpang, dan kembali turun pada tahun 2013 menjadi 171.930 penumpang. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2014 sebesar 172.762 penumpang.

2.3.1.15. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Provinsi Papua Barat dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Salah satu layanannya adalah menggunakan layanan komunikasi tertulis melalui kantor pos di Papua Barat. Pada tahun 2014 terdapat 6 (enam) kantor pos dan giro di Provinsi Papua Barat, yang terdiri dari 1 kantor pos dan giro induk, 3 kantor pembantu, dan 2 kantor pos dan giro tambahan. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah kantor pos dan giro pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 jumlah kantor pos dan giro berjumlah 27 buah, kemudian menurun pada tahun 2011 menjadi 19 buah. Pada tahun 2012 sempat terjadi kenaikan menjadi 22 buah, namun kembali turun pada tahun 2013 menjadi 15 buah dan terakhir pada tahun 2014 hanya tinggal 6 buah saja.

Tabel 2.83 Banyaknya kantor Pos dan Giro Menurut Jenisnya, 2010-2014

Tahun	Kantor Pos dan Giro Induk	Kantor pembantu	Kantor Pos dan Giro Tambahan	Rumah Pos	Kantor Pos	Jumlah
2010	6	7	0	3	11	27
2011	5	6	2	4	4	19
2012	7	9	4	0	2	22
2013	3	5	5	0	2	15
2014	1	3	2	0	0	6

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2015

Untuk layanan surat terdapat 4 jenis layanan surat yang dapat diakses oleh masyarakat, yaitu layanan jasa surat biasa, kiltas, kilat khusus, dan pengiriman luar negeri. Jumlah pengiriman surat di Papua Barat cendderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 jumlah surat yang dikirimkan sebanyak 310.825 surat, kemudian turun drastis menjadi 85.998 surat pada tahun 2011. Penurunan jumlah surat yang dikirim berlanjut pada tahun 2012 mencapai 65.293 surat. Pada tahun 2013 sempat mengalami kenaikan mencapai 130.698 surat, namun kenaikan jumlah pengiriman surat ini tidak melebihi jumlah pengiriman surat pada tahun 2010.

Tabel 2.84 Banyaknya Surat Pos Yang dikirim Menurut Sifat Pengiriman, 2010-2014

Tahun	Biasa	Kilat	Kilat Khusus	Luar Negeri	Jumlah
2010	133.108	22.316	155.101	300	310.825
2011	14.447	124	66.753	314	85.998
2012	20.478	328	42.282	425	65.293
2013	8.026	5.319	116.937	416	130.698
2014	6.759	0	86.684	563	84.194

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2015

Penurunan pun kembali terjadi pada tahun 2014 hingga mencapai 84.194 surat. Surat-surat tersebut terdiri dari atas layanan surat biasa sebesar 6.759 surat atau sebesar 7%, layanan surat kilat khusus sebesar 86.684 surat atau sebesar 92%, dan sisanya layanan surat luar negeri sebesar 563 surat atau sebesar 1%.

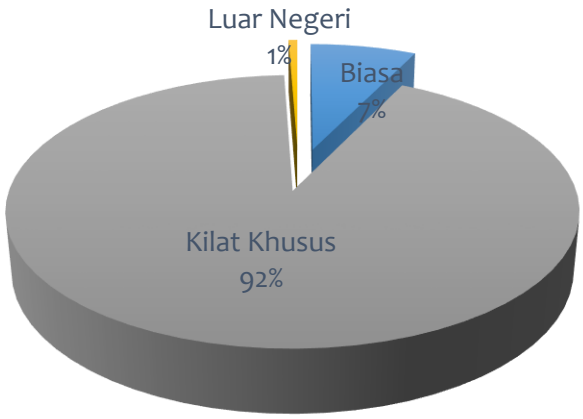

Gambar 2.50 Persentase Banyaknya Surat Pos Yang dikirim Menurut Sifat Pengiriman, 2014
Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2015 (diolah)

Untuk jenis komunikasi telepon, jumlah sentral telepon otomatis tertinggi berada pada tahun 2010 dengan jumlah 19.748 sambungan dan terendah pada tahun 2014 dengan jumlah 3,833 sambungan. Untuk sambungan cabang otomatis tertinggi juga berada pada tahun 2010 dengan jumlah 3.507 sambungan dan terendah pada tahun 2012.

Tabel 2.85 Jumlah Sambungan telepon menurut Jenis Sambungan

Tahun	Sambungan Sentral			Sambungan Cabang		
	Otomatis	Biasa	Jumlah	Otomatis	Biasa	Jumlah
2010	19.748	-	19.748	3.507	-	3.507
2011	4.223	8	4.231	3.139	-	3.139
2012	12.574	8	12.574	-	-	0
2013	4.333	-	4.333	6	-	6
2014	3.833	-	3.833	6	-	6

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2015

Jumlah sentral telepon di Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 berjumlah empat unit, satu unit berada di Kabupaten Fakfak dengan kapasitas otomatis sebanyak 3.157 sambungan, satu unit berada di Kabupaten Kaimana dengan kapasitas otomatis sebanyak 675 sambungan, dan dua unit berada di Kota Sorong dengan kapasitas sebanyak 1 sambungan. Sedangkan, jumlah sambungan cabang otomatis di Kota Sorong dengan kapsitas otomatis sebanyak 6 sambungan.

2.3.1.16. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan rakyat. Semakin banyaknya koperasi yang aktif diharapkan dapat memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan, guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan jumlah pengangguran. Jumlah koperasi aktif dari tahun 2010 hingga 2013 selalu mengalami penurunan, berbeda dengan tahun sebelumnya yang sempat mengalami kenaikan dari tahun 2009 sejumlah 506 koperasi aktif menjadi 710 koperasi aktif. Kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2013 menjadi 626 koperasi aktif. Dengan penurunan koperasi aktif selama tiga tahun terakhir ini, diharapkan pemerintah kembali menggalakkan kembali koperasi di masing-masing kabupaten/kota di Papua Barat. Berbeda dengan koperasi aktif, jumlah koperasi tidak aktif cenderung tidak stabil setiap tahunnya.

Pada tahun 2010 jumlah koperasi tidak aktif meningkat dari 451 koperasi menjadi 556 koperasi. Kemudian pada 2011 kembali meningkat menjadi 569 koperasi. Pada tahun 2012 menurun menjadi 439 koperasi dan pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 811 koperasi tidak aktif.

Tabel 2.86 Jumlah Koperasi Provinsi Papua Barat (unit), 2009-2013

Jenis Koperasi	2009	2010	2011	2012	2013
Koperasi Aktif	506	701	373	412	626
Koperasi Tidak Aktif	451	556	569	439	811
Jumlah	957	1.257	942	851	1.437

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2014

Apabila melihat jumlah koperasi aktif dan tidak aktif per kabupaten pada tahun 2013, Kabupaten Manokwari merupakan kabupaten dengan jumlah koperasi aktif terbanyak sebesar 231 koperasi dan koperasi aktif paling sedikit berada di Kabupaten Tambrauw sebesar 8 koperasi aktif. Sedangkan koperasi tidak aktif terbanyak berada di Kabupten Fakfak yaitu sebanyak 303 koperasi.

Tabel 2.87 Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (unit), 2013

Kabupaten/Kota	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
Fakfak	28	303	331
Kaimana	11	39	50
Teluk Wondama	10	26	36
Teluk Bintuni	38	89	127
Manokwari	231	95	326
Sorong Selatan	74	41	115
Sorong	73	90	163
Raja Ampat	65	0	65
Tambrauw	8	6	14
Maybrat	15	32	47
Kota Sorong	73	90	163

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2014

Di Provinsi Papua Barat terdapat 14 macam koperasi pada tahun 2015, yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 145 koperasi, Koperasi Pontren (KOPENTREN) sebanayak 12 koperasi, KOPERMAS sebanayak 254 koperasi, Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) sebanyak 78 koperasi, Koperasi Karyawan (KOPKAR) sebanyak 22 koperasi, Koperasi Angkatan Darat (TNI AD) sebanyak 12 koperasi, Koperasi Serba Usaha (KSU) sebanyak 351 koperasi, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebanyak 165 koperasi, Koperawi Wanita sebanyak 41 koperasi, Koperasi Mahasiswa sebanyak 15 koperasi, Koperasi Perikanan/Nelayan sebanyak 20 koperasi dan koperasi lainnya sebanyak 120 koperasi.

Sementara itu, jenis Usaha industri di Papua Barat dapat dibagi menjadi 8 jenis industri, yaitu industri dari kulit, industri dari kayu, industri logam mulia dan bahan dari logam, industri anyaman, industri gerabah/keramik/batu, industri kain/tenun, industri makanan dan minuman, serta industri lainnya. Industri dari kulit berjumlah 2 industri, industri dari kayu sebanyak 118 industri, industri logam mulia dan bahan dari logam sebanyak 9 industri, industri anyaman sebanayak 125 industri, industri gerabah/keramik/batu sebanayak 74 industri, industri kain/tenun sebanyak 22 industri, industri makanan dan minuman sebanyak 115 industri dan industri lainnya sebanyak 35 industri.

Dilihat dari jumlah usaha, pada tahun 2012 dan 2013 jumlah usaha pada sektor industri kecil ini mencapai 1.225 usaha, dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi sebesar 3.813 orang, dan nilai produksi mencapai Rp 13.381.123. Pada tahun 2012 hingga 2013 tidak terjadi peningkatan maupun penurunan atau dapat dibilang cukup stangnan.

Tabel 2.88 Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi menurut Jenis di Paua Barat, 2011-2013

Uraian	2011	2012	2013
Jumlah Usaha (unit)	1.009	1.225	1.225
Tenaga Kerja (orang)	2.987	3.813	3.813
Nilai Produksi (Ribu Rp)	134.799.544	13.381.123	13.381.123

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2014

2.3.1.17. Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat. Pada RPJMN 2015-2019 sudah tertuang pula poin mengenaik peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, yang menandakan keseriusan dari pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penanaman modal dibedakan menjadi dua, yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan PMDN adalah kegiatan menanam modal yang sepenuhnya dilakukan oleh penanam modal dalam negeri.

Selama periode 2011 hingga 2015, PMA di Provinsi Papua Barat cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah proyek maupun niai investasi yang masuk. Pada tahun 2011 jumlah proyek di Papua Barat mencapai 4.342 proyek, dengan nilai investasi US$19.475 juta. Kemudian, pada tahun 2012 meningkat menjadi 4.579 proyek dengan nilai investasi sebesar US$24.565 juta dan pada tahun 2013 menjadi 9.612 proyek dengan nilai investasi sebesar US$28.618 juta. Peningkatan ini pun terus terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 12.632 proyek dengan nilai investasi sebesar 28.529,8 juta dan pada tahun 2015 mencapai 17.738 proyek nilai nilai investasi mencapai US$29.275,9 juta. Pada tahun 2015 sebagian besar proyek berada pada sektor perindustrian dengan jumlah sebanyak 7.184 proyek dengan nilai investasi sebesar US$11.763,07 juta dan terendah

berada pada sektor kehutanan dengan jumlah proyek sebanyak 79 proyek dengan nilai investasi sebesar US$18,19 juta.

Tabel 2.89 Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Papua Barat, 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Proyek (unit)	4.342	4.579	9.612	12.632	17.738
Nilai Investasi (juta US$)	19.475	24.565	28.618	28.529,6	29.275,9

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Arah pertumbuhan PMDN hampir sama besarnya dengan PMA. Walaupun dalam sisi jumlah proyek masih terbilang lebih besar PMA dibanding PMDN, namun secara perlahan namun pasti PMDN terus meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2011-2015. Pada tahun 2011 jumlah proyek PMDN sebanyak 1.313 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 76.000,7 miliar. Pada tahun 2012 jumlah proyek PMDN sempat menurun menjadi 1.210 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 92.182 miliar. Walaupun ada penuruna jumlah proyek pada tahun 2012, namun nilai investasi tetap meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2011. Kemudian pada tahun 2013 meningkat kembali menjadi 2.129 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 128.151 miliar dan kembali meningkat menjadi 2.392 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 156.126,27 miliar pada tahun 2014. Selanjutnya, pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah proyek yang mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 5.100 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 179.465,87 miliar.

Tabel 2.90 Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Papua Barat, 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Proyek (unit)	1.313	1.210	2.129	2.392	5.100
Nilai Investasi (miliar Rp)	76.000,7	92.182	128.151	156.126,27	179.465,87

Sumber: BPS Provinsi Papa Barat, 2017

Pada tahun 2015, PMDN tertinggi berada pada sektor perindustrian dengan jumlah proyek sebesar 2.525 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 89.045,29 miliar dan jumlah proyek PMDN terendah berada pada sektor kehutanan dengan jumlah 15 proyek, namun nilai investasi terendah berada pada sektor perikanan sebesar Rp 274,65 miliar. PMA dan

PMDN yang ada di Papua Barat memiliki kecenderungan mengarah ke sektor perindustrian. Tingginya PMA dibandingkan dengan PMDN yang ada di Papua Barat menandakan bahwa lebih banyak investasi yang berasal dari penanam modal luar negeri dibandingkan dengan penanam modal dalam negeri.

2.3.1.18. Kepemudaan dan Olah Raga

Pada dasarnya kepemudaan dan olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepemudaan dan olahraga. Urusan kepemudaan dan olah raga diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sebagai pelaku utama dalam pembangunan di dalam lingkup kepemudaan dan olahraga. Dalam rangka memenuhi arahan tersebut diperlukan program-program yang berkaitan dengan sektor lain, misalnya pendidikan, kesehatan, kepemimpinan serta profesionalitas.

Dalam kaitannya dengan meningkatkan pembinaan urusan kepemudaan dan olahraga, diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar internasional. Pada tahun 2014, ketersediaan lapangan olahraga di Papua Barat bervariasi. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.93 jumlah lapangan sepakbola mencapai 328 buah di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Papua Barat. Jumlah lapangan terbanyak ada di Kabupaten Raja Ampat, dengan jumlah 78 lapangan. Sementara itu jumlah paling sedikit berada di Kabupaten Manokwari Selatan, sejumlah 7 lapangan. Selain itu, di kabupaten yang lainnya memiliki jumlah lapangan yang cukup bervariasi. Pada cabang olahraga yang lain yaitu voli, jumlah lapangan yang tersedia di seluruh Provinsi Papua Barat berjumlah 664 lapangan. Jumlah lapangan voli yang terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Pegunungan Arfak dengan jumlah 105 lapangan. Sementara itu, Kota Sorong memiliki jumlah lapangan bola voli yang tersedikit yaitu dengan jumlah 17 lapangan. Beralih pada cabang olahraga bulutangkis, di seluruh Papua Barat memiliki 86 lapangan. Jumlah tersebut didominasi oleh Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong, ketiganya masing-masing memiliki 18 lapangan bulu tangkis di daerahnya. Sementara itu di Kabupaten Tambraw, dan Kabupaten Maybrat hanya memiliki 1 buah lapangan bulu tangkis di daerahnya masing-

masing. Sementara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak tidak memiliki lapangan bulu tangkis.

Selanjutnya pada cabang olahraga basket, di Provinsi Papua Barat memiliki 31 lapangan basket yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Jumlah lapangan basket terbanyaj dimiliki oleh Kota Sorong dengan 9 lapangan. Sementara itu, kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Tambraw adalah yang memiliki lapangan basket paling sedikit karena hanya memiliki masing-masing satu buah lapangan basket. Sementara Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Pegunungan Arfak tidak memiliki lapangan basket.

Dalam cabang olahraga tenis lapangan, di seluruh Papua Barat memiliki dua puluh lapangan. Delapan buah lapangan terdapat di kota sorong (terbanyak) dan di Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Pegunungan Arfak hanya memiliki masing-masing satu buah lapangan. Selain itu, di kabupaten lain tidak memiliki lapangan tenis.

Pada Tabel 2.93 juga ditampilkan jumlah lapangan futsal yang ada di Papua Barat. Lapangan futsal terbanyak ada di Kabupaten Fakfak, jumlahnya 14 buah lapangan. Sementara itu Kabupaten Teluk Wondama dan kabupaten Sorong Selatan memiliki sebuah lapangan futsal saja. Berbeda dengan kondisi kabupaten yang lain, di Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak tidak memiliki lapangan futsal.

Fasilitas olahraga renang di Provinsi Papua Barat jumlahnya tidak sebanyak fasilitas olahraga yang lain. Provinsi Papua barat hanya memiliki tiga buah Kolam Renang, yaitu 1 kolam renang berada di Kabupaten Manokwari, dan 2 buah kolam renang ada di Kota Sorong.

Tabel 2.91 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Lapangan Olah Raga di Provinsi Papua Barat

Kabupaten/Kota		Sepak Bola	Bola Voli	Bulu Tangkis	Bola Basket	Tenis Lapangan	Futsal	Kolam Renang
1.	Fakfak	18	44	5	2	2	14	-
2.	Kaimana	23	36	6	2	1	7	-
3.	Teluk Wondama	15	25	2	1	1	1	-
4.	Teluk Bintuni	34	99	18	4	-	4	-
5.	Manokwari	39	63	18	6	5	6	1
6.	Sorong Selatan	23	42	-	-	1	1	-
7.	Sorong	41	60	18	2	-	2	-
8	Raja Ampat	78	87	2	2	-	4	-
9.	Tambrauw	14	24	1	1	-	-	-
10.	Maybrat	11	31	1	-	1	-	-
11.	Manokwari Selatan	7	31	4	2	-	-	-
12.	Pegunungan Arfak	10	105	-	-	1	-	-
13.	Kota Sorong	15	17	11	9	8	3	2
Papua Barat		**328**	**664**	**86**	**31**	**20**	**42**	**3**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2014

2.3.1.19. Statistik

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Provinsi Papua barat bekerjasama dengan BPS Provinsi Papua Barat telah merangkum berbagai statistik Provinsi Papua Barat. Urusan statistik yang dimaksud merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Propinsi Papua Barat. Urusan Statistik ini dirujuk berdasarkan lampiran Permendagri No. 45 tahun 2010, yaitu adanya ketersediaan dokumen perencanaan berikut:

1. Buku Provinsi dalam angka
2. Buku Statistik Daerah
3. Buku PDRB Provinsi

Penyusunan ketiga buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. Berdasarkan ketersediaan ketiga buku tersebut dapat dilihat pada Tabel XX. Provinsi Papua barat telah menunjukkan kemajuan pesatnya dengan hasil selama periode 2011-2016 rangkuman statistik buku-buku tersebut selalu tersedia.

Buku Provinsi Papua Barat dalam angka pada dasarnya setiap tahunnya berisi dengan rangkuman statistik mengenai geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, pariwisata, keuangan daerah, dan pendapatan regional. Buku Provinsi Papua Barat dalam angka tersebut merupakan sumber data dan informasi terkait Provinsi Papua Barat dan dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat umum sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam versi yang lebih ringkas, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyediakan Buku Statistik Daerah sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan. Publikasi Buku Statistik Daerah Provinsi Papua Barat tiap tahunnya diterbitkan oleh BPS Provinsi Papua barat berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Provinsi Papua Barat yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami pembangunan serta potensi yang ada di Provinsi Papua barat. Publikasi ini mengemas kondisi terkini, perkembangan pembangunan yang ditampilkan dalam bentuk yang lebih informatif, dan bersifat analisis. Materi yang disajikan dalam Buku Statistik Daerah Provinsi Papua Barat memuat berbagai indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Provinsi Papua Barat dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Terkait dengan aktivitas ekonomi, pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyediakan buku PDRB Provinsi Papua barat baik menurut lapangan usaha maupun pengeluaran. Selama Periode 2011-2016, buku-buku tersebut selalu tersedia dan dapat di akses melalui situs BPS Provinsi Papua Barat. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengekuaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor neto antar daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi terbaru telah menggunakan tahun dasar 2010 serta sudah menerapkan *konsep System of national Accounts* 2008 seperti yang telah direkomendasikan oleh *United Nations.*

Tabel 2.92 Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2011-2016

No.	Capaian Pembangunan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Buku Provinsi Dalam Angka	√	√	√	√	√	√
2.	Buku Statistik Daerah	√	√	√	√	√	√
3.	Buku PDRB Provinsi	√	√	√	√	√	√

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

2.3.1.20. Persandian

Persandian merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk menjabarkan kewenangan daerah terkait urusan persandian maka telah dilakukan Pemetaan Urusan Persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian sebagaimana termuat dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terkait dengan kewenangan pertama yaitu penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Adapun layanan yang perlu dilakukan yaitu terkait dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JIK) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal.

Indikator keberhasilannya dilihat dari jumlah informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan, serta dari jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian. Layanan berikutnya terkait dengan melaksanakan dukungan kegiatan pengamanan informasi, dengan indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta dari jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per-bulannya.

Sedangkan kewenangan kedua terkait dengan penetapan pola hubungan komunikasi sandi dengan bentuk layanannya yaitu melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi, berdasarkan indikator berupa jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan (Majalah Info Singkat permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Sementara itu secara khusus di Provinsi papua barat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016, urusan komunikasi dan informatika kini digabung dengan Persandian dan Telekomunikasi (Santel), sehingga sudah terlaksana dan kedepannya bias bekerjasama dengan baik.

2.3.1.21. Kebudayaan

Pada dasarnya Provinsi Papua Barat memiliki keanekaragaman budaya yang masih memerlukan penataan dan pengembangan lebih lanjut dalam upaya pelestariannya. Hal ini dikarenakan banyak suku yang ada di Papua Barat yang mencapai 67 suku, antara lain Suku Matbat, Biga, Seget, Duriankere, Ma'ya, Maden, Biak, Kawe, Wauyai, Legenyem, Waigeo, Moi, As, Moraid, Abun, Karon Dori, Mpur, Meyah, Hatam, Manikion, Wandamen, Arandai, Moskona, Kaburi, Kais, Maybrat, Tehit, Kalabra, Konda, Yahadian, Suabo, Puragi, Kokoda, Kemberano, Tanahmerah, Erokwanas, Bedoanas, Arguni, Sekar, Onin, Iha, Baham, Karas, Uruangnirin, Mor, Irarutu, Kuri, Mairasi, Buruai, Kamberau, Kowiai, Semimi, Mer, Kamoro, Ekari, Tunggare, Iresim, Yaur, Yeretuar, Tandia, Roon, Dusner, Meoswar, Ansus, Woi, Pom, dan Mapia. Pada suku-suku ini dikelompokkan dalam klan- klan yang merupakan bagian dari masyarakat.

Suku Meyah, Moile, Hatam dan Manikion yang sering disebut orang Arfak tinggal di Kabupaten Manokwari dan terdiri dari 35 klan. Perkawinan di antara orang Arfak biasanya banyak diatur orangtua dan para kerabatnya. Kadang-kadang orang sudah dijodohkan sejak kecil. Sekarang pemuda dan pemudi sering mendapatkan jodoh melalui acara-acara adat seperti pesta tari adat yang bernama *ares komer*. Acara pesta seperti itu adalah makan bersama, menyanyi, menari dan memuji seseorang dengan dengan pantun yang dilagukan.

Dalam pandangan suku-suku asli Papua pada umumnya, tanah adat adalah satu hal yang sangat penting. Bagi mereka, tanah ibarat seorang ibu yang memberikan kehidupan bagi anaknya. Dengan demikian, fungsi tanah terintegrasi ke dalam keseluruhan aktivitas kehidupan.Tanah adat dalam konsep orang Papua adalah hak milik sekaligus hak atas penguasaannya. Tanah merupakan modal awal kehidupan. Dengan demikian, dalam tanah terkandung dan terkait berbagai nilai di antaranya nilai ekonomi, politis, pertahanan dan religius magis. Kepemilikan tanah bagi suku Papua bersifat komunal. Jadi, jika terjadi perpindahan kepemilikan atas tanah, perpindahan itu menjadi urusan komunal atau urusan semua anggota suku bukan urusan individu semata.

Tak hanya suku yang beragam, namun Papua Barat juga memiliki bahasa yang beragam juga, tercatat 310 bahasa yang digunakan oleh masyarakat Papua Barat namun karena ada 67 suku yang mendalamu sehingga bahasa tersebut mengecil menjadi 67 bahasa. Bahasa-bahasa yang digunakan, yakni: bahasa Matbat, Biga, Seget, Duriankere, Ma'ya, Maden, Biak, Kawe, Wauyai, Legenyem, Waigeo, Moi, As, Moraid, Abun, Karon Dori, Mpur, Meyah, Hatam, Manikion, Wandamen, Arandai, Moskona, Kaburi, Kais, Maybrat, Tehit, Kalabra, Konda, Yahadian, Suabo, Puragi, Kokoda, Kemberano, Tanahmerah, Erokwanas, Bedoanas, Arguni, Sekar, Onin, Iha, Baham, Karas, Uruangnirin, Mor, Irarutu, Kuri, Mairasi, Buruai, Kamberau, Kowiai, Semimi, Mer, Kamoro, Ekari, Tunggare, Iresim, Yaur, Yeretuar, Tandia, Roon, Dusner, Meoswar, Ansus, Woi, Pom, dan Mapia.

Bahasa-bahasa di Papua dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan besar yang oleh ahli linguistik disebut *phylum* (fila), yaitu fila bahasa-bahasa Melanesia dan fila bahas-bahasa non-Melanesia. Berdasarkan pembagian fila, bahasa-bahasa di Non-Melanesia di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terdiri dari 9 fila, yaitu: (1) fila Trans Papua; (2) fila Papua Barat; (3) fila Teluk Cendrawasih; (4) fila Kepala burung bagian Timur tingkat golongan; (5) fila Warnbori tingkat isolat; (6) fila Taurap (Borumeso) tingkat isolat; (7) fila Pauwi tingkat isolat; (8) fila Sko tingkat golongan; dan (9) fila Kuomtari tingkat golongan.

Keberagaman juga terlihat dari seni tari di Papua Barat. Di Papua Barat terdapat empat bentuk tarian adat dalam suku ini, yaitu:

a. *Tup*, merupakan gerakan berputar di tempat, atau berjalan atau berlari yang dilakukan sambil bernyanyi.
b. *Weantagawi*, merupakan gerakan dua orang yang saling berhadapan muka sambil menghentakkan kaki di tanah bersama-sama. Gerakan ini diikuti langkahmengikuti irama, maju dua langkah dan mundur dua langkah seirama dengan lagu yang dibawakan.
c. *Pipakwean*, merupakan gerakan berlari mondar-mondir di suatu tempat terbatas, seirama dengan lagu yang dibawakan.
d. *Tem*, gerakan ini diadakan di dalam rumah, di dalam sinar nyala api. Muda-mudi duduk berhadapan muka, dipisahkan oleh tungku apui, sambil bernyanyi kaum pemuda memberi daun kepada pemudi dan sebaliknya.

Sedangakan untuk tarian terdapat tiga macam, yaitu (1) tarian muda-mudi, tarian ini merupakan tarian yang dilakukan oleh para pemuda dengan cara melambai-lambaikan dedaunan kepada gais yang disukainya dan apabila si gadis menyukasinya makan gais tersebut akan ikut menari bersama pemuda tadi; (2) tarian pesta, jeni lagu yang dibawakan adalah lagu-lagu kegembiraan, kesenengan, serta pujian; dan (3) tarian perang, lagu-lagu yang dibawakan berisi lagu-lagu perjuangan yang membangkitkan semangat juang.

Apabila dilihat dari sisi kerajinan, kerajinan di Papua sangat bervariasi. Salah satunya adalah seni ukir. Ukiran-ukiran tersebut biaanya berbentuk busur, panah, maupun peralatan-peralan perang lainnya. Warna-warna yang mendominasi yang digunakan dalam kerajinan adalah putih, hitam, merah dan kuning. Warna putih dibuat dari tanah liat, isi keladi putih yang membusuk atau abu dari tungku api. Warna hitam dibuat dari asap lemak babi dan damar, arang dapur atau dari buah-buahan hutan. Warna merah dibuat dari tanah merah yang digali dari dalam tanah. Sedangkan warna kuning dibuat dari akar tumbuh-tumbuhan dan tali-talian hutan.

Banyaknya hasil kerajinan dan budaya masyarakat Papua Barat membuat pemerintah harus giat untuk mengembangkan dan memperkenalkan budaya tersebut sebagai budaya asli Papua Barat, salah satu caranya adalah dengan mendaftarkannya baik secara nasional maupun internasional. Secara runtut waktu, dalam beberapa tahun terakhir pencapaian yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada Gambar 2.51.

Gambar 2.51 Alur Kebudayaan Papua Barat yang Diakui Nasional dan Internasional
Sumber: RIPPDA Provinsi Papua Barat 2011-2030 (diolah)

Secara keseluruhan, objek wisata budaya di Provinsi Papua barat tersebar diseluruh Kabupaten maupun kota. Pada Tabel 2.93 terlihat bahwa ada berbagai macam objek wisata budaya yang tersebar di seluruh Provinsi Papua Barat. Jumlahnya dari tahun ke tahun bervariasi dan menyebar di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2009 terdapat 98 wisata budaya, kemudian menurun menjadi 32 wisata budaya pada tahun 2010. Kemudian meningkat pada tahun 2011 menjadi 133 wisata budaya dan kembali turun hingga tahun 2013 mencapai 45 wisata budaya.

Tabel 2.93 Jumlah Wisata Budaya di Provinsi Papua barat (obyek), 2009-2013

No.	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Fakfak	6	4	6	11	7
2.	Kaimana	2	2	8	8	6
3.	Teluk Wondama	4	3	19	15	9
4.	Teluk Bintuni	7	4	7	8	2
5.	Manokwari	7	6	13	11	5
6.	Sorong Selatan	2	3	3	4	1
7.	Sorong	68	6	68	1	1
8.	Raja Ampat	-	4	3	10	8
9.	Tambrauw	-	2		1	1
10.	Maybrat	-	2	1	1	1
11.	Sorong	2	6	5	4	4
Jumlah		98	32	133	74	45

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2013

2.3.1.22. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Di Provinsi Papua Barat terdapat satu buah Perpustakaan umum provinsi dan satu buah perpustakaan umum Kabupaten/kota yang juga berjumlah satu buah.

Selanjutnya, apabila dikategorikan berdasarkan jenis koleksi yang dimiliki di Perpustakaan yang ada, seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.94 terdapat 33 jenis manuskrip dan juga terdapat 37 majalah langka. Sementara itu pada beberapa tahun terakhir, jumlah anggotanya sudah mencapai 12 ribu orang.

Tabel 2.94 Jumlah Koleksi Perpustakaan Berdasarkan jenisnya, 2011

Manuskrip (unit)	Majalah langka (eks)	Jumlah anggota (orang)
33	37	12.000

Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Papua Barat, 2011

Kemudian, pendanaan yang dilakukan pemerintah Papua Barat guna menunjang perpustakaan di Papua Barat pun fluktuatif. Pada tahun 2011 pendanaan yang dikeluarkan sebesar Rp12.852.800.000, kemudian menurun pada tahun 2012 menjadi Rp9.469.550.000. Pada tahun 2013 pendanaan kembali meningkat menjadi Rp19.527.300.000 dan kembali menurun pada tahun 2014 menjadi Rp4.046.220.000. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2015 menjadi Rp3.375.270.000 dan pada tahun 2016 meningkat mencapai Rp5.050.000.000.

Beberapa program yang ada di urusan perpustakaan antara lain pembangunan gedung perpustakaan dan prasarana perpustakaan, program pengadaan rak buku perpustakaan kabupaten/kota, dan program pengadaan mobil pintar. Pada tahun 2011 dan 2012 pembangunan perpustakaan difokuskan di dua tempat, yaitu di Provinsi Papua Barat (perpustakaan provinsi) dan di Kabupaten Sorong. Kemudian pengadaan buku bacaan difokuskan di Kabupatek Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Raja Ampat, sedangkan pengadaan rak buku perpustakaan difokuskan di Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Kaimana. Pada tahun 2013 terdapat pengadaan jaringan perpustakaan online, sehingga semua masyarakat dapat mengakses melalui internet. Pada tahun 2015 dibangun pondol baca perpustakaan kampung kabupaten/kota di Kabupaten Manokwari dan pada tahun 2016 pemerintah membantu membangun perpustakaan kampus UKIP Sorong.

2.3.1.23. Kearsipan

Tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berbeda dari suatu organisasi, menuntut sistem pengarsipan yang baik sebagai informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. Arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan, harus dapat terus terpelihara dan dilestarikan sebagaimana mestinya dalam menciptakan suatu tata kelola administrasi yang baik. Kesadaran akan pentingnya arsip diseluruh jajaran pemerintahan menjadi titik tekan tertentu penyelenggaraan program bidang kearsipan.

Untuk menopang program-program tersebut, pendanaan merupakan salah satu hal yang penting. Pendanaan pada urusan kearsipan ini menjadi satu dengan urusan perpustakaan, sehingga cukup susah untuk membedaka pos untuk kearsipan dan perpustakaan pada awalnya. Dana penunjang perpustakaan di Papua Barat pun fluktuatif. Pada tahun 2011 pendanaan yang dikeluarkan sebesar Rp1.755.250.000, kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp3.796.020.000. Pada tahun 2013 pendanaan menurun menjadi Rp2.701.800.000 dan kembali menurun pada tahun 2014 menjadi Rp1.950.200.000. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi Rp2.306.000.000 dan pada tahun 2016 kembali menurun mencapai Rp2.270.800.000. Beberapa program yang ada di urusan perpustakaan antara lain program pengumpulan data kearsipan, program pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan, dan program penyelematan dan pelestarian dokumen. Pada tahun 2013 dimulai pembangunan depo arsip di Kabupaten Manokwari.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Provinsi Papua Barat memiliki potensi sumberdaya kelautan yang besar baik untuk sektor perikanan, minyak dan gas, wisata, perhubungan laut, dan konservasi. Dengan potensi sumberdaya kelautan yang tinggi meliputi kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal sehingga di masa mendatang, melalui pemanfaatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai sumber devisa, kebutuhan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Perairan Provinsi Papua Barat merupakan bagian dari Perairan Indonesia yang berbatasan dengan dua sistem samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sehingga sifat serta kondisi fisik dan kimia seperti massa air, arus, pasang surut dan kesuburan perairan sangat dipengaruhi oleh kedua samudera tersebut. Selain pengaruh tersebut, musim juga turut mempengaruhi kondisi perairan karena perubahan musim dari barat ke timur atau sebaliknya akan menyebabkan perubahan kondisi fisik seperti perubahan suhu, salinitas, gelombang, dan lain-lain dari perairan tersebut.

Naik turunnya muka laut dapat terjadi sekali sehari (pasut tunggal atau *diurnal tide*) atau dua kali sehari (pasut ganda atau *semi diurnal tide*), sedangkan pasut yang berperilaku di antara keduanya disebut sebagai pasut campuran. Kisaran pasang surut (*tidal range*) adalah perbedaan tinggi muka air pada saat pasang maksimum dengan tinggi muka air pada saat surut minimum yang juga dipengaruhi oleh geometrik wilayah yang bersangkutan. Kisaran pasang surut di perairan Papua mencapai 3-6 meter, dengan tipe pasut ganda campuran. Gelombang laut terbentuk karena adanya proses alih energi dari angin ke permukaan laut, atau pada saat-saat tertentu disebabkan oleh gempa di dasar laut. Gelombang ini merambat ke segala arah dengan membawa energi yang kemudian dilepaskan ke pantai dalam bentuk hempasan ombak.

Pengamatan gelombang di perairan Papua relatif masih belum banyak dilakukan. Namun demikian sesungguhnya terdapat hubungan antara angin musim dan pola gerakan gelombang. Hasil penelitian Pusat Riset Teknologi Kelautan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2005 menunjukkan bahwa tinggi gelombang di wilayah kajian berkisar antara 0,2–1,2 m. Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai (*nearshore current*) yang berpengaruh terhadap proses sedimentasi ataupun abrasi di pantai. Pola arus pantai ini terutama ditentukan oleh besarnya sudut yang dibentuk antara gelombang yang datang dengan garis pantai. Jika sudut datang cukup besar, maka akan terbentuk arus menyusur pantai (*longshore current*) yang disebabkan oleh perbedaan teknan hidrostatik. Selain gelombang, pasang surut juga merupakan parameter oseanografi lain yang penting sebagai pembangkit arus di pantai.

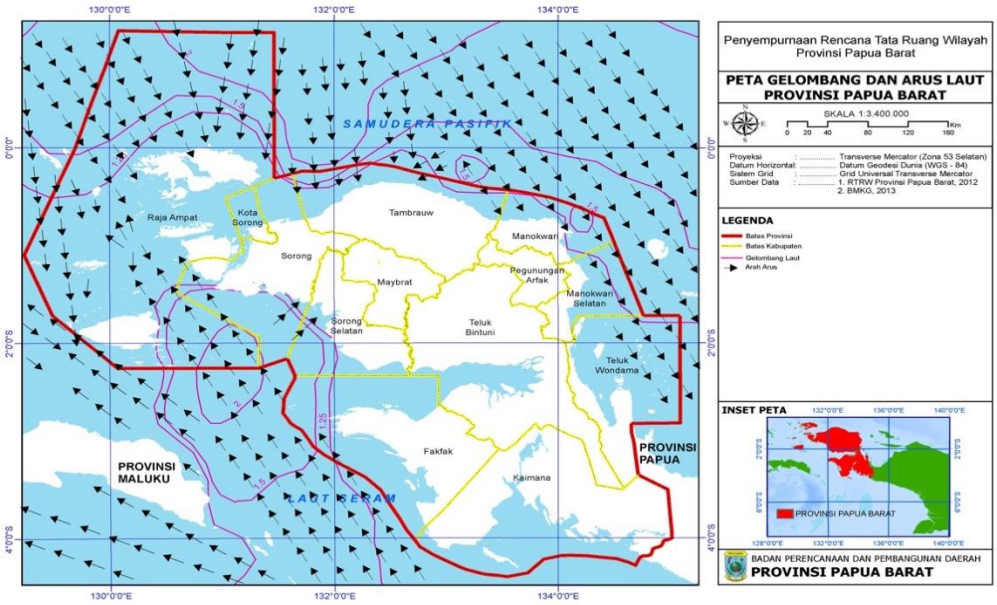

Gambar 2.52 Peta Gelombang dan Arus Laut di Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Arus yang disebabkan oleh pasut ini dipengaruhi oleh dasar perairan. Arus pasang surut yang terkuat akan ditemui di dekat permukaan dan akan menurun kecepatannya semakin mendekati dasar perairan. Arus adalah gerakan air yang mengakibatkan perpindahan horisontal dan vertikal masa air oleh perbedaan energi potensial. Keadaan arus laut umumnya terjadi akibat pengaruh beberapa gaya yang bersamaan yang terdiri dari arus tetap, arus periodik, (pasut) dan arus angin. Bishop (1984) menyatakan bahwa gaya yang berperan dalam sirkulasi masa air adalah gaya gradient tekanan, gaya coriolis, gaya gravitasi, gaya gesekan, dan gaya sentrifugal. Pola arus perairan Papua menurut P30-LIPI Ambon tahun 1992 bahwa pola arus dipengaruhi oleh pasang surut, dimana kecepatan arus rata-rata pada waktu pasang dan surut 7–8 cm/det di daerah pesisirnya, dan waktu pasang 11 cm/det. Keadaan ini dipengaruhi dipengaruhi oleh keadaan rataan dan sedimentasi di pesisir pantai.

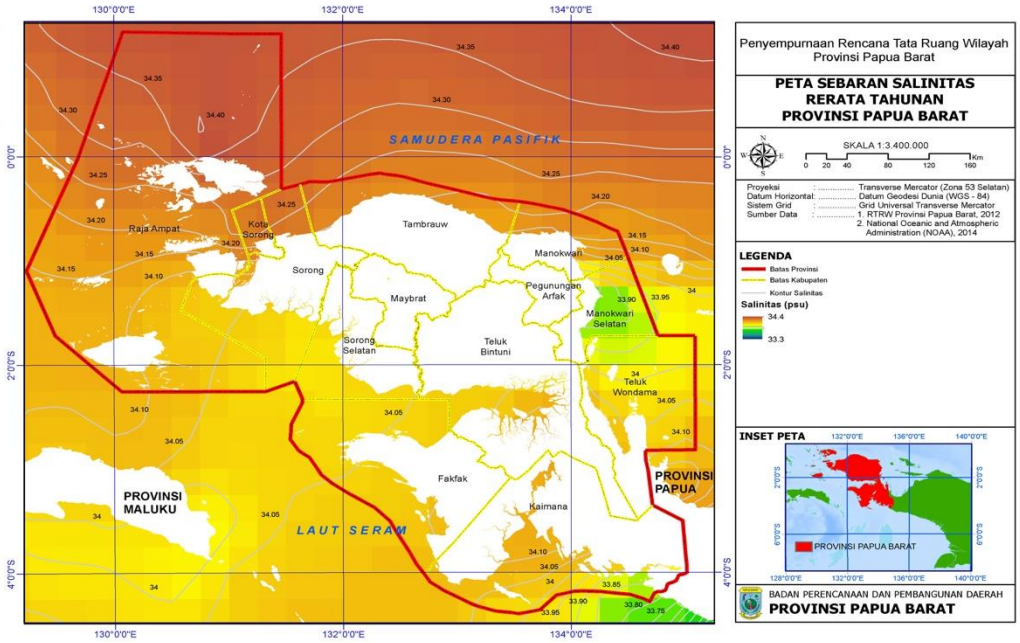

Gambar 2.53 Peta Sebaran Salinitas Rerata Tahunan di Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Upwelling adalah menaiknya massa air laut dari lapisan bawah permukaan (dari kedalaman (150–250 m) karena proses fisik perairan. Karena massa air bawah permukaan pada umumnya lebih kaya zat hara dibandingkan dengan lapisan permukaannya, maka menaiknya massa air tersebut akan menyuburkan kawasan permukaannya. Di perairan Papua, *upwelling* terjadi di Laut Arafura (Wyrtki, 1958). Air naik di laut tersebut terjadi pada musim Timur, dimulai sekitar bulan Mei sampai kira-kira bulan September. Karena pada saat tersebut angin musim Timur mendorong keluar air permukaan Laut Arafuru dengan laju yang lebih besar daripada yang dapat diimbangi oleh air permukaan sekitarnya, akibatnya air yang berada di lapisan bawahnya terangkat naik untuk mengisi kekosongan tersebut. Air yang naik ini bersumber dari kedalaman sekitar 125–300 m yang menyusup dari Lautan Pasifik. Kecepatan naiknya tampaknya kecil, diperkirakan 0,0006 cm/detik. Tetapi ini mempunyai arti besar, karena dengan adanya volume air yang terangkat di daerah ini bisa mencapai 2 juta m^3/detik. Akibat dari naiknya massa air ini adalah suhu permukaan menjadi lebih rendah, yaitu C lebih rendah dari musim Barat, sedangkan salinitas lebih tinggi 1 per mil. Demikian pula kandungan fosfat dan nitrat masing-masing naik dua kali lipat.

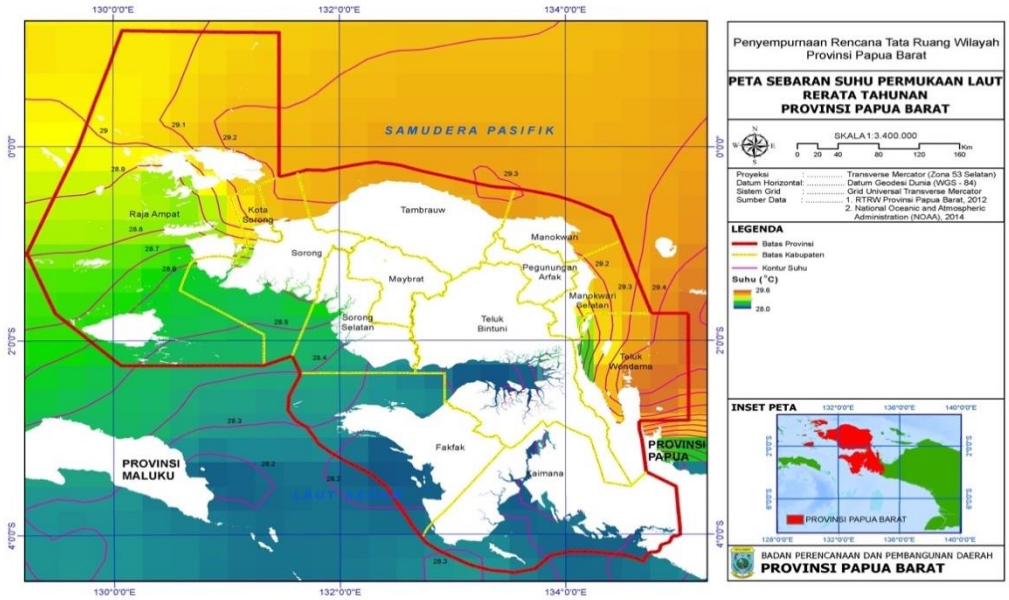

Gambar 2.54 Peta Sebaran Suhu Permukaan Laut Rerata Tahunan di Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

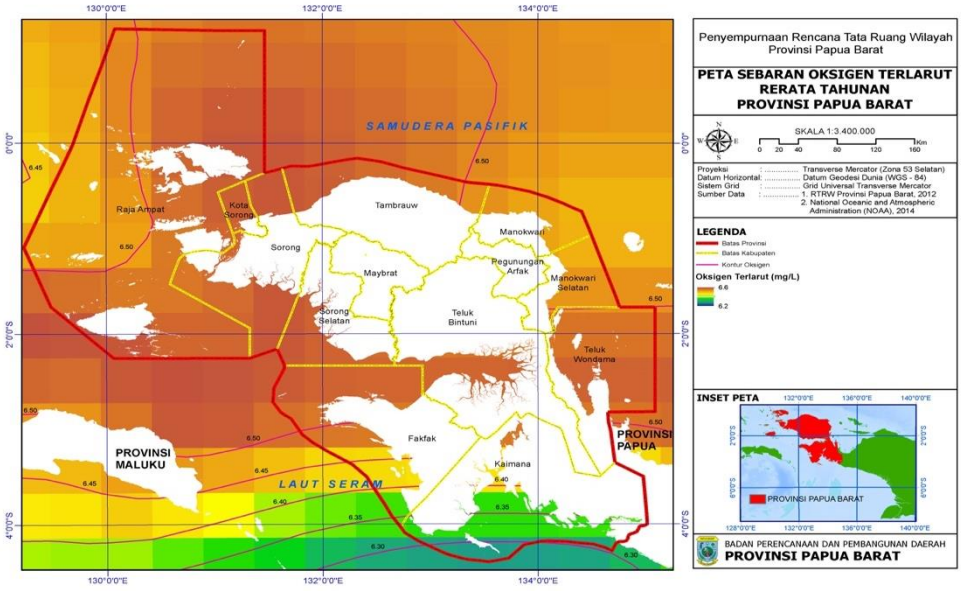

Gambar 2.55 Peta Sebaran Oksigen Terlarut Rerata Tahunan di Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Perairan di Papua sangat dipengaruhi oleh dua musim, yaitu: (a) musim Barat, dan (b) musim Timur. Musim Barat puncaknya terjadi pada bulan Februari, sedangkan musim Timur puncaknya terjadi pada bulan Agustus. Aspek fisik dan kimia adalah sesuatu proses yang dinamis dan sangat tergantung pada musim. Pada saat musim Barat suhu permukaan

laut cenderung lebih panas bila dibanding dengan pada musim Timur. Dinginnya suhu permukaan di musim Timur tersebut cenderung membuat perairan cenderung lebih subur yaitu dengan adanya peningkatan fitoplankton dan zooplankton.

Wilayah perairan Selatan Papua merupakan perairan yang memiliki karakteristik massa air yang agak berbeda dengan perairan wilayah Indonesia lain. Hal ini disebabkan oleh letak geografis perairan tersebut yang berdekatan dan lebih terbuka dengan laut Banda, laut Timor dan samudera Hindia. Pada musim Timur kondisi oseanografis perairan ini banyak dipengaruhi oleh massa air dari Laut Banda (Wyrtki, 1961; Tchernia, 1980). Hal ini berpengaruh besar terhadap sebaran klorofil-a dan nutruen serta ikan-ikan pelagis di wilayah tersebut sehingga perairan ini juga dikenal sebagai salah satu daerah penangkapan ikan dan udang, terutama ikan-ikan pelagis. Sedangkan kadar oksigen terlarut (DO) di Perairan Utara dan Selatan berkisar antara 6,3–6,8 mg/l, kandungan konsentrasi fosfat berkisar antara 0,07–0,35 µm, kadar konsentrasi nitrat berkisar antara 0,1–0,7 µm, serta kadar konsentrasi silikat yang terukur berkisar antara 1,0–6.5 µm.

Tabel 2.95 Kisaran Nilai Kondisi Fisik, Kimia, dan Biologi Perairan Papua Barat

Parameter	Musim Barat	Musim Peralihan I	Musim Timur	Musim Peralihan 2	Rerata
	(Des - Feb)	(Mar - Mei)	(Juni - Ags)	(Sep - Nov)	Tahunan
Suhu (°C)	28,3 - 29,1	28,6 - 29,8	25,9 - 29,7	28,3 - 30,5	28,2 - 29,5
Salinitas (psu)	33,6 - 34,6	33,2 - 34,3	33,7 - 34,4	34,2 - 34,7	33,7 - 34,4
Oksigen (mg/l)	6,3 - 6,5	6,1 - 6,5	6,3 - 6,8	6,3 - 6,5	6,3 - 6,5
Fosfat (µm)	0,16 - 0,35	0,12 - 0,26	0,07 - 0,33	0,10 - 0,25	0,15 - 0,25
Nitrat (µm)	0,2 - 1,4	0,3 - 0,7	0,2 - 1,7	0,1 - 1,1	0,3 - 1,2
Silikat (µm)	1,0 - 5,5	2,5 - 6,5	1,5 - 4,5	1,0 - 4,0	1,5 - 4,5
Klorofil a (mg/m3) Gb	0,5 - 2,0		0,5 - 2,0		0,1 - 10
Fitoplankton (cell/dm3)	200 - 1.800		200 - 3.000		
Zooplankton (cm3/cm2)	5 - 10		10 - 40		
Larva Krustasea (Jumlah/m2)	500 - 1.000		500 - 1.000		

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Dalam rangka perlindungan terhadap sumberdaya perairan, pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah telah menetapkan beberapa kawasan konservasi perairan di wilayah Provinsi Papua Barat. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan perubahannnya pada Undang-undang 45 Tahun 2009, serta Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan

perubahannya pada Undang-undang No. 1 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Ekosistem dan sumberdaya alam pesisir merupakan suatu himpunan integral dari komponen hayati dan nirhayati, yang secara fungsional berhubungan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk suatu sistem yang dikenal dengan ekosistem atau sistem ekologi. Apabila terjadi perubahan pada salah satu dari kedua komponen tersebut maka akan dapat mempengaruhi keseluruhan sistem yang ada baik dalam kesatuan struktur fungsional maupun dalam keseimbangannya. Di dalam suatu ekosistem pesisir terjadi transformasi energi yang berlangsung diantara kedua komponen dalam sistem tersebut maupun dengan komponen-komponen dari sistem lainnya. Kelangsungan fungsi ekosistem sangat menentukan kelestarian sumberdaya alam sebagai komponen yang terlibat dalam sistem tersebut. Karena itu untuk menjamin kelestarian sumberdaya alam, perlu diperhatikan hubungan ekologis yang berlangsung di antara komponen-komponen sumberdaya alam yang menyusun suatu sistem.

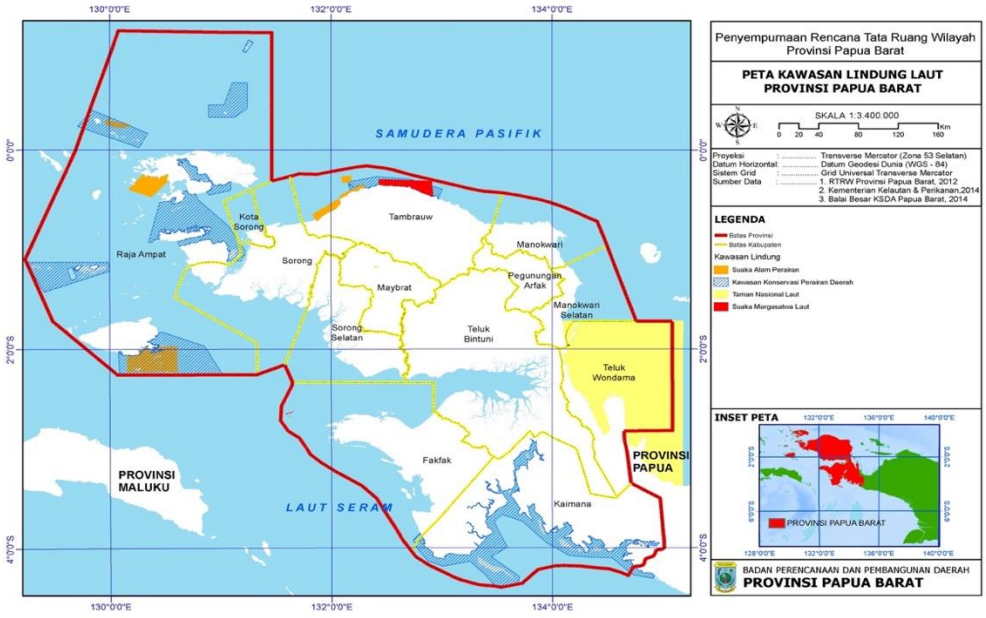

Gambar 2.56 Peta Kawasan Lindung Laut di Provinsi Papua Barat, 2017
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Dalam RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033, kawasan konservasi atau lindung laut di Provinsi Papua Barat terdiri dari beberapa kriteria diantaranya suaka margastwa laut

(Kepulauan Raja Ampat, Pulau Sabuda dan Tataruga, dan Kepulauan Panjang), cagar alam laut (Pantai Sausapor), Taman Nasional Laut (Teluk Cendrawasih), dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (Taman Wisata Alam Laut Distrik Abun dan Kepulauan Padaido). Mendasarkan pada manfaatnya, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua Barat yang diperuntukkan sebagai perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan Kepulauan Raja Ampat, kawasan Teluk Bintuni, kawasan Teluk Cendrawasih, kawasan pesisir utara kepala burung (Sausapor, Manokwari), dan kawasan pesisir seluruh kabupaten/kota; kawasan untuk kepentingan ekonomi adalah kawasan Raja Ampat, kawasan mangrove Bintuni, dan kawasan sagu Sorong Selatan; kawasan untuk kepentingan wisata dan ritual meliputi kawasan Kepulauan Raja Ampat, kawasan Teluk Triton dan Pulau Aiduna (Kaimana). Gambaran mengenai beberapa kawasan konservasi di perairan Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih

Kawasan Taman Nasional Laut Teluk Cederawasih (TNTC) terletak di Samudera Pasifik dan secara geografis terletak pada koordinat 01°43'-03°22' Lintang Utara dan 134°06'-135°10' Bujur Timur. Berdasarkan wilayah administrasi, TNTC berada di Kabupaten Teluk Wondama yang meliputi 13 distrik yaitu Distrik Wasior, Wondiboi, Rasiei, Naikere, Pesisir Kuri, Teluk Duairi, Roon, Rumberpon, Soug Wepu, Windesi, Wamesa, Dataran Wamesa, dan Roswar. TNTC merupakan perwakilan ekosistem terumbu karang, pantai, mangrove dan hutan tropika daratan pulau di Papua. TNTC merupakan taman nasional perairan laut terluas di Indonesia, terdiri dari daratan dan pesisir pantai (0,9%), daratan pulau-pulau (3,8%), terumbu karang (5,5%), dan perairan lautan (89,8%). Potensi karang TNTC tercatat 150 jenis dari 15 famili, dan tersebar di tepian 18 pulau besar dan kecil. Persentase penutupan karang hidup bervariasi antara 30,40% sampai dengan 65,64%. Umumnya, ekosistem terumbu karang terbagi menjadi dua zona yaitu zona rataan terumbu (reef flat) dan zona lereng terumbu (reef slope). Jenis-jenis karang yang dapat dilihat antara lain koloni karang biru (*Heliopora coerulea*), karang hitam (*Antiphates sp.*), family *Faviidae* dan *Pectiniidae*, serta berbagai jenis karang lunak.

Kawasan TNTC secara definitif ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.8009/Kpts-II/2002 tanggal 29 Agustus 2002 dengan luas 1.453.500 hektare, terdiri dari

68.000 hektare daratan yang meliputi 12.400 hektare (0,85%) pesisir pantai, 55.800 hektare (3,84%) daratan pada pulau- pulau, 80.000 hektare (5,5%) terumbu karang dan luas lautan 1.305.500 hektare (89,8%). Kawasan TNTC beriklim tropis lembab. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Fergusson, kawasan TNTC termasuk dalam iklim tipe A dengan nilai Q = 12,47 %. Rata-rata curah hujan per tahun berkisar antara 1.500-3.500 mm dengan temperatur udara 25-30° C dan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 75-90%.

Kawasan Konservasi Kabupaten Raja Ampat

Dasar hukum penetapan perairan Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Raja Ampat adalah Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2008 Tentang Kawasan Konservasi Daerah Kabupaten Raja Ampat. Luas seluruh kawasan tersebut adalah sebesar 1.026.540 Ha yang terdiri dari 5 area yaitu Area I (perairan Kepulauan Ayau-Asia seluas 101.440 Ha), Area II (Teluk Mayalibit seluas 53.100 Ha), Area III (Selat Dampier seluas 336.000 Ha), Area IV (Perairan Kepuluaan Misool seluas 366.000 Ha), dan Area V (Perairan Kepulauan Kofiau dan Boo seluas 170.000 Ha). Kondisi hidro-oseanografi wilayah Kabupaten Raja Ampat dipengaruhi oleh dinamika perairan Laut Seram, Laut Halmahera dan Samudera Pasifik. Wilayah ini memiliki pasang surut bertipe campuran condong ke harian ganda (*mixed tide, prevailing semi diurnal*). Arus permukaan di wilayah perairan Raja Ampat tergolong relatif kuat terutama di bagian celah atau selat antara dua pulau. Secara umum, pola pergerakan arus di wilayah perairan Raja Ampat pada bulan Agustus mengarah dari Timur menyusuri bagian Utara Pulau Papua menuju Barat Daya (Laut Banda). Sedangkan pada bulan Oktober arus datang dari arah Barat Daya menyusuri Kepulauan Maluku menuju Timur Laut/Samudera Pasifik (Wyrtki, 1961).

Raja Ampat menjadi rumah bagi 69,21% spesies karang dunia, dimana ditemukan 553 jenis karang (Veron et al., 2009) dan dua diantaranya merupakan jenis endemik Raja Ampat dari keluarga Acroporidae yaitu Montipora delacatula dan Montipora verruculosus (DeVantier et al., 2009). Selain itu ditemukan setidaknya 41 jenis dari 90 genus karang lunak Alcyonacean dari 14 Famili (Donnelly et al., 2002). Di wilayah ini juga ditemukan 699 jenis moluska dan menjadi rumah bagi 5 jenis penyu (McKenna et al., 2002), setidaknya 1.505 jenis ikan karang (Allen dan Erdmann, 2012; update Erdmann, 2013) dan rumah bagi 15 jenis mamalia laut yang terdiri dari 14 jenis cetacean (13 jenis paus dan lumba-lumba) dan 1 jenis duyung (Dugong dugon) (Kahn, 2007). Salah satu pemicu keanekaragaman yang luar biasa

ini adalah tingginya keragaman habitat mulai dari lamun, mangove, terumbu karang di perairan dangkal (termasuk terumbu karang tepi, penghalang, patch dan atoll) hingga celah dalam antar pulau-pulau kecil utama. Dengan tingkat keragaman hayati yang begitu tinggi, para ilmuwan menyebut Kepulauan Raja Ampat sebagai jantung Segitiga Karang Dunia.

Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya

Secara geografis, kawasan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya terletak pada 0°24'29" BT- 0°14'22"LS dan 129°50'25"-129°40'32"BT. Secara administratif, wilayah ini masuk ke dalam Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat dengan luas kawasan mencapai 271.630 Ha. Kepulauan Raja Ampat dikenal memiliki tingkat keanekaragaman hayati dan endimisitas sumber daya pesisir dan laut yang tinggi. Dalam konteks regional, Kepulauan Raja Ampat termasuk dalam kawasan segitiga karang dunia (*coral triangle)* dan merupakan bagian kawasan penting keanekaragaman hayati pesisir dan laut. Kawasan segitiga karang ditandai dengan adanya 500 atau lebih jenis karang dan merupakan pusat dari kelimpahan dan keragaman karang di bumi. Kawasan koservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Waigeo sebelah Barat merupakan kawasan konservasi yang terletak di wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Raja Ampat. Kawasan SAP tersebut memiliki banyak potensi, baik potensi ekologi, potensi ekonomi, dan potensi sosial budaya. SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat terdiri dari serangkaian pulau-pulau kecil dan pulau-pulau karst sebanyak 100 pulau yang tidak berpenghuni, kecuali Pulau Piai dan Pulau Sayang dibagian timur SAP.

Tipe terumbu karang disekitar Kepulauan Wayag adalah terumbu karang tepi (*fringingreef*) dan sebagian kecil karang gosong (*patchreef*). Kontur terumbu daerah umumnya curam hingga tegak lurus dengan kecerahan air 10-15 m. Kontur terumbu datar hingga landai hanya berada di barat dan utara Pulau Piai dan barat, selatan dan timur Pulau Sayang serta teluk-teluk didalam Pulau Wayag. Survei *manta tow* oleh Cipada 2008 diketahui persentase penutupan karang hidup di SAP Kepulauan Waigeo berkisar antara 0-70% dengan rata-rata tutupan 20,55%, sedangkan rata-rata persentase penutupan biota lainnya adalah 17.49%. Persentase penutupan rata-rata karang matiadalah 41.03%,

sedangkan persentase penutupan pasir dan patahan karang masing-masing adalah 12.17% dan 8.76%.

Pulau Piai dan Pulau Sayang merupakan tempat bertelur penyu hijau dan penyu sisik bertelur. Hasil manta tow selama 8 hari ditemukan penyu hijau 38 ekor dan penyu sisik 49 ekor (CI, 2008). Di disekitar SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat banyak ditemukan kima raksasa, teripang, lola dan lobster serta ketam kenari dan juga merupakan tempat perlintasan cetacean (paus dan lumba-lumba) yang meliputi lumba-lumba risso (*Grampusgriseus*), lumba-lumba hidung botolumum (*Tursiopstruncatus*) dan lumba-lumba spinner (*Stenella longirostris*). Perairan sekitar Kepulauan Wayag-Sayang juga merupakan tempat hiu beregenerasi dan memulihkan populasinya. Cukup mudah untuk menemukan anakan hiu berenang disekitar pantai. Selain itu ditemukan banyak tempat berkumpulnya (agregasi) ikan pari manta dibeberapa tempat. Potensi ikan di SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat cukup tinggi. SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat adalah daerah penting sekali untuk ruaya paus, Penyu Hijau, Penyu Sisik, ikan hiu, dan manta. Pulau Sayang-Wayag adalah daerah sangat penting dari sisi bertelur Penyu Hijau dan juga menjadi daerah perlindungan penyu.

Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya

Secara geografis, kawasan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat dan laut di sekitarnya terletak pada 0°14'18"BT-0°25'29"LS dan 130°18'32"-130°10'29"BT. Sementara secara administratif, wilayah ini masuk ke dalam Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat dengan luas kawasan sebesar 60.000 Ha. Kawasan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan laut di sekitarnya memiliki batas-batas sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan Pulau Waigeo; sebelah selatan berbatasan dengan perairan Kepulauan Fam; sebelah timur berbatasan dengan perairan Pulau Gam; dan sebelah barat berbatasan dengan perairan Pulau Batangpele dan Pulau Maijafun. Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) pada 3 September 2009 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 64 Tahun 2009. Keputusan ini menetapkan perairan Kepulauan Raja Ampat dan laut di sekitarnya sebagai Suaka Alam Perairan (SAP).

Perairan Kabupaten Raja Ampat dipengaruhi oleh iklim tropis dan perubahan iklim

muson. Pada Mei-November umumnya bertiup angin Pasat Tenggara sedangkan pada Desember-April bertiup angin Barat Laut. Karakteristik fisik perairan Kepulauan Raja Ampat memungkinkan kawasan ini menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi sejumlah biota perairan khususnya terumbu karang. Kedalaman perairan yang relatif dangkal, kejernihan air dan intensitas keterpaparan cahaya matahari yang cukup, menjadikan perairan Raja Ampat sebagai habitat yang baik untuk komunitas karang. Kecerahan di perairan Raja Ampat berkisar antara 4-23 m dengan rata-rata kecerahan 12,91 m. Kecerahan terendah berada di Teluk Mayalibit yang hanya mencapai 4-5 m. Hal ini karena tingginya tingkat kekeruhan perairan di Teluk Mayalibit yang disebabkan banyaknya bahan tersuspensi. Sedangkan kecerahan maksimum berada di perairan daerah Kofiau yang mencapai 23 m. Hal ini diperkirakan karena lokasi ini berada pada kawasan perairan bebas (cukup jauh dari daratan) sehingga pengaruh bahan-bahan tersuspensi yang berasal dari aktivitas daratan sangat kecil.

Raja Ampat kaya akan ekosistem terumbu karang, ikan dan biota laut lainnya, lamun dan manggrove. Kepulauan Raja Ampat memiliki terumbu karang yang sangat indah dan sangat kaya akan berbagai jenis ikan dan moluska. Berdasarkan hasil penelitian tercatat 537 jenis karang keras (CI, TNC-WWF), 9 diantaranya adalah jenis baru dan 13 jenis endemik. Jumlah ini merupakan 75% karang dunia. Berdasarkan indeks kondisi karang, 60% kondisi karang di Kepulauan Raja Ampat dalam kondisi baik dan sangat baik. Ekosistem terumbu karang di Kepulauan Raja Ampat terbentang di paparan dangkal di hampir semua pulau-pulau, namun yang terbesar terdapat di distrik Waigeo Barat, Waigeo Selatan, Ayau, Samate dan Misool Timur Selatan. Tipe terumbu karang yang terdapat di Kepulauan Raja Ampat umumnya berupa karang tepi (*fringe reef*), dengan kemiringan yang cukup curam. Selain itu terdapat juga tipe terumbu karang cincin (*atol*) dan terumbu penghalang (*barrier reef*).

Menurut pendataan TNC-WWF, di wilayah ini tercatat sekitar 899 jenis ikan karang sehingga Raja Ampat diketahui mempunyai 1.104 jenis ikan yang terdiri dari 91 famili. Diperkirakan jenis ikan di kawasan Raja Ampat dapat mencapai 1.346 jenis. Berdasarkan fakta tersebut, kawasan ini menjadi kawasan dengan kekayaan jenis ikan karang tertinggi di dunia. Selain itu dikawasan ini juga ditemukan 699 jenis hewan lunak (jenis moluska) yang terdiri atas 530 siput-siputan (*gastropoda*), 159 kerang-kerangan (*bivalva*), 2

Scaphoda, 5 cumi-cumian (*cephalopoda*), dan 3 *Chiton*. Sementara itu, populasi padang lamun hampir tersebar di seluruh Kepulauan Raja Ampat. Padang lamun tersebar di sekitar Waigeo, Kofiau, Batanta, Ayau, dan Gam. Padang lamun yang terdapat di Kabupaten Raja Ampat umumnya homogen dan berdasarkan ciri-ciri umum lokasi, tutupan, dan tipe substrat, dapat digolongkan sebagai padang lamun yang berasosiasi dengan terumbu karang. Tipe ini umumnya ditemukan di lokasi di daerah pasang surut dan rataan terumbu karang yang dangkal. Jenis lamun yang tumbuh baik di kawasan tersebut antara lain jenis *Enholus acoroides, Thoiossio hemprichii, Holophilo ovolis, Cymodoceo rotundoto,* dan *Syringodium isoetifoiium*.

Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Kaimana

Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Kaimana, merupakan KKLD yang dicadangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana, melalui Peraturan Bupati Kaimana No. 04 Tahun 2008 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Kaimana. Luas wilayah yang dicadangkan menjadi KKLD adalah sebesar 597.747 Ha meliputi seluruh perairan sejauh 4 mil laut dari garis pantai terakhir pulau terluar (seluruh wilayah perairan Kaimana) sehingga semua kampung masuk dalam kawasan, yaitu terdapat 7 distrik yang terdiri dari 84 kampung dan 2 kelurahan. Secara morfologi, Kabupaten Kaimana meliputi wilayah datar hingga berbukit-bukit dan bahkan bergunung, dengan kemiringan lereng bervariasi mulai dari < 2% hingga di atas 70% dengan ketinggian tempat berkisar antara 0 - 2.800 m di atas permukaan laut. Iklim secara umum dibagi menjadi 2 yaitu musim kemarau dan penghujan, namun masyarakat lokal lebih mengenal 4 musim yaitu pancaroba timur (Maret-Mei), angin timur (Juni- Agustus), pancaroba barat (September-November), dan musim angin barat (Desember-Februari). Temperatur permukaan perairan Kaimana pada bulan Agustus berkisar antara 25,6-27,0°C dan 24,3-26,5°C di dasar (50 m), sedangkan pada bulan Februari temperatur bervariasi antara 28,4° dan 29,0°C di lapisan permukaan dan 27,3-29,6°C di dasar. Rata-rata perbedaan antara permukaan dan dasar perairan lebih besar di bulan Agustus daripada Februari. Salinitas pada perairan Kaimana tercatat antara 29,5- 34,1.

Persentase penutupan karang hidup pada kedalaman 4-6 m berkisar antara 22-82%, sementara persentase penutupan karang hidup pada kedalaman 12-15 m berkisar antara 4-

57%, dan persentase penutupan karang hidup pada kedalaman 20-25 m berkisar antara 3-68%. Spesies ikan yang paling sering dijumpai adalah *Lutjanus decussatus, Parupeneus barberinus, Parupeneus multifasciatus, Ctenochaetus binotatus*dan *Scarus flavipectoralis*. Sementara lebih dari setengah dari biomas ikan target yang tercatat terdiri dari famili *Caesionidae (fusiliers), Scaridae (parrot fish) dan Acanthuridae (surgeon fish)*. Perairan daerah Kaimana memiliki terumbu karang tepi (*fringing reef*). Topografi daerah pesisirnya landai. Hasil penelitian dari CI sepanjang tahun 2006–2010, daerah KKLD Kaimana memiliki 1.003 jenis ikan, 471 jenis karang, 28 jenis udang, dan 2 mantis. Tutupan karang yang dihasilkan memperlihatkan bahwa tutupan karang karang mati mencapai 16%, karang hidup 15%, rubbles 10%, pasir 42% dan biota lainnya 17%. Daerah hutan mangrove terdapat di Teluk triton, yaitu disekitar kampung Lobo dan Teluk Arguni di Distrik Yamor. Mangrove di wilayah KKLD Kaimana masih tergolong asli dan masih cukup baik.

Suaka Margasatwa Laut Jamursba Medi Kabupaten Tambrauw

Suaka Margasatwa Luat Jamursba Medi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 891 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Bupati Tambrauw No. 46 Tahun 2013. Luas kawasan Suaka Margasatwa Laut (SML) Jamursba Medi Kabupaten Tambrauw adalah sebesar 278,25 Ha. Kawasan Suaka Margasastwa Laut (SML) Jamurba Medi dan Pantai Warmon merupakan pantai peneluran penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*) yang secara administrasi masuk kedalam Distrik Abun, Kabupaten Tambrauw. Secara garis besar, penduduk di kawasan SML Jamursba Medi dan Warmon sebagian besar adalah berasal dari Suku Abun. Masyarakat Kampung di sekitar Kawasan SML Jamursba Medi dan Warmon memiliki kearifan lokal, yaitu dalam penyelesaian konflik diselesaikan dengan membayar denda berupa kain timor. Masyarakat disekitar menyadari bahwa sumberdaya alam mereka akan habis apabila tidak di atur pemanfaatannya. Masyarakat menetapkan kawasan gunung sepanjang bagian belakang kawasan peneluran penyu dari Kampung Wau-Weyaf sampai dengan Kampung Saubeba sebagai wilayah yang tidak boleh dilakukan perburuhan karena dianggap sebagai kawasan tabungan.

Sumberdaya alam (laut dan darat/hutan) di Kawasan SML Jamursba Medi dan Warmon yang di kandungnya sangat besar, dan masyarakat memanfaatkanya untuk kehidupan sehari-hari. Berdasarkan dari sejarah, masyarakat di kawasan ini berasal dari

pedalaman, jadi untuk sumber penghidupan sehari-hari mereka peroleh dari hutan (berkebun maupun berburu). Mata pencaharian yang umumnya dilakukan masyarakat di Kawasan SML Jamursba Medi dan Warmon adalah berburu dan berkebun meskipun mereka tinggal di daerah pesisir. Kalaupun ada yang melaut untuk mencari ikan, itu hanya untuk dikonsumsi. Sedangkan hasil kebun dan berburu itulah yang mereka jual.

Kawasan Konservasi Kabupaten Tambrauw (Kawasan Konservasi Laut Daerah Abun)

Secara geografis, Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Abun terletak pada posisi 0°17'22"-0°21'44" LS dan 132°20'56"-132°37'11" BT, dan memiliki luas wilayah sekitar 26.795,53 Ha. Sementara secara administratif, KKLD Abun berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, sebelah selatan Distrik Yembun, Fef dan Miyah, sebelah timur Saukorem dan Amberbaken, dan sebelah barat Distrik Moraid. Kawasan Abun di Kabupaten Tambrauw memiliki keunikan biofisik serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Diantara keunikan yang dimiliki kawasan ini adalah fungsinya sebagai tempat peneluran penyu belimbing (*Dermochelys coreaceae*) dengan tingkat populasi betina bertelur terbesar di dunia. Berdasarkan keunikan yang dimilikinya, kawasan ini ditetapkan sebagai KKLD berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sorong No. 142 tahun 2005 dan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 891/Kpts-III/1999, merupakan satu diantara dua belas KKLD di Papua yang dikelola secara aktif dengan tujuan memberdayakan masyarakat setempat dalam usaha pengelolaan sumberdaya pesisir.

Luas kawasan sebesar 169.158 Ha terdiri atas 69.372 (41%) daratan dan 99.786 Ha (59%) perairan laut merupakan pantai berpasir yang ekstensif dan hutan dataran rendah pesisir yang berfungsi sebagai habitat peneluran penyu belimbing (*Dermochelys coriaceae*). Habitat peneluran penyu ini terbentang sepanjang pesisir pantai mulai dari Kampung Werur di Distrik Sausapor hingga ke Kampung Waiben di Distrik Abun. Pemahaman masarakat tentang peran dan fungsi kawasan tidak perlu dikuatirkan, karena komitmen dan implementasi adat sebagai bagian dari kearifan tradisional mereka khususnya dalam pengelolaan sumberdaya alam, merupakan aturan yang tidak tertulis dan diturunkan dari generasi ke generasi. Karena itu semboyan mereka "Bur, Nden, Sem Mikindewa Membow" = Tanah, hutan dan laut dilindungi untuk hari depan.

Daerah perairan di sekitar kawasan KKLD Abun memiliki kedalaman antara 7.000-

9.000 meter, hal ini dimungkinkan karena kawasan ini berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik. Kecepatan arus 1 meter/detik. Salinitas berkisar antara 34,2-34,4 dengan rata-rata sebesar 32. Temperatur permukaan berkisar antara 29-30°C. Sepanjang pesisir pantai Kabupaten Sorong merupakan tipe vegetasi hutan pantai, namun tidak terdapat hutan bakau (mangrove). Vegetasi didominasi oleh jenis-jenis pandan laut, ketapang, batatas laut, bakung laut, waru laut, dan putat laut. Vegetasi ini sangat baik untuk meneduhi kawasan pantai peneluran penyu, khusunya jenis penyu hijau dan penyu sisik. Adapun jenis penyu yang biasa ditemukan di daerah distrik Abun adalah jenis Penyu Belimbing (*Dermochelys coreacea*), Penyu hijau (*Chelonia mydas*), Penyu sisik (*Eretmochelys imbricate*), Penyu lekang (*Lepidochelys oliace*). Kondisi terumbu karang di Kabupaten Sorong masih tergolong cukup baik dengan persentase penutupan mencapai 60%, dengan luas hamparan karang diperkirakan 484.985 ha. Terumbu karang hanya dijumpai pada daerah di sekitar tubir, dan reef flatnya didominasi oleh karang papan. Pada beberapa daerah, terumbu karang hidup ditemukan pada kedalaman 15 meter. Dikawasan ini ditemukan 8 jenis *sea grass* yang tergolong dalam 2 famili, yakni *Hydrocharitaceae* dan *Cymodoceae*.

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa Provinsi Papua Barat memiliki potensi sumberdaya kelautan khususnya perikanan yang tinggi. Untuk kegiatan perikanan laut, potensi perikanan tangkap Provinsi Papua Barat meliputi tiga wilayah perairan, yaitu di WPPNRI 715 (Teluk Tomini-Laut Seram), WPPNRI 717 (Samudera Pasifik), dan WPPNRI 718 (Laut Arafura-Laut Timor). Mendasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 47 Tahun 2016 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi sumberdaya ikan di WPPNRI 715 adalah sebesar 631.703 ton, WPPNRI 717 sebesar 603.688 ton, dan WPPNRI 718 sebesar 1.992.730 ton. Di WPPNRI 715, potensi SDI tersebut meliputi ikan pelagis kecil yaitu sebesar 378.734 ton, ikan pelagis besar sebsar 51.394 ton, ikan demersal sebesar 114.005 ton, ikan karang sebesar 69.975 ton, udang penaeid sebesar 6.089 ton, lobster sebesar 710 ton, kepiting sebesar 490 ton, rajungan sebesar 643 ton, dan cumi-cumi sebesar 9.664 ton. Pada WPPNRI 717, potensi SDI pelagis kecil adalah sebesar 312.901 ton, ikan pelagis besar sebesar 56.067 ton, ikan demersal sebesar 111.619 ton, ikan karang sebesar 32.376 ton,

udang penaeid sebesar 8.669 ton, lobster sebesar 1.065 ton, kepiting sebesar 620 ton, rajungan sebesar 22 ton, dan cumi-cumi sebesar 2.124 ton. Sementara itu, potensi SDI di WPPNRI 718 meliputi ikan pelagis kecil sebesar 823.328 ton, 489.795 ton, ikan demersal sebesar 586.277 ton, ikan karang sebesar 30.555 ton, udang penaeid sebesar 53.502 ton, lobster sebesar 386 ton, kepiting sebesar 1.507 ton, rajungan sebesar 1.911 ton, dan cumi-cumi sebesar 5.470 ton.

Tabel 2.96 Potensi SDI di Perairan Provinsi Papua Barat Menurut WPPNRI

WPP-RI	Uraian	Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar	Ikan Demersal	Ikan Karang	Udang Penaeid	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi-cumi	Jumlah
WPP-RI 715	Potensi (ton)	378.734	51.394	114.005	69.975	6.089	710	490	643	9.664	631.704
	JTB (ton)	302.987	41.115	91.204	55.890	4.871	568	392	515	7.731	
	Tingkat pemanfaatan	1,05	1,58	0,51	0,49	1,21	1,23	1,81	1,20	1,80	
WPP-RI 717	Potensi (ton)	391.126	56.067	111.619	32.376	8.669	1.065	620	22	2.124	603.688
	JTB (ton)	312.901	44.854	89.295	25.901	6.935	852	496	18	1.699	
	Tingkat pemanfaatan	0,73	0,95	0,45	0,81	0,25	1,21	0,90	1,45	0,70	
WPP-RI 718	Potensi (ton)	823.328	489.795	586.277	30.555	53.502	386	1.507	1.911	5.470	1.992.731
	JTB (ton)	658.662	391.836	469.022	24.444	42.802	309	1.205	1.529	4.376	
	Tingkat pemanfaatan	0,52	0,65	1,14	0,50	1,30	1,23	0,77	0,17	0,70	

Sumber: Kepmen KP No. 47 Tahun 2016

Secara keseluruhan, potensi SDI di perairan Provinsi Papua Barat adalah sebesar 3.228.123 ton, jika diasumsikan bahwa untuk Provinsi Papua Barat potensinya adalah sebesar 10% dari total potensi tersebut di atas, maka potensi perikanan tangkap laut adalah sebesar 322.812 ton. Dalam kurun waktu 2011-2015, volume produksi perikanan tangkap laut Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dari 116.593 ton ton pada tahun 2011 menjadi sebanyak 136.393 ton pada tahun 2015. Walaupun sempat mengalami penurunan produksi pada tahun 2014 sebesar 1,47%, produksi perikanan di Provinsi Papua Barat selama periode tersebut tumbuh sebesar 3,32% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 13,68%. Melihat jumlah produksi eksisting tersebut, terlihat bahwa produksi perikanan tangkap laut di Provinsi Papua Barat belum optimal. Hal tersebut salah satunya disebabkan armada tangkap yang digunakan nelayan di beberapa wilayah masih tradisional sehingga jangkauan wilayah penangkapannya masih terbatas pada zona 0-4 mil laut, serta fasilitas pelabuhan perikanan yang belum memadai untuk bersandarnya kapal motor besar.

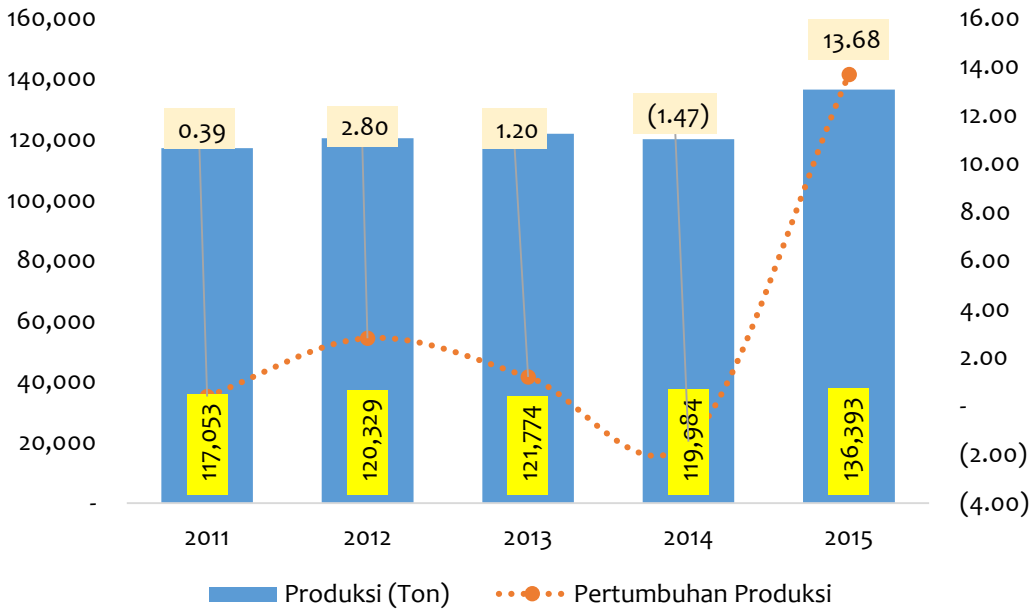

Gambar 2.57 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Laut di Provinsi Papua Barat, 2011-2015
Sumber: BPS, 2017 (diolah)

Dengan potensi sumberdaya perikanan yang tinggi, pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap laut di Provinsi Papua Barat dapat dikatakan masih rendah. Hal tersebut berbeda dengan provinsi lain di sekitarnya seperti Provinsi Maluku dan Papua yang telah menjadi lumbung ikan laut Indonesia. Dalam bidang perikanan tangkap laut, produksi ikan tangkap laut Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 menempati urutan ke-20 dimana produksi tersebut tertinggal jauh dari Provinsi Papua yang menempati urutan 10 dengan produksi sebesar 221.340 ton dan Provinsi Maluku yang menjadi produsen ikan tangkap laut terbesar di Indonesia pada tahun 2015 dengan produksi mencapai 617.985 ton. Dengan WPPNRI yang sama, seyogyanya produksi perikanan tangkap laut Provinsi Papua Barat dapat meningkat seperti provinsi tetangga di masa mendatang melalui peningkatan kapasitas teknologi armada penangkapan, sumberdaya manusia, dan fasilitas pendukung kegiatan perikanan tangkap laut seperti pelabuhan, listrik, es, dan lainnya.

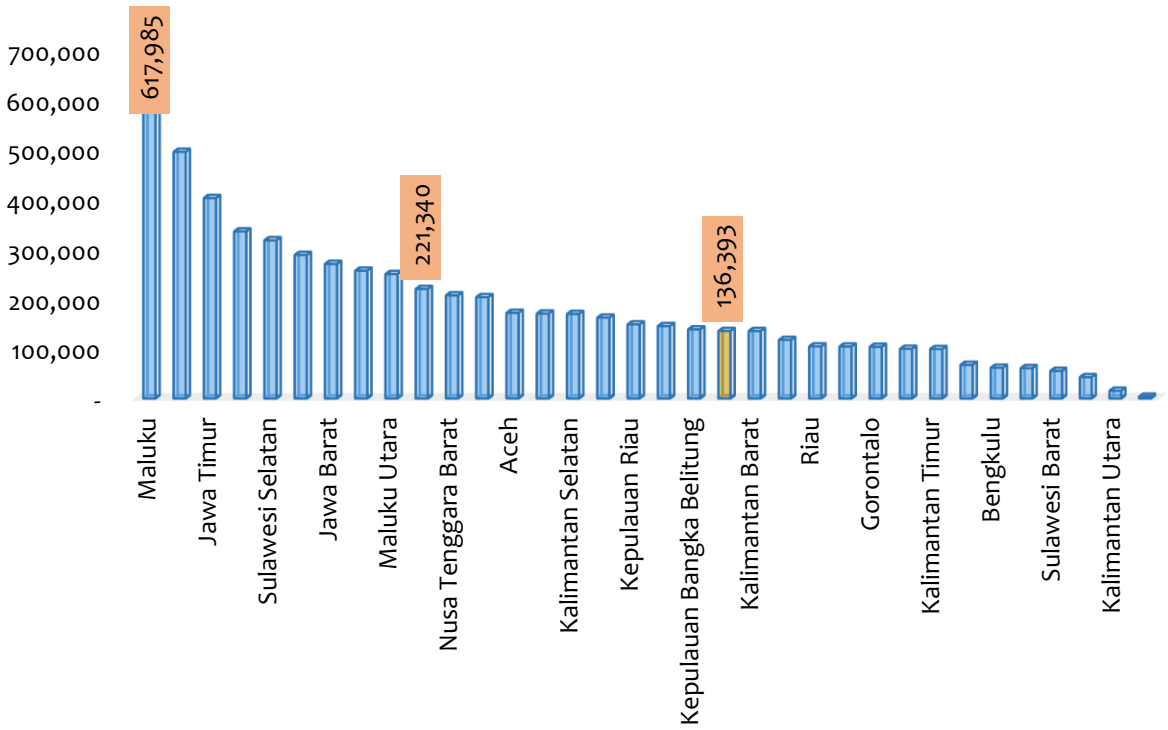

Gambar 2.58 Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Provinsi (ton), 2015
Sumber: BPS, 2017 (diolah)

Terkait dengan produksi perikanan tangkap laut, terdapat 10 komoditas utama yang menjadi tangkapan nelayan di Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2013, komoditas ikan yang menjadi tangkapan terbesar nelayan adalah cakalang yaitu sebesar 13.018 ton, diikuti madidihang (7.963 ton), tenggiri (7.216 ton), teri (4.016 ton), kembung (3.931 ton), kakap putih (2.739 ton ton), udang windu (2.681 ton), tongkol komo (2.515 ton), manyung (2.406 ton), dan kakap merah (2.312 ton). Hanya 10 komoditas tersebut yang memiliki produksi lebih dari 2.000 ton dan secara keseluruhan menyumbang 40,07% produksi perikanan tangkap laut Provinsi Papua Barat. Namun jika dilihat dari nilai produksi per jenis ikan pada tahun 2013, komoditas ikan yang memiliki nilai produksi terbesar adalah udang windu yaitu sebesar Rp 156,92 miliar, diikuti tenggiri (Rp 114,17 miliar), udang putih (Rp 106,41 miliar), udang dogol (Rp 95,52 miliar), udang barong (Rp 84,20 miliar), cakalang (Rp 70,14 miliar), teri (Rp 58,60 miliar), kakap merah (Rp 52,06 miliar), madidihang (Rp 43,72 miliar), dan kakap putih (Rp 40,25 miliar). Data tersebut menunjukkan bahwa komoditas penting perikanan tangkap laut di Provinsi Papua Barat adalah kelompok pelagis besar dan udang-udangan.

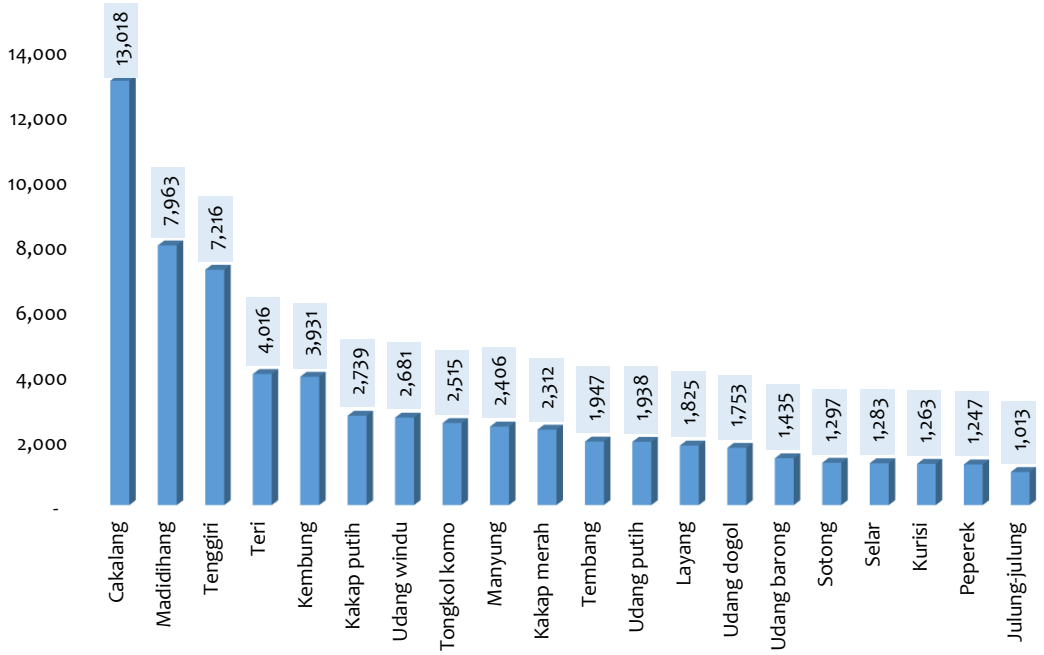

Gambar 2.59 Volume Produksi Perikanan Tangkap Laut Terbesar Menurut Jenis (ton), 2013
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2014 (diolah)

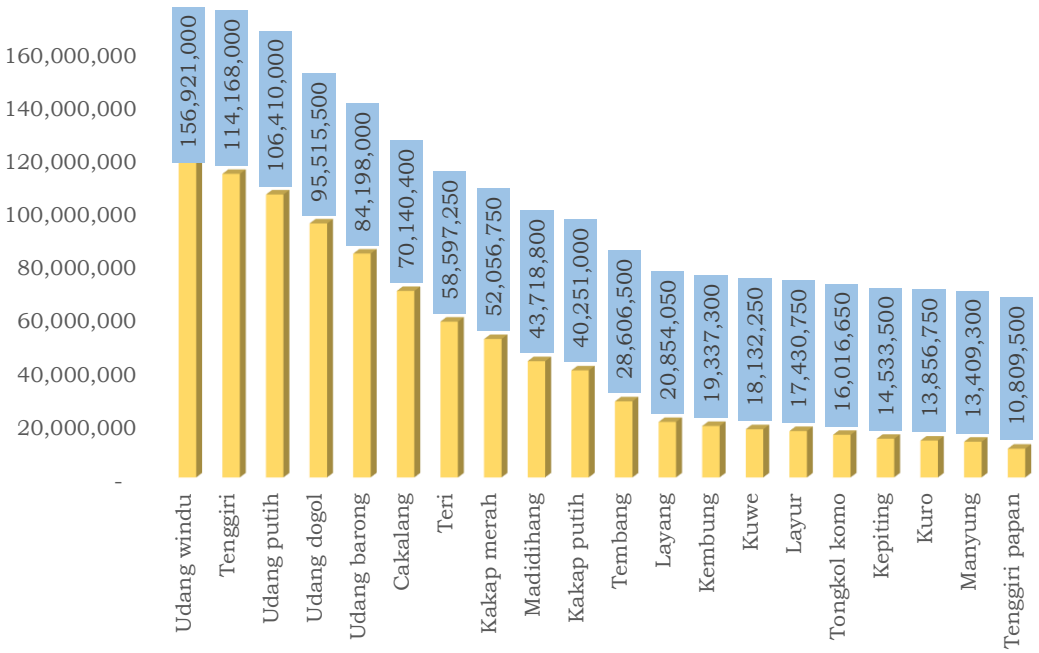

Gambar 2.60 Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut Terbesar Menurut Jenis (Rp 000), 2013
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2014 (diolah)

Seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa produksi perikanan tangkap laut Provinsi Papua Barat dihasilkan dari 11 kabupaten/kota yang memiliki wilayah

laut. Selama periode 2011-2015, produksi perikanan tangkap laut terbesar di Provinsi Papua Barat ditempat oleh Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Kontribusi kedua wilayah tersebut selama periode 2011-2015 adalah sebesar 49,88 persen per tahun. Pada tahun 2011 dan 2012, posisi ketiga ditempati Kabupaten Sorong Selatan, disusul Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Sorong. Semenjak tahun 2013, posisi Kabupaten Sorong Selatan sebagai penghasil ikan tangkap laut terbesar ketiga di Provinsi Papua Barat digeser oleh Kabupaten Fakfak. Posisi tersebut berlangsung hingga tahun 2015 sehingga penghasil ikan tangkap laut diurutkan dari yang terbesar adalah Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupatgen Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong.

Tabel 2.97 Kabupaten/Kota Produsen Terbesar Perikanan Laut Di Provinsi Papua Barat, 2011-2015

No.	Kabupaten/Kota				
	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kota Sorong	Kota Sorong	Kota Sorong	Kota Sorong	Kota Sorong
2.	Kabupaten Manokwari	Kabupaten Manokwari	Kabupaten Manokwari	Kabupaten Manokwari	Kabupaten Manokwari
3.	Kabupaten Sorong Selatan	Kabupaten Sorong Selatan	Kabupaten Fakfak	Kabupaten Fakfak	Kabupaten Fakfak
4.	Kabupaten Fakfak	Kabupaten Fakfak	Kabupaten Sorong Selatan	Kabupaten Sorong Selatan	Kabupaten Sorong Selatan
5.	Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

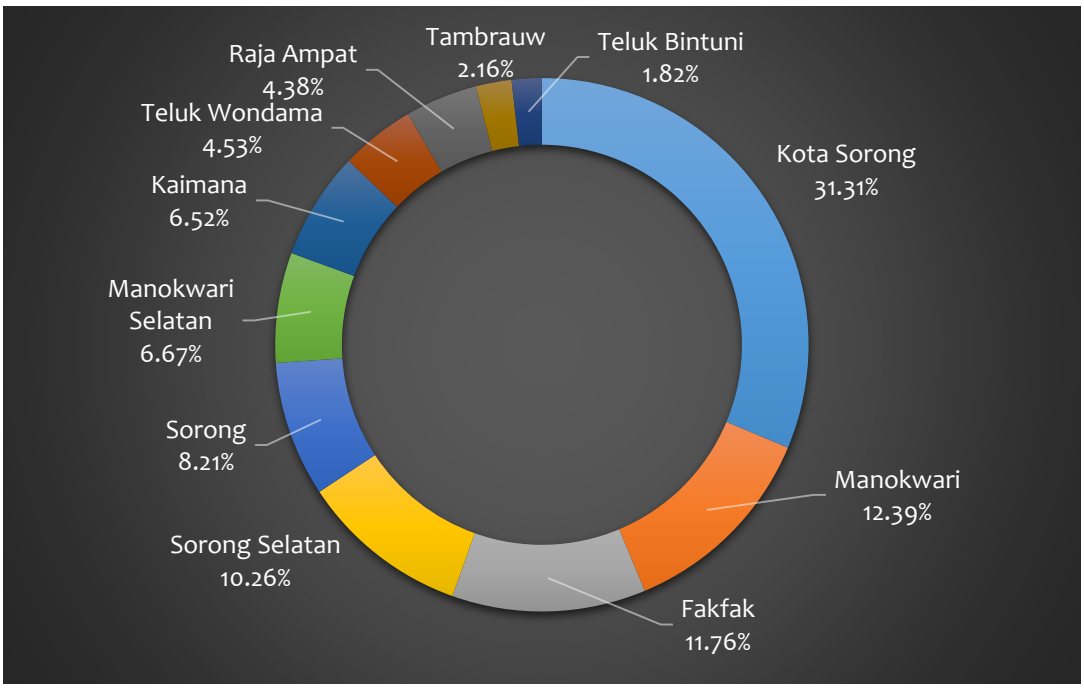

Gambar 2.61 Persentase Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Kab/Kota (%), 2015
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Produksi perikanan tangkap laut sangat dipengaruhi jumlah dan komposisi armada penangkapan. Semakin banyak jumlah armada penangkapan dan komposisi armadanya modern (kapal motor) tinggi, maka produksi perikanan tangkap juga akan mengalami peningkatan (produktivitas per unit armada meningkat). Pada tahun 2015, jumlah armada perikanan tangkap laut di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah sebanyak 14.315 unit yang terdiri dari 5.305 unit perahu tanpa motor (PTM), 4.387 unit perahu motor tempel, dan 1.505 unit kapal motor. Wilayah yang memiliki jumlah armada kapal tertinggi di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Fakfak yaitu sebanyak 3.049 unit, disusul Kota Sorong sebanyak 3.042 unit, dan Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 2.658 unit. Walaupun berada pada posisi kedua dari sisi jumlah armada kapal setelah Kabupaten Fakfak, produksi perikanan tangkap laut di Kota Sorong menempati urutan pertama salah satunya disebabkan besarnya kapasitas armada penangkapan yang memiliki pangkalan di Kota Sorong. Semakin besar kapasitas sebuah kapal motor, maka daya jelajah operasi penangkapannya akan semakin luas dan waktu untuk satu trip penangkapan lebih lama sehingga produktivitasnya akan semakin tinggi. Selain itu, wilayah perairan Kota Sorong memiliki akses yang lebih mudah untuk 3 WPPNRI yang ada di Provinsi Papua Barat jika dibandingkan dengan Kabupaten Fakfak.

Tabel 2.98 Jumlah Perahu Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis (unit), 2015

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Perahu		
		PTM	PMT	Kapal Motor
1.	Fak-Fak	1.117	965	798
2.	Kaimana	467	265	56
3.	Teluk Wondama	232	125	18
4.	Teluk Bintuni	223	150	20
5.	Manokwari	242	328	42
6.	Sorong Selatan	622	490	46
7.	Sorong	522	300	122
8.	Raja Ampat	629	381	39
9.	Kota Sorong	871	1.040	330
10.	Tambrauw	250	166	11
11.	Manokwari Selatan	130	177	23
Jumlah		5.305	4.387	1.505

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Sebagai sarana untuk memperoleh hasil tangkapan yang maksimal, kegiatan eksploitasi perikanan menggunakan alat tangkap digunakan untuk memudahkan manusia dalam menangkap ikan. Alat tangkap merupakan salah satu faktor penting suksesnya sebuah operasi penangkapan ikan mengingat jenis suatu alat tangkap yang digunakan akan berpengaruh terhadap jenis ikan yang ditangkap. Sebagai contoh, alat tangkap pancing biasanya ditujukan untuk menangkap kelompok ikan pelagis besar, sementara pukat cincin digunakan untuk menangkap ikan pelagis kecil. Di Provinsi Papua Barat, jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan cukup beraneka ragam sehingga variasi ikan hasil tangkapan juga beraneka ragam seperti disebutkan pada bagian sebelumnya. Pada tahun 2014, terdapat 5 jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan nelayan di Provinsi Papua Barat dalam operasi penangkapan ikan yaitu jaring insang tetap sebanyak 5.194 unit, jala tebar sebanyak 2.081 unit, pancing rawai tetap dasar sebanyak 2.048 unit, pancing tonda sebanyak 1.525 unit, dan jaring insang hanyut sebanyak 1.283 unit. Rincian mengenai jenis dan jumlah alat tangkap yang digunakan nelayan di Provinsi Papua Barat ditampilkan pada gambar berikut:

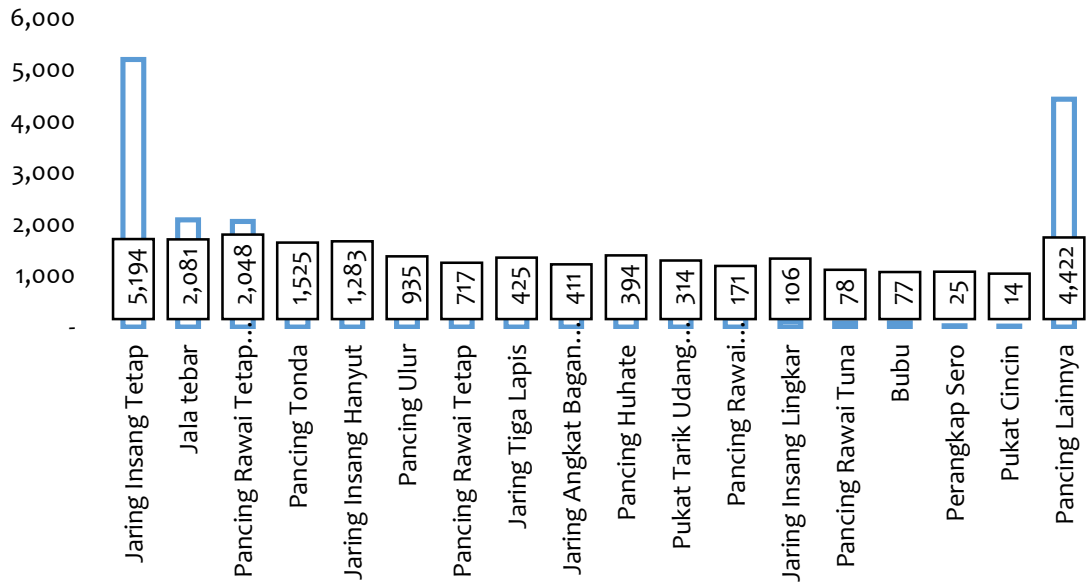

Gambar 2.62 Jumlah Alat Tangkap Menurut Jenis (unit), 2014
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2015 (diolah)

Ketersediaan pelabuhan perikanan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap pengembangan kegiatan perikanan tangkap laut di suatu wilayah. Pada umumnya, wilayah dengan pelabuhan perikanan yang memadai akan menjadi daerah sentra produksi karena pelabuhan tersebut mampu menampung kapal dengan kapasitas besar. Kementerian Kelautan dan Perikanan membagi pelabuhan perikanan ke dalam 4 kelas yaitu Kelas A (Pelabuhan Perikanan Samudera), Kelas B (Pelabuhan Perikanan Nusantara), Kelas C (Pelabuhan Perikanan Pantai), dan Kelas D (Pangkalan Pendaratan Ikan). Mendasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, terdapat 15 pelabuhan perikanan di Provinsi Papua Barat yang tersebar di 3 WPPNRI. Dari Kepmen tersebut, kelas pelabuhan yang ada di Provinsi Papua Barat terdiri dari 1 unit pelabuhan kelas C yaitu PPP Sorong dan 14 unit pelabuhan kelas D dimana hingga tahun 2034, kelas pelabuhan perikanan yang ada di Provinsi Papua Barat tidak mengalami kenaikan kelas. Persebaran pelabuhan tersebut berada di WPPNRI 715 sebanyak 11 unit (1 unit PPP), WPPNRI 717 sebanyak 3 unit, dan WPPNRI 718 sebanyak 1 unit. Rincian mengenai pelabuhan perikanan yang ada di Provinsi Papua Barat ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.99 Jumlah Pelabuhan Perikanan di Provinsi Papua Barat

Nama Pelabuhan	Lokasi	Rencana Pelabuhan Perikanan			
		5 Tahun	10 Tahun	20 Tahun	
		2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
WPPNRI 715					
Bintuni	Kabupaten Teluk Bintuni	PPI	PPI	PPI	PPI
Wimro	Kabupaten Teluk Bintuni	PPI	PPI	PPI	PPI
Coa Kaimana	Kabupaten Kaimana	-	PPI	PPI	PPI
Himatota	Kabupaten Kaimana	PPI	PPI	PPI	PPI
Avona	Kabupaten Kaimana	PPI	PPI	PPI	PPI
Dulan Pok-pok	Kabupaten Fakfak	PPI	PPI	PPI	PPI
Katapop	Kabupaten Sorong	PPI	PPI	PPI	PPI
Klademak	Kota Sorong	PPI	PPI	PPI	PPI
Sorong	Kota Sorong	PPP	PPP	PPP	PPP
Wersar	Kabupaten Sorong Selatan	PPI	PPI	PPI	PPI
Saonek	Kabupaten Raja Ampat	PPI	PPI	PPI	PPI
WPPNRI 717					
Dotir	Kabupaten Teluk Wondama	PPI	PPI	PPI	PPI
Wasior	Kabupaten Teluk Wondama	PPI	PPI	PPI	PPI
Sanggeng	Kabupaten Manokwari	PPI	PPI	PPI	PPI
WPPNRI 718					
Adijaya	Kabupaten Kaimana	PPI	PPI	PPI	PPI

Sumber: Kepmen KP No. 45 Tahun 2014

Selain perikanan tangkap laut, Provinsi Papua Barat juga memiliki potensi perikanan tangkap di perairan umum mengingat banyaknya sungai dan danau besar yang ada di beberapa wilayah kabupaten. Selama periode 2011-2015, prouksi perikanan tangkap di perairan umum cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011, produksinya adalah sebesar 246 ton, kemudian meningkat menjadi 328 ton pada tahun 2012, dalam dua tahun berturut-turut, produksi mengalami penurunan menjadi sebesar 219 ton pada tahun 2014, selanjutnya pada tahun 2015, produksi kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 276 ton. Armada tangkap yang digunakan oleh nelayan dalam kegiatan operasi penangkapan adalah jenis perahu tanpa motor seperti jukung dan perahu motor tempel. Jumlah perahu tanpa motor pada tahun 2015 adalah sebanyak 397 unit, sedangkan perahu motor tempel berjumlah 136 unit.

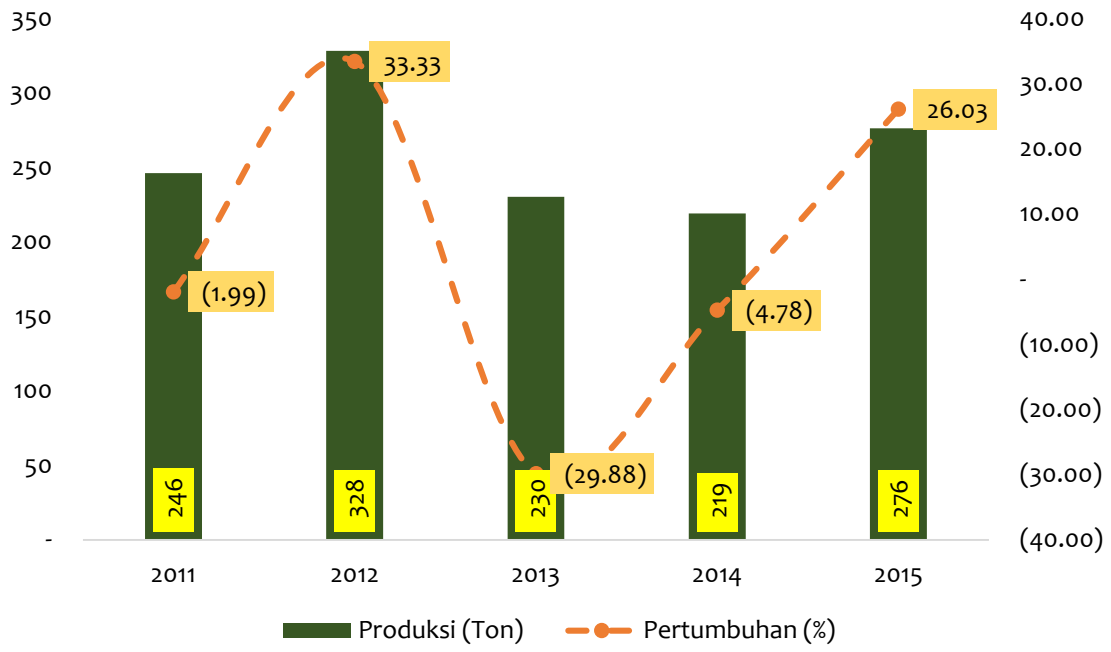

Gambar 2.63 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum di Provinsi Papua Barat, 2011-2015
Sumber: BPS, 2017 (diolah)

Selain dari perikanan tangkap, produksi perikanan Provinsi Papua Barat juga berasal dari perikanan budidaya. Secara umum, kegiatan perikanan budidaya di Provinsi Papua Barat dapat dikatakan belum berkembang karena pemanfaatan lahan yang masih rendah. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan luas area budidaya dari seluas 1.780 Ha pada tahun 2014 menjadi seluas 44.143 Ha, akan tetatpi kenaikan luas lahan tersebut tidak berbanding lurus dengan produksi. Selama periode 2011-2015, produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan dari 21.737 ton menjadi 40.079 ton. Namun, dalam kurun waktu 2012, produksi perikanan budidaya terus mengalami penurunan setiap tahun dari produksi tertingginya sebesar 63.893 ton.

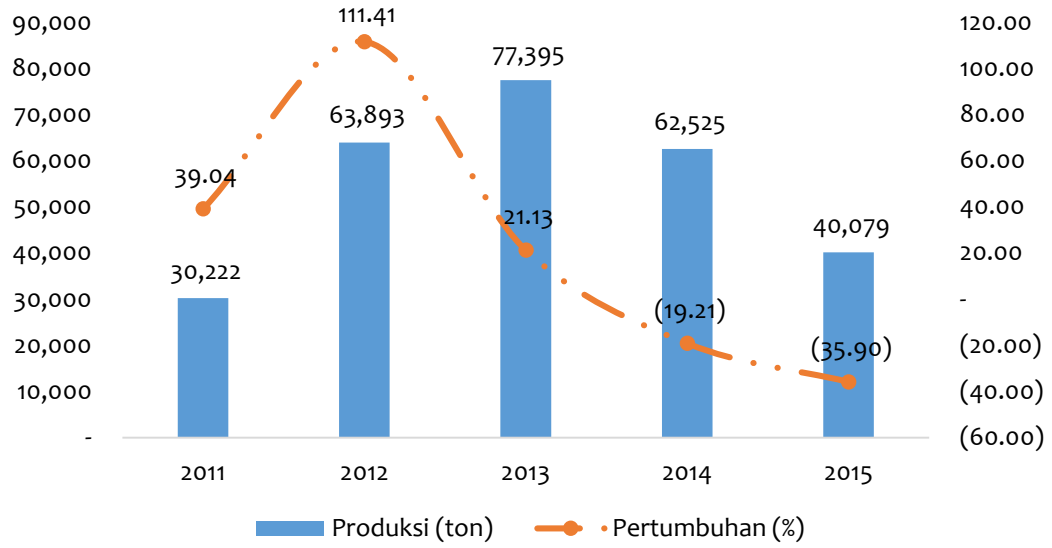

Gambar 2.64 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Papua Barat, 2011-2015
Sumber: BPS, 2017 (diolah)

2.3.2.2. Pariwisata

Provinsi Papua Barat memiliki kekayaan alam berupa hutan pegunungan yang luas dan wilayah laut dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain keindahan alam, budaya masyarakat di Provinsi Papua Barat juga merupakan salah satu atraksi pariwisata yang menarik. Sektor pariwisata merupakan sektor yang diharapkan akan menjadi *leading* sektor di Provinsi Papua Barat pada masa mendatang, walaupun saat ini belum menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian. Secara makro sektor pariwisata merupakan industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui: penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan taraf hidup, serta secara simultan dapat menggerakkan sektor-sektor produksi lain, sehingga pariwisata sering disebut sebagai lokomotif perekonomian.

Menurut Bappenas (2015), arah kebijakan dalam pengembangan sektor pariwisata nasional meliputi: pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, pembangunan destinasi pawriwisata dengan meningkatkan daya Tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri, pembangunan industri pariwsata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk dan jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran,

dan pembangunan kelembagaan pariwisata dengan membangun sumberdaya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional. Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu tema pengembangan di Provinsi Papua Barat adalah adalah percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati. Selain itu, dalam RPJMN 2015-2019 juga disebutkan bahwa kawasan strategis pengembangan pariwisata di Provinsi Papua Barat adalah kawasan wisata bahari terpadu di Kabupaten Raja Ampat. Bersama daerah lain seperti Wakatobi dan Bunaken, Raja Ampat menjadi destinasi pariwisata unggulan dengan tema *Coral Wonders*.

Tidak hanya Raja Ampat, sesungguhnya Provinsi Papua Barat memiliki destinasi wisata yang menarik diantaranya hutan pegunungan di Kabupaten Pegunungan Arfak, hutan mangrove di Kabupaten Teluk Bintuni, wisata gua di kawasan Pegunungan Lina di Kabuoaten Manokwari. wisata bahari Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC) di Kabupaten Teluk Wondama, kawasan konservasi Penyu Belimbing Jamursba Medi di Kabupaten Tambrauw, dan kawasan konservasi perairan di Kabupaten Kaimana. Dengan dikembangkannya kawasan Raja Ampat sebagai salah satu destinasi wisata unggulan nasional, hendaknya Pemerintah Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota mulai melirik kawasan lain untuk dikembangkan melalui peningkatan akses menuju kawasan wisata, sarana pendukung wisata seperti hotel dan restoran, dan penyiapan tenaga kerja pariwisata yang handal. Jika dilihat lebih lanjut, masih banyak potensi wisata alam di Provinsi Papua Barat yang belum dikembangkan dengan optimal dan memerlukan penataan untuk menjadi sebuah daya tarik wisata unggulan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya tarik wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Provinsi Papua Barat.

Tabel 2.100 Kawasan Pariwisata di Provinsi Papua Barat

Kabupaten/Kota	Jenis Wisata
Kabupaten Fakfak	- Tugu Perjuangan Merah Putih (Pulau Tubir Seram Kampung Nemiwikarya) - Tugu PD II (Kelurahan Fakfak Utara) - Tugu Peperangan (Kelurahan Fakfak Selatan) - Pantai Pasir Putih I (Kampung Pasir Putih) - Pantai Pasir Putih II (Kampung Wayati) - Pantai Wayob (Pulau Panjang, Kampung Werpigan) - Sungai Air Besar (Kampung Air Besar) - Air Terjun Maredred (Kampung Pasir Putih)

Kabupaten/Kota	Jenis Wisata
	- Kolam Renang Air Besar (Kampung Air Besar) - Air Terjun Kali (Kampung Werba Distrik Fakfak Barat) - Pasir Pantai (Kampung Senggaram Distrik Fakfak Timur) - Kolam Air Kamandir (Kampung Senggaram Distrik Fakfak Timur) - Kolam Ikan Iskoomporis (Kampung Senggaram Distrik Fakfak Timur) - Goa Alam (Distrik Fakfak) - Lubang Kayu Merah (Kampung Kayu Merah) - Penangkaran Ikan Duyung (Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat) - Cagar Alam Pegunungan (Distrik Fakfak) - Wisata budaya
Kabupaten Kaimana	- Danau Kamaka (Distrik Kaimana) - Danau Lumira (Distrik Arguni Bawah) - Danau Yamor (Distrik Yamor) - Danau Siviki (Distrik Teluk Arguni) - Pariwisata Alam (Distrik Kaimana, Distrik Buruway, Distrik Teluk Etna, Distrik Arguni Bawah dan Distrik Teluk Arguni)
Kabupaten Manokwari	- Wisata Budaya (Pulau Mansinam) - Wisata Alam (Pantai Pasir Putih, Pantai Borarsi, Angrem, Indoki, Fanindi, Arkuki, Wirsi, Imbrairiri, Biryosi, dan Wosi) - Wisata Buatan (Teluk Sawaibu) - Wisata Minat (Wisata Belanja di Kawasan CBD Manokwari, dan Pelabuhan Manokwari)
Kabupaten Maybrat	- Kali Wensi di Ayamaru - Kali Ombak di Mare - Kali Auk/Seni di Mare - Air terjun Urik di Mare - Air terjun, mata air asin di Aifat - Pemandangan alam hutan dan pegunungan di Ayamaru, Mare dan Ayawasi Aifat - Taman hutan raya di Distrik Aifat Timur - Wisata Ayamaru
Kabupaten Raja Ampat	- Kampung Wisata (Aborek, Sauwandrek, Sawinggray, Yen Waup Nor, Yen Buba) - Pulau Wayag hingga gugusan pulau Kawe di bagian utara Waigeo - Pulau Gam – pulau Kri, Mansuar dan pulau Wai - Pulau Ketimkerio – pulau Wagmab dan pulau Walib dibagian selatan Misool - Gugusan pulau Kofiau dibagian timur Kabupaten Raja Ampat
Kabupaten Sorong Selatan	- Pantai Kapal/Kohoin, Sungai Sembra, Hutan Wisata Bariat, Hutan Lindung Manelek, Hutan Lindung Namro di Distrik Teminabuan - Danau Uter, Gua Eway, Sungai Sesna, Hutan Lindung Sesor dan Boldon di Distrik Wayer - Kolam renang alam Klagoin di Distrik Seremuk - Pantai Konda di Distrik Teminabuan - Pantai Isogo, Pantai Seget, Pantai Nawetira, Pantai Sertubir, Pantai Matemani, Pantai Sibora, Pantai Pasir Hitam di Distrik Inanwatan - Pantai Tapuri di Distrik Kais - Pantai Tambani di Distrik Kokoda

Kabupaten/Kota	Jenis Wisata
Kabupaten Manokwari Selatan	- Pantai Raipawi di Distrik Ransiki - Pantai Wee di Distrik Ransiki - Pantai Muari - Gunung Botak - Wisata Bendungan Oransbari - Wisata Alam di Distrik Momi Waren
Kabupaten Teluk Wondama	- Bukit Aitumeri - Taman Nasional Laut Cenderawasih - Pulau Rumberpon - Pulau Nusrowi - Pulau Nukusa - Pulau Mioswar - Pulau Roon - Pulau Yoop
Kabupaten Pegunungan Arfak	- Wisata Danau Anggi Gita dan Anggi Giji - Wisata Cagar Alam Pegunungan Arfak - Wisata Belanja di Kawasan CBD, Pegunungan Arfak dan Pelabuhan Pegunungan Arfak
Kabupaten Tambrauw	- Pulau Dua di Distrik Sausapor - Pulau Miossu - Bekas Tank Sekutu (Kampung Werur Distrik Sausapor) - Laut Abun di Distrik Abun - Gua Kelelawar (Kampung Tabamrese Distrik Miyah)
Kota Sorong	- Pulau Nanah Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan - Pulau Dofior Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan - Pulau Tsiof Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan - Pulau Ram Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan - Pulau Soop Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan - Hutan Wisata di Kelurahan Klasmanan Distrik Sorong Timur - Wisata Budaya di Distrik Sorong Kepulauan - Wisata Situs Bersejarah di Pulau Doom - Wisata Situs Bersejarah Tembok Dofior - Gua Jepang di Pulau Tsiof Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan - Tugu Jepang di Kelurahan Klademak Distrik Sorong - Pantai Tanjung Kasuari di Kelurahan Tanjung Kasuari - Pulau Buaya Kelurahan Kampung Baru - Pulau Doom Kelurahan Doom Barat Distrik Sorong Kepulauan
Kabupaten Sorong	- Wisata Alam (Distrik Klaili, Distrik Kasimle, Distrik Makbon)
Kabupaten Teluk Bintuni	- Wisata alam sungai Muturi dan Sebyar di Distrik Bintuni - Wisata alam sungai Tembuni di Distrik Tembuni - Wisata alam sungai Kaitero dan sungai Kasuri di Distrik Babo - Wisata alam danau tenemot dan danau Makiri - Distrik Aranday

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Menurut Bappenas (2015), pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua Barat dapat dikatakan belum optimal dilihat dari besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap

perekonomian Provinsi Papua Barat jika dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya. Melihat data jumlah tamu yang menginap selama periode 2010-2014, jumlah tamu asing yang menginap di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dari 8.614 orang pada tahun 2010 menjadi sebanyak 20.137 orang pada tahun 2014. Sementara itu, jumlah tamu domestik yang menginap meningkat signifikan dari sebanyak 272.155 orang pada tahun 2010 menjadi sebanyak 858.790 orang pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke beberapa objek wisata di Provinsi Barat belum begitu besar walaupun jumlahnya mengalami peningkatan selama periode 2010-2014. Salah satu penyebab peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Papua Barat yang tidak terlalu signifikan adalah aksesibilitas dan infrastruktur dimana pada faktanya, kemajuan wisata di suatu daerah berkaitan erat dengan kesiapan infrastruktur yang dimilikinya.

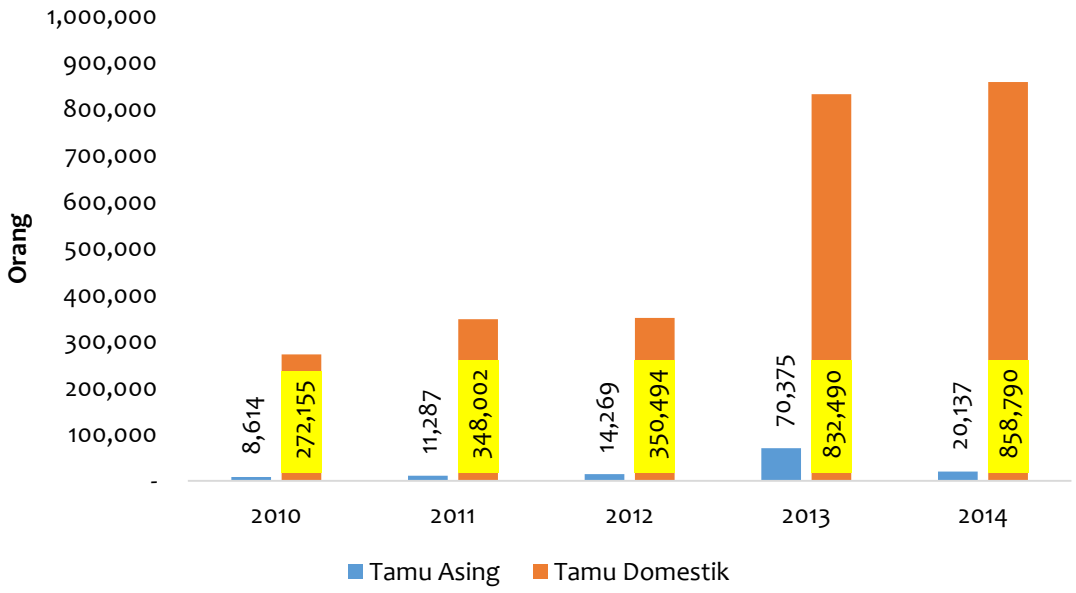

Gambar 2.65 Jumlah Tamu Asing dan Domestik yang Menginap, 2010-2014
Sumber: Bappenas, 2015 (diolah)

Melihat perkembangan rata-rata tamu menginap baik di hotel bintang maupun melati, lama tamu menginap selama periode 2009-2014 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2009, rata-rata tamu yang menginap di hotel bintang adalah selama 2,75 hari kemudian menurun menjadi sebesar 2,33 hari pada tahun 2014. Pada kasus tamu yang menginap di hotel melati, lama tamu menginap mengalami peningkatan dari selama 2,14 hari pada tahun 2009 menjadi 2,16 hari pada tahun 2014. Jika dirinci menurut jenis tamu baik asing

maupun domestik, lama menginap di hotel bintang mengalami penurunan. Pada tahun 2009, lama tamu asing menginap di hotel bintang adalah selama 9,75 hari kemudian turun menjadi selama 1,87 hari pada tahun 2014, sedangkan lama tamu domestik turun dari sebesar 2,56 hari (2009) menjadi selama 2,34 hari (2014). Sementara itu, jumlah tamu asing dan domestik yang menginap di hotel melati justru mengalami peningkatan dimana tamu asing yang menginap meningkat dari selama 3,36 hari pada tahun 2009 menjadi selama 3,56 hari pada tahun 2014, sedangkan tamu domestik meningkat dari selama 2,14 hari (2009) menjadi selama 2,16 hari (2014).

Tabel 2.101 Lama Tamu Asing Menginap Menurut Jenis Hotel (Hari), 2009-2014

Tahun	Asing		Domestik		Total	
	Bintang	Melati	Bintang	Melati	Bintang	Melati
2009	9.75	3.36	2.56	2.14	2.75	2.14
2010	2.97	4.25	2.37	2.66	2.41	2.71
2011	4.16	2.93	2.33	2.75	2.42	2.75
2012	5.75	7.01	2.82	3.07	2.88	3.10
2013	2.72	2.55	1.84	2.47	1.85	2.47
2014	1.87	3.56	2.34	2.16	2.33	2.16

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Selain akses konektivitas melalui pembangunan infrastruktur, perkembangan sektor pariwisata tentunya sangat didukung oleh beberapa fasilitas penunjung kenyamanan dalam berwisata seperti sarana akomodasi berupa hotel. Perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua Barat tentunya sangat didukung dengan meningkatnya sarana akomodasi dimana jumlah hotel selama periode 2009-2015 jumlahnya mengalami peningkatan dari sebanyak 73 hotel (2009) menjadi sebanyak 125 hotel (2015). Kelas hotel bintang di Provinsi Papua Barat jumlahnya mengalami peningkatan dari sebanyak 8 unit pada tahun 2009 menjadi sebanyak 15 unit pada tahun 2015, sedangkan hotel kelas melati bertambah dari sebanyak 65 unit menjadi 110 unit. Hingga tahun 2015, sebagian besar hotel bintang di Provinsi Papua Barat berada di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari dengan jumlah masing-masing sebanyak 9 dan 3 unit, sedangkan wilayah lain yang memiliki kelas hotel bintang adalah Kabupaten Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni dengan jumlah masing-masing sebanyak 1 unit. Dengan berkembangnya pariwisata Kabupaten Raja Ampat sebagai salah satu destinasi wisata unggulan, maka banyak terdapat hotel baru

yang bermunculan untuk memenuhi permintaan dimana jumlahnya pada tahun 2015 sebanyak 30 unit.

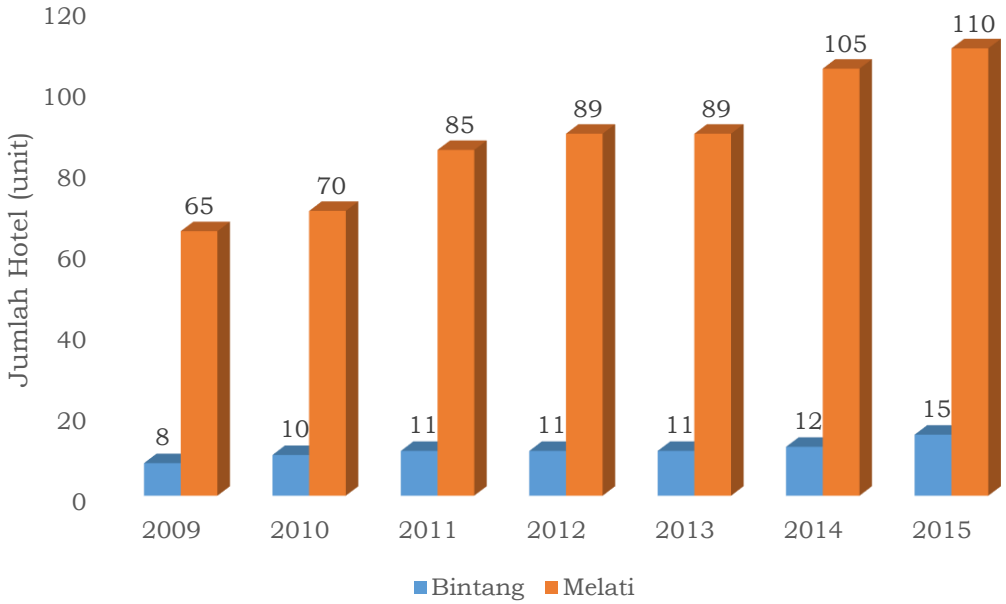

Gambar 2.66 Jumlah Hotel Menurut Kelas di Provinsi Papua Barat, 2009-2015
Sumber: Papua Barat Dalam Angka, 2016 (diolah)

2.3.2.3. Pertanian

Seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi Provinsi Papua Barat. Di bidang ketenagakerjaaan, sektor pertanian menjadi tulang punggung mata pencaharian masyarakat. Selain itu, pentingnya sektor pertanian juga dilihat dari fungsinya sebagai sumber pangan utama bagi masyarakat dan kontribusinya terhadap perekonomian. Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu tema pengembangan wilayah Papua termasuk Provinsi Papua Barat adalah percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Pengembangan kawasan strategis untuk Provinsi Papua Barat di bidang pertanian diantaranya adalah pengembangan kawasan pertanian di Karas dan Teluk Arguni; pengembangan sentra ternak sapi Pola *Ranch* di Bomberai, Kebar, dan Salawati; pengembangan pala di Fakfak; dan pengembangan sagu rakyat dan investasi industri komoditas sagu di Sorong Selatan. Sektor pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, dan

peternakan. Jenis tanaman pangan yang dibudidayakan penduduk di Provinsi Papua Barat adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.

Luas lahan sawah di Provinsi Papua Barat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu sawah irigasi dan non irigasi (tadah hujan). Luas lahan sawah di Provinsi Papua Barat secara keseluruhan pada tahun 2015 adalah seluas 19.661 ha yang terdiri dari sawah irigasi seluas 7.501 ha dan sawah non irigasi seluas 12.160 ha. Berdasarkan data BPS Provinsi Papua Barat (2016), sawah irigasi berada di berada di 7 kabupaten, sedangkan sawah non irigasi berada di 9 kabupaten. wilayah yang memiliki sawah irigasi dengan luasan terbesar adalah Kabupaten Manokwari yaitu seluas 3.348 ha, disusul Kabupaten Sorong seluas 1.903 ha, dan Kabupaten Manokwari Selatan seluas 980 ha. Pada sawah non irigasi, luasan terbesar berada di Kabupaten Sorong yaitu seluas 4.234 ha, disusul Kabupaten Kaimana seluas 4.057 ha, dan Kabupaten Manokwari seluas 1.525 ha. Data luasan sawah menunjukkan bahwa infrastruktur pengairan untuk irigasi sawah sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan produksi tanaman pangan dan kemandirian pangan yang juga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani.

Tabel 2.102 Luas Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan (ha), 2015

No.	Kabupaten	Jenis Sawah		Jumlah
		Irigasi	Non Irigasi	
1.	Fakfak	300	960	1,260
2.	Kaimana	-	4,057	4,057
3.	Teluk Wondama	120	542	662
4.	Teluk Bintuni	475	77	552
5.	Manokwari	3,348	1,525	4,873
6.	Sorong Selatan	-	125	125
7.	Sorong	1,903	4,234	6,137
8.	Raja Ampat	375	580	955
9.	Tambrauw	-	-	-
10.	Maybrat	-	-	-
11.	Kota Sorong	980	60	1,040
12.	Manokwari Selatan	-	-	-
13.	Pegunungan Arfak	-	-	-
Jumlah		**7.501**	**12.160**	**19.661**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Selain sawah, Provinsi Papua Barat juga memiliki lahan tegal dengan luasan keseluruhan sebesar 6.523 ha yang tersebar di 6 kabupaten/kota. Wilayah dengan luasan lahan tegal terbesar adalah Kabupaten Sorong (4.707 ha), diikuti Kabupaten Manokwari Selatan seluas 1.112 ha, dan Kabupaten Teluk Wondama seluas 351 ha. Ladang di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah seluas 662.818 ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota. Luasan ladang tertinggi di Provinsi Papua Barat berada di Kabupaten Pegunungan Arfak yaitu seluas 415.678 ha, diikuti Kabupaten Fakfak seluas 70.114 ha, dan Kabupaten Sorong seluas 68.387 ha, sedangkan luasan ladang terkecil berada di Kabupaten Teluk Wondama dengan luas hanya sebesar 538 ha. Sesungguhnya Provinsi Papua Barat masih memiliki lahan yang luas untuk pengembangan berbagai jenis tanaman pangan. Luasan lahan yang tidak diusahakan (*temporarily unused*) di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah seluas 2.087.099 ha dengan luasan tertinggi berada di Kabupaten Sorong Selatan (1.147.949 ha). Wilayah lain yang memiliki lahan yang luas (lebih dari 100.000 ha) untuk pengembangan beerbagai komoditas pertanian diantaranya adalah Kabupaten Sorong (359.773 ha), Kabupaten Sorong (359.773 ha), Kabupaten Fakfak (226.582 ha), Kabupaten Raja Ampat (213.906 ha), dan Kabupaten Maybrat (113.065 ha).

Tabel 2.103 Luas Lahan Tegal, Ladang, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota (ha), 2015

No.	Kabupaten	Jenis Lahan		
		Tegal	Ladang	Sementara Tidak Diusahakan
1.	Fakfak	-	70,114	226,582
2.	Kaimana	-	2,590	8,213
3.	Teluk Wondama	351	538	464
4.	Teluk Bintuni	125	1,664	5,617
5.	Manokwari	89	33,971	8,581
6.	Sorong Selatan	-	15,949	1,147,949
7.	Sorong	4,707	68,387	359,773
8.	Raja Ampat	-	34,097	213,906
9.	Tambrauw	-	3,893	125
10.	Maybrat	-	14,605	113,065
11.	Kota Sorong	1,112	833	879
12.	Manokwari Selatan	-	415,678	1,346
13.	Pegunungan Arfak	139	599	599
Jumlah		**6.523**	**662.918**	**2.087.099**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Luas panen padi sawah di Provinsi Papua Barat selama periode 2011-2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011, luas panen padi sawah adalah seluas 6.898 ha, kemudian menurun menjadi 6.592 ha pada tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2013 terjadi peningkatan luas panen menjadi 6.794 ha, dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 6.800 ha. Berbeda dengan luas panen yang cenderung menurun, produksi padi sawah di Provinsi Papua Barat selama periode 2011-2015 justru mengalami peningkatan. Produksi padi sawah pada tahun 2011 adalah sebesar 25.599 ton yang terus meningkat hingga tahun 2013 menjadi sebesar 27.995 ton, selanjutnya pada tahun 2014 produksi mengalami penurunan menjadi sebesar 26.104 ton, dan pada tahun 2015 mencapai produksi tertinggi menjadi sebesar 29.243 ton.

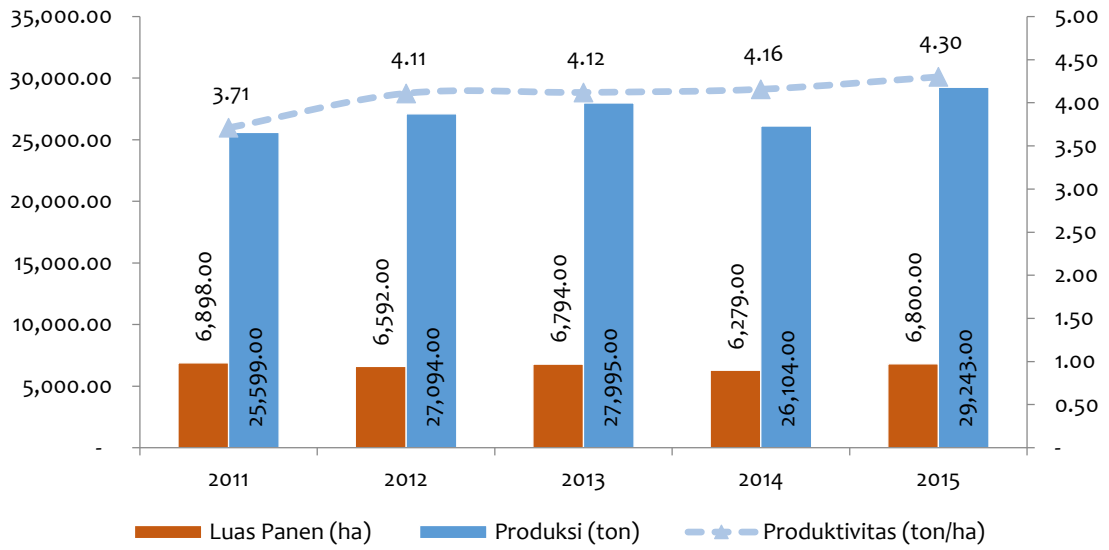

Gambar 2.67 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah Provinsi Papua Barat, 2011-2015
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Dengan luas panen yang mengalami penurunan namun diimbangi dengan peningkatan produksi, maka produktivitas lahan padi sawah di Provinsi Papua Barat dapat dikatakan mengalami peningkatan selama periode 2011-2015. Pada tahun 2011, produktivitas lahan padi sawah adalah sebesar 3,71 ton/ha kemudian meningkat setiap tahun menjadi sebesar 4,30 ton/ha pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan produktivitas padi nasional yang mencapai 5,34 ton per ha, maka produktivitas lahan padi sawah di Provinsi Papua Barat belum dapat dikatakan optimal karena masih ada selisih

sebesar 1 ton per ha. Walaupun produktivitas padi mengalami peningkatan setiap tahun, namun masih ada potensi untuk peningkatan produktivitas melalui pembangunan sarana prasarana pendukung usaha pertanian seperti saluran irigasi, pengembangan bibit unggul, teknologi produksi lahan, dan tentunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian.

Tabel 2.104 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015

No.	Kabupaten	Padi Sawah		
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1.	Fakfak	580.00	2,281.00	3.93
2.	Kaimana	-	-	-
3.	Teluk Wondama	9.00	36.00	4.00
4.	Teluk Bintuni	305.00	1,255.00	4.11
5.	Manokwari	3,723.00	16,090.00	4.32
6.	Sorong Selatan	-	-	-
7.	Sorong	937.00	4,057.00	4.33
8.	Raja Ampat	213.00	861.00	4.04
9.	Tambrauw	-	-	-
10.	Maybrat	-	-	-
11.	Kota Sorong	-	-	-
12.	Manokwari Selatan	1,033.00	4,663.00	4.51
13.	Pegunungan Arfak	-	-	-
Jumlah		**6.800,00**	**29.243,00**	**4,30**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Jika dirinci menurut kabupaten/kota pada tahun 2015, produsen padi sawah terbesar di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Manokwari yaitu sebesar 16.090 ton (55,02%), disusul Kabupaten Manokwari Selatan sebesar 4.663 ton (15,19%), dan Kabupaten Sorong sebesar 4.057 ton (13,78%). Tingginya produksi padi sawah di Kabupaten Manokwari tentunya didorong oleh luasan lahan sawah yang ada pada daerah tersebut dimana luasan lahan sawah di Kabupaten Manokwari mencapai 3.723 ha (54,75%). Dari sisi produktivitas, wilayah dengan produktivitas padi sawah tertinggi adalah Kabupaten Manokwari Selatan yaitu sebesar 4,51 ton/ha, disusul Kabupaten Sorong sebesar 4,33 ton/ha, dan Kabupaten Manokwari sebesar 4,32 ton/ha. Dari data produksi dan luas lahan padi sawah di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pengembangan padi sawah ke depan, wilayah potensial

yang dapat dikembangan sebagai sentra produksi padi sawah di provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan.

Selain padi yang dibudidayakan di sawah, produksi padi di Provinsi Papua Barat juga berasal dari padi yang dibudidayakan di ladang. Sama seperti padi sawah. Luas panen padi ladang di Provinsi Papua Barat selama periode 2012-2015 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2012, luas panen padi ladang adalah seluas 1.158 ha kemudian menurun setiap tahun hingga hanya menjadi seluas 374 ha pada tahun 2015. Jika padi yang dibudidayakan di sawah produktivitasnya mengalami peningkatan, padi ladang justru menunjukkan hasil yang berkebalikan dimana produktivitasnya mengalami penurunan dari sebesar 2,72 ton/ha pada tahun 2012 menjadi sebesar 2,61 ton/ha pada tahun 2015. Dengan adanya penurunan luas panen dan penurunan produktivitas, maka produksi padi ladang di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan dari sebesar 3.150 ton pada tahun 2012 menjadi hanya sebesar 976 ton pada tahun 2015.

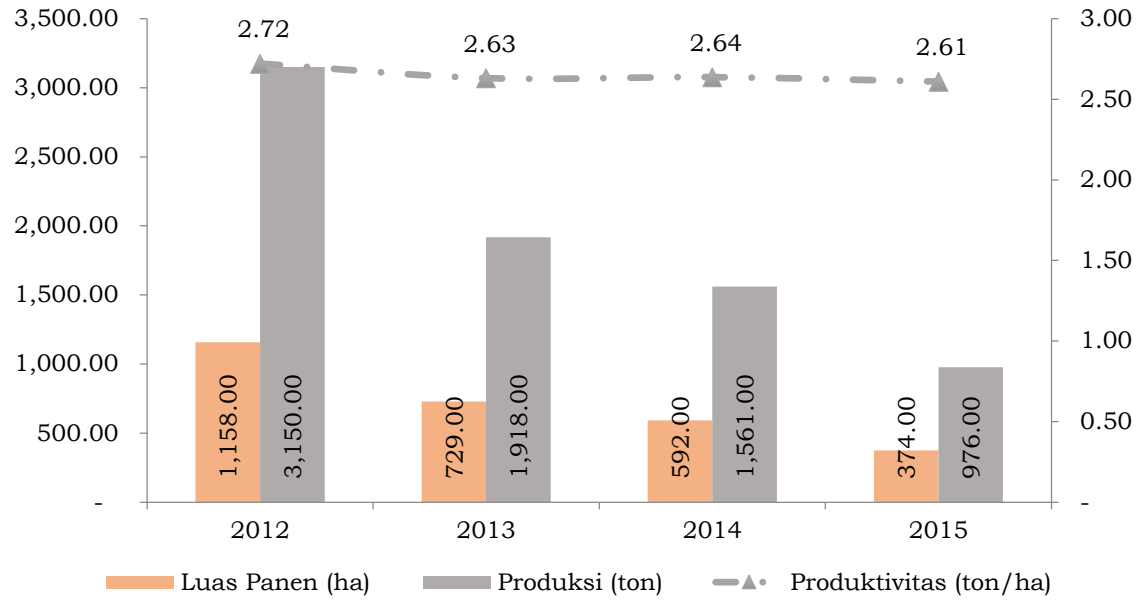

Gambar 2.68 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Ladang Provinsi Papua Barat, 2011-2015
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Tidak hanya menjadi produsen padi sawah terbesar, Kabupaten Manokwari juga merupakan produsen padi ladang terbesar di Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2015, produksi padi ladang di Kabupaten Manokwari adalah sebesar 274 ton. Wilayah lain yang memiliki produksi padi lading cukup tinggi dengan produksi di atas 100 ton diantaranya adalah Kabupaten Teluk Wondama yaitu sebesar 257 ton (26,33%), Kabupaten Sorong

Selatan sebesar 154 ton (15,78%), dan Kabupaten Kaimana sebesar 140 ton (14,34%). Sementara itu, wilayah yang tidak memproduksi padi ladang adalah Kabupaten Fakfak, Sorong, Raja Ampat, Maybrat, Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong. Secara rinci, luas panen dan produksi padi ladang di Provinsi Papua Barat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.105 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Ladang Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015

No.	Kabupaten	Padi Ladang		
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1.	Fakfak	-	-	-
2.	Kaimana	54.00	140.00	2.59
3.	Teluk Wondama	98.00	257.00	2.62
4.	Teluk Bintuni	3.00	8.00	2.67
5.	Manokwari	105.00	274.00	2.61
6.	Sorong Selatan	59.00	154.00	2.61
7.	Sorong	-	-	-
8.	Raja Ampat	-	-	-
9.	Tambrauw	30.00	78.00	2.60
10.	Maybrat	-	-	-
11.	Kota Sorong	-	-	-
12.	Manokwari Selatan	25.00	65.00	2.60
13.	Pegunungan Arfak	-	-	-
Jumlah		**374,00**	**976,00**	**2,61**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Tanaman pangan lain yang dibudidayakan masyarakat diantaranya adalah jagung. Luas panen jagung selama periode 2011-2015 mengalami peningkatan dari seluas 1.278 ha pada tahun 2011 menjadi seluas 1.307 ha pada tahun 2015. Peningkatan luas panen tersebut juga diiringi oleh peningkatan produksi dari sebesar 2.125 ton menjadi sebesar 2.264 ton, sedangkan produktivitasnya meningkat dari sebesar 1,66 ton per ha menjadi sebesar 1,73 ton per ha. Walaupun terjadi peningkatan, produktivitas lahan jagung di Provinsi Papua Barat merupakan yang terendah di level nasional. Jika dibandingkan dengan produktivitas rata-rata nasional yang telah mencapai 5,18 ton per ha, maka masih terdapat selisih sekitar 2 ton per ha antara produktivitas eksisting di Provinsi Papua Barat dengan produktivitas nasional. Pada tahun 2015, produksi jagung Provinsi Papua Barat berasal dari 12 kabupaten/kota dimana wilayah yang tidak memproduksi jagung adalah Kabupaten Sorong Selatan. Produsen jagung terbesar pada tahun 2015 adalah Kabupaten Manokwari

yaitu sebesar 711 ton, disusul Kabupaten Sorong sebesar 507 ton, Kabupaten Raja Ampat sebesar 443 ton, Kabupaten Manokwari Selatan sebesar 237 ton, dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 124 ton. Tingginya produksi jagung pada 5 wilayah tersebut disebabkan memiliki luas panen yang tinggi seperti Kabupaten Manokwari yang memiliki luas panen seluas 411 ha (31,45%) dan Kabupaten Sorong memiliki luas panen seluas 293 ha (19,51%).

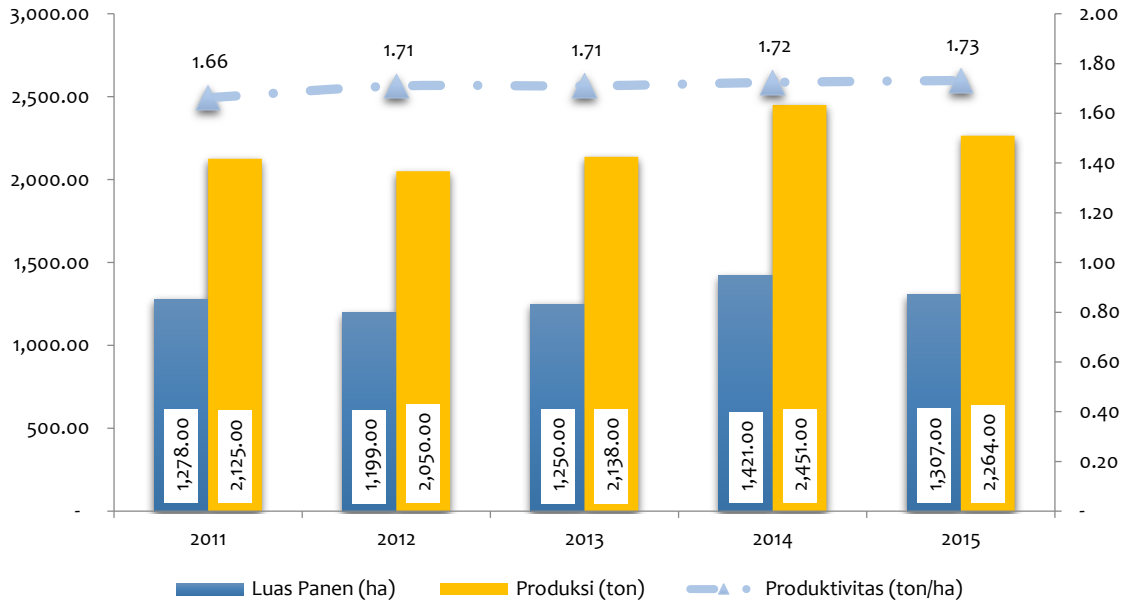

Gambar 2.69 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung Provinsi Papua Barat, 2011-2015
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Tabel 2.106 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015

No.	Kabupaten	Jagung		
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1.	Fakfak	4.00	7.00	1.75
2.	Kaimana	7.00	12.00	1.71
3.	Teluk Wondama	22.00	38.00	1.73
4.	Teluk Bintuni	72.00	124.00	1.72
5.	Manokwari	411.00	711.00	1.73
6.	Sorong Selatan	-	-	-
7.	Sorong	293.00	507.00	1.73
8.	Raja Ampat	255.00	443.00	1.74
9.	Tambrauw	22.00	38.00	1.73
10.	Maybrat	15.00	26.00	1.73
11.	Kota Sorong	29.00	51.00	1.76
12.	Manokwari Selatan	137.00	237.00	1.73
13.	Pegunungan Arfak	40.00	70.00	1.75

No.	Kabupaten	Jagung		
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
Jumlah		1.307,00	2.264,00	1,73

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Untuk tanaman kedelai, luas panennya selama periode 2011-2015 selalu mengalami peningkatan setiap tahun dari seluas 375 ton pada tahun 2011 menjadi seluas 1.362 ha pada tahun 2015. Peningkatan luas panen tersebut juga diiringi oleh peningkatan produksi setiap tahun dari sebesar 403 ton menjadi 1.439 ton. Akan tetapi hal tersebut tidak disertai dengan peningkatan produktivitas yang justru mengalami penurunan dari sebesar 1,07 ton/ha menjadi sebesar 1,06 ton per ha. Seperti pada komoditas padi dan jagung, produktivitas lahan kedelai di Provinsi Papua Barat juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang telah mencapai 1,60 ton/ha.

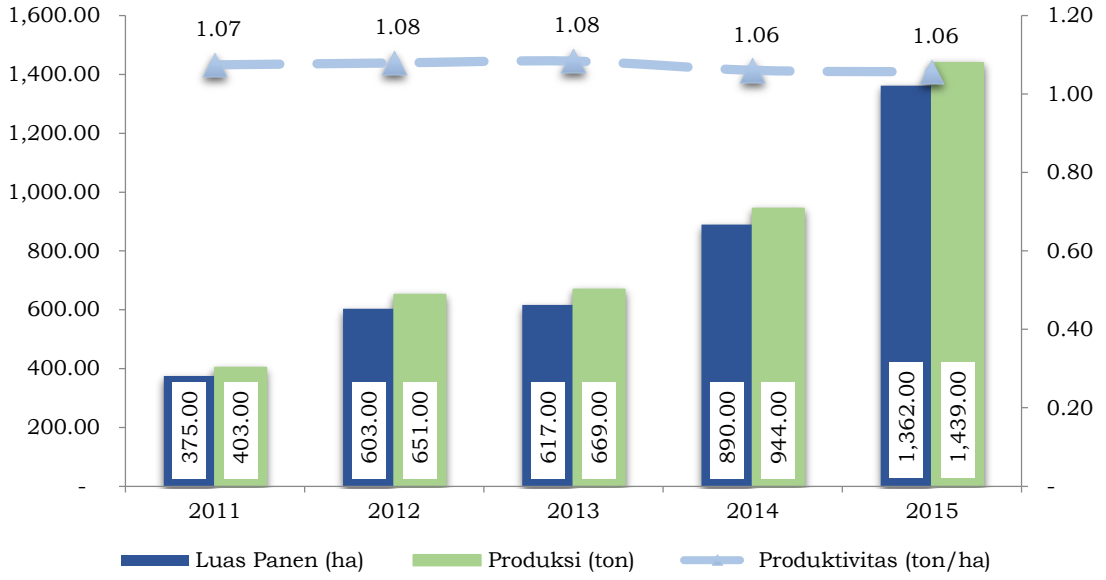

Gambar 2.70 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kedelai Provinsi Papua Barat, 2011-2015
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Jika dirinci menurut wilayah, produsen terbesar kedelai di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Manokwari yaitu sebesar 769 ton (53,44%). Tingginya produksi kedelai di Kabupaten Manokwari disebabkan wilayah tersebut memiliki luas lahan terbesar dibanding wilayah lainnya yaitu sebesar 734 ha (53,89%). Produsen terbesar kedua komoditi kedelai adalah Kabupaten Fakfak yaitu sebesar 442 ton. Data tersebut

menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut merupakan sentra produksi kedelai dengan persentase produksi mencapai 84,16%.

Tabel 2.107 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kedelai Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015

No.	Kabupaten	Kedelai		
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1.	Fakfak	410.00	442.00	1.08
2.	Kaimana	5.00	5.00	1.00
3.	Teluk Wondama	11.00	11.00	1.00
4.	Teluk Bintuni	23.00	23.00	1.00
5.	Manokwari	734.00	769.00	1.05
6.	Sorong Selatan	34.00	36.00	1.06
7.	Sorong	67.00	71.00	1.06
8.	Raja Ampat	5.00	5.00	1.00
9.	Tambrauw	-	-	-
10.	Maybrat	56.00	60.00	1.07
11.	Kota Sorong	-	-	-
12.	Manokwari Selatan	17.00	17.00	1.00
13.	Pegunungan Arfak	-	-	-
Jumlah		**1.362,00**	**1.439,00**	**1,06**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Selama periode 2011-2015, luas panen kacang tanah di Provinsi Papua Barat cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011, luas panen kacang tanah adalah seluas 596 ha, kemudian mengalami penurunan menjadi 445 ha pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013, terjadi peningkatan luas panen kacang tanah menjadi seluas 600 ha, namun dalam kurun wakfu 2014-2015, terjadi penurunan luas panen kacang tanah menjadi seluas 594 ha. Dari sisi produksi, justru terjadi peningkatan produksi selama periode tersebut dari sebesar 625 ton menjadi sebesar 653 ton. Peningkatan produksi tersebut tentunya didorong dengan semakin meningkatnya produktivitas lahan dari 1,05 ton per ha menjadi sebesar 1,10 ton/ha. Seperti pada komoditas lain yang disebutkan di atas, produktivitas lahan untuk kacang tanah di Provinsi Papua Barat lebih rendah jika dibandingkan rata-rata nasional yaitu sebesar 1,33 ton per ha. Produksi kacang tanah pada tahun 2015 berasal dari 10 kabupaten dimana wilayah yang tidak memiliki produksi kacang tanah adalah Kabupaten Fakfak, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong. Posisi pertama produsen kacang tanah terbesar di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 ditempati oleh Kabupaten Maybrat

yaitu sebesar 169 ton. Wilayah lain yang memiliki produksi kacang tanah tinggi adalah Kabupaten Manokwari yaitu sebesar 168 ton dan Kabupaten Raja Ampat sebesar 136 ton. Dilihat dari sisi produktivitas, wilayah yang memiliki produktivitas lahan kacang tanah tertinggi adalah Kabupaten Tambrauw yaitu sebesar 1,20 ton per ha, sedangkan produktivitas terendah

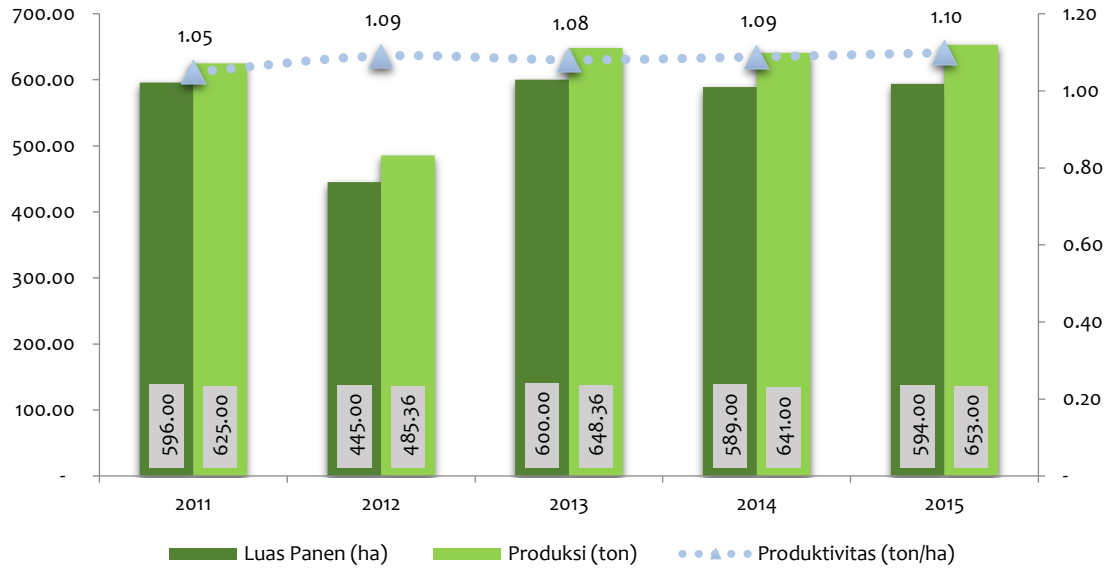

Gambar 2.71 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Tanah Provinsi Papua Barat, 2011-2015
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Tabel 2.108 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Tanah Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015

No.	Kabupaten	Kacang Tanah		
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1.	Fakfak	-	-	-
2.	Kaimana	7.00	7.00	1.00
3.	Teluk Wondama	11.00	12.00	1.09
4.	Teluk Bintuni	12.00	13.00	1.08
5.	Manokwari	152.00	168.00	1.11
6.	Sorong Selatan	27.00	29.00	1.07
7.	Sorong	47.00	52.00	1.11
8.	Raja Ampat	124.00	136.00	1.10
9.	Tambrauw	5.00	6.00	1.20
10.	Maybrat	153.00	169.00	1.10
11.	Kota Sorong	-	-	-
12.	Manokwari Selatan	56.00	61.00	1.09
13.	Pegunungan Arfak	-	-	-

No.	Kabupaten	Kacang Tanah		
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
Jumlah		**594,00**	**653,00**	**1,10**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Pada komoditi kacang hijau, terjadi penurunan luas panen selama periode 2011-2015 dari seluas 257 ha pada tahun 2011 menjadi seluas 112 ha pada tahun 2015. Dengan adanya penurunan luas panen, produksi kacang hijau juga mengalami penurunan dari sebesar 264 ton (2011) menjadi 116 ton (2015). Walaupun secara umum mengalami peningkatan, produktivitas kacang hijau cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011, produktivitas kacang hijau adalah sebesar 1,03 ton per ha, kemudian meningkat hingga level tertinggi yaitu sebesar 1,11 ton per ha, namun dalam periode 2013-2015, produktivitas kacang hijau mengalami penurunan setiap tahun menjadi sebesar 1,04 ton/ha pada tahun 2015. Wilayah yang memiliki produksi kacang hijau tertinggi adalah Kabupaten Maybrat dengan produksi sebesar 33 ton, diikuti Kabupaten Sorong sebesar 23 ton, dan Kabupaten Manokwari Selatan sebesar 20 ton. Sementara itu, wilayah yang tidak memiliki lahan kacang hijau pada tahun 2015 adalah Kabupaten Fakfak, Raja Ampat, Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong.

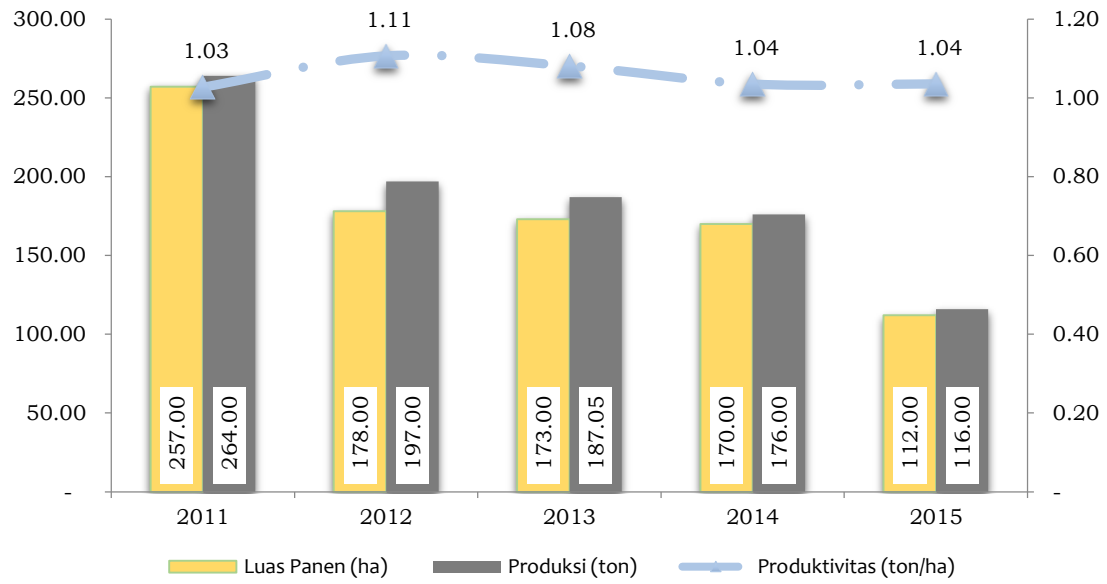

Gambar 2.72 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Hijau Provinsi Papua Barat, 2011-2015
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Tabel 2.109 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Hijau Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015

No.	Kabupaten	2015		
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1.	Fakfak	-	-	-
2.	Kaimana	2.00	2.00	1.00
3.	Teluk Wondama	6.00	6.00	1.00
4.	Teluk Bintuni	8.00	7.00	0.88
5.	Manokwari	17.00	16.00	0.94
6.	Sorong Selatan	7.00	6.00	0.86
7.	Sorong	22.00	23.00	1.05
8.	Raja Ampat	-	-	-
9.	Tambrauw	3.00	3.00	1.00
10.	Maybrat	29.00	33.00	1.14
11.	Kota Sorong	-	-	-
12.	Manokwari Selatan	18.00	20.00	1.11
13.	Pegunungan Arfak	-	-	-
Jumlah		**112,00**	**116,00**	**1,04**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Ubi kayu merupakan salah satu tanaman pangan utama di Provinsi Papua Barat jika dilihat dari sisi produksi. Luas panen ubi kayu di Provinsi Papua Barat selama periode 2011-2015 mengalami penurunan dari seluas 1.744 ha pada tahun 2011 menjadi seluas 987 ha pada tahun 2015. Dalam periode tersebut terjadi penurunan lahann hampir 80%. Dengan adanya penurunan luas lahan ubi kayu, produksi ubi kayu Provinsi Papua Barat selama periode tersebut juga mengalami penurunan dari sebesar 20.440 ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 11.181 ton pada tahun 2015. Produksi ubi kayu di Provinsi Papua Barat mengikuti pola peningkatan atau penurunan luas panen, jika luas panen meningkat maka produksi juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Dari sisi produktivitas, terjadi juga penurunan dari sebesar 11,72 ton/ha (2011) menjadi sebesar 11,33 ton/ha (2015). Jika dibandingkan dengan rata-rata produktivitas nasional pada tahun 2015, produktivitas lahan ubi kayu Provinsi Papua Barat hanya setengah dari rata-rata nasional yang telah mencapai 22,96 ton/ha.

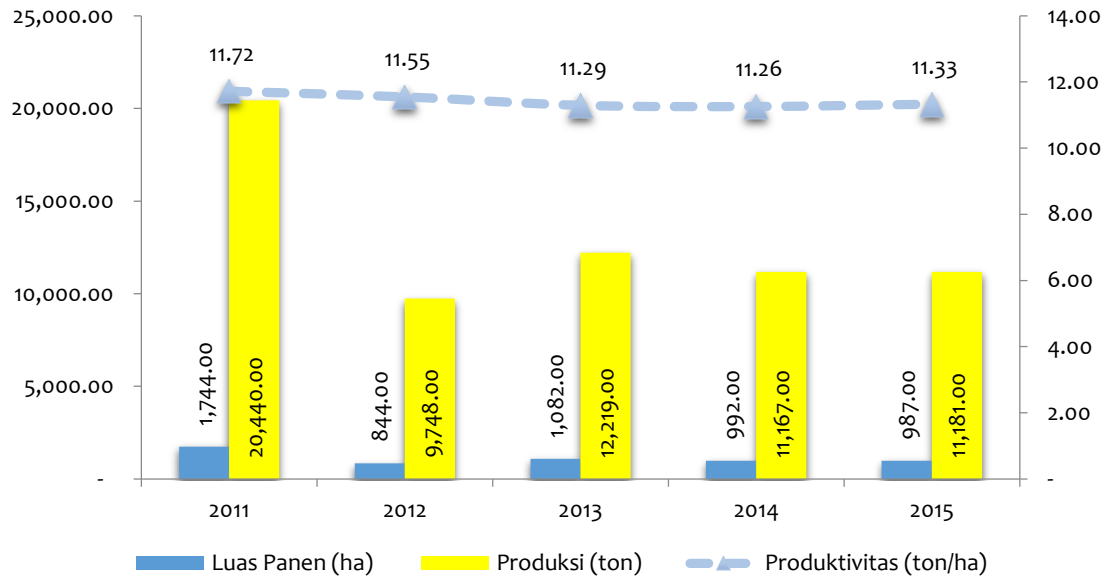

Gambar 2.73 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Kayu Provinsi Papua Barat, 2011-2015
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Produksi ubi kayu pada tahun 2015 berasal dari 11 kabupaten/kota dimana 2 wilayah yang tidak memiliki produksi ubi kayu adalah Kabupaten Tambrauw dan Pegunungan Arfak. Luas panen ubi kayu terbesar berada di tiga wilayah yaitu Kabupaten Sorong seluas 246 ha, diikuti Raja Ampat seluas 173 ha, dan Kota Sorong seluas 108 ha. Dengan tingginya luas panen pada ketiga wilayah tersebut, maka produksi ubi kayu terbesar di Provinsi Papua Barat juga berasal dari tiga wilayah yaitu Kabupaten Sorong sebesar 2.799 ton (25,03%), disusul Kabupaten Raja Ampat sebesar 1.942 ton (17,37%), dan Kota Sorong sebesar 1.240 ton (11,09%). Dari sisi produktivitas, Kabupaten Teluk Wondama menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 11,75 ton/ha, diikuti Kabupaten Sorong Selatan sebesar 11,56 ton/ha, dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 11,52 ton/ha. Rincian mengenai produksi ubi kayu menurut kabupaten/kota ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.110 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Kayu Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015

No.	Kabupaten	Ubi Kayu		
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1.	Fakfak	62.00	713.00	11.50
2.	Kaimana	31.00	342.00	11.03
3.	Teluk Wondama	68.00	799.00	11.75

4.	Teluk Bintuni	54.00	622.00	11.52
5.	Manokwari	85.00	934.00	10.99
6.	Sorong Selatan	9.00	104.00	11.56
7.	Sorong	246.00	2,799.00	11.38
8.	Raja Ampat	173.00	1,942.00	11.23
9.	Tambrauw	-	-	-
10.	Maybrat	89.00	982.00	11.03
11.	Kota Sorong	108.00	1,240.00	11.48
12.	Manokwari Selatan	62.00	704.00	11.35
13.	Pegunungan Arfak	-	-	-
Jumlah		**987,00**	**11.181,00**	**11,33**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Komoditas ubi jalar termasuk salah satu makanan utama pengganti beras yang sudah familiar baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat karena tanaman ubi jalar relatif mudah tumbuh pada kondisi iklim yang beraneka ragam. Hal tersebut terlihat dimana komditas ubi jalar diproduksi hampir di seluruh kabupaten/kota. Pada tahun 2011, luas panen ubi jalar adalah seluas 1.018 ha, kemudian terus meningkat hingga tahun 2013 yaitu mencapai 1.343 ha. Pada tahun 2014, luas panen ubi jalar mengalami penurunan menjadi seluas 1.080 ha, dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi seluas 1.157 ha. Dari sisi produksi, terjadi peningkatan produksi ubi jalar dari sebesar 10.409 ton (2011) menjadi sebesar 13.101 ton (2015). Peningkatan produksi ubi jalar juga diimbangi dengan peningkatan produktivitas dari sebesar 10,22 ton/ha (2011) menjadi sebesar 11,32 ton/ha (2015).

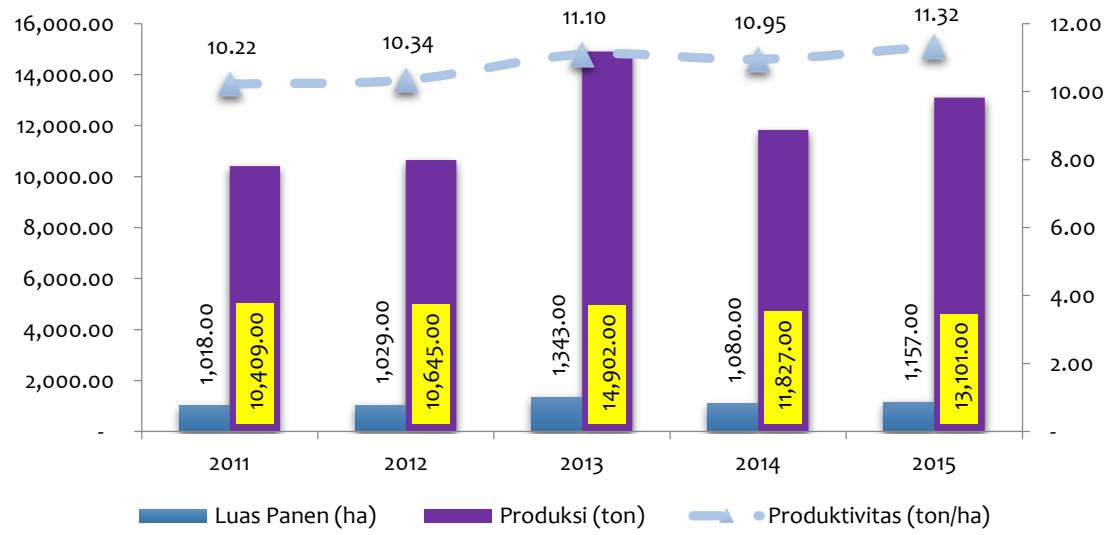

Gambar 2.74 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Jalar Provinsi Papua Barat, 2011-2015
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Dari sisi luas panen, wilayah yang memiliki luas panen ubi jalar terbesar adalah Kabupaten Sorong yaitu sebesar 227 ha, diikuti Kabupaten Raja Ampat sebesar 217 ha, dan Kabupaten Manokwari sebesar 164 ha. Dari sisi produksi, ketiga wilayah tersebut di atas juga merupakan produsen utama ubi jalar di Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten Sorong meyumbang produksi sebesar 2.571 ton (19,62%), Raja Ampat sebesar 2.430 ton (18,55%), dan Manokwari sebesar 1.865 ton (14,24%). Jika dilihat dari sisi produktivitas, posisi pertama ditempati Kabupaten Fakfak dengan produktivitas sebesar 11,88 ton/ha, disusul Kabupaten Teluk Wondama sebesar 11,65 ton/ha, dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 11,65 ton/ha.

Tabel 2.111 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Jalar Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015

No.	Kabupaten	2015		
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1.	Fakfak	24.00	285.00	11.88
2.	Kaimana	23.00	254.00	11.04
3.	Teluk Wondama	51.00	594.00	11.65
4.	Teluk Bintuni	116.00	1,343.00	11.58
5.	Manokwari	164.00	1,865.00	11.37
6.	Sorong Selatan	15.00	170.00	11.33
7.	Sorong	227.00	2,571.00	11.33
8.	Raja Ampat	217.00	2,430.00	11.20
9.	Tambrauw	-	-	-
10.	Maybrat	98.00	1,086.00	11.08
11.	Kota Sorong	83.00	946.00	11.40
12.	Manokwari Selatan	76.00	868.00	11.42
13.	Pegunungan Arfak	63.00	689.00	10.94
Jumlah		**1.157,00**	**13.101,00**	**11,32**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Usaha tanaman hortikultura yang dikembangkan oleh penduduk di Provinsi Papua Barat sebagian besar masih dalam skala tradisional dan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan subsistennya. Jenis tanaman hortikultura yang dibudidayakan penduduk meliputi tanaman sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat. Untuk sayuran, luas panennya selama periode 2011-2014 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011, luas panen sayuran secara keseluruhan adalah seluas 5.264 ha, kemudian meningkat menjadi seluas 6.637 ha pada tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2013 menurun menjadi

4.488 ha, dan pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi seluas 5.033 ha. Berbeda dengan luas panen sayuran yang mengalami sedikit penurunan, produksi sayuran justru menurun signifikan selama periode 2011-2014. Pada tahun 2011, produksi sayuran Provinsi Papua Barat adalah sebesar 22.869 ton, kemudian meningkat menjadi sebesar 27.993 ton pada tahun 2012, selanjutnya produksi sayuran mengalami penurunan hingga menjadi hanya sebesar 9.532 ton pada tahun 2014.

Tabel 2.112 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Sayuran di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis, 2011-2014

No.	Jenis Sayuran	2011		2012		2013		2014	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Bawang merah	77	106	62	189	47	16	21	6
2.	Bawang putih	5	3	19	35	-	-	-	-
3.	Bawang daun	150	558	154	615	89	30	90	27
4.	Jentang	78	170	14	98	3	23	3	1
5.	Kubis	154	310	243	578	156	218	139	124
6.	Kembang kol	28	67	16	42	8	12	9	7
7.	Petsai	636	1,734	909	2,663	678	1,408	713	1,575
8.	Wortel	14	25	13	85	-	-	-	-
9.	Kacang merah	6	20	1	2	6	6	6	1
10.	Kacang panjang	807	5,426	809	4,652	550	1,190	582	1,075
11.	Cabe besar	285	1,084	278	1,089	123	234	167	272
12.	Cabe rawit	504	1,642	632	1,651	497	831	503	749
14.	Tomat	400	1,961	670	2,849	391	916	415	694
15.	Terung	300	1,894	412	2,530	254	644	262	555
16.	Buncis	197	768	267	1,200	190	224	205	266
17.	Ketimun	361	1,430	449	1,470	290	702	353	417
18.	Labu siam	89	356	140	493	71	318	105	156
19.	Kangkung	490	3,327	646	4,756	387	2,112	445	1,994
20.	Bayam	581	1,645	741	1,745	607	691	779	1,057
21.	Melon	25	90	49	434	43	661	76	154
22.	Semangka	77	253	113	817	97	1,124	160	402
Jumlah		**5.264**	**22.869**	**6.637**	**27.993**	**4.487**	**11.360**	**5.033**	**9.532**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Jenis sayuran yang ditanam masyarakat adalah bawang merah, bawang daun, kentang, kubis, kembang kol, petsai, kacang merah, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, melon, dan semangka. Jika dilihat dari luas panen menurut jenis sayuran, luas panen tertinggi adalah untuk bayam yaitu seluas 779 ha, disusul petsai seluas 713 ha, dan kacang panjang seluas 582 ha. Sementara itu, jika dilihat dari sisi produksi, komoditi kangkung merupakan jenis sayur yang paling banyak diproduksi yaitu sebesar 1.994 ton, disusul petsai sebesar 1.575 ton, kacang panjang sebesar 1.075 ton, bayam sebesar 1.057 ton, dan cabe rawit sebesar 749 ton. Wilayah yang memiliki produksi sayuran tertinggi di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Manokwari yaitu sebesar 3.292 ton, disusul Kota Sorong sebesar 2.542 ton, dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 1.406 ton. Dari data statistik, produksi sayuran di Kabupaten Pegunungan Arfak belum tercatat oleh BPS Provinsi Papua Barat, padahal wilayah ini dengan kondisi iklim yang ada sangat potensial untuk dikembangkan sebagai produsen sayuran utama di Provinsi Papua Barat melalui berbagai intervensi program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten.

Tabel 2.113 Perkembangan Produksi Buah di Provinsi Papua Barat, 2011-2014

No.	Jenis Buah	Produksi (kg)			
		2011	2012	2013	2014
1.	Alpukat	157	506	158	1,290
2.	Belimbing	93	205	70	448
3.	Duku	694	1,705	308	1,944
4.	Durian	861	2,846	1,172	12,585
5.	Jambu Biji	185	350	536	536
6.	Jambu Air	119	309	109	109
7.	Jeruk Siam	206	381	234	796
8.	Jeruk Besar	159	186	65	453
9.	Mangga	476	1,181	382	2,673
10.	Nangka	435	1,175	502	2,437
11.	Nanas	111	164	56	499
12.	Pepaya	398	1,376	387	4,107
13.	Pisang	2,609	5,452	1,884	16,142
14.	Rambutan	433	945	1,047	3,405
15.	Salak	167	361	131	1,612
16.	Sawo	18	16	13	128
17.	Sirsak	42	63	63	321
18.	Sukun	231	468	271	1,937

No.	Jenis Buah	Produksi (kg)			
		2011	2012	2013	2014
19.	Melinjo	45	41	9	90
20.	Petai	27	24	19	111
Jumlah		**7.466**	**17.754**	**7.416**	**51.623**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Jenis tanaman buah yang dibudidayakan masyarakat di Provinsi Papua Barat adalah alpukat, belimbing, duku, durian, jambu biji, jambu air, jambu siam, jeruk besar, mangga, nangka, nanas, pepaya, pisang, rambutan, salak, sawo, sirsak, sukun, melinjo, dan petai. Selama periode 2011-2014, produksi buah-buahan Provinsi Papua Barat meningkat dari sebesar 7.466 kg pada tahun 2011 menjadi sebesar 51.623 kg pada tahun 2014. Peningkatan produksi buah-buahan di Provinsi Papua Barat selama periode tersebut didorong oleh meningkatnya produksi pisang dan durian. Pada tahun 2013, produksi pisang adalah sebesar 1.884 kg dan meningkat menjadi sebesar 16.142 kg pada tahun 2014, sedangkan durian meningkat dari 1.172 kg (2013) menjadi 12.585 kg (2014). Jenis buah lain yang diproduksi dalam jumlah cukup besar di Provinsi Papua Barat adalah pepaya (4.107 kg), rambutan (3.405 kg), mangga (2.673 kg), dan nangka (2.437 kg). Selain tanaman sayuran dan buah-buahan, Provinsi Papua Barat juga memproduksi tanaman obat. Produksi jahe pada tahun 2015 adalah sebesar 0,22 ton, lengkuas sebesar 0,37 ton, dan kunyit sebesar 0,22 ton. Jenis tanaman obat yang paling banyak diproduksi pada tahun 2014 adalah jahe (29.065 kg), disusul laos (23.163 kg), kunyit (22.542 kg), kencur (9.520 kg), dan mengkudu (1.981 ton). Secara rinci, produksi tanaman obat menurut jenis ditampilkan pad tabel berikut:

Tabel 2.114 Perkembangan Produksi Tanaman Obat di Provinsi Papua Barat (ton), 2011-2014

No.	Jenis	Produksi			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jahe	12,282	22,017	56,860	29,065
2.	Laos	16,164	29,549	58,599	23,163
3.	Kencur	4,889	3,239	18,044	9,520
4.	Kunyit	20,018	23,576	49,231	22,542
5.	Lempuyang	1,265	2,837	180	31
6.	Temulawak	8,413	275	57	30
7.	Temuireng	1,322	166	50	32
8.	Dringo	783	1,465	20	-
9.	Kapulaga	313	8	114	35

No.	Jenis	Produksi			
		2011	2012	2013	2014
10.	Mengkudu	6,910	19,542	4,006	1,981
11.	Kejibeling	1,122	1,301	22	85
12.	Sambiloto	1,117	1,307	726	341
Jumlah		**74.598**	**105.282**	**187.909**	**86.825**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan penduduk di Provinsi Papua Barat adalah kelapa, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kakao, pala, jambu mete, dan sagu. Luas areal perkebunan kelapa di Provinsi Papua Barat selama periode 2011-2014 menurun dari seluas 21.155 ha pada tahun 2011 menjadi seluas 14.038 ha pada tahun 2014. Dengan berkurangnya luas areal, hal tersebut kemudian diikuti juga dengan penurunan produksi kelapa dari sebesar 17.710 ton (2011) menjadi sebesar 5.603 ton (2014). Produksi kelapa pada tahun 2014 berasal dari 11 wilayah dengan wilayah yang tidak memiliki produksi kelapa adalah Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak. Produksi kelapa tertinggi pada tahun 2014 berasal dari Kabupaten Tambrauw yaitu sebesar 1.526 ton, diikuti Kabupaten Manokwari sebesar 1.444 ton, dan Kabupaten Sorong sebesar 707 ton. Dari sisi luas panen, sesungguhnya Kabupaten Raja Ampat memiliki luas panen tertinggi yang mencapai 6.025 ha, disusul Kabupaten Tambrauw seluas 3.373 ha, dan Kabupaten Manokwari seluas 1.994 ha.

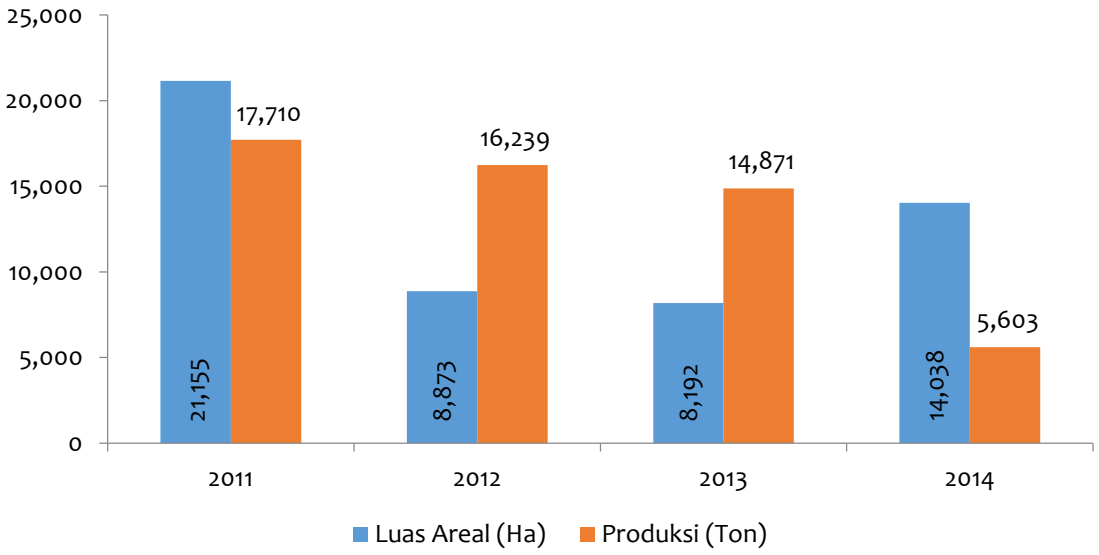

Gambar 2.75 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kelapa di Provinsi Papua Barat, 2011-2014

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Luas areal perkebunan kelapa di Provinsi Papua Barat selama periode 2011-2014 mengalami peningkatan yang signifikan dari seluas 24.269 ha pada tahun 2011 menjadi seluas 37.602 ha pada tahun 2015. Peningkatan luas areal tersebut juga turut menyumbang peningkatan produksi kelapa sawit dari sebesar 45.358 ton (2011) menjadi sebesar 293.181 ton (2015). Kepemilikan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat terdiri dari perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan dan perkebunan rakyat. Luas areal perkebunan besar pada tahun 2014 adalah seluas 21.842 ha yang terdiri dari 4.000 ha di Kabupaten Teluk Bintuni, 5.570 ha di Kabupaten Manokwari, dan 12.272 ha di Kabupaten Sorong. Sedangkan luas perkebunan rakyat pada tahun 2014 adalah seluas 15.760 ha yang terdiri dari 3.000 ha di Kabupaten Teluk Bintuni, 11.863 ha di Kabupaten Manokwari, dan 897 ha di Kabupaten Sorong. Produksi kelapa sawit yang berasal dari perkebunan besar pada tahun 2014 adalah sebesar 144.403 ha, sedangkan produksi dari perkebunan rakyat adalah sebesar 148.778 ha. Peningkatan produksi kelapa sawit tersebut dimungkinkan karena struktur tanaman kelapa sawit di Provinsi Papua Barat sebagian besar termasuk tanaman yang menghasilkan sehingga dari sisi produktivitas sedang berada pada titik optimal.

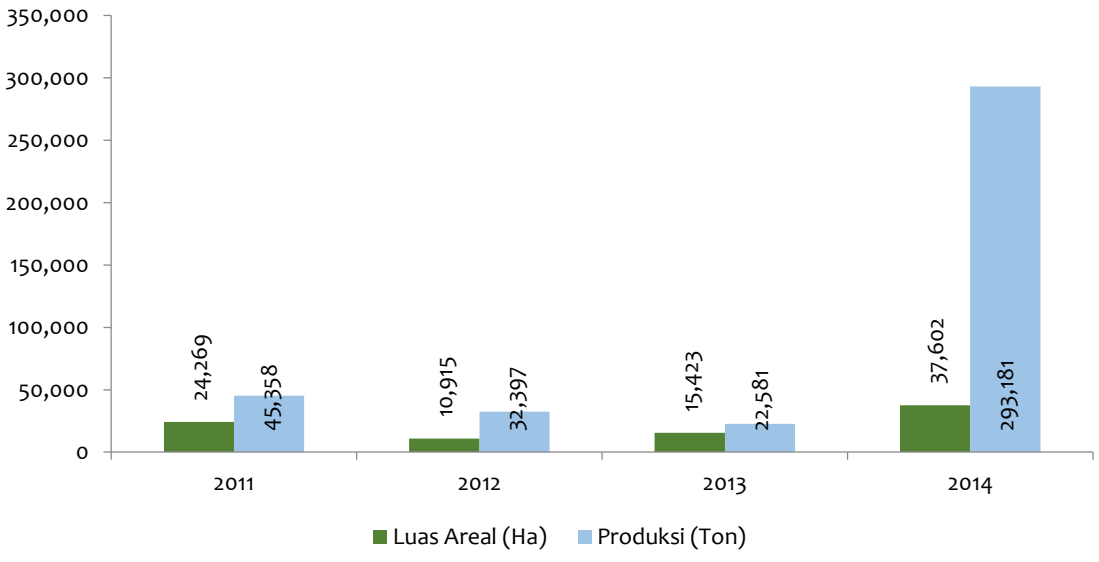

Gambar 2.76 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat, 2011-2014
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Luas areal tanaman kopi di Provinsi Papua Barat dalam periode 2012-2014 mengalami peningkatan dari seluas 503 ha pada tahun 2012 menjadi seluas 522 ha pada tahun 2014. Berbanding terbalik dengan luas areal tanaman yang meningkat, produksi kopi justru mengalami penurunan dari sebesar 169 ton pada tahun 2012 menjadi hanya sebesar 61 ton pada tahun 2014. Penurunan produksi kopi tersebut dimungkinkan karena struktur kopi di Provinsi Papua Barat sebagian besar termasuk dalam tanaman yang belum menghasilkan atau tanaman tua/rusak sehingga dari sisi produktivitas belum optimal. Selain itu, penurunan produksi juga dimungkinkan disebabkan oleh perawatan yang dilakukan oleh petani belum baik sehingga pertumbuhan produksnya tidak maksimal. Wilayah yang memiliki luas areal perkebunan kopi tertinggi adalah Kabupaten Fakfak yaitu seluas 171 ha, disusul Kabupaten Manokwari seluas 139 ha, dan Kabupaten Pegunungan Arfak seluas 65 ha. Dari sisi produksi, wilayah yang memiliki produksi kopi tertinggi adalah Kabupaten Fakfak yaitu sebesar 42 ton, disusul Kabupaten Tambrauw sebesar 9 ton, dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 5 ton. Sesungguhnya Provinsi Papua Barat memiliki potensi untuk pengembangan kopi mengingat wilayahnya memiliki ketinggian yang sesuai dengan pertumbuhan optimal kopi seperti Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari, dan Manokwari Selatan.

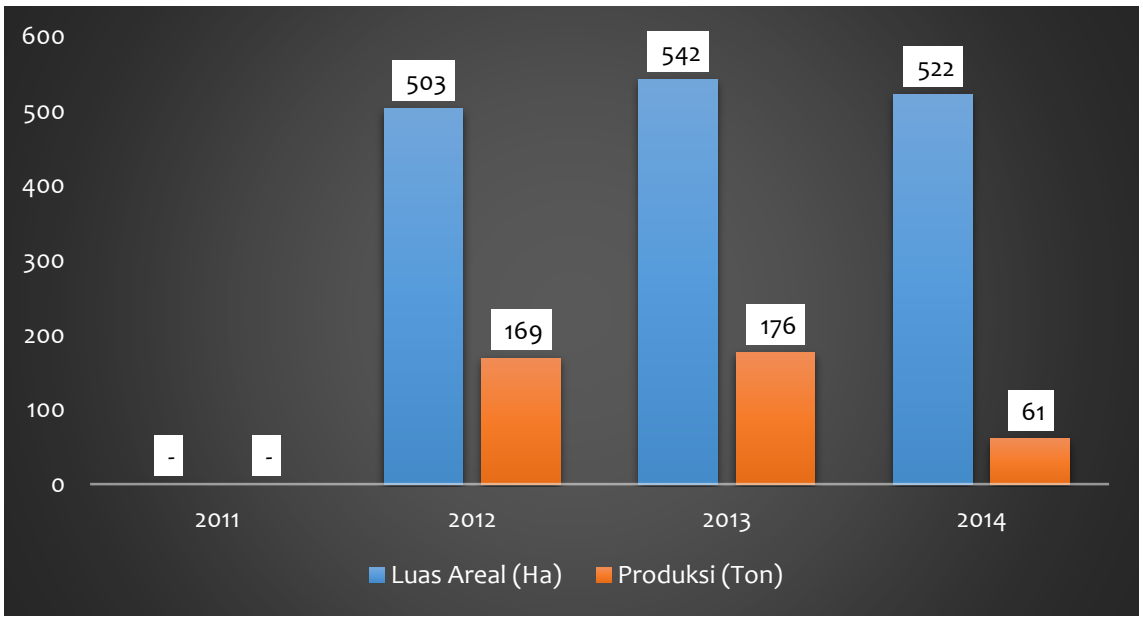

Gambar 2.77 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kopi di Provinsi Papua Barat, 2011-2014
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Selama periode 2011-2014, luas areal perkebunan cengkeh di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, luas areal perkebunan cengkeh adalah seluas 254 ha dan meningkat menjadi sebesar 816 ha pada tahun 2014. Dengan adanya peningkatan luas areal tanam, maka produksi cengkeh juga mengalami peningkatan dari sebesar 57 ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 84 ton pada tahun 2014. Wilayah yang memiliki perkebunan cengkeh di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Fakfak (469 ha), Kabupaten Kaimana (315 ha), Kabupaten Manokwari (13 ha), Kota Sorong (10 ha), Kabupaten Teluk Bintuni (7 ha), dan Kabupaten Sorong (2 ha). Dari sisi produksi, Kabupaten Kaimana menempati urutan pertama dengan produksi sebesar 50 ton, disusul Kabupaten Fakfak sebesar 31 ton, sedangkan Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, dan Kota Sorong memiliki produksi masing-masing sebesar 1 ton.

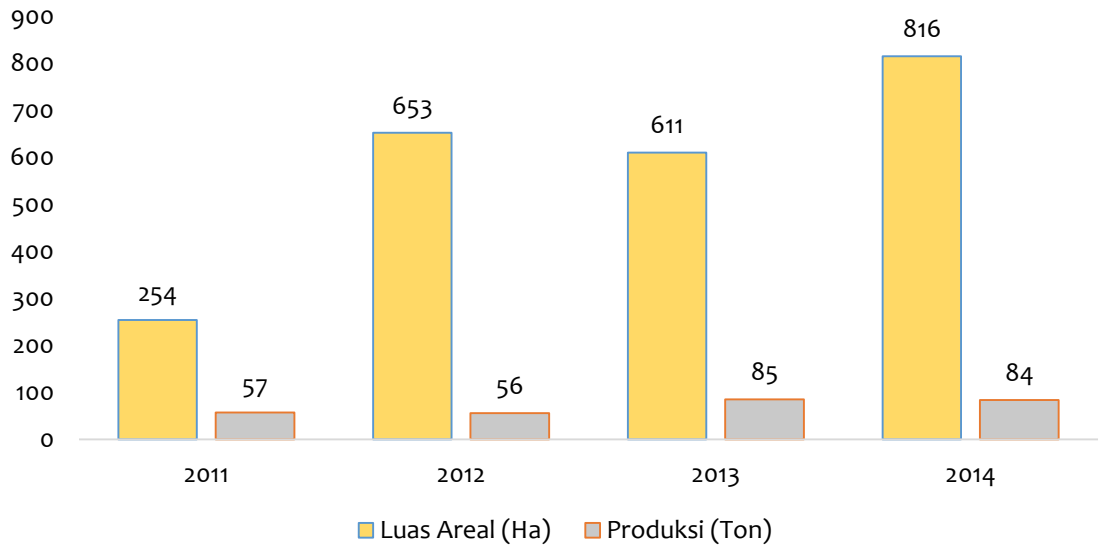

Gambar 2.78 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Cengkeh di Provinsi Papua Barat, 2011-2014
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Luas areal perkebunan kakao di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dari seluas 9.131 ha pada tahun 2011 menjadi seluas 10.804 ha pada tahun 2014. Peningkatan luas areal tanam tersebut sayangnya tidak disertai dengan peningkatan produksi dimana produksi kakao mengalami penurunan dari sebesar 5.133 ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 3.105 ton pada tahun 2014. Penurunan produksi tersebut terjadi karena adanya mekanisme *replacement* yang dilakukan petani (pergantian tanaman yang telah tua/rusak

diganti dengan tanaman baru yang belum menghasilkan) sehingga belum berdampak pada produksi. Tanaman kakao di Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 tersebar di 12 wilayah kabupaten/kota dimana hanya Kabupaten Pegunungan Arfak yang tidak memiliki produksi kakao. Produsen kakao tertinggi ditemapati oleh Kabupaten Manokwari yaitu sebesar 1.039 ton, disusul Kabupaten Manokwari Selatan sebesar 907 ton, dan Kabupaten Tambrauw sebesar 415 ton. Dari sisi luas areal, wilayah yang memiliki luas areal tanaman kakao terbesar adalah Kabupayten Manokwari Selatan (3.488 ha), disusul Kabupaten Manokwari (2.136 ha), Kabupaten Sorong Selatan (1.390 ha), dan Kabupaten Tambrauw (1.278 ha). Pada tahun 2014, hanya 4 wilayah tersebut di atas yang memiliki perkebunan kakao di atas 1.000 ha.

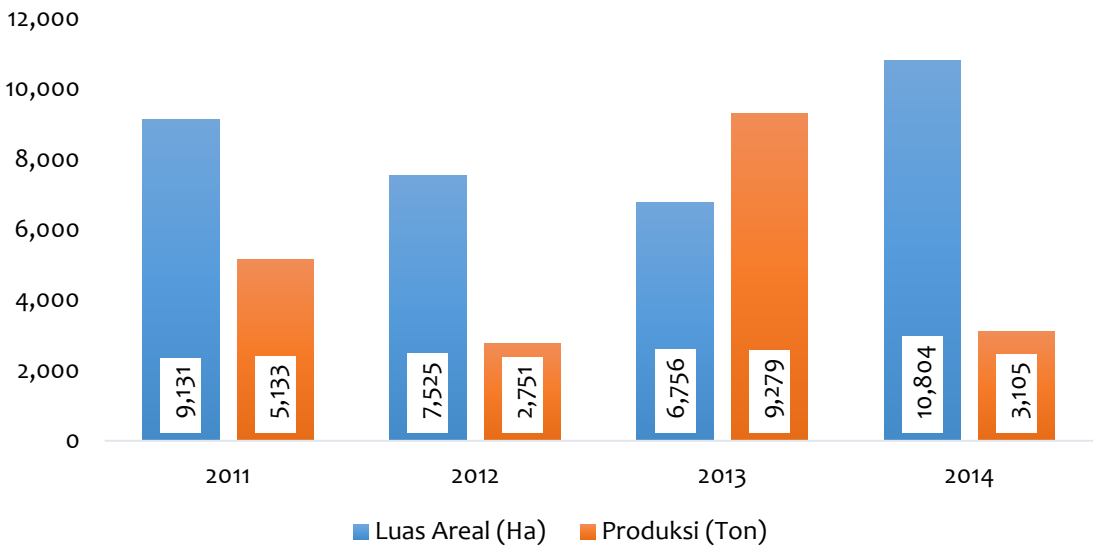

Gambar 2.79 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kakao di Provinsi Papua Barat, 2011-2014
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Tanaman pala merupakan salah satu tanaman khas yang dikembangkan penduduk di pesisir barat Provinsi Papua Barat. Luas areal tanaman pala selama periode 2011-2014 mengalami peningkatan dari seluas 5.816 ha pada tahun 2011 menjadi seluas 15.087 ha pada tahun 2014. Peningkatan luas areal tanaman pala juga diiringi oleh peningkatan produksi pala dari sebesar 255 ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 4.658 ton pada tahun 2014. Wilayah yang memiliki perkebunan pala meliputi Kabupaten Fakfak (6.774 ha), Kabupaten Kaimana (7.839 ha), Kabupaten Teluk Wondama (65 ha), Kabupaten Teluk Bintuni (95 ha), Kabupaten Manokwari (244 ha), Kabupaten Raja Ampat (20 ha), dan Kabupaten Maybrat

(50 ha). Sementara itu, produksi pala pada tahun 2014 hanya berasal dari 4 wilayah yaitu Kabupaten Fakfak (4.112 ton), Kabupaten Kaimana (532 ton), Kabupaten Teluk Bintuni (8 ton), dan Kabupaten Teluk Wondama (6 ton). Dalam RPJMN 2015-2019, disebutkan pula bahwa pengembangan pala berada di Kabupaten Fakfak. Penetapan tersebut telah sesuai dengan kondisi eksisting yang ada dimana Kabupaten Fakfak memiliki produksi terbesar, namun tidak tertutup kemungkinan juga pemerintah provinsi mengembangkan tanaman pala di Kabupaten Kaimana dan Teluk Bintuni sehingga nantinya terbentuk lokasi segitiga pala di Provinsi Papua Barat yang meliputi Kabupaten Fakfak sebagai pusat, sedangkan Kabupaten Kaimana dan Teluk Bintuni menjadi penyangganya.

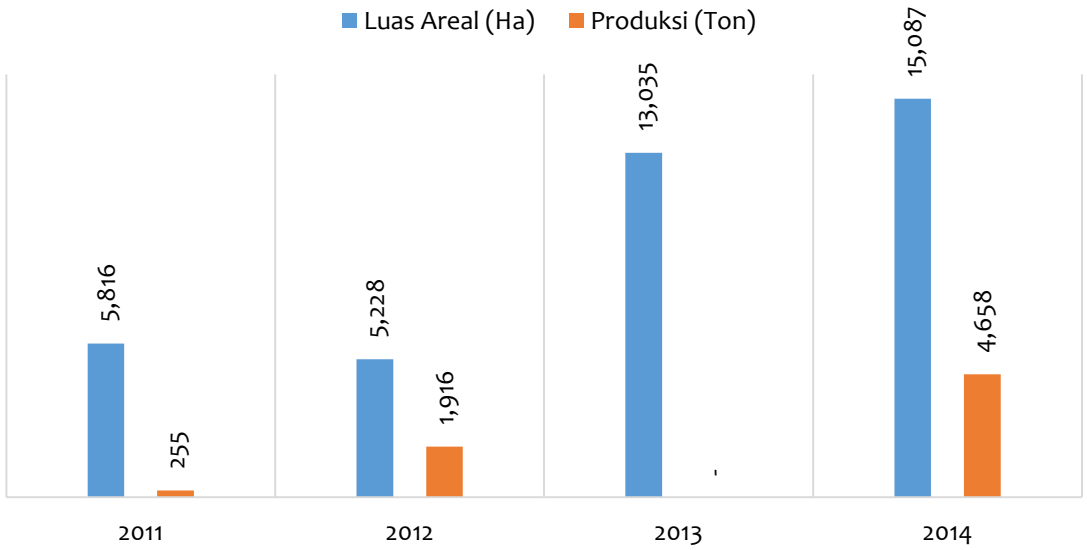

Gambar 2.80 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Pala di Provinsi Papua Barat, 2011-2014
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Luas areal taanaman jambu mete di Provinsi Papua Barat pada tahun 2011 adalah seluas 218 ha, kemudian meningkat menjadi 389 ha pada tahun 2012, namun dalam dua tahun selanjutnya terjadi penurunan hingga menjadi hanya seluas 113 ha pada tahun 2014. Pada tahun 2014, wilayah yang memiliki perkebunan jambu mete hanya Kabupaten Fakfak yaitu seluas 113 ha. Selama periode 2011-2014, luas areal tanaman sagu di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dari seluas 594 ha pada tahun 2011 menjadi seluas 1.957 ha pada tahun 2014. Dari data yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Papua Barat (2016), produksi pala hanya tercatat pada tahun 2014 yaitu sebesar 843 ton. Wilayah yang memiliki luas areal tanaman sagu terbesar pada tahun 2014 adalah Kabupaten Raja Ampat (680 ha),

Kabupaten Sorong (530 ha), Kabupaten Sorong Selatan (447 ha), dan Kabupaten Teluk Bintuni (300 ha). Dari sisi produksi, wilayah dengan produksi sagu tertinggi pada tahun 2014 adalah Kabupaten Sorong (360 ton), disusul Kabupaten Sorong Selatan (290 ton), Kabupaten Teluk Bintuni (180 ton), dan Kabupaten Raja Ampat (13 ton). Dalam RPJMN 2015-2019, lokasi pengembangan sagu rakyat di Provinsi Papua Barat berada di Kabupaten Sorong Selatan. Sementara itu, dilihat dari data statistik yang ada, lokasi lain yang potensial untuk pengembangan sagu rakyat selain yang sudah ditetapkan dalam RPJMN adalah Kabupaten Sorong.

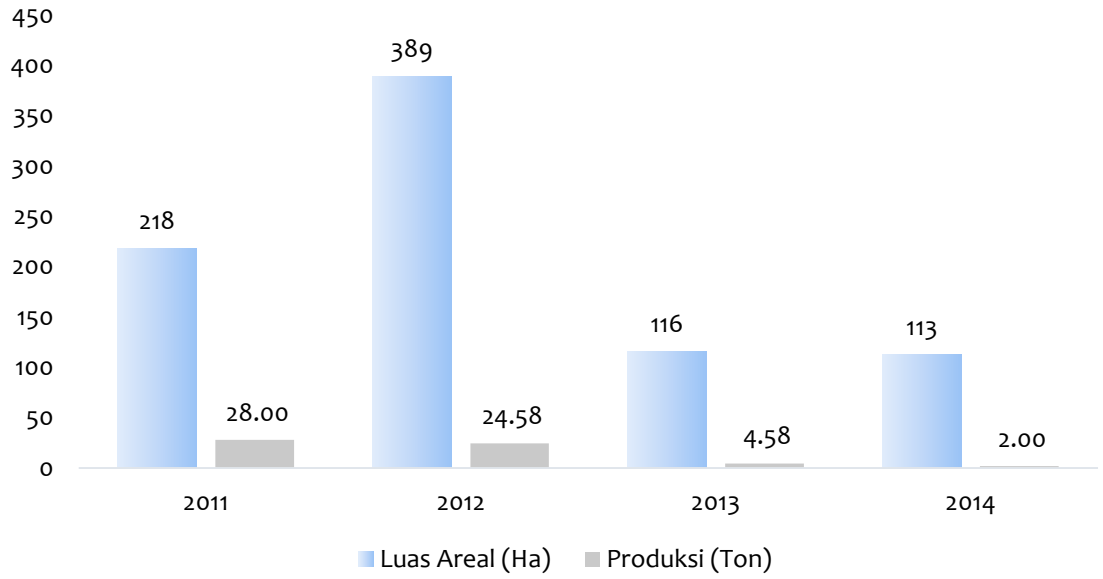

Gambar 2.81 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Jambu Mete di Provinsi Papua Barat, 2011-2014
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

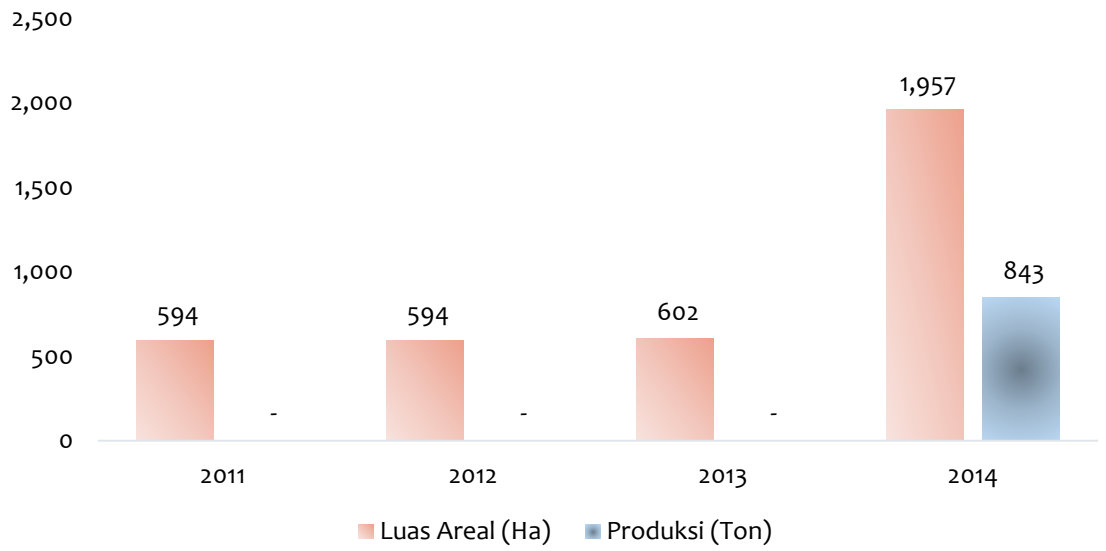

Gambar 2.82 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Sagu di Provinsi Papua Barat, 2011-2014
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Ternak adalah hewan hasil domestikasi oleh manusia yang diatur segala kehidupannya (reproduksi, produksi kesehatan, pemeliharaan, dan lain-lain) oleh manusia dan dapat dimanfaatkan produk dan jasanya (daging, telur, susu, kulit, lemak, tenaga, wool, dan lain-lain) untuk kepentingan manusia. Ternak secara umum dikelompokkan ke dalam lima golongan yaitu ternak besar (sapi, kerbau, kuda), ternak kecil (babi, kambing, domba), ternak unggas (ayam, itik, angsa, puyuh, kalkun), hewan kesayangan (kucing, anjing), dan aneka satwa (ulat sutera, lebah madu, cacing tanah, burung walet). Sektor peternakan di Provinsi Papua Barat dapat dikatakan belum berkembang karena sebagian besar usaha yang dilakukan masyarakat masih dalam skala rumah tangga dan belum sepenuhnya komersial. Jenis ternak yang dibudidayakan penduduk di Provinsi Papua Barat meliputi jenis ternak besar seperti sapi dan kerbau, ternak kecil seperti kambing dan babi, serta ternak unggas yang terdiri dari ayamb buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, dan itik.

Perkembangan populasi sapi potong di Provinsi Papua Barat selama periode 2011-2014 menunjukkan terjadinya pertambahan populasi. Populasi sapi potong pada tahun 2011 adalah sebanyak 41.462 ekor, kemudian meningkat menjadi sebanyak 52.046 ekor pada tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2013 terjadi penurunan populasi menjadi sebanyak 48.159 ekor, dan pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi sebanyak 61.436 ekor.

Populasi sapi potong pada tahun 2014 tersebut di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan populasi sapi potong terbesar berada di Kabupaten Sorong yaitu sebanyak 21.942 ekor. Kabupaten Manokwari menempati urutan kedua dengan populasi sebanyak 21.287 ekor, disusul Kabupaten Fakfak sebanyak 4.557 ekor, Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 2.706 ekor, dan Kabupaten Tambrauw sebanyak 2.380 ekor.

Sama dengan populasi sapi potong, populasi kambing selama periode 2011-2014 menunjukkan perkembangan positif dengan populasi mengalami pertambahan setiap tahun. Populasi kambing pada tahun 2011 adalah sebanyak 16.810 ekor, kemudian meningkat setiap tahun hingga menjadi sebanyak 24.258 ekor pada tahun 2014. Populasi babi selama periode 2011-2014 juga menunjukkan perkembangan yang positif walaupun pada tahun 2014 mengalami penurunan populasi. Populasi babi pada tahun 2011 adalah sebanyak 76.420 ekor, kemudian mengalami peningkatan setiap tahun hingga tahun 2013 menjadi sebanyak 97.583 ekor, dan pada tahun 2014 menurun menjadi sebanyak 91.936 ekor. Populasi kambing dan babi di Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota. Wilayah yang memiliki populasi kambing tertinggi adalah Kabupaten Manokwari yaitu sebanyak 6.440 ekor, diikuti Kabupaten Sorong sebanyak 5.201 ekor, dan Kabupaten Raja Ampat sebanyak 2.604 ekor. Sementara untuk babi, wilayah dengan populasi babi terbanyak adalah Kabupaten Manokwari yaitu sebanyak 34.994 ekor, diikuti Kota Sorong sebanyak 19.244 ekor, dan Kabupaten Manokwari sebanyak 15.718 ekor.

Jenis ternak unggas utama yang dikembangkan oleh masyarakat di Provinsi Papua Barat adalah: ayam kampung, ayam pedaging, ayam petelur, dan itik. Populasi ayam kampung di Provinsi Papua Barat selama periode 2011-2014 mengalami peningkatan setaiap tahun. Pada tahun 2011, jumlah populasi ayam kampung adalah sebanyak 1.021.581 ekor, kemudian meningkat cukup signifikan hingga tahun 2014 menjadi sebanyak 1.607.660 ekor. Populasi ayam kampong di Provinsi Papua Barat tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan populasi ayam kampung terbesar berada di Kabupaten Manokwari yaitu sebanyak 481.937 ekor, disusul Kabupaten Sorong sebanyak 356.475 ekor, dan Kota Sorong sebanyak 213.643 ekor. Berbeda dengan ayam kampung yang populasinya meningkat, populasi ayam petelur di Provinsi Papua Barat justru mengalami penurunan. Pada tahun 2011, populasi ayam petelur adalah sebanyak 64.238 ekor,

kemudian menuruna menjadi sebanyak 50.583 ekor pada tahun 2012, dan pada tahun 2013-2014, populasi meningkat setiap tahunnya hingg menjadi sebanyak 62.117 ekor pada tahun 2014. Populasi ayam petelur di Provinsi Papua Barat hanya berada di 5 wilayah yaitu Kabupaten Sorong (42.678 ekor), Kabupaten Manokwari (8.881 ekor), Kota Sorong (5.641 ekor), Kabupaten Fakfak (2.917 ekor), dan Kabupaten Manokwari Selatan (2.000 ekor).

Populasi ayam pedaging di Provinsi Papua Barat selama periode 2011-2014 mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2011, populasi ayam pedaging di Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 581.089 ekor dan meningkat menjadi sebanyak 1.260.053 ekor pada tahun 2014. Populasi ayam pedaging hanya berada di 5 wilayah yaitu Kabupaten Manokwari (665.800 ekor), Kabupaten Sorong (340.267 ekor), Kota Sorong (248.225 ekor), Kabupaten Fakfak (4.206 ekor), dan Kabupaten Teluk Bintuni (1.555 ekor). Populasi itik di Provinsi Papua Barat juga mengalami peningkatan selama periode 2011-2014. Pada tahun 2011, populasi itik berjumlah 19.693 ekor, kemudian menurun menjadi sebanyak 16.190 ekor pada tahun 2012, dan pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi sebanyak 52.119 ekor.

Tabel 2.115 Perkembangan Populasi Ternak Besar dan Kecil di Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota (ekor), 2011-2014

No.	Kabupaten	2011			2012			2013			2014		
		Sapi Potong	Kambing	Babi	Sapi Potong	Kambing	Babi	Sapi Potong	Kambing	Babi	Sapi Potong	Kambing	Babi
1.	Fakfak	1,996	741	1,642	4,696	795	795	2,458	953	954	4,557	1,021	2,978
2.	Kaimana	516	645	438	645	740	645	606	858	752	798	962	1,059
3.	Teluk Wondama	198	229	1,006	248	317	329	310	431	394	453	508	607
4.	Teluk Bintuni	1,127	370	2,792	1,409	375	3,910	1,720	380	4,692	2,142	367	4,025
5.	Manokwari	16,802	7,567	55,817	21,003	8,695	38,451	20,843	8,991	46,141	21,287	6,440	34,994
6.	Sorong Selatan	613	750	1,609	766	889	1,483	597	1,009	2,359	911	1,250	2,857
7.	Sorong	17,462	3,490	2,658	19,416	4,139	14,476	18,748	4,308	17,371	21,942	5,201	15,718
8.	Raja Ampat	1,237	1,562	402	1,546	1,852	1,562	1,345	2,151	1,874	1,703	2,604	812
9.	Tambrauw	146	330	300	228	391	879	243	454	1,054	2,380	540	1,421
10.	Maybrat	140		609	175	227	2,532	144	273	3,038	235	318	2,078
11.	Kota Sorong	1,225	1,126	9,147	1,914	1,981	15,795	1,145	2,486	18,954	1,493	2,511	19,244
12.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,706	2,354	2,292
13.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	829	182	3,851
Jumlah		**41,462**	**16,810**	**76,420**	**52,046**	**20,401**	**80,857**	**48,159**	**22,294**	**97,583**	**61,436**	**24,258**	**91,936**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Tabel 2.116 Perkembangan Populasi Ternak Unggas di Provinsi Papua Barat Menurur Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak (ekor), 2011-2014

No.	Kabupaten	2011				2012				2013				2014			
		Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
1.	Fakfak	67,375	-	2,994	381	76,693	-	3,353	487	92,032	-	3,755	623	38,700	2,917	4,206	797
2.	Kaimana	25,542	-		83	29,054	-	-	106	34,863	-	-	173	48,159	-	-	173
3.	Teluk Wondama	51,492	-		96	58,407	-	-	122	70,088	-	-	156	2,944	-	-	200
4.	Teluk Bintuni	69,179	-	1,392	797	78,691	-	1,444	1,019	94,429	-	1,498	1,303	121,815	-	1,555	1,667
5.	Manokwari	304,965	29,974	64,266	15,260	356,897	6,000	534,087	8,523	428,276	7,200	78,668	24,977	481,937	8,881	665,800	26,956

No.	Kabupaten	2011				2012				2013				2014			
		Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
6.	Sorong Selatan	74,375	-		84	85,144	-		107	102,173	-		136	129,951	-	-	174
7.	Sorong	241,218	30,756	291,764	2,532	276,146	41,040	552,481	5,239	331,375	41,040	323,263	4,143	356,475	42,678	340,267	21,192
8.	Raja Ampat	68,627	-	-	103	78,564	-	-	131	94,277	-	-	167	138,341	-	-	214
9.	Tambrauw	3,010	-	-	-	3,423	-	-	-	4,108	-	-	-	5,902	-	-	-
10.	Maybrat	-	-	-	-	1,381	-	-	-	1,657	-	-	-	2,010	-	-	-
11.	Kota Sorong	115,798	3,508	220,673	357	131,720	3,543	549,572	-	158,064	4,252	238,678	583	213,643	5,641	248,225	746
12.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,158	2,000	-	-
13.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,625	-	-	-
	Jumlah	**1,021,581**	**64,238**	**581,089**	**19,693**	**1,176,120**	**50,583**	**1,640,937**	**15,734**	**1,411,342**	**52,492**	**645,862**	**32,261**	**1,607,660**	**62,117**	**1,260,053**	**52,119**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Tabel 2.117 Pemotongan Ternak Besar dan Kecil di Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak (ekor), 2011-2014

No.	Kabupaten	2011			2012			2013			2014		
		Sapi Potong	Kambing	Babi	Sapi Potong	Kambing	Babi	Sapi Potong	Kambing	Babi	Sapi Potong	Kambing	Babi
1.	Fakfak	520	130	41	598	-	55	821	436	192	1,088	665	257
2.	Kaimana	15	113	18	22	-	19	34	432	68	654	355	81
3.	Teluk Wondama	15	57	33	17	-	40	26	212	127	44	347	153
4.	Teluk Bintuni	350	65	42	403	-	47	618	207	138	732	95	156
5.	Manokwari	4,656	1,330	419	5,354	-	476	8,214	5,131	1,399	6,606	3,535	8,385
6.	Sorong Selatan	85	131	179	98	-	216	150	513	681	308	583	824
7.	Sorong	5,216	613	675	6,003	-	817	9,208	2,518	2,574	7,808	2,184	3,115
8.	Raja Ampat	284	274	150	327	-	181	502	1,127	569	1,241	1,621	692
9.	Tambrauw	20	80	71	15	-	86	23	326	270	52	341	330
10.	Maybrat	-	-	145	23	-	170	35	84	517	41	172	606

No.	Kabupaten	2011			2012			2013			2014		
		Sapi Potong	Kambing	Babi	Sapi Potong	Kambing	Babi	Sapi Potong	Kambing	Babi	Sapi Potong	Kambing	Babi
11.	Kota Sorong	2,566	397	4,317	2,956	-	5,228	4,535	1,276	16,461	2,624	1,517	14,734
12.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293	891	796
13.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	11	806
Jumlah		**13,727**	**3,190**	**6,090**	**15,816**	**-**	**7,335**	**24,166**	**12,262**	**22,996**	**21,681**	**12,317**	**30,935**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Tabel 2.118 Perkembangan Produksi Daging Ternak Besar dan Kecil di Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota (kg), 2011-2014

No.	Kabupaten	2011			2012			2013			2014		
		Sapi Potong	Kambing	Babi	Sapi Potong	Kambing	Babi	Sapi Potong	Kambing	Babi	Sapi Potong	Kambing	Babi
1.	Fakfak	87,360	1,625	2,255	100,464	3,005	3,025	-	-	-	183,644	8,412	14,157
2.	Kaimana	2,520	1,412	990	3,696	2,788	1,045	-	-	-	110,361	4,494	4,453
3.	Teluk Wondama	2,520	712	1,815	2,898	1,188	2,200	-	-	-	7,416	4,383	8,437
4.	Teluk Bintuni	68,800	812	2,310	67,620	1,406	2,585	-	-	-	123,447	1,195	8,580
5.	Manokwari	782,208	16,625	23,045	899,539	33,007	26,180	-	-	-	1,114,513	44,718	461,175
6.	Sorong Selatan	14,280	1,637	9,845	16,422	3,374	11,880	-	-	-	51,909	7,372	45,331
7.	Sorong	876,288	7,662	37,125	1,008,504	15,703	44,935	-	-	-	1,317,350	27,628	171,314
8.	Raja Ampat	47,712	3,425	8,250	54,869	7,030	9,955	-	-	-	209,380	20,499	38,038
9.	Tambrauw	3,360	962	3,905	2,520	2,011	4,730	-	-	-	8,724	4,317	18,161
10.	Maybrat	-	-	7,975	3,864	507	9,350	-	-	-	6,979	2,169	33,319
11.	Kota Sorong	431,088	4,962	237,435	496,608	8,978	287,540	-	-	-	442,752	19,193	810,381
12.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	-		-	-	-	49,510	133	43,758
13.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-		-	-	-	32,061	11,268	44,330
Jumlah		**2,316,136**	**39,834**	**334,950**	**2,657,004**	**78,997**	**403,425**	**-**	**-**	**-**	**3,658,046**	**155,781**	**1.701.434**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Tabel 2.119 Perkembangan Produksi Daging Ternak Unggas di Provinsi Papua Barat Menurur Kabupaten/Kota (ekor), 2011-2014

No.	Kabupaten	2011				2012				2013				2014			
		Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
1.	Fakfak	50,665	-	2,340	232	56,100	-	2,615	290	-	-	-	623	28,309	2,386	3,421	500
2.	Kaimana	19,207	-	-	49	21,252	-	-	63	-	-	-	173	35,228	-	-	108
3.	Teluk Wondama	38,721	-	-	58	42,724	-	-	72	-	-	-	156	2,154	-	-	125
4.	Teluk Bintuni	52,022	-	1,088	488	57,562	-	1,126	609	-	-	-	1,303	89,108	-	1,265	1,045
5.	Manokwari	229,333	9,561	50,262	9,363	261,070	9,601	55,474	11,684	-	-	-	24,977	352,537	7,265	541,595	16,901
6.	Sorong Selatan	55,929	-	-	50	62,282	-		63	-	-	-	136	95,059	-	-	109
7.	Sorong	181,395	9,810	228,187	1,552	202,000	9,852	75,057	1,938	-	-	-	4,143	101,196	34,914	276,790	13,287
8.	Raja Ampat	51,607	-	-	62	57,486	-	-	77	-	-	-	167	260,761	-	-	134
9.	Tambrauw	1,985	-	-	-	2,503	-	-	-	-	-	-	-	4,317	-	-	-
10.	Maybrat	-	-	-	-	957	-	-	-	-	-	-	-	1,470	-	-	-
11.	Kota Sorong	87,080	1,118	172,587	218	96,353	1,123	179,054	271	-	-	-	583	156,280	4,615	201,909	468
12.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,061	1,636	-	-
13.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,523	-	-	-
	Jumlah	**767,944**	**20,489**	**454,464**	**12,072**	**860,289**	**20,576**	**313,326**	**15,067**	**-**	**-**	**-**	**32,261**	**1,176,003**	**50,816**	**1,024,980**	**32,677**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Tabel 2.120 Perkembangan Produksi Telur di Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak (kg), 2011-2014

No.	Kabupaten	2011			2012			2013			2014		
		Ayam Kampung	Ayam Petelur	Itik	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Itik	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Itik	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Itik
1.	Fakfak	23,206	-	2,054	26,416	-	-	31,664	-	3,359	13,315	40,635	4,298
2.	Kaimana	8,797	-	447	10,007	-	-	11,995	-	728	16,569	-	933
3.	Teluk Wondama	17,736	-	517	20,118	-	-	24,114	-	841	1,013	-	1,078
4.	Teluk Bintuni	23,828	-	4,296	27,104	-	-	31,112	-	7,026	41,911	-	8,989
5.	Manokwari	105,042	109,386	82,270	122,930	421,559	-	147,350	-	134,682	165,812	123,715	145,353
6.	Sorong Selatan	5,617	-	452	29,327	-	-	35,153	-	733	44,710	-	938
7.	Sorong	83,085	190,936	13,650	95,116	432,560	-	114,010	-	22,340	122,646	594,516	114,272
8.	Raja Ampat	23,638	-	555	27,061	-	-	28,995	-	901	47,597	-	1,154
9.	Tambrauw	-	-	-	1,179	-	-	1,413	-	-	2,031	-	-
10.	Maybrat	-		-	476	-	-	570	-	-	692	-	-
11.	Kota Sorong	39,885	48,844	1,924	45,370	49,337	-	54,382	-	3,144	73,504	78,581	4,023
12.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,376	27,861	-
13.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,945	-	-
Jumlah		**330,834**	**349,166**	**106,165**	**405,104**	**903,456**	**-**	**480,758**	**-**	**173,754**	**553,121**	**865,308**	**281,038**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Produksi pangan yang berasal dari kegiatan peternakan adalah daging dan telur. Produksi daging yang berasal dari ternak besar dan kecil di Provinsi Papua Barat selama periode 2011-2014 menunjukkan peningkatan. Produksi daging sapi pada tahun 2011 adalah sebesar 2.316.136 kg dan meningkat menjadi sebesar 3.658.046 kg pada tahun 2014, produksi daging kambing meningkat dari 39.834 kg (2011) menjadi 155.781 kg (2014), dan produksi daging babi meningkat dari 334.950 (2011) menjadi 1.701.434 kg (2014). Wilayah yang menjadi produsen utama daging ternak besar dan ternak kecil pada tahun 2014 adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong. Pada tahun 2014, produksi daging ternak besar dan ternak kecil di Kabupaten Manokwari adalah sebesar 1.620.406 kg yang terdiri dari 1.114.513 kg daging sapi, 44.718 kg daging kambing, dan 461.175 kg. Kabupaten Sorong memproduksi daging sebesar 1.516.292 kg yang terdiri dari daging sapi sebesar 1.317.350 kg, daging kambing sebesar 27.628 kg, dan daging babi sebesar 171.314 kg, sedangkan Kota Sorong memiliki produksi daging sebesar 1.272.326 kg yang terdiri dari daging sapi sebesar 442.752 kg, daging kambing sebesar 19.193 kg, dan daging babi sebesar 810.381 kg.

Produksi daging unggas di Provinsi Papua Barat berasal dari ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Produksi daging ayam kampung di Provinsi Papua Barat meningkat dari sebesar 767.944 kg pada tahun 2011 menjadi sebesar 1.176.003 kg pada tahun 2014. Produksi daging ayam kampung berasal dari seluruh kabupaten/kota dengan produksi tertinggi berada di Kabupaten Manokwari yaitu sebesar 352.537 kg, disusul Kabupaten Raja Ampat sebesar 260.761 kg, dan Kota Sorong sebesar 156.280 kg. untuk daging ayam petelur, produksinya meningkat dari sebesar 20.489 kg (2011) menjadi sebesar 50.816 kg (2014). Produksi daging ayam petelur berasal dari 6 wilayah dengan produksi tertinggi berasal dari Kabupaten Sorong yaitu sebesar 34.914 kg. untuk ayam pedaging, produksinya meningkat signifikan dari sebesar 454.464 kg pada tahun 2011 menjadi sebesar 1.024.980 kg pada tahun 2014. Wilayah dengan produksi ayam pedaging terbesar di Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 berturut-turut adalah Kabupaten Manokwari (541.595 kg), Kabupaten Sorong (276.909 kg), dan Kota Sorong (201.909 kg). Produksi daging itik juga mengalami peningkatan dari sebesar 12.072 kg pada tahun 2011 menjadi sebesar 32.677 kg pada tahun 2014. Wilayah yang memiliki produksi daging itik terbesar di Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 adalah Kabupaten Manokwari yaitu

sebesar 16.901 kg, disusul Kabupaten Sorong sebesar 13.287 kg, dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 1.045 kg.

Selain daging, produk hasil ternak lain yang dihasilkan Provinsi Papua Barat adalah telur. Produksi telur tersebut berasal dari ternak unggas yaitu ayam kampung, ayam petelur, dan itik. Produksi telur secara keseluruhan mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2013 sempat mengalami penurunan yang signifikan. Produksi telur secara keseluruhan pada tahun 2011 adalah sebanyak 786.165 kg, kemudian meningkat menjadi sebesar 1.308.560 kg, selanjutnya pada tahun 2013, produksi telur mengalami penurunan menjadi sebesar 654.512 kg, dan pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi 1.699.467 kg. Jika dirinci menurut jenis ternak, untuk produksi telur ayam kampung, produksinya mengalami kenaikan setiap tahun dari 330.834 kg (2011) menjadi sebanyak 553.121 kg pada tahun 2014. Seperti pada produksi daging, wilayah yang memiliki produksi telur ayam kampung tertinggi pada tahun adalah Kabupaten Manokwari (165.812 kg), disusul Kabupaten Sorong sebesar (122.646 kg), dan Kota Sorong (73.504 kg). Produksi ayam ras petelur juga meningkat dari sebesar 349.166 kg pada tahun 2011 menjadi sebesar 865.308 kg pada tahun 2014. Produksi telur ayam petelur pada tahun 2014 hanya berasal dari 5 kabupaten/kota dengan produksi terbesar berada di Kabupaten Sorong (594.516 kg), disusul Kabupaten Manokwari (123.715 kg), Kota Sorong (78.581 kg), Kabupaten Fakfak (40.635 kg), dan Kabupaten Manokwari Selatan (27.861 kg).

Produksi telur itik pada tahun 2011 adalah sebesar 106.165 kg dan pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 281.038 kg. Produsen utama telur itik di Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 adalah Kabupaten Manokwari yaitu sebesar 145.353 kg dan Kabupaten Sorong sebesar 114.472 kg. Mendasarkan pada data yang diterbitkan BPS Provinsi Papua Barat, 3 wilayah utama penghasil produk ternak baik daging maupun telur adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong. Tingginya produksi daging dan telur pada 3 wilayah tersebut dimungkinkan karena kebutuhan masyarakat akan protein hewani yang semakin meningkat setiap tahun dan adanya peningkatan daya beli masyarakat. Berdasarkan data-data yang telah diurakan, menunjukkan bahwa produksi ternak Provinsi Papua Barat terus meningkat, namun demikian melihat masih banyaknya ternak yang didatangkan semakin meningkat setiap tahun, mengindikasikan bahwa usaha peternakan masih memiliki peluang yang menjanjikan untuk dikembangkan.

2.3.2.4. Kehutanan

Pembangunan sektor kehutanan mencakup semua upaya memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan ekologi, dan sosial masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat terutama masyarakat tempatan. Oleh karena itu, potensi sektor kehutanan harus diolah sebaik mungkin sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi masyarakat di Provinsi Papua Barat. Pengembangan sektor kehutanan harus melingkupi berbagai usaha pemanfaatan hutan secara maksimal dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan hidup dalam arti luas, pada hakekatnya harus berprinsip dapat memberikan manfaat optimal jangka panjang, meliputi sistem dan manajemen pengelolaan kawasan hutan beserta isinya sebagai sumber pendapatan daerah dan masyarakat agar sejahtera dan berkeadilan. Namun pada kenyataannya banyak dijumpai kejanggalan-kejanggalan dalam sistem dan manajemen pengelolaan hutan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdampak negatif bahkan sudah mencapai pada taraf ancaman hari depan. Adanya pembalakan liar serta kegiatan alih fungsi hutan (deforestasi) telah mengakibatkan sejumlah hutan di Provinsi Papua Barat mengalami degradasi hutan. Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan pada kurun 2012–2013 telah terjadi deforestasi di Papua Barat seluas 10.620,2 ha dan jumlah lahan kritis pada tahun 2013 mencapai 487.343 ha dengan tingkat kekritisan kritis 410.601 ha dan sangat kritis 76.742 ha. Untuk itu perlu adanya peninjauan terhadap sistem dan manajemen pengelolaan hutan beserta peraturan dan pengaturan yang berlaku baik langsung maupun yang saling terkait.

Tabel 2.121 Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten/Kota (ha), 2015

No.	Kabupaten	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi			Jumlah
				Terbatas	Tetap	Dapat Dikonversi	
1.	Fakfak	43,742.27	55,261.94	224,198.29	442,788.10	136,837.68	902,828.28
2.	Kaimana	339,458.29	131,435.40	567,758.68	336,199.79	123,623.50	1,498,475.66
3.	Teluk Wondama	54,265.08	794,392.22	78,289.74	68,915.16	150,450.44	1,146,312.64
4.	Teluk Bintuni	127,225.96	197,256.19	486,223.15	746,095.34	233,260.35	1,790,060.99
5.	Manokwari	62,364.94	96,325.29	34,859.52	9,237.77	19,221.33	222,008.85
6.	Sorong Selatan	159,308.67	12,067.28	17,494.78	123,757.81	198,669.33	511,297.87
7.	Sorong	34,599.57	7,266.71	86,791.74	175,695.51	258,537.81	562,891.34
8.	Raja Ampat	147,451.65	592,472.37	6,924.96	18,017.03	142,372.86	907,238.87
9.	Tambrauw	316,803.42	607,566.22	143,551.53	4,831.98	92,866.24	1,165,619.39
10.	Maybrat	110,585.04	21,629.92	37,634.14	232,335.44	51,361.33	453,545.87

No.	Kabupaten	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi			Jumlah
				Terbatas	Tetap	Dapat Dikonversi	
11.	Kota Sorong	6,906.72	1,081.05	5,260.34	2,927.91	25,225.04	41,401.06
12.	Manokwari Selatan	66,553.07	44,496.22	50,956.46	21,040.51	8,357.11	191,403.37
13.	Pegunungan Arfak	158,414.50	78,480.86	37,493.23	4,221.43	-	278,610.02
Jumlah		**1,627,679.18**	**2,639,731.67**	**1,777,436.56**	**2,186,063.78**	**1,440,783.02**	**9,671,694.21**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat merupakan wilayah hutan sehingga sektor kehutanan merupakan salah satu sektor strategis. Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 memiliki kawasan hutan dan perairan seluas 9.671.694,21 ha. Dari seluruh luasan tersebut, sebagian besar luasan hutan merupakan hutan produksi dengan luasan keseluruhan mencapai 5.404.283,56 ha (55,88%). Untuk hutan produksi, luas hutan produksi terbatas pada tahun 2015 adalah seluas 1.777436,56 (18,38%) ha, hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 1.440.783,02 ha (14,90%), dan hutan produksi tetap seluas 2.186.783,02 ha (22,60%). Sementara untuk luas hutan lindung 1.627.679,18 ha (16,83%) dan hutan suaka alam dan pelestarian alam seluas 2.639.731,67 ha (27,29%).

Berdasarkan proporsi tersebut, nampak bahwa kawasan hutan untuk tujuan perlindungan masih berada di atas persentase yang disyaratkan, yaitu minimal 30%. Proporsi tersebut perlu dipertimbangkan kembali, karena dengan pemekaran wilayah di Provinsi Papua Barat, persebaran di setiap kabupaten/kota tentunya akan bervariasi. Selain itu, secara fisiografi, kawasan hutan di Provinsi Papua Barat memiliki kelerengan yang bervariasi dari datar sampai sangat curam, namun sekitar 65% memiliki *slopes* dari curam-sangat curam dengan kemiringan di atas 25%. Oleh karenanya dalam rencana pengembangan wilayah pembangunan di setiap kabupaten/kota perlu mempertimbangkan proporsi kawasan hutan untuk perlindungan ini. Kawasan hutan produksi, khususnya areal hutan produksi konversi persebarannya tidak merata di setiap kabupaten/kota. Untuk itu, penataan fungsi kawasan perlu ditinjau kembali dan peninjauannnya dilaksanakan bersamaan dengan penetapan tata ruang wilayah pembangunan Provinsi Papua Barat dengan tetap memperhatikan karakeristik dan potensi SDA tersedia di setiap wilayah kabupaten/kota.

Tabel 2.122 Perusahaan Penerima Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Papua Barat

No.	Nama IPPKH	Nomor IPPKH	Tanggal IPPKH	Luas (Ha)
1.	Petrochina International (Bermuda) Ltd	SK.365/Menhut-II/2009	23 Juni 2009	17,13
2.	Petrochina International (Bermuda) Ltd	SK.628/Menhut-II/2011	11 Februari 2011	16,76
3.	Petrochina International (Bermuda) Ltd	SK.71/Menhut-II/2011	3 Februari 2011	58,29
4.	Petrochina International (Bermuda) Ltd.	SK.171/Menhut-II/2009	14 April 2009	3,31
Jumlah				95,49

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Pemanfaatan hutan produksi merupakan kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan produksi untuk memperoleh manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi tanpa mengurangi fungsi utama kawasan hutan tersebut. Pemanfaatan kawasan hutan ini dilakukan melalui pemberian izin pemanfaatan hutan alam dan izin pemanfaatan hutan tanaman.

Izin pemanfaatan pada hutan alam dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHKHA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), dan Izin Usaha Pemanfaatan dalam rangka Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). Pada tahun 2013, terdapat 1 perusahaan yang mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan seluas ± 95,49 ha yang berada di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Selain itu, terdapat 20 perusahaan yang mendapatkan izin usaha untuk pemanfaatan hutan produksi seluas ± 3.068.138 ha. Kabupaten Teluk Bintuni memiliki jumlah lahan terluas untuk penebangan yang dilakukan oleh perusaahan IUPHHKHA yaitu seluas 50.843,50 ha dengan produksi kayu mencapai 157.738,54 m^3. Sementara Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) yang berkembang di Provinsi Papua Barat digolongkan menjadi 2 yaitu industri yang berskala besar dengan nilai produksi lebih dari 6.000 m^3 dan industri di bawah sedang yaitu produksi di bawah 6.000 m^3. Sedikitnya terdapat 3 perusahaan berskala besar dan 15 perusahaan sedang yang bergerak dalam sektor kehutanan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2013.

Tabel 2.123 Perusahaan Penerima Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Provinsi Papua Barat

No.	Nama IUPHHK-HA	SK IUPHHK-HA		Luas (ha)	Masa Berlaku SK	
		Nomor SK	Tanggal SK		Tanggal	Tahun
1.	PT Arfak Indra	333/Menhut-II/2009	15 Juni 2009	177.900	25 Oktober	2054
2.	PT Asco Prima Nusantara	82/Menhut-II/2009	5 Maret 2009	171.270		2055
3.	PT Bangun Kayu Irian	01/Kpts-II/1993; add.SK. 122/Menhut-II/2012	4 Januari 1993 add. 1 Maret 2012	282.260		2013
4.	PT Bintuni Utama Murni W. Industries	213/Menhut-II/2007	28 Mei 2007	82.120	31 Desember	2053
5.	PT Hanurata Coy Ltd.	81/Kpts-II/1994	25 Februari 1994	417.570		2014
6.	PT Kaltim Hutama	652/Menhut-II/2009	15 Oktober 2009	161.670	21 Maret	2053
7.	PT Kurniatama Sejahtera	648/Menhut-II/2009	15 Oktober 2009	115.800		2054
8.	PT Mancaraya Agromandiri	55/Menhut-II/2006	14 Maret 2006	97.820	1 November	2036
9.	PT Manokwari Mandiri Lestari	366/Menhut-II/2011	7 Juli 2011	90.980		2047
10.	PT Megapura Mambramo Bangun	397/Menhut-II/2006	17 Juli 2006	55.100	21 Mei	2022
11.	PT Mitra Pembangunan Global	714/Menhut-II/2009	19 Oktober 2009	83.950		2054
12.	PT Multi Wahana Wijaya	159/Menhut-II/2011	31 Maret 2011	107.740		2056
13.	PT Papua Satya Kencana	647/Menhut-II/2009	15 Oktober 2009	195.420		2054
14.	PT Teluk Bintani	509/Menhut-II/2012	13 September 2012	237.750	13 September	2057
15.	PT Wana Galang Utama	464/Kpts-II/1992	22 Oktober 1992	212.000		2012
16.	PT Wanalrian Perkasa	936/Kpts-II/1992	25 November 1992	53.800		2012
17.	PT Wana Kayu Hasilindo	547/Kpts-II/1997	22 Agustus 1997	84.000		2017
18.	PT Wapoga Mutiara Timber Unit I	744/Kpts-II/1990; SK.723/Menhut-II/2011; SK.624/Menhut-II/2012	13 Desember 1990; 20 Desember 2011; 7 November 2012	130.755	20 Desember	2056
19.	PT Wukirasari	477/Menhut-II/2008	31 Desember 2008	116.320	26 November	2052
20.	PT Yotefa Sarana Timber	570/Menhut-II/2011	3 Oktober 2011	123.565		2056
Papua Barat				3.068.138		

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Produksi hasil hutan di Provinsi Papua Barat diantaranya adalah chip, kayu bulat, kayu gergajian, dan veneer. Selama periode 2010-2013, produksi kayu dapat dikatakan fluktuatif. Pada tahun 2010, produksi kayu adalah sebesar 193.812,34 m^3, kemudian pada tahun 2011 naik menjadi 211.839,74 m^3, kemudian turun menjadi sebesar 194.414,00 m^3, dan pada tahun 2013 turun kembali hingga produksi terendah menjadi sebesar 150.537,50 m^3. Jika dilihat dari wilayah, produksi kayu olahan Provinsi Papua Barat sebagain besar berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong. Sebagai contoh adalah pada tahun 2013, dari total produksi 4 wilayah sebesar 150.537,50 m^3, produksi kayu olahan yang berasal dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar 148.057,79 m^3 (98,35%) dimana produksi kayu olahan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 61.497,59 m^3 dan Kabupaten Sorong sebesar 86.560,2 m^3.

Tabel 2.124 Perkembangan Produksi Kayu Olahan Menurut Kabupaten/Kota (m^3), 2010-2013

No.	Kabupaten	2010	2011	2012	2013
1.	Fakfak	224.20	1,415.10	2,270.01	-
2.	Kaimana	5,433.56	7,383.48	3,397.62	696.10
3.	Teluk Wondama	1,119.85	1,338.35	-	-
4.	Teluk Bintuni	110,687.79	131,915.57	115,050.26	61,497.59
5.	Manokwari	1,070.17	-	-	1,783.61
6.	Sorong Selatan	-	-	-	-
7.	Sorong	74,463.75	67,467.27	70,334.40	86,560.20
8.	Raja Ampat	-	-	-	-
9.	Tambrauw	813.02	607.79	-	-
10.	Maybrat	-	-	-	-
11.	Kota Sorong	-	1,712.18	3,361.71	-
12.	Manokwari Selatan	-	-	-	-
13.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-
Jumlah		**193,812.34**	**211,839.74**	**194,414.00**	**150,537.50**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pemanfaatan sumber daya alam migas khususnya minyak bumi dan gas alam cair memberikan kontribusi yang besar untuk perekonomian Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat memiliki potensi energi dan sumber daya mineral yang besar namun potensi

tersebut belum ditangani secara optimal. Peran energi dan sumber daya mineral tersebut selain untuk keperluan pertambangan dan ekspor hasil tambang juga menjadi sumber penyedia energi. Sumber daya energi selama ini memanfaatkan energi fosil khususnya minyak, batu bara, serta gas bumi yang merupakan sumber energi tidak terbaharukan. Provinsi Papua Barat sebagai daerah penghasil gas terbesar di Indonesia tetap mengalami krisis energi, yaitu sering terjadi pemadaman listrik dan kelangkaan BBM. Papua Barat merupakan penghasil energi terbesar, terutama berasal dari produksi gas di Sumur Tangguh, namun hasil produksinya sebagian besar digunakan untuk ekspor. Kebutuhan energi yang semakin meningkat dan disertai dengan menipisnya cadangan migas mendorong setiap wilayah mencari sumber energi alternatif untuk dikembangkan. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sumber energi lain di Provinsi Papua Barat untuk memenuhi kebutuhan energi di provinsi ini dengan menetapkan kebijakan energi terbaharukan dan konservasi energi (Bappenas, 2015).

Keterbatasan infrastruktur di Papua Barat berpengaruh terhadap minimnya pemanfaatan energi yang dapat diperbarui sebagai bahan baku pembangkit listrik. Di sisi lain, pemanfaatan sumber energi terbarukan bersifat lokal dan tidak ekonomis jika ditransportasikan antar wilayah. Kondisi ini menyebabkan pengembangan sumber energi terbarukan sangat cocok dalam peningkatan pemanfaatan energi di wilayah terpencil dan terisolasi. Potensi energi di Provinsi Papua Barat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energi, dengan memanfaatkan sumberdaya energi lain yang berasal dari gelombang laut, angin, air, dan matahari (Bappenas, 2015).

Ketersediaan energi terutama fasilitas kelistrikan merupakan sebuah aspek penting dalam pembangunan suatu daerah. Listrik berperan penting dalam peningkatan investasi suatu daerah mengingat hal tersebut merupakan salah satu faktor penentu bagaimana suatu investasi akan ditanamkan. Listrik merupakan salah satu kebutuhan utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah karena semua memerlukan listrik dari rumah tangga, instansi pemerintah, perkantoran, hingga industri. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan energi, maka pembangunan sarana dan prasarana energi juga menjadi kebutuhan vital dan mendesak di Provinsi Papua Barat. Selain dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik yang semakin mendesak di masa mendatang, penyediaan sarana kelistrikan yang bersumber dari gas (LNG) di Provinsi Papua Barat juga sebagai

wujud pemerataan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat. Sebagaimana kondisi yang ada, beberapa wilayah di Provinsi Papua Barat belum mendapatkan fasilitas listrik yang memadai bahkan masyarakat di daerah pedalaman belum mendapatkan fasilitas listrik.

Kekurangan pasokan energi listrik di Provinsi Papua Barat disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik. Pembangunan di Provinsi Papua Barat sejalan dengan kebutuhan listrik masyarakat yang semakin bertambah untuk aktivitas sehari-hari. Sistem kelistrikan di Provinsi Papua Barat masih terisolasi, terdiri dari 5 sistem besar (beban > 1 MW) yaitu sistem Sorong, Fakfak, Manokwari, Kaimana dan Teminabuan. Selain itu, terdapat sistem kelistrikan terisolasi dengan beban puncak kurang dari 1 MW yaitu listrik perdesaan tersebar di 50 lokasi. Beban puncak total (non coincident) seluruh sistem kelistrikan di Provinsi Papua Barat sekitar 56,6 MW, dipasok dari pembangkit-pembangkit jenis PLTD, PLTM, dan dari excess power PLTMG/PLTG, yang terhubung langsung melalui jaringan tegangan menengah 20 kV. Sistem kelistrikan Sorong merupakan sistem terbesar di Provinsi Papua Barat dengan beban puncak 2011 sekitar 28,6 MW (Bappenas, 2015).

Unit pembangkit listrik yang ada di Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 82 unit. Hingga tahun 2015, jumlah daya terpasang listrik adalah sebesar 108.206 KW dengan produksi listrik sebesar 427.041.762 KWh. Melihat data hingga tingkat kabupaten, penyebaran fasilitas listrik di Provinsi Papua Barat masih belum merata atau cenderung terpusat di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Dari segi daya terpasang, kedua wilayah tersebut memiliki daya terpasang sebesar 74,12% (Kabupaten Manokwari sebesar 32,36% dan Kota Sorong sebesar 41,76%), sedangkan persentase produksi listrik sebesar 81,27% dimana produksi listrik di Kabupaten Manokwari sebesar 117.358.069 KWh (27,48%) dan Kota Sorong sebesar 229.692.081 KWh (53,79%). Dengan wilayah berupa kepulauan sehingga terbatasnya akses jaringan ke sumber pembangkit, kapasitas kelistrikan di Kabupaten Raja Ampat menempati urutan terkecil di Provinsi Papua Barat dengan daya terpasang sebesar 82 KWh dan produksi listrik sebesar 84.633 KWh. Rincian mengenai daya terpasang dan produksi listrik menurut kabupaten di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.125 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kabupaten/Kota, 2015

No.	Kabupaten/Kota	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)
1.	Fakfak	7,188	28,050,784	24,924,141	893,096
2.	Kaimana	6,056	17,330,091	15,398,416	551,765
3.	Teluk Wondama	1,320	1,207,459	993,579	28,938
4.	Teluk Bintuni	3,720	17,467,734	14,373,636	418,635
5.	Manokwari	35,018	117,358,609	96,570,625	2,812,637
6.	Sorong Selatan	5,108	11,663,883	10,363,784	371,361
7.	Sorong	616	625,501	555,780	19,915
8.	Raja Ampat	82	84,633	75,199	2,695
9.	Tambrauw	320	431,318	383,242	13,733
10.	Maybrat	860	860,731	764,791	27,404
11.	Manokwari Selatan	2,730	2,268,939	1,867,037	54,378
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-
13.	Kota Sorong	45,188	229,692,081	204,089,763	7,313,057
Papua Barat		**108,206**	**427,041,763**	**370,359,994**	**12,507,614**

Sumber: Papua Barat Dalam Angka, 2016

Persentase rumah tangga di Provinsi Papua Barat yang menggunakan sumber penerangan listrik dari PLN pada tahun 2014 adalah sebesar 68,72%, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 63,20%. Sementara itu, persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik non PLN adalah sebesar 16,95% dan yang menggunakan pelita/senter sebesar 12,80%. Jadi dapat dikatakan bahwa persentase rumah tangga yang belum menggunakan listrik sebagai sumber penerangan adalah sebesar 14,33%. Secara umum, walaupun kondisi kelistrikan di Provinsi Papua Barat belum cukup memadai, tetapi telah terjadi peningkatan penetrasi akses masyarakat dalam mendapatkan sumber penerangan. Selama periode 2012-2015, jumlah pelanggan listrik mengalami peningkatan setiap tahun dari 117.402 pelanggan pada tahun 2012 menjadi sebanyak 174.978 pelanggan pada tahun 2015. Jumlah pelanggan listrik terbanyak pada tahun 2015 berada di Kabupaten Manokwari yaitu sebanyak 53.155 pelanggan, disusul Kota Sorong sebanyak 52.001 pelanggan, dan Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 21.574 pelanggan.

Tabel 2.126 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2015

No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
1.	Fakfak	11,594	14,171	15,224	15,076
2.	Kaimana	5,495	6,471	7,036	7,353
3.	Teluk Wondama	5,262	6,781	8,723	9,505
4.	Teluk Bintuni	3,218	3,831	6,837	8,570
5.	Manokwari	37,317	42,365	46,733	53,155
6.	Sorong Selatan	4,000	5,318	7,269	7,744
7.	Sorong	13,466	16,914	18,719	21,574
8.	Raja Ampat	-	-	-	-
9.	Tambrauw	-	-	-	-
10.	Maybrat	-	-	-	-
11.	Manokwari Selatan	-	-	-	-
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-
13.	Kota Sorong	37,050	44,624	49,414	52,001
Papua Barat		**117,402**	**140,475**	**159,955**	**174,978**

Sumber: Papua Barat Dalam Angka, 2016

Pengembangan kelistrikan di Provinsi Papua Barat terus ditingkatkan karena wilayah ini masih mengalami defisit listrik. Provinsi Papua Barat masih terbatas akan pembangunan infrastruktur yang membuat pemanfaatan energi terbarukan juga terbatas. Padahal dengan pemanfaatan energi terbarukan kebutuhan energi Provinsi Papua Barat dapat terpenuhi. Alternatif lain penyediaan sumber energi untuk penyediaan listrik di Provinsi Papua Barat berasal dari jual beli excess power yang memanfaatkan pembangunan pabrik semen dan PLTU di Manokwari. Daya mampu pembangkit listrik di sistem Manokwari saat ini sebesar 17,5 MW menggunakan tenaga diesel, dengan beban puncak 16,8 MW. Pembelian excess power ini akan meningkatan penghematan dan mengurangi pemakaian BBM sebesar 21 juta liter per tahun. Adanya excess power 10 MW di Manokwari akan menambah kapasitas excess power Provinsi Papua Barat. Saat ini PLN Wilayah Papua dan Papua Barat telah membeli excess power di Kota Sorong sebesar 37MW yang menggunakan PLTMG sehingga produksi listrik di Kota Sorong hampir bebas BBM.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga listrik karena meningkatnya permintaan tenaga listrik. Rasio elektrifikasi di Provinsi Papua Barat tahun 2014 masih di bawah 100 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 81,70 persen. Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dan jumlah keseluruhan rumah tangga (RUPTL PLN 2015-2024). Rasio

elektrifikasi ini menggambarkan tingkat ketersediaan energi listrik untuk masyarakat. Wilayah Provinsi Papua Barat secara keseluruhan memiliki rasio elektrifikasi yang rendah karena luas wilayahnya dan jarak antar rumah tangga cukup jauh. Dalam periode 2015-2019, pemerintah pusat memprioritaskan pengembangan dan pembangunan sistem dan energi kelistrikan di Provinsi Papua Barat di 5 lokasi yaitu: PLTU Andai (14 MW), PLTU Klalin (30 MW), PLTMG mobile Manokwari (20 MW), PLTMG Fakfak (10 MW), dan PLTMG Bintuni (10 MW).

Tabel 2.127 Rencana Pengembangan Kelistrikan di Provinsi Papua Barat

Kabupaten/Kota	Rencana Pengembangan
Kabupaten Fakfak	➢ Pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) pada setiap distrik/ kampung ➢ Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) disekitar sungai besar
Kabupaten Kaimana	➢ Pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Distrik Kaimana ➢ Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) di Distrik Teluk Etna dan Distrik Kaimana ➢ Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh distrik ➢ Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) di wilayah kepulauan dan pesisir di Distrik Kaimana dan Distrik Buruway
Kabupaten Manokwari	➢ Penambahan daya listrik dan jaringan listrik ➢ Pembangunan gardu induk listrik dan peningkatan kapasitas gardu induk ➢ Pembangunan jaringan listrik ke wilayah-wilayah tertinggal dan atau terisolasi yang selama ini belum mendapatkan pelayanan energi listrik ➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) disekitar sungai besar
Kabupaten Maybrat	➢ Peningkatan kapasitas unit pembangkit listrik di Aitinyo dan Ayamaru ➢ Pembangunan unit pembangkit baru (PLTD) untuk kawasan Kumurkek dan Aifat Timur ➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Aifat dan distrik lainnya ➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh)di Kali Seni – Mare ➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
Kabupaten Raja Ampat	➢ Pengembangan Pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) pada setiap distrik ➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin

Kabupaten/Kota	Rencana Pengembangan
	➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa
Kabupaten Sorong Selatan	➢ Peningkatan kapasitas sambungan listrik dan jangkauan pelayanan di Kota Teminabuhan ➢ Pengembangan instalasi sambungan listrik lama ataupun pembangunan instalasi sambungan listrik baru bagi ibukota distrik yang telah memiliki PLTD seperti di Distrik Moswaren, Konda, dan Saifi ➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh)
Kabupaten Manokwari Selatan	➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Distrik Tahota dan Distrik Neney ➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Distrik Ransiki dan Distrik Oransbari ➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) di Distrik Ransiki, Distrik Isim, Distrik Neney dan Distrik Oransbari ➢ Pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Distrik Ransiki, Distrik Oransbari, dan Distrik Momiwaren
Kabupaten Pegunungan Arfak	➢ Pembangunan gardu induk di Distrik Anggi ➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Distrik Minyambouw ➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Distrik Anggi ➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) di Distrik Taige, Distrik Hingk, dan Distrik Catubouw
Kabupaten Teluk Wondama	➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Distrik Wasior dan Distrik Windesi ➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Tenaga Surya (PLTS) diseluruh distrik ➢ Pengembangan jaringan transmisi listrik diseluruh distrik/kampung
Kabupaten Tambrauw	➢ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) diseluruh distrik ➢ Perluasan jaringan transmisi listrik diseluruh distrik/kampung ➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh)
k. Kota Sorong	➢ Pengembangan dan pembangunan PLTG Arar di Kabupaten Sorong yang interkoneksinya melayani seluruh Papua Barat

Kabupaten/Kota	Rencana Pengembangan
	➢ Peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Klasaman di Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur dengan kapasitas 30,7 MW ➢ Peningkatan PLTD Klademak di Kelurahan Klademak Distrik Sorong dengan kapasitas 28 MW ➢ Pengembangan PLTA Warsamson di DAS Warsamson dengan kapasitas 31 MW ➢ Pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV yang melintas di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Maokwari, serta Kabupaten Fakfak. ➢ Penyempurnaan interkoneksi 20 kV di seluruh Kota Sorong
Kabupaten Sorong	➢ Pengembangan PLTD di Distrik Klamono, Distrik Makbon, Distrik Seget, Wanurian (Distrik Beraur), Kalfdalim (Distrik Salawati), Kasim (Distrik Seget) ➢ Pengembangan Pembangkit Tenaga Surya (PLTS) di seluruh daerah pedalaman ➢ Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Distrik Mayamuk
Kabupaten Teluk Bintuni	➢ Pengembangan PLTD dan PLTS

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Pulau Papua yang diketahui terbentuk sejak jutaan tahun yang lalu sebagai hasil benturan Lempeng Benua Australia (Australia Plate) yang bergerak ke Utara dengan Lempeng Pasifik (Pacific Crustal Plate) yang bergerak ke arah Barat. Akibat benturan antara lempeng tersebut di atas menimbulkan keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah dengan terjadinya penerobosan batuan beku dengan komposisi sedang ke dalam batuan sedimen di atasnya, memungkinkan terbentuknya mineralisasi logam yang berasosiasi dengan perak dan emas. Konsentrasi mineral-mineral logam diperkirakan terdapat pada Lajur Pegunungan Tengah Papua. Posisi tektonik Papua yang berada di Lingkar Pasifik, yang berupa cincin gunung api memberikan potensi endapan mineral yang besar, telah diketahui sepanjang jalur tersebut dari Amerika Selatan, Philipina, Papua New Guinea sampai ke Selandia Baru telah ditemukan banyak endapan emas dan tembaga kelas dunia (RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033).

Akibat tektonik di Pulau Papua juga memungkinkan terbentuk cekungan dengan sedimen-sedimen yang cukup tebal dalam kondisi lingkungan laut; di mana lingkungan perairan terdapat cukup banyak kehidupan mikro organik yang terakumulasi menjadi

cadangan hidrokarbon. Contohnya di daerah Kepala Burung, di daerah tersebut cukup potensial untuk diadakan eksplorasi minyak dan gas bumi. Tidak tertutup kemungkinan daerah-daerah lain seperti sampai saat ini masih terus dilakukan eksplorasi baik di daratan maupun lepas pantai, mengingat keberhasilan Papua Nugini telah menemukan cekungan-cekungan minyak dan gas bumi yang cukup potensial. Keuntungan-keuntungan lainnya, yaitu adanya cadangan batubara, nikel, kobal, krom, dan uranium (RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033).

Tabel 2.128 Potensi Mineral Logam dan Non Logam di Provinsi Papua Barat

Kabupaten/Kota	Potensi Tambang	Distrik	Volume Cadangan
Manokwari	Batu Gamping	Terdapat merata di semua distrik dan melimpah penyebarannya	13,92 Miliar Ton
	Lempung	Tersebar merata di Distrik Manokwari	Kandungan lempung terdiri dari Sio rata-rata 55%, A12O3-12,3%, MgO rata-rata 1,27 dan Fe203 rata-rata 10,4%
	Pasir Batu	Distrik Manokwari an Distrik Warmare	Volume cadangan sebesar 1.855 juta ton m3 dan 12,13 m3
	Diorit Granit	Distrik Warmare di sekitar Kampung Wagesi, Gunung Nuasa, Sungai Maryam	Volume cadangan 26,95 miliar metrik ton
Pegunungan Arfak	Timah	Sepanjang sungai Warsomi Distrik Anggi	Deposit mineral belumdiketahui, kandungan timahnya berkisar antara 345-685
	Senk dan Tembaga	Danau Anggi Giji	Deposit mineral belum diketahui dan sampai saat ini potensi belum dimanfaatkan
	Granit	Distrik Anggi	-
Manokwari Selatan	Granit	Distrik Ransiki	-
Tambrauw	Timah	Distrik Ambarbaken sepanjang Sungai Waturi	Deposit mineral belum diketahui, kandungan timahnya berkisar antara 345-685
	Senk dan Tembaga	Distrik Ambarbaken kampung Sutera Kampung Bomas	Deposit mineral belum diketahui dan sampai saat ini potensi belum dimanfaatkan
	Emas	Distrik Ambarbaken	Deposit mineral belum diketahui dan belum dieksplorasi
	Granit	Distrik Ambarbaken dan Distrik Kebar	Volume cadangan sebesar 96,83 miliar metrik ton
	Pasir Kuarsa	Tersebar di Distrik Kebar Kampung Atay Selatan	Volume cadangan 137,5 mt berdasarkan penelitian SiO2 – rata-rata 77,6% ; A12O3 – Rata-rata13,65% Fe2O3 rata-rata 0,84% pausri gelas kaca
	Tembaga	Distrik Sausapor	
	Emas	Distrik Sausapor	

Kabupaten/Kota	Potensi Tambang	Distrik	Volume Cadangan
	Tanah Hitam	Distrik Sausapor	
	Biji Besi	Distrik Sausapor	
Maybrat	Minyak Bumi dan gas	Distrik Aifat Timur	
	Batu Gamping	Distrik Kais Ayamaru Utara	
	Emas	Distrik Aifat Timur	
	Fosfat	Distrik Ayamaru, Ayamaru Utara, dan Mare	
	Zink	Distrik Aifat dab Aifat Timur	
	Marmer dan Bahan Baku Semen	Distrik Ayamaru, Ayamaru Utara, dan Mare	
Teluk Bintuni	Minyak dan Gas Bumi	Mogoi, Waisian, Muturi, dan Berau	Volume cadangan terbesar adalah gas alam sebesar 14,3 TCF; Cadangan mika sebesar 150,1 juta metrik ton terdiri dari Genis Maskovit sebesar 19,39 metric ton, Genis Kuarsa sebesar 91,28 Juta metrik ton, dan Genis Pragmatik sebesar 31,5 metrik ton Volume cadangan hipotetik batu bara 0,29-1,27% kadar abu 2,1-5,4%; Selain gas dan minyak bumi, bahan galian adalah batu bara, batu lumpur, batu pasir, dan batu gamping; Kandungan mika 150, 1 metric ton, terdiri dari Genis Maskovit sebesar 15,38 metric ton, jenis kuarsa sebesar 91,28 juta metric ton, nisprematik sebesar 31,50 juta metrik ton.
	Batu Bara		
	Mika		
Raja Ampat	Cobalt	Distrik Wageo Selatan Pulau Wageo dan Gag	
	Tembaga	Distrik Wageo Selatan, Pulau Wageo dan Gag, Distrik Wageo Utara dan Distrik Samate	
	Nikel	Distrik Wageo Selatan (Pulau Wageo dan Gag), Distrik Wageo Utara dan Distrik Samate	
	Mangan	Distrik Wageo Utara dan Distrik Samate	
	Batu bara	Distrik Wageo Utara dan Distrik Samate	
	Fosfat dan Opal	Distrik Misol	
Teluk Wondama	Mika	Distrik Wasior	Cadangan deposit sebesar 90,11 juta metrik ton, yang terdiri dari jenis Moskovit sebesar 17,31 juta metrik ton, jenis kuarsa sebesar 61,21 juta metrik ton dan jenis peckmatik sebesar 11,50 juta metrik ton
	Batu Gamping	Tersebar di Distrik Wasior dan Wendesi	
	Biji Besi	Distrik Wasior	

Kabupaten/Kota	Potensi Tambang	Distrik	Volume Cadangan
Sorong Selatan	Minyak Bumi dan gas	Distrik Kais dan Distrik Inanwatan	
	Batu Gamping	Distrik Kais dan Distrik Sawiat	
	Marmer dan Bahan Baku Semen	Distrik Sawiat	
	Emas	Distrik Sawiat	
Kabupaten Sorong	Batu Bara	Distrik Salawati, Ayata, dan Klamono	
	Koramit	Distrik Salawati	
Fak Fak	Pasir Kuarsa	Bomberai, Distrik Kokas	Volume cadangan sebesar 1.500 ha dengan ketebalan rata-rata 6 meter sehingga perkiraan cadangan adalah 90 juta m3
	Batu Gamping	Distrik Kokas pada Pegunungan Onin	Luas 142.500 Ha dan jumlah cadangan +2.850 juta m3
	Batu Bara	Distrik Teluk Etna, Teluk Arguni, buruway, Kokas, dan Fak Fak Timur	Sebaran Volume 457.000 m2
	Emas	Distrik Teluk Etna, Ubadari, dan Kokas	Sebaran 1.282.000 m2 dengan kadar 0,050 gr/ton hasil analisis laboratorium P3G Bandung
	Minyak dan Gas	Menyebar di distrik Kokas, teluk Berau Buruway, Fakfak Timur, dan Fakfak Barat	Dengan kadar + 26.680.500 m2
	Lempung	Menyebar di distrik Kokas, kampung Tawar dengan luas 4.500 Ha	Jumlah cadangan kurang lebih 450 juta m3 dan Distrik Bomberai dengan luasan 12 Ha, jumlah cadangan + 864 juta m3
	Perak	Menyebar di Distrik Fakfak (Bandara Torea)	Dengan kadar 3,1 gr/ton
	Tembaga	Menyebar di Distrik Fakfak (Bandara Torea)	Dengan kadar 16,8 gr/ton
	Timbal	Menyebar di Distrik Fakfak (Bandara Torea)	Dengan kadar 15,2 gr/ton
	Senk	Menyebar di Distrik Fakfak (Bandara Torea)	Dengan kadar 47,2 gr/ton

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Kegiatan pertambangan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan banyak terdapat di wilayah Sorong dan sekitarnya. Kuasa pertambangan yang beroperasi di wilayah Papua Barat salah satunya yaitu Petrochina International (Bermuda) Ltd dengan luas operasional ± 95,49 Ha yang berada di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Di Kabupaten Teluk Bintuni terdapat kegiatan pertambangan besar gas bumi (LNG) yang dilakukan oleh BP Tangguh. Penggalian selama ini belum memberikan hasil yang cukup

signifikan bagi perekonomian Provinsi Papua Barat, meski demikian memiliki kecenderungan untuk terus meningkat. Terdapat beberapa daerah yang memiliki potensi galian logam namun belum dilakukan eksplorasi lebih lanjut. Batubara sebagai salah satu barang galian juga cukup potensial di Provinsi Papua Barat. Persebaran bahan galian batubara terutama terdapat di daerah kepala burung yaitu di daerah Homa, Igomo, dan Salawati. Batubara yang terdapat di ketiga kawasan tersebut tergolong batubara muda karena masih menampakkan struktur kayu. Adanya bahan tambang batubara ini mendorong peluang dikembangkannya Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk memenuhi kebutuhan listrik Provinsi Papua Barat.

2.3.2.6. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap perekonomian Provinsi Papua Barat dapat dikatakan masih kecil. Walaupun kontribusinya masih kecil, kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terus meningkat setiap tahun selama periode 2011-2016 dimana kontribusinya pada tahun 2011 adalah sebesar 5,45% dan pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 6,58%. Dari sisi pertumbuhan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terus tumbuh setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut adalah sebesar 8,32% per tahun. Pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 13,05%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2012 yang hanya sebesar 5,32%. Jika menilik perdagangan dalam negeri, sarana perdagangan yang paling banyak di wilayah perdesaan pada tahun 2014 adalah jenis toko/warung kelontong yang berjumlah sebanyak 844 unit. Sementara jumlah warung/kedai makanan dan minuman berjumlah 268 unit, restoran/rumah makan berjumlah 17 unit, dan mini market berjumlah 44 unit. Toko/warung kelontong di Provinsi Papua Barat tersebar merata di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan wilayah yang paling banyak memiliki toko/warung kelontong adalah Kabupaten Raja Ampat yaitu sebanyak 113 unit, disusul Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 110 unit, dan Kabupaten Fakfak sebanyak 99 unit. Sementara wilayah yang memiliki jumlah minimarket terbanyak di Provinsi Papua Barat adalah Kota Sorong (16 unit), Kabupaten Manokwari (6 unit), dan Kabupaten Teluk Bintuni (5 unit).

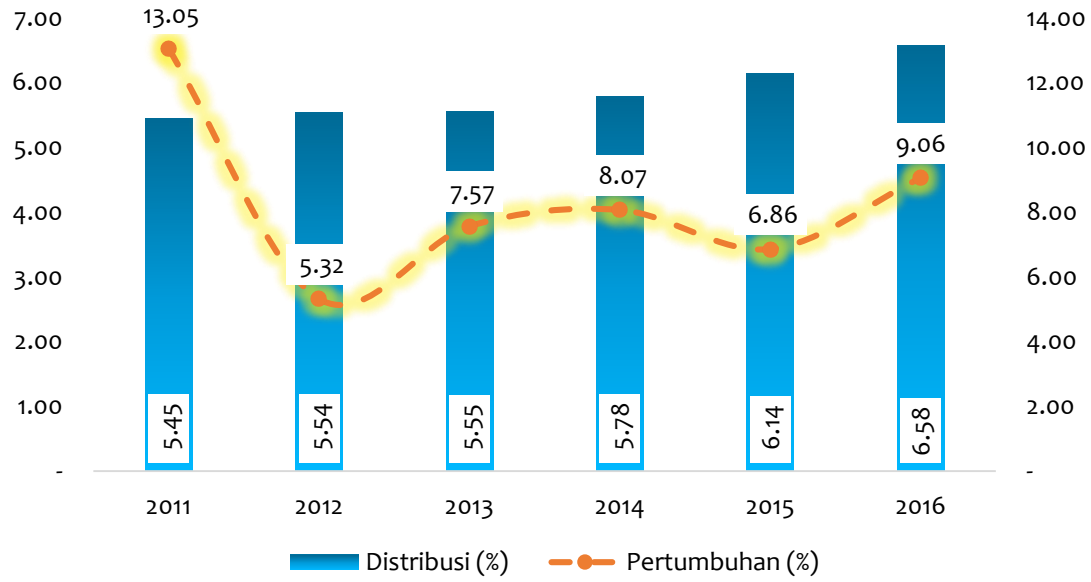

Gambar 2.83 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor, 2011-2016
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Tabel 2.129 Banyaknya Kampung yang Memiliki Sarana Perdagangan Menurut Kabupaten/Kota (unit), 2014

No.	Kabupaten/Kota	Sarana Perdagangan			
		Mini Market	Restoran/ Rumah Makan	Warung/ Kedai Makanan dan Minuman	Toko/ Warung Kelontong
1.	Fakfak	-	2	18	99
2.	Kaimana	4	-	7	69
3.	Teluk Wondama	3	-	6	62
4.	Teluk Bintuni	5	2	30	110
5.	Manokwari	6	6	30	84
6.	Sorong Selatan	4	1	8	51
7.	Sorong	3	1	20	88
8.	Raja Ampat	1	-	7	113
9.	Tambrauw	-	-	3	26
10.	Maybrat	2	1	4	79
11.	Manokwari Selatan	-	1	8	25
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	7
13.	Kota Sorong	16	3	27	31
Papua Barat		**44**	**17**	**168**	**844**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Pada perdagangan luar negeri, fasilitas pendukung (sarana transportasi) yang berada Provinsi Papua Barat diantaranya adalah Pelabuhan Bintuni, Kaimana, dan Sorong

yang digunakan untuk pelabuhan muat, sedangkan yang digunakan untuk pelabuhan bongkar adalah Pelabuhan Bintuni, Fakfak, Kaimana, Sorong, Manokwari, dan Teluk Kasim/Salawati. Dari sisi nilai ekspor, pada tahun 2015 nilainya mengalami penurunan menjadi US$2.741.794.405 dari sebelumnya US$3.974.513.519. Sementara dari sisi impor justru mengalami peningkatan dari sebesar US$ 27.550.190 (2014) menjadi sebesar US$35.653.618 (2015). Produk utama yang diekspor Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 diantaranya adalah bahan bakar mineral dengan nilai perdagangan sebesar US$2.714.006.993, disusul ikan dan udang sebesar US$17.259.127, dan produk kayu, barang dari kayu sebesar US$3.283.280. Negara tujuan ekspor utama produk Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah Korea Selatan dengan nilai ekspor sebesar US$934.152.130 (34,07%), Tiongkok sebesar US$874.320.862 (31,89%), Jepang sebesar US$566.843.285 (20,67%), Taiwan sebesar US$130.762.876 (4,77%), dan Singapura sebesar US$109.140.962 (3,98%).

Tabel 2.130 Nilai Ekspor Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2015

No.	Jenis Komoditi	Volume (ton)	Nilai FOB (US $)
1.	Bahan bakar mineral	6,754,184,727	2,714,006,993
2.	Bijih, kerak, dan abu logam	-	-
3.	Daging dan ikan olahan	-	-
4.	Ikan dan udang	2,342,247	17,259,127
5.	Kakao	-	-
6.	Kayu, barang dari kayu	40,148,960	3,283,280
7.	Mesin-mesin/pesawat mekanik	-	-
8.	Perhiasan/permata	1,030	5,243,766
9.	Kapal laut	1,655	2,000,000
10.	Sabun dan preparat pembersih	7	63
11.	*Postal packages*	71,427	1,176
Jumlah		**6,796,750,053**	**2,741,794,405**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Tabel 2.131 Negara Tujuan Ekspor Provinsi Papua Barat, 2015

No.	Jenis Komoditi	Nilai FOB (US $)	Persentase (%)
1.	Australia	61,280	0.00
2.	Tiongkok	874,320,862	31.89
3.	Prancis	146	0.00
4.	Hongkong	5,863,873	0.21
5.	Iran	219	0.00
6.	Jepang	566,843,285	20.67

No.	Jenis Komoditi	Nilai FOB (US $)	Persentase (%)
7.	Korea Selatan	934,152,130	34.07
8.	Malaysia	38,177,829	1.39
9.	Meksiko	20,830,527	0.76
10.	Belanda	481	0.00
11.	Singapura	109,140,962	3.98
12.	Taiwan	130,762,876	4.77
13.	Thailand	37,086,924	1.35
14.	Turki	22,000	0.00
15.	Uni Emirat Arab	24,388,149	0.89
16.	Inggris	63	0.00
17.	Amerika Serikat	149	0.00
18.	Vietnam	142,650	0.01
Jumlah		**2,741,794,405**	**100.00**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

2.3.2.7. Perindustrian

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling dominan dan memiliki prospek yang sangat baik dalam perekonomian Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2011, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian adalah sebesar 32,88, kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi sebesar 32,64%, selanjutnya pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi sebesar 32,98% persen pada tahun 2013. Namun dalam 3 tahun terkahir, kontribusi sektor industri pengolahan terus mengalami penurunan setiap tahun menjadi sebesar 26,40%. Rata-rata pertumbuhan sektor industri pengolahan di Provinsi Papua Barat selama periode 2011-2016 adalah sebesar 4,15% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,46%. Seperti diketahui, proyek pengilangan gas alam cair Tangguh yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni merupakan penyumbang terbesar terhadap nilai PDRB Provinsi Papua Barat.

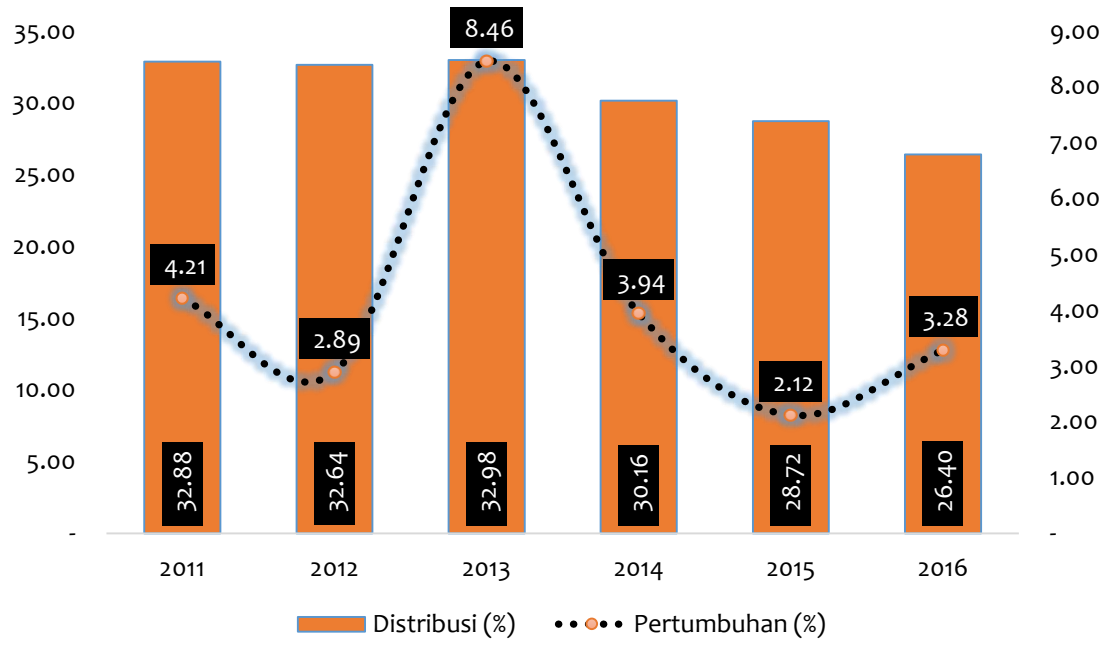

Gambar 2.84 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, 2011-2016
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Selama periode 2011-2014, jumlah indsutri besar/sedang di Provinsi Papua Barat meningkat setiap tahun dari sebanyak 24 unit pada tahun 2011 menjadi sebanyak 34 unit pada tahun 2014. Jenis industri yang paling banyak di Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 adalah industri makanan (KBLI Kode 10) yang berjumlah 14 unit dan industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya (Kode KBLI 16) yang berjumlah 8 unit. Berdasarkan kepemilikan modalnya, 3 unit industri merupakan BUMN, 30 unit industri milik swasta nasional, dan 1 unit industri milik asing. Jumlah pekerja yang terserap di Provinsi Papua Barat pada 34 unit industri besar/sedang tersebut adalah sebanyak 4.979 orang. Tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan aspek produksi berjumlah 3.778 orang yang terdiri dari 3.778 laki-laki dan 1.510 orang perempuan, sedangkan tenaga kerja lainnya (tidak berhubungan dengan aspek produksi) berjumlah 1.201 orang yang terdiri dari 1.026 orang laki-laki dan 175 perempuan. Dilihat dari persebaran unit industri, 12 unit perusahaan industri besar/sedang berada di Kota Sorong, 7 unit di Kabupaten Manokwari, dan 7 unit di Kabupaten Teluk Bintuni. Wilayah lainnya yang memiliki unit industri besar/sedang adalah Kabupaten Sorong (5 unit), Kabupaten Teluk Wondama (2 unit), dan Kabupaten Kaimana (1 unit). Gambaran

detail mengenai industri besar/sedang di Provinsi Papua Barat ditampilkan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.132 Perkembangan Industri Besar/Sedang Menurut Jenis di Provinsi Papua Barat (unit), 2011-2014

Kode KBLI	Deskripsi	2011	2012	2013	2014
10	Industri makanan	10	14	14	14
11	Industri minuman	3	3	2	3
16	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya	6	6	8	8
18	Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman	1	1	1	1
19	Industri produk dari batu bata dan pengilangan minyak bumi	2	2	1	1
23	Industri barang galian bukan logam	-	-	3	3
25	Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya	-	-	-	1
31	Industri furnitur	-	-	-	1
33	Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	2	2	2	2
Jumlah		**24**	**28**	**31**	**34**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2015

Tabel 2.133 Perkembangan Industri Besar/Sedang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (unit), 2011-2014

No.	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014
1.	Fakfak	-	-	-	-
2.	Kaimana	-	1	1	1
3.	Teluk Wondama	-	-	2	2
4.	Teluk Bintuni	7	8	7	7
5.	Manokwari	3	3	4	7
6.	Sorong Selatan	-	-	-	-
7.	Sorong	3	3	5	5
8.	Raja Ampat	-	-	-	-
9.	Tambrauw	-	-	-	-

No.	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014
10.	Maybrat	-	-	-	-
11.	Manokwari Selatan	-	-	-	-
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-
13.	Kota Sorong	11	13	12	12
Papua Barat		24	28	31	34

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2015

Tabel 2.134 Jumlah Industri Besar/Sedang Menurut Jenis dan Status Kepemilikan Modal di Provinsi Papua Barat (unit), 2014

Kode KBLI	Deskripsi	Pemerintah Pusat	Swasta Nasional	Asing	Jumlah
10	Industri makanan	1	12	1	14
11	Industri minuman	-	3	-	3
16	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya	-	8	-	8
18	Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman	-	1	-	1
19	Industri produk dari batu bata dan pengilangan minyak bumi	1	-	-	1
23	Industri barang galian bukan logam	-	3	-	3
25	Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya	-	1	-	1
31	Industri furnitur	-	1	-	1
33	Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	1	1	-	2
Jumlah		**3**	**30**	**1**	**34**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2015

Tabel 2.135 Jumlah Industri Besar/Sedang Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Modal di Provinsi Papua Barat (unit), 2014

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Pemerintah Pusat	Swasta Nasional	Asing
1.	Fakfak	-	-	-	-
2.	Kaimana	1	-	1	-
3.	Teluk Wondama	2	-	2	-
4.	Teluk Bintuni	7	-	7	-
5.	Manokwari	7	1	6	-
6.	Sorong Selatan	-	-	-	-
7.	Sorong	5	1	4	-
8.	Raja Ampat	-	-	-	-

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Pemerintah Pusat	Swasta Nasional	Asing
9.	Tambrauw	-	-	-	-
10.	Maybrat	-	-	-	-
11.	Manokwari Selatan	-	-	-	-
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-
13.	Kota Sorong	12	1	11	-
Papua Barat		34	3	31	-

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2015

Tabel 2.136 Jumlah Tenaga Kerja di Industri Besar/Sedang Menurut Jenis Industri di Provinsi Papua Barat (orang), 2014

Kode KBLI	Jumlah Tenaga Kerja	Tenaga Kerja Produksi		Tenaga Kerja Lainnya	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
10	3,054	1,174	1,219	544	117
11	83	36	17	13	17
16	1,665	936	244	448	37
18	28	15	13	-	-
19	20	19	-	1	-
23	73	53	3	15	2
25	28	17	8	2	1
31	28	18	6	3	1
33	129	80	-	42	7
Jumlah	**4,979**	**2,268**	**1,510**	**1,026**	**175**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2015

Tabel 2.137 Jumlah Tenaga Kerja di Industri Besar/Sedang Menurut Jenis Industri di Provinsi Papua Barat (orang), 2014

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja	Tenaga Kerja Produksi		Tenaga Kerja Lainnya	
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Fakfak	-	-	-	-	-
2.	Kaimana	1,073	226	698	115	34
3.	Teluk Wondama	51	38	-	12	1
4.	Teluk Bintuni	847	346	64	376	61
5.	Manokwari	401	304	75	14	8
6.	Sorong Selatan	-	-	-	-	-
7.	Sorong	1,346	669	227	421	29
8.	Raja Ampat	-	-	-	-	-
9.	Tambrauw	-	-	-	-	-
10.	Maybrat	-	-	-	-	-
11.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	-
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-
13.	Kota Sorong	1,390	765	446	130	49
Papua Barat		**5,108**	**2,348**	**1,510**	**1,068**	**182**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2015

Pada level industri kecil dan mikro di perdesaan, jumlahnya pada tahun 2014 adalah sebanyak 500 unit. Dengan wilayah hutan yang luas disertai melimpahnya sumberdaya, industri dari anyaman dan kayu merupakan jenis industri yang paling banyak berada di wilayah perdesaan Provinsi Papua Barat. Jumlah industri kecil dan mikro yang bergerak di industri anyaman sebanyak 125 unit, sedangkan jumlah industri dari kayu berjumlah 118 unit. Jenis industri lain yang berkembang di perdesaan Provinsi Papua Barat adalah dilihat dari jumlahnya adalah industri makanan dan minuman yaitu sebanyak 115 unit dan industri gerabah/keramik/batu sebanyak 74 unit.

Tabel 2.138 Banyaknya Desa Menurut Keberadaan dan Jenis Indsutri Kecil dan Mikro di Provinsi Papua Barat (unit), 2014

No.	Kabupaten/Kota	Industri dari Kulit	Industri dari Kayu	Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam	Industri Anyaman	Industri Gerabah / Keramik/ Batu	Industri dari Kain/ Tenun	Industri Makanan dan Minuman	Industri Lainnya
1.	Fakfak	-	10	-	5	1	-	4	1
2.	Kaimana	1	3	1	7	2	-	6	1
3.	Teluk Wondama	-	6	-	1	4	-	9	4
4.	Teluk Bintuni	1	18	-	6	7	2	26	13
5.	Manokwari	-	23	2	12	16	10	13	7
6.	Sorong Selatan	-	5	-	15	-	-	2	-
7.	Sorong	-	20	-	9	19	5	19	3
8.	Raja Ampat	-	10	-	51	5	-	21	4
9.	Tambrauw	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Maybrat	-	-	-	17	3	-	-	-
11.	Manokwari Selatan	-	7	-	-	5	-	-	1
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	2	-	-
13.	Kota Sorong	-	16	6	2	12	3	15	1
Papua Barat		**2**	**118**	**9**	**125**	**74**	**22**	**115**	**35**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2015

Dilihat dari persebarannya, jumlah industri kecil dan mikro paling banyak berada di Kabupaten Raja Ampat yaitu sebanyak 91 unit. Tingginya industri kecil dan mikro di Kabupaten Raja Ampat turut didorong makin meningkatnya kunjungan wisatawan di Kabupaten Raja Ampat. Usaha kecil dan mikro yang berkembang di Kabupaten Raja Ampat

adalah industri dari anyaman (51 unit), industri makanan dan minuman (21 unit), dan industri dari kayu (10 unit) dimana industri-industri tersebut berkembang karena adanya potensi pasar yang terus meningkat. Selain itu, penduduk perdesaan di Kabupaten Raja Ampat juga dituntut untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sehingga Kabupaten Raja Ampat tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga karya masyarakatnya. Wilayah lain yang memiliki banyak industri kecil dan mikro di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Manokwari (83 unit), Kabupaten Sorong (75 unit), dan KabupatenTeluk Bintuni (73 unit). Perkembangan industri kecil dan mikro pada wilayah-wilayah tersebut tentunya didorong tingginya jumlah pendatang dari luar provinsi untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh adalah pendatang di Kabupaten Manokwari secara umum berkaitan dengan urusan pemerintahan, pendatang di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong berkaitan dengan urusan bisnis dan jasa lainnya. Data statistik yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa potensi pasar yang besar pada suatu wilayah akan mendorong berkembangnya industri kecil dan mikro di suatu wilayah.

2.3.2.8. Transmigrasi

Pendanaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk urusan transmigrasi selama periode 2011-2016 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011, jumlah anggaran urusan transmigrasi adalah sebesar Rp21.236.450.000, kemudian turun menjadi Rp10.465.190.000 pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 meningkat signifikan menjadi sebesar Rp30.549.100.000. Dalam kurun waktu 2014-2015, pendaaan untuk urusan transmigrasi terus menurun setiap tahun hingga hanya menjadi Rp7.749.997.000 pada tahun 2015. Beberapa program yang dijalankan terkait urusan transmigrasi adalah program pengembangan transmigrasi lokal, program pengembangan wilayah transmigrasi, dan program pengembangan pemukiman transmigrasi lokal. Transmigrasi lokal di Provinsi Papua Barat bukan berarti perpindahan penduduk dari satu provinsi ke provinsi lain, tetapi pemecahan penduduk di satu wilayah dengan tingkat ekonomi lemah sehingga diharapkan terjadi peningkatan ekonomi keluarga yang melakukan transmigrasi.

Program yang berkaitan dengan urusan transmigrasi pada tahun 2011 adalah pembangunan rumah penduduk sebanyak 483 unit yang tersebar di 7 kabupaten yaitu Kabupaten Raja Ampat (100 unit), Kabupaten Fakfak (100 unit), Kabupaten Manokwari

(165 unit), Kabupaten Maybrat (59 unit), Kabupaten Sorong Selatan (7 unit), Kabupaten Sorong (50 unit), dan Kabupaten Teluk Wondama (2 unit). Selanjutnya pada tahun 2012, jumlah rumah yang dibangun adalah sebanyak 141 unit yang tersebar di 5 kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari (80 unit), Kabupaten Teluk Bintuni (24 unit), Kabupaten Maybrat (25 unit), Kabupaten Sorong (5 unit), dan Kabupaten Sorong Selatan (7 unit). Jumlah rumah yang dibangun pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 245 unit yang tersebar di 6 kabupaten. Rincian rumah yang dibangun pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Kabupaten Fakfak sebanyak 80 unit, Kabupaten Raja Ampat sebanyak 50 unit, Kabupaten Manokwari sebanyak 43 unit, Kabupaten Maybray sebanyak 42 unit, Kabupaten Sorong sebanyak 5 unit, dan Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 25 unit.

Program pembangunan rumah dalam urusan transmigrasi kembali dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dimana jumlah rumah yang dibangun meningkat menjadi sebanyak 339 unit. Rincian rumah yang dibangun pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Kabupaten Manokwari sebanyak 271 unit, Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 13 unit, Kabupaten Manokwari Selatan dan Raja Ampat masing-masing sebanyak 25 unit, dan Kota Sorong sebanyak 5 unit. Pada tahun 2015, jumlah rumah yang dibangun berkurang menjadi 111 unit yang tersebar di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari (64 unit), Kabupaten Teluk Bintuni (20 unit), Kabupaten Manokwari Selatan (7 unit), dan Kabupaten Sorong Selatan (20 unit).

Dalam program transmigrasi lokal, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menjamin kebutuhan beras bagi transmigran setiap bulan selama 5 tahun dimana setelah periode tersebut transmigran diharapkan mencapai kemandirian melalui pemanfaatan lahan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk usaha pertanian. Lahan usaha yang akan diberikan kepada masyarakat transmigrasi luasan arealnya tidak seragam seperti yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seluas 2 hektar, namun hal tersebut disesuaikan dengan konteks lokal. Selain program pembangunan/penataan rumah, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan, serta insentif berupa sarana prasarana produksi usaha kepada transmigran agar kapasitas pengetahuan dalam pengelolaan lahan makin meningkat. Dalam rangka peningakatan kenyamanan dan konektivitas transmigran, Pemerintah Provinsi Papua Barat membangun fasilitas pendukung seperti pos kesehatan, sarana pendidikan, KB, Posyandu, obat-obatan dan

sarana keagaamaan di lokasi pengembangan transmigrasi. Untuk mendorong program percepatan pembangunan di bidang transmigrasi, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menggodok Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan telah diserahkan ke DPRD Provinsi Papua Barat untuk ditetapkan dan disahkan sebagai produk hukum daerah.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Per Kapita Per Bulan

Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah aspek pendapatan, tingkat konsumsi, dan pola konsumsi. Besarnya tingkat pendapatan seseorang sangat menentukan besarnya tingkat dan pola konsumsi. Adanya peningkatan pendapatan biasanya akan diikuti oleh pertumbuhan pola dari komposisi pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan (*Engel's Law*). Hal tersebut terkait dengan tingkat kepuasan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan akan makanan merupakan syarat minimum untuk setiap individu bertahan hidup namun pemenuhan kebutuhan makanan akan mencapai kepuasan maksimum pada tingkat tertentu atau adanya titik kejenuhan sehingga pengeluaran makanan juga akan terbatas sampai titik jenuh tersebut. Berbeda dengan kebutuhan akan non makanan yang tak terbatas atau tidak ada titik jenuhnya, sehingga setelah kebutuhan akan makanan terpenuhi tentunya kenaikan pendapatan akan lebih cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan.

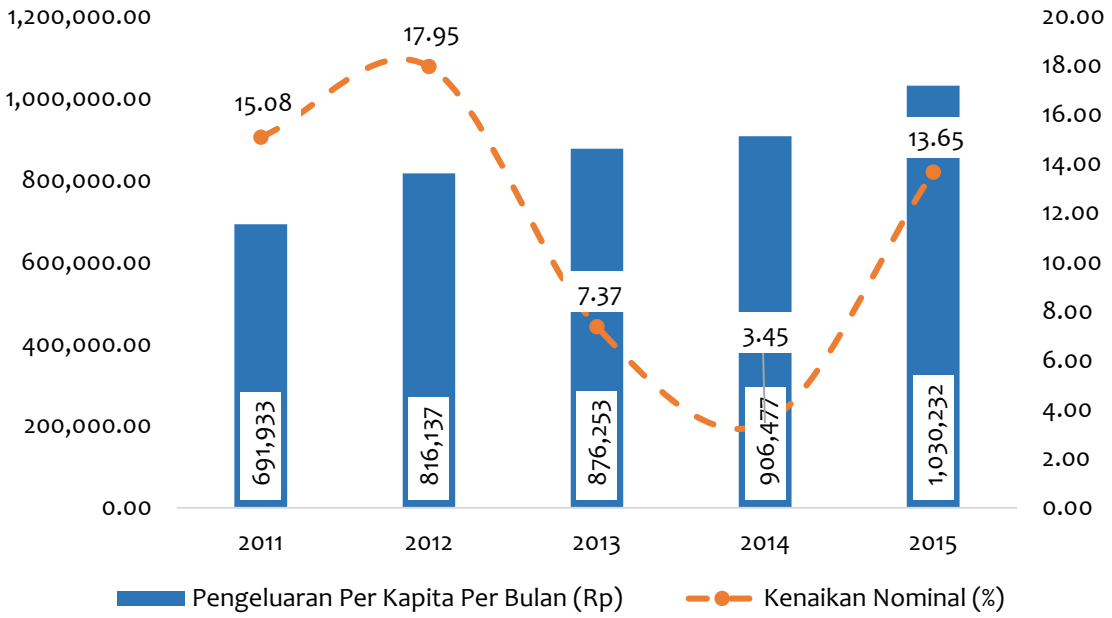

Gambar 2.85 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Provinsi Papua Barat, 2011-2015
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Selama periode 2011-2015, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan setiap tahun dari sebesar Rp691.933 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp1.030.232 pada tahun 2015. Rata-rata kenaikan pengeluaran per kapita per bulan penduduk selama periode tersebut adalah sebesar 11,50% per tahun dengan kenaikan nominal per tahun tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 17,95%, sedangkan kenaikan nominal terendah terjadi pada tahun 2014 yang hanya sebesar 3,45%. Data kenaikan pengeluaran per kapita tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan daya beli penduduk di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan. Jika melihat pengeluaran menurut kabupaten/kota pada tahun 2015, wilayah dengan pengeluaran per kapita per bulan tertinggi adalah Kabupaten Teluk Bintuni yaitu sebesar Rp1.448.706, diikuti Kota Sorong sebesar Rp1.292.238, dan Kabupaten Manokwari sebesar Rp1.187.395. Wilayah dengan pengeluaran per kapita per bulan terendah pada tahun 2015 adalah Kabupaten Pegunungan Arfak yaitu sebesar Rp256.334. Menilik data perkembangan pengeluaran per kapita per bulan pada tahun 2014-2015, beberapa daerah mengalami kondisi yang berbeda dimana terdapat daerah yang mengalami peningkatan pengeluaran, namun ada juga yang mengalami penurunan. Wilayah yang mengalami

penurunan pengeluaran per kapita per bulan adalah Kota Sorong, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Tambrauw.

Tabel 2.139 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Per bulan Menurut Kabupaten/Kota (Rp), 2011-2015

No.	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Fakfak	556,699	588,793	708,748	654,486	639,518
2.	Kaimana	547,311	665,251	790,875	819,768	897,680
3.	Teluk Wondama	342,667	579,338	712,492	714,843	877,829
4.	Teluk Bintuni	962,864	1.017.256	1,056,257	1,068,660	1,448,706
5.	Manokwari	724,317	939,559	970,522	945,437	1,187,395
6.	Sorong Selatan	502,621	486,174	513,894	707,773	783,250
7.	Sorong	487,043	500,855	507,321	630,277	912,458
8.	Raja Ampat	397,516	441,315	614,287	659,276	849,716
9.	Tambrauw	289,377	359,465	377,822	381,247	363,583
10.	Maybrat	523,568	436,179	503,789	464,747	593,414
11.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	624,936
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	256,334
13.	Kota Sorong	937,812	1.141.762	1,324,416	1,448,834	1,292,238
Papua Barat		**691,933**	**816,137**	**876,253**	**906,477**	**10,727,057**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

2.4.1.2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan

Struktur konsumsi rumah tangga dapat memberikan gambaran penting mengenai komposisi pengeluaran rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Pengeluaran rumah tangga dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu konsumsi makanan dan non makanan. Secara umum, rumah tangga dengan pengeluaran konsumsi non makanan yang lebih tinggi dapat dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Melihat data perkembangan persentase pengeluaran konsumsi yang diterbitkan BPS Provinsi Papua Barat (2016), telah terjadi pergeseran pola konsumsi rumah tangga di Provinsi Papua Barat selama periode 2011-2015. Pada tahun 2011, persentase pengeluaran konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi non makanan dimana persentase konsumsi makanan sebesar 50,19% dan persentase konsumsi non makanan sebesar 49,81%. Selanjutnya pada periode 2012-2015 persentase pengeluaran konsumsi non makanan lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi makanan dimana pada tahun 2015 persentase pengeluaran konsumsi makanan sebesar 49,77%, sedangkan persentase pengeluaran konsumsi non makanan sebesar 50,23%. Data tersebut menunjukkan bahwa

tingkat kesejahteraan pendudukan di Provinsi Papua Barat selama periode tersebut menunjukkan perbaikan.

Tabel 2.140 Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan di Provinsi Papua Barat, 2011-2015

No.	Kabupaten/ Kota	Makanan(%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Fakfak	53.05	51.09	48.54	52.25	59.04
2.	Kaimana	60.63	58.17	56.24	57.43	52.06
3.	Teluk Wondama	68.55	62.89	63.76	58.20	54.80
4.	Teluk Bintuni	50.53	50.73	54.69	54.08	46.39
5.	Manokwari	45.26	42.56	45.45	45.20	44.63
6.	Sorong Selatan	52.77	58.33	62.23	52.69	72.13
7.	Sorong	57.32	57.93	59.30	57.13	49.02
8.	Raja Ampat	65.60	61.24	54.79	57.37	51.09
9.	Tambrauw	70.38	73.62	75.20	67.82	67.28
10.	Maybrat	64.57	65.62	64.56	66.04	88.69
11.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	60.20
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	62.70
13.	Kota Sorong	46.14	45.68	41.93	40.90	45.84
Papua Barat		50.19	48.68	49.18	48.73	49.77

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Tabel 2.141 Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan di Provinsi Papua Barat, 2011-2015

No.	Kabupaten/Kota	Non Makanan (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Fakfak	46.95	48.91	51.46	47.75	40.96
2.	Kaimana	39.37	41.83	43.76	42.57	47.94
3.	Teluk Wondama	31.45	37.11	36.24	41.80	45.20
4.	Teluk Bintuni	49.47	49.27	45.31	45.92	53.61
5.	Manokwari	54.74	57.44	54.55	54.80	55.37
6.	Sorong Selatan	47.23	41.67	37.77	47.31	27.87
7.	Sorong	42.68	42.07	40.70	42.87	50.98
8.	Raja Ampat	34.40	38.76	45.21	42.63	48.91
9.	Tambrauw	29.62	26.38	24.80	32.18	32.72
10.	Maybrat	35.43	34.38	35.44	33.96	11.31
11.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	39.80
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	37.30
13.	Kota Sorong	53.86	54.32	58.07	59.10	54.16
Papua Barat		49.81	51.32	50.82	51.27	50.23

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Melihat pola pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan pada tingkat kabupaten, maka terdapat perbedaan komposisi antara beberapa wilayah dengan wilayah lainnya. Di Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kota Sorong, persentase pengeluaran konsumsi non makanan lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pengeluaran konsumsi makanan. Sementara di daerah lainnya, persentase pengeluaran konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi non makanan. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa tingkat kesejahteraan di Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, dan Kota Sorong lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Papua Barat.

2.4.1.3. Produktivitas Total Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi Provinsi Papua Barat terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari produktivitas total daerah yang menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tiga sektor ekonomi yang dominan di Provinsi Papua Barat adalah sektor industri pengolahan, disusul oleh pertambangan dan penggalian, dan sektor konstruksi. Perhitungan produktivitas total daerah digunakan untuk mengetahui tingkat produktivitas masing-masing lapangan usaha per angkatan kerja yang menunjukkan produktifnya angkatan kerja tersebut dalam mendorong suatu sektor/lapangan usaha pada suatu daerah. Angka produktivitas total daerah dihitung dengan membagi output lapangan usaha dalam PDRB dengan jumlah angkatan kerja pada lapangan usaha tersebut.

Tabel 2.142 Produktivitas Sektor dan Produktivitas Total Daerah (Rp Juta), 2011-2015

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	29.01	31.62	32.27	36.64	42.50
2.	Jasa Kemasyarakatan	81.23	92.94	90.10	107.53	100.67
3.	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	46.12	54.22	61.94	59.45	63.28

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
4.	Lainnya (Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan)	550.88	483.13	632.32	525.17	611.87
Produktivitas Total Daerah		**131.48**	**138.76**	**149.87**	**153.82**	**165.38**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Dari tabel di atas diketahui bahwa produktivitas total daerah di Provinsi Papua Barat selama periode 2011-2015 mengalami peningkatan setiap tahun dari sebesar Rp 131,48 juta pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp 165,38 juta pada tahun 2015. Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa produktivitas di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan merupakan yang terendah di antara sektor lainnya walaupun selama periode 2011-2015 menunjukkan peningkatan setiap tahun. Angka produktivitas tersebut tentunya sangat timpang dengan lapangan usaha lainnya yang meliputi berbagai lapangan usaha seperti industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan. Sebagai contoh adalah pada tahun 2015 dimana produktivitas lapangan usaha lainnya lebih tinggi 14 kali lipat dibandingkan lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan.

2.4.1.4. Nilai Tukar Petani

Pembangunan nasional pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu dalam setiap tahapan pembangunan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi tujuan utama. Sebagai negara agraris, jumlah penduduk yang terlibat dalam kegiatan pertanian/agribisnis sangat besar, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. Dalam rencana rencana jangka panjang pembangunan nasional peningkatan kesejahteraan petani telah dan akan menjadi prioritas pembangunan pertanian mendatang. Terdapat hubungan erat antara harga komoditas tanaman pangan yang diterima petani dengan harga bahan makanan yang dikonsumi dan harga konsumsi rumahtangga secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan harga yang diterima petani

terutama harga sub sektor tanaman pangan akan berdampak peningkatan harga bahan makanan dan harga konsumsi pedesaan (inflasi pedesaan). Ini berarti kebijakan kebijakan peningkatan harga pangan yang diterima petani (seperti harga dasar gabah) dalam rangka meningkatkan NTP juga berakibat meningkatkan harga konsumsi rumahtangga pedesaan (inflasi di pedesaan) dan terutama harga bahan makanan (Rusono, dkk., 2013).

Dengan struktur tataniaga pertanian yang terjadi saat ini, kenaikan harga produk yang diterima petani tidak identik dengan peningkatan pendapatan petani. Kenaikan harga yang diterima petani justru mengindikasikan kelangkaan suplai/produksi pertanian. Peningkatan NTP berarti kenaikan harga yang diterima petani (harga produsen) dengan proporsi yang lebih tinggi dari harga yang dibayar petani (harga konsumen). Pada kondisi demikian maka NTP yang konstan dinilai lebih baik, karena pada NTP yang konstan berarti perubahan harga yang diterima petani meningkat (atau menurun) secara proporsional dengan perubahan harga yang dibayar petani. Petani juga didorong untuk meningkatkan produktivitas dan nilai jualnya melalui peningkatan akses kepada teknologi (melalui bimbingan dan penyuluhan), peningkatan akses terhadap institusi layanan usahatani dan infrastruktur untuk memperoleh kemudahan sarana produksi dan peningkatan akses pasar. melalui penyediaan infrastruktur (Rusono, dkk., 2013).

Konsep perhitungan NTP merupakan pengembangan pengembangan secara makro dari konsep nilai tukar subsisten dimana petani berada pada posisi sebagai produsen dan konsumen. NTP mengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi (makanan dan non makanan) dan keperluan dalam menghasilkan produk pertanian.

Menurut BPS (2013), definisi NTP adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Kegunaan NTP adalah untuk mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan konsumsi rumah tangga. Selain itu, NTP dapat memberikan gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki

tingkat kesejahteraan petani serta menunjukkan tingkat daya saing (*competiveness*) produk pertanian dibandingkan dengan produk lain.

Secara umum penghitungan NTP menghasilkan 3 (tiga) kemungkinan yaitu nilai NTP >100 berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan petani naik lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Dengan demikian tingkat kesejahteraan petani cenderung lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode tahun dasar. NTP = 100 berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksu sama dengan kenaikan/penurunan harga barang/jas yang dikonsumsi petani. Dengan demikian tingkat kesejahteraan petani cenderung tidak mengalami perubahan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode tahun dasar. Sedangkan NTP <100 berarti petani mengalami defisit dimana kenaikan harga barang produksi relatif lebih kecil dibandingkan kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi petani. Dengan demikian tingkat kesejahteraan petani cenderung menurun dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode tahun dasar.

Tabel 2.143 Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Papua Barat Menurut Subsektor, 2012-2015

No.	NTP Menurut Subsektor	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1.	Tanaman Pangan	100.00	82.44	95.17	96.92
2.	Hortikultura	100.00	103.69	100.27	101.32
3.	Tanaman Perkebunan	100.00	113.38	103.63	101.43
4.	Peternakan	100.00	110.92	100.69	99.11
5.	Perikanan	100.00	112.97	103.48	105.43

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Nilai tukar petani dibedakan atas lima subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pada subsektor tanaman panga, NTP selama periode 2013-2015 terus mengalami peningkatan dari sebesar 82,44 pada tahun 2013 menjadi sebesar 96,92 pada tahun 2015. Dari angka tersebut, diketahui bahwa petani tanaman pangan mengalami defisit dimana kenaikan harga barang produksi relatif lebih kecil dibandingkan kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi petani tersebut. Pada subsektor hortikultura, tanaman perkebunan, dan perikanan, walaupun angka NTP cenderung fluktuatif, tetapi NTP pada ketiga subsektor tersebut selama periode 2013-2015 berada di atas angka 100 yang berarti bahwa petani mengalami surplus.

Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi dan pendapatan petani naik lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Dengan demikian tingkat kesejahteraan petani cenderung lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan pada periode tahun dasar. Pada subsektor peternakan, angka NTP selama periode 2013-2015 menunjukkan penurunan setiap tahun bahkan angka NTP pada tahun 2015 berada di bawah 100 yang berarti petani mengalami defisit dimana kenaikan harga barang produksi relatif lebih kecil dibandingkan kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi petani. Dengan demikian tingkat kesejahteraan petani pada subsektor peternakan cenderung menurun dibanding tingkat kesejahteraan pada periode tahun dasar.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Sarana Transportasi

Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan baik kegiatan ekonomi maupun sosialnya. Fasilitas transportasi khususnya jalan di Provinsi Papua Barat dapat dikatakan relatif tertinggal dibandingkan wilayah lainnya sehingga pemerintah pusat dalam RPJMN 2015-2019 terus mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah di Provinsi Papua Barat melalui pembangunan jalan baru Trans Papua Barat. Di Provinsi Papua Barat terdapat empat ruas jalan nasional yaitu ruas Manokwari-Sorong sepanjang 606,17 km, ruas Manokwari-Bintuni sepanjang 217,15 km, ruas Fakfak-Hurimber-Bomberay sepanjang 162 km, dan ruas Sorong-Mega sepanjang 76 km. Sementara itu, selain ruas eksisting yang ada, terdapat juga ruas tambahan yaitu Fakfak-Kaimana-Manokwari sepanjang 609 km dan ruas Susumuk-Bintuni sepanjang 204 km. Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, panjang jalan di Provinsi Papua Barat selama periode 2011-2014 mengalami peningkatan dari sepanjang 6.403,25 km pada tahun 2011 menjadi sepanjang 7.268,32 km pada tahun 2014. Dengan adanya peningkatan panjang jalan, diharapkan wilayah yang sebelumnya terisolir menjadi terkoneksi dimana hal tersebut nantinya akan meningkatkan perekonomian sehingga terjadi perdagangan antar daerah khususnya hasil produksi pertanian.

Sementara itu, dari sisi jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Papua Barat selama periode 2011-2014 cenderung fluktuatif bahkan mengalami penurunan. Pada tahun 2011, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 116.841 unit dan pada tahun 2014 turun menjadi sebanyak 16.738 unit. Dengan adanya peningkatan panjang jalan, namun di sisi lain jumlah kendaraan bermotor mengalami penurunan, maka rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan mengalami penurunan dari 18,25 unit per km pada tahun 2011 menjadi sebesar 2,30 unit per km pada tahun 204. Jumlah kendaraan bermotor yang cenderung terus meningkat merupakan indikator semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang memadai sejalan dengan mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Dengan terus digalakkannya pembangunan jalan trans Papua Barat oleh pemerintah pusat, maka aksesibilitas masyarakat di Provinsi Papua Barat akan meningkat baik aksesibilitas dalam provinsi (antar kabupaten) maupun trans provinsi sehingga aktivitas perekonomian mengalami peningkatan.

Tabel 2.144 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Barat, 2011-2014

No.	Tahun	Panjang Jalan (Km)	Jumlah Kendaraan (Unit)	Rasio (Unit/Km)
1.	2011	6,403.25	116,841	18.25
2.	2012	7,351.71	16,738	2.28
3.	2013	7,274.99	25,474	3.50
4.	2014	7,268.32	16,738	2.30

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Angkutan laut merupakan salah satu sarana transportasi utama yang digunakan di Provinsi Papua Barat baik untuk pergerakan manusia atau barang dalam provinsi maupun antar provinsi. Pentingnya sarana transportasi laut dikarenakan wilayah geografis Provinsi Papua Barat yang berada di sepanjang pesisir dan transportasi darat antar kabupaten belum terkoneksi dengan baik. Dengan adanya program tol laut yang dicanangkan pemerintah pusat, maka di masa mendatang pergerakan orang dan barang akan semakin meningkat denga tersedianya pelabuhan besar yang terkoneksi langsung dengan pelabuhan di pulau lain.

Data kunjungan kapal pada tahun 2015 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 telah terjadi peningkatan pergerakan kapal yang bersandar di beberapa pelabuhan laut di Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2015, jumlah kapal yang berlayar meningkat menjadi 7.850 pelayaran dibandingkan pada tahun 2011 yang hanya sebanyak 617 pelayaran. Dari

sisi pergerakan orang yang menggunakan kapal juga terjadi peningkatan yang signifikan dari sebanyak 562.734 penumpang pada tahun 2011 menjadi sebanyak 1.277.498 penumpang pada tahun 2015. Pergerakan barang melalui aktivitas bongkar dan muat di pelabuhan laut juga meningkat dari sebesar 550.686 ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 2.585.532 ton pada tahun 2014. Kunjungan kapal yang terus meningkat di pelabuhan merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan terjadinya peningkatan aktivitas perekonomian daerah.

Tabel 2.145 Jumlah Penumpang dan Barang yang terangkut melalui Pelabuhan di Provinsi Papua Barat, 2011-2015

Tahun	Jumlah Kapal	Jumlah Penumpang (orang)			Jumlah Barang (Ton)		
		Debarkasi	Embarkasi	Jumlah	Bongkar	Muat	Jumlah
2011	617	256,610	306,124	562,734	475,907	74,779	550,686
2012	681	313,010	326,893	639,903	454,365	63,119	517,484
2013	767	294,800	276,425	571,225	1,526,507	146,028	1,672,535
2014	431	348,444	276,425	624,869	2,402,814	182,718	2,585,532
2015	7,850	613,139	664,359	1,277,498	-	-	-

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Sarana transportasi udara di Provinsi Papua Barat merupakan akses jalur transportasi utama yang menghubungkan Provinsi Papua Barat dengan provinsi lain dimana bandara utama yang digunakan adalah Bandara Rendani di Kabupaten Manokwari dan Bandara Domine Eduard Osok di Kota Sorong. Selain itu, pergerakan orang dengan menggunakan pesawat semakin tinggi dengan adanya pengembangan beberapa bandara di beberapa kabupaten seperti Bandara Torea di Kabupaten Fakfak, Bandara Utarum di Kabupaten Kaimana, Bandara Wasior di Kabupaten Teluk Wondama, Bandara Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan, Bandara Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni, dan Bandara Marinda di Kabupaten Raja Ampat. Melihat data yang ada, selama periode 2011-2015, frekuensi penerbangan di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya 23.246 penerbangan pada tahun 2011 menjadi sebanyak 31.571 penerbangan pada tahun 2015. Dengan adanya peningkatan frekuensi penerbangan, jumlah penumpang baik yang datang maupun berangkat juga mengalami peningkatan dari sebanyak 680.933 penumpang (2011) menjadi sebanyak 1.333.077 penumpang (2015). Hal yang sama juga terjadi pada jumlah barang terangkut yang meningkat dari sebesar 8.813.755 kg (2011) menjadi sebesar 16.600.939 kg (2015).

Tabel 2.146 Jumlah Penumpang dan Barang yang terangkut melalui Bandar Udara di Provinsi Papua Barat, 2011-2015

Tahun	Frekuensi Penerbangan	Jumlah Penumpang (orang)			Jumlah Barang (Kg)		
		Datang	Berangkat	Jumlah	Bongkar	Muat	Jumlah
2011	23,246	333,428	347,505	680,933	4,494,295	4,319,460	8,813,755
2012	27,774	485,541	513,301	998,842	6,816,186	5,512,847	12,329,033
2013	28,578	569,770	612,397	1,182,167	7,526,652	7,055,851	14,582,503
2014	28,471	564,076	609,132	1,173,208	7,282,622	7,029,606	14,312,228
2015	31,571	647,018	686,059	1,333,077	8,542,010	8,058,929	16,600,939

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

2.4.2.2. Fasilitas Jasa Perbankan

Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut segala urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Selain memberikan kemudahan fasilitas bertransaksi dan sebagai tempat penyedia dana bagi yang membutuhkan dana kredit, perbankan juga menjadi sarana yang aman untuk bertransaksi. Perkembangan kelembagaan keuangan masih didominasi oleh lembaga keuangan pemerintah dan swasta, sedangkan lembaga keuangan yang dikelola masyarakat masih sangat terbatas. Selama periode 2011-2014, terjadi peningkatan jumlah kantor bank di Provinsi Papua Barat untuk semua jenis kelompok bank. Pada bank yang dimiliki BUMN dan BUMD, jumlah kantornya meningkat dari sebanyak 86 unit pada tahun 2011 menjadi sebanyak 105 unit pada tahun 2014. Sementara itu, jumlah kantor bank swasta nasional juga meningkat dari sebanyak 22 unit (2011) menjadi sebanyak 27 unit (2014), sedangkan jumlah kantor BPR meningkat dari hanya 1 unit (2011) menjadi sebanyak 4 unit (2014). Peningkatan jumlah kantor bank tersebut dapat menjadi indikasi bahwa perekonomian Provinsi Papua Barat menunjukkan peningkatan dimana penduduk memerlukan jasa perbankan sebagai perantara dalam aktivitas ekonominya.

2.4.2.3. Fasilitas Akomodasi dan Rumah Makan

Dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata di Provinsi Papua Barat, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan merupakan prasyarat utama untuk mendukung hal tersebut. Ketersediaan penginapan sangat menunjang dalam

pelaksanaan pembangunan perekonomian suatu daerah. Banyaknya penginapan dapat menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua Barat tentunya sangat didukung dengan meningkatnya sarana akomodasi dimana jumlah hotel selama periode 2009-2015 jumlahnya mengalami peningkatan dari sebanyak 73 hotel (2009) menjadi sebanyak 125 hotel (2015). Kelas hotel bintang di Provinsi Papua Barat jumlahnya mengalami peningkatan dari sebanyak 8 unit pada tahun 2009 menjadi sebanyak 15 unit pada tahun 2015, sedangkan hotel kelas melati bertambah dari sebanyak 65 unit menjadi 110 unit. Hingga tahun 2015, sebagian besar hotel bintang di Provinsi Papua Barat berada di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari dengan jumlah masing-masing sebanyak 9 dan 3 unit, sedangkan wilayah lain yang memiliki kelas hotel bintang adalah Kabupaten Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni dengan jumlah masing-masing sebanyak 1 unit. Fasilitas rumah makan juga merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan pariwisata dimana tren yang ada saat ini menunjukkan bahwa turis dalam berwisata tidak hanya menikmati panorama yang ada, tetapi juga menikmati kuliner yang tersedia. Melihat perkembangan di wilayah perkotaan, segala jenis rumah makan baik yang menyajikan berbagai makanan tradisional Indonesia maupun masakan asing terus tumbuh di Provinsi Papua Barat. Sementara di wilayah perdesaaan, juga terus berkembanga rumah makan dimana pada tahun 2014 berjumlah 17 unit, sedangkan yang berbentuk warung/kedai makanan dan minuman berjumlah 168 unit.

2.4.2.4. Ketersediaan Listrik, Air Bersih, dan Sarana Komunikasi

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan energi, maka pembangunan sarana dan prasarana energi juga menjadi kebutuhan vital dan mendesak di Provinsi Papua Barat. Dalam periode 2015-2019, pemerintah pusat memprioritaskan pengembangan dan pembangunan sistem dan energi kelistrikan di Provinsi Papua Barat di 5 lokasi yaitu: PLTU Andai (14 MW), PLTU Klalin (30 MW), PLTMG mobile Manokwari (20 MW), PLTMG Fakfak (10 MW), dan PLTMG Bintuni (10 MW). Dengan meningkatnya produksi listrik melalui pembangunan pembangkit diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Papua Barat. Selain itu, peningkatan produksi listrik juga dapat mendorong tumbuhnya industri dimana hal tersebut nantinya akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan perekonomian. Pada tahun 2015, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber

penerangan listrik PLN di Provinsi Papua Barat adalah sebesar adalah sebesar 75,95%. Wilayah dengan penerangan listrik PLN tertinggi di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah Kota Sorong (99,39%), Kabupaten Manokwari (98,90%), Kabupaten Sorong (89,78%), Kabupaten Sorong Selatan (87,85%), dan Kabupaten Teluk Bintuni (76,65%).

Persentase umah tangga yang dapat memperoleh sumber air minum bersih di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 60,47%. Sumber air minum bersih tersebut berasal dari ledeng, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan air mata terlindung. Wilayah dengan persentase sumber air minum bersih tertinggi berada di Kota Sorong dengan persentase mencapai 91,46%. Wilayah lain dengan persentase sumber air minum bersih >50% di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Manokwari (63,73%), Kabupaten Raja Ampat (58,73%), Kabupaten Manokwari Selatan (57.98%), Kabupaten Teluk Bintuni (56,76%), Kabupaten Kaimana (53,04%), dan Kabupaten Fakfak (50,12%). Untuk sumber air minum layak, persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak sebesar 72,95%. Sumber air minum layak tersebut berasal dari air kemasan, air isi ulang, sumu bor./pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak tertinggi berada di Kota Sorong yaitu sebesar 94,69%, diikuti Kabupaten Sorong sebesar 90,27%, dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 88,89%.

Tabel 2.147 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih, dan Sumber Air Minum Layak (%), 2015

No.	Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum Bersih	Sumber Air Minum Layak
1.	Fakfak	50.12	74.85
2.	Kaimana	53.04	76.78
3.	Teluk Wondama	25.26	5.70
4.	Teluk Bintuni	56.76	88.89
5.	Manokwari	63.73	64.07
6.	Sorong Selatan	45.74	62.34
7.	Sorong	41.44	90.27
8.	Raja Ampat	58.73	63.28
9.	Tambrauw	29.33	29.33
10.	Maybrat	31.62	31.63
11.	Manokwari Selatan	57.98	60.13
12.	Pegunungan Arfak	31.64	31.64
13.	Kota Sorong	91.46	94.69
Papua Barat		**60.47**	**59.51**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Telepon seluler memegang peranan penting sebagai sarana komunikasi penduduk dan juga sebagai sarana utama akses internet. Persentase penduduk yang memiliki HP di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 55,45%. Melihat persebaran kepemilikan HP pada tiap wilayah, memang masih terdapat ketimpangan yang disebabkan terbatasnya fasilitas BTS. Wilayah dengan penduduk yang memiliki HP >50% pada tahun 2015 adalah Kota Sorong (73,06%), diikuti Kabupaten Manokwari (66,25%), Kabupaten Sorong (57,43%), dan Kabupaten Teluk Bintuni (53,90%). Internet dalam kehidupan modern merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat yang memegang peranan penting sebagai sumber informasi, pengiriman pesan, hiburam, fasilitas komersial, fasilitas finansial, dan kegunaan lainnya. Persentase pendudukan yang menggunakan internet pada tahun 2015 dapat dikatakan relatif rendah yaitu hanya sebesar 31,14%. Dengan fasilitas internet yang cukup memadai, Kota Sorong menempati peringkat pertama yang penduduknya paling banyak mengakses internet yaitu sebesar 31,14%.

Tabel 2.148 Persentase Penduduk yang Memiliki HP dan Mengakses Internet, 2015

No.	Kabupaten/Kota	Memiliki HP (%)	Mengakses Internet (%)
1.	Fakfak	43.63	12.44
2.	Kaimana	45.12	10.99
3.	Teluk Wondama	41.65	11.20
4.	Teluk Bintuni	53.90	16.90
5.	Manokwari	66.25	18.64
6.	Sorong Selatan	43.00	7.29
7.	Sorong	57.43	16.84
8.	Raja Ampat	45.76	15.82
9.	Tambrauw	25.32	0.48
10.	Maybrat	30.85	4.56
11.	Manokwari Selatan	42.93	4.09
12.	Pegunungan Arfak	11.26	-
13.	Kota Sorong	73.06	31.14
Papua Barat		**55.44**	**17.72**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

2.4.2.5. Sistem Perkotaan

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyusun perencanaan ruang dan wilayah dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat 2013-2013. Dalam dokuem tersebut, pusat kegiatan nasional (PKN) di Provinsi Papua Barat berada di

Kota Sorong. Fungsi Kota Sorong adalah sebagai (a) simpul kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya pada skala regional; (b) pelayanan jaringan transportasi (udara, darat, laut) untuk mewujudkan struktur ruang wilayah nasional, provinsi dengan orientasi ke PKN lain dan PKW terkait; (c) pusat jasa, pengolahan dan pengumpul barang secara nasional atau melayani beberapa provinsi; (d) simpul transportasi secara nasional atau meliputi beberapa provinsi; (e) pusat jasa keuangan yang melayani nasional atau beberapa provinsi.

Penetapan Kota Sorong sebagai PKN memperhatikan perkembangan kegiatan perkotaan yang sangat pesat, terutama pada perdagangan dan jasa yang berskala nasional dan internasional. Struktur perekonomian Kota Sorong mulai bergeser menuju sektor sekunder dan tersier, diantaranya industri pengolahan, perdagangan, jasa dan pariwisata walaupun secara umum masih didominasi oleh sektor pertanian. Skala pelayanan bersifat nasional dan internasional yang dimiliki Kota Sorong telah mampu menempatkan kawasan ini sesuai fungsinya sebagai PKN. Aksesibilitas dari dan menuju Kota Sorong yang semakin meningkat telah mendorong meningkatnya pergerakan orang dan barang. Pelabuhan dan bandar udara Domine Eduard Osok di Kota Sorong merupakan salah satu gerbang ekspor-impor berskala nasional dan internasional.

Penentuan PKW di Provinsi Papua Barat yaitu Kabupaten Manokwari, Fakfak dan Ayamaru yang merupakan pusat pertumbuhan utama dalam skala regional dan memiliki orientasi nasional. Kabupaten Manokwari saat ini berfungsi sebagai PKW, mengingat ditetapkannya Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat. Fungsi kota PKW adalah pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten, pelayanan jaringan telekomunikasi dan energi yang mendukung pelayanan provinsi, pelayanan jaringan telekomunikasi dan energi yang mendukung pelayanan provinsi, dan elayanan jaringan transportasi (udara, darat, sungai) untuk mewujudkan sistem antar kota. Upaya mendorong pemantapan fungsi PKN Kota Sorong perlu didukung dengan upaya mendorong pemantapan fungsi PKW terutama dalam memberikan pelayanan skala regional yang dapat mengurangi pergerakan langsung dari PKL dan kawasan perdesaan ke PKN. Pengembangan infrastruktur dan pelayanan yang

bersifat lokal diharapkan dapat dipenuhi oleh PKW sebagai pusat koleksi dan distribusi yang dapat melayani kebutuhan kawasan andalan terkait.

Selain pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah menetapkan Pusat Kegiatan Lokal. PKL untuk Provinsi Papua Barat ditentukan di Teminabuan (Sorong Selatan), Aimas (Kabupaten Sorong), Kaimana (Kaimana), Bintuni (Teluk Bintuni), Waisai (Raja Ampat), Raisei (Teluk Wondama), Fef (Tambrauw), dan Kumurkek (Maybrat). Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa distrik. Dalam upaya mendorong perkembangan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan kaitannya dengan kampung pusat produksi, rencana pengembangan sistem perkotaan menetapkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam sistem perkotaan provinsi sebagai pendukung berfungsinya Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan mengurangi pergerakan dari desa pusat produksi langsung ke Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) merupakan kawasan yang dalam jangka waktu tertentu akan diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKLp untuk Provinsi Papua Barat ditentukan di Kabupaten Manokwari Selatan (Ransiki) dan Anggi (Pegunungan Arfak). Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Provinsi papua barat mempunyai dua Pusat Kegiatan Strategis Nasional, yaitu Pulau Fani Kawasan Perbatasan Laut RI sebagai pulau terluar, dan Kawasan Raja Ampat sebagai Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati.

2.4.2.6. Luas Wilayah Produktif dan Industri

Wilayah produktif di Provinsi Papua Barat meliputi lahan yang digunakan sebagai budidaya pertanian. Luas keseluruhan wilayah produktif di Provinsi Papua Barat mendasarkan pada kondisi penggunaan lahan eksisting dalam RTRW Provinsi Papua Barat adalah seluas 2.203,23 km^2. Lahan produktif tersebut terdiri dari lahan perkebunan campuran seluas 425,97 km^2, lahan perkebunan seluas 630,37 km^2, ladang seluas 540,09

km², lahan tanaman campuran seluas 485,96 km², dan sawah seluas 120,84 km². Luas wilayah produktif di Provinsi Papua Barat diperkirakan akan mengalami perubahan di masa mendatang karena adanya perubahan peruntukan lahan tersebut khususnya untuk permukiman penduduk.

Untuk bidang industri, pemerintah pusat dalam RPJMN 2015-2019 telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Sorong dan Kawasan Industri Petrokimia di Kabupaten Teluk Bintuni. Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Terdapat empat daerah di Pulau Papua yang didorong untuk dikembangkan menjadi KEK, ketiganya berada di Provinsi Papua Barat, yaitu Sorong (persiapan penetapan KEK), Teluk Bintuni (persiapan operasional), dan Raja Ampat (usulan). Fokus pengembangan KEK di Papua Barat adalah pada industri petrokimia, pengembangan industri pengolahan tambang mineral, serta kawasan industri Teluk Bintuni.

Pengembangan kegiatan ekonomi kawasan strategis Provinsi Papua Barat fokus pada pengembangan komoditas unggulan wilayah sebagai berikut: (1) Pengembangan kawasan industri petrokimia; (2) Pengembangan Industri berbasis migas dan pupuk di Teluk Bintuni; (3) Peningkatan produktivitas ekspor untuk produk minyak-gas, pengolahan pertambangan mineral, pertanian/ perkebunan, dan hasil laut; (4) Pengembangan kawasan pertanian di Karas dan Teluk Arguni; (5) Pengembangan sentra ternak sapi Pola Ranch di Bomberai, Kebar, dan Salawati; (6) Pengembangan Pala di Fakfak; (7) Pengembangan sagu rakyat dan investasi industri komoditas sagu di Sorong Selatan; (8) Pengembangan kawasan wisata bahari terpadu di kawasan Raja Ampat, dan kawasan wisata religi Mansinam; (9) Pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi kecil dan menengah guna mendukung potensi sektor pariwisata, terutama industri kreatif dan makanan olahan khas wilayah Sorong, Manokwari, dan Fak-fak; serta (10) Pembinaan terhadap mutu produk usaha kecil dan menengah di Kawasan Sorong, Manokwari, dan Fakfak. Salah satu syarat pengembangan KEK adalah ketersediaan investor yang akan menggerakkan investasi di wilayah tersebut. KEK bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat melalui hadirnya aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah. Terbentuknya KEK diharapkan semakin

membangun daya saing wilayah dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan Industri (KI) bertujuan untuk mengendalikan tata ruang, meningkatkan upaya industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri, meningkatkan daya saing investasi, serta memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait. Arah pengembangan KI di luar Pulau Jawa diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi dan meningkatkan efisiensi sistem logistik dan KI sebagai pergerakan utama pusat-pusat pertumbuhan baru. KI di Papua Barat terletak di Desa Onar Baru Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni. Luas lahan KI sekitar 2122 hektar, dengan basis industri pada pupuk dan petrokimia. Pembangunan industri petrokimia di Kabupaten Teluk Bintuni didasarkan pada potensi yang dimilikinya, yaitu potensi gas bumi di Teluk Bintuni yang sudah diidentifikasi sebesar 23,8 TSCF, sekitar 12,9 TSCF sudah dialokasikan untuk 2 kilang LNG, dan sisanya sebesar 10,9 TSCF untuk 1 train LNG. Selain itu, ditemukan juga cadangan baru sebesar 6-8 TSCF. Potensi gas bumi tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku industri ammonia untuk mendukung industri urea dan bahan baku industri methanol untuk mendukung industri pusat olefin (Bappenas, 2015).

2.4.2.7. Luas Wilayah Kebanjiran dan Kekeringan

Mendasarkan pada Indeks Risiko Bencana Indonesia yang diterbitkan BNPB (2015), paparan risiko bencana kebanjiran di Provinsi Papua Barat adalah seluas 705.743 ha, sedangkan paparan risiko bencana kekeringan seluas 4.744.689 ha. Wilayah dengan risiko bencana banjir tinggi di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, dan Kota Sorong. Sementara itu, wilayah dengan risiko bencana kekeringan tinggi di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, dan Raja Ampat.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Penanaman modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam pembangunan karena penanaman modal menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Penanaman

modal berperan sebagai faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dalam kegiatan penanaman modal, setiap penanam modal selalu mengharapkan keuntungan, sedangkan pemerintah berkeinginan agar kegiatan tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal maka perlu upaya penguatan daya saing perekonomian nasional, karena itu pemerintah perlu menyusun kebijakan yang menyelaraskan antara harapan penanam modal dengan keinginan pemerintah agar berjalan beriringan dan mencapai hasil yang optimal.

Kebijakan penanaman modal di Indonesia telah menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Bukan hanya pada skala nasional, setiap daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan kebijakan penanaman modal dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif bagi terciptanya kemudahan investasi. Dukungan pemerintah dalam meningkatkan investasi di Indonesia diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Investasi asing dan domestik yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi.

2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Tingkat kriminalitas di suatu wilayah akan mempengaruhi iklim investasi di wilayah tersebut. Dengan tingkat kriminalitas yang rendah pada suatu wilayah, maka akan tercipta iklim investasi yang kondusif mengingat dengan kondisi keamanan yang terjamin maka investor akan lebih tenang dalam menanamkan modalnya terutama terkait dengan investasi jangka panjang pada sektor riil. Selain itu, dengan rendahnya kriminalitas, maka ketidakpastian dalam berusaha dapat diminimalkan karena terawasinya pungutan liar yang sangat memberatkan bagi investor. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan

kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

Selama periode 2012-2015, angka kriminalitas di Provinsi Papua Barat termasuk dalam kategori yang rendah. Pada tahun 2012, angka kriminalitas di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 0,23 persen, kemudian meningkat menjadi sebesar 0,27 persen pada 2013, selanjutnya angka kriminalitas pada tahun 2014 adalah sebesar 0,24 persen, dan pada tahun tahun 2015 meningkat kembali menjadi 0,26%. Jumlah tindak pidana yang diterima pihak kepolisian pada tahun 2012 adalah sebanyak 1.825 kasus, kemudian meningkat menjadi sebanyak 2.262 kasus pada tahun 2013, selanjutnya turun menjadi sebanyak 2.039 kasus pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 jumlah tindak pidana meningkat menjadi 2.281 kasus. Pada tahun 2015, jumlah tindak pidana tertinggi berada di Kabupaten Manokwari yaitu sebanyak 575 kasus, diikuti Kota Sorong sebanyak 555 kasus, dan Kabupaten Sorong sebanyak 297 kasu, sedangkan tindak pidana terendah terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu sebanyak 89 kasus.

Tabel 2.149 Angka Kriminalitas di Provinsi Papua Barat, 2012-2015

Tahun	Penduduk	Tindak Pidana (kasus)	Angka Kriminalitas (%)
2012	806,995	1,825	0.23
2013	828,293	2,262	0.27
2014	849,809	2,039	0.24
2015	871,510	2,281	0.26

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

2.4.3.2. Pajak dan Retribusi Daerah

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat terus mendorong daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan prinsip pada pelayanan optimal, namun tidak memberatkan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari PAD dimaksudkan agar daerah menjadi mandiri dan tidak bergantung pada dana transfer yang diberikan pemerintah pusat. Dengan adanya peningkatan PAD yang disertai dengan meningkatnya kontribusi PAD pada pendapatan daerah, maka daerah tersebut memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mendorong pembangunan. Sumber-sumber PAD yang dimiliki oleh daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah.

Tabel 2.150 Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, 2015

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)
2011	119,509,796,365	1,137,679,215
2012	142,529,273,075	1,420,766,825
2013	184,122,826,272	1,944,899,940
2014	225,585,407,972	1,206,600,394
2015	234,918,446,737	1,075,786,880

Sumber: LKPJ Provinsi Papua Barat, 2011-2015

Pungutan pajak dan retribusi daerah di Provinsi Papua Barat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi terkait dengan pajak daerah terdiri dari pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaaan, dan pajak rokok. Sementara untuk jenis retribusi, pemerintah provinsi memiliki kewenangan pemungutan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu dimana jenis retribusi tersebut memiliki turunannya masing-masing dan ragamnya sesusi dengan jenis pelayanan yang diberikan daerah. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, penerimaan PAD yang berasal dari pajak daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar Rp 119,51 miliar pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp 234,92 miliar pada tahun 2015. Jika penerimaan pajak daerah terus meningkat setiap tahun, penerimaan retribusi daerah justru fluktuatif bahkan cenderung menurun. Pada tahun 2011, penerimaan retribusi daerah adalah sebesar Rp 1,14 miliar, kemudian meningkat selama 2 tahun selanjutnya hingga mencapai Rp 1,94 miliar pada tahun 2013, namun pada tahun 2014-2015 penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan menjadi Rp 1,08 miliar.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kondisi aspek daya saing daerah Provinsi Papua Barat terkait dengan sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja, tingkat ketergantungan penduduk, dan kapasitas aparatur pemerintahan.

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja baik di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan data BPS Provinsi Papua Barat (2016), sebagian besar penduduk bekerja di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 memiliki pendidikan yang rendah (wajib belajar 9 tahun). Persentase penduduk bekerja yang tidak/belum pernah sekolah sebesar sebesar 6,42%, tidak/belum tamat SD sebesar 12,12%, dan lulusan SD sebesar 20,95%. Sementara persentase penduduk bekerja yang memiliki pendidikan perguruan tinggi hanya sebesar 11,96%. Penduduk bekerja yang memiliki pendidikan SMP sebesar 16,49%, SMA/SMK sebesar28,88%, dan diploma sebesar 3,19%.

Tabel 2.151 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2015

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	24,396
Tidak/Belum Tamat SD	46,091
SD/MI	79,606
SMP/MTS	62,717
SMA/SMK/MA	109,797
Diploma	12,145
S1/S2/S3 (Universitas)	45,474
Jumlah	**380,226**
Rasio Tenaga Kerja (S1/S2/S3)	**11.96**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

2.4.4.2. Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, diperlukan aparatur pemerintahan yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan

nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan tugas aparatur pemerintahan yaitu untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Untuk dapat menjalankan tugs-tugas dimaksud maka setiap aparatur harus memiliki manajemen yang baik, yaitu manajemen yang dapat memperbandingkan (*merit system*) antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh calon pejabat pada saat rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi jabatan. Kebijakan pembangunan kepegawaian daerah diarahkan pada penyiapan ketersediaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional di semua instansi dengan menata keseimbangan jumlah aparatur dengan beban kerja di setiap satuan kerja pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur melalui pengelolaan sumberdaya aparatur berdasarkan standar kompetensi.

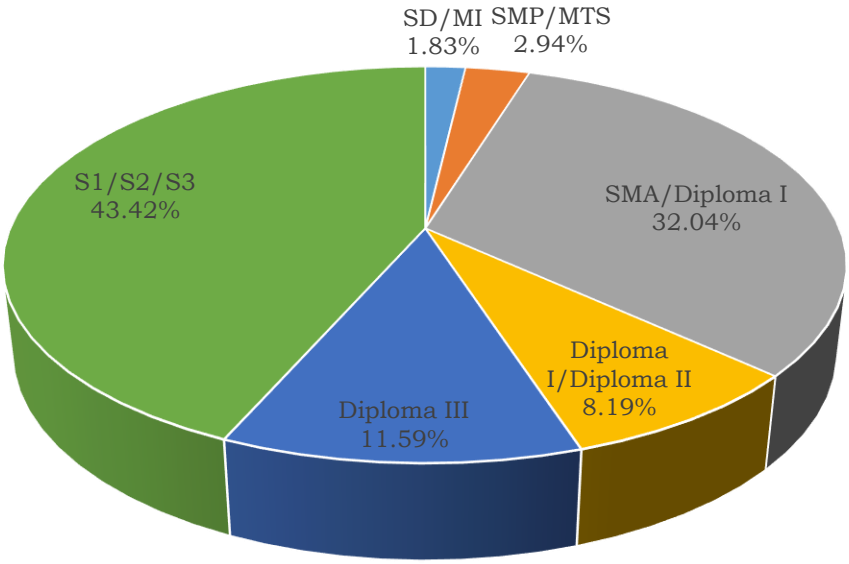

`

Gambar 2.86 Persentase Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan, 2015
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Hingga tahun 2015, jumlah aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 38.064 orang yang terdiri dari 19.650 laki-laki dan 18.414 perempuan. Tingkat pendidikan aparatur pemerintahan di Provinsi Papua Barat dapat dikatakan masih kurang baik dimana sebagain besar aparatur pemerintah memiliki pendidikan di bawah Diploma II

yaitu sebanyak 17.127 orang. Jumlah aparatur sipil negara yang memiliki pendidikan Diploma III sebanyak 4.411 orang, dan pendidikan S1/S2/S3 sebanyak 16.526 orang. Diharapkan pada masa mendatang, kualitas pendidikan aparatur di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dimana hal tersebut nantinya akan bermanfaat bagi peningkatan kapasitas SDM dan pengetahuan aparatur menghadapi isu terkini serta pada optimalisasi pelayanan bagi masyarakat.

2.4.4.3. Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio*, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan di Provinsi Papua Barat selama periode 2011-2015 dapat dikatakan mengalami penurunan. Pada tahun 2011, rasio ketergantungan di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 54,84%, kemudian meningkat menjadi 55,77% pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013-2015, rasionya menurun menjadi 51,13%. Nilai rasio ketergantungan Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 sebesar 51,13%. Hal ini berarti bahwa diantara 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung beban hidup

sekitar 51 penduduk usia belum produktif 0-14 tahun dan usia tidak produktif 65 tahun ke atas. Rasio ketergantungan di Provinsi Papua Barat dapat dikatakan baik karena nilainya masih di bawah 62,33% karena beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif rendah. Terkait dengan IPM, penurunan angka ketergantungan akan memberi keluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap naiknya angka IPM, jika mereka dapat memperoleh akses untuk pengembangan dirinya. Seperti akses ke pendidikan dan pelatihan, fasilitas kesehatan, dan akses ke sumber modal untuk meningkatkan usahanya. Jika mereka tidak mendapatkan akses tersebut, maka bonus demografi yang ditandai dengan makin menurunnya angka ketergantungan justru akan menjadi malapetaka. Sebuah bencana bagi suatu daerah karena, banyak penduduk usia produktif yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai pekerjaan, akibatnya bisa jadi sering terjadi tindakan kriminalitas.

Tabel 2.152 Perkembangan Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua Barat, 2011-2015

Kategori	2011	2012	2013	2014	2015
Belum Produktif	264,931	278,808	264,202	271,070	277,996
Produktif	509,564	524,031	548,061	562,294	576,649
Tidak Produktif	14,518	13,441	16,030	16,445	16,865
Dependency Ratio	**54.84**	**55.77**	**51.13**	**51.13**	**51.13**

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Mendasarkan pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, analisis gambaran umum kondisi Provinsi Papua Barat terkait dengan evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan ditampilkan pada Tabel 2.153.

Tabel 2.153 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1)	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	3.63	7.36	5.38	4.15	4.52	-	-
1.1.1.2	Laju Inflasi	4.99	7.28	1.74	1.15	0.63	-	-
1.1.1.3	PDRB per Kapita (Rp Juta)	55.04	63.98	68.46	72.16		-	-
1.1.1.4	Indeks Gini	0.425	0.431	0.439	0.44	0.373	-	-
1.1.1.5	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)	333,485	363,929	397,662	441,569		-	-
1.1.1.6	Persentase Penduduk Miskin	28.2	26.67	27.13	25.82		-	-
1.1.1.7	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	229.99	224.27	229.43	225.36		-	-
1.1.1.8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	7.23	6.35	6.2	6.24		-	-
1.1.1.9	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	2.65	2.16	2.05	2.33		-	-
1.1.1.10	Jumlah Perkara Pidana	1.825	2.262	2.039	2.281		-	-
1.1.1.11	Jumlah Pidana Diselesaikan	268	1.619	1.476	551		-	-
1.1.1.12	Persentase Perkara Pidana Diselesaikan	14.68	71.57	72.39	24.16		-	-
1.2.	Kesejahteraan Sosial						-	-
1.2.1	Pendidikan						-	-
1.2.1.1	Angka Melek Huruf	93.74	94.14				-	-
1.2.1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	6.87	6.91	6.96	7.01	7.06	-	-
1.2.1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105.21	105.27	109.35			-	-
1.2.1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	90.95	87.71	87.86			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1.2.1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA	70.48	73.15	83.11			-	-
1.2.1.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) PerPenduduk Usia Kerjaan Tinggi	25.99	32.34	34.97			-	-
1.2.1.7	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan-Tidak Mempunyai Ijazah	19.47	24.7	23.2			-	-
1.2.1.8	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan-SD/MI	23.82	23.46	22.05			-	-
1.2.1.9	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan-SLTP/MTs	19.46	18.33	18.08			-	-
1.2.1.10	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan-SMA/MA	21.67	19.65	20.34			-	-
1.2.1.11	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan-SMK	5.36	4.61	5.42			-	-
1.2.1.12	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan-Diploma I/II	0.67	0.5	0.56			-	-
1.2.1.13	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan-Akademi/Diploma III	1.99	1.85	1.64			-	-
1.2.1.14	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan-Diploma IV/Universitas/S2/S3	7.56	6.9	8.69			-	-
1.2.1.15	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	88.97	89.94	92.76	92.9		-	-
1.2.1.16	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	59.76	60.99	68.18	68.29		-	-
1.2.1.17	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA	46.46	54.2	62.29	62.4		-	-
1.2.1.18	Angka Partisipasi Murni (APM) PerPenduduk Usia Kerjaan Tinggi	15.75	20.1	24.19	20.55		-	-
1.2.2	Kesehatan						-	-
1.2.2.1	Jumlah Anak Lahir 0	9.03	8.3	7.65			-	-
1.2.2.2	Jumlah Anak Lahir 1	20.66	20.13	20.95			-	-
1.2.2.3	Jumlah Anak Lahir 2	24.4	22.46	23.46			-	-
1.2.2.4	Jumlah Anak Lahir ≥3	45.92	49.11	47.93			-	-
1.2.2.5	Jumlah Anak Meninggal 0	83.99	81.62	82.92			-	-
1.2.2.6	Jumlah Anak Meninggal 1	10.02	11.26	10.49			-	-
1.2.2.7	Jumlah Anak Meninggal 2	3.73	4.03	3.92			-	-
1.2.2.8	Jumlah Anak Meninggal ≥3	2.26	3.08	2.67			-	-
1.2.2.9	Angka Harapan Hidup	64.9	65.1	65.1	65.2	65.3	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1.2.3.	Tenaga Kerja						-	-
1.2.3.1	Rasio Penduduk yang Bekerja	67.12	66.41	68.3			-	-
2)	PELAYANAN UMUM						-	-
2.1	Pelayanan Urusan Wajib						-	-
2.1.1	Pendidikan						-	-
2.1.1.1	Pendidikan Dasar						-	-
2.1.1.1.1	Rasio Penduduk Usia Kerja terhadap Ketersediaan TK	3	2	2	3		-	-
2.1.1.1.2	Rasio Penduduk Usia Kerja terhadap Ketersediaan SD/MI	5	5	9	8		-	-
2.1.1.1.3	Rasio Penduduk Usia Kerja terhadap Ketersediaan SD/MI	132	128	125	139		-	-
2.1.1.1.4	Rasio Murid terhadap Ketersediaan SD/MI	126	123	121	135		-	-
2.1.1.1.5	Rasio Murid terhadap Guru SD/MI	27	27	13	18		-	-
2.1.1.1.6	APS SD/MI (7-12 tahun)	95.56	95.58	96.65	96.74		-	-
2.1.1.2	Pendidikan Menengah						-	-
2.1.1.2.1	Rasio Penduduk Usia Kerja terhadap Ketersediaan SMP/MTs	9	11	12	14		-	-
2.1.1.2.2	Rasio Penduduk Usia Kerja terhadap Ketersediaan SMA/MA	11	12	12	18		-	-
2.1.1.2.3	Rasio Penduduk Usia Kerja terhadap Ketersediaan SMK	10	15	13	25		-	-
2.1.1.2.4	Rasio Penduduk Usia Kerja terhadap Ketersediaan SMP/MTs	563	566	502	502		-	-
2.1.1.2.5	Rasio Penduduk Usia Kerja terhadap Ketersediaan SMA/SMK	364	357	304	268		-	-
2.1.1.2.6	Rasio Murid terhadap Ketersediaan SMP/MTs	175	188	169	161		-	-
2.1.1.2.7	Rasio Murid terhadap Ketersediaan SMA/SMK	245	257	243	215		-	-
2.1.1.2.8	Rasio Murid terhadap Guru SMP/MTs	19	17	15	12		-	-
2.1.1.2.9	Rasio Murid terhadap Guru SMA/SMK	23	20	20	11		-	-
2.1.1.2.10	APS SMP/MTs (13-15 tahun)	91.65	92.81	96.28	96.58		-	-
2.1.1.2.11	APS SMA/SMK (16-18 tahun)	67.18	72.04	79.87	79.99		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.1.3	Pendidikan Tinggi						-	-
2.1.1.3.1	Rasio Penduduk Usia Kerja terhadap Ketersediaan Perguruan Tinggi	41	54	60	37		-	-
2.1.1.3.2	Rasio Penduduk Usia Kerja terhadap Ketersediaan Perguruan Tinggi	5,285	4,303	3,478	3,340		-	-
2.1.1.3.3	Rasio Murid terhadap Ketersediaan Perguruan Tinggi	1,052	1,033	1,032	1,001		-	-
2.1.1.3.4	Rasio Murid terhadap Guru Perguruan Tinggi	26	19	17	27		-	-
2.1.1.3.5	APS Perguruan Tinggi (19-24 tahun)	19.9	24	29.66	29.96		-	-
2.1.2	Kesehatan						-	-
2.1.2.1	Jumlah Rumah Sakit			16			-	-
2.1.2.2	Jumlah Puskesmas			151			-	-
2.1.2.3	Jumlah Dokter			236			-	-
2.1.2.4	Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Dokter			3,601			-	-
2.1.2.5	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir						-	-
2.1.2.5.1	Dokter	17.15	16.67	17.8	25		-	-
2.1.2.5.2	Bidan	53.87	49.75	51.84	47.02		-	-
2.1.2.5.3	Tenaga Medis Lain	4.97	3.04	3.64	5.28		-	-
2.1.2.5.4	Dukun	14.64	18.35	15.43	13.56		-	-
2.1.2.5.5	Famili	8.86	11.59	10.88	5.28		-	-
2.1.2.5.6	Lainnya	0.5	0.59	0.41	7.81		-	-
2.1.2.6	Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi						-	-
2.1.2.6.1	BCG				81.83		-	-
2.1.2.6.2	DPT				73.53		-	-
2.1.2.6.3	Polio				80.44		-	-
2.1.2.6.4	Campak				65.73		-	-
2.1.2.6.5	Hepatitis B				69.98		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.2.7	Jumlah Kasus Penyakit						-	-
2.1.2.7.1	Malaria			82,487			-	-
2.1.2.7.2	TB Paru			577			-	-
2.1.2.7.3	Kusta			633			-	-
2.1.2.7.4	DBD			77			-	-
2.1.2.8	Jumlah Kasus Baru AIDS			13			-	-
2.1.2.9	Jumlah Kasus Kumulatif AIDS			1734			-	-
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						-	-
2.1.3.1	Kondisi Jalan						-	-
2.1.3.1.1	Baik			34.53			-	-
2.1.3.1.2	Sedang			25.81			-	-
2.1.3.1.3	Rusak			18.08			-	-
2.1.3.1.4	Rusak Berat			21.57			-	-
2.1.3.2	Panjang Jalan (KM)						-	-
2.1.3.2.1	Fakfak			588.17			-	-
2.1.3.2.2	Kaimana			559.48			-	-
2.1.3.2.3	Teluk Wondama			38.93			-	-
2.1.3.2.4	Teluk Bintuni			1,059.93			-	-
2.1.3.2.5	Manokwari			1,391.10			-	-
2.1.3.2.6	Sorong Selatan			531.63			-	-
2.1.3.2.7	Sorong			1,524.19			-	-
2.1.3.2.8	Raja Ampat			243.75			-	-
2.1.3.2.9	Tambrauw			684			-	-
2.1.3.2.10	Maybrat			719.04			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.3.2.11	Kota Sorong			332.3			-	-
2.1.3.3	Jenis Permukaan Jalan						-	-
2.1.3.3.1	Aspal			30.41			-	-
2.1.3.3.2	Kerikil			35.8			-	-
2.1.3.3.3	Tanah			28.79			-	-
2.1.3.3.4	Tidak Dirinci			5.01			-	-
2.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						-	-
2.1.4.1	Persentase Jenis Kepemilikan Rumah						-	-
2.1.4.1.1	Milik Sendiri	66.79	72.46	70.88			-	-
2.1.4.1.2	Kontrak	2.65	2.15	2.29			-	-
2.1.4.1.3	Sewa	11.65	10.2	10.09			-	-
2.1.4.1.4	Bebas Sewa	4.54	3.05	4.37			-	-
2.1.4.1.5	Dinas	6.21	5.75	4.83			-	-
2.1.4.1.6	Rumah Milik Orang Tua/Sanak/Saudara	7.83	5.98	7.25			-	-
2.1.4.1.7	Lainnya	0.34	0.41	0.29			-	-
2.1.4.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai m2						-	-
2.1.4.2.1	<= 19	5.33	5.18	5.5	4.94		-	-
2.1.4.2.2	20-49	56.58	49.56	49.07	47.59		-	-
2.1.4.2.3	50-99	30.19	34.66	34.63	36.19		-	-
2.1.4.2.4	100-149	5.05	7.4	7.36	7.42		-	-
2.1.4.2.5	150+	2.85	3.2	3.44	3.86		-	-
2.1.4.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap						-	-
2.1.4.3.1	Beton	1.93	1.51	1.46			-	-
2.1.4.3.2	Genteng	0.97	0.79	0.41			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.4.3.3	Sirap	0.31	0.29	0.31			-	-
2.1.4.3.4	Seng	92.98	92.51	94.07			-	-
2.1.4.3.5	Ijuk/Lainnya	3.25	3.13	2.02			-	-
2.1.4.3.6	Lainnya	0.56	1.77	1.73			-	-
2.1.4.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding						-	-
2.1.4.4.1	Tembok	56	58.27	58.37			-	-
2.1.4.4.2	Kayu	39.89	38.64	39.32			-	-
2.1.4.4.3	Bambu	0.43	0.35	0.34			-	-
2.1.4.4.4	Lainnya	3.68	2.74	1.97			-	-
2.1.4.5	Sumber Penerangan (%)						-	-
2.1.4.5.1	Listrik PLN				76		-	-
2.1.4.5.2	Listrik Non-PLN				13		-	-
2.1.4.5.3	Bukan Listrik				11		-	-
2.1.4.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Untuk Minum						-	-
2.1.4.6.1	Ledeng				6.36		-	-
2.1.4.6.2	Pompa				3.08		-	-
2.1.4.6.3	Air Dalam Kemasan				36.47		-	-
2.1.4.6.4	Sumur Terlindung				14.38		-	-
2.1.4.6.5	Sumur Tak Terlindung				4.51		-	-
2.1.4.6.6	Mata Air Terlindung				8.12		-	-
2.1.4.6.7	Mata Air Tak Terlindung				7.03		-	-
2.1.4.6.8	Air Permukaan				7.53		-	-
2.1.4.6.9	Air Hujan				12.48		-	-
2.1.4.6.10	Lainnya				0.03		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.4.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar						-	-
2.1.4.7.1	Sendiri				67		-	-
2.1.4.7.2	Bersama				17		-	-
2.1.4.7.3	MCK Komunal				2		-	-
2.1.4.7.4	Umum				8		-	-
2.1.4.7.5	Tidak Ada				6		-	-
2.1.5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat						-	-
2.1.5.1	Jumlah Tindak Pidana	1,825	2,262	3,159	2,262		-	-
2.1.5.2	Indeks Demokrasi Indonesia	65.7	60.7	65.65	59.97		-	-
2.1.6	Sosial						-	-
2.1.6.1	Persentase Penduduk Menurut Jenis Agama						-	-
2.1.6.1.1	Islam				33.149		-	-
2.1.6.1.2	Protestan				57.958		-	-
2.1.6.1.3	Katholik				8.521		-	-
2.1.6.1.4	Hindu				0.188		-	-
2.1.6.1.5	Budha				0.182		-	-
2.1.6.1.6	Lainnya				0.002		-	-
2.1.7	Tenaga Kerja						-	-
2.1.7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67.12	66.41	68.3	68.68	70.05	-	-
2.1.7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.49	4.62	5.02	8.08	7.46	-	-
2.1.7.3	Tingkat Kesempatan Kerja	94.51	95.38	94.98	91.92	92.54	-	-
2.1.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						-	-
2.1.8.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	60.3	60.91	61.28	61.73		-	-
2.1.8.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	81.57	81.72	81.95	81.99		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.8.3	Rasio IPG terhadap IPM	135.28	134.17	133.73	132.82		-	-
2.1.8	Lingkungan Hidup						-	-
2.1.8.1	Jumlah Daerah yang Terkena Pencemaran Lingkungan Hidup						-	-
2.1.8.1.1	Pencemaran Air				31		-	-
2.1.8.1.2	Pencemaran Tanah				8		-	-
2.1.8.1.3	Pencemaran Udara				26		-	-
2.1.8.1.4	Tidak Ada Pencemaran				1512		-	-
2.1.9	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						-	-
2.1.9.1	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan/Memakai Alat KB	41.25	42.91	42.12	43.96		-	-
2.1.10	Perhubungan						-	-
2.1.10.1	Jumlah Kendaraan Bermotor	116,841	25,474	28,435			-	-
2.1.10.2	Persentase Kendaraan Bermotor						-	-
2.1.10.2.1	Mobil Penumpang			9.03			-	-
2.1.10.2.2	Mobil Barang			4.46			-	-
2.1.10.2.3	Bis			0.12			-	-
2.1.10.2.4	Sepeda Motor			86.40			-	-
2.1.10.3	Jumlah Kunjungan Kapal						-	-
2.1.10.3.1	Fakfak	116	126	33			-	-
2.1.10.3.2	Manokwari	197	297	182			-	-
2.1.103.3	Kota Sorong	368	344	216			-	-
2.1.10.4	Jumlah Pengunjung Datang						-	-
2.1.10.4.1	Fakfak	32,294	41,806	25,544			-	-
2.1.10.4.2	Manokwari	115,212	100,906	102,932			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.10.4.3	Kota Sorong	165,504	152,088	219,968			-	-
2.1.10.5	Jumlah Pengunjung Pergi						-	-
2.1.10.5.1	Fakfak	35,762	43,784	35,535			-	-
2.1.10.5.2	Manokwari	111,107	115,076	116,242			-	-
2.1.10.5.3	Kota Sorong	180,024	117,565	162,853			-	-
2.1.10.6	Jumlah dan Penumpang Pesawat						-	-
2.1.10.6.1	Jumlah Pesawat Berangkat	13,956	14,289	14,409			-	-
2.1.10.6.2	Jumlah Pesawat Datang	13,818	14,289	14,602			-	-
2.1.10.6.3	Jumlah Penumpang Berangkat	513,301	612,397	609,132			-	-
2.1.10.6.4	Jumlah Penumpang Datang	485,541	569,770	564,076			-	-
2.1.10.6.5	Jumlah Penumpang Transit	173,913	171,930	172,762			-	-
2:01:11	Komunikasi dan Informatika						-	-
02.01.11.1	Banyaknya Kantor Pos dan Giro						-	-
2.1.11.1.2	Kantor Pos dan Giro Induk	7	3	1			-	-
2.1.11.1.3	Kantor Pembantu	9	5	3			-	-
2.1.11.1.4	Kantor Pos dan Giro Tambahan	4	5	2			-	-
2.1.11.1.5	Rumah Pos	0	0	0			-	-
2.1.11.1.6	Kantor Pos	2	2	0			-	-
2.1.11.1.7	Surat Pos Biasa	20,478	8,026	6,759			-	-
2.1.11.1.8	Surat Pos Kilat	328	5,319	0			-	-
2.1.11.1.9	Surat Pos Kilat Khusus	42,282	116,937	86,684			-	-
2.1.11.1.10	Surat Pos Luar Negeri	425	416	563			-	-
2.1.11.2	Persentase Banyaknya Surat Pos yang dikirim						-	-
2.1.11.2.1	Surat Pos Kilat Khusus			92			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.11.2.2	Surat Pos Biasa			7			-	-
2.1.11.2.3	Surat Pos Luar Negeri			1			-	-
2.1.11.3	Jumlah Sambungan Telepon Jenis Sambungan Sentral						-	-
2.1.11.3.1	Otomatis	12,574	4,333	3,833			-	-
2.1.11.3.2	Biasa	8	0	0			-	-
2.1.11.4	Jumlah Sambungan Telepon Jenis Sambungan Cabang						-	-
2.1.11.4.1	Otomatis	0	6	6			-	-
2.1.11.4.2	Biasa	0	0	0			-	-
2:01:12	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						-	-
2.1.12.1	Jumlah Koperasi						-	-
2.1.12.1.1	Aktif	412	626				-	-
2.1.12.1.2	Tidak Aktif	439	811				-	-
2.1.12.2	Jumlah Koperasi di Kab./Kota						-	-
2.1.12.2.1	Fakfak						-	-
2.1.12.2.1.1	Aktif		28				-	-
2.1.12.2.1.2	Tidak Aktif		303				-	-
2.1.12.2.2	Kaimana						-	-
2.1.12.2.2.1	Aktif		11				-	-
2.1.12.2.2.2	Tidak Aktif		39				-	-
2.1.12.2.3	Teluk Wondama						-	-
2.1.12.2.3.1	Aktif		10				-	-
2.1.12.2.3.2	Tidak Aktif		26				-	-
2.1.12.2.4	Teluk Bintuni						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.12.2.4.1	Aktif		38				-	-
2.1.12.2.4.2	Tidak Aktif		89				-	-
2.1.12.2.5	Manokwari						-	-
2.1.12.2.5.1	Aktif		231				-	-
2.1.12.2.5.2	Tidak Aktif		95				-	-
2.1.12.2.6	Sorong Selatan						-	-
2.1.12.2.6.1	Aktif		74				-	-
2.1.12.2.6.2	Tidak Aktif		41				-	-
2.1.12.2.7	Sorong						-	-
2.1.12.2.7.1	Aktif		73				-	-
2.1.12.2.7.2	Tidak Aktif		90				-	-
2.1.12.2.8	Raja Ampat						-	-
2.1.12.2.8.1	Aktif		65				-	-
2.1.12.2.8.2	Tidak Aktif		0				-	-
2.1.12.2.9	Tambrauw						-	-
2.1.12.2.9.1	Aktif		8				-	-
2.1.12.2.9.2	Tidak Aktif		6				-	-
2.1.12.2.10	Maybrat						-	-
2.1.12.2.10.1	Aktif		15				-	-
2.1.12.2.10.2	Tidak Aktif		32				-	-
2.1.12.2.11	Kota Sorong						-	-
2.1.12.2.11.1	Aktif		73				-	-
2.1.12.2.11.2	Tidak Aktif		90				-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.12.3	Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi menurut Jenis						-	-
2.1.12.3.1	Jumlah Usaha (Unit)	1,225	1,225				-	-
2.1.12.3.2	Tenaga Kerja (Orang)	3,813	3,813				-	-
2.1.12.3.3	Nilai Produksi (Ribu Rp)	13,381,123	13,381,123				-	-
2:01:13	Penanaman Modal						-	-
2.1.13.1	Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)						-	-
2.1.13.1.1	Jumlah Proyek (Unit)	4,579	9,612	12,632	17,738		-	-
2.1.13.1.2	Nilai Investasi (Juta US$)	24,565	28,618	28,529.60	29,275.90		-	-
2.1.13.2	Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)						-	-
2.1.13.2.1	Jumlah Proyek (Unit)	1,210	2,129	2,392	5,100		-	-
2.1.13.2.2	Nilai Investasi (Juta US$)	92,182	128,151	156,126.27	179,465.87		-	-
2:01:14	Kepemudaan dan Olah Raga						-	-
2.1.14.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Lapangan Olah Raga						-	-
2.1.14.1.1	Fakfak						-	-
2.1.14.1.1.1	Sepak Bola		18				-	-
2.1.14.1.1.2	Bola Voli		44				-	-
2.1.14.1.1.3	Bulu Tangkis		5				-	-
2.1.14.1.1.4	Bola Basket		2				-	-
2.1.14.1.1.5	Tenis Lapangan		2				-	-
2.1.14.1.1.6	Futsal		14				-	-
2.1.14.1.1.7	Kolam Renang		0				-	-
2.1.14.1.2	Kaimana						-	-
2.1.14.1.2.1	Sepak Bola		23				-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.14.1.2.2	Bola Voli		36				-	-
2.1.14.1.2.3	Bulu Tangkis		6				-	-
2.1.14.1.2.4	Bola Basket		2				-	-
2.1.14.1.2.5	Tenis Lapangan		1				-	-
2.1.14.1.2.6	Futsal		7				-	-
2.1.14.1.2.7	Kolam Renang		0				-	-
2.1.14.1.3	Teluk Wondama						-	-
2.1.14.1.3.1	Sepak Bola		15				-	-
2.1.14.1.3.2	Bola Voli		25				-	-
2.1.14.1.3.3	Bulu Tangkis		2				-	-
2.1.14.1.3.4	Bola Basket		1				-	-
2.1.14.1.3.5	Tenis Lapangan		1				-	-
2.1.14.1.3.6	Futsal		1				-	-
2.1.14.1.3.7	Kolam Renang		0				-	-
2.1.14.1.4	Teluk Bintuni						-	-
2.1.14.1.4.1	Sepak Bola		34				-	-
2.1.14.1.4.2	Bola Voli		99				-	-
2.1.14.1.4.3	Bulu Tangkis		18				-	-
2.1.14.1.4.4	Bola Basket		4				-	-
2.1.14.1.4.5	Tenis Lapangan		0				-	-
2.1.14.1.4.6	Futsal		4				-	-
2.1.14.1.4.7	Kolam Renang		0				-	-
2.1.14.1.5	Manokwari						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.14.1.5.1	Sepak Bola		39				-	-
2.1.14.1.5.2	Bola Voli		63				-	-
2.1.14.1.5.3	Bulu Tangkis		18				-	-
2.1.14.1.5.4	Bola Basket		6				-	-
2.1.14.1.5.5	Tenis Lapangan		5				-	-
2.1.14.1.5.6	Futsal		6				-	-
2.1.14.1.5.7	Kolam Renang		1				-	-
2.1.14.1.6	Sorong Selatan						-	-
2.1.14.1.6.1	Sepak Bola		23				-	-
2.1.14.1.6.2	Bola Voli		42				-	-
2.1.14.1.6.3	Bulu Tangkis		0				-	-
2.1.14.1.6.4	Bola Basket		0				-	-
2.1.14.1.6.5	Tenis Lapangan		1				-	-
2.1.14.1.6.6	Futsal		1				-	-
2.1.14.1.6.7	Kolam Renang		0				-	-
2.1.14.1.7	Sorong						-	-
2.1.14.1.7.1	Sepak Bola		41				-	-
2.1.14.1.7.2	Bola Voli		60				-	-
2.1.14.1.7.3	Bulu Tangkis		18				-	-
2.1.14.1.7.4	Bola Basket		2				-	-
2.1.14.1.7.5	Tenis Lapangan		0				-	-
2.1.14.1.7.6	Futsal		2				-	-
2.1.14.1.7.7	Kolam Renang		0				-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.14.1.8	Raja Ampat						-	-
2.1.14.1.8.1	Sepak Bola		78				-	-
2.1.14.1.8.2	Bola Voli		87				-	-
2.1.14.1.8.3	Bulu Tangkis		2				-	-
2.1.14.1.8.4	Bola Basket		2				-	-
2.1.14.1.8.5	Tenis Lapangan		0				-	-
2.1.14.1.8.6	Futsal		4				-	-
2.1.14.1.8.7	Kolam Renang		0				-	-
2.1.14.1.9	Tambrauw						-	-
2.1.14.1.9.1	Sepak Bola		14				-	-
2.1.14.1.9.2	Bola Voli		24				-	-
2.1.14.1.9.3	Bulu Tangkis		1				-	-
2.1.14.1.9.4	Bola Basket		1				-	-
2.1.14.1.9.5	Tenis Lapangan		0				-	-
2.1.14.1.9.6	Futsal		0				-	-
2.1.14.1.9.7	Kolam Renang		0				-	-
2.1.14.1.10	Maybrat						-	-
2.1.14.1.10.1	Sepak Bola		11				-	-
2.1.14.1.10.2	Bola Voli		31				-	-
2.1.14.1.10.3	Bulu Tangkis		1				-	-
2.1.14.1.10.4	Bola Basket		0				-	-
2.1.14.1.10.5	Tenis Lapangan		1				-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.14.1.10.6	Futsal		0				-	-
2.1.14.1.10.7	Kolam Renang		0				-	-
2.1.14.1.11	Manokwari Selatan						-	-
2.1.14.1.11.1	Sepak Bola		7				-	-
2.1.14.1.11.2	Bola Voli		31				-	-
2.1.14.1.11.3	Bulu Tangkis		4				-	-
2.1.14.1.11.4	Bola Basket		2				-	-
2.1.14.1.11.5	Tenis Lapangan		0				-	-
2.1.14.1.11.6	Futsal		0				-	-
2.1.14.1.11.7	Kolam Renang		0				-	-
2.1.14.1.12	Pegunungan Arfak						-	-
2.1.14.1.12.1	Sepak Bola		10				-	-
2.1.14.1.12.2	Bola Voli		105				-	-
2.1.14.1.12.3	Bulu Tangkis		0				-	-
2.1.14.1.12.4	Bola Basket		0				-	-
2.1.14.1.12.5	Tenis Lapangan		1				-	-
2.1.14.1.12.6	Futsal		0				-	-
2.1.14.1.12.7	Kolam Renang		0				-	-
2.1.14.1.13	Kota Sorong						-	-
2.1.14.1.13.1	Sepak Bola		15				-	-
2.1.14.1.13.2	Bola Voli		17				-	-
2.1.14.1.13.3	Bulu Tangkis		11				-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.14.1.13.4	Bola Basket		9				-	-
2.1.14.1.13.5	Tenis Lapangan		8				-	-
2.1.14.1.13.6	Futsal		3				-	-
2.1.14.1.13.7	Kolam Renang		2				-	-
2:01:15	Kebudayaan						-	-
2.1.15.1	Jumlah Wisata Budaya						-	-
2.1.15.1.1	Fakfak	11	7				-	-
2.1.15.1.2	Kaimana	8	6				-	-
2.1.15.1.3	Teluk Wondama	15	9				-	-
2.1.15.1.4	Teluk Bintuni	8	2				-	-
2.1.15.1.5	Manokwari	11	5				-	-
2.1.15.1.6	Sorong Selatan	4	1				-	-
2.1.15.1.7	Sorong	1	1				-	-
2.1.15.1.8	Raja Ampat	10	8				-	-
2.1.15.1.9	Tambrauw	1	1				-	-
2.1.15.1.10	Maybrat	1	1				-	-
2.1.15.1.11	Sorong	74	45				-	-
2:02	Pelayanan Urusan Pilihan						-	-
2:02:01	Pertanian						-	-
2.2.1.1	Luas Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan (ha)						-	-
2.2.1.1.1	Fakfak						-	-
2.2.1.1.1.1	Irigasi				300		-	-
2.2.1.1.1.2	Non Irigasi				960		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.1.2	Kaimana						-	-
2.2.1.1.2.1	Irigasi				-		-	-
2.2.1.1.2.2	Non Irigasi				4,057		-	-
2.2.1.1.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.1.1.3.1	Irigasi				120		-	-
2.2.1.1.3.2	Non Irigasi				542		-	-
2.2.1.1.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.1.1.4.1	Irigasi				475		-	-
2.2.1.1.4.2	Non Irigasi				77		-	-
2.2.1.1.5	Manokwari						-	-
2.2.1.1.5.1	Irigasi				3,348		-	-
2.2.1.1.5.2	Non Irigasi				1,525		-	-
2.2.1.1.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.1.1.6.1	Irigasi				-		-	-
2.2.1.1.6.2	Non Irigasi				125		-	-
2.2.1.1.7	Sorong						-	-
2.2.1.1.7.1	Irigasi				1,903		-	-
2.2.1.1.7.2	Non Irigasi				4,234		-	-
2.2.1.1.8	Raja Ampat						-	-
2.2.1.1.8.1	Irigasi				375		-	-
2.2.1.1.8.2	Non Irigasi				580		-	-
2.2.1.1.9	Tambrauw						-	-
2.2.1.1.9.1	Irigasi				-		-	-
2.2.1.1.9.2	Non Irigasi				-		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.1.10	Maybrat						-	-
2.2.1.1.10.1	Irigasi				-		-	-
2.2.1.1.10.2	Non Irigasi				-		-	-
2.2.1.1.11	Kota Sorong						-	-
2.2.1.1.11.1	Irigasi				980		-	-
2.2.1.1.11.2	Non Irigasi				60		-	-
2.2.1.1.12	Manokwari Selatan						-	-
2.2.1.1.12.1	Irigasi				-		-	-
2.2.1.1.12.2	Non Irigasi				-		-	-
2.2.1.1.13	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.1.1.13.1	Irigasi				-		-	-
2.2.1.1.13.2	Non Irigasi				-		-	-
2.2.1.2	Luas Lahan Menurut Kabupaten/Kota (ha),						-	-
2.2.1.2.1	Fakfak						-	-
2.2.1.2.1.1	Lahan Tegal				-		-	-
2.2.1.2.1.2	Lahan Ladang				70,114		-	-
2.2.1.2.1.3	Lahan Sementara Tidak diusahakan				226,582		-	-
2.2.1.2.2	Kaimana						-	-
2.2.1.2.2.1	Lahan Tegal				-		-	-
2.2.1.2.2.2	Lahan Ladang				2,590		-	-
2.2.1.2.2.3	Lahan Sementara Tidak diusahakan				8,213		-	-
2.2.1.2.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.1.2.3.1	Lahan Tegal				351		-	-
2.2.1.2.3.2	Lahan Ladang				538		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.2.3.3	Lahan Sementara Tidak diusahakan				464		-	-
2.2.1.2.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.1.2.4.1	Lahan Tegal				125		-	-
2.2.1.2.4.2	Lahan Ladang				1,664		-	-
2.2.1.2.4.3	Lahan Sementara Tidak diusahakan				5,617		-	-
2.2.1.2.5	Manokwari						-	-
2.2.1.2.5.1	Lahan Tegal				89		-	-
2.2.1.2.5.2	Lahan Ladang				33,971		-	-
2.2.1.2.5.3	Lahan Sementara Tidak diusahakan				8,581		-	-
2.2.1.2.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.1.2.6.1	Lahan Tegal				-		-	-
2.2.1.2.6.2	Lahan Ladang				15,949		-	-
2.2.1.2.6.3	Lahan Sementara Tidak diusahakan				1,147,949		-	-
2.2.1.2.7	Sorong						-	-
2.2.1.2.7.1	Lahan Tegal				4,707		-	-
2.2.1.2.7.2	Lahan Ladang				68,387		-	-
2.2.1.2.7.3	Lahan Sementara Tidak diusahakan				359,773		-	-
2.2.1.2.8	Raja Ampat						-	-
2.2.1.2.8.1	Lahan Tegal				-		-	-
2.2.1.2.8.2	Lahan Ladang				34,097		-	-
2.2.1.2.8.3	Lahan Sementara Tidak diusahakan				213,906		-	-
2.2.1.2.9	Tambrauw						-	-
2.2.1.2.9.1	Lahan Tegal				-		-	-
2.2.1.2.9.2	Lahan Ladang				3,893		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.2.9.3	Lahan Sementara Tidak diusahakan				125		-	-
2.2.1.2.10	Maybrat						-	-
2.2.1.2.10.1	Lahan Tegal				-		-	-
2.2.1.2.10.2	Lahan Ladang				14,605		-	-
2.2.1.2.10.3	Lahan Sementara Tidak diusahakan				113,065		-	-
2.2.1.2.11	Kota Sorong						-	-
2.2.1.2.11.1	Lahan Tegal				1,112		-	-
2.2.1.2.11.2	Lahan Ladang				833		-	-
2.2.1.2.11.3	Lahan Sementara Tidak diusahakan				879		-	-
2.2.1.2.12	Manokwari Selatan						-	-
2.2.1.2.12.1	Lahan Tegal				-		-	-
2.2.1.2.12.2	Lahan Ladang				415,678		-	-
2.2.1.2.12.3	Lahan Sementara Tidak diusahakan				1,346		-	-
2.2.1.2.13	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.1.2.13.1	Lahan Tegal				139		-	-
2.2.1.2.13.2	Lahan Ladang				599		-	-
2.2.1.2.13.3	Lahan Sementara Tidak diusahakan				599		-	-
2.2.1.3	Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah						-	-
2.2.1.3.1	Luas Panen (ha)	6,592	6,794	6,279	6,800		-	-
2.2.1.3.2	Produksi (ton)	27,094	27,995	26,104	29,243		-	-
2.2.1.3.3	Produktivitas (ton/ha)	4.11	4.12	4.16	4.30		-	-
2.2.1.4	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah						-	-
2.2.1.4.1	Fakfak						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.4.1.1	Luas Panen (ha)				580		-	-
2.2.1.4.1.2	Produksi (ton)				2,281		-	-
2.2.1.4.1.3	Produktivitas (ton/ha)				3.93		-	-
2.2.1.4.2	Kaimana						-	-
2.2.1.4.2.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.4.2.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.4.2.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.4.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.1.4.3.1	Luas Panen (ha)				9		-	-
2.2.1.4.3.2	Produksi (ton)				36		-	-
2.2.1.4.3.3	Produktivitas (ton/ha)				4		-	-
2.2.1.4.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.1.4.4.1	Luas Panen (ha)				305		-	-
2.2.1.4.4.2	Produksi (ton)				1,255		-	-
2.2.1.4.4.3	Produktivitas (ton/ha)				4.11		-	-
2.2.1.4.5	Manokwari						-	-
2.2.1.4.5.1	Luas Panen (ha)				3,723		-	-
2.2.1.4.5.2	Produksi (ton)				16,090		-	-
2.2.1.4.5.3	Produktivitas (ton/ha)				4.32		-	-
2.2.1.4.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.1.4.6.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.4.6.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.4.6.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.4.7	Sorong						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.4.7.1	Luas Panen (ha)				937		-	-
2.2.1.4.7.2	Produksi (ton)				4,057		-	-
2.2.1.4.7.3	Produktivitas (ton/ha)				4.33		-	-
2.2.1.4.8	Raja Ampat						-	-
2.2.1.4.8.1	Luas Panen (ha)				213		-	-
2.2.1.4.8.2	Produksi (ton)				861		-	-
2.2.1.4.8.3	Produktivitas (ton/ha)				4.04		-	-
2.2.1.4.9	Tambrauw						-	-
2.2.1.4.9.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.4.9.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.4.9.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.4.10	Maybrat						-	-
2.2.1.4.10.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.4.10.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.4.10.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.4.11	Kota Sorong						-	-
2.2.1.4.11.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.4.11.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.4.11.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.4.12	Manokwari Selatan						-	-
2.2.1.4.12.1	Luas Panen (ha)				1,033		-	-
2.2.1.4.12.2	Produksi (ton)				4,663		-	-
2.2.1.4.12.3	Produktivitas (ton/ha)				4.51		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.4.13	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.1.4.13.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.4.13.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.4.13.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.5	Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Ladang						-	-
2.2.1.5.1	Luas Panen (ha)	1,158	729	592	374		-	-
2.2.1.5.2	Produksi (ton)	3,150	1,918	1,561	976		-	-
2.2.1.5.3	Produktivitas (ton/ha)	2.72	2.63	2.64	2.61		-	-
2.2.1.6	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Ladang						-	-
2.2.1.6.1	Fakfak						-	-
2.2.1.6.1.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.6.1.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.6.1.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.6.2	Kaimana						-	-
2.2.1.6.2.1	Luas Panen (ha)				54		-	-
2.2.1.6.2.2	Produksi (ton)				140		-	-
2.2.1.6.2.3	Produktivitas (ton/ha)				2.59		-	-
2.2.1.6.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.1.6.3.1	Luas Panen (ha)				98		-	-
2.2.1.6.3.2	Produksi (ton)				257		-	-
2.2.1.6.3.3	Produktivitas (ton/ha)				2.62		-	-
2.2.1.6.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.1.6.4.1	Luas Panen (ha)				3		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.6.4.2	Produksi (ton)				8		-	-
2.2.1.6.4.3	Produktivitas (ton/ha)				2.67		-	-
2.2.1.6.5	Manokwari						-	-
2.2.1.6.5.1	Luas Panen (ha)				105		-	-
2.2.1.6.5.2	Produksi (ton)				274		-	-
2.2.1.6.5.3	Produktivitas (ton/ha)				2.61		-	-
2.2.1.6.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.1.6.6.1	Luas Panen (ha)				59		-	-
2.2.1.6.6.2	Produksi (ton)				154		-	-
2.2.1.6.6.3	Produktivitas (ton/ha)				2.61		-	-
2.2.1.6.7	Sorong						-	-
2.2.1.6.7.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.6.7.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.6.7.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.6.8	Raja Ampat						-	-
2.2.1.6.8.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.6.8.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.6.8.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.6.9	Tambrauw						-	-
2.2.1.6.9.1	Luas Panen (ha)				30		-	-
2.2.1.6.9.2	Produksi (ton)				78		-	-
2.2.1.6.9.3	Produktivitas (ton/ha)				2.60		-	-
2.2.1.6.10	Maybrat						-	-
2.2.1.6.10.1	Luas Panen (ha)				-		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.6.10.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.6.10.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.6.11	Kota Sorong						-	-
2.2.1.6.11.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.6.11.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.6.11.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.6.12	Manokwari Selatan						-	-
2.2.1.6.12.1	Luas Panen (ha)				25		-	-
2.2.1.6.12.2	Produksi (ton)				65		-	-
2.2.1.6.12.3	Produktivitas (ton/ha)				2.60		-	-
2.2.1.6.13	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.1.6.13.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.6.13.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.6.13.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.7	Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung						-	-
2.2.1.7.1	Luas Panen (ha)	1,199	1,250	1,421	1,307		-	-
2.2.1.7.2	Produksi (ton)	2,050	2,138	2,451	2,264		-	-
2.2.1.7.3	Produktivitas (ton/ha)	1.71	1.71	1.72	1.73		-	-
2.2.1.8	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung						-	-
2.2.1.8.1	Fakfak						-	-
2.2.1.8.1.1	Luas Panen (ha)				4		-	-
2.2.1.8.1.2	Produksi (ton)				7		-	-
2.2.1.8.1.3	Produktivitas (ton/ha)				1.75		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.8.2	Kaimana						-	-
2.2.1.8.2.1	Luas Panen (ha)				7		-	-
2.2.1.8.2.2	Produksi (ton)				12		-	-
2.2.1.8.2.3	Produktivitas (ton/ha)				1.71		-	-
2.2.1.8.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.1.8.3.1	Luas Panen (ha)				22		-	-
2.2.1.8.3.2	Produksi (ton)				38		-	-
2.2.1.8.3.3	Produktivitas (ton/ha)				1.73		-	-
2.2.1.8.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.1.8.4.1	Luas Panen (ha)				72		-	-
2.2.1.8.4.2	Produksi (ton)				124		-	-
2.2.1.8.4.3	Produktivitas (ton/ha)				1.72		-	-
2.2.1.8.5	Manokwari						-	-
2.2.1.8.5.1	Luas Panen (ha)				411		-	-
2.2.1.8.5.2	Produksi (ton)				711		-	-
2.2.1.8.5.3	Produktivitas (ton/ha)				1.73		-	-
2.2.1.8.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.1.8.6.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.8.6.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.8.6.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.8.7	Sorong						-	-
2.2.1.8.7.1	Luas Panen (ha)				293		-	-
2.2.1.8.7.2	Produksi (ton)				507		-	-
2.2.1.8.7.3	Produktivitas (ton/ha)				1.73		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.8.8	Raja Ampat						-	-
2.2.1.8.8.1	Luas Panen (ha)				255		-	-
2.2.1.8.8.2	Produksi (ton)				443		-	-
2.2.1.8.8.3	Produktivitas (ton/ha)				1.74		-	-
2.2.1.8.9	Tambrauw						-	-
2.2.1.8.9.1	Luas Panen (ha)				22		-	-
2.2.1.8.9.2	Produksi (ton)				38		-	-
2.2.1.8.9.3	Produktivitas (ton/ha)				1.73		-	-
2.2.1.8.10	Maybrat						-	-
2.2.1.8.10.1	Luas Panen (ha)				15		-	-
2.2.1.8.10.2	Produksi (ton)				26		-	-
2.2.1.8.10.3	Produktivitas (ton/ha)				1.73		-	-
2.2.1.8.11	Kota Sorong						-	-
2.2.1.8.11.1	Luas Panen (ha)				29		-	-
2.2.1.8.11.2	Produksi (ton)				51		-	-
2.2.1.8.11.3	Produktivitas (ton/ha)				1.76		-	-
2.2.1.8.12	Manokwari Selatan						-	-
2.2.1.8.12.1	Luas Panen (ha)				137		-	-
2.2.1.8.12.2	Produksi (ton)				237		-	-
2.2.1.8.12.3	Produktivitas (ton/ha)				1.73		-	-
2.2.1.8.13	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.1.8.13.1	Luas Panen (ha)				40		-	-
2.2.1.8.13.2	Produksi (ton)				70		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.8.13.3	Produktivitas (ton/ha)				1.75		-	-
2.2.1.9	Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kedelai						-	-
2.2.1.9.1	Luas Panen (ha)	603	617	890	1,362		-	-
2.2.1.9.2	Produksi (ton)	651	669	944	1,439		-	-
2.2.1.9.3	Produktivitas (ton/ha)	1.08	1.08	1.06	1.06		-	-
2.2.1.10	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kedelai						-	-
2.2.1.10.1	Fakfak						-	-
2.2.1.10.1.1	Luas Panen (ha)				410		-	-
2.2.1.10.1.2	Produksi (ton)				442		-	-
2.2.1.10.1.3	Produktivitas (ton/ha)				1.08		-	-
2.2.1.10.2	Kaimana						-	-
2.2.1.10.2.1	Luas Panen (ha)				5		-	-
2.2.1.10.2.2	Produksi (ton)				5		-	-
2.2.1.10.2.3	Produktivitas (ton/ha)				1		-	-
2.2.1.10.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.1.10.3.1	Luas Panen (ha)				11		-	-
2.2.1.10.3.2	Produksi (ton)				11		-	-
2.2.1.10.3.3	Produktivitas (ton/ha)				1		-	-
2.2.1.10.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.1.10.4.1	Luas Panen (ha)				23		-	-
2.2.1.10.4.2	Produksi (ton)				23		-	-
2.2.1.10.4.3	Produktivitas (ton/ha)				1		-	-
2.2.1.10.5	Manokwari						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.10.5.1	Luas Panen (ha)				734		-	-
2.2.1.10.5.2	Produksi (ton)				769		-	-
2.2.1.10.5.3	Produktivitas (ton/ha)				1.05		-	-
2.2.1.10.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.1.10.6.1	Luas Panen (ha)				34		-	-
2.2.1.10.6.2	Produksi (ton)				36		-	-
2.2.1.10.6.3	Produktivitas (ton/ha)				1.06		-	-
2.2.1.10.7	Sorong						-	-
2.2.1.10.7.1	Luas Panen (ha)				67		-	-
2.2.1.10.7.2	Produksi (ton)				71		-	-
2.2.1.10.7.3	Produktivitas (ton/ha)				1.06		-	-
2.2.1.10.8	Raja Ampat						-	-
2.2.1.10.8.1	Luas Panen (ha)				5		-	-
2.2.1.10.8.2	Produksi (ton)				5		-	-
2.2.1.10.8.3	Produktivitas (ton/ha)				1		-	-
2.2.1.10.9	Tambrauw						-	-
2.2.1.10.9.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.10.9.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.10.9.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.10.10	Maybrat						-	-
2.2.1.10.10.1	Luas Panen (ha)				56		-	-
2.2.1.10.10.2	Produksi (ton)				60		-	-
2.2.1.10.10.3	Produktivitas (ton/ha)				1.07		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.10.11	Kota Sorong						-	-
2.2.1.10.11.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.10.11.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.10.11.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.10.12	Manokwari Selatan						-	-
2.2.1.10.12.1	Luas Panen (ha)				17		-	-
2.2.1.10.12.2	Produksi (ton)				17		-	-
2.2.1.10.12.3	Produktivitas (ton/ha)				1		-	-
2.2.1.10.13	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.1.10.13.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.10.13.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.10.13.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.11	Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Tanah						-	-
2.2.1.11.1	Luas Panen (ha)	445	600	589	594		-	-
2.2.1.11.2	Produksi (ton)	485.36	648.36	641	653		-	-
2.2.1.11.3	Produktivitas (ton/ha)	1.09	1.08	1.09	1.10		-	-
2.2.1.12	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Tanah						-	-
2.2.1.12.1	Fakfak						-	-
2.2.1.12.1.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.12.1.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.12.1.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.12.2	Kaimana						-	-
2.2.1.12.2.1	Luas Panen (ha)				7		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.12.2.2	Produksi (ton)				7		-	-
2.2.1.12.2.3	Produktivitas (ton/ha)				1		-	-
2.2.1.12.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.1.12.3.1	Luas Panen (ha)				11		-	-
2.2.1.12.3.2	Produksi (ton)				12		-	-
2.2.1.12.3.3	Produktivitas (ton/ha)				1.09		-	-
2.2.1.12.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.1.12.4.1	Luas Panen (ha)				12		-	-
2.2.1.12.4.2	Produksi (ton)				13		-	-
2.2.1.12.4.3	Produktivitas (ton/ha)				1.08		-	-
2.2.1.12.5	Manokwari						-	-
2.2.1.12.5.1	Luas Panen (ha)				152		-	-
2.2.1.12.5.2	Produksi (ton)				168		-	-
2.2.1.12.5.3	Produktivitas (ton/ha)				1.11		-	-
2.2.1.12.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.1.12.6.1	Luas Panen (ha)				27		-	-
2.2.1.12.6.2	Produksi (ton)				29		-	-
2.2.1.12.6.3	Produktivitas (ton/ha)				1.07		-	-
2.2.1.12.7	Sorong						-	-
2.2.1.12.7.1	Luas Panen (ha)				47		-	-
2.2.1.12.7.2	Produksi (ton)				52		-	-
2.2.1.12.7.3	Produktivitas (ton/ha)				1.11		-	-
2.2.1.12.8	Raja Ampat						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.12.8.1	Luas Panen (ha)				124		-	-
2.2.1.12.8.2	Produksi (ton)				136		-	-
2.2.1.12.8.3	Produktivitas (ton/ha)				1.10		-	-
2.2.1.12.9	Tambrauw						-	-
2.2.1.12.9.1	Luas Panen (ha)				5		-	-
2.2.1.12.9.2	Produksi (ton)				6		-	-
2.2.1.12.9.3	Produktivitas (ton/ha)				1.20		-	-
2.2.1.12.10	Maybrat						-	-
2.2.1.12.10.1	Luas Panen (ha)				153		-	-
2.2.1.12.10.2	Produksi (ton)				169		-	-
2.2.1.12.10.3	Produktivitas (ton/ha)				1.10		-	-
2.2.1.12.11	Kota Sorong						-	-
2.2.1.12.11.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.12.11.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.12.11.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.12.12	Manokwari Selatan						-	-
2.2.1.12.12.1	Luas Panen (ha)				56		-	-
2.2.1.12.12.2	Produksi (ton)				61		-	-
2.2.1.12.12.3	Produktivitas (ton/ha)				1.09		-	-
2.2.1.12.13	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.1.12.13.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.12.13.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.12.13.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.13	Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Hijau						-	-
2.2.1.13.1	Luas Panen (ha)	178	173	170	112		-	-
2.2.1.13.2	Produksi (ton)	197	187.05	176	116		-	-
2.2.1.13.3	Produktivitas (ton/ha)	1.11	1.08	1.04	1.04		-	-
2.2.1.14	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Hijau						-	-
2.2.1.14.1	Fakfak						-	-
2.2.1.14.1.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.14.1.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.14.1.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.14.2	Kaimana						-	-
2.2.1.14.2.2	Luas Panen (ha)				2		-	-
2.2.1.14.2.3	Produksi (ton)				2		-	-
2.2.1.14.2.4	Produktivitas (ton/ha)				1		-	-
2.2.1.14.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.1.14.3.1	Luas Panen (ha)				6		-	-
2.2.1.14.3.2	Produksi (ton)				6		-	-
2.2.1.14.3.3	Produktivitas (ton/ha)				1		-	-
2.2.1.14.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.1.14.4.1	Luas Panen (ha)				8		-	-
2.2.1.14.4.2	Produksi (ton)				7		-	-
2.2.1.14.4.3	Produktivitas (ton/ha)				0.88		-	-
2.2.1.14.5	Manokwari						-	-
2.2.1.14.5.1	Luas Panen (ha)				17		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.14.5.2	Produksi (ton)				16		-	-
2.2.1.14.5.3	Produktivitas (ton/ha)				0.94		-	-
2.2.1.14.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.1.14.6.1	Luas Panen (ha)				7		-	-
2.2.1.14.6.2	Produksi (ton)				6		-	-
2.2.1.14.6.3	Produktivitas (ton/ha)				0.86		-	-
2.2.1.14.7	Sorong						-	-
2.2.1.14.7.1	Luas Panen (ha)				22		-	-
2.2.1.14.7.2	Produksi (ton)				23		-	-
2.2.1.14.7.3	Produktivitas (ton/ha)				1.05		-	-
2.2.1.14.8	Raja Ampat						-	-
2.2.1.14.8.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.14.8.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.14.8.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.14.9	Tambrauw						-	-
2.2.1.14.9.1	Luas Panen (ha)				3		-	-
2.2.1.14.9.2	Produksi (ton)				3		-	-
2.2.1.14.9.3	Produktivitas (ton/ha)				1		-	-
2.2.1.14.10	Maybrat						-	-
2.2.1.14.10.1	Luas Panen (ha)				29		-	-
2.2.1.14.10.2	Produksi (ton)				33		-	-
2.2.1.14.10.3	Produktivitas (ton/ha)				1.14		-	-
2.2.1.14.11	Kota Sorong						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.14.11.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.14.11.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.14.11.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.14.12	Manokwari Selatan						-	-
2.2.1.14.12.1	Luas Panen (ha)				18		-	-
2.2.1.14.12.2	Produksi (ton)				20		-	-
2.2.1.14.12.3	Produktivitas (ton/ha)				1.11		-	-
2.2.1.14.13	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.1.14.13.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.14.13.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.14.13.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.15	Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Kayu						-	-
2.2.1.15.1	Luas Panen (ha)	844	1,082	992	987		-	-
2.2.1.15.2	Produksi (ton)	9,748	12,219	11,167	11,181		-	-
2.2.1.15.3	Produktivitas (ton/ha)	11.55	11.29	11.26	11.33		-	-
2.2.1.16	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Kayu						-	-
2.2.1.16.1	Fakfak						-	-
2.2.1.16.1.1	Luas Panen (ha)				62		-	-
2.2.1.16.1.2	Produksi (ton)				713		-	-
2.2.1.16.1.3	Produktivitas (ton/ha)				11.50		-	-
2.2.1.16.2	Kaimana						-	-
2.2.1.16.2.1	Luas Panen (ha)				31		-	-
2.2.1.16.2.2	Produksi (ton)				342		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.16.2.3	Produktivitas (ton/ha)				11.03		-	-
2.2.1.16.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.1.16.3.1	Luas Panen (ha)				68		-	-
2.2.1.16.3.2	Produksi (ton)				799		-	-
2.2.1.16.3.3	Produktivitas (ton/ha)				11.75		-	-
2.2.1.16.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.1.16.4.1	Luas Panen (ha)				54		-	-
2.2.1.16.4.2	Produksi (ton)				622		-	-
2.2.1.16.4.3	Produktivitas (ton/ha)				11.52		-	-
2.2.1.16.5	Manokwari						-	-
2.2.1.16.5.1	Luas Panen (ha)				85		-	-
2.2.1.16.5.2	Produksi (ton)				934		-	-
2.2.1.16.5.3	Produktivitas (ton/ha)				10.99		-	-
2.2.1.16.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.1.16.6.1	Luas Panen (ha)				9		-	-
2.2.1.16.6.2	Produksi (ton)				104		-	-
2.2.1.16.6.3	Produktivitas (ton/ha)				11.56		-	-
2.2.1.16.7	Sorong						-	-
2.2.1.16.7.1	Luas Panen (ha)				246		-	-
2.2.1.16.7.2	Produksi (ton)				2,799		-	-
2.2.1.16.7.3	Produktivitas (ton/ha)				11.38		-	-
2.2.1.16.8	Raja Ampat						-	-
2.2.1.16.8.1	Luas Panen (ha)				173		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.16.8.2	Produksi (ton)				1,942		-	-
2.2.1.16.8.3	Produktivitas (ton/ha)				11.23		-	-
2.2.1.16.9	Tambrauw						-	-
2.2.1.16.9.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.16.9.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.16.9.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.16.10	Maybrat						-	-
2.2.1.16.10.1	Luas Panen (ha)				89		-	-
2.2.1.16.10.2	Produksi (ton)				982		-	-
2.2.1.16.10.3	Produktivitas (ton/ha)				11.03		-	-
2.2.1.16.11	Kota Sorong						-	-
2.2.1.16.11.1	Luas Panen (ha)				108		-	-
2.2.1.16.11.2	Produksi (ton)				1,240		-	-
2.2.1.16.11.3	Produktivitas (ton/ha)				11.48		-	-
2.2.1.16.12	Manokwari Selatan						-	-
2.2.1.16.12.1	Luas Panen (ha)				62		-	-
2.2.1.16.12.2	Produksi (ton)				704		-	-
2.2.1.16.12.3	Produktivitas (ton/ha)				11.35		-	-
2.2.1.16.13	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.1.16.13.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.16.13.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.16.13.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.17	Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Jalar						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.17.1	Luas Panen (ha)	1,029	1,343	1,080	1,157		-	-
2.2.1.17.2	Produksi (ton)	10,645	14,902	11,827	13,101		-	-
2.2.1.17.3	Produktivitas (ton/ha)	10.34	11.10	10.95	11.32		-	-
2.2.1.18	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Jalar						-	-
2.2.1.18.1	Fakfak						-	-
2.2.1.18.1.1	Luas Panen (ha)				24		-	-
2.2.1.18.1.2	Produksi (ton)				285		-	-
2.2.1.18.1.3	Produktivitas (ton/ha)				11.88		-	-
2.2.1.18.2	Kaimana						-	-
2.2.1.18.2.1	Luas Panen (ha)				23		-	-
2.2.1.18.2.2	Produksi (ton)				254		-	-
2.2.1.18.2.3	Produktivitas (ton/ha)				11.04		-	-
2.2.1.18.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.1.18.3.1	Luas Panen (ha)				51		-	-
2.2.1.18.3.2	Produksi (ton)				594		-	-
2.2.1.18.3.3	Produktivitas (ton/ha)				11.65		-	-
2.2.1.18.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.1.18.4.1	Luas Panen (ha)				116		-	-
2.2.1.18.4.2	Produksi (ton)				1,343		-	-
2.2.1.18.4.3	Produktivitas (ton/ha)				11.58		-	-
2.2.1.18.5	Manokwari						-	-
2.2.1.18.5.1	Luas Panen (ha)				164		-	-
2.2.1.18.5.2	Produksi (ton)				1,865		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.18.5.3	Produktivitas (ton/ha)				11.37		-	-
2.2.1.18.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.1.18.6.1	Luas Panen (ha)				15		-	-
2.2.1.18.6.2	Produksi (ton)				170		-	-
2.2.1.18.6.3	Produktivitas (ton/ha)				11.33		-	-
2.2.1.18.7	Sorong						-	-
2.2.1.18.7.1	Luas Panen (ha)				227		-	-
2.2.1.18.7.2	Produksi (ton)				2,571		-	-
2.2.1.18.7.3	Produktivitas (ton/ha)				11.33		-	-
2.2.1.18.8	Raja Ampat						-	-
2.2.1.18.8.1	Luas Panen (ha)				217		-	-
2.2.1.18.8.2	Produksi (ton)				2,430		-	-
2.2.1.18.8.3	Produktivitas (ton/ha)				11.20		-	-
2.2.1.18.9	Tambrauw						-	-
2.2.1.18.9.1	Luas Panen (ha)				-		-	-
2.2.1.18.9.2	Produksi (ton)				-		-	-
2.2.1.18.9.3	Produktivitas (ton/ha)				-		-	-
2.2.1.18.10	Maybrat						-	-
2.2.1.18.10.1	Luas Panen (ha)				98		-	-
2.2.1.18.10.2	Produksi (ton)				1,086		-	-
2.2.1.18.10.3	Produktivitas (ton/ha)				11.08		-	-
2.2.1.18.11	Kota Sorong						-	-
2.2.1.18.11.1	Luas Panen (ha)				83		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.18.11.2	Produksi (ton)				946		-	-
2.2.1.18.11.3	Produktivitas (ton/ha)				11.40		-	-
2.2.1.18.12	Manokwari Selatan						-	-
2.2.1.18.12.1	Luas Panen (ha)				76		-	-
2.2.1.18.12.2	Produksi (ton)				868		-	-
2.2.1.18.12.3	Produktivitas (ton/ha)				11.42		-	-
2.2.1.18.13	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.1.18.13.1	Luas Panen (ha)				63		-	-
2.2.1.18.13.2	Produksi (ton)				689		-	-
2.2.1.18.13.3	Produktivitas (ton/ha)				10.94		-	-
2.2.1.19	Perkembangan Luas Panen dan Produksi Sayuran						-	-
2.2.1.19.1	Bawang Merah						-	-
2.2.1.19.1.1	Luas Panen (ha)	62	47	21			-	-
2.2.1.19.1.2	Produksi (ton)	189	16	6			-	-
2.2.1.19.2	Bawang Putih						-	-
2.2.1.19.2.1	Luas Panen (ha)	19	-	-			-	-
2.2.1.19.2.2	Produksi (ton)	35	-	-			-	-
2.2.1.19.3	Bawang Daun						-	-
2.2.1.19.3.1	Luas Panen (ha)	154	89	90			-	-
2.2.1.19.3.2	Produksi (ton)	615	30	27			-	-
2.2.1.19.4	Jentang						-	-
2.2.1.19.4.1	Luas Panen (ha)	14	3	3			-	-
2.2.1.19.4.2	Produksi (ton)	98	23	1			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.19.5	Kubis						-	-
2.2.1.19.5.1	Luas Panen (ha)	243	156	139			-	-
2.2.1.19.5.2	Produksi (ton)	578	218	124			-	-
2.2.1.19.6	Kembang Kol						-	-
2.2.1.19.6.1	Luas Panen (ha)	16	8	9			-	-
2.2.1.19.6.2	Produksi (ton)	42	12	7			-	-
2.2.1.19.7	Petsal						-	-
2.2.1.19.7.1	Luas Panen (ha)	909	678	713			-	-
2.2.1.19.7.2	Produksi (ton)	2,663	1,408	1,575			-	-
2.2.1.19.8	Wortel						-	-
2.2.1.19.8.1	Luas Panen (ha)	13	-	-			-	-
2.2.1.19.8.2	Produksi (ton)	85	-	-			-	-
2.2.1.19.9	Kacang Merah						-	-
2.2.1.19.9.1	Luas Panen (ha)	1	6	6			-	-
2.2.1.19.9.2	Produksi (ton)	2	6	1			-	-
2.2.1.19.10	Kacang Panjang						-	-
2.2.1.19.10.1	Luas Panen (ha)	809	550	582			-	-
2.2.1.19.10.2	Produksi (ton)	4,652	1,190	1,075			-	-
2.2.1.19.11	Cabe Besar						-	-
2.2.1.19.11.1	Luas Panen (ha)	278	123	167			-	-
2.2.1.19.11.2	Produksi (ton)	1,089	234	272			-	-
2.2.1.19.12	Cabe Rawit						-	-
2.2.1.19.12.1	Luas Panen (ha)	632	497	503			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.19.12.2	Produksi (ton)	1,651	831	749			-	-
2.2.1.19.13	Tomat						-	-
2.2.1.19.13.1	Luas Panen (ha)	670	391	415			-	-
2.2.1.19.13.2	Produksi (ton)	2,849	916	694			-	-
2.2.1.19.14	Terung						-	-
2.2.1.19.14.1	Luas Panen (ha)	412	254	262			-	-
2.2.1.19.14.2	Produksi (ton)	2,530	664	555			-	-
2.2.1.19.15	Buncis						-	-
2.2.1.19.15.1	Luas Panen (ha)	267	190	205			-	-
2.2.1.19.15.2	Produksi (ton)	1,200	224	266			-	-
2.2.1.19.16	Ketimun						-	-
2.2.1.19.16.1	Luas Panen (ha)	449	290	353			-	-
2.2.1.19.16.2	Produksi (ton)	1,470	702	417			-	-
2.2.1.19.17	Labu Siam						-	-
2.2.1.19.17.1	Luas Panen (ha)	140	71	105			-	-
2.2.1.19.17.2	Produksi (ton)	493	318	156			-	-
2.2.1.19.18	Kangkung						-	-
2.2.1.19.18.1	Luas Panen (ha)	646	387	445			-	-
2.2.1.19.18.2	Produksi (ton)	4,756	2,112	1,994			-	-
2.2.1.19.19	Bayam						-	-
2.2.1.19.19.1	Luas Panen (ha)	741	607	779			-	-
2.2.1.19.19.2	Produksi (ton)	1,745	691	1,057			-	-
2.2.1.19.20	Melon						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.19.20.1	Luas Panen (ha)	49	43	76			-	-
2.2.1.19.20.2	Produksi (ton)	434	661	154			-	-
2.2.1.19.21	Semangka						-	-
2.2.1.19.21.1	Luas Panen (ha)	113	97	160			-	-
2.2.1.19.21.2	Produksi (ton)	817	1,124	402			-	-
2.2.1.20	Perkembangan Produksi Buah						-	-
2.2.1.20.1	Alpukat	506	158	1,290			-	-
2.2.1.20.2	Belimbing	205	70	448			-	-
2.2.1.20.3	Duku	1,705	308	1,944			-	-
2.2.1.20.4	Durian	2,846	1,172	12,585			-	-
2.2.1.20.5	Jambu Biji	350	536	536			-	-
2.2.1.20.6	Jambu Air	309	109	109			-	-
2.2.1.20.7	Jeruk Siam	381	234	796			-	-
2.2.1.20.8	Jeruk Besar	186	65	453			-	-
2.2.1.20.9	Mangga	1,181	382	2,673			-	-
2.2.1.20.10	Nangka	1,175	502	2,437			-	-
2.2.1.20.11	Nanas	164	56	499			-	-
2.2.1.20.12	Pepaya	1,376	387	4,107			-	-
2.2.1.20.13	Pisang	5,452	1,884	16,142			-	-
2.2.1.20.14	Rambutan	945	1,047	3,405			-	-
2.2.1.20.15	Salak	361	131	1,612			-	-
2.2.1.20.16	Sawo	16	13	128			-	-
2.2.1.20.17	Sirsak	63	63	321			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.20.18	Sukun	468	271	1,937			-	-
2.2.1.20.19	Melinjo	41	9	90			-	-
2.2.1.20.20	Petai	24	19	111			-	-
2.2.1.21	Perkembangan Produksi Tanaman Obat						-	-
2.2.1.21.1	Jahe	22,017	56,860	29,065			-	-
2.2.1.21.2	Laos	29,549	58,599	23,163			-	-
2.2.1.21.3	Kencur	3,239	18,044	9,520			-	-
2.2.1.21.4	Kunyit	23,576	49,231	22,542			-	-
2.2.1.21.5	Lempuyang	2,837	180	31			-	-
2.2.1.21.6	Temulawak	275	57	30			-	-
2.2.1.21.7	Temuireng	166	50	32			-	-
2.2.1.21.8	Dringo	1,465	20	-			-	-
2.2.1.21.9	Kapulaga	8	114	35			-	-
2.2.1.21.10	Mengkudu	19,542	4,006	1,981			-	-
2.2.1.21.11	Kejibeling	1,301	22	85			-	-
2.2.1.21.12	Sambiloto	1,307	726	341			-	-
2.2.1.22	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kelapa						-	-
2.2.1.22.1	Luas Areal (ha)	8,873	8,192	14,038			-	-
2.2.1.22.2	Produksi (ton)	16,239	14,871	5,603			-	-
2.2.1.23	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit						-	-
2.2.1.23.1	Luas Areal (ha)	10,915	15,423	37,602			-	-
2.2.1.23.2	Produksi (ton)	32,397	22,581	293,181			-	-
2.2.1.24	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kopi						-	-
2.2.1.24.1	Luas Areal (ha)	503	542	522			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.24.2	Produksi (ton)	169	176	61			-	-
2.2.1.25	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Cengkeh						-	-
2.2.1.25.1	Luas Areal (ha)	653	611	816			-	-
2.2.1.25.2	Produksi (ton)	56	85	84			-	-
2.2.1.26	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kakao						-	-
2.2.1.26.1	Luas Areal (ha)	7,525	6,756	10,804			-	-
2.2.1.26.2	Produksi (ton)	2,751	9,279	3,105			-	-
2.2.1.27	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Pala						-	-
2.2.1.27.1	Luas Areal (ha)	5,228	13,035	15,087			-	-
2.2.1.27.2	Produksi (ton)	1,916	-	4,658			-	-
2.2.1.28	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Jambu Mete						-	-
2.2.1.28.1	Luas Areal (ha)	389	116	113			-	-
2.2.1.28.2	Produksi (ton)	24.58	4.58	2.00			-	-
2.2.1.29	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Sagu						-	-
2.2.1.29.1	Luas Areal (ha)	594	602	1,957			-	-
2.2.1.29.2	Produksi (ton)	-	-	843			-	-
2.2.1.30	Perkembangan Populasi Ternak Besar dan Kecil						-	-
2.2.1.30.1	Fakfak						-	-
2.2.1.30.1.1	Sapi Potong	4,696	2,458	4,557			-	-
2.2.1.30.1.2	Kambing	795	953	1,021			-	-
2.2.1.30.1.3	Babi	795	954	2,978			-	-
2.2.1.30.2	Kaimana						-	-
2.2.1.30.2.1	Sapi Potong	645	606	798			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.30.2.2	Kambing	740	858	962			-	-
2.2.1.30.2.3	Babi	645	752	1,059			-	-
2.2.1.30.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.1.30.3.1	Sapi Potong	248	310	453			-	-
2.2.1.30.3.2	Kambing	317	431	508			-	-
2.2.1.30.3.3	Babi	329	394	607			-	-
2.2.1.30.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.1.30.4.1	Sapi Potong	1,409	1,720	2,142			-	-
2.2.1.30.4.2	Kambing	375	380	367			-	-
2.2.1.30.4.3	Babi	3,910	4,692	4,025			-	-
2.2.1.30.5	Manokwari						-	-
2.2.1.30.5.1	Sapi Potong	21,003	20,843	21,287			-	-
2.2.1.30.5.2	Kambing	8,695	8,991	6,440			-	-
2.2.1.30.5.3	Babi	38,451	46,141	34,994			-	-
2.2.1.30.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.1.30.6.1	Sapi Potong	766	597	911			-	-
2.2.1.30.6.2	Kambing	889	1,009	1,250			-	-
2.2.1.30.6.3	Babi	1,483	2,359	2,857			-	-
2.2.1.30.7	Sorong						-	-
2.2.1.30.7.1	Sapi Potong	19,416	18,748	21,942			-	-
2.2.1.30.7.2	Kambing	4,139	4,308	5,201			-	-
2.2.1.30.7.3	Babi	14,476	17,371	15,718			-	-
2.2.1.30.8	Raja Ampat						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.30.8.1	Sapi Potong	1,546	1,345	1,703			-	-
2.2.1.30.8.2	Kambing	1,852	2,151	2,604			-	-
2.2.1.30.8.3	Babi	1,562	1,874	812			-	-
2.2.1.30.9	Tambrauw						-	-
2.2.1.30.9.1	Sapi Potong	228	243	2,380			-	-
2.2.1.30.9.2	Kambing	391	454	540			-	-
2.2.1.30.9.3	Babi	879	1,054	1,421			-	-
2.2.1.30.10	Maybrat						-	-
2.2.1.30.10.1	Sapi Potong	175	144	235			-	-
2.2.1.30.10.2	Kambing	227	273	318			-	-
2.2.1.30.10.3	Babi	2,532	3,038	2,078			-	-
2.2.1.30.11	Kota Sorong						-	-
2.2.1.30.11.1	Sapi Potong	1,914	1,145	1,493			-	-
2.2.1.30.11.2	Kambing	1,981	2,486	2,511			-	-
2.2.1.30.11.3	Babi	15,795	18,954	19,244			-	-
2.2.1.30.12	Manokwari Selatan						-	-
2.2.1.30.12.1	Sapi Potong	-	-	2,706			-	-
2.2.1.30.12.2	Kambing	-	-	2,354			-	-
2.2.1.30.12.3	Babi	-	-	2,292			-	-
2.2.1.30.13	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.1.30.13.1	Sapi Potong	-	-	829			-	-
2.2.1.30.13.2	Kambing	-	-	182			-	-
2.2.1.30.13.3	Babi	-	-	3,851			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.31	Perkembangan Populasi Ternak Unggas						-	-
2.2.1.31.1	Fakfak						-	-
2.2.1.31.1.1	Ayam Kampung	76,693	92,032	38,700			-	-
2.2.1.31.1.2	Ayam Petelur	-	-	2,917			-	-
2.2.1.31.1.3	Ayam Pedaging	3,353	3,755	4,206			-	-
2.2.1.31.1.4	Itik	487	623	797			-	-
2.2.1.31.2	Kaimana						-	-
2.2.1.31.2.1	Ayam Kampung	29,054	34,863	48,159			-	-
2.2.1.31.2.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.31.2.3	Ayam Pedaging	-	-	-			-	-
2.2.1.31.2.4	Itik	106	173	173			-	-
2.2.1.31.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.1.31.3.1	Ayam Kampung	58,407	70,088	2,944			-	-
2.2.1.31.3.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.31.3.3	Ayam Pedaging	-	-	-			-	-
2.2.1.31.3.4	Itik	122	156	200			-	-
2.2.1.31.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.1.31.4.1	Ayam Kampung	78,691	94,429	121,815			-	-
2.2.1.31.4.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.31.4.3	Ayam Pedaging	1,444	1,498	1,555			-	-
2.2.1.31.4.4	Itik	1,019	1,303	1,667			-	-
2.2.1.31.5	Manokwari						-	-
2.2.1.31.5.1	Ayam Kampung	356,897	428,276	481,937			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.31.5.2	Ayam Petelur	6,000	7,200	8,881			-	-
2.2.1.31.5.3	Ayam Pedaging	534,087	78,668	665,800			-	-
2.2.1.31.5.4	Itik	8,523	24,977	26,956			-	-
2.2.1.31.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.1.31.6.1	Ayam Kampung	85,144	102,173	129,951			-	-
2.2.1.31.6.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.31.6.3	Ayam Pedaging	-	-	-			-	-
2.2.1.31.6.4	Itik	107	136	174			-	-
2.2.1.31.7	Sorong						-	-
2.2.1.31.7.1	Ayam Kampung	276,146	331,375	356,475			-	-
2.2.1.31.7.2	Ayam Petelur	41,040	41,040	42,678			-	-
2.2.1.31.7.3	Ayam Pedaging	552,481	323,263	340,267			-	-
2.2.1.31.7.4	Itik	5,239	4,143	21,192			-	-
2.2.1.31.8	Raja Ampat						-	-
2.2.1.31.8.1	Ayam Kampung	78,564	94,277	138,341			-	-
2.2.1.31.8.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.31.8.3	Ayam Pedaging	-	-	-			-	-
2.2.1.31.8.4	Itik	131	167	214			-	-
2.2.1.31.9	Tambrauw						-	-
2.2.1.31.9.1	Ayam Kampung	3,423	4,108	5,902			-	-
2.2.1.31.9.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.31.9.3	Ayam Pedaging	-	-	-			-	-
2.2.1.31.9.4	Itik	-	-	-			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.31.10	Maybrat						-	-
2.2.1.31.10.1	Ayam Kampung	1,381	1,657	2,010			-	-
2.2.1.31.10.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.31.10.3	Ayam Pedaging	-	-	-			-	-
2.2.1.31.10.4	Itik	-	-	-			-	-
2.2.1.31.11	Kota Sorong						-	-
2.2.1.31.11.1	Ayam Kampung	131,720	158,064	213,643			-	-
2.2.1.31.11.2	Ayam Petelur	3,543	4,252	5,641			-	-
2.2.1.31.11.3	Ayam Pedaging	549,572	238,678	248,225			-	-
2.2.1.31.11.4	Itik	-	583	746			-	-
2.2.1.31.12	Manokwari Selatan						-	-
2.2.1.31.12.1	Ayam Kampung	-	-	30,158			-	-
2.2.1.31.12.2	Ayam Petelur	-	-	2,000			-	-
2.2.1.31.12.3	Ayam Pedaging	-	-	-			-	-
2.2.1.31.12.4	Itik	-	-	-			-	-
2.2.1.31.13	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.1.31.13.1	Ayam Kampung	-	-	37,625			-	-
2.2.1.31.13.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.31.13.3	Ayam Pedaging	-	-	-			-	-
2.2.1.31.13.4	Itik	-	-	-			-	-
2.2.1.32	Pemotongan Ternak Besar dan Kecil						-	-
2.2.1.32.1	Fakfak						-	-
2.2.1.32.1.1	Sapi Potong	598	821	1,088			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.32.12	Kambing	-	436	665			-	-
2.2.1.32.13	Babi	55	192	257			-	-
2.2.1.32.2	Kaimana						-	-
2.2.1.32.21	Sapi Potong	22	34	654			-	-
2.2.1.32.22	Kambing	-	432	355			-	-
2.2.1.32.23	Babi	19	68	81			-	-
2.2.1.32.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.1.32.31	Sapi Potong	17	26	44			-	-
2.2.1.32.32	Kambing	-	212	347			-	-
2.2.1.32.33	Babi	40	127	153			-	-
2.2.1.32.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.1.32.41	Sapi Potong	403	618	732			-	-
2.2.1.32.42	Kambing	-	207	95			-	-
2.2.1.32.43	Babi	47	138	156			-	-
2.2.1.32.5	Manokwari						-	-
2.2.1.32.51	Sapi Potong	5,354	8,214	6,606			-	-
2.2.1.32.52	Kambing	-	5,131	3,535			-	-
2.2.1.32.53	Babi	476	1,399	8,385			-	-
2.2.1.32.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.1.32.61	Sapi Potong	98	150	308			-	-
2.2.1.32.62	Kambing	-	513	583			-	-
2.2.1.32.63	Babi	216	681	824			-	-
2.2.1.32.7	Sorong						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.32.7.1	Sapi Potong	6,003	9,208	7,808			-	-
2.2.1.32.7.2	Kambing	-	2,518	2,184			-	-
2.2.1.32.7.3	Babi	817	2,574	3,115			-	-
2.2.1.32.8	Raja Ampat						-	-
2.2.1.32.8.1	Sapi Potong	327	502	1,241			-	-
2.2.1.32.8.2	Kambing	-	1,127	1,621			-	-
2.2.1.32.8.3	Babi	181	569	692			-	-
2.2.1.32.9	Tambrauw						-	-
2.2.1.32.9.1	Sapi Potong	15	23	52			-	-
2.2.1.32.9.2	Kambing	-	326	341			-	-
2.2.1.32.9.3	Babi	86	270	330			-	-
2.2.1.32.10	Maybrat						-	-
2.2.1.32.10.1	Sapi Potong	23	35	41			-	-
2.2.1.32.10.2	Kambing	-	84	172			-	-
2.2.1.32.10.3	Babi	170	517	606			-	-
2.2.1.32.11	Kota Sorong						-	-
2.2.1.32.11.1	Sapi Potong	2,956	4,535	2,624			-	-
2.2.1.32.11.2	Kambing	-	1,276	1,517			-	-
2.2.1.32.11.3	Babi	5,228	16,461	14,734			-	-
2.2.1.32.12	Manokwari Selatan						-	-
2.2.1.32.12.1	Sapi Potong	-	-	293			-	-
2.2.1.32.12.2	Kambing	-	-	891			-	-
2.2.1.32.12.3	Babi	-	-	796			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.32.13	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.1.32.13.1	Sapi Potong	-	-	190			-	-
2.2.1.32.13.2	Kambing	-	-	11			-	-
2.2.1.32.13.3	Babi	-	-	806			-	-
2.2.1.33	Perkembangan Produksi Daging Ternak Besar dan Kecil						-	-
2.2.1.33.1	Fakfak						-	-
2.2.1.33.1.1	Sapi Potong	100,464	-	183,644			-	-
2.2.1.33.1.2	Kambing	3,005	-	8,412			-	-
2.2.1.33.1.3	Babi	3,025	-	14,157			-	-
2.2.1.33.2	Kaimana						-	-
2.2.1.33.2.1	Sapi Potong	3,696	-	110,361			-	-
2.2.1.33.2.2	Kambing	2,788	-	4,494			-	-
2.2.1.33.2.3	Babi	1,045	-	4,453			-	-
2.2.1.33.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.1.33.3.1	Sapi Potong	2,898	-	7,416			-	-
2.2.1.33.3.2	Kambing	1,188	-	4,383			-	-
2.2.1.33.3.3	Babi	2,200	-	8,437			-	-
2.2.1.33.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.1.33.4.1	Sapi Potong	67,620	-	123,447			-	-
2.2.1.33.4.2	Kambing	1,406	-	1,195			-	-
2.2.1.33.4.3	Babi	2,585	-	8,580			-	-
2.2.1.33.5	Manokwari						-	-
2.2.1.33.5.1	Sapi Potong	899,539	-	1,114,513			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.33.5.2	Kambing	33,007	-	44,718			-	-
2.2.1.33.5.3	Babi	26,180	-	461,175			-	-
2.2.1.33.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.1.33.6.1	Sapi Potong	16,422	-	51,909			-	-
2.2.1.33.6.2	Kambing	3,374	-	7,372			-	-
2.2.1.33.6.3	Babi	11,880	-	45,331			-	-
2.2.1.33.7	Sorong						-	-
2.2.1.33.7.1	Sapi Potong	1,008,504	-	1,317,350			-	-
2.2.1.33.7.2	Kambing	15,703	-	27,628			-	-
2.2.1.33.7.3	Babi	44,935	-	171,314			-	-
2.2.1.33.8	Raja Ampat						-	-
2.2.1.33.8.1	Sapi Potong	54,869	-	209,380			-	-
2.2.1.33.8.2	Kambing	7,030	-	20,499			-	-
2.2.1.33.8.3	Babi	9,955	-	38,038			-	-
2.2.1.33.9	Tambrauw						-	-
2.2.1.33.9.1	Sapi Potong	2,520	-	8,724			-	-
2.2.1.33.9.2	Kambing	2,011	-	4,317			-	-
2.2.1.33.9.3	Babi	4,730	-	18,161			-	-
2.2.1.33.10	Maybrat						-	-
2.2.1.33.10.1	Sapi Potong	3,864	-	6,979			-	-
2.2.1.33.10.2	Kambing	507	-	2,169			-	-
2.2.1.33.10.3	Babi	9,350	-	33,319			-	-
2.2.1.33.11	Kota Sorong						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.33.11.1	Sapi Potong	496,608	-	442,752			-	-
2.2.1.33.11.2	Kambing	8,978	-	19,193			-	-
2.2.1.33.11.3	Babi	287,540	-	810,381			-	-
2.2.1.33.12	Manokwari Selatan						-	-
2.2.1.33.12.1	Sapi Potong	-	-	49,510			-	-
2.2.1.33.12.2	Kambing	-	-	133			-	-
2.2.1.33.12.3	Babi	-	-	43,758			-	-
2.2.1.33.13	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.1.33.13.1	Sapi Potong	-	-	32,061			-	-
2.2.1.33.13.2	Kambing	-	-	11,268			-	-
2.2.1.33.13.3	Babi	-	-	4,430			-	-
2.2.1.34	Perkembangan Produksi Daging Ternak Unggas						-	-
2.2.1.34.1	Fakfak						-	-
2.2.1.34.1.1	Ayam Kampung	56,100	-	28,309			-	-
2.2.1.34.1.2	Ayam Petelur	-	-	22,386			-	-
2.2.1.34.1.3	Ayam Pedaging	2,615	-	3,421			-	-
2.2.1.34.1.4	Itik	290	-	500			-	-
2.2.1.34.2	Kaimana						-	-
2.2.1.34.2.1	Ayam Kampung	21,252	-	35,228			-	-
2.2.1.34.2.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.34.2.3	Ayam Pedaging	-	-	-			-	-
2.2.1.34.2.4	Itik	63	-	108			-	-
2.2.1.34.3	Teluk Wondama						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.34.3.1	Ayam Kampung	42,724	-	2,154			-	-
2.2.1.34.3.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.34.3.3	Ayam Pedaging	-	-	-			-	-
2.2.1.34.3.4	Itik	72	-	125			-	-
2.2.1.34.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.1.34.4.1	Ayam Kampung	57,562	-	89,108			-	-
2.2.1.34.4.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.34.4.3	Ayam Pedaging	1,126	-	1,265			-	-
2.2.1.34.4.4	Itik	609	-	1,045			-	-
2.2.1.34.5	Manokwari						-	-
2.2.1.34.5.1	Ayam Kampung	261,070	-	352,537			-	-
2.2.1.34.5.2	Ayam Petelur	9,601	-	7,265			-	-
2.2.1.34.5.3	Ayam Pedaging	55,474	-	541,595			-	-
2.2.1.34.5.4	Itik	11,684	-	16,901			-	-
2.2.1.34.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.1.34.6.1	Ayam Kampung	62,282	-	95,059			-	-
2.2.1.34.6.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.34.6.3	Ayam Pedaging	-	-	-			-	-
2.2.1.34.6.4	Itik	63	-	109			-	-
2.2.1.34.7	Sorong						-	-
2.2.1.34.7.1	Ayam Kampung	202,000	-	101,196			-	-
2.2.1.34.7.2	Ayam Petelur	9,852	-	34,914			-	-
2.2.1.34.7.3	Ayam Pedaging	75,057	-	276,790			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.34.7.4	Itik	1,938	-	13,287			-	-
2.2.1.34.8	Raja Ampat						-	-
2.2.1.34.8.1	Ayam Kampung	57,486	-	260,761			-	-
2.2.1.34.8.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.34.8.3	Ayam Pedaging	-	-	-			-	-
2.2.1.34.8.4	Itik	77	-	134			-	-
2.2.1.34.9	Tambrauw						-	-
2.2.1.34.9.1	Ayam Kampung	2,503	-	4,317			-	-
2.2.1.34.9.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.34.9.3	Ayam Pedaging	-	-	-			-	-
2.2.1.34.9.4	Itik	-	-	-			-	-
2.2.1.34.10	Maybrat						-	-
2.2.1.34.10.1	Ayam Kampung	957	-	1,470			-	-
2.2.1.34.10.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.34.10.3	Ayam Pedaging	-	-	-			-	-
2.2.1.34.10.4	Itik	-	-	-			-	-
2.2.1.34.11	Kota Sorong						-	-
2.2.1.34.11.1	Ayam Kampung	96,353	-	156,280			-	-
2.2.1.34.11.2	Ayam Petelur	1,123	-	4,615			-	-
2.2.1.34.11.3	Ayam Pedaging	179,054	-	201,909			-	-
2.2.1.34.11.4	Itik	271	-	468			-	-
2.2.1.34.12	Manokwari Selatan						-	-
2.2.1.34.12.1	Ayam Kampung	-	-	22,061			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.34.12.2	Ayam Petelur	-	-	1,636			-	-
2.2.1.34.12.3	Ayam Pedaging	-	-	-			-	-
2.2.1.34.12.4	Itik	-	-	-			-	-
2.2.1.34.13	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.1.34.13.1	Ayam Kampung	-	-	27,523			-	-
2.2.1.34.13.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.34.13.3	Ayam Pedaging	-	-	-			-	-
2.2.1.34.13.4	Itik	-	-	-			-	-
2.2.1.35	Perkembangan Produksi Telur						-	-
2.2.1.35.1	Fakfak						-	-
2.2.1.35.1.1	Ayam Kampung	26,416	31,664	13,315			-	-
2.2.1.35.1.2	Ayam Petelur	-	-	40,635			-	-
2.2.1.35.1.3	Itik	-	3,359	4,298			-	-
2.2.1.35.2	Kaimana						-	-
2.2.1.35.2.1	Ayam Kampung	10,007	1,195	16,569			-	-
2.2.1.35.2.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.35.2.3	Itik	-	728	933			-	-
2.2.1.35.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.1.35.3.1	Ayam Kampung	20,118	24,114	1,013			-	-
2.2.1.35.3.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.35.3.3	Itik	-	841	1,078			-	-
2.2.1.35.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.1.35.4.1	Ayam Kampung	27,104	31,112	41,911			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.35.4.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.35.4.3	Itik	-	7,026	8,989			-	-
2.2.1.35.5	Manokwari						-	-
2.2.1.35.5.1	Ayam Kampung	122,930	147,350	165,812			-	-
2.2.1.35.5.2	Ayam Petelur	421,559	-	123,715			-	-
2.2.1.35.5.3	Itik	-	134,682	143,353			-	-
2.2.1.35.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.1.35.6.1	Ayam Kampung	29,327	35,153	44,710			-	-
2.2.1.35.6.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.35.6.3	Itik	-	733	938			-	-
2.2.1.35.7	Sorong						-	-
2.2.1.35.7.1	Ayam Kampung	95,116	144,010	122,646			-	-
2.2.1.35.7.2	Ayam Petelur	432,560	-	594,516			-	-
2.2.1.35.7.3	Itik	-	22,340	114,272			-	-
2.2.1.35.8	Raja Ampat						-	-
2.2.1.35.8.1	Ayam Kampung	27,061	28,995	47,597			-	-
2.2.1.35.8.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.35.8.3	Itik	-	901	1,154			-	-
2.2.1.35.9	Tambrauw						-	-
2.2.1.35.9.1	Ayam Kampung	1,179	1,413	2,031			-	-
2.2.1.35.9.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.35.9.3	Itik	-	-	-			-	-
2.2.1.35.10	Maybrat						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.35.10.1	Ayam Kampung	476	570	692			-	-
2.2.1.35.10.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.35.10.3	Itik	-	-	-			-	-
2.2.1.35.11	Kota Sorong						-	-
2.2.1.35.11.1	Ayam Kampung	45,370	54,382	73,504			-	-
2.2.1.35.11.2	Ayam Petelur	49,337	-	78,581			-	-
2.2.1.35.11.3	Itik	-	3,144	4,023			-	-
2.2.1.35.12	Manokwari Selatan						-	-
2.2.1.35.12.1	Ayam Kampung	-	-	10,376			-	-
2.2.1.35.12.2	Ayam Petelur	-	-	27,861			-	-
2.2.1.35.12.3	Itik	-	-	-			-	-
2.2.1.35.13	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.1.35.13.1	Ayam Kampung	-	-	12,945			-	-
2.2.1.35.13.2	Ayam Petelur	-	-	-			-	-
2.2.1.35.13.3	Itik	-	-	-			-	-
2:02:02	Kehutanan						-	-
2.2.2.1	Luas Kawasan Hutan dan Perairan (ha)						-	-
2.2.2.1.1	Fakfak						-	-
2.2.2.1.1.1	Hutan Lindung				43,742.27		-	-
2.2.2.1.1.2	Suaka Alam dan Pelestarian Alam				55,261.94		-	-
2.2.2.1.1.3	Hutan Produksi Terbatas				224,198.29		-	-
2.2.2.1.1.4	Hutan Produksi Tetap				442,788.10		-	-
2.2.2.1.1.5	Hutan Produksi dapat dikonversi				136,837.68		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.2.1.2	Kaimana						-	-
2.2.2.1.2.1	Hutan Lindung				339,458.29		-	-
2.2.2.1.2.2	Suaka Alam dan Pelestarian Alam				131,435.40		-	-
2.2.2.1.2.3	Hutan Produksi Terbatas				567,758.68		-	-
2.2.2.1.2.4	Hutan Produksi Tetap				336,199.79		-	-
2.2.2.1.2.5	Hutan Produksi dapat dikonversi				123,623.50		-	-
2.2.2.1.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.2.1.3.1	Hutan Lindung				54,265.08		-	-
2.2.2.1.3.2	Suaka Alam dan Pelestarian Alam				794,392.22		-	-
2.2.2.1.3.3	Hutan Produksi Terbatas				78,289.74		-	-
2.2.2.1.3.4	Hutan Produksi Tetap				68,915.16		-	-
2.2.2.1.3.5	Hutan Produksi dapat dikonversi				150,450.44		-	-
2.2.2.1.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.2.1.4.1	Hutan Lindung				127,225.96		-	-
2.2.2.1.4.2	Suaka Alam dan Pelestarian Alam				197,256.19		-	-
2.2.2.1.4.3	Hutan Produksi Terbatas				486,223.15		-	-
2.2.2.1.4.4	Hutan Produksi Tetap				746,095.34		-	-
2.2.2.1.4.5	Hutan Produksi dapat dikonversi				233,260.35		-	-
2.2.2.1.5	Manokwari						-	-
2.2.2.1.5.1	Hutan Lindung				62,364.94		-	-
2.2.2.1.5.2	Suaka Alam dan Pelestarian Alam				96,325.29		-	-
2.2.2.1.5.3	Hutan Produksi Terbatas				34,859.52		-	-
2.2.2.1.5.4	Hutan Produksi Tetap				9,237.77		-	-
2.2.2.1.5.5	Hutan Produksi dapat dikonversi				19,221.33		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.2.1.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.2.1.6.1	Hutan Lindung				159,308.67		-	-
2.2.2.1.6.2	Suaka Alam dan Pelestarian Alam				12,067.28		-	-
2.2.2.1.6.3	Hutan Produksi Terbatas				17,494.78		-	-
2.2.2.1.6.4	Hutan Produksi Tetap				123,757.81		-	-
2.2.2.1.6.5	Hutan Produksi dapat dikonversi				198,669.33		-	-
2.2.2.1.7	Sorong						-	-
2.2.2.1.7.1	Hutan Lindung				34,599.57		-	-
2.2.2.1.7.2	Suaka Alam dan Pelestarian Alam				7,266.71		-	-
2.2.2.1.7.3	Hutan Produksi Terbatas				86,791.74		-	-
2.2.2.1.7.4	Hutan Produksi Tetap				175,695.51		-	-
2.2.2.1.7.5	Hutan Produksi dapat dikonversi				258,537.81		-	-
2.2.2.1.8	Raja Ampat						-	-
2.2.2.1.8.1	Hutan Lindung				147,451.65		-	-
2.2.2.1.8.2	Suaka Alam dan Pelestarian Alam				592,472.37		-	-
2.2.2.1.8.3	Hutan Produksi Terbatas				6,924.96		-	-
2.2.2.1.8.4	Hutan Produksi Tetap				18,017.03		-	-
2.2.2.1.8.5	Hutan Produksi dapat dikonversi				142,372.86		-	-
2.2.2.1.9	Tambrauw						-	-
2.2.2.1.9.1	Hutan Lindung				316,803.42		-	-
2.2.2.1.9.2	Suaka Alam dan Pelestarian Alam				607,566.22		-	-
2.2.2.1.9.3	Hutan Produksi Terbatas				143,551.53		-	-
2.2.2.1.9.4	Hutan Produksi Tetap				4,831.98		-	-
2.2.2.1.9.5	Hutan Produksi dapat dikonversi				92,866.24		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.2.1.10	Maybrat						-	-
2.2.2.1.10.1	Hutan Lindung				110,585.04		-	-
2.2.2.1.10.2	Suaka Alam dan Pelestarian Alam				21,629.92		-	-
2.2.2.1.10.3	Hutan Produksi Terbatas				37,634.14		-	-
2.2.2.1.10.4	Hutan Produksi Tetap				232,335.44		-	-
2.2.2.1.10.5	Hutan Produksi dapat dikonversi				51,361.33		-	-
2.2.2.1.11	Kota Sorong						-	-
2.2.2.1.11.1	Hutan Lindung				6,906.72		-	-
2.2.2.1.11.2	Suaka Alam dan Pelestarian Alam				1,081.05		-	-
2.2.2.1.11.3	Hutan Produksi Terbatas				5,260.34		-	-
2.2.2.1.11.4	Hutan Produksi Tetap				2,927.91		-	-
2.2.2.1.11.5	Hutan Produksi dapat dikonversi				25,225.04		-	-
2.2.2.1.12	Manokwari Selatan						-	-
2.2.2.1.12.1	Hutan Lindung				66,553.07		-	-
2.2.2.1.12.2	Suaka Alam dan Pelestarian Alam				44,496.22		-	-
2.2.2.1.12.3	Hutan Produksi Terbatas				50,956.46		-	-
2.2.2.1.12.4	Hutan Produksi Tetap				2,104,051.00		-	-
2.2.2.1.12.5	Hutan Produksi dapat dikonversi				8,357.11		-	-
2.2.2.1.13	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.2.1.13.1	Hutan Lindung				158,414.50		-	-
2.2.2.1.13.2	Suaka Alam dan Pelestarian Alam				78,480.86		-	-
2.2.2.1.13.3	Hutan Produksi Terbatas				37,493.23		-	-
2.2.2.1.13.4	Hutan Produksi Tetap				4,221.43		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.2.1.13.5	Hutan Produksi dapat dikonversi				-		-	-
2.2.2.2	Perkembangan Produksi Kayu Olahan						-	-
2.2.2.2.1	Fakfak	2,270.01	-				-	-
2.2.2.2.2	Kaimana	3,397.62	696.10				-	-
2.2.2.2.3	Teluk Wondama	-	-				-	-
2.2.2.2.4	Teluk Bintuni	115,050.26	61,497.59				-	-
2.2.2.2.5	Manokwari	-	1,783.61				-	-
2.2.2.2.6	Sorong Selatan	-	-				-	-
2.2.2.2.7	Sorong	70,334.40	86,560.20				-	-
2.2.2.2.8	Raja Ampat	-	-				-	-
2.2.2.2.9	Tambrauw	-	-				-	-
2.2.2.2.10	Maybrat	-	-				-	-
2.2.2.2.11	Kota Sorong	3,361.71	-				-	-
2.2.2.2.12	Manokwari Selatan	-	-				-	-
2.2.2.2.13	Pegunungan Arfak	-	-				-	-
2:02:03	Kelautan dan Perikanan						-	-
2.2.3.1	Potensi SDI di Perairan Menurut WPP.RI 715						-	-
2.2.3.1.1	Ikan Pelagis Kecil						-	-
2.2.3.1.1.1	Potensi (ton)					378,734	-	-
2.2.3.1.1.2	JBT (ton)					302,987	-	-
2.2.3.1.1.3	Tingkat Pemanfaatan					1.05	-	-
2.2.3.1.2	Ikan Pelagis Besar						-	-
2.2.3.1.2.1	Potensi (ton)					51,394	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.3.1.2.2	JBT (ton)					41,115	-	-
2.2.3.1.2.3	Tingkat Pemanfaatan					1.58	-	-
2.2.3.1.3	Ikan Demersal						-	-
2.2.3.1.3.1	Potensi (ton)					114,005	-	-
2.2.3.1.3.2	JBT (ton)					91,204	-	-
2.2.3.1.3.3	Tingkat Pemanfaatan					0.51	-	-
2.2.3.1.4	Ikan Karang						-	-
2.2.3.1.4.1	Potensi (ton)					69,975	-	-
2.2.3.1.4.2	JBT (ton)					55,890	-	-
2.2.3.1.4.3	Tingkat Pemanfaatan					0.49	-	-
2.2.3.1.5	Udang Penaeid						-	-
2.2.3.1.5.1	Potensi (ton)					6,089	-	-
2.2.3.1.5.2	JBT (ton)					4,871	-	-
2.2.3.1.5.3	Tingkat Pemanfaatan					1.21	-	-
2.2.3.1.6	Lobster						-	-
2.2.3.1.6.1	Potensi (ton)					710	-	-
2.2.3.1.6.2	JBT (ton)					568	-	-
2.2.3.1.6.3	Tingkat Pemanfaatan					1.23	-	-
2.2.3.1.7	Kepiting						-	-
2.2.3.1.7.1	Potensi (ton)					490	-	-
2.2.3.1.7.2	JBT (ton)					392	-	-
2.2.3.1.7.3	Tingkat Pemanfaatan					1.81	-	-
2.2.3.1.8	Rajungan						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.3.1.8.1	Potensi (ton)					643	-	-
2.2.3.1.8.2	JBT (ton)					515	-	-
2.2.3.1.8.3	Tingkat Pemanfaatan					1.2	-	-
2.2.3.1.9	Cumi-cumi						-	-
2.2.3.1.9.1	Potensi (ton)					9,664	-	-
2.2.3.1.9.2	JBT (ton)					7,731	-	-
2.2.3.1.9.3	Tingkat Pemanfaatan					1.8	-	-
2.2.3.2	Potensi SDI di Perairan Menurut WPP.RI 717						-	-
2.2.3.2.1	Ikan Pelagis Kecil						-	-
2.2.3.2.1.1	Potensi (ton)					391,126	-	-
2.2.3.2.1.2	JBT (ton)					312,901	-	-
2.2.3.2.1.3	Tingkat Pemanfaatan					0.73	-	-
2.2.3.2.2	Ikan Pelagis Besar						-	-
2.2.3.2.2.2	Potensi (ton)					56,067	-	-
2.2.3.2.2.3	JBT (ton)					44,854	-	-
2.2.3.2.2.4	Tingkat Pemanfaatan					0.95	-	-
2.2.3.2.3	Ikan Demersal						-	-
2.2.3.2.3.1	Potensi (ton)					111,619	-	-
2.2.3.2.3.2	JBT (ton)					89,295	-	-
2.2.3.2.3.3	Tingkat Pemanfaatan					0.45	-	-
2.2.3.2.4	Ikan Karang						-	-
2.2.3.2.4.1	Potensi (ton)					32,376	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.3.2.4.2	JBT (ton)					25,901	-	-
2.2.3.2.4.3	Tingkat Pemanfaatan					0.81	-	-
2.2.3.2.5	Udang Penaeid						-	-
2.2.3.2.5.1	Potensi (ton)					8,669	-	-
2.2.3.2.5.2	JBT (ton)					6,935	-	-
2.2.3.2.5.3	Tingkat Pemanfaatan					0.25	-	-
2.2.3.2.6	Lobster						-	-
2.2.3.2.6.1	Potensi (ton)					1,065	-	-
2.2.3.2.6.2	JBT (ton)					852	-	-
2.2.3.2.6.3	Tingkat Pemanfaatan					1.21	-	-
2.2.3.2.7	Kepiting						-	-
2.2.3.2.7.1	Potensi (ton)					620	-	-
2.2.3.2.7.2	JBT (ton)					496	-	-
2.2.3.2.7.3	Tingkat Pemanfaatan					0.9	-	-
2.2.3.2.8	Rajungan						-	-
2.2.3.2.8.1	Potensi (ton)					22	-	-
2.2.3.2.8.2	JBT (ton)					18	-	-
2.2.3.2.8.3	Tingkat Pemanfaatan					1.45	-	-
2.2.3.2.9	Cumi-cumi						-	-
2.2.3.2.9.1	Potensi (ton)					2,124	-	-
2.2.3.2.9.2	JBT (ton)					1,699	-	-
2.2.3.2.9.3	Tingkat Pemanfaatan					0.7	-	-
2.2.3.3	Potensi SDI di Perairan Menurut WPP.RI 718						-	-
2.2.3.3.1	Ikan Pelagis Kecil						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.3.3.1.1	Potensi (ton)					823,328	-	-
2.2.3.3.1.2	JBT (ton)					658,662	-	-
2.2.3.3.1.3	Tingkat Pemanfaatan					0.52	-	-
2.2.3.3.2	Ikan Pelagis Besar						-	-
2.2.3.3.2.1	Potensi (ton)					489,795	-	-
2.2.3.3.2.2	JBT (ton)					391,836	-	-
2.2.3.3.2.3	Tingkat Pemanfaatan					0.65	-	-
2.2.3.3.3	Ikan Demersal						-	-
2.2.3.3.3.1	Potensi (ton)					586,277	-	-
2.2.3.3.3.2	JBT (ton)					469,022	-	-
2.2.3.3.3.3	Tingkat Pemanfaatan					1.14	-	-
2.2.3.3.4	Ikan Karang						-	-
2.2.3.3.4.1	Potensi (ton)					30,555	-	-
2.2.3.3.4.2	JBT (ton)					24,444	-	-
2.2.3.3.4.3	Tingkat Pemanfaatan					0.5	-	-
2.2.3.3.5	Udang Penaeid						-	-
2.2.3.3.5.1	Potensi (ton)					53,502	-	-
2.2.3.3.5.2	JBT (ton)					42,802	-	-
2.2.3.3.5.3	Tingkat Pemanfaatan					1.3	-	-
2.2.3.3.6	Lobster						-	-
2.2.3.3.6.1	Potensi (ton)					386	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.3.3.6.2	JBT (ton)					309	-	-
2.2.3.3.6.3	Tingkat Pemanfaatan					1.23	-	-
2.2.3.3.7	Kepiting						-	-
2.2.3.3.7.1	Potensi (ton)					1,507	-	-
2.2.3.3.7.2	JBT (ton)					1,205	-	-
2.2.3.3.7.3	Tingkat Pemanfaatan					0.77	-	-
2.2.3.3.8	Rajungan						-	-
2.2.3.3.8.1	Potensi (ton)					1,911	-	-
2.2.3.3.8.2	JBT (ton)					1,529	-	-
2.2.3.3.8.3	Tingkat Pemanfaatan					0.17	-	-
2.2.3.3.9	Cumi-cumi						-	-
2.2.3.3.9.1	Potensi (ton)					5,470	-	-
2.2.3.3.9.2	JBT (ton)					4,376	-	-
2.2.3.3.9.3	Tingkat Pemanfaatan					0.7	-	-
2.2.3.4	Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Laut						-	-
2.2.3.4.1	Jumlah (ton)	120,329	121,774	119,984	136,393		-	-
2.2.3.4.2	Pertumbuhan Produksi	2.80	1.20	-1.47	13.68		-	-
2.2.3.5	Volume Produksi Perikanan Tangkap Laut Terbesar (ton)						-	-
2.2.3.5.1	Cakalang		13,018				-	-
2.2.3.5.2	Madidihang		7,963				-	-
2.2.3.5.3	Tenggiri		7,216				-	-
2.2.3.5.4	Teri		4,016				-	-
2.2.3.5.5	Kembung		3,931				-	-
2.2.3.5.6	Kakap Putih		2,739				-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.3.5.7	Udang Windu		2,681				-	-
2.2.3.5.8	Tongkol Komo		2,515				-	-
2.2.3.5.9	Manyung		2,406				-	-
2.2.3.5.10	Kakap Merah		2,312				-	-
2.2.3.5.11	Tembang		1,947				-	-
2.2.3.5.12	Udang Putih		1,938				-	-
2.2.3.5.13	Layang		1,825				-	-
2.2.3.5.14	Udang Dogol		1,753				-	-
2.2.3.5.15	Udang Barong		1,435				-	-
2.2.3.5.16	Sotong		1,297				-	-
2.2.3.5.17	Selar		1,283				-	-
2.2.3.5.18	Kurisi		1,263				-	-
2.2.3.5.19	Peperek		1,247				-	-
2.2.3.5.20	Julung-julung		1,013				-	-
2.2.3.6	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut Terbesar (Ribu Rp)						-	-
2.2.3.6.1	Udang Windu		156,921,000				-	-
2.2.3.6.2	Tenggiri		114,168,000				-	-
2.2.3.6.3	Udang Putih		106,410,000				-	-
2.2.3.6.4	Udang Dogol		95,515,500				-	-
2.2.3.6.5	Udang Barong		84,198,000				-	-
2.2.3.6.6	Cakalang		70,140,400				-	-
2.2.3.6.7	Teri		58,597,250				-	-
2.2.3.6.8	Kakap Merah		52,056,750				-	-
2.2.3.6.9	Medidihang		43,718,800				-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.3.6.10	Kakap Putih		40,251,000				-	-
2.2.3.6.11	Tembang		28,606,500				-	-
2.2.3.6.12	Layang		30,854,050				-	-
2.2.3.6.13	Kembung		19,337,300				-	-
2.2.3.6.14	Kuwe		18,132,250				-	-
2.2.3.6.15	Layur		17,430,750				-	-
2.2.3.6.16	Tongkol Komo		16,016,650				-	-
2.2.3.6.17	Kepiting		14,533,500				-	-
2.2.3.6.18	Kuro		13,856,750				-	-
2.2.3.6.19	Manyung		13,409,300				-	-
2.2.3.6.20	Tenggiri Papan		10,809,500				-	-
2.2.3.7	Persentase Produksi Perikanan Tangkap Laut						-	-
2.2.3.7.1	Fakfak				11.76		-	-
2.2.3.7.2	Manokwari				12.39		-	-
2.2.3.7.3	Kota Sorong				31.31		-	-
2.2.3.7.4	Teluk Bintuni				1.82		-	-
2.2.3.7.5	Tambrauw				2.16		-	-
2.2.3.7.6	Raja Ampat				4.38		-	-
2.2.3.7.7	Teluk Wondama				4.53		-	-
2.2.3.7.8	Kaimana				6.52		-	-
2.2.3.7.9	Manokwari Selatan				6.67		-	-
2.2.3.7.10	Sorong				8.21		-	-
2.2.3.7.11	Sorong Selatan				10.26		-	-
2.2.3.8	Jumlah Perahu Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis (unit)						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.3.8.1	Fakfak						-	-
2.2.3.8.1.1	Jenis PTM					1,117	-	-
2.2.3.8.1.2	Jenis PMT					965	-	-
2.2.3.8.1.3	Jenis Kapal Motor					798	-	-
2.2.3.8.2	Kaimana						-	-
2.2.3.8.2.1	Jenis PTM					467	-	-
2.2.3.8.2.2	Jenis PMT					265	-	-
2.2.3.8.2.3	Jenis Kapal Motor					56	-	-
2.2.3.8.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.3.8.3.1	Jenis PTM					232	-	-
2.2.3.8.3.2	Jenis PMT					125	-	-
2.2.3.8.3.3	Jenis Kapal Motor					18	-	-
2.2.3.8.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.3.8.4.1	Jenis PTM					223	-	-
2.2.3.8.4.2	Jenis PMT					150	-	-
2.2.3.8.4.3	Jenis Kapal Motor					20	-	-
2.2.3.8.5	Manokwari						-	-
2.2.3.8.5.1	Jenis PTM					242	-	-
2.2.3.8.5.2	Jenis PMT					328	-	-
2.2.3.8.5.3	Jenis Kapal Motor					42	-	-
2.2.3.8.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.3.8.6.1	Jenis PTM					622	-	-
2.2.3.8.6.2	Jenis PMT					490	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.3.8.6.3	Jenis Kapal Motor					46	-	-
2.2.3.8.7	Sorong						-	-
2.2.3.8.7.1	Jenis PTM					522	-	-
2.2.3.8.7.2	Jenis PMT					300	-	-
2.2.3.8.7.3	Jenis Kapal Motor					122	-	-
2.2.3.8.8	Raja Ampat						-	-
2.2.3.8.8.1	Jenis PTM					629	-	-
2.2.3.8.8.2	Jenis PMT					381	-	-
2.2.3.8.8.3	Jenis Kapal Motor					39	-	-
2.2.3.8.9	Kota Sorong						-	-
2.2.3.8.9.1	Jenis PTM					871	-	-
2.2.3.8.9.2	Jenis PMT					1,040	-	-
2.2.3.8.9.3	Jenis Kapal Motor					330	-	-
2.2.3.8.10	Tambrauw						-	-
2.2.3.8.10.1	Jenis PTM					250	-	-
2.2.3.8.10.2	Jenis PMT					166	-	-
2.2.3.8.10.3	Jenis Kapal Motor					11	-	-
2.2.3.8.11	Manokwari Selatan						-	-
2.2.3.8.11.1	Jenis PTM					130	-	-
2.2.3.8.11.2	Jenis PMT					177	-	-
2.2.3.8.11.3	Jenis Kapal Motor					23	-	-
2.2.3.9	Jumlah Alat Tangkap (unit)						-	-
2.2.3.9.1	Jaring Insang Tetap			5,194			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.3.9.2	Jala Tebar			2,081			-	-
2.2.3.9.3	Pancing Rawai Tetap Dasar			2,048			-	-
2.2.3.9.4	Pancing Tonda			1,525			-	-
2.2.3.9.5	Jaring Insang Hanyut			1,283			-	-
2.2.3.9.6	Pancing Ulur			935			-	-
2.2.3.9.7	Pancing Rawai Tetap			717			-	-
2.2.3.9.8	Jaring Tiga Lapis			425			-	-
2.2.3.9.9	Jaring Angkat Bagan Perahu/Rakit			411			-	-
2.2.3.9.10	Pancing Huhate			394			-	-
2.2.3.9.11	Pukat Tarik Udang Ganda			314			-	-
2.2.3.9.12	Pancing Rawai Hanyut Non Tuna			171			-	-
2.2.3.9.13	Jaring Insang Lingkar			106			-	-
2.2.3.9.14	Pancing Rawai Tuna			78			-	-
2.2.3.9.15	Bubu			77			-	-
2.2.3.9.16	Perangkap Sero			25			-	-
2.2.3.9.17	Pukat Cincin			14			-	-
2.2.3.9.18	Pancing Lainnya			4,422			-	-
2.2.3.10	Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum						-	-
2.2.3.10.1	Produksi (ton)	328	230	219	276		-	-
2.2.3.10.2	Persentase Pertumbuhan	33.33	-29.88	-4.78	26.03		-	-
2.2.3.11	Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya						-	-
2.2.3.11.1	Produksi (ton)	63,893	77,395	62,525	40,079		-	-
2.2.3.11.2	Persentase Pertumbuhan	111.41	21.13	-19.21	-35.90		-	-
2:02:04	Pariwisata						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.4.1	Jumlah Tamu Asing dan Domestik yang Menginap						-	-
2.2.4.1.1	Tamu Asing	14,269	70,375	20,137			-	-
2.2.4.1.2	Tamu Domestik	350,494	832,490	858,790			-	-
2.2.4.2	Lama Tamu Menginap Menurut Jenis Hotel (Hari)						-	-
2.2.4.2.1	Tamu Asing Menginap di Hotel Bintang	5.75	2.72	1.87			-	-
2.2.4.2.2	Tamu Asing Menginap di Hotel Melati	7.01	2.55	3.56			-	-
2.2.4.2.3	Tamu Domestik Menginap di Hotel Bintang	2.82	1.84	2.34			-	-
2.2.4.2.4	Tamu Domestik Menginap di Hotel Melati	3.07	2.47	2.16			-	-
2.2.4.3	Jumlah Hotel Menurut Kelas						-	-
2.2.4.3.1	Bintang	11	11	12	15		-	-
2.2.4.3.2	Melati	89	89	105	110		-	-
2:02:05	Energi dan Sumber Daya Mineral						-	-
2.2.5.1	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN						-	-
2.2.5.1.1	Fakfak						-	-
2.2.5.1.1.1	Daya Terpasang (KW)				7,188		-	-
2.2.5.1.1.2	Produksi Listrik (KWh)				28,050,784		-	-
2.2.5.1.1.3	Listrik Terjual (KWh)				24,924,141		-	-
2.2.5.1.1.4	Dipakai Sendiri (KWh)				893,096		-	-
2.2.5.1.2	Kaimana						-	-
2.2.5.1.2.1	Daya Terpasang (KW)				6,056		-	-
2.2.5.1.2.2	Produksi Listrik (KWh)				17,330,091		-	-
2.2.5.1.2.3	Listrik Terjual (KWh)				15,398,416		-	-
2.2.5.1.2.4	Dipakai Sendiri (KWh)				551,765		-	-
2.2.5.1.3	Teluk Wondama						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.5.1.3.1	Daya Terpasang (KW)				1,320		-	-
2.2.5.1.3.2	Produksi Listrik (KWh)				1,207,459		-	-
2.2.5.1.3.3	Listrik Terjual (KWh)				993,579		-	-
2.2.5.1.3.4	Dipakai Sendiri (KWh)				28,938		-	-
2.2.5.1.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.5.1.4.1	Daya Terpasang (KW)				3,720		-	-
2.2.5.1.4.2	Produksi Listrik (KWh)				17,467,734		-	-
2.2.5.1.4.3	Listrik Terjual (KWh)				14,373,636		-	-
2.2.5.1.4.4	Dipakai Sendiri (KWh)				418,635		-	-
2.2.5.1.5	Manokwari						-	-
2.2.5.1.5.1	Daya Terpasang (KW)				35,018		-	-
2.2.5.1.5.2	Produksi Listrik (KWh)				117,358,609		-	-
2.2.5.1.5.3	Listrik Terjual (KWh)				96,570,625		-	-
2.2.5.1.5.4	Dipakai Sendiri (KWh)				2,812,637		-	-
2.2.5.1.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.5.1.6.1	Daya Terpasang (KW)				5,108		-	-
2.2.5.1.6.2	Produksi Listrik (KWh)				11,663,883		-	-
2.2.5.1.6.3	Listrik Terjual (KWh)				10,363,784		-	-
2.2.5.1.6.4	Dipakai Sendiri (KWh)				371,361		-	-
2.2.5.1.7	Sorong						-	-
2.2.5.1.7.1	Daya Terpasang (KW)				616		-	-
2.2.5.1.7.2	Produksi Listrik (KWh)				625,501		-	-
2.2.5.1.7.3	Listrik Terjual (KWh)				555,780		-	-
2.2.5.1.7.4	Dipakai Sendiri (KWh)				19,915		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.5.1.8	Raja Ampat						-	-
2.2.5.1.8.1	Daya Terpasang (KW)				82		-	-
2.2.5.1.8.2	Produksi Listrik (KWh)				84,633		-	-
2.2.5.1.8.3	Listrik Terjual (KWh)				75,199		-	-
2.2.5.1.8.4	Dipakai Sendiri (KWh)				2,695		-	-
2.2.5.1.9	Tambrauw						-	-
2.2.5.1.9.1	Daya Terpasang (KW)				320		-	-
2.2.5.1.9.2	Produksi Listrik (KWh)				431,318		-	-
2.2.5.1.9.3	Listrik Terjual (KWh)				383,242		-	-
2.2.5.1.9.4	Dipakai Sendiri (KWh)				13,733		-	-
2.2.5.1.10	Maybrat						-	-
2.2.5.1.10.1	Daya Terpasang (KW)				860		-	-
2.2.5.1.10.2	Produksi Listrik (KWh)				860,731		-	-
2.2.5.1.10.3	Listrik Terjual (KWh)				764,791		-	-
2.2.5.1.10.4	Dipakai Sendiri (KWh)				27,404		-	-
2.2.5.1.11	Manokwari Selatan						-	-
2.2.5.1.11.1	Daya Terpasang (KW)				2,730		-	-
2.2.5.1.11.2	Produksi Listrik (KWh)				2,268,939		-	-
2.2.5.1.11.3	Listrik Terjual (KWh)				1,867,037		-	-
2.2.5.1.11.4	Dipakai Sendiri (KWh)				54,378		-	-
2.2.5.1.12	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.5.1.12.1	Daya Terpasang (KW)				-		-	-
2.2.5.1.12.2	Produksi Listrik (KWh)				-		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.5.1.12.3	Listrik Terjual (KWh)				-		-	-
2.2.5.1.12.4	Dipakai Sendiri (KWh)				-		-	-
2.2.5.1.13	Kota Sorong						-	-
2.2.5.1.13.1	Daya Terpasang (KW)				45,188		-	-
2.2.5.1.13.2	Produksi Listrik (KWh)				229,692,081		-	-
2.2.5.1.13.3	Listrik Terjual (KWh)				204,089,763		-	-
2.2.5.1.13.4	Dipakai Sendiri (KWh)				7,313,057		-	-
2.2.5.2	Jumlah Pelanggan Listrik						-	-
2.2.5.2.1	Fakfak	5,262	6,781	8,723	9,505		-	-
2.2.5.2.2	Kaimana	3,218	3,831	6,837	8,570		-	-
2.2.5.2.3	Teluk Wondama	37,317	42,365	46,733	53		-	-
2.2.5.2.4	Teluk Bintuni	4,000	5,318	7,269	7,744		-	-
2.2.5.2.5	Manokwari	13,466	16,914	18,719	21,574		-	-
2.2.5.2.6	Sorong Selatan	-	-	-	-		-	-
2.2.5.2.7	Sorong	-	-	-	-		-	-
2.2.5.2.8	Raja Ampat	-	-	-	-		-	-
2.2.5.2.9	Tambrauw	-	-	-	-		-	-
2.2.5.2.10	Maybrat	-	-	-	-		-	-
2.2.5.2.11	Manokwari Selatan	-	-	-	-		-	-
2.2.5.2.12	Pegunungan Arfak	-	-	-	-		-	-
2.2.5.2.13	Kota Sorong	37,050	44,624	49,414	52,001		-	-
2:02:06	Perdagangan						-	-
2.2.6.1	Persentase Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.6.1.1	Distribusi	5.54	5.55	5.78	6.14	6.58	-	-
2.2.6.1.2	Pertumbuhan	5.32	7.57	8.07	6.86	9.06	-	-
2.2.6.2	Banyaknya Kampung yang Memiliki Sarana Perdagangan						-	-
2.2.6.2.1	Fakfak						-	-
2.2.6.2.1.1	Mini Market			-			-	-
2.2.6.2.1.2	Restoran/Rumah Makan			2			-	-
2.2.6.2.1.3	Warung/Kedai Makanan dan Minuman			18			-	-
2.2.6.2.1.4	Toko/Warung Kelontong			99			-	-
2.2.6.2.2	Kaimana						-	-
2.2.6.2.2.1	Mini Market			4			-	-
2.2.6.2.2.2	Restoran/Rumah Makan			-			-	-
2.2.6.2.2.3	Warung/Kedai Makanan dan Minuman			7			-	-
2.2.6.2.2.4	Toko/Warung Kelontong			69			-	-
2.2.6.2.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.6.2.3.1	Mini Market			3			-	-
2.2.6.2.3.2	Restoran/Rumah Makan			-			-	-
2.2.6.2.3.3	Warung/Kedai Makanan dan Minuman			6			-	-
2.2.6.2.3.4	Toko/Warung Kelontong			62			-	-
2.2.6.2.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.6.2.4.1	Mini Market			5			-	-
2.2.6.2.4.2	Restoran/Rumah Makan			2			-	-
2.2.6.2.4.3	Warung/Kedai Makanan dan Minuman			30			-	-
2.2.6.2.4.4	Toko/Warung Kelontong			110			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.6.2.5	Manokwari						-	-
2.2.6.2.5.1	Mini Market			6			-	-
2.2.6.2.5.2	Restoran/Rumah Makan			6			-	-
2.2.6.2.5.3	Warung/Kedai Makanan dan Minuman			30			-	-
2.2.6.2.5.4	Toko/Warung Kelontong			84			-	-
2.2.6.2.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.6.2.6.1	Mini Market			4			-	-
2.2.6.2.6.2	Restoran/Rumah Makan			1			-	-
2.2.6.2.6.3	Warung/Kedai Makanan dan Minuman			8			-	-
2.2.6.2.6.4	Toko/Warung Kelontong			51			-	-
2.2.6.2.7	Sorong						-	-
2.2.6.2.7.1	Mini Market			3			-	-
2.2.6.2.7.2	Restoran/Rumah Makan			1			-	-
2.2.6.2.7.3	Warung/Kedai Makanan dan Minuman			20			-	-
2.2.6.2.7.4	Toko/Warung Kelontong			88			-	-
2.2.6.2.8	Raja Ampat						-	-
2.2.6.2.8.1	Mini Market			1			-	-
2.2.6.2.8.2	Restoran/Rumah Makan			-			-	-
2.2.6.2.8.3	Warung/Kedai Makanan dan Minuman			7			-	-
2.2.6.2.8.4	Toko/Warung Kelontong			113			-	-
2.2.6.2.9	Tambrauw						-	-
2.2.6.2.9.1	Mini Market			-			-	-
2.2.6.2.9.2	Restoran/Rumah Makan			-			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.6.2.9.3	Warung/Kedai Makanan dan Minuman			3			-	-
2.2.6.2.9.4	Toko/Warung Kelontong			26			-	-
2.2.6.2.10	Maybrat						-	-
2.2.6.2.10.1	Mini Market			2			-	-
2.2.6.2.10.2	Restoran/Rumah Makan			1			-	-
2.2.6.2.10.3	Warung/Kedai Makanan dan Minuman			4			-	-
2.2.6.2.10.4	Toko/Warung Kelontong			79			-	-
2.2.6.2.11	Manokwari Selatan						-	-
2.2.6.2.11.1	Mini Market			-			-	-
2.2.6.2.11.2	Restoran/Rumah Makan			1			-	-
2.2.6.2.11.3	Warung/Kedai Makanan dan Minuman			8			-	-
2.2.6.2.11.4	Toko/Warung Kelontong			25			-	-
2.2.6.2.12	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.6.2.12.1	Mini Market			-			-	-
2.2.6.2.12.2	Restoran/Rumah Makan			-			-	-
2.2.6.2.12.3	Warung/Kedai Makanan dan Minuman			-			-	-
2.2.6.2.12.4	Toko/Warung Kelontong			7			-	-
2.2.6.2.13	Kota Sorong						-	-
2.2.6.2.13.1	Mini Market			16			-	-
2.2.6.2.13.2	Restoran/Rumah Makan			3			-	-
2.2.6.2.13.3	Warung/Kedai Makanan dan Minuman			27			-	-
2.2.6.2.13.4	Toko/Warung Kelontong			31			-	-
2.2.6.3	Nilai Ekspor						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.6.3.1	Bahan Bakar Mineral						-	-
2.2.6.3.1.1	Volume (ton)				6,754,184,727		-	-
2.2.6.3.1.2	Nilai FOB (US$)				2,714,006,993		-	-
2.2.6.3.2	Bijih, Kerak, dan Abu Logam						-	-
2.2.6.3.2.1	Volume (ton)				-		-	-
2.2.6.3.2.2	Nilai FOB (US$)				-		-	-
2.2.6.3.3	Daging dan Ikan Olahan						-	-
2.2.6.3.3.1	Volume (ton)				-		-	-
2.2.6.3.3.2	Nilai FOB (US$)				-		-	-
2.2.6.3.4	Ikan dan Udang						-	-
2.2.6.3.4.1	Volume (ton)				2,342,247		-	-
2.2.6.3.4.2	Nilai FOB (US$)				17,259,127		-	-
2.2.6.3.5	Kakao						-	-
2.2.6.3.5.1	Volume (ton)				-		-	-
2.2.6.3.5.2	Nilai FOB (US$)				-		-	-
2.2.6.3.6	Kayu, Barang dari Kayu						-	-
2.2.6.3.6.1	Volume (ton)				40,148,960		-	-
2.2.6.3.6.2	Nilai FOB (US$)				3,283,280		-	-
2.2.6.3.7	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik						-	-
2.2.6.3.7.1	Volume (ton)				-		-	-
2.2.6.3.7.2	Nilai FOB (US$)				-		-	-
2.2.6.3.8	Perhiasan/Permata						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.6.3.8.1	Volume (ton)				1,030		-	-
2.2.6.3.8.2	Nilai FOB (US$)				5,243,766		-	-
2.2.6.3.9	Kapal Laut						-	-
2.2.6.3.9.1	Volume (ton)				1,655		-	-
2.2.6.3.9.2	Nilai FOB (US$)				2,000,000		-	-
2.2.6.3.10	Sabun dan Preparat Pembersih						-	-
2.2.6.3.10.1	Volume (ton)				7		-	-
2.2.6.3.10.2	Nilai FOB (US$)				63		-	-
2.2.6.3.11	Postal Packages						-	-
2.2.6.3.11.1	Volume (ton)				71,427		-	-
2.2.6.3.11.2	Nilai FOB (US$)				1,176		-	-
2.2.6.4	Negara Tujuan Ekspor						-	-
2.2.6.4.1	Australia						-	-
2.2.6.4.1.1	Nilai FOB (US$)				61,280		-	-
2.2.6.4.1.2	Persentase				-		-	-
2.2.6.4.2	Tiongkok						-	-
2.2.6.4.2.1	Nilai FOB (US$)				874,320,862		-	-
2.2.6.4.2.2	Persentase				31.89		-	-
2.2.6.4.3	Perancis						-	-
2.2.6.4.3.1	Nilai FOB (US$)				146		-	-
2.2.6.4.3.2	Persentase				-		-	-
2.2.6.4.4	Hongkong						-	-
2.2.6.4.4.1	Nilai FOB (US$)				5,863,873		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.6.4.4.2	Persentase				0.21		-	-
2.2.6.4.5	Iran						-	-
2.2.6.4.5.1	Nilai FOB (US$)				219		-	-
2.2.6.4.5.2	Persentase				-		-	-
2.2.6.4.6	Jepang						-	-
2.2.6.4.6.1	Nilai FOB (US$)				566,843,285		-	-
2.2.6.4.6.2	Persentase				20.67		-	-
2.2.6.4.7	Korea Selatan						-	-
2.2.6.4.7.1	Nilai FOB (US$)				934,152,130		-	-
2.2.6.4.7.2	Persentase				34.07		-	-
2.2.6.4.8	Malaysia						-	-
2.2.6.4.8.1	Nilai FOB (US$)				38,177,829		-	-
2.2.6.4.8.2	Persentase				1.39		-	-
2.2.6.4.9	Meksiko						-	-
2.2.6.4.9.1	Nilai FOB (US$)				20,830,527		-	-
2.2.6.4.9.2	Persentase				0.76		-	-
2.2.6.4.10	Belanda						-	-
2.2.6.4.10.1	Nilai FOB (US$)				481		-	-
2.2.6.4.10.2	Persentase				-		-	-
2.2.6.4.11	Singapura						-	-
2.2.6.4.11.1	Nilai FOB (US$)				109,140,962		-	-
2.2.6.4.11.2	Persentase				3.98		-	-
2.2.6.4.12	Taiwan						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.6.4.12.1	Nilai FOB (US$)				130,762,876		-	-
2.2.6.4.12.2	Persentase				4.77		-	-
2.2.6.4.13	Thailand						-	-
2.2.6.4.13.1	Nilai FOB (US$)				37,086,924		-	-
2.2.6.4.13.2	Persentase				1.35		-	-
2.2.6.4.14	Turki						-	-
2.2.6.4.14.1	Nilai FOB (US$)				22,000		-	-
2.2.6.4.14.2	Persentase				-		-	-
2.2.6.4.15	Uni Emirat Arab						-	-
2.2.6.4.15.1	Nilai FOB (US$)				24,388,149		-	-
2.2.6.4.15.2	Persentase				0.89		-	-
2.2.6.4.16	Inggris						-	-
2.2.6.4.16.1	Nilai FOB (US$)				63		-	-
2.2.6.4.16.2	Persentase				-		-	-
2.2.6.4.17	Amerika Serikat						-	-
2.2.6.4.17.1	Nilai FOB (US$)				149		-	-
2.2.6.4.17.2	Persentase				-		-	-
2.2.6.4.18	Vietnam						-	-
2.2.6.4.18.1	Nilai FOB (US$)				14,265		-	-
2.2.6.4.18.2	Persentase				0.01		-	-
2:02:07	Perindustrian						-	-
2.2.7.1	Persentase Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan						-	-
2.2.7.1.1	Distribusi	32.64	32.98	30.16	28.72	26.4	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.1.2	Pertumbuhan	2.89	8.46	3.94	2.12	3.28	-	-
2.2.7.2	Perkembangan Industri Besar/Sedang						-	-
2.2.7.2.1	Industri Makanan	14	14	14			-	-
2.2.7.2.2	Industri Minuman	3	2	3			-	-
2.2.7.2.3	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya	6	8	8			-	-
2.2.7.2.4	Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman	1	1	1			-	-
2.2.7.2.5	Industri produk dari batu bata dan pengilangan minyak bumi	2	1	1			-	-
2.2.7.2.6	Industri barang galian bukan logam	0	3	3			-	-
2.2.7.2.7	Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya	0	0	1			-	-
2.2.7.2.8	Industri furnitur	0	0	1			-	-
2.2.7.2.9	Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	2	2	2			-	-
2.2.7.3	Perkembangan Industri Besar/Sedang						-	-
2.2.7.3.1	Fakfak	0	0	0			-	-
2.2.7.3.2	Kaimana	1	1	1			-	-
2.2.7.3.3	Teluk Wondama	0	2	2			-	-
2.2.7.3.4	Teluk Bintuni	8	7	7			-	-
2.2.7.3.5	Manokwari	3	4	7			-	-
2.2.7.3.6	Sorong Selatan	0	0	0			-	-
2.2.7.3.7	Sorong	3	5	5			-	-
2.2.7.3.8	Raja Ampat	0	0	0			-	-
2.2.7.3.9	Tambrauw	0	0	0			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.3.10	Maybrat	0	0	0			-	-
2.2.7.3.11	Manokwari Selatan	0	0	0			-	-
2.2.7.3.12	Pegunungan Arfak	0	0	0			-	-
2.2.7.3.13	Kota Sorong	13	12	12			-	-
2.2.7.4	Jumlah Industri Besar/Sedang Menurut Jenis dan Status Kepemilikan Modal						-	-
2.2.7.4.1	Industri Makanan						-	-
2.2.7.4.1.1	Pemerintah Pusat			1			-	-
2.2.7.4.1.2	Swasta Nasional			12			-	-
2.2.7.4.1.3	Asing			1			-	-
2.2.7.4.2	Industri Minuman						-	-
2.2.7.4.2.1	Pemerintah Pusat			0			-	-
2.2.7.4.2.2	Swasta Nasional			3			-	-
2.2.7.4.2.3	Asing			0			-	-
2.2.7.4.3	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya						-	-
2.2.7.4.3.1	Pemerintah Pusat			0			-	-
2.2.7.4.3.2	Swasta Nasional			8			-	-
2.2.7.4.3.3	Asing			0			-	-
2.2.7.4.4	Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman						-	-
2.2.7.4.4.1	Pemerintah Pusat			0			-	-
2.2.7.4.4.2	Swasta Nasional			1			-	-
2.2.7.4.4.3	Asing			0			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.4.5	Industri produk dari batu bata dan pengilangan minyak bumi						-	-
2.2.7.4.5.1	Pemerintah Pusat			1			-	-
2.2.7.4.5.2	Swasta Nasional			0			-	-
2.2.7.4.5.3	Asing			0			-	-
2.2.7.4.6	Industri barang galian bukan logam						-	-
2.2.7.4.6.1	Pemerintah Pusat			0			-	-
2.2.7.4.6.2	Swasta Nasional			3			-	-
2.2.7.4.6.3	Asing			0			-	-
2.2.7.4.7	Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya						-	-
2.2.7.4.7.1	Pemerintah Pusat			0			-	-
2.2.7.4.7.2	Swasta Nasional			1			-	-
2.2.7.4.7.3	Asing			0			-	-
2.2.7.4.8	Industri Furnitur						-	-
2.2.7.4.8.1	Pemerintah Pusat			0			-	-
2.2.7.4.8.2	Swasta Nasional			1			-	-
2.2.7.4.8.3	Asing			0			-	-
2.2.7.4.9	Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan						-	-
2.2.7.4.9.1	Pemerintah Pusat			1			-	-
2.2.7.4.9.2	Swasta Nasional			1			-	-
2.2.7.4.9.3	Asing			0			-	-
2.2.7.5	Jumlah Industri Besar/Sedang Menurut Kabupaten/Kota						-	-
2.2.7.5.1	Fakfak						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.5.1.1	Pemerintah Pusat			0			-	-
2.2.7.5.1.2	Swasta Nasional			0			-	-
2.2.7.5.1.3	Asing			0			-	-
2.2.7.5.2	Kaimana						-	-
2.2.7.5.2.1	Pemerintah Pusat			0			-	-
2.2.7.5.2.2	Swasta Nasional			1			-	-
2.2.7.5.2.3	Asing			0			-	-
2.2.7.5.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.7.5.3.1	Pemerintah Pusat			0			-	-
2.2.7.5.3.2	Swasta Nasional			2			-	-
2.2.7.5.3.3	Asing			0			-	-
2.2.7.5.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.7.5.4.1	Pemerintah Pusat			0			-	-
2.2.7.5.4.2	Swasta Nasional			7			-	-
2.2.7.5.4.3	Asing			0			-	-
2.2.7.5.5	Manokwari						-	-
2.2.7.5.5.1	Pemerintah Pusat			1			-	-
2.2.7.5.5.2	Swasta Nasional			6			-	-
2.2.7.5.5.3	Asing			0			-	-
2.2.7.5.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.7.5.6.1	Pemerintah Pusat			0			-	-
2.2.7.5.6.2	Swasta Nasional			0			-	-
2.2.7.5.6.3	Asing			0			-	-
2.2.7.5.7	Sorong						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.5.7.1	Pemerintah Pusat			1			-	-
2.2.7.5.7.2	Swasta Nasional			4			-	-
2.2.7.5.7.3	Asing			0			-	-
2.2.7.5.8	Raja Ampat						-	-
2.2.7.5.8.1	Pemerintah Pusat			0			-	-
2.2.7.5.8.2	Swasta Nasional			0			-	-
2.2.7.5.8.3	Asing			0			-	-
2.2.7.5.9	Tambrauw						-	-
2.2.7.5.9.1	Pemerintah Pusat			0			-	-
2.2.7.5.9.2	Swasta Nasional			0			-	-
2.2.7.5.9.3	Asing			0			-	-
2.2.7.5.10	Maybrat						-	-
2.2.7.5.10.1	Pemerintah Pusat			0			-	-
2.2.7.5.10.2	Swasta Nasional			0			-	-
2.2.7.5.10.3	Asing			0			-	-
2.2.7.5.11	Manokwari Selatan						-	-
2.2.7.5.11.1	Pemerintah Pusat			0			-	-
2.2.7.5.11.2	Swasta Nasional			0			-	-
2.2.7.5.11.3	Asing			0			-	-
2.2.7.5.12	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.7.5.12.1	Pemerintah Pusat			0			-	-
2.2.7.5.12.2	Swasta Nasional			0			-	-
2.2.7.5.12.3	Asing			0			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.5.13	Kota Sorong						-	-
2.2.7.5.13.1	Pemerintah Pusat			1			-	-
2.2.7.5.13.2	Swasta Nasional			11			-	-
2.2.7.5.13.3	Asing			0			-	-
2.2.7.6	Jumlah Tenaga Kerja Industri Makanan						-	-
2.2.7.6.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.6.1.1	Laki-laki			1,174			-	-
2.2.7.6.1.2	Perempuan			1,219			-	-
2.2.7.6.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.6.2.1	Laki-laki			544			-	-
2.2.7.6.2.2	Perempuan			117			-	-
2.2.7.7	Jumlah Tenaga Kerja Industri Minuman						-	-
2.2.7.7.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.7.1.1	Laki-laki			36			-	-
2.2.7.7.1.2	Perempuan			17			-	-
2.2.7.7.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.7.2.1	Laki-laki			13			-	-
2.2.7.7.2.2	Perempuan			17			-	-
2.2.7.8	Jumlah Tenaga Kerja Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya						-	-
2.2.7.8.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.8.1.1	Laki-laki			936			-	-
2.2.7.8.1.2	Perempuan			244			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.8.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.8.2.1	Laki-laki			448			-	-
2.2.7.8.2.2	Perempuan			37			-	-
2.2.7.9	Jumlah Tenaga Kerja Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman						-	-
2.2.7.9.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.9.1.1	Laki-laki			15			-	-
2.2.7.9.1.2	Perempuan			13			-	-
2.2.7.9.1	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.9.1.1	Laki-laki			0			-	-
2.2.7.9.1.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.10	Jumlah Tenaga Kerja Industri produk dari batu bata dan pengilangan minyak bumi						-	-
2.2.7.10.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.10.1.1	Laki-laki			19			-	-
2.2.7.10.1.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.10.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.10.2.1	Laki-laki			1			-	-
2.2.7.10.2.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.11	Jumlah Tenaga Kerja Industri barang galian bukan logam						-	-
2.2.7.11.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.11.1.1	Laki-laki			53			-	-
2.2.7.11.1.2	Perempuan			3			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.11.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.11.2.1	Laki-laki			15			-	-
2.2.7.11.2.2	Perempuan			2			-	-
2.2.7.12	Jumlah Tenaga Kerja Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya						-	-
2.2.7.12.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.12.1.1	Laki-laki			17			-	-
2.2.7.12.1.2	Perempuan			8			-	-
2.2.7.12.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.12.2.1	Laki-laki			2			-	-
2.2.7.12.2.2	Perempuan			1			-	-
2.2.7.13	Jumlah Tenaga Kerja Industri furnitur						-	-
2.2.7.13.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.13.1.1	Laki-laki			18			-	-
2.2.7.13.1.2	Perempuan			6			-	-
2.2.7.13.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.13.2.1	Laki-laki			3			-	-
2.2.7.13.2.2	Perempuan			1			-	-
2.2.7.14	Jumlah Tenaga Kerja Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan						-	-
2.2.7.14.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.14.1.1	Laki-laki			80			-	-
2.2.7.14.1.2	Perempuan			0			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.14.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.14.2.1	Laki-laki			42			-	-
2.2.7.14.2.2	Perempuan			7			-	-
2.2.7.15	Jumlah Tenaga Kerja Fakfak						-	-
2.2.7.15.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.15.1.1	Laki-laki			0			-	-
2.2.7.15.1.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.15.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.15.2.1	Laki-laki			0			-	-
2.2.7.15.2.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.16	Jumlah Tenaga Kerja Kaimana						-	-
2.2.7.16.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.16.1.1	Laki-laki			226			-	-
2.2.7.16.1.2	Perempuan			698			-	-
2.2.7.16.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.16.2.1	Laki-laki			115			-	-
2.2.7.16.2.2	Perempuan			34			-	-
2.2.7.17	Jumlah Tenaga Kerja Teluk Wondama						-	-
2.2.7.17.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.17.1.1	Laki-laki			38			-	-
2.2.7.17.1.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.17.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.17.2.1	Laki-laki			12			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.17.2.2	Perempuan			1			-	-
2.2.7.18	Jumlah Tenaga Kerja Teluk Bintuni						-	-
2.2.7.18.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.18.1.1	Laki-laki			346			-	-
2.2.7.18.1.2	Perempuan			64			-	-
2.2.7.18.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.18.2.1	Laki-laki			376			-	-
2.2.7.18.2.2	Perempuan			61			-	-
2.2.7.19	Jumlah Tenaga Kerja Manokwari						-	-
2.2.7.19.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.19.1.1	Laki-laki			304			-	-
2.2.7.19.1.2	Perempuan			75			-	-
2.2.7.19.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.19.2.1	Laki-laki			14			-	-
2.2.7.19.2.2	Perempuan			8			-	-
2.2.7.20	Jumlah Tenaga Kerja Sorong Selatan						-	-
2.2.7.20.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.20.1.1	Laki-laki			0			-	-
2.2.7.20.1.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.20.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.20.2.1	Laki-laki			0			-	-
2.2.7.20.2.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.21	Jumlah Tenaga Kerja Sorong						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.21.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.21.1.1	Laki-laki			0			-	-
2.2.7.21.1.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.21.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.21.2.1	Laki-laki			0			-	-
2.2.7.21.2.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.22	Jumlah Tenaga Kerja Raja Ampat						-	-
2.2.7.22.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.22.1.1	Laki-laki			0			-	-
2.2.7.22.1.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.22.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.22.2.1	Laki-laki			0			-	-
2.2.7.22.2.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.23	Jumlah Tenaga Kerja Tambrauw						-	-
2.2.7.23.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.23.1.1	Laki-laki			0			-	-
2.2.7.23.1.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.23.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.23.2.1	Laki-laki			0			-	-
2.2.7.23.2.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.24	Jumlah Tenaga Kerja Maybrat						-	-
2.2.7.24.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.24.1.1	Laki-laki			0			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.24.1.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.24.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.24.2.1	Laki-laki			0			-	-
2.2.7.24.2.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.25	Jumlah Tenaga Kerja Manokwari Selatan						-	-
2.2.7.25.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.25.1.1	Laki-laki			0			-	-
2.2.7.25.1.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.25.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.25.2.1	Laki-laki			0			-	-
2.2.7.25.2.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.26	Jumlah Tenaga Kerja Pegunungan Arfak						-	-
2.2.7.26.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.26.1.1	Laki-laki			0			-	-
2.2.7.26.1.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.26.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-
2.2.7.26.2.1	Laki-laki			0			-	-
2.2.7.26.2.2	Perempuan			0			-	-
2.2.7.27	Jumlah Tenaga Kerja Kota Sorong						-	-
2.2.7.27.1	Tenaga Kerja Produksi						-	-
2.2.7.27.1.1	Laki-laki			765			-	-
2.2.7.27.1.2	Perempuan			446			-	-
2.2.7.27.2	Tenaga Kerja Lainnya						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.27.2.1	Laki-laki			130			-	-
2.2.7.27.2.2	Perempuan			49			-	-
2.2.7.28	Banyaknya Desa Menurut Keberadaan dan Jenis Indsutri Kecil dan Mikro						-	-
2.2.7.28.1	Fakfak						-	-
2.2.7.28.1.1	Industri dari Kulit			0			-	-
2.2.7.28.1.2	Industri dari Kayu			10			-	-
2.2.7.28.1.3	Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam			0			-	-
2.2.7.28.1.4	Industri Anyaman			5			-	-
2.2.7.28.1.5	Industri Gerabah/Keramik/Batu			1			-	-
2.2.7.28.1.6	Industri dari Kain/Tenun			0			-	-
2.2.7.28.1.7	Industri Makanan dan Minuman			4			-	-
2.2.7.28.1.8	Industri Lainnya			1			-	-
2.2.7.28.2	Kaimana						-	-
2.2.7.28.2.1	Industri dari Kulit			1			-	-
2.2.7.28.2.2	Industri dari Kayu			3			-	-
2.2.7.28.2.3	Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam			1			-	-
2.2.7.28.2.4	Industri Anyaman			7			-	-
2.2.7.28.2.5	Industri Gerabah/Keramik/Batu			2			-	-
2.2.7.28.2.6	Industri dari Kain/Tenun			0			-	-
2.2.7.28.2.7	Industri Makanan dan Minuman			6			-	-
2.2.7.28.2.8	Industri Lainnya			1			-	-
2.2.7.28.3	Teluk Wondama						-	-
2.2.7.28.3.1	Industri dari Kulit			0			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.28.3.2	Industri dari Kayu			6			-	-
2.2.7.28.3.3	Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam			0			-	-
2.2.7.28.3.4	Industri Anyaman			1			-	-
2.2.7.28.3.5	Industri Gerabah/Keramik/Batu			4			-	-
2.2.7.28.3.6	Industri dari Kain/Tenun			0			-	-
2.2.7.28.3.7	Industri Makanan dan Minuman			9			-	-
2.2.7.28.3.8	Industri Lainnya			4			-	-
2.2.7.28.4	Teluk Bintuni						-	-
2.2.7.28.4.1	Industri dari Kulit			1			-	-
2.2.7.28.4.2	Industri dari Kayu			18			-	-
2.2.7.28.4.3	Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam			0			-	-
2.2.7.28.4.4	Industri Anyaman			6			-	-
2.2.7.28.4.5	Industri Gerabah/Keramik/Batu			7			-	-
2.2.7.28.4.6	Industri dari Kain/Tenun			2			-	-
2.2.7.28.4.7	Industri Makanan dan Minuman			26			-	-
2.2.7.28.4.8	Industri Lainnya			13			-	-
2.2.7.28.5	Manokwari						-	-
2.2.7.28.5.1	Industri dari Kulit			0			-	-
2.2.7.28.5.2	Industri dari Kayu			23			-	-
2.2.7.28.5.3	Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam			2			-	-
2.2.7.28.5.4	Industri Anyaman			12			-	-
2.2.7.28.5.5	Industri Gerabah/Keramik/Batu			16			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.28.5.6	Industri dari Kain/Tenun			10			-	-
2.2.7.28.5.7	Industri Makanan dan Minuman			13			-	-
2.2.7.28.5.8	Industri Lainnya			7			-	-
2.2.7.28.6	Sorong Selatan						-	-
2.2.7.28.6.1	Industri dari Kulit			0			-	-
2.2.7.28.6.2	Industri dari Kayu			5			-	-
2.2.7.28.6.3	Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam			0			-	-
2.2.7.28.6.4	Industri Anyaman			15			-	-
2.2.7.28.6.5	Industri Gerabah/Keramik/Batu			0			-	-
2.2.7.28.6.6	Industri dari Kain/Tenun			0			-	-
2.2.7.28.6.7	Industri Makanan dan Minuman			2			-	-
2.2.7.28.6.8	Industri Lainnya			0			-	-
2.2.7.28.7	Sorong						-	-
2.2.7.28.7.1	Industri dari Kulit			0			-	-
2.2.7.28.7.2	Industri dari Kayu			20			-	-
2.2.7.28.7.3	Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam			0			-	-
2.2.7.28.7.4	Industri Anyaman			9			-	-
2.2.7.28.7.5	Industri Gerabah/Keramik/Batu			19			-	-
2.2.7.28.7.6	Industri dari Kain/Tenun			5			-	-
2.2.7.28.7.7	Industri Makanan dan Minuman			19			-	-
2.2.7.28.7.8	Industri Lainnya			3			-	-
2.2.7.28.8	Raja Ampat						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.28.8.1	Industri dari Kulit			0			-	-
2.2.7.28.8.2	Industri dari Kayu			10			-	-
2.2.7.28.8.3	Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam			0			-	-
2.2.7.28.8.4	Industri Anyaman			51			-	-
2.2.7.28.8.5	Industri Gerabah/Keramik/Batu			5			-	-
2.2.7.28.8.6	Industri dari Kain/Tenun			0			-	-
2.2.7.28.8.7	Industri Makanan dan Minuman			21			-	-
2.2.7.28.8.8	Industri Lainnya			4			-	-
2.2.7.28.9	Tambrauw						-	-
2.2.7.28.9.1	Industri dari Kulit			0			-	-
2.2.7.28.9.2	Industri dari Kayu			0			-	-
2.2.7.28.9.3	Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam			0			-	-
2.2.7.28.9.4	Industri Anyaman			0			-	-
2.2.7.28.9.5	Industri Gerabah/Keramik/Batu			0			-	-
2.2.7.28.9.6	Industri dari Kain/Tenun			0			-	-
2.2.7.28.9.7	Industri Makanan dan Minuman			0			-	-
2.2.7.28.9.8	Industri Lainnya			0			-	-
2.2.7.28.10	Maybrat						-	-
2.2.7.28.10.1	Industri dari Kulit			0			-	-
2.2.7.28.10.2	Industri dari Kayu			0			-	-
2.2.7.28.10.3	Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam			0			-	-
2.2.7.28.10.4	Industri Anyaman			17			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.28.10.5	Industri Gerabah/Keramik/Batu			3			-	-
2.2.7.28.10.6	Industri dari Kain/Tenun			0			-	-
2.2.7.28.10.7	Industri Makanan dan Minuman			0			-	-
2.2.7.28.10.8	Industri Lainnya			0			-	-
2.2.7.28.11	Manokwari Selatan						-	-
2.2.7.28.11.1	Industri dari Kulit			0			-	-
2.2.7.28.11.2	Industri dari Kayu			7			-	-
2.2.7.28.11.3	Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam			0			-	-
2.2.7.28.11.4	Industri Anyaman			0			-	-
2.2.7.28.11.5	Industri Gerabah/Keramik/Batu			5			-	-
2.2.7.28.11.6	Industri dari Kain/Tenun			0			-	-
2.2.7.28.11.7	Industri Makanan dan Minuman			0			-	-
2.2.7.28.11.8	Industri Lainnya			1			-	-
2.2.7.28.12	Pegunungan Arfak						-	-
2.2.7.28.12.1	Industri dari Kulit			0			-	-
2.2.7.28.12.2	Industri dari Kayu			0			-	-
2.2.7.28.12.3	Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam			0			-	-
2.2.7.28.12.4	Industri Anyaman			0			-	-
2.2.7.28.12.5	Industri Gerabah/Keramik/Batu			0			-	-
2.2.7.28.12.6	Industri dari Kain/Tenun			2			-	-
2.2.7.28.12.7	Industri Makanan dan Minuman			0			-	-
2.2.7.28.12.8	Industri Lainnya			0			-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.7.28.13	Kota Sorong						-	-
2.2.7.28.13.1	Industri dari Kulit			0			-	-
2.2.7.28.13.2	Industri dari Kayu			16			-	-
2.2.7.28.13.3	Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam			6			-	-
2.2.7.28.13.4	Industri Anyaman			2			-	-
2.2.7.28.13.5	Industri Gerabah/Keramik/Batu			12			-	-
2.2.7.28.13.6	Industri dari Kain/Tenun			3			-	-
2.2.7.28.13.7	Industri Makanan dan Minuman			15			-	-
2.2.7.28.13.8	Industri Lainnya			1			-	-
3)	DAYA SAING DAERAH						-	-
3:01	Kemampuan Ekonomi Daerah						-	-
3:01:01	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan						-	-
3.1.1.1	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan						-	-
3.1.1.1.1	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp)	816,137	876,253	906,477	1,030,232		-	-
3.1.1.1.2	Persentase Kenaikan Nominal	17.95	7.37	3.45	13.65		-	-
3.1.1.2	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Per bulan Menurut Kabupaten/Kota (Rp)						-	-
3.1.1.2.1	Fakfak	588,793	708,748	654,486	639,518		-	-
3.1.1.2.2	Kaimana	665,251	790,875	819,768	89,768		-	-
3.1.1.2.3	Teluk Wondama	579,338	712,492	714,843	877,829		-	-
3.1.1.2.4	Teluk Bintuni	1,017,256	1,056,257	1,068,660	1,448,706		-	-
3.1.1.2.5	Manokwari	939,559	970,522	945,437	1,187,395		-	-
3.1.1.2.6	Sorong Selatan	486,174	513,894	707,773	78,325		-	-
3.1.1.2.7	Sorong	500,855	507,321	630,277	912,458		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.1.1.2.8	Raja Ampat	441,315	614,287	659,276	849,716		-	-
3.1.1.2.9	Tambrauw	359,465	377,822	381,247	36,583		-	-
3.1.1.2.10	Maybrat	436,179	503,789	464,747	593,414		-	-
3.1.1.2.11	Manokwari Selatan	-	-	-	624,936		-	-
3.1.1.2.12	Pegunungan Arfak	-	-	-	256,334		-	-
3.1.1.2.13	Kota Sorong	1,141,762	1,324,416	1,448,834	1,292,238		-	-
3:01:02	Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan						-	-
3.1.2.1	Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan Menurut Kabupaten/Kota						-	-
3.1.2.1.1	Fakfak	51.09	48.54	52.25	59.04		-	-
3.1.2.1.2	Kaimana	58.17	56.24	57.43	52.06		-	-
3.1.2.1.3	Teluk Wondama	62.89	63.76	58.20	54.80		-	-
3.1.2.1.4	Teluk Bintuni	50.73	54.69	54.08	46.39		-	-
3.1.2.1.5	Manokwari	42.56	45.45	45.20	44.63		-	-
3.1.2.1.6	Sorong Selatan	58.33	62.23	52.69	72.13		-	-
3.1.2.1.7	Sorong	57.93	59.30	57.13	49.02		-	-
3.1.2.1.8	Raja Ampat	61.24	54.79	57.37	51.09		-	-
3.1.2.1.9	Tambrauw	73.62	75.20	67.82	67.28		-	-
3.1.2.1.10	Maybrat	65.62	64.56	66.04	88.69		-	-
3.1.2.1.11	Manokwari Selatan	0	0	0	60.20		-	-
3.1.2.1.12	Pegunungan Arfak	0	0	0	62.70		-	-
3.1.2.1.13	Kota Sorong	45.68	41.93	40.90	45.84		-	-
3.1.2.2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Menurut Kabupaten/Kota						-	-
3.1.2.2.1	Fakfak	48.91	51.46	47.75	40.96		-	-
3.1.2.2.2	Kaimana	41.83	43.76	42.57	47.94		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.1.2.2.3	Teluk Wondama	37.11	36.24	41.80	45.20		-	-
3.1.2.2.4	Teluk Bintuni	49.27	45.31	45.92	53.61		-	-
3.1.2.2.5	Manokwari	57.44	54.55	54.80	55.37		-	-
3.1.2.2.6	Sorong Selatan	41.67	37.77	47.31	27.87		-	-
3.1.2.2.7	Sorong	42.07	40.70	42.87	50.98		-	-
3.1.2.2.8	Raja Ampat	38.76	45.21	42.63	48.91		-	-
3.1.2.2.9	Tambrauw	26.38	24.80	32.18	32.72		-	-
3.1.2.2.10	Maybrat	34.38	35.44	33.96	11.31		-	-
3.1.2.2.11	Manokwari Selatan	0	0	0	39.80		-	-
3.1.2.2.12	Pegunungan Arfak	0	0	0	37.30		-	-
3.1.2.2.13	Kota Sorong	54.32	58.07	59.10	54.16		-	-
3:01:03	Produktivitas Total Daerah						-	-
3.1.3.1	Produktivitas Sektor dan Produktivitas Total Daerah (Rp Juta)						-	-
3.1.3.1.1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	**31.62**	**32.27**	**36.64**	**42.5**		-	-
3.1.3.1.2	Jasa Kemasyarakatan	92.94	90.1	107.53	100.67		-	-
3.1.3.1.3	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	54,.22	61.94	59.45	63.28		-	-
3.1.3.1.4	Lainnya (Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan)	**483.13**	**632.32**	**525.17**	**611.87**		-	-
3:01:04	Nilai Tukar Petani						-	-
3.1.4.1	Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Subsektor						-	-
3.1.4.1.1	Tanaman Pangan	100.00	82.44	95.17	96.92		-	-
3.1.4.1.2	Hortikultura	100.00	103.69	100.27	101.32		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.1.4.1.3	Tanaman Perkebunan	100.00	113.38	103.63	101.43		-	-
3.1.4.1.4	Peternakan	100.00	110.92	100.69	99.11		-	-
3.1.4.1.5	Perikanan	100.00	112.97	103.48	105.43		-	-
3:02	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						-	-
3:02:01	Sarana Transportasi						-	-
3.2.1.1	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan						-	-
3.2.1.1.1	Panjang Jalan (Km)	7,352	7,275	7,268			-	-
3.2.1.1.2	Jumlah Kendaraan (unit)	16,738	25,474	16,738			-	-
3.2.1.1.3	Rasio (Unit/Km)	2.28	3.50	2.30			-	-
3.2.1.2	Jumlah Penumpang yang terangkut melalui Pelabuhan						-	-
3.2.1.2.1	Debarkasi	313,010	294,800	348,444	613,139		-	-
3.2.1.2.2	Embarkasi	326,893	276,425	276,425	664,359		-	-
3.2.1.3	Jumlah Barang yang terangkut melalui Pelabuhan						-	-
3.2.1.3.1	Bongkar	454,365	1,526,507	2,402,814	-		-	-
3.2.1.3.2	Muat	63,119	146,028	182,718	-		-	-
3.2.1.4	Jumlah Penumpang yang terangkut melalui Bandar Udara (Orang)						-	-
3.2.1.4.1	Datang	485541	569770	564.076	647.018		-	-
3.2.1.4.2	Berangkat	513301	612397	609.132	686.059		-	-
3.2.1.5	Jumlah Barang yang terangkut melalui Bandar Udara (Kg)						-	-
3.2.1.5.1	Bongkar	6816186	7526652	7282622	8542010		-	-
3.2.1.5.2	Muat	5512847	7055851	7029606	8058929		-	-
3:02:02	Ketersediaan Listrik, Air Bersih, dan Sarana Komunikasi						-	-
3.2.2.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih, dan Sumber Air Minum Layak						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.2.2.1.1	Fakfak						-	-
3.2.2.1.1.1	Sumber Air Minum Bersih				50.12		-	-
3.2.2.1.1.2	Sumber Air Minum Layak				74.85		-	-
3.2.2.1.2	Kaimana						-	-
3.2.2.1.2.1	Sumber Air Minum Bersih				53.04		-	-
3.2.2.1.2.2	Sumber Air Minum Layak				76.78		-	-
3.2.2.1.3	Teluk Wondama						-	-
3.2.2.1.3.1	Sumber Air Minum Bersih				25.26		-	-
3.2.2.1.3.2	Sumber Air Minum Layak				5.70		-	-
3.2.2.1.4	Teluk Bintuni						-	-
3.2.2.1.4.1	Sumber Air Minum Bersih				56.76		-	-
3.2.2.1.4.2	Sumber Air Minum Layak				88.89		-	-
3.2.2.1.5	Manokwari						-	-
3.2.2.1.5.1	Sumber Air Minum Bersih				63.73		-	-
3.2.2.1.5.2	Sumber Air Minum Layak				64.07		-	-
3.2.2.1.6	Sorong Selatan						-	-
3.2.2.1.6.1	Sumber Air Minum Bersih				45.74		-	-
3.2.2.1.6.2	Sumber Air Minum Layak				62.34		-	-
3.2.2.1.7	Sorong						-	-
3.2.2.1.7.1	Sumber Air Minum Bersih				41.44		-	-
3.2.2.1.7.2	Sumber Air Minum Layak				90.27		-	-
3.2.2.1.8	Raja Ampat						-	-
3.2.2.1.8.1	Sumber Air Minum Bersih				58.73		-	-
3.2.2.1.8.2	Sumber Air Minum Layak				63.28		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.2.2.1.9	Tambrauw						-	-
3.2.2.1.9.1	Sumber Air Minum Bersih				29.33		-	-
3.2.2.1.9.2	Sumber Air Minum Layak				29.33		-	-
3.2.2.1.10	Maybrat						-	-
3.2.2.1.10.1	Sumber Air Minum Bersih				31.62		-	-
3.2.2.1.10.2	Sumber Air Minum Layak				31.63		-	-
3.2.2.1.11	Manokwari Selatan						-	-
3.2.2.1.11.1	Sumber Air Minum Bersih				57.98		-	-
3.2.2.1.11.2	Sumber Air Minum Layak				60.13		-	-
3.2.2.1.12	Pegunungan Arfak						-	-
3.2.2.1.12.1	Sumber Air Minum Bersih				31.64		-	-
3.2.2.1.12.2	Sumber Air Minum Layak				31.64		-	-
3.2.2.1.13	Kota Sorong						-	-
3.2.2.1.13.1	Sumber Air Minum Bersih				91.46		-	-
3.2.2.1.13.2	Sumber Air Minum Layak				94.69		-	-
3.2.2.2	Persentase Penduduk yang Memiliki HP dan Mengakses Internet						-	-
3.2.2.2.1	Fakfak						-	-
3.2.2.2.1.1	Memiliki HP				43.63		-	-
3.2.2.2.1.2	Mengakses Internet				12.44		-	-
3.2.2.2.2	Kaimana						-	-
3.2.2.2.2.1	Memiliki HP				45.12		-	-
3.2.2.2.2.2	Mengakses Internet				10.99		-	-
3.2.2.2.3	Teluk Wondama						-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.2.2.2.3.1	Memiliki HP				41.65		-	-
3.2.2.2.3.2	Mengakses Internet				11.2		-	-
3.2.2.2.4	Teluk Bintuni						-	-
3.2.2.2.4.1	Memiliki HP				53.9		-	-
3.2.2.2.4.2	Mengakses Internet				16.9		-	-
3.2.2.2.5	Manokwari						-	-
3.2.2.2.5.1	Memiliki HP				66.25		-	-
3.2.2.2.5.2	Mengakses Internet				18.64		-	-
3.2.2.2.6	Sorong Selatan						-	-
3.2.2.2.6.1	Memiliki HP				43		-	-
3.2.2.2.6.2	Mengakses Internet				7.29		-	-
3.2.2.2.7	Sorong						-	-
3.2.2.2.7.1	Memiliki HP				57.43		-	-
3.2.2.2.7.2	Mengakses Internet				16.84		-	-
3.2.2.2.8	Raja Ampat						-	-
3.2.2.2.8.1	Memiliki HP				45.76		-	-
3.2.2.2.8.2	Mengakses Internet				15.82		-	-
3.2.2.2.9	Tambrauw						-	-
3.2.2.2.9.1	Memiliki HP				25.32		-	-
3.2.2.2.9.2	Mengakses Internet				0.48		-	-
3.2.2.2.10	Maybrat						-	-
3.2.2.2.10.1	Memiliki HP				30.85		-	-
3.2.2.2.10.2	Mengakses Internet				4.56		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.2.2.2.11	Manokwari Selatan						-	-
3.2.2.2.11.1	Memiliki HP				42.93		-	-
3.2.2.2.11.2	Mengakses Internet				4.09		-	-
3.2.2.2.12	Pegunungan Arfak						-	-
3.2.2.2.12.1	Memiliki HP				11.26		-	-
3.2.2.2.12.2	Mengakses Internet				0		-	-
3.2.2.2.13	Kota Sorong						-	-
3.2.2.2.13.1	Memiliki HP				73.06		-	-
3.2.2.2.13.2	Mengakses Internet				31.14		-	-
3:02:03	Angka Kriminalitas						-	-
3.2.3.1	Angka Kriminalitas Penduduk	806,995	828,293	849,809	87,151		-	-
3.2.3.2	Angka Kriminalitas Tindak Pidana (Kasus)	1,825	2,262	2,039	2,281		-	-
3.2.3.3	Persentase Angka Kriminalitas	0.23	0.27	0.24	0.26		-	-
3:02:04	Pajak dan Retribusi Daerah						-	-
3.2.4.1	Pajak Daerah (Rp)	142,529,273,075	184,122,826,272	225,585,407,972	234,918,446,737		-	-
3.2.4.2	Retribusi Daerah (Rp)	1,420,766,825	944,899,940	1,206,600,394	1,075,786,880		-	-
3:03	Fokus Sumber Daya Manusia						-	-
3:03:01	Kualitas Tenaga Kerja						-	-
3.3.1.1	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan						-	-
3.3.1.1.1	Tidak/Belum Pernah Sekolah				24,396		-	-
3.3.1.1.2	Tidak/Belum Tamat SD				46,091		-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.3.1.1.3	SD/MI				79,606		-	-
3.3.1.1.4	SMP/MTS				62,717		-	-
3.3.1.1.5	SMA/SMK/MA				109,797		-	-
3.3.1.1.6	Diploma				12,145		-	-
3.3.1.1.7	S1/S2/S3 (Universitas)				45,474		-	-
3:03:02	Kapasitas Aparatur Pemerintahan						-	-
3.3.2.1	Persentase Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan						-	-
3.3.2.1.1	SD/MI				1.83		-	-
3.3.2.1.2	SMP/MTS				2.94		-	-
3.3.2.1.3	SMA/Diploma I				32.04		-	-
3.3.2.1.4	Diploma I/II				8.19		-	-
3.3.2.1.5	Diploma III				11.59		-	-
3.3.2.1.6	S1/S2/S3				43.42		-	-
3:03:03	Rasio Ketergantungan						-	-
3.3.3.1	Perkembangan Rasio Ketergantungan	55.77	51.13	51.13	51.13		-	-

Keterangan: Data tidak dapat diinterpretasi karena dalam RPJMD Papua Barat Tahun 2012-2016 tidak ditentukan target pada setiap indikator capaian

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah).

Perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah karena kebijakan pembangunan harus menyesuaikan dengan kemampuan pendanaannya. Dalam penentuan pagu indikatif program prioritas, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya menjadi dasar utama penentuan target sasaran maupun program pembangunan.

Untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, diperlukan prediksi penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai upaya untuk memprediksi dengan baik sumber-sumber penerimaan di masa datang maka diperlukan gambaran umum kinerja keuangan melalui realisasi APBD sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun di masa lalu.

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

Komponen Pendapatan

1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Komponen Belanja

1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Komponen Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah,

permasalahan yang muncul serta potensi tantangan kedepan. Secara umum gambaran tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 3.1 menunjukkan perkembangan realisasi pendapatan daerah Provinsi Papua Barat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Secara umum, realisasi pendapatan daerah Provinsi Papua Barat mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dengan pertumbuhan rata-rata pertahun mencapai sebesar 16 persen, dari sebesar Rp 3,87 triliun pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp 5,61 triliun pada tahun 2013 dan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 5,80 triliun pada tahun 2015 dan menjadi sebesar Rp 6,74 triliun pada tahun 2016.

Jika dilihat dari pertumbuhan masing-masing jenis pendapatan, maka terlihat adanya perbedaan pola pertumbuhan. Selama periode tahun 2012-2016, pendapatan asli daerah mengalami perlambatan pertumbuhan walaupun secara absolut mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dari sebesar Rp 175,4 miliar pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp 236,2 miliar pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2015 dan 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 322 miliar dan sebesar Rp 338 miliar. Sepanjang tahun 2012-2016, pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18,7 persen per tahun.

Berbeda dengan pos PAD yang selalu mengalami pertumbuhan positif selama tahun 2012-2016, dana perimbangan justru mengalami pasang surut yang cukup tajam, dari sebesar Rp 1,51 triliun pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp 2,99 triliun pada

tahun 2013 dan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp2,78 triliun pada tahun 2014 dan sebesar Rp 2,40 triliun pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016, dana perimbangan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 3,22 triliun. Sepanjang tahun 2012-2016, pos dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 27,3 persen per tahun. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terutama disumbangkan oleh dana otonomi khusus papua dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otsus juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dari sebesar Rp 2,18 triliun pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp 2,40 triliun pada tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp 3,10 triliun pada tahun 2016.

Tabel 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 -2016 (Rp juta)

Uraian	2012			2013			2014			2015			2016		
	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%
PENDAPATAN	**3.939.327**	**.873.388**	**98,3**	**4.877.983**	**5.637.697**	**115,6**	**5.040.439**	**5.791.599**	**114,9**	**5.947.949**	**5.840.374**	**98,2**	**6.507.328**	**6.740.387**	**103,6**
Pendapatan Asli Daerah	155.917	175.450	112,5	192.159	236.283	123,0	271.807	306.675	112,8	298.434	322.799	108,2	378.841	338.811	89,4
Pendapatan Pajak Daerah	123.415	142.529	115,5	131.881	184.123	139,6	219.647	225.256	102,6	226.984	230.414	101,5	339.233	207.476	61,2
Hasil Retribusi Daerah	922	1.421	154,1	950	1.945	204,6	767	1.207	157,3	1.545	1.077	69,7	1.545	903	58,5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.810	8.810	100,0	13.021	13.021	100,0	27.365	14.365	52,5	20.000	7.725	38,6	32.000	32.211	100,7
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.770	22.690	99,7	46.307	37.194	80,3	24.028	65.848	274,0	49.905	83.584	167,5	100.474	53.569	53,3
Dana Perimbangan	**1.596.161**	**1.516.157**	**95,0**	**2.275.502**	**2.992.755**	**131,5**	**2.062.240**	**2.783.645**	**135,0**	**2.623.044**	**2.496.264**	**95,2**	**2.948.821**	**3.221.910**	**109,3**
Bagi Hasil Pajak	200.596	191.649	95,5	932.356	1.630.850	174,9	710.938	1.425.049	200,4	983.596	928.249	94,4	914.973	1.230.768	134,5
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	455.534	384.476	84,4	1.064.873	1.064.873	100,0	1.122.265	1.122.265	100,0	1.284.079	1.284.079	100,0	1.322.766	1.322.766	100,0
Dana Alokasi Umum	901.398	901.398	100,0	64.931	64.931	100,0	61.216	61.216	100,0	92.376	92.376	100,0	501.422	489.420	97,6
Dana Alokasi Khusus	38.633	38.633	100,0	2.410.322	2.408.658	99,9	2.706.392	2.701.279	99,8	3.026.472	3.021.311	99,8	3.179.665	3.179.665	100,0
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**2.187.249**	**2.181.782**	**99,8**	**114.762**	**113.213**	**98,7**	**159.007**	**153.942**	**96,8**	**159.076**	**153.963**	**96,8**	**2.312.165**	**2.312.165**	**100,0**
Dana Penyesuaian	115.653	110.289	95,4	1.866.836	1.866.836	100,0	2.047.316	2.047.316	100,0	2.117.327	2.117.327	100,0	862.500	862.500	100,0
Dana Otonomi khusus	1.642.887	1.642.887	100,0	153	38	25,0	69	21	30,0	69	21	30,0	5.000	5.000	100,0
Dana Tambahan Infrastruktur	428.571	428.571	100,0	428.571	428.571	100,0	500.000	500.000	100,0	750.000	750.000	100,0	862.500	862.500	100,0
Pendapatan Lainnya	138	35	25,0	153	38	25,0	69	21	30,0	69	21	30,0	5.000	5.000	100,0

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012– 2016

Keterangan

A= Anggaran dan R = Realisasi

Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Provinsi Papua Barat dapat dikatakan sangat berbeda dengan kebanyakan daerah lain di Indonesia yang umumnya didominasi oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun dana perimbangan. Sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, pendapatan daerah Provinsi Papua Barat didominasi oleh besarnya kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dalam hal ini bersumber dari dana otonomi khusus Papua yang dihitung sebesar 2 persen dari DAU nasional serta dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua.

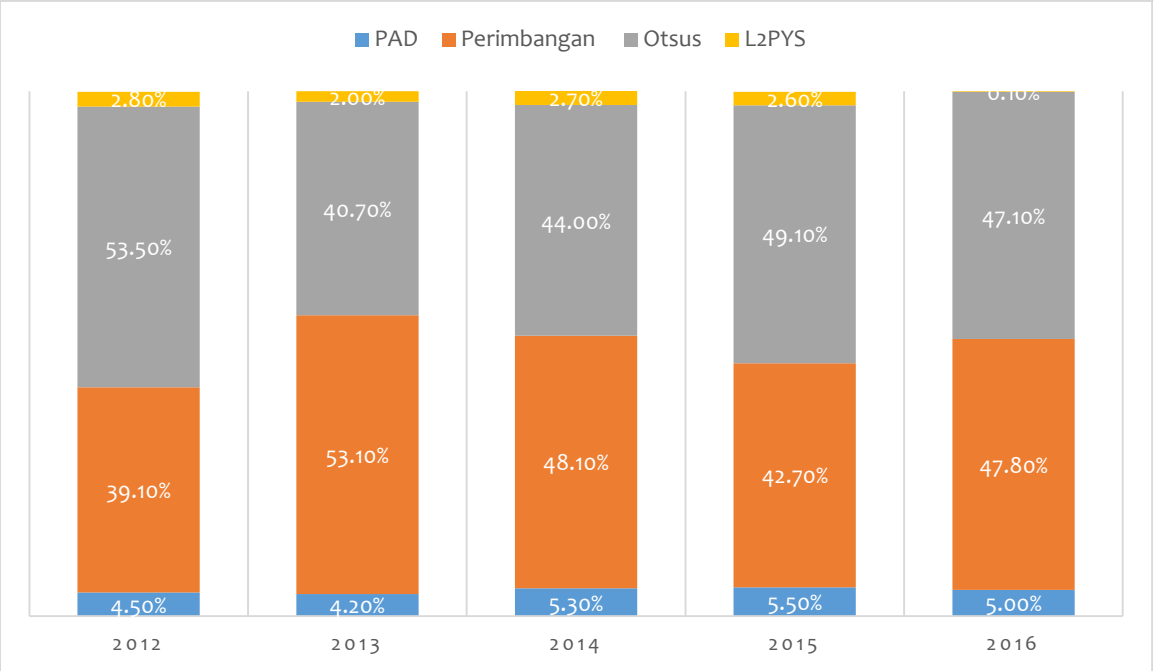

Gambar 3.1 Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat 2012-2016
Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012– 2016 (diolah)

Gambar 3.1 menunjukkan perkembangan struktur pendapatan daerah Provinsi Papua Barat sepanjang tahun 2012-2016. Pada periode tersebut terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah hanya berkisar pada angka 4% sampai dengan 5%, kemudian Dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak dan SDA serta DAU dan DAK memberikan kontribusi dalam kisaran angka 39% sampai dengan 53%. Sedangkan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur dala rangka otsus juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan mencapai kisaran angka 40% sampai dengan 53%.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Selama periode tahun 2012-2016, target pendapatan daerah yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD sudah dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi pendapatan yang dapat diwujudkan oleh daerah yang yang selalu hampir pada kisaran angka 100%.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Selisih (Rp)
2012	3.939.327.152.609,88	3.873.388.417.668,69	98,3%	(65.938.734.941,19)
2013	4.877.983.252.413,00	5.637.696.633.774,20	115,6%	759.713.381.361,20
2014	5.040.439.208.777,00	5.791.598.721.006,22	114,9%	751.159.512.229,22
2015	5.947.949.335.893,00	5.840.373.819.323,61	98,2%	(107.575.516.569,39)
2016	6.507.327.575.729,00	6.740.386.627.579,89	103,6%	233.059.051.850,89

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012–2016 (diolah)

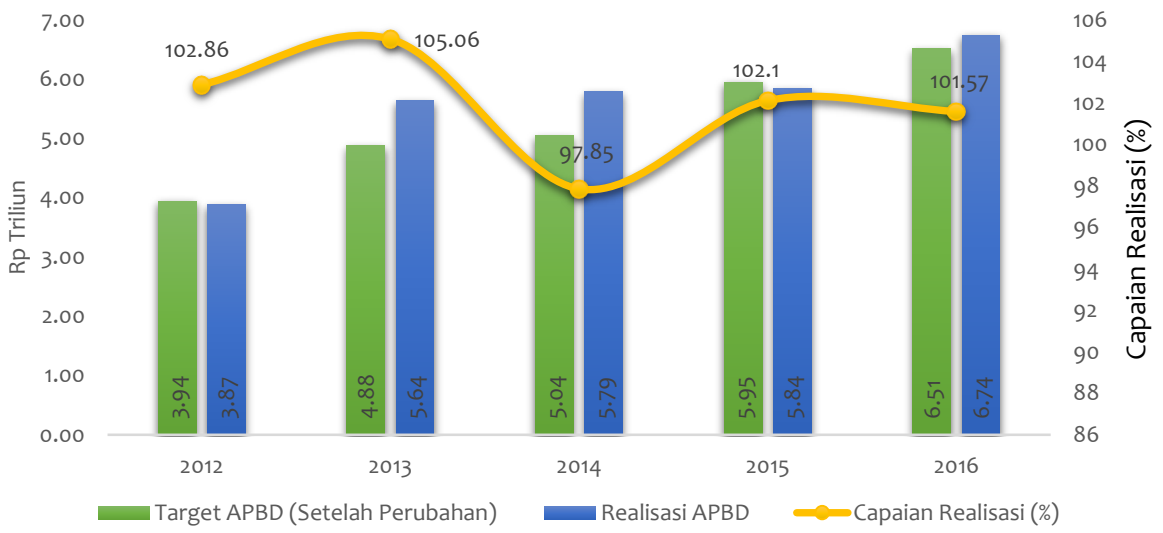

Gambar 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012-2016

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012–2016 (diolah)

Beberapa permasalahan yang terkait dengan optimalisasi mobilisasi pendapatan daerah selama ini, antara lain:

- Belum optimalnya strategi inteksifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah;

- Masih rendahya kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah dalam membayar kewajibannya bagi pembangunan daerah;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang tugas peningkatan pendapatan asli daerah;
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- Belum berkembangnya upaya peningkatan pendapatan daerah dari berbagai potensi sumber daya alam selain dari pajak dan retribusi daerah;
- Belum optimalnya pengelolaan dan kontribusi BUMD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah;

3.1.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Sesuai dengan definisi yang dikembangkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja ini dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Secara umum dari tahun 2012 sampai tahun 2016, jumlah anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Tabel 3.3. berikut menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Jumlah nominal belanja daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2012 mencapai sebesar Rp 3,89 triliun yang kemudian berkembang menjadi sebesar Rp 6,40 triliun pada tahun 2016.

Jika dilihat dari sumber pertumbuhan terlihat adanya peningkatan alokasi yang cukup signifikan pada kedua pos belanja yaitu; belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 13,2%, sedangkan belanja langsung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,8% per tahun.

Semua pos belanja tidak langsung dalam periode tahun 2012-2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan terkecuali belanja tidak tersangka. Pos belanja pegawai secara perlahan namun pasti mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,4% per tahun, kemudian belanja hibah mengalami pertumbuhan sebesar 27,1% per tahun, belanja bantuan sosial mengalami pertumbuhan rerata sebesar 117,9% per tahun dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten, Kota, Distrik, Kelurahan, dan Kampung mengalami pertumbuhan sebesar 13% per tahun. Sedangkan pada pos belanja langsung terjadi peningkatan belanja yang cukup signifikan pada semua jenis belanja. Pada periode 2012-2016, belanja pegawai mengalami pertumbuhan rerata sebesar 10% per tahun, belanja barang dan jasa mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,1% per tahun dan belanja modal mengalami pertumbuhan rerata sebesar 16,9% per tahun.

Tabel 3.3 Perkembangan Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 (Rp juta)

Uraian	2012			2013			2014			2015			2016		
	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%
Belanja	4.312.434	3.898.932	90	5.121.636	4.514.034	88	6.254.110	5.428.849	87	7.489.168	6.880.167	92	7.110.067	6.464.612	91
Belanja Tidak Langsung	2.330.898	2.055.365	88	2.821.570	2.577.912	91	3.185.341	2.876.704	90	3.722.472	3.502.394	94	3.507.024	3.289.956	94
Belanja Pegawai	254.898	171.578	67	290.590	172.542	59	295.316	178.581	60	339.233	207.476	61	343.112	226.774	66
Belanja Hibah	396.776	377.023	95	485.105	467.017	96	494.269	463.623	94	543.472	514.553	95	912.685	896.788	98
Belanja Bantuan Sosial	7.202	6.397	89	42.081	38.320	91	42.623	35.296	83	47.256	44.192	94	30.230	24.499	81
Belanja Bagi Hasil kepada Kab/Kota	609.710	448.054	73	853.592	777.050	91	851.116	713.747	84	1.197.495	1.180.116	99	527.838	460.431	87
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten, Kota, Distrik, Kelurahan, dan Kampung	1.052.312	1.052.312	100	1.130.201	1.120.101	99	1.487.017	1.485.457	100	1.580.306	1.556.057	98	1.683.159	1.681.464	100
Belanja Tidak Terduga	10.000	-	0	20.000	2.883	14	15.000	-	0	13.148	-	0	10.000	-	0
Belanja Langsung	1.981.536	1.843.567	93	2.300.066	1.936.122	84	3.068.769	2.552.146	83	3.766.696	3.377.773	90	3.603.043	3.174.656	88
Belanja Pegawai	129.535	110.328	85	155.048	128.815	83	155.310	136.217	88	156.062	135.608	87	186.839	160.055	86
Belanja Barang dan Jasa	960.800	879.370	92	1.155.640	973.639	84	1.439.913	1.224.141	85	1.799.142	1.565.161	87	1.861.730	1.568.058	84
Belanja Modal	891.200	853.869	96	989.378	833.669	84	1.473.546	1.191.788	81	1.811.492	1.677.004	93	1.554.473	1.446.544	93

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012– 2016 (diolah)

Keterangan

A= Anggaran

R = Realisasi

Realisasi Belanja Daerah

Selama periode tahun 2012-2016, realisasi belanja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD belum dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja yang dapat diwujudkan oleh daerah yang hanya mencapai kisaran angka sebesar 88% sampai dengan 92%.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Selisih (Rp)
2012	4.312.434.108.268	3.898.931.911.491	90	(413.502.196.777)
2013	5.121.635.506.086	4.514.034.285.287	88	(607.601.220.799)
2014	6.254.109.903.334	5.428.849.491.031	87	(825.260.412.303)
2015	7.489.168.345.357	6.880.166.675.771	92	(609.001.669.586)
2016	7.110.066.586.147	6.464.612.242.303	91	(645.454.343.844)

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012–2016 (diolah)

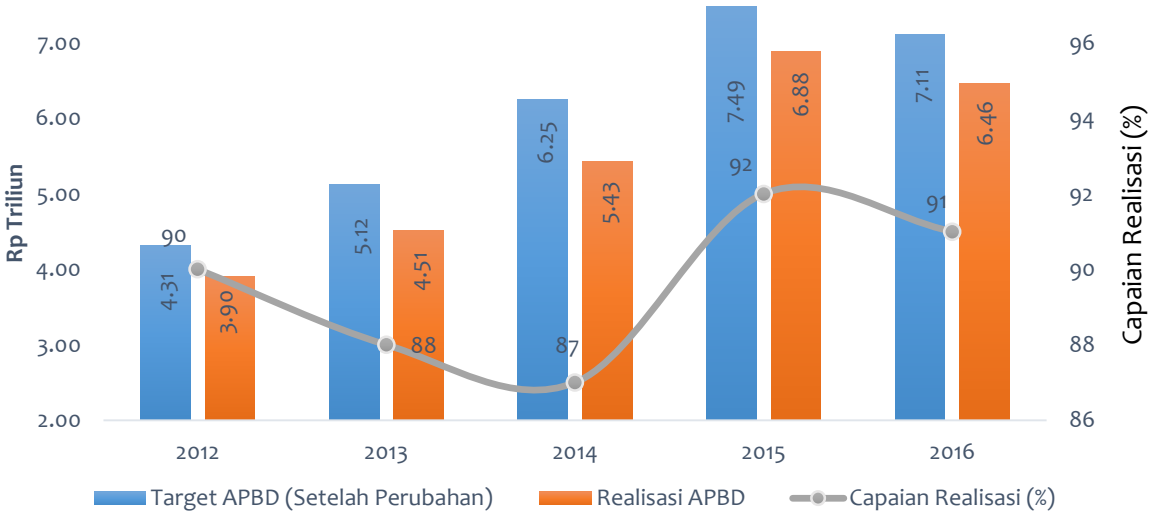

Gambar 3.3 Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012-2016

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012– 2016 (diolah)

3.1.1.3. Realisasi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah didefinsikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Tabel 3.5 Perkembangan Rencana dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 -2016 (Rp juta)

Uraian	2012			2013			2014			2015			2016		
	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%
Surplus/ Defisit	-243652	1123662	-461	-243652	1123662	-461	-1247266	333499	-27	-1541288	-1039814	67	-510463	275774	-54
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	398108	398119	100	372575	372575	100	1331492	1356492	102	0	0		0	0	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	398108	398119	100	372575	372575	100	1331492	1356492	102	1667169	1665917	100	520464	516617	99
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25000	0	0	50000	50000	100	75000	0	0	125847	105640		10000	10000	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25000	0		50000	50000	100	75000	0	0	120640	105640	88	10000	10000	100
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pihak Ketiga	0	0		0	0		0	0		5207	0		0	0	
Pembiayaan Netto	373108	398119		322575	232830		1256492	1333670		1541322	1560277		510464	506617	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	1	372575		78923	1356492		9226	1667169		520464	520464		1	782391	

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012–2016 (diolah)

Keterangan

A= Anggaran

R = Realisasi

3.1.2. Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah pada periode tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa jumlah nilai total nominal Aset daerah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2012, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp 4,83 triliun yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 8,34 triliun pada tahun 2013. Pada tahun 2014, nilai total aset meningkat menjadi sebesar Rp 10,13 triliun yang kemudian menurun menjadi sebesar Rp 7,89 triliun pada tahun 2015 dan menjadi sebesar Rp 9,03 triliun pada tahun 2016. Faktor utama yang menyebabkan turun naiknya nilai total aset daerah adalah pemberlakuan basis akkrual akuntansi keuangan daerah yang memperhitungkan penyusutan nilai aset tetap daerah, sehingga nilai aset tetap yang tersaji di neraca adalah nilai bukunya.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Pada pos kewajiban daerah terlihat bahwa sepanjang tahun 2012-2016 Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat terdistribusi kedalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Dari data neraca terlihat bahwa sepanjang tahun 2012-2016, jumlah hutang mengalami mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas

pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Pada sisi lain, selama periode tahun 202-2016, Nilai ekuitas dana Provinsi Papua Barat juga mengalami fluktuasi sangat tajam. Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah.Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan.Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

Tabel 3.6 Perkembangan Neraca Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
ASET	**4.832.357.581.159**	**8.345.973.275.335**	**10.130.351.024.696**	**7.894.905.303.026**	**9.030.570.639.652**	**22%**
ASET LANCAR	**382.213.960.967**	**1.396.628.102.423**	**2.083.652.768.666**	**1.067.716.483.959**	**1.415.526.268.328**	**75%**
Kas Di Kas Daerah	349.932.849.008	1.331.059.021.631	1.665.174.268.597	517.368.437.318	780.664.143.604	72%
Kas Di Bendahara Penerimaan	-	-	-	3.900.000	-	-100%
Kas Di Bendahara Pengeluaran	25.375.565.230	25.596.335.625	2.011.953.255	3.086.100.091	1.341.483.853	-24%
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	-	-	-	-	-	
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
Piutang Pajak	-	-	-	-	-	
Piutang Retribusi	-	-	-	-	-	
Piutang Dana Bagi Hasil	-	-	-	4.478.401.500	5.206.109.900	16%
Piutang Dana Alokasi Umum	-	-	-	3.874.637.137	8.127.344.022	110%
Piutang Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-474.768.427	-818.511.437	72%
Piutang Lain-lain	5.122.942.522	5.123.912.522	6.052.707.859	4.569.333.667	739.833.334	-23%
Persediaan	1.782.604.207	34.848.832.645	410.413.838.954	534.810.442.674	619.900.677.680	745%
INVESTASI JANGKA PANJANG	**119.451.409.125**	**162.311.202.007**	**158.955.349.597**	**264.699.860.261**	**274.146.536.709**	**26%**
Investasi Non Permanen	-	-	-	-	0	
Investasi Permanen	119.451.409.125	162.311.202.007	158.955.349.597	264.699.860.261	274.146.536.709	26%
ASET TETAP	**4.330.692.211.067**	**5.679.324.682.488**	**6.664.038.649.484**	**5.429.278.731.891**	**7.300.070.490.526**	**16%**
Tanah	141.281.223.775	250.525.667.775	289.273.249.775	345.395.332.825	1.197.467.120.714	90%
Peralatan dan Mesin	772.571.553.783	794.799.328.275	877.071.040.049	947.978.395.780	977.969.164.257	6%
Gedung dan Bangunan	1.344.246.437.831	802.730.173.493	1.403.071.574.095	1.666.112.829.263	1.879.558.156.047	17%
Jalan Jaringan dan Instalasi	1.923.334.404.178	3.255.800.591.680	3.715.160.719.983	4.700.121.692.433	5.691.086.818.227	33%
Aset Tetap Lainnya	134.999.317.500	177.570.320.250	183.767.343.750	230.827.537.750	264.809.475.244	19%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.259.274.000	397.898.601.015	195.694.721.832	309.728.199.922	448.373.605.434	686%
Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-2.770.885.256.082	-3.159.193.849.398	14%
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
ASET LAINNYA	-	**1.107.709.288.417**	**1.223.704.256.949**	**1.133.210.226.915**	**40.827.344.089**	**-31%**
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	20.207.412	
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-		
Aset Tak Berwujud	-	-	12.877.323.000	1.951.600.000	2.986.800.000	-16%
Aset Lain-lain	-	1.107.709.288.417	1.210.826.933.949	1.131.258.626.915	37.820.336.677	-31%
KEWAJIBAN	**5.783.610.713**	**146.444.762.513**	**132.828.413.149**	**319.054.531.593**	**635.820.386.354**	**666%**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.783.610.713**	**84.718.012.513**	**94.872.663.149**	**241.059.531.593**	**479.459.786.354**	**407%**
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2.696.053.713	17.430.322	-20.414.953	-5.458.092	0	-122%
Utang Bunga	-	-	-	1.561.979.354	1.561.979.354	0%
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	975.000.000	625.000.000	-36%
Utang beban	-	-	-	217.437.532.483	380.345.847.652	75%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi		6.500.000.000	59.201.950.000	15.000.000.000	81.030.000.000	392%
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.087.557.000	78.200.582.191	35.691.128.102	6.090.477.848	15.896.959.348	614%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**-**	**61.726.750.000**	**37.955.750.000**	**77.995.000.000**	**156.360.600.000**	**56%**
Utang Dalam Negeri		61.726.750.000	37.955.750.000	77.995.000.000	156.360.600.000	56%
Utang Jangka Panjang Lainnya						
EKUITAS DANA	**4.826.573.970.446**	**8.199.528.512.823**	**9.997.522.611.547**	**7.894.905.303.026**	**9.030.570.639.652**	**21%**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
EKUITAS DANA LANCAR	**376.430.350.254**	**1.311.910.089.911**	**1.988.780.105.517**	-	-	**67%**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	372.575.438.168	1.356.492.086.807	1.667.168.607.312	-	-	62%
Cadangan Untuk Piutang	5.122.942.522	5.123.912.522	6.052.707.859	-	-	-27%
Cadangan Untuk Persediaan	1.782.604.207	34.848.832.645	410.413.838.954	-	-	944%
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-3.087.557.000	-84.700.582.191	-94.893.078.102	-	-	852%
Pendapatan yang Ditangguhkan	36.922.357	145.840.128	38.029.493	-	-	40%
						-
EKUITAS DANA INVESTASI	**4.450.143.620.192**	**6.887.618.422.912**	**8.008.742.506.030**	-	-	**-10%**
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	119.451.409.125	162.311.202.007	158.955.349.597	-	-	-22%
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	4.330.692.211.067	5.679.324.682.488	6.664.038.649.484	-	-	-17%
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	-	1.107.709.288.417	1.223.704.256.949	-	-	-45%
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-61.726.750.000	-37.955.750.000	-	-	-69%
EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	-			
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
KOREKSI EKUITAS	-	-	-	-	-	
Koreksi Ekuitas	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**4.832.357.581.159**	**8.345.973.275.335**	**10.130.351.024.696**	**7.894.905.303.026**	**9.030.570.639.652**	**22%**

Sumber: Neraca Daerah Provinsi Papua Barat 2012-2016

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.

Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Tabel 3.7 Analisis Rasio Neraca Daerah Provinsi Papua Barat

RASIO	RUMUS	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Likuiditas	**Aset Lancar**	**382.213.960.967**	**1.396.628.102.423**	**2.083.652.768.666**	**1.067.716.483.959**	**1.415.526.268.328**
	Kewajiban Jangka Pendek	**5.783.610.713**	**84.718.012.513**	**94.872.663.149**	**241.059.531.593**	**479.459.786.354**
	Rasio Lancar	**66**	**16**	**22**	**4**	**3**
	Aset Lancar – Persediaan	3,80431E+11	1,36178E+12	1,67324E+12	5,32906E+11	7,95626E+11
	Kewajiban Jangka Pendek	**5.783.610.713**	**84.718.012.513**	**94.872.663.149**	**241.059.531.593**	**479.459.786.354**
	Quick Ratio	**66**	**16**	**18**	**2**	**2**
Rasio Solvabilitas	**Total Hutang**	**5783610713**	**1,46445E+11**	**1,32828E+11**	**3,19055E+11**	**6,3582E+11**
	Total Aset	4,83236E+12	8,34597E+12	1,01304E+13	7,89491E+12	9,03057E+12
	Rasio Total Hutang (%)	**0,120%**	**1,755%**	**1,311%**	**4,041%**	**7,041%**
	Total Hutang	5783610713	1,46445E+11	1,32828E+11	3,19055E+11	6,3582E+11
	Total Ekuitas	4,82657E+12	8,19953E+12	9,99752E+12	7,89491E+12	9,03057E+12
	Rasio Hutang/Modal (%)	**0,12%**	**1,79%**	**1,33%**	**4,04%**	**7,04%**

Sumber: Neraca Daerah Provinsi Papua Barat 2012-2016 (diolah)

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar *(current ratio)* karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya.Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Current ratio dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

a) Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
b) Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
c) Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d) Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e) Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f) Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yangditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang disepakati setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Provinsi Papua Barat tahun-tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwajumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuksetiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

a) Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.

b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun berkenaan yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

c) Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajakdan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak danwajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan nodalatau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagal penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, telah mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan

dengan peraturan daerah.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat terdiri dari; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan sumber Daya Alam.

a) Pendapatan dari DBH-Pajak dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir;

b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir.

c) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DAU dan DAK didasarkan pada realisasi pendapatan DAU dan DAKselama 3 (tiga) tahun terakhir.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a) Dana Otonomi Khusus Papua merupakan dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau sebesar 2% (dua perseratus) dari pagu Dana Alokasi Umum

Nasional. Penganggarannya disesuaikan dengan Perdasus Papua Barat Tentang Pengalokasian dana Otonomi Khusus Papua Barat;

b) Dana Tambahan Infrastruktur Daerah Dalam Rangka Otonomi khusus Papua yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR-RI berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran.

c) Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.

d) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan Umum Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2015, sebagai berikut:

a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial

c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan

tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2.1. Proporsi Realisasi Belanja Daerah

3.2.1.1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Berdasarkan data realisasi APBD Provinsi Papua Barat tahun 2012-2016, dapat diketahui bahwa proporsi belanja tidak langsung menyerap anggaran sebesar 52,9%, sedangkan belanja langsung menyerap anggaran rerata sebesar 47,1%. Besarnya proporsi anggaran belanja tidak langsung dalam hal ini terkait dengan adanya transfer dana otonomi khusus Papua dan dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

Tabel 3.8 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Proporsi Rerata
Belanja Tidak Langsung	**52,7%**	**57,1%**	**53,0%**	**50,9%**	**50,9%**	**52,9%**
Belanja Pegawai	4,4%	3,8%	3,3%	3,0%	3,5%	3,6%
Belanja Hibah	9,7%	10,3%	8,5%	7,5%	13,9%	10,0%
Belanja Bantuan Sosial	0,2%	0,8%	0,7%	0,6%	0,4%	0,5%
Belanja Bagi Hasil kepada Kab/Kota	11,5%	17,2%	13,1%	17,2%	7,1%	13,2%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten, Kota, Distrik, Kelurahan, dan Kampung	27,0%	24,8%	27,4%	22,6%	26,0%	25,6%
Belanja Tidak Terduga	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Belanja Langsung	**47,3%**	**42,9%**	**47,0%**	**49,1%**	**49,1%**	**47,1%**
Belanja Pegawai	2,8%	2,9%	2,5%	2,0%	2,5%	2,5%
Belanja Barang dan Jasa	22,6%	21,6%	22,5%	22,7%	24,3%	22,7%
Belanja Modal	21,9%	18,5%	22,0%	24,4%	22,4%	21,8%
TOTAL BELANJA	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012–2016 (diolah)

Jika dilihat dari pos jenis belanja, terlihat cukup besarnya alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten, Kota, Distrik, Kelurahan, dan Kampung yang sepanjang tahun 2012-2016 menyerap alokasi anggaran sebesar 25,6%, kemudian pos belanja barang dan jasa menyerap anggaran sebesar 22,7% dan belanja modal menyerap anggaran sebesar 21,8% per tahunnya.

3.2.1.2. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan *overhead cost* bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya. Dalam konteks penganggaran daerah, overhead cost pemerintah ini diletakkan pada berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Papua Barat tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2012-2016

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)
BELANJA	**1.130.579.045.288**	**1.055.925.621.916**	**1.293.141.014.829**	**1.388.444.637.831**	**1.371.961.667.816**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**164.912.466.662**	**162.945.949.739**	**174.845.843.162**	**200.685.352.148**	**222.242.958.206**
Belanja Pegawai	164.912.466.662	162.945.949.739	174.845.843.162	200.685.352.148	222.242.958.206
Gaji Dan Tunjangan	108.853.709.133,00	106.451.946.683,00	117.383.240.662,00	134.950.373.341,00	152.195.134.006,00
Tambahan Penghasilan PNS	49.584.057.529,00	50.539.708.806,00	51.313.442.500,00	56.812.018.807,00	61.783.689.200,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	6.474.700.000,00	5.954.294.250,00	6.149.160.000,00	8.922.960.000,00	8.264.135.000,00
BELANJA LANGSUNG	**965.666.578.626**	**892.979.672.177**	**1.118.295.171.667**	**1.187.759.285.683**	**1.149.718.709.610**
Belanja Pegawai	**96.236.201.556**	**108.662.365.479**	**115.226.541.125**	**135.514.172.142**	**160.025.957.505**
Honorarium PNS	41.814.319.004,00	46.338.609.229,00	55.968.709.300,00	54.946.734.555,00	57.630.423.053,00
Honorarium Non PNS	39.855.120.802,00	45.558.195.000,00	42.668.474.325,00	58.996.028.557,00	77.240.860.652,00
Uang Lembur	14.566.761.750,00	16.765.561.250,00	16.589.357.500,00	21.571.409.030,00	25.154.673.800,00
Belanja Barang dan Jasa	**696.947.454.029**	**654.424.251.183**	**771.233.869.599**	**827.485.117.136**	**861.153.434.042**
Belanja Bahan Pakai Habis	29.628.828.677,00	43.028.604.245,00	55.473.282.814,00	67.513.061.546,00	60.622.099.705,00
Belanja Bahan/Material	85.307.057.685,00	64.183.094.956,00	75.861.243.339,00	59.942.353.729,00	64.914.633.238,00
Belanja Jasa Kantor	55.365.245.561,00	54.024.598.433,00	51.435.562.643,00	62.140.118.082,63	76.437.838.726,00
Belanja Premi Asuransi	2.195.000.000,00	2.181.000.000,00	2.493.154.000,00	6.306.768.434,00	6.613.338.395,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.680.247.026,00	18.413.665.403,00	15.524.695.452,00	20.681.779.282,91	20.583.344.983,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.529.058.096,00	53.085.612.580,00	59.751.369.065,00	75.410.073.134,00	51.706.573.226,00
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	44.218.127.517,00	5.541.273.000,00	5.375.255.000,00	7.171.729.000,00	6.915.084.350,00
Belanja Makanan Dan Minuman	91.564.310.347,00	93.181.538.361,00	122.788.857.568,00	160.767.769.567,00	128.700.100.240,00
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	5.448.305.500,00	4.692.592.050,00	6.338.609.150,00	4.601.175.714,00	5.557.776.500,00
Belanja Pakaian Kerja	728.135.000,00	1.190.720.000,00	1.550.119.000,00	909.412.000,00	613.461.500,00
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	4.086.961.750,00	4.903.409.400,00	6.752.782.200,00	5.339.056.080,00	6.265.651.006,00
Belanja Perjalanan Dinas	271.701.090.474,00	246.648.412.505,00	282.977.143.591,00	293.341.403.375,00	319.410.017.561,00

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.576.300.000,00	3.548.925.000,00	5.037.850.000,00	29.574.983.329,00	65.088.157.002,00
Belanja kursus. pelatihan. sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.083.769.396	5.986.372.000,00	7.447.041.777,00	10.785.305.824,00	9.434.459.910,00
Belanja Jasa Konsultansi	53.835.017.000,00	53.814.433.250,00	72.426.904.000,00	23.000.128.038,00	38.290.897.700,00
Belanja Modal	**172.482.923.041**	**129.893.055.515**	**231.834.760.943**	**224.759.996.405**	**128.539.318.063**
Belanja Modal Pengadaan Tanah	27.403.359.000,00	40.162.757.000,00	57.812.746.000,00	106.430.476.050,00	35.535.258.389
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	12.976.545.000,00	1.383.766.000,00	1.946.400.000,00	1.755.561.000,00	757.000.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	42.994.786.501,00	12.464.126.000,00	39.067.097.450,00	19.562.974.355,00	17.667.800.074
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	19.577.463.400,00	972.763.000,00	4.892.074.000,00	5.882.660.000,00	3.434.635.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	52.075.500,00	19.657.000,00	78.650.000,00	1.373.323.000,00	594.950.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	298.350.000,00	3.291.947.000,00	16.000.000,00	1.074.673.500,00	1.038.870.000
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	899.815.000,00	1.970.754.890,00	2.123.194.170,00		18.267.018.500
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.892.667.200,00	18.789.904.700,00	35.146.962.125,00	29.644.338.600,00	25.289.537.400
Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.824.119.490,00	12.237.861.570,00	11.930.497.833,00	13.458.888.000,00	16.537.530.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.148.680.100,00	9.198.022.500,00	36.225.400.625,00	20.845.222.245,45	3.438.309.700
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	714.295.000,00	541.930.900,00	2.193.349.000,00		
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.643.523.000,00	585.540.000,00	3.598.381.000,00		
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	6.953.629.450,00	4.131.879.780,00	2.218.801.000,00	12.213.098.500,00	2.011.596.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	13.244.656.400,00	21.196.054.700,00	29.950.290.000,00	5.876.198.320,00	1.714.537.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	697.908.000,00	312.832.000,00	1.065.393.000,00	161.072.000,00	12.540.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	-	19.500.000,00	508.000.000,00	0,00	
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	9.004.050.000,00	2.613.758.475,00	3.061.524.740,00	6.481.510.835,00	2.239.736.000
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian. Kebudayaan	157.000.000,00	1.780.392.500,00	666.500.000,00	1.296.000.000,00	815.000.000

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012–2016 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur secara mengalami pasang surut, Pada tahun 2012, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai sebesar 29,00% yang kemudian menurun menjadi sebesar 23,14% pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 23,82% dan menurun menjadi 19,88% pada tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi 21,9% pada tahun 2016.

Tabel 3.10 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Belanja (Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	Tahun Anggaran 2012	1.130.579.045.288	3.898.931.911.491	29,00%
2.	Tahun Anggaran 2013	1.055.925.621.916	4.564.034.285.287	23,14%
3.	Tahun Anggaran 2014	1.293.141.014.829	5.428.849.491.031	23,82%
4.	Tahun Anggaran 2015	1.388.444.637.831	6.985.806.675.771	19,88%
5.	Tahun Anggaran 2016	1.371.961.667.816	6.474.612.242.303	21,19%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012–2016 (diolah)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah didefinsikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat

bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Provinsi Papua Barat selama kurun waktu tahun 2012 s.d 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.11 Realisasi Pembiayaan Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	**Pendapatan Daerah**	3.873.388.417.669	5.637.696.633.774	5.791.598.721.006	5.840.373.819.324	6.740.386.627.580
2.	**Belanja Daerah**	3.898.931.911.491	4.514.034.285.287	5.428.849.491.031	6.880.166.675.771	6.464.612.242.303
	Surplus/Defisit	-25.543.493.822	1.123.662.348.487	362.749.229.975	- 1.039.792.856.447	275.774.385.277
3.	**Pembiayaan daerah**					
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	398.118.931.990,04	605.405.176.487,46	2.690.161.983.643,66	1.665.917.451.948	516.616.636.964
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	372.575.438.167,73	1.356.492.086.806,83	1.665.917.451.948,13	516.616.636.963,75
	Pembiayaan Netto	398.118.931.990	232.829.738.320	1.333.669.896.837	1.560.277.451.948	506.616.636.964
	Sisa Lebih/Kurang Pembiyaaan Tahun Berkenaan	372.575.438.168	1.356.492.086.807	1.667.168.607.312	520.463.895.501	782.391.022.241

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012–2016 (diolah)

Dari tabel terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2012-2016 terjadi peningkatan pembiayaan netto pada setiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara

lain berasal dari pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa dana lanjutan.

Tabel 3.12 Surplus/Defisit Riil APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	3.873.388.417.669	5.637.696.633.774	5.791.598.721.006	5.840.373.819.324	6.740.386.627.580
	Dikurangi					
2.	Realisasi Belanja Daerah	3.898.931.911.491	4.514.034.285.287	5.428.849.491.031	6.880.166.675.771	6.464.612.242.303
3.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah	0,00	372.575.438.167,73	1.356.492.086.806,83	1.665.917.451.948,13	516.616.636.963,75
	Surplus/Defisit Riil	**(25.543.493.822)**	**751.086.910.319**	**(993.742.856.832)**	**(2.705.710.308.395)**	**(240.842.251.687)**

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012–2016 (diolah)

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TahunAnggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2016, maka selanjutnya dapat digambarkan proyesi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2022 mendatang.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan Provinsi Papua Barat dilakukan berdasarkan judgement terhadap pertumbuhan pos pendapatan daerah selama tahun 2012-2016 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat dalam lima tahun yang akan datang, dengan kondisi awal APBD Provinsi Papua Barat tahun 2017 dan realisasi APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2015. Berdasarkan penghitungan tersebut, pendapatan daerah pada APBD tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp 6,88 Triliun, dan meningkat menjadi Rp 7,32 triliun pada tahun 2018. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2017-2021, pendapatan daerah akan menjadi Rp 10,37 triliun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya serta Lain-Lain Pendapatan Yang sah berupa dana otonomi khusus Papua dan dana tambahan Infrastruktur Dalam rangka Otsus, namun demikian pendapatan asli diperkirakan akan mengalami akselerasi seiring dengan berkembangnya berbagai sektor ekonomi Provinsi Papua Barat.

Seiring dengan perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah juga mengalami peningkatan yang cukup seignifikan, dari sebesar Rp 7,19 Triliun pada tahun 2017 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 7,96 triliun pada tahun 2019. Pada akhir periode RPJMD Papua Barat 2017-2022 ini belanja daerah diperkirakan telah mencapai angka Rp 10,33 Triliun.

Tabel 3.13 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017-2022

No.	URAIAN	APBD	PROYEKSI					Growth
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	**PENDAPATAN**	**6.888.867.177.840**	**7.127.771.975.355**	**7.960.779.419.701**	**8.681.347.745.260**	**9.466.428.428.222**	**10.372.005.780.103**	9%
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**403.269.106.650**	**438.549.074.448**	**476.791.906.793**	**523.177.975.432**	**575.495.772.975**	**620.788.478.348**	9%
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	262.246.500.000	280.603.755.000	303.052.055.400	330.326.740.386	363.359.414.425	392.428.167.579	8%
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.622.250.000	1.816.920.000	1.998.612.000	2.218.459.320	2.440.305.252	2.684.335.777	11%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.600.000.000	37.632.000.000	41.395.200.000	45.948.672.000	50.543.539.200	54.587.022.336	10%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	105.800.356.650	118.496.399.448	130.346.039.393	144.684.103.726	159.152.514.099	171.088.952.656	10%
2	**Dana Perimbangan**	**3.196.319.386.190**	**3.291.766.347.407**	**3.821.785.304.058**	**4.204.747.340.093**	**4.617.167.982.538**	**5.125.076.161.776**	10%
2.1.	Bagi Hasil Pajak	178.169.166.053	195.986.082.658	217.544.551.751	243.649.897.961	275.324.384.696	316.623.042.400	12%
2.2.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.219.715.760.137	1.305.095.863.347	1.409.503.532.414	1.536.358.850.332	1.674.631.146.861	1.842.094.261.548	9%
2.3.	DAU	1.378.805.557.000	1.516.686.112.700	1.668.354.723.970	1.835.190.196.367	2.018.709.216.004	2.220.580.137.604	10%
2.4.	DAK	419.628.903.000	469.984.371.360	526.382.495.923	589.548.395.434	648.503.234.977	745.778.720.224	12%
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**3.289.278.685.000**	**3.397.456.553.500**	**3.662.202.208.850**	**3.953.422.429.735**	**4.273.764.672.709**	**4.626.141.139.979**	7%
3.1.	Dana Otonomi Khusus	2.406.778.685.000	2.647.456.553.500	2.912.202.208.850	3.203.422.429.735	3.523.764.672.709	3.876.141.139.979	10%
3.2.	Dana Tambahan Infrastruktur	875.000.000.000	750.000.000.000	750.000.000.000	750.000.000.000	750.000.000.000	750.000.000.000	0
3.3.	Pendapatan Lainnya	7.500.000.000	-	-	-	-	-	-
2	**BELANJA**	**7.198.960.532.711**	**7.072.771.975.355**	**7.905.779.419.701**	**8.626.347.745.260**	**9.411.428.428.222**	**10.317.005.780.103**	8%
02.01	**Belanja Tidak Langsung**	**4.123.221.854.753**	**4.105.633.068.212**	**4.832.967.631.259**	**5.245.051.753.750**	**5.683.780.475.462**	**6.194.578.952.658**	9%
02.01.01	Belanja Pegawai	683.615.528.934	707.796.305.381	753.686.120.650	791.370.426.682	830.938.948.016	872.485.895.417	5%
02.01.04	Belanja Hibah	753.103.059.000	652.553.954.496	740.296.122.548	771.810.928.675	835.401.475.109	861.171.548.864	3%
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	43.660.000.000	45.843.000.000	48.135.150.000	50.541.907.500	70.069.002.875	55.722.453.019	7%

No.	URAIAN	APBD	PROYEKSI					Growth
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	864.710.693.675	545.000.000.000	835.000.000.000	926.556.322.808	1.083.121.664.567	1.140.027.747.796	10%
02.01.06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota/PemDes	1.768.132.573.144	2.144.439.808.335	2.445.850.238.061	2.694.772.168.085	2.854.249.384.894	3.255.171.307.562	13%
02.01.07	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0%
02.02	**Belanja Langsung**	**3.075.738.677.958**	**2.967.138.907.143**	**3.072.811.788.442**	**3.381.295.991.510**	**3.727.647.952.760**	**4.122.426.827.445**	6%
02.02.01	Belanja Pegawai	181.820.947.320	200.003.042.052	220.003.346.257	210.003.680.883	266.204.048.971	292.824.453.868	10%
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	1.853.744.620.165	1.539.119.082.182	1.543.030.990.400	1.607.334.089.440	1.814.067.498.384	1.985.474.248.222	2%
02.02.03	Belanja Modal	1.040.173.110.473	1.228.016.782.910	1.309.777.451.785	1.563.958.221.187	1.647.376.405.405	1.844.128.125.355	12%
03.00	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**(310.093.354.871)**	**55.000.000.000**	**55.000.000.000**	**55.000.000.000**	**55.000.000.000**	**55.000.000.000**	
03.01	Penerimaan Pembiayaan	365.093.354.871	0	0	0	0	0	
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012–2016 (diolah)

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Langkah pertama yang dilakukan dalam menghitung kerangka pendanaan daerah adalah menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang merupakan hasil proyeksi total penerimaan daerah, baik yang bersumber dari pos pendapatan daerah maupun pos pembiayaan daerah. Selanjutnya total proyeksi penerimaan daerah tersebut dikurangi dengan hasil proyeksi total belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.

Sesuai dengan kondisi tersebut, proyeksi pendapatan daerah Provinsi Papua Barat 2017-2022 dihitung berdasarkan asumsi pertumbuhan moderat, hal ini didasarkan pada data realisasi yang juga moderat, kemudian proyeksi SiLPA tahun 2017-2022 yang diperkirakan hanya sebesar Rp 100 miliar pertahun atau jauh dibawah realisasi selama periode tahun 2012-2016. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD.

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Provinsi Papua Barat dalam jangka waktu lima tahun 2017-2022, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.14 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017-2022

No.	URAIAN	PROYEKSI					
		APBD 2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**PENDAPATAN**	**6.888.867**	**7.127.772**	**7.960.779**	**8.681.348**	**9.466.428**	**10.372.006**
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	**6.888.867**	**7.127.772**	**7.960.779**	**8.681.348**	**9.466.428**	**10.372.006**
	Dikurangi:						
4.	Belanja Tidak Langsung	4.123.222	4.105.633	4.832.968	5.245.052	5.683.780	6.194.579
5.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUDA	**2.710.645**	**2.967.139**	**3.072.812**	**3.381.296**	**3.727.648**	**4.122.427**

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok dua kelompok prioritas yang diuraikan dalam tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022

URAIAN	PROYEKSI					
	APBD 2017	2018	2019	2020	2021	2022
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUDA	**2.710.645**	**2.967.139**	**3.072.812**	**3.381.296**	**3.727.648**	**4.122.427**
PRIORITAS I	813.194	890.142	921.844	1.014.389	1.118.294	1.236.728
PRIORITAS II	1.897.452	2.076.997	2.150.968	2.366.907	2.609.354	2.885.699

Foto: Billy, 2017

Foto: Charles Paiki, 2017

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJM atau RPJP). Adanya gap ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 ini perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Permasalahan tersebut merupakan masalah prioritas utama yang menjadi agenda rencana pembangunan dalam periode 2017-2022 yang berasal dari penjelasan misi pembangunan yang telah dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkante ridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan di Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

4.1.1.1. Urusan Bidang Pendidikan

- Masih terdapat sekitar 5,86% penduduk Provinsi Papua Barat yang berumur 15 tahun ke atas yang masih masih belum/tidak dapat membaca dan menulis;
- Masih rendahnya rerata lama sekolah penduduk di Provinsi Papua Barat dimana angkanya pada tahun 2016 sebesar 7,06 tahun. Hal tersebut berarti bahwa rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP;
- Tingkat pendidikan penduduk masih rendah dimana sebagian besar penduduk di Provinsi Papua Barat menamatkan pendidikan hingga tingkat SD bahkan tidak memiliki ijazah dengan persentase masing-masing sebesar 23,20 dan 22,05%. Persentase penduduk yang mengenyam pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi masih rendah dimana persentasenya hanya sebesar 8,69% pada tahun 2014;
- Angka partisipasi murni penduduk dari jenjang pendidikan SD hingga perguruan tinggi dapat dikatakan masih rendah. APM SD pada tahun 2015 sebesar 92,9%, APM SMP sebesar 68,29%, APM SMA sebesar 62,40%, dan APM perguruan tinggi sebesar 20,55%;
- Masih belum meratanya ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan SMA. Beberapa kabupaten pada tahun 2014 mengalami kekurangan fasilitas SMA seperti Kabupaten Kaimana (1 unit SMA), Maybrat (2 unit SMA), Teluk Wondama (2 unit SMA). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan fasilitas SMA di seluruh wilayah provinsi menjadi keharusan untuk optimalisasi peningkatan IPM Provinsi Papua Barat;
- Masih cukup tingginya angka putus sekolah di Provinsi Papua Barat yang pada tahun 2016 nilainya mencapai 54%;
- Belum berkembangnya SMK yang berbasis potensi pengembangan kawasan lokal seperti SMK pertanian sagu di Kabupaten Sorong Selatan, SMK migas di Kabupaten Teluk Bintuni, dan SMK pertanian pada tanaman pala di Kabupaten Fakfak;

- Belum optimalnya pengembangan database tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi sehingga kualitas tenaga pengajar yang kurang baik akan mempengaruhi output siswa;
- Tidak ada konsep bersama antara provinsi dan kabupaten terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan pendidikan di Provinsi Papua Barat. Hal tersebut ditunjukkan pada indikator IPM di sektor pendidikan yang nilainya masih jauh dari nilai maksimal.

4.1.1.2. Urusan Bidang Kesehatan

- Angka harapan hidup di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat masih rendah seperti Kabupaten Teluk Wondama yaitu selama 59 tahun, Kabupaten Teluk Bintuni 59,5 tahun, dan Kabupaten Tambrauw selama 59,2 tahun;
- Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dalam berbagai spesialisasi kemampuan, seperti Dokter umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidah, Ahli Farmasi, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan, serta Ahli GIzi. Dari Total 2.166 tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Papua Barat, hanya terpusat di beberapa daerah, sementara daerah seperti Teluk Wondama dan Pegunungan Arfak sama sekali tidak memiliki tenaga kesehatan. Rasio di Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 sebesar 3.601, yang artinya sekitar 3.601 penduduk akan diobati oleh 1 dokter;
- Beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat belum memiliki rumah sakit seperti Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Maybrat, dan Tambrauw;
- Fenomena kelahiran dengan menggunakan jasa dukun juga masih terjadi di Provinsi Papua Barat dengan persentase sebesar 13,56%. Hal ini terjadi di daerah-daerah yang memang tidak terjangkau oleh tenaga kesehatan;
- Cakupan balita yang belum mendapatkan imunisasi masih cukup tinggi (<95%). Pada tahun 2015 persentase balita yang mendapatkan imunisasi BCG sebesar 81,83%, imunisasi DPT sebesar 73,53%, imunisasi campak sebesar 65,73 persen, dan imunisasi hepatitis b sebesar 69,98%;
- Keterbatasan pengetahuan masyarakat menyebabkan alat kesehatan yang sudah didistribusikan menjadi tidak bermanfaat. Sehingga sangat dibutuhkan tenaga kesehatan/penyuluh yang bersifat edukatif;

- Banyak masyarakat di Papua Barat yang belum memliki kartu kesehatan (Kartu Indonesia Sehat maupun BPJS) sehingga menyulitkan mereka saat datang ke puskesmas atau rumah sakit;
- Belum tersedianya data yang menunjukkan jumlah orang asli papua yang sebenarnya, *by name by address*, sehingga program kesehatan sering tidak merata dan tepat sasaran;
- Masalah kesehatan menjadi semakin kompleks karena gaya hidup dan sarana kebersihan yang terbatas pada tempat tinggal masyarakat, seperti sarana air bersih, MCK, edukasi makanan bergizi, dll;
- Adanya stigma negatif ditengah masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS sehingga rendahnya keinginan penderita untuk melaporkan diri dan mendapatkan pelayanan medis lebih lanjut.

4.1.1.3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- Kondisi geografis wilayah yang sulit telah mengakibatkan cukup tingginya indeks kemahalan konstruksi di wilayah Provinsi Papua Barat yang berakibat pada tingginya biaya pembangunan infrastruktur fisik daerah. Persentase wilayah kabupaten/kota yang terhubung dengan jaringan jalan di Provinsi Papua Barat masih kurang yaitu hanya sebesar 42,15%;
- Belum memadainya kuantitas dan kualitas jalan di wilayah Provinsi Papua Barat terutama ke daerah-daerah yang memiliki potensi besar baik di bidang pertanian dan perkebunan, pariwisata, kelautan dan perikanan seperti akses jalan dari Kabupaten Pegunungan Arfak menuju Kabupaten Manokwari;
- Masih banyaknya jalan-jalan provinsi yang masih dalam status rusak dan belum optimal penanganannya. Dari sepanjang 2.309 km jalan yang di bawah kewenangan provinsi, hanya 638 km (27,6%) yang sudah diaspal dan dalam kondisi baik, sedangkan sepanjang 1671 km atau 72,4 persen masih berupa jalan tanah dan dalam kondisi rusak;
- Belum optimalnya pemeliharaan saluran irigasi di 11 wilayah yang menjadi kewenangan provinsi;
- Belum optimalnya ketersediaan TPA di berbagai wilayah Provinsi Papua Barat;

- Tingginya abrasi kawasan pantai akibat gelombang;
- Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur dasar daerah;
- Tingginya egosektoral dalam pelaksanaan program pembangunan di samping kurang diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan tata ruang daerah yang telah ditetapkan;
- Belum memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Provinsi Papua Barat.

4.1.1.4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

- Kondisi geografis wilayah berupa pegunungan dan kepulauan-kepulauan telah mengakibatkan kesulitan dan mahalnya pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di wilayah Provinsi Papua Barat;
- Belum optimalnya jumlah rumah yang dibangun untuk Orang Asli Papua (OAP), rata-rata pertahun baru dibangun sebanyak 200 rumah untuk OAP;
- Masih terdapat 13 kawasan permukiman kumuh yang tersebar di wilayah kabupaten/kota Provinsi Papua Barat, dengan penanganan yang kurang optimal;
- Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan perumahan masyarakat dan penataan kawasan permukiman;
- Pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman seringkali masih kurang memperhatikan aspek tata ruang dan kaidah lingkungan hidup.

4.1.1.5. Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

- Pada tahun 2015, nilai IDI Provinsi Papua Barat turun jauh sebesar 5,65 poin menjadi sebesar 59,97 poin sehingga masuk dalam kategori buruk. Aspek lembaga demokrasi merupakan aspek yang berkontribusi besar dalam merosotnya IDI Provinsi Papua Barat pada tahun 2015;
- Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat karena belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat. Pada tahun 2015, kasus pidana di Provinsi Papua Barat mencapai 2.262 kasus;

- Masih belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu;
- Belum optimalnya fungsi FKUB sebagai wahana untuk menjaga kerukunan umat beragama;
- Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketentraman dan kenyamanan masyarakat;
- Masih adanya potensi kecemburuan sosial di masyarakat antara orang asli Papua dan warga pendatang;
- Provinsi Papua Barat termasuk provinsi yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori tinggi dengan keseluruhan skor sebesar 154. Potensi bencana yang tinggi tersebut dapat mengancam ketentraman hidup masyarakat;
- Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana dimana skor kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana hanya sebesar 0,46 atau termasuk dalam kategori sedang;
- Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial;
- Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- Belum optimalnya penyiapan mitigasi bencana di beberapa wilayah yang memiliki kelas risiko multi bencana tinggi.

4.1.1.6. Urusan Bidang Sosial

- Masih cukup tingginya jumlah penduduk yang berada dalam kondisi kemiskinan dan rentan terhadap kemiskinan. Walaupun terjadi penurunan persentase penduduk miskin, hal tersebut ternyata tetap menempatkan Provinsi Papua Barat pada posisi kedua setelah Provinsi Papua sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia (25,43%) pada tahun 2016;
- Masih banyaknya kelompok orang asli papua dalam komunitas adat terpencil yang belum terjamah dan memiliki aksesibilitas dalam pembangunan;
- Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial;

- Belum optimalnya pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial pada masyarakat;
- Belum optimalnya kelembagaan dan partisipasi penanganan masalah kesejahteraan sosial.

4.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

4.1.2.1. Urusan Bidang Tenaga Kerja

- Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Papua Barat masih cukup rendah dimana angkanya pada tahun 2014 sebesar 68,30%. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa masih banyak penduduk pada angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan/menganggur. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 sebesar 8,08% dan menunjukkan kenaikan dari tahun 2014 yang hanya sebesar 5,02%;
- Tidak ada sinergisitas antar OPD yang membidangi peningkatan sumber daya manusia untuk mengurangi pengangguran baik dari sisi pendidikan formal maupun dari pendidikan nonformal sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia maupun pelaku usaha yang sudah berinvestasi di Provinsi Papua Barat baik itu pada bidang perkebunan, pariwisata, perikanan, gas bumi maupun perminyakan;
- Belum tersedianya Balai Latihan Kerja di Provinsi Papua Barat yang dapat memberikan pendidikan/pelatihan nonformal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan sesuai dengan SDA yang tersedia, mengingat sudah banyak dana yang sudah dialokasikan ke kampung. Balai Latihan Kerja yang ada di Provinsi Papua Barat hanya satu di Kota Sorong dan merupakan BLK milik Kementerian Tenaga Kerja.
- Belum terealisasinya pemetaan/data dukung kebutuhan tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Provinsi Papua Barat sehingga belum dapat direncanakan secara baik kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Papua Barat.

4.1.2.2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

- Dari sisi kesenjangan gender, terlihat bahwa rasio yang ditunjukkan memiliki tren yang menurun walaupun rasionya melebihi 100 persen. Hal ini berarti masih terjadi kesenjangan gender di Provinsi Papua Barat. perbandingan antara IPG dengan IPM berada pada kisaran 132-136%;
- Masih tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa daerah seperti Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Fakfak tercatat memiliki kasus KDRT relatif tinggi dibanding daerah lain di Provinsi Papua Barat. Permasalahan ekonomi keluarga yang diimbangi dengan kebiasaan penggunaan minuman keras (miras) merupakan salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Masih terjadinya kasus diskriminasi, eksploitasi serta perdagangan perempuan dan anak. Kasus eksploitasi dan perdagangan perempuan terjadi lebih banyak di daerah perkotaan seperti Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Dengan pertumbuhan perkotaan yang pesat dengan banyaknya bermunculan tempat-tempat hiburan, pertokoan, dan hotel, menjadikan potensi eksploitasi dan perdagangan perempuan dan anak menjadi tinggi. Selain itu, Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari juga tercatat memiliki temuan kasus paling banyak untuk tenaga kerja di bawah umur. Jika dilihat dari jenis pekerjaannya, maka pekerjaan di sektor informal yang paling banyak ditemukan tenaga kerja anak. Faktor pedidikan dan ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab tingginya angka tenaga kerja di bawah umur di Provinsi Papua Barat;
- Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak. Kondisi keluarga yang tidak harmonis, disertai beberapa kasus perceraian dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang termasuk minuman keras menjadi salah satu penyebab utama banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Papua Barat. Di beberapa wilayah perkotaan seperti Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari, sering juga kekerasan terhadap anak diakibatkan karena adanya upaya kekerasan seksual dan perjudian;
- Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah di Provinsi Papua Barat.

Banyak kegiatan yang diatahkan untuk pengarusutamaan gender diidentikan hanya untuk keterlibatan perempuan saja. Munculnya dikotomi dasar tentang arti pengarusutamaan gender ini secara tidak langsung justru membuat program pemberdayaan dan pengarusutamaan gender tidak dapat berjalan dengan optimal. Belum lagi di banyak wilayah di Provinsi Papua Barat masih sangat kental terhadap pola patrilineal kesukuan, menyebabkan paritisipasi aktif dari perempuan dalam proses pembangunan menajdi sulit;

- Masih Kurangnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak;
- Mencegah terjadinya pernikahan dini pada anak usia remaja.

4.1.2.3. Urusan Bidang Pangan

- Diversifikasi sumber pangan lokal relatif masih terbatas. Rasio konsumsi pangan lokal terhadap beras masih cukup rendah dimana persentasenya pada tahun 2016 hanya sebesar 15,40%;
- Persentase daerah rentan pangan di Provinsi Papua Barat masih cukup tinggi dengan persentase sebesar 31,76%. Belum dikembangkan dan dipromosikan dengan baik sumber pangan alternatif seperti komoditas sagu, ubi jalar dan keladi sebagai potensi bahan pangan lokal;
- Peningkatan akses pangan masyarakat mensyarakatkan akses terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal masih terbatas;
- Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas supply bahan pangan;
- Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas penyuluh/pemdamping pengolahan pangan dan gizi untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan pangan;
- Masih terbatasnya pemenuhan infrastruktur pengolahan pangan (laboratorium uji mutu, peralatan, dll) yang akan turut menentukan kapasitas produksi dan ketersediaan bahan pangan;

- Masih kurangnya promosi olahan pangan lokal dan kampanye diversifikasi pangan sebagai salah satu kunci dalam pencapaian diversifikasi pangan dan ketahanan pangan daerah.

4.1.2.4. Urusan Bidang Pertanahan

- Tingginya konfik pertanahan khususnya berkaitan dengan tanah hak milik dan tanah adat;
- Belum optimalnya pemetaan tanah hak milik dan tanah hak ulayat di wilayah Provinsi Papua Barat;
- Pelayanan administrasi pertanahan masih belum menjangkau secara efektif sampai dengan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis.

4.1.2.5. Urusan Bidang Lingkungan Hidup

- Terjadinya pembalakan liar di wilayah hutan lindung baik untuk kegiatan pertambangan maupun perkebunan;
- Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparatur terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup.

4.1.2.6. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- Belum optimalnya data kependudukan di Papua Barat termasuk data tentang Orang Asli Papua.
- Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan relatif masih kurang.
- Kepemilikan e-KTP dan akta kelahiran masih rendah. Target secara nasional pada tahun 2019 mencapai 100% penduduk telah terjangkau oleh e-KTP dan memiliki akta kelahiran. Namun kondisi di Papua Barat sampai dengan tahun 2016 baru mencapai 60% kepemilikan e-KTP dan 40,1% kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Papua Barat. Salah satu penyebabnya adalah kondisi geografis Papua Barat yang sulit dijangkau.

4.1.2.7. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- Masih rendahnya kualitas aparatur di tingkat kampung dalam menjalankan fungsi dan pelayanan kepada masyarakat. Di Provinsi Papua Barat terdapat 1.224 kampung, dimana sebagian besar aparatur pemerintah kampung masih belum dapat baca tulis. Hal ini tentu saja mengakibatkan proses pelayanan dan pembangunan di masing-masing kampong menjadi terhambat.
- Belum optimalnya penggunaan dana kampung sebagai penggerak perekonomian di masing-masing kampung. Penggunaan dana kampung masih banyak yang hanya kemudian dibagi-bagi di tingkat kampung secara tunai kepada masyaakat kampung;
- Kampung-kampung terisolasi karena telekomunikasi yang terbatas di pulau-pulau terpencil/terluar maupun daerah pedalaman;
- Terbatasnya sarana transportasi dari dan menuju pusat ekonomi dan pemerintahan;
- Pendapatan desa masih rendah karena belum terbentuk serta dimanfaatkannya BUMDES sebagai sumber pendapatan desa;
- Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif masih rendah.

4.1.2.8. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- Masih tingginya migrasi dan angka kelahiran (laju pertumbuhan penduduk) di Provinsi Papua Barat. Tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 2,54% lebih tinggi dibandingkan angka nasional;
- Masih tingginya angka kematian di usia produktif;
- Belum adanya data terpadu terkait kependudukan dan KB khususnya yang berkaitan dengan orang asli papua;
- Belum optimalnya pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Reproduksi disosialisasikan dan dilaksanakan bagi masyarakat.

4.1.2.9. Urusan Bidang Perhubungan

- Kurangnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan telah mengakibatkan kurang efektifnya fasilitasi pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
- Masih belum optimalnya ketersediaan trayek perintis pada perhubungan laut dan udara;
- Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- Proses perencanaan (studi-pengusulan) dan proses pembangunan sarana dan prasarana fisik sarana prasarana infrastruktur perhubungan memakan waktu yang lama;
- Adanya permasalahan hak ulayat dalam pengembangan proyek nasional perekeratapian yang saat ini sedang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat.

4.1.2.10. Urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika

- Banyak wilayah yang masih terbatas untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat;
- Belum memadainya sarana dan prasarana infrastruktur komunikasi dan informatika;
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung diberbagai bidang pembangunan daerah;
- Belum adanya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat.

4.1.2.11. Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

- Persentase koperasi aktif di Provinsi Papua Barat masih rendah dimana persentasenya sebesar 43,56% pada tahun 2013;
- Belum difungsikannya insfrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal, seperti pasar dan sarana TPUK.

4.1.2.12. Urusan Bidang Penanaman Modal

- Belum tersusunnya data UMKMK potensial yang bermitra dengan PMA/PMDN;

- Belum adanya regulasi terkait tentang penanaman modal di Provinsi Papua Barat, serta regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Papua Barat. Kurangnya kepastian hukum ini membuat pelaku usaha/investor menjadi terganggu;
- Belum optimalnya Pengusaha Asli Papua dalam kegiatan ekonomi di Papua Barat.
- Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk taat dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007, PERKA BPKM RI No. 15 Tahun 2015, dan PERKA BKPM No. 17 Tahun 2015. Hal ini terlihat dari jumlah rencana PMA dan PMDN yang berjumlah 192, dan hanya terealisasi sejumlah 57 dari 133.

4.1.2.13. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

- Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di provinsi/kabupaten/kota;
- Minimnya kompetisi olahraga dalam daerah karena keterbatasan SDM pertandingan;
- Banyak atlet yang mengalami kendala administrasi karena ada perbedaan data di akte dan kondisi fisiknya;

4.1.2.14. Urusan Bidang Statistik

- Belum optimalnya ketersediaan data data statistik pembangunan daerah;
- Kurangnya kordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia pendataan dan statistik daerah.

4.1.2.15. Urusan Bidang Persandian

- Belum optimalnya sara prasarana jejaring persandian daerah khususnya di kabupaten/kota yang secara geografis sulit dijangkau oleh telekomunikasi persandian;
- Kurangnya sumberdaya manusia di bidang pengelolaan persandian dan pengamanan asset vital daerah.

4.1.2.16. Urusan Bidang Kebudayaan

- Belum diterapkan keberadaan UU otonomi khusus yang dapat mendukung pengembangan kebudayaan. Provinsi Papua Barat memiliki banyak potensi dalam sektor budaya, hal ini dapat dilihat pada tahun 2012 UNESCO telah menetapkan noken sebagai karya budaya masyarakat asli Papua;
- Belum adanya gedung kesenian dan taman budaya berskala provinsi representatif yang dapat digunakan untuk melakukan pementasan dan latihan bagi sanggar/grup kesenian.

4.1.3. Urusan Pilihan

4.1.3.1. Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan

- Masih kurangnya pemanfaatan dan pengolahan hasil produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Basis perikanan Provinsi Papua Barat saat ini adalah perikanan tangkap yang memanfaatkan kekayaan sumberdaya laut Papua dan sekitarnya. Potensi sumberdaya ikan di sekitar wilayah Papua Barat, terutama di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) No. 714, 715, 717, dan 718 mencapai 3,66 juta ton (36,8% potensi sumberdaya ikan nasional). Khusus WPP 717 dan 718 diperkiran potensi mencapai 2,5 juta ton dan belum dikelola secara optimal. Rata-rata produksi ikan Provinsi Papua Barat di atas 100.000 ton dengan pertumbuhan produksi rata-rata di atas 4% per tahun. Produksi ikan tahun 2015 baru mencapai 136 ribu ton (2,2% produksi nasional);
- Hasil perikanan masih dipasarkan dalam bentuk segar atau belum ditangani dengan baik untuk proses penanganan dan pengolahan lebih lanjut. Karena itu, pengembangan industri pascapanen (pengolahan) menjadi kegiatan bisnis yang perlu dikembangkan;
- Produk perikanan tangkap laut di Provinsi Papua Barat umumnya masih dipasarkan dalam bentuk segar (54,89%), dan hanya sebagian kecil yang diolah terutama pengolahan modern seperti pembekuan dan pengalengan ikan (penggaraman (0,59%), pengasapan (0,41%), pembekuan (43,70%), pengalengan (0,34%), dan pengolahan lainnya sebanyak (0,08%);

- Masih terbatasnya SDM, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan;
- Belum adanya pengembangan industry pengolahan terpadu di bidang perikanan. Usaha pengolahan ikan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai untuk sumber PAD, penyerap tenaga kerja yang banyak. Oleh karena itu pengembangan industri pengolahan perlu dilakukan secara terpadu dalam satu klaster yang saling terkait (sistem minabisnis);
- Masih rendahnya mutu bahan baku industri perikanan;
- Masih terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal) di Provinsi Papua Barat;
- Masih terbatasnya akses terhadap pasar produksi. Kebijakan nasional pelarangan alat tangkap menyebabkan banyak kapal yang tidak beroperasi di daerah Papua Barat, seperti di Kaimana. Imbas permasalahan kebijakan perikanan adalah ditutupnya beberapa UPI, seperti di Sorong dilaporkan 23 pabrik tutup;
- Masih banyaknya produk usaha perikanan terutama hasil olahan tanpa label, sehingga mengurangi *traceability* produk dan nilai tambah yang akan diperoleh daerah/negara;
- Banyaknya infrastrutur untuk nelayan seperti SPBN (stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan) yang beralih fungsi menjadi pom bensin umum;
- Masih sulitnya pengembangan budidaya perikanan rumput laut dan unggulan lain seperti ikan kerapu terutama berkaitan karena kesulitan pemasaran produk dan ketersediaan benih dan indukan berkualitas. Sebagai contoh ujicoba 50 ha budidaya rumput laut yang berhasil dalam aspek produksi, tapi hasil tidak ada yang beli. Untuk komoditas unggulan lain (ex. Kerapu), pengembangan masih menghadapi kesulitan sumber benih dan induk berkualitas;
- Masih terbatasnya pakan ikan untuk budidaya perikanan. Kawasan budidaya laut telah ditetapkan seperti di Sorong, Kab Sorong, dan Raja Ampat, namun belum beroperasi dengan baik. Salah satu masalah budidaya perikanan rakyat adalah masalah pakan.
- Produk khas Papua Barat dari komoditas perikanan belum berkembang;

- Belum adanya pola penataan yang jelas yang disertai pola pengelolaan sebagai Provinsi konservasi terutama dalam kaitannya dengan konservasi laut.

4.1.3.2. Urusan Bidang Pariwisata

- Belum sepenuhnya diterapkan prinsip-prinsip pengembangan yang dipakai dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi Papua Barat yang mencakup prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (*suistainable tourism development*) dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*);
- Masih kurangnya pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Papua Barat. Pada tahun 2012 terdapat 113 objek wisata alam, 10 objek wisata bahari, 74 objek wisata budaya, dan 15 objek wisata aggo. Penurunan jumlah objek wisata terlihat pada tahun 2013 menjadi 82 objek wisata alam, 10 objek wisata bahari, 45 objek wisata budaya, dan 15 objek wisata agro. Selain itu, aksesibiltas antar wilayah yang relatif masih buruk karena jaringan antar regional (Trans Papua) belum terkoneksi secara sempurna, sehingga banyak wilayah destinasi wisata belum dapat dijangkau dengan kendaraan biasa (hanya bisa menggunakan 4WD);
- Belum optimalnya promosi potensi wisata Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2012 jumlah tamu menginap di hotel sebesar 109.964, kemudian pada tahun 2013 naik menjadi 184.033 dan pada tahun 2014 menjadi 194.329. Walaupun terjadi kenaikan jumlah tamu dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari proporsi jenis tamu, tamu domestik masih lebih dominan dibanding tamu asing. Pada tahun 2014 tamu asing yang mengunjungi Papua Barat sebesar 3.048 dan tamu domestik sebesar 191.281.
- Kegiatan pariwisata di Provinsi Papua Barat cenderung terpusat di Kabupaten Raja Ampat, sesungguhnya Provinsi Papua Barat memiliki destinasi wisata yang menarik diantaranya hutan pegunungan di Kabupaten Pegunungan Arfak, hutan mangrove di Kabupaten Teluk Bintuni, wisata gua di kawasan Pegunungan Lina di Kabuoaten Manokwari. wisata bahari Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC) di Kabupaten Teluk Wondama, kawasan konservasi Penyu Belimbing Jamursba

Medi di Kabupaten Tambrauw, dan kawasan konservasi perairan di Kabupaten Kaimana.

4.1.3.3. Urusan Bidang Pertanian

Tanaman pangan dan hortikultura

- Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura masih relatif rendah;
- Kawasan lahan pertanian pangan kurang mencukupi (perlu dilakukan pembukaan lahan pertanian);
- Tidak tersedia alat mesin untuk pembukaan atau perluasan lahan pertanian yang diperuntukan untuk tanaman pangan dan hortikultura;
- Permasalahan kepastian status tanah pertanian untuk pengembangan lahan pertanian (status tanah adat/tanah ulayat);
- Pengembangan varietas tanaman pangan unggulan lokal belum dilakukan dengan baik seperti sagu dan umbi-umbian;
- Keterbatasan alat transportasi produk pertanian;
- Keterbatasan akses pasar produk pangan;
- Tidak tersedia gudang penyimpanan produk pertanian;
- Keterbatasan petani dalam mengkses pupuk bersubsidi (jumlah pengecer sedikit dan tidak tersebar merata di seluruh kabupaten);
- Terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke lahan perkebunan atau untuk penggunaan lain;
- Tenaga penyuluh/pendamping petani sangat tidak memadai dan sebagian penyluh beralih fungsi menjadi tenaga struktural;
- Belum ada tenaga penilai penyuluh di badan kepegawaian daerah (menghambat karir dan penilaian kinerja penyuluh);
- Belum ada UPT yang khusus menangai penyuluhan pada petani;
- Masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam meningkatkan produksi;
- Kegiatan layanan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh sangat terbatas.

Perkebunan

- Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani pekebun untuk mengaplikasikan pupuk yang baik serta perawatan tanaman perkebunan dengan baik;
- Ketersediaan sumber bibit perkebunan yang berkualitas sangat terbatas (tidak ada kebun induk tanaman perkebunan);
- Jumlah petugas penyuluh perkebunan sangat kurang.

Peternakan dan kesehatan hewan

- Belum tersedia lahan untuk penanaman tanaman pakan ternak;
- Usaha peternakan belum dilakukan dengan intensif (masih menggunakan cara tradisional dan ternak tidak dikandangkan);
- Harga pakan ternak mahal/tidak terjangkau petani/peternak;
- Bahan baku sumber pakan ternak kurang (utamanya jagung);
- Jumlah dokter hewan sangat terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh kabupaten;
- Distribusi petugas penyuluh sangat tidak merata dan kurang. Selain itu, kapasitas petugas penyuluh masih relatif rendah;
- Fasilitas rumah pengolah pupuk organik (UPO) masih sangat terbatas dan belum merata di seluruh wilayah.
- Belum tersedia rumah potong hewan (RPH) yang memadai dan tersebar di seluruh kabupaten.

4.1.3.4. Urusan Bidang Kehutanan;

- Keberadaan hutan yang terancam akibat perambahan hutan, kerusakan hutan, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dan pemekaran wilayah;
- Belum optimalnya aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- Daya Dukung DAS yang masih rendah;
- Pemanfaatan lahan untuk budidaya masih rendah;

- Peran serta masyarakat dalam kegiatan kehutanan yang belum optimal;
- Distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang belum terjamin;
- Pendapatan petani hutan yang masih rendah sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar hutan belum optimal;
- Konservasi lahan dan pelestarian sumber daya kehutanan yang belum optimal;
- Pencurian dan perdagangan kayu illegal cukup tinggi;
- Potensi dan kerusakan hutan yang belum dapat teridentifikasi;
- Kewenangan Pemerintah Daerah untuk pengelolaan kehutanan di daerah yang dialihkan ke Pemerintah Pusat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014.

4.1.3.5. Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

- Kurangnya data pendukung potensi energi terbarukan di wilayah Provinsi Papua Barat;
- Persentase rumah tangga di Provinsi Papua Barat yang menggunakan sumber penerangan listrik dari PLN pada tahun 2014 adalah sebesar 68,72%, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 63,20%. Sementara itu, persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik non PLN adalah sebesar 16,95% dan yang menggunakan pelita/senter sebesar 12,80%. Data tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga yang belum menikmati listrik di Provinsi Papua Barat cukup tinggi;
- Belum teridentifikasinya potensi geologi detail di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat;
- Belum optimalnya pemetaan potensi wilayah rawan bencana geologi di Provinsi Papua Barat;
- Belum optimalnya pengelolaan potensi air bawah tanah, padahal banyak wilayah di Provinsi Papua Barat yang tidak memiliki potensi sumber daya air pemukaan;
- Belum selesainya penataan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Papua Barat;
- Masih terdapat pertambangan liar (PETI) di Provinsi Papua Barat;

- Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi energi terbarukan, padahal peluang penggunaannya bervariasi mulai dari tenaga surya, mikro hidro maupun angin.

4.1.3.6. Urusan Bidang Perdagangan

- Ekspor unggulan di Provinsi Papua Barat masih berupa komoditas migas dimana persentasenya mencapai 98,98% pada tahun 2015;
- Rendahnya kuantitas dan kualitas produksi dan industri kecil lokal serta produk kerajinan yang dapat dipasarkan;
- Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktkk perdagangan yang tidak sehat;
- Belum maksimalnya tingkat kesadaran konsumen dalam menggunakan haknya sebagai konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumden No. 8 Tahun 1999;
- Pelaporan arus barang keluar masuk, yang merupakan kewajiban pelaku usaha belum terlaksana dengan baik.

4.1.3.7. Urusan Bidang Perindustrian

- Belum terlaksananya pengembangan sentra Industri kecil yang terintegrasi dengan sektor unggulan daerah di Provinsi Papua Barat;
- Lemahnya akses permodalan untuk industri kecil dan menengah;
- Masih banyak potensi hasil-hasil pertanian dan perikanan kelautan yang belum diolah secara maksimal dalam skala industri;
- Lemahnya kualitas SDM dalam pengeolahan produk dan peningkatan kualitas/mutu;
- Kewajiban perusahaan pemegang izin usaha industri baik skala menengah dan besar di Provinsi Papua Barat sampai saat ini belum menyampaikan laporan yang terkait dengan nilai investasi, kapasitas terpasang, realisasi produk dan penjualan hasil produk yang dihasilkan.

4.1.3.8. Urusan Bidang Ketransmigrasian

- Belum optimalnya pengelolaan transmigrasi local antar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Transmigrasi beberapa masih diikuti para transmigran berasal dari daerah Jawa, Sulawesi dan Maluku.
- Masih kurangnya penataan lokasi transmigrasi menjadi kawasan transmigrasi terpadu yang bersinergi dengan kawasan terluar, tertinggal, dan perbatasan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi lokal.

4.1.4. Urusan Pemerintahan Penunjang

4.1.4.1. Urusan Bidang Pemerintahan Umum

- Rendahnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat yang secara nasional berada di peringkat 30;
- Belum adanya penegasan Batas Wilayah baik antar provinsi yaitu antara Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua dan 13 Kabupaten dalam Provinsi Papua Barat;
- Terdapat distrik, kelurahan dan kampung yang belum memiliki kantor, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
- Masih adanya ganti rugi tanah ulayat yang belum selesai. Pembebasan tanah ulayat ini untuk pembangunan sarana prasarana pemerintahan Provinsi Papua Barat;
- Pemilihan Kepala Kampung belum dilaksanakan oleh Kabupaten secara serentak;
- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan *civil society*;
- Nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih perlu direvitalisasi di setiap jenjang birokrasi (Pembentukan kelompok budaya kerja sebagai wadah diskusi untuk memecahkan permasalahan pekerjaan);
- Prinsip *money follow function, money follow organization* harus mulai ditinggalkan, menjadi *money follow programme;*
- Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk pembangunan daerah;
- Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah;

- Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja serta antar-instansi;
- Belum adanya ketepatan waktu pada pengesahan APBD dan APBD Perubahan;
- Rendahnya kewenangan Lembaga MRP dalam mengawal program-program otonomi khusus yang mengarah pada pemberdayaan perlindungan dan keberpihakan Masyarakat Asli Papua. Kewenangan hanya memberikan pertimbangan atau fungsi konsultatif.

4.1.4.2. Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian

- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan;
- Masih rendahnya profesionalisme birokrasi;
- Belum berkembangnya sistem *reward* dan *punishment* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua Barat.

4.1.4.3. Urusan Bidang Keuangan Daerah

- Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah yang ditandai dengan belum Optimalinya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah;
- Belum optimalnya pengelolaan Asset Daerah;
- Masih rendahnya kontribusi unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah terhadap PAD;
- Belum akuratnya database pajak daerah;
- Belum optimalnya pelayanan pajak daerah, baik melalui Samsat maupun instansi pemungut lainnya.

4.1.4.4. Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah;
- Belum optimalnya kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan OPD-OPD, maupun dengan pemerintah Pusat, antar Provinsi, dan kabupaten/kota;
- Belum memadainya ketersediaan data-data pembangunan daerah;

- Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

4.1.4.5. Urusan Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah

- Belum terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran organisasi perangkat daerah;
- Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh organisasi perangkat daerah.

4.2. ISU STRATEGIS PROVINSI PAPUA BARAT

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Provinsi Papua Barat dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Provinsi Papua Barat. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

4.2.1.1. Isu Strategis Internasional

Seiring dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (*sustainable development goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan intensif, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

mengajukan 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Negara- negara Anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang disusun oleh Kelompok Kerja Terbuka akan menjadi basis utama untuk proses antar-pemerintah pasca-2015.

1. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di manapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia;
4. Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua;
7. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara Negara-negara;
11. Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang keberlanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya;
14. Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan

menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

16. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan;

4.2.2. Isu Kebijakan Nasional

4.2.2.1. Kebijakan Otonomi Khusus

Papua Barat merupakan salah satu provinsi dengan status otonomi khusus. Basis kebijakan status otonomi khusus di Indonesia beragam, dikarenakan alasan politik, ekonomi, kesejarahan dan kebudayaan, dan posisi sebagai ibukota negara. Status otonomi khusus Provinsi Papua Barat (yang merupakan pemekaran Provinsi Papua) dirumuskan berbasis pertimbangan terutama politik dan ekonomi. Basis legal otonomi khusus Provinsi Papua Barat adalah UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Tujuan pokok pemberian otonomi khusus adalah pengakuan dan penghormatan karakteristik sebuah daerah yang spesifik, sekaligus sebagai upaya untuk memperkokoh integrasi nasional yang ditempuh melalui penghargaan secara setara atas keragaman kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat. Lebih lanjut, tujuan pemberian status otonomi khusus adalah sebagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat yang selama ini tertinggal dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya.

Undang-undang menggariskan, upaya untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dilakukan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam provinsi secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga kesenjangan antara Provinsi Papua Barat dan daerah lain bisa dimoderasi, dan hak-hak dasar penduduk Asli Papua mulai bisa dipenuhi. Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat juga menekankan prinsip-prinsip dasar pengelolaan pemerintahan yang harus bertumpu pada perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar

penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga Negara.

Disain otonomi khusus yang menjadi basis penyelenggaran pemerintahan di Provinsi Papua Barat mencakup aspek kewenangan dan tugas pemerintahan yang sangat luas, bukan hanya aspek pemerintahan umum yang berlaku di semua tempat, namun aspek-aspek spesifik yang terkait dengan pengembangan kesejahteraan dan perlindungan hak azasi manusia. Aspek-aspek kewenangan yang secara spesifik harus menjadi perhatian pemerintah provinsi mencakup perlindungan dan pengembangan masyarakat adat, pengembangan ekonomi orang asli Papua, keterjaminan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, konservasi lingkungan hidup, dan hubungan antar umat beragama yang bersendi toleransi/penghargaan. Kewenangan-kewenangan tersebut secara spesifik menekankan pada perlakukan yang bersifat afirmatif untuk masyarakat asli Papua. Bentuk afirmasi lain berkaitan dengan kelembagaan pemerintahan dan kepemimpinan politik, dimana Orang Asli Papua memiliki saluran yang lebih luas melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan ketentuan prioritas dalam kepemimpinan politik di provinsi dan kabupaten/kota.

Di luar kewenangan dan kelembagaan politik/pemerintahan, aspek penting dalam Undang-undang Otonomi Khusus adalah sumber pembiayaan pembangunan dan pemerintahan. Salah satu tantangan utama yang hendak dijawab melalui implementasi otonomi khusus adalah kesenjangan antara Provinsi Papua dan Papua Barat dengan provinsi lainnya, maupun kesenjangan antar wilayah di dalam provinsi (antar kabupaten/kota, kota – pedesaan/pedalaman, dan kawasan pegunungan – pantai). Salah satu upaya untuk memotong lebih cepat profil kesenjangan tersebut adalah melalui skema afirmasi anggaran, khususnya transfer pemerintah pusat ke daerah. Secara garis besar sumber pendapatan mencakup; 1) pendapatan asli provinsi, kabupaten/kota, 2) dana perimbangan, 3) penerimaan provinsi dalam rangka Otonomi Khusus, 4) pinjaman daerah, dan 5) lain-lain penerimaan yang sah. Khusus untuk Dana Perimbangan dalam rangka Otonomi Khusus mencakup bagi hasil pajak yang nilainya mencapai 90% (untuk PBB), dan Bagi hasil sumber daya alam yang nilai mencapai 70-80% untuk sektor-sektor utama (kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan gas alam). Di luar sumber di atas, bentuk afirmasi keuangan yang lebih

spesifik adalah Penerimaan Khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, berlaku selama 25 tahun (akan berakhir 2026). Secara spesifik afirmasi keuangan ini terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, dua sektor pembangunan manusia yang sangat tertinggal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Di luar skema afirmasi yang bersifat tetap tersebut, secara rutin Pemerintah Pusat juga merancang berbagai bentuk kebijakan dan pembangunan yang bisa dengan lebih cepat mengurangi kesenjangan, khususnya di sektor infrastruktur dan sosial ekonomi. Undang-udang tidak secara spesifik mengatur penggunaan sumber-sumber keuangan di atas, namun memberikan panduan prioritas yaitu setidaknya 30% (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

Sebagai upaya lebih lanjut untuk implementasi Otonomi Khusus, Pemerintah Pusat dalam dokumen RPJMN tahun 2015-2019, mencanangkan kebijakan *New Deal Policy for Papua*. Kebijakan ini bertujuan mempercepat proses pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai dengan UU No 21 tahun 2001 terkait dengan penguatan implementasi otonomi khusus dan penerapan Inpres No. 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudian pada tahun 2008, pemerintah menetapkan UU No. 35 tahun 2008 tentang penetapan PP pengganti UU No. 1 tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang. UU ini juga menjadi dasar dari pembentukan Provinsi Papua Barat. Lebih lanjut, tujuan dan aspek-aspek otonomi khusus yang dirumuskan dalam UU tersebut harus menjadi fondasi dan ruh kebijakan pembangunan, termasuk RPJMD.

Pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Provinsi Papua Barat masih mengalami sejumlah kendala. Otonomi khusus ini dimaksudkan untuk memberikan perhatian lebih bagi masyarakat. Di dalam dokumen RPJMN 2015-2019 disinggung terkait dengan rendahnya kinerja pemerintah daerah otonomi khusus khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat yang bisa dilihat dari dua sisi yaitu proses dan capaian sistemik. Dari sisi proses, masih terdapat pemerintah daerah yang belum mampu memberikan pelayanan publik secara otpimal. Sementara dari sisi capaian sistemik, beberapa indikator makro menunjukkan belum adanya perubahan yang signifikan. Povinsi Papua Barat salah satunya,

memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kondisi kemiskinan yang belum menunjukkan perubahan berarti jika dibandingkan dengan era sebelum adanya otonomi khusus. IPM Papua Barat berada pada tiga terbawah dari 34 provinsi di Indonesia dan juga menjadi provinsi yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi.

4.2.2.2. Pembangunan Wilayah Tertinggal

Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan salah satu wilayah yang perlu segera ditingkatkan pembangunannya. Wilayah ini termasuk ke dalam wilayah tertinggal. Oleh karena itu perlu upaya penanganan secara khusus dalam pengelolaanya. Arah kebijakan untuk mengatasi daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat sesuai dengan dokumen RPJMN tahun 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan Provinsi Papua Barat yang difokuskan pada hal-hal sebagai berikut.

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal;
2. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir;
3. Pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian;
4. Pemihakan terhadap Orang Asli Papua;
5. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
6. Pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan;
7. Pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir; dan
8. Penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Terdapat 7 wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat yang akan ditangani oleh Pemerintah Pusat sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan wilayah yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2015-2019 antara lain Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, Raja Ampat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondoma.

4.2.2.3. Pembangunan Kawasan Perbatasan

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan periode 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan semakin kuatnya pertahanan keamanan nasional.

Sedangkan strategi pembangunan perbatasan negara sebagai berikut meliputi: dimensi pengelolaan Batas Wilayah Negara, meliputi: (a) penguatan infrastruktur diplomasi (data dukung dan sarana) dan koordinasi tim perunding inter dan antar tim perunding; (b) peningkatan koordinasi keamanan dan pertahanan perbatasan laut dan darat, serta standarisasi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keamanan dan pertahanan; (c) mendorong peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kedaulatan negara.

Di Provinsi Papua Barat, terdapat wilayah yang sudah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas (LOKPRI) penanganan kawasan perbatasan 2015-2019. Wilayah tersebut adalah wilayah Kabupaten Raja Ampat. Wilayah ini yang akan menjadi prioritas penanganan sehingga pembangunan yang ada disana akan berjalan dengan baik.

4.2.3. Isu Pembangunan Wilayah Papua

4.2.3.1. Pembangunan Jalan Trans Papua dan Papua Barat

Pembangunan Jalan Trans Papua dan Jalan Lintas Perbatasan Papua akan direncanakan sepanjang 4.357 km dan direncanakan selesai hingga tahun 2018 (www.pu.go.id). Pembangunan ini diharapkan tidak hanya untuk membuka konektivitas antar daerah di Pulau Papua tetapi juga dapat mengembangkan kawasan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Pembangunan Jalur Trans Papua dan Papua Barat terdiri dari 11 ruas jalan dimana 7 ruas jalan di Provinsi Papua dan 4 ruas jalan berada di Provinsi Papua Barat. Berikut disajikan tabel rencana ruas Jalan Trans Papua pada Tabel berikut.

Tabel 4.1 Tabel Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat

No.	Ruas jalan	Panjang (Km)	Provinsi
1.	Nabire-Waghete-Enarotali	262	Papua
2.	Timika-Mapuraja-Pomako	42	Papua
3.	Serui-Menawi-Saubeba	49	Papua
4.	Jayapura-Wamena-Mulia	733	Papua
5.	Jayapura-Sarmi	364	Papua
6.	Jayapura-Hamidi-Holtekam-Skow-Perbatasan Papua Nugini	53	Papua
7.	Merauke-Waropko	557	Papua
8.	Sorong-Makbon Mega	88	Papua Barat
9.	Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari	606,17	Papua Barat
10.	Manokwari-Maruni-Bintuni	217,15	Papua Barat
11.	Fakfak-Hurimber-Bomberai	139,24	Papua Barat

Pembangunan Trans Papua dan Papua Barat memiliki medan yang berat. Selain, kondisi wilayah faktor cuaca, sulitnya material, pembebasan lahan juga menjadi kendala dalam pembangunan jalan ini. Pembangunan Jalur Trans Papua dan Papua Barat diharapkan dapat menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di wilayah Pulau Papua. Selain itu juga diharapkan mampu menurunkan angka kemalahan yang selama ini terjadi di Pulau Papua.

4.2.3.2. Pembangunan Pada Tanah Ulayat

Tanah ulayat ialah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat atau kewenangan masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu. Dengan kewenangan ini, masyarakat boleh mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat yang dimaksud ialah orang yang memiliki hubungan lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus. Pembangunan di Papua terkadang terkendala karena pembangunan dilakukan pada tanah ulayat. Beberapa kendala pembangunan terkait dengan kesulitan perolehan sertifikat milik dialami oleh ditemukan antara lain pada Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana (Apernas) dalam membangun perumahan sehat dan sederhana di Papua (Kabarpapua.co/23 Maret 2016). Dalam kasus tersebut terjadi pemalangan yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan berdalih pengembang belum melunasi pemayaran tanah (Kabarpapua.co/23 Maret 2016).

4.2.4. Isu Strategis Wilayah Papua Barat

4.2.4.1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu masalah pokok pembangunan di Provinsi Papua Barat. Di bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi Papua Barat masih relatif tinggi. Berdasarkan data BPS di tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat ada sebanyak 228.380 jiwa sedangkan tingkat ketimpangan termasuk dalam kategori sedang; pada tahun 2016 angka rasio gini adalah 0,373. Kemiskinan dan ketimpangan yang yang semakin dalam, semakin parah dan semakin meluas akan mengancam sistem sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, percepatan penanggulangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan harus menjadi agenda kebijakan strategis bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat dan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup wilayah Pemerintah Provinsi Papua Barat. Di satu sisi, orientasi kebijakan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat harus difokuskan pada upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan. Kebijakan tersebut meliputi:

1. Kebijakan Otonomi Khusus;
2. Pengembangan perumahan layak huni;
3. Pembangunan wilayah tertinggal;
4. Pembangunan Ssktor kemaritiman Papua Barat;
5. Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
6. Program afirmasi pendidikan;
7. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Papua Barat;
8. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
9. Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;
10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
11. Pembangunan Jalan Trans Papua dan Papua Barat;
12. Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan permukiman;
13. Pembangunan pada tanah ulayat
14. Pengembangan wilayah dan kewilayahan (pemekaran wilayah);
15. Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi;
16. Penyepakatan tapal batas antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat;
17. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar Papua Barat;
18. Pengendalian pemanfaatan ruang Papua Barat;
19. Pembangunan kawasan perbatasan;

Di sisi yang lain, upaya koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan harus dioptimalkan. Hal ini sedemikian karena telah dipahami bahwa permasalahan utama yang menyebabkan kurang efektifnya upaya penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Pendekatan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan cenderung seragam dan menyederhanakan permasalahan dan karakteristik kemiskinan.
2. Rendahnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kemiskinan.
3. Minimnya koordinasi antar para pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat miskin secara aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
4. Penanggulangan kemiskinan masih dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah. Dalam beberapa kasus, pandangan seperti itu menyebabkan masyarakat menjadi tergantung dan sulit keluar dari kemiskinan.
5. Penanggulangan kemiskinan sesungguhnya merupakan persoalan lintas bidang pembangunan, namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah ditengarai masih bersifat sektoral dan belum komprehensif.

Berdasarkan kondisi seperti itu, maka peningkatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), baik yang ada di provinsi maupun di kabupaten/kota harus semakin lebih dioptimalkan. TKPKD Provinsi Papua Barat harus meningkatkan perannya dalam sinergisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di provinsi serta memfasilitasi peningkatan peran sinergisasi TKPKD kabupaten/kota lingkup Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, Provinsi Papua Barat harus menargetkan peningkatan Indeks Kinerja TKPKD Provinsi Papua Barat serta Indeks Kinerja TKPKD kabupaten/kota lingkup Provinsi Papua Barat.

4.2.4.2. Pengembangan Wilayah dan Kewilayahan (Pemekaran wilayah)

Sebagai muda, Provinsi Papua Barat diresmikan pada tahun 2007 berdasarkan pada PP Nomor 24 tahun 2007, sebagai pemekaran dari Provinsi Papua dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan kewilayahan. Salah satu tantangan tersebut adalah aspirasi pemekaran wilayah, dalam bentuk kabupaten/kota, di Provinsi Papua Barat kembali muncul di permukaan. Aspirasi tersebut merupakan perkembangan lanjutan atas pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dipandang sebagai cara yang paling cepat untuk mengatasi ketimpangan wilayah. Namun demikian, harus disadari pula bahwa pemekaran wilayah tidak serta merta menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan ekonomi yang kuat demi kesejahteraan. Banyak pengalaman menunjukkan, daerah-daerah yang baru dibentuk justru terjebak dalam berbagai persoalan konflik yang

membutuhkan penyelesaian secara jernih, dan kecenderungan pemekaran hanya untuk memenuhi kebutuhan sejumlah elit politik. Untuk itu, agenda pengembangan daerah melalui jalur pemekaran harus disikapi secara rasional dan hati-hati.

Beberapa faktor penyebab pemekaran wilayah terkait dengan wilayah administrasi yang sangat luas sehingga mempengaruhi perkembangan wilayah. ini juga tidak terlepas dari adanya otonomi khusus bagi Papua sehingga pembentukan DOB menjadi salah satu hal yang perlu untuk direalisasikan. Namun demikian pemekaran ini tidak boleh disalahgunakan dengan didasarkan pada kesukuan atau sejenisnya. Pemekaran wilayah ini tidak bisa dilakukan secara cepat karena memerlukan proses untuk dapat menjadi provinsi mandiri. Wilayah yang dimekarkan harus siap untuk mengelola adinistrasi wilayahnya, mengelola potensi alam, potensi sumberdaya manusia, maupun sumber daya lainnya. Daerah otonomi baru ini harus mampu menjadikan wilayahnya lebih berkembang dari sebelumnya dengan asusmsi pengelolaan yang lebih dekat dan mampu mandiri secara ekonomi. Pembentukan Daerah Otonom Baru memang bisa menjadi alternatif untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Namun demikian, hal mendesak yang dibutuhkan adalah grand disain pengembangan wilayah, yang nantinya menjadi panduan bagi pengelolaan aspirasi pembentukan DOB. Momentum moratorium pemekaran daerah, justru harus menjadi peluang pemerintah provinsi untuk merumuskan cetak biru kebijakan pembangunan kewilayahan, sehingga ke depan pemekaran bukan hanya sebagai respon atas hasrat politik para elit, namun juga sebagai instrumen untuk memastikan fungsi-fungsi pemerintahan dan implementasi otonomi khusus memberikan kemanfaatan paling besar bagi masyarakat di Papua Barat.

4.2.4.3. Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi

Provinsi Papua Barat dicanangkan sebagai provinsi konservasi pada 19 Oktober 2015. Pencanangan ini diharapkan Provinsi Papua Barat mampu mengelola dan melindungi sumberdaya alam secara berkelanjutan dan mampu menjadi modal dasar pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Provinsi ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan hutan yang luas, wilayah laut yang luas dan spesies yang beragam. Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) menjadi pusat keanekaragaman laut. Wilayah laut terletak pada jantung segitiga karang dan memiliki keanekaragaman karang tertinggi di

dunia. Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Konservasi diharapkan dapat dilaksanakan mulai tahun 2017. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat menyelamatkan ekosistem hutan dan perairan di wilayah Papua Barat.

Sebelum dicanangkan sebagai provinsi konservasi, masyarakat Papua Barat memiliki kearifan lokal dalam menjaga lingkungannya. Kehidupan sehari-hari mereka sangat dekat dengan alam. Mereka memiliki adat "sasi" yaitu larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu dan sasi ini dianggap sebagai bentuk pelestarian alam untuk menjaga populasi dan keberadaan sumber daya alam.

Untuk menjalankan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi, pada tahun 2017 akan disusun Rancangan Peraturan Daerah Khusus (RAPERDASUS) sebagai dasar dalam melaksanakan provinsi konservasi. Pencanangan Provinsi Konservasi akan mempangaruhi berbagai sektor yang ada didalamnya. Kegiatan industri harus dilaksanakan dengan tidak merusak ataupun mencemari alam, kegiatan pertambangan juga dilakukan dengan tidak berlebihan, kegiatan kehutanan harus dilakukan seimbang antara penebangan dan penanaman, kegiatan pariwisata harus tetap menjaga ekosistem yang ada, kegiatan penangkapan ikan tidak boleh merusak ekosistem laut. Hal ini dimasudkan untuk menjaga keseimbangan alam sehingga tidak merusak alam dan tetap menjaga ekosistem yang ada didalamnya.

Provinsi konservasi tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kelestarian alam tetapi juga untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam dan kebudayaan setempat. Oleh karena itu pencanangan sebagai Provinsi Konservasi ini diharapkan mampu menjaga kelestarian alam, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan menjaga kebudayaan daerah setempat. Dengan provinsi konservasi juga diharapkan agar setiap pembangunan yang dijalankan dapat arif terhadap lingkungan sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

4.2.4.4. Tapal Batas Antar Wilayah Papua Barat

Batas antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat hingga kini masih menjadi sengketa. Permasalahan perbatasan ini sangat terkait dengan upaya pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Sedangkan dari sisi pelayanan fasilitas wilayah maka akan sangat mempengaruhi akses perolehan

terhadap pelayanan publik masyarakat pada bidang pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan dan perekonomian wilayah. Pada bidang pendidikan akan sangat mempengaruhi dimana masyarakat harus memperoleh fasilitas pendidikan. Dari sisi kesehatan dimana masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan baik itu akses terhadap puskesmas, posyandu, maupun rumah sakit. Sedangkan dari sisi administrasi pemerintahan terkait dengan kemudahan masyarakat dalam mengurus administrasi pemerintahan dan dari segi perekonomian terkait dengan akses masyarakat terhadap pasar dan aliran barang. Apabila Provinsi Papua Barat sudah memiliki batas wilayah yang jelas maka dapat menghidari konflik antar wilayah dalam bidang pengelolaan sumber daya alam maupun penyediaan fasilitas publik bagi masyarakat.

Permasalahan sengketa tapal batas tidak hanya terjadi antar wilayah kabupaten/kota tetapi juga dengan provinsi tetangga yaitu dengan permasalahan perbatasan dengan Provinsi Papua dan Provinsi Maluku Utara. Dalam penyelesaian permasalahan ini wilayah-wilayah yang bersengketa harus berunding bersama untuk memecahkan permasalahan batas wilayah ini. Namun, perlu ada pihak ketiga yang menengahi permasalahan ini. Kementerian Dalam Negeri perlu ada untuk memfasilitasi permasalahan ini sehingga permasalahan sengketa batas wilayah dapat segera diselesaikan. Oleh karena itu, kedepan penyusunan peta Wilayah Provinsi Papua Barat dengan persetujuan berbagai wilayah yang bersengketa perlu segera disusun sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

4.2.4.5. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Papua Barat

Dua kota di Provinsi Papua Barat yang menjadi sasaran program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) antara lain Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari dengan luas wilayah kumuh yang ditangani seluas 151,78 Ha (www.radarsorong.com). Pengentasan kawasan kumuh ini untuk mendukung program 0% kawasan kumuh tahun 2019 seiring dengan adanya kebijakan penanganan kawasan kumuh Nasional. Pengentasan kawasan kumuh ini juga untuk meningkatkan kualitas permukiman khususnya diwilayah perkotaan. Pelaksakaan pengentasan kawasan kumuh ini akan diatur melalu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Wiayah Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari.

4.2.4.6. Pengembangan Perumahan Layak Huni

Masih banyak rumah yang belum layak huni di Provinsi Papua Barat. Kebutuhan akan rumah yang layak huni di Provinsi Papua Barat cukup tinggi. Pemerintah mulai mencanangkan pembangunan rumah layak huni serta pembangunan rumah khusus pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

4.2.4.7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Papua Barat

Pembangunan infrastruktur dasar dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah. Beberapa wilayah masih belum terjangkan energi listrik, penyediaan air bersih perlu dilakukan di seluruh wilayah, sarana telekomunikasi yang masih terbatas, serta infrastruktur sosial ekonomi di beberapa wilayah masih belum tersedia. Pembangunan infrastruktur dasar ini menjadi prioritas yang harus segera dilaksanakan agar dapat mendorong peningkatan pembangunan wilayah.

4.2.4.8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Papua Barat

Setiap pembangunan harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disusun. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan permasalahan ruang wilayah. Kondisi ini juga untuk menjaga keberadaan kawasan lindung sehingga tidak mengalami kerusakan yang berpotensi menimbulkan bencana. Optimalisasi pemanfaatan ruang harus dilakukan pada kawasan-kawasan yang sudah ditentukan sesuai dengan peruntukannya. Alih fungsi lahan pada kawasan lindung harus dihindari.

4.2.4.9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas hidup sangat terkait dengan kesejahteraan manusia. Di Provinsi Papua Barat penilaian Indeks Kualitas Hidup masih menjadi kendala untuk dilaksanakan. Keterbatasan dana dan SDM masih menjadi kendala dalam upaya untuk penilaian Indeks Kualitas Hidup. Untuk melihat tingkat pencemaran air dan udara maka perlu dilakukan pemantauan secara berkala apakah terjadi pencemaran pada wilayah sungai dan udara. Wilayah sungai akan berpotensi tercemar apabila sungai berlokasi dekat dengan wilayah tambang. Terkait dengan kualitas udara pada setiap wilayah Kabupaten dan Kota harus memiliki Ruang Terbuka Hijau sehingga kualitas udara tetap terjaga. Permasalahan

persampahan belum menjadi permasalahan yang serius. Meskipun demikian permsalahan sampah harus dikelola dengan baik. Keberadaan sampah rumah tangga hingga keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Akhir.

4.2.4.10. Pengelolaan Hutan

Terkait dengan UU No. 23 tahun 2014, maka pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan produksi namun hanya diberikan kewenangan untuk mengawasi. Dengan demikian kewenangan provinsi menjadi lebih sempit. Provinsi Papua Barat memiliki 76 Polisi Hutan dan mereka hanya bertugas untuk mengawasi hutan. Apabila melihat pada UU 41 tahun 2009, pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan hutan, namun setelah diterbitkan UU No 23 tahun 2014, maka provinsi tidak diberikan kewenangan untuk mengelola hutan.

Di samping itu, dengan keberadaan hutan yang cukup luas tersebut menimbulkan permasalahan lain terkait dengan data dan informasi potensi dan kerusakan hutan. Pemerintah Provinsi Papua Barat kesulitan dalam melakukan identifikasi potensi dan kondisi kehutanan eksisting. Hal ini tidak terlepas dari dana dan keberadaan tenaga untuk melakukan identifikasi tersebut. Anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan identifikasi dan kondisi hutan cukup besar. Setiap lima tahun sekali updating terhadap data ini harus dilakukan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat belum memiliki citra satelit wilayah yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi hutan. Keberadaan citra satelit juga dapat membantu untuk melakukan kajian wilayah secara temporal sehingga dapat mengetahui perubahan yang terjadi.

4.2.4.11. Pembangunan Sektor Maritim Papua Barat

Papua Barat memiliki potensi sektor kemaritiman sebagai tempat menaruh harapan karena laut menyimpan potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi tersebut adalah potensi tiga dimensi wilayah laut (permukaan, tengah dan bawah laut), geografis, politik dan ekonomi (geoekopol). Sektor ekonomi kelautan Papua Barat meliputi industri perikanan tangkap dan budidaya; industri pascapanen dan pengolahan hasil perikanan; industri bioteknologi; mineral dan energi; industri pariwisata; trasportasi laut dan jasa kelautan; serta pengelolaan pulau-pulau kecil.

Menurut Laporan Bappenas (2015) sasaran pengembangan ekonomi maritim dan kelautan Papua Barat diantaranya adalah termanfaatkannya sumber daya kelautan, tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, terwujudnya tol laut dan upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut dan konektivitas laut. Percepatan pengembangan sektor kemaritiman karenanya harus menjadi prioritas pengembangan perekonomian Papua Barat.

Untuk pengembangan industri perikanan, Papua bersama Maluku secara umum adalah lumbung ikan nasional. Pengembangan industri perikanan tangkap (laut) saat ini di lakukan di 9 sentra pelabuhan perikanan yang memanfaatkan sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 dan 717. Pada wilayah pengelolaan tersebut diestimasi potensi sumberdaya ikan yang dapat dieksploitasi mencapai 1.235.400 ton per tahun (12,4% stok ikan nasional). Produksi perikanan tangkap, yang merupakan sumber utama produksi ikan Papua Barat saat ini baru mencapai 136,4 ribu ton (2015), yang menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar bagi pengembagan industri perikanan tangkap, jika melihat stok ikan yang ada. Jika Papua Barat menargetkan untuk mampu memanfaatkan 20% dari potensi sumberdaya di WPP saat ini maka potensi produksi diperkirakan dapat mencapai 246 ribu ton per tahun dan dapat meningkat posisi perikanan Papua Barat sebagai 10 besar produsen ikan di Indonesia (menguatkan posisi Indonesia yang saat ini sebagai produsen ikan terbesar kedua di dunia). Pengembangan sektor perikanan ini selain penting dari aspek sosial ekonomi, juga untuk menegakkan kedaulatan negara mengingat maraknya perikanan ilegal di sekitar perairan Papua atau Samudra Pasifik secara umum. Namun demikian, terdapat tantangan pengembangan perikanan Papua Barat diantaranya usaha perikanan (tangkap maupun budidaya) yang masih belum terpadu dalam system minabisnis, mayoritas skala mikro dan kecil, terbatasnya infrastruktur seperti pelabuhan perikanan sebagai sentra perikanan terpadu. Karena itu perlu strategi pembangunan ekonomi kemaritiman yang adaptif lokasi dan sosial budaya melalui penguatan infrastruktur kelautan (pelabuhan, kapal, alat tangkap), permodalan, upaya peningkatan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan industry pascapanen dan pengolahan hasil perikanan.

Kegiatan ekonomi kemaritiman yang lain yang penting dan perlu terus dikembangkan adalah indusri transportasi laut dan jasa kelautan. Berdasarkan data Papua Barat Dalam Angka Tahun 2017, pelabuhan utama di Papua Barat antara lain di Fakfak, Manokwari, Kaimana dan Kota Sorong. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan dalam negeri (domestik) mencapai 7850 kapal atau setara 22.668.949 GRT, sementara kunjungan luar negeri ke Papua Barat, terutama melalui Manokwari dan Kota Sorong mencapai 34 unit kapal atau setara dengan 139.216 GRT. Jumlah ini mengalami peningkatan dbandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.607 unit atau setara 13.837.892 GRT. Beberapa pelabuhan telah mulai tercatat aktivitasnya seperti di Raja Ampat yang tercatat memiliki kunjungan domestik mencapai 1290 unit kapal atau setara 439.310 GRT. Perkembangan sektor transportasi laut menjadi kunci pengembangan ekonomi maritim karena sebagai wilayah kepulauan trasnportasi laut akan memperkuat konektivitas antar wilayah beserta pengembangan perekonomiannya.

Daya tarik ekonomi kelautan lainnya adalah industri jasa kelautan dan pariwisata. Papua Barat telah menetapkan diri sebagai provinsi konservasi karena itu kegiatan ekonomi berbasis jasa dapat menjadi penggerak perekonomian kepulauan, apalagi Papua Barat adalah salah satu wilayah segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*). Sejalan dengan itu pariwisata bahari dapat menjadi andalan ekonomi kelautan Papua. Berdasarkan data Papua dalam Angka Tahun 2016 dan 2017, lama tamu menginap di Hotel Bintang dan Hotel Melati cukup berfluktuasi dalam kurung waktu 7 tahun terakhir, yaitu dari 1,87 sampai 9,75 hari. Tingkat hunian hotel pada tahun 2015, yaitu sekitar 31,03 untuk hotel non-berbintang dan 39,91 untuk hotel berbintang. Karena itu pengembangan industry pariwisata yang saat ini berbasis pariwisata bahari perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan system informasi, layanan, dan pengelolaannya.

4.2.4.12. Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

Papua Barat, Kabupaten Sorong memiliki keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus. Tiga dimensi potensi sumberdaya kelautan (permukaan laut, dalam laut dan dasar laut) tidak hanya menyediakan sumberdaya untuk dimanfaatkan tetapi juga menjamin terbangunnya konektivitas wilayah (darat, laut, sungai) secara baik di Pulau Papua. Penetapan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong menunjukkan kemauan kuat secara bersama antara pemerintah daerah dan pusat untuk membangun sentra ekonomi baru di timur Indonesia. Lokasi tersebut selain memiliki sumberdaya laut yang sangat potensial untuk pengembangan industri kelautan dan perikanan, juga sangat strategis untuk pengembangan industri logistik, industri pengolahan ekspor, dan industri yang berbasis pariwisata bahari, pertanian serta pertambangan. Keunggulan geostrategis dari wilayah Kabupaten Sorong yaitu berada pada jalur lintasan perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sorong serta dunia usaha dan masyarakat. Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah terebut kehadiran KEK Sorong ini ditujukan dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, dan Kabupaten Sorong, tepatnya di sekitar Selat Sele dipilih karena memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis.

Sesuai dengan RPJMN 2015–2019 KEK Sorong menjadi bagian dari 7 KEK di luar Jawa. Kawasan Ekonomi Khusus Sorong memiliki luas 523,7 ha, yang terletak datam wilayah Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Sektor unggulan KEK Sorong meliputi Industri Penunjang Logistik, Pariwisata, dan Industri pengolahan Perikanan (tangkap dan budidaya). Sesuai dengan Pasal 4 PP 31/2016 terdapat 3 zona dan industri dalam Kawasan, yaitu: (1) logistik, (2) zona industri, dan (3) zona pengolahan ekspor. Karena itu, KEK Sorong memiliki bidang Lintas Sektor antara lain: (1) Kelautan & Perikanan; (2) Agroindustri, (3) Pariwisata, (4) Transportasi & Perhubungan, dan (4) Industri Manufaktur. Untuk menguatkan dan mempercepat perwujudan dan pengembangan KEK Sorong maka perlu dipastikan 3 isu penting: (1) Kesiapan Lahan; (2) Kesiapan Investor atau pelaku usaha; (3) Dukungan Pemda dan masyarakat.

4.2.4.13. Kawasan Industri (KI) Petrokimia Teluk Bintuni

Pemerintah pusat dalam RPJMN 2015-2019 telah menetapkan Kawasan Industri Petrokimia di Kabupaten Teluk Bintuni. Fokus pengembangan KEK di Papua Barat adalah pada industri petrokimia, pengembangan industri pengolahan tambang mineral, serta

kawasan industri Teluk Bintuni. Pengembangan kegiatan ekonomi kawasan strategis Provinsi Papua Barat fokus pada pengembangan komoditas unggulan wilayah sebagai berikut: (1) Pengembangan kawasan industri petrokimia; (2) dan Pengembangan Industri berbasis migas dan pupuk di Teluk Bintuni. Kawasan Industri (KI) bertujuan untuk mengendalikan tata ruang, meningkatkan upaya industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri, meningkatkan daya saing investasi, serta memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait. KI di Papua Barat terletak di Desa Onar Baru Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni. Luas lahan KI sekitar 2122 hektar, dengan basis industri pada pupuk dan petrokimia. Pembangunan industri petrokimia di Kabupaten Teluk Bintuni didasarkan pada potensi yang dimilikinya, yaitu potensi gas bumi di Teluk Bintuni yang sudah diidentifikasi sebesar 23,8 TSCF, sekitar 12,9 TSCF sudah dialokasikan untuk 2 kilang LNG, dan sisanya sebesar 10,9 TSCF untuk 1 train LNG. Selain itu, ditemukan juga cadangan baru sebesar 6-8 TSCF (Bappenas, 2015).

4.2.4.14. Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan"

Mendasarkan pada dokumen Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pada Buku III (Agenda Pembangunan Wilayah) telah diuraikan secara rinci tema pembangunan nasional berdasar wilayah. Dengan mempertimbangkan pada potensi dan keunggulan Wilayah Papua, telah dirumuskan beberapa tema besar pembangunan Wilayah Papua, salah satu tema utama adalah "Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/sub-sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan.

Tabel 4.3 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkata Pengangguran di Provinsi Papua Barat Dalam RPJMN 2015-2019 (%)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan Ekonomi	7.9	10.3	14.7	16.4	16.6
Tingkat Kemiskinan	25.6	23.5	21.4	19.4	17.4

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Pengangguran	5.1	4.8	3.1	3.0	2.8

Sumber: RPJMN 2015-2019

Sasaran pertumbuhan ekonomi wilayah Papua menurut perhitungan Bappenas (2014) dipredikasi akan mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat memberikan dorongan pada pertumbuhan sektor primer dan industri yang berbasis pada sektor primer unggulan yaitu sektor agro.

Berdasarkan data Potensi Pertanian di Provinsi Papua Barat yang merupakan hasil analisis Sensus Pertanian Papua Barat 2013 (BPS Papua Barat, 2014) dilaporkan sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki posisi dan peran yang sangat strategis bagi perekonomian wilayah karena mampu menyerap tenaga kerja sebesar 48,71% (proporsi angakatan kerja yang tertinggi) dan mampu memberikan sumbangan pada PDRB sebesar 11,65%. Jika dilakukan analisis PDRB tanpa migas, maka kontribusi sektor agro pada PDRB sebesar 26,31%.

Sektor pertanian juga dipandang memiliki kontribusi yang besar untuk mengatasi problem kemiskinan di wilayah Propinsi Papua Barat. Jika sektor agro dapat dikelola dengan baik dengan dukungan perbaikan dan penambahan infratsruktur fisik dan ekonomi, peningkatan kapasitas SDM dan dukungan kelembagaan serta kebijakan yang suportif maka produktivitas dan nilai tambah sektor agro dapat meningkat sehingga akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha baik sektor primer maupun industri olahannya serta jasa-jasa terkait. Peningkatan pendapatan pelaku usaha sektor-sektor terkait dapat dipastikan akan berdampak pada pengurangan status kemiskinan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis Bappenas (2014), angka kemiskinan di Papua Barat masih cukup tinggi dan diprediksi akan menururun secara signifikan. Kontribusi sektor agro menjadi sangat penting pada pembangunan ekonomi terutama terkait dengan strategi penguranagan kemiskinan karena sektor agro menampung sebagian besar angakatan kerja dan berlokasi di pedesaan yang identik dengan kantung kemiskinan.

Selain menghadapi problem kemiskinan, problem penting yang dihadapi masyarakat Papua Barat adalah problem masih cukup tingginya angka pengangguran. Berdasarkan hasil analisis Bappenas (2014), angka pengangguran di Papua Barat masih cukup tinggi dan

diprediksi akan menurun secara signifikan. Kontribusi sektor agro menjadi sangat penting pada pembangunan ekonomi terutama terkait dengan strategi mengatasi angka pengangguran karena sektor agro dapat menampung angakatan kerja yang berlokasi di pedesaan. Pengembangan industri berbasis agro hulu-hilir juga sangat potensial untuk menampung lebih banyak tenaga kerja di pinggiran kota dan perkotaan.

Terkait dengan prioritas pembangunan sektor agro, Buku 3 RPJMN juga mendokumentasikan strategi pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis di Provinsi Papua Barat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- Peningkatan produktivitas ekspor untuk produk pertanian/ perkebunan, dan hasil laut;
- Pengembangan kawasan pertanian di Karas dan Teluk Arguni;
- Pengembangan sentra ternak sapi Pola Ranch di Bomberai, Kebar, dan Salawati;
- Pengembangan Pala di Fakfak;
- Pengembangan sagu rakyat dan investasi industri komoditas sagu di Sorong Selatan;

Tabel 4.4 Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota untuk Memperkuat Pusat Pertumbuhan di Provinsi Papua Barat

Kode	Lokasi Prioritas	Kelompok Kawasan	Komoditas Unggulan
D1	Misool dan Sekitarnya (Kabupaten Raja Ampat)	**Perkotaan** Misool **Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya**: Samate, Pulau Rembombo, Pulau Yefman, Pulau Matan, Pulau Senapan **Kawasan Pariwisata**: KSPN Raja Ampat **Kota Otonom Terdekat**: Sorong	➢ Ikan kerapu ➢ Rumput laut ➢ Wisata taman nasional laut ➢ Wisata bahari
D2	Manokwari dan sekitarnya (Kabupaten Manokwari	**PKW Manokwari** **Kawasan Agropolitan Padi:** Prafi, Masui, Sidey	➢ Padi ➢ Kakao

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat secara terstruktur perlu didukung dengan pemihakan regulasi dan anggaran bagi keberlanjutan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat. Kebijakan percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat yang terkait dengan sektor agro diwijudkan dalam tiga program utama yaitu:

- Peningkatan ekonomi lokal;
- Peningkatan infrastruktur dasar;
- Pemihakan terhadap Masyarakat Asil Papua.

Selain tiga program utama yang terkait dengan tema pembangunan agro, juga perlu didukung dengan dua program penunjang yang terkait yaitu:

- Penguatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan;
- Pengembangan kapasitas kelembagaan.

Kebijakan pembangunan nasional berbasis kewilayahan di Provinsi Papua barat yang salah satu tema utamanya membangun industri bernilai tambah ekonomi dengan berbasis sektor agro/pertanian juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Papua Barat. Misi ke-6 Gubernur Papua Barat adalah "Membangun Pertanian yang Mendiri dan Berdaulat" dengan tiga kebijakan dasar yaitu: (1) memperkuat pertanian berbasis komoditas lokal unggulan, (2) membangun pertanian sebagai penggerak perekonomian rakyat dengan pola hulu-hilir yang berfungsi sebagai penyedia kesempatan kerja dan sebagai sumber penghidupan yang layak bagi petani lokal serta (3) peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan melalui pengembangan komoditas pangan lokal (utamanya sagu dan umbi-umbian).

Tema utama pembangunan wilayah Papua barat dengan salah satu prioritas pada pengembangan sektor agro (pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan) dari berbagai aspek dari hulu ke hilir sangat strategis baik dalam konteks lokal, nasional dan global. Tema utama pembangunan global dan nasional yang memberi prioritas pada pencapaian ketahanan pangan (*food security*) telah direspon dengan sangat positif oleh Propinsi Papua barat. Dengan dukungan karakteristik yang sangat kondusif untuk pembangunan sektor agro dan juga kelimpahan kepemilikan sumberdaya hayati terkait agro memberikan peluang yang sangat besar bagi Provinsi Papua Barat untuk dapat mewujudkan pembangunan sektor agro yang kopetitif dan berdaya saing.

Pengembangan potensi unggulan bahan baku lokal baik yang merupakan komoditas pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan dapat mendukung pencapaian diversifikasi pangan. Strategi pembangunan agro yang diprioritaskan pada perbaikan dan penambahan infratstruktur fisik dan ekonomi, peningkatan kapasitas SDM dan dukungan kelembagaan serta kebijakan yang suportif maka produktivitas dan nilai tambah sektor agro dapat meningkat sehingga akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha baik sektor primer maupun industri olahannya serta jasa-jasa terkait. Selain itu, pengembangan sektor agro di Provinsi Papua Barat sangat berpotensi untuk menciptakan surplus produk agro

yang menjadi sumber ekspor ke luar provinsi bahkan dapat menjadi komoditas ekspor ke luar negeri pada masa-masa mendatang.

4.2.4.15. Program Afirmasi Pendidikan

UUD 1945 mengamanatkan, tiap warga negara wajib mengenyam pendidikan dasar dan negara wajib mengelolanya. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah bersama masyarakat berusaha mengimplementasikan segala bentuk kebijakan pendidikan untuk memenuhi amanat tersebut. Salah satu kebijakan tersebut adalah program afirmasi pendidikan bagi anak-anak Papua Barat.

Program afirmasi pendidikan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya daerah di wilayah Papua Barat yang pendidikannya memerlukan batuan baik moral maupun material dari sekolah yang lebih baik kualitasnya. Tujuannya, memberikan kesempatan kepada anak-anak Papua Barat untuk lebih mengoptimalkan kemampuannya dan menumbuhkembangkan potensi-potensi yang dimiliki untuk bersaing dengan anak bangsa di luar Papua Barat. Melalui program Afirmasi Pendidikan inilah, anak-anak Papua Barat yang memiliki kemauan dan kemampuan serta berprestasi berkesempatan untuk bersekolah di daerah luar Papua Barat atau sekolah tunjukan program Afirmasi Pendidikan.

Dalam pelaksanaan program ini, ditemukan beberapa kendala atau masalah yang dihadapi selama menempuh pendidikan di luar Papua Barat atau di sekolah tunjukan program Afirmasi Pendidikan. Kendala tersebut, khususnya bagi Program Afirmasi Pendidikan Menengah antara lain:

1. Penggunaan bahasa yang berpengaruh pada komunikasi.
2. Perbedaan cara belajar.
3. Kemampuan dalam menangkap, memahami hingga meginterpretasi pelajaran
4. Bantuan pendampingan dan pengawasan dalam penyesuaian lingkungan berkaitan dengan interaksi sosial.
5. Keterbataan pembiayaan untuk les atau privat untuk pelajaran tertentu yang dirasa sulit.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh siswa Program Afirmasi Pendidikan tersebut adalah bagaimana mereka mampu mengatasi kendala komunikasi dan interaksi dengan

lingkungan baru, yang menyebabkan mereka merasa dalam situasi terisolasi dan diskoneksi yang tentunya berpengaruh pada hasil belajar mereka.

Dari berbagai isu strategis baik pada tataran internasional, nasional, wilayah Pulau Papua, dan wilayah Papua Barat yang disebutkan pada bagian sebelumnya, berikut adalah uraian singkat mengenai poin penting dalam isu-isu strategis tersebut:

Tabel 4.5 Pokok Penting Isu Strategis Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022Tingkatan IsuIsu StrategisPokok Penting Isu

Tingkatan Isu	Isu Strategis	Pokok Penting Isu
Isu Strategis Internasional	Pembangunan berkelanjutan SDGs (*sustainable development goals*)	Penghapusan kemiskinan;
		Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan;
		Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang;
		Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
		Pencapaian kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
		Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua;
		Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
		Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaanyang layak bagi semua;
		Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi;
		Mengurangi ketimpangan;
		Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
		Memastikan pola konsumsi dan produksi yang keberlanjutan;
		Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya;
		Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan;
		Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
		Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
		Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan;
Isu Kebijakan Nasional	Kebijakan Otonomi Khusus	Belum tersusunnya Perdasus dan Perdasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat;
		Pengelolaan alokasi dana otonomi khusus belum optimal;
		Pemberian dana otonomi khusus belum memberikan kemajuan yang signifikan bagi pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan diProvinsi Papua Barat;
	Pembangunan Wilayah Tertinggal	Terdapat 7 wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat yang akan ditangani oleh Pemerintah Pusat sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan wilayah antara lain Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, Raja Ampat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondoma.
	Pengembangan Kawasan Perbatasan	Terdapat wilayah yang sudah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas (LOKPRI) penanganan kawasan perbatasan 2015-2019. Wilayah tersebut adalah wilayah Kabupaten Raja Ampat.
Isu Pembangunan Wilayah Papua	Pembangunan Jalan Trans Papua dan Papua Barat	Terdapat pembangunan ruas jalan trans Papua Barat seperti pada ruas jalan Sorong-Mabun Mega sepanjang 88 km, ruas Sorong-Klamono, Ayamaru-Kebar-Manokwari sepanjang 606,17 km, ruas Manokwari-Maruni-Bintuni sepanjang 217,15 km, dan ruas Fakfak-Hurimber-Bomberai sepanjang 139,24 km
	Pembangunan Pada Tanah Ulayat	Pembangunan di Pulau Papua terkadang terkendala karena pembangunan dilakukan pada tanah ulayat.
Isu Strategis Wilayah Papua Barat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu masalah pokok pembangunan di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan data BPS di tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat ada sebanyak 228.380 jiwa sedangkan tingkat ketimpangan termasuk dalam kategori sedang;
		Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat tertinggi kedua setelah Provinsi Papua dengan persentase sebesar 25,43%;
		Penduduk miskin di Provinsi Papua Barat cenderung terpusat pada wilayah perkampungan atau pedalaman yang belum mendapatkan sentuhan pembangunan;
		Beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi seperti Kabupaten Pegunungan Arfak,Tambrauw, dan Teluk Wondama;
	Pengembangan Wilayah dan Kewilayahan (Pemekaran Wilayah)	Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu membuat grand desain pengembangan wilayah dan pembangunan keiwilayahan;
		Daerah otonomi baru harus mampu menjadikan wilayahnya lebih berkembang dari sebelumnya dengan asusmsi pengelolaan yang lebih dekat dan mampu mandiri secara ekonomi.

Tingkatan Isu	Isu Strategis	Pokok Penting Isu
Isu Strategis Wilayah Papua Barat	Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi	Provinsi Papua Barat memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan hutan yang luas, wilayah laut yang luas dan spesiesyang beragam. Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) menjadi pusat keanekaragaman laut. Wilayah laut terletak pada jantung segitiga karang dan memiliki keanekaragaman karang tertinggi di dunia;
		Pencanangan sebagai Provinsi Konservasi ini diharapkan mampu menjaga kelestarian alam, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan menjaga kebudayaan daerah setempat. Dengan provinsi konservasi juga diharapkan agar setiap pembangunan yang dijalankan dapatarif terhadap lingkungan sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan.
	Tapal Batas Antar Wilayah Papua Barat	Batas antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat hingga kini masih menjadi sengketa;
		Permasalahan sengketa tapal batas tidak hanya terjadi antar wilayah kabupaten/kota tetapi juga dengan provinsi tetangga yaitudengan permasalahan perbatasan dengan Provinsi Papua dan Provinsi Maluku Utara.
	Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Papua Barat	Dua kota di Provinsi Papua Barat yang menjadi sasaran program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) antara lain Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari dengan luas wilayah kumuh yang ditangani seluas 151,78 Ha.
	Pengembangan Perumahan Layak Huni	Pemerintah mulai mencanangkan pembangunan rumah layak huni serta pembangunan rumah khusus pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Papua Barat	Pembangunan infrastruktur dasar dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah;
		Beberapa wilayah masih belum terjangkan energi listrik, penyediaan air bersih perlu dilakukan di seluruh wilayah, sarana telekomunikasi yang masih terbatas, serta infrastruktur sosial ekonomi di beberapa wilayah masih belum tersedia.
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Papua Barat	Optimalisasi pemanfaatan ruang harus dilakukan pada kawasan-kawasan yang sudah ditentukan sesuai dengan peruntukannya.
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Dengan dicanangkannya Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi, maka penilaian pengelolaan lingkungan hidup melalui indeks kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu indikator utama pencangan provinsi konservasi.
	Pengelolaan Hutan	Terkait dengan UU No. 23 tahun 2014, maka pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan produksi namun hanya diberikan kewenangan untuk mengawasi. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat memanfaatkan Undangundang Otonomi Khusus sebagai pijakan dalam pemanfaatan bagi hasil sektor kehutanan yang berpihak pada daerah.
	Pembangunan Sektor Maritim Papua Barat	Sasaran pengembangan ekonomi maritim dan kelautan Papua Barat diantaranya adalah termanfaatkannya sumber daya kelautan, tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, terwujudnya tol laut dan upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut dan konektivitas laut;
		Untuk pengembangan industri perikanan, Papua bersama Maluku secara umum adalah lumbung ikan nasional. Pengembangan industri perikanan tangkap (laut) saat ini di lakukan di 9 sentra pelabuhan perikanan yang memanfaatkan sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan(WPP) 715 dan 717;
		Daya tarik ekonomi kelautan lainnya adalah industri jasa kelautan dan pariwisata. Papua Barat telah menetapkan diri sebagai provinsi konservasi karena itu kegiatan ekonomi berbasis jasa dapat menjadi penggerak perekonomian kepulauan, apalagi Papua Barat adalah salah satu wilayahsegitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*). Sejalan dengan itu pariwisata bahari dapat menjadi andalan ekonomi kelautan Papua.
	Kawasan Ekonomi Khusus Sorong	Wilayah dalam KEK memiliki sumberdaya laut yang sangat potensial untuk pengembangan industri kelautan dan perikanan, juga sangat strategis untuk pengembangan industri logistik, industri pengolahan ekspor, dan industri yang berbasis pariwisata bahari, pertanian serta pertambangan.
		Sektor unggulan KEK Sorong meliputi Industri Penunjang Logistik, Pariwisata, dan Industri pengolahan Perikanan (tangkap dan budidaya).
	Kawasan Industri (KI) Petrokimia Teluk Bintuni	Pengembangan kegiatan ekonomi kawasan strategis Provinsi Papua Barat fokus pada pengembangan komoditas unggulan wilayah sebagai berikut: (1) Pengembangan kawasan industri petrokimia; (2) dan Pengembangan Industri berbasis migas dan pupuk di Teluk Bintuni.
	Percepatan pengembangan i	Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki posisi dan peran yang sangat strategis bagi perekonomian wilayah karena mampumenyerap tenaga kerja sebesar 48,71% (proporsi angakatan kerja yang tertinggi);

Tingkatan Isu	Isu Strategis	Pokok Penting Isu
	industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan	Sektor pertanian juga dipandang memiliki kontribusi yang besar untuk mengatasi problem kemiskinan di wilayah Propinsi Papua Barat;
		Memperkuat pertanian berbasis komoditas lokal unggulan; membangun pertanian sebagai penggerak perekonomian rakyat dengan pola hulu-hilir yang berfungsi sebagai penyedia kesempatan kerja dan sebagai sumber penghidupan yang layak bagi petani lokal; serta peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan melalui pengembangan komoditas pangan lokal (utamanya sagu dan umbi-umbian).
		Pengembabngan potensi unggulan bahan baku lokal baik yang merupakan komoditas pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan dapat mendukung pencapaian diversifikasi pangan.
	Program Afirmasi Pendidikan	Program afirmasi pendidikan memberikan kesempatan kepada anak-anak Papua Barat untuk lebih mengoptimalkan kemampuannya dan menumbuhkembangkan potensi-potensi yang dimiliki untuk bersaing dengan anak bangsa di luar Papua Barat.
		Terdapat beberapa kendala atau masalah yang dihadapi selama menempuh pendidikan di luar Papua Barat atau di sekolah tunjukan program Afirmasi Pendidikan.

Foto: Billy, 2017

Foto: Charles Paiki, 2017

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Papua Barat, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2017–2022 adalah:

Visi:

menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun

MENUJU PAPUA BARAT YANG AMAN, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT

Penjabaran makna dari Visi Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

AMAN : Mengarah pada kondisi sikap saling menghargai dan saling menghormati dalam perbedaan suku dan agama, guna menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang damai dan harmonis, sebagai prasyarat utama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

SEJAHTERA : Mengarah pada kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan melalui peningkatan perekonomian masyarakat yang berfokus pada pengembangan potensi unggulan lokal, dengan sasaran utama meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.

BERMARTABAT : Mengarah pada kondisi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang jujur dan bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta menegakkan supremasi hukum, dengan mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai luhur adat dan agama dalam tatanan kehidupan

bermasyarakat di Provinsi Papua Barat.

5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*) serta otonomi khusus yang efektif;
2. Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar;
5. Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata;
6. Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat;
7. Memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial;
8. Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah.

Keterkaitan antara visi dan misi pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 Keterkaitan Visi dan Misi Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022

Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera, dan	Provinsi Papua Barat yang Bermartabat	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (*good and clean*

Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
Bermartabat		*governance*) serta otonomi khusus yang efektif
	Provinsi Papua Barat yang Sejahtera	Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan
		Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan
		Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar
		Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata
		Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat
		Memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial
	Provinsi Papua Barat yang Aman	Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah

Dari Tabel 5.1 tentang keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, selanjutnya hal tersebut dituangkan dalam kerangka pemikiran (*logical framework*) sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

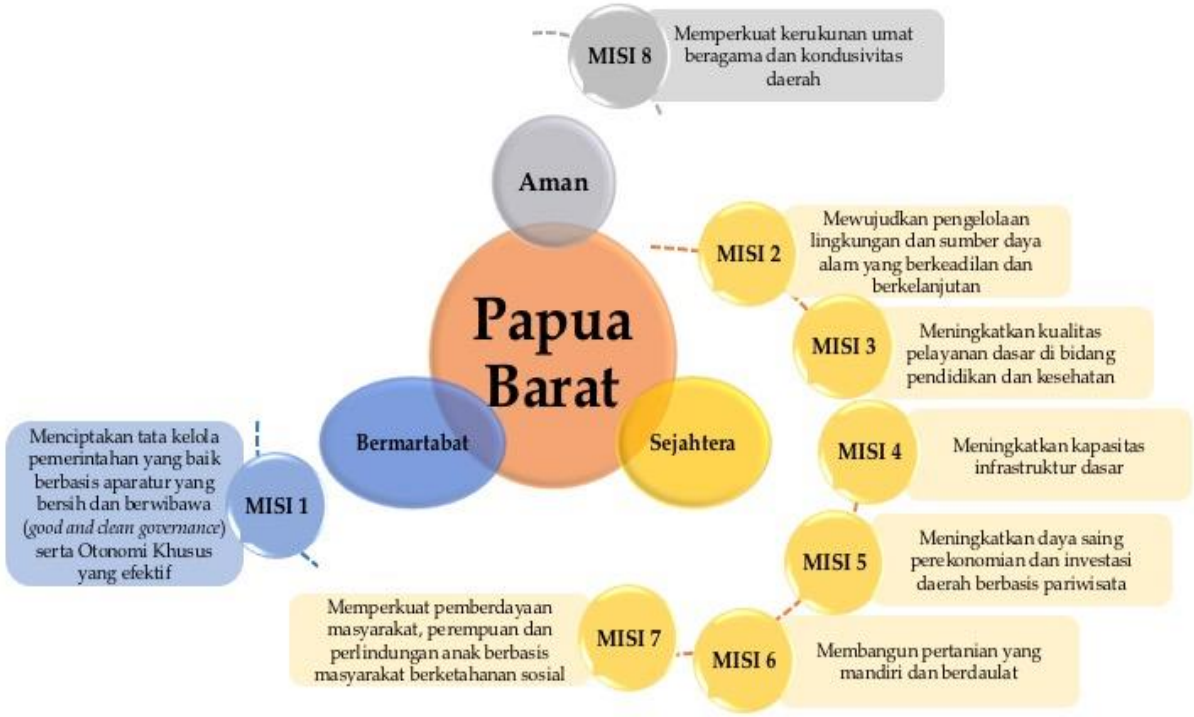

Gambar 5.1 Kerangka Pemikiran (*Logical Framework*) Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Papua Barat untuk periode tersebut.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pelaksanaan visi dan misi pembangunan diarahkan untuk mencapai sasaran makro sebagai *impact* makro pembangunan jangka menengah daerah, meliputi:

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun;

2. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas setiap tahun;
3. Terkendalinya laju inflasi setiap tahun;
4. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
5. Menurunnya Rasio Gini;
6. Menurunnya persentase tingkat kemiskinan;
7. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
8. Menurunnya Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson;
9. Meningkatnya pengeluaran per kapita per bulan;
10. Menurunnya persentase pengeluaran konsumsi makanan;
11. Meningkatnya produktivitas total daerah.

Tabel 5.2 Indikator Makro Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022

Sasaran Makro	Target					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas (%)	6,75	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Laju Inflasi Tahunan (%)	3,28	4,08	3,66	3,67	3,80	3,71
Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	62,32	63,21	63,64	64,09	64,54	64,95
Rasio Gini (Angka)	0,37	0,38	0,37	0,36	0,36	0,35
Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	25,10	24,27	23,29	22,42	21,67	20,93
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,52	6,45	6,42	6,28	5,87	5,69
Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson (Angka)	0,45	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39
Pengeluaran per kapita per bulan (Rp juta)	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
Persentase pengeluaran konsumsi makanan (%)	50,00	49,75	49,60	49,50	49,40	49,30
Produktivitas total daerah (Rp juta)	167,00	167,50	170,00	172,50	175,00	180,00

5.3.1. Tujuan dan Sasaran pada Misi 1

Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 1 pembangunan daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, yaitu: **"Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*) serta otonomi khusus yang efektif",** maka ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

1. **Tujuan 1: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat,** dengan sasaran**:**

a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat, dengan indikator:
   - Kinerja penyelenggaraan di Provinsi Papua Barat yang meliputi: ketersediaan Perdasus sesuai mandat undang-undang otonomi khusus, ketersediaan Perdasi sesuai mandat undang-undang otonomi khusus, dan kinerja pelaksanaan program dalam regulasi terkait otonomi khusus.

2. **Tujuan 2: Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan, sinergitas kebijakan pembangunan, dan pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus**, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah; dengan indikator:
      - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
      - Indeks Kepuasan Masyarakat.
   b. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator:
      - Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan daerah.
   c. Optimalnya sistem pengawasan daerah, dengan indikator:
      - Persentase penyelesaian TLHP.
   d. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, dengan indikator:
      - Cakupan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan.
   e. Meningkatnya kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan indikator:
      - Tingkat implementasi inovasi daerah.
   f. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator:
      - Opini pengelolaan keuangan daerah;
      - Persentase tingkat pertumbuhan PAD;
      - Persentase PAD terhadap pendapatan daerah.

3. **Tujuan 3: Terwujudnya pengelolaan data dan informasi layanan publik yang terintegrasi dan berbasis IT**, dengan sasaran**:**
   a. Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi dan pelayanan informasi publik berbasis IT; dengan indikator:

- Cakupan layanan publik berbasis IT;

b. Meningkatnya ketersediaan data sebagai basis kebijakan pembangunan daerah, dengan indikator:
   - Persentase data OPD yang dimuat dalam database satu data.

c. Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan persandian daerah, dengan indikator:
   - Cakupan layanan persandian daerah.

d. Meningkatnya budaya baca masyarakat, dengan indikator:
   - Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan.

e. Meningkatnya tata kelola administrasi kearsipan daerah, dengan indikator:
   - Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah.

5.3.2. Tujuan dan Sasaran Pada Misi 2

Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 2 pembangunan daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, yaitu: **"Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan",** maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran pembangunan daerah, yaitu: **Terwujudnya pengembangan dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan**, dengan sasaran:

a. Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan; dengan indikator:
   - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

b. Meningkatnya kelestarian pengelolaan hutan secara terpadu, dengan indikator:
   - Cakupan fasilitasi penanganan kasus kehutanan.

c. Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan wilayah dan penataan wilayah lingkup Provinsi Papua barat, dengan indikator:
   - Cakupan penyepakatan batas wilayah antar kabupaten/kota;
   - Cakupan penyepakatan batas wilayah Provinsi Papua Barat;
   - Cakupan penyepakatan batas wilayah Hak Ulayat;
   - Cakupan penyepakatan batas hak kelola tanah ulayat;
   - Cakupan penyediaan lahan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni.

d. Meningkatnya konservasi sumber daya alam di Provinsi Papua Barat, dengan indikator:
   - Luas tutupan hutan dalam kawasan hutan;
   - Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi;
   - Luas kawasan konservasi perairan;
   - Pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan.

5.3.3. Tujuan dan Sasaran Pada Misi 3

Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 3 pembangunan daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, yaitu: **"Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan",** maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu: **Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing**, dengan sasaran:

a. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan manajemen pendidikan; dengan indikator:
   - Rerata Lama Sekolah;
   - Rerata Lama Sekolah Orang Asli Papua;
   - Harapan Lama Sekolah;
   - Harapan Lama Sekolah Orang Asli Papua;
   - Angka Melek Huruf;
   - Angka Melek Huruf Orang Asli Papua;
   - Persentase guru Orang Asli Papua.

b. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan indikator:
   - Angka Kematian Ibu OAP;
   - Angka harapan hidup;
   - Persentase balita gizi buruk;
   - Persentase balita gizi kurang;
   - Cakupan kampung siaga aktif;
   - Angka Kematian Bayi OAP;
   - Prevalensi HIV/AIDS;
   - Rasio tenaga kesehatan. Dokter, tenaga medis per satuan penduduk;
   - Cakupan Puskesmas terakreditasi di distrik;

- RSUD rujukan provinsi.

c. Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga, dengan indikator:
   - Jumlah atlet berprestasi Provinsi Papua Barat di tingkat nasional;
   - Jumlah pemuda OAP pelopor.

5.3.4. Tujuan dan Sasaran Pada Misi 4

Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 4 pembangunan daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, yaitu: **"Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar",** maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu: **Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik di wilayah Provinsi Papua Barat**, dengan sasaran:

a. Meningkatnya interkoneksi antar wilayah, ketersediaan layanan dasar infrastruktur daerah dan kualitas pengelolaan tata ruang daerah; dengan indikator:
   - Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi;
   - Persentase jalan provinsi dengan kualitas baik;
   - Persentase jembatan provinsi dengan kualitas baik;
   - Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik;
   - Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi;
   - Jumlah TPA regional.

b. Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Papua Barat, dengan indikator:
   - Cakupan Rumah Layak Huni bagi OAP yang tepat syarat;
   - Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh;
   - Cakupan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh;
   - Cakupan rumah tangga dengan air minum layak;
   - Cakupan rumah tangga dengan sanitasi layak;

c. Optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dan ketersediaan energi baru dan terbarukan, dengan indikator:
   - Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian;

- Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan;
- Persentase kampung terakses listrik;
- Tingkat fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam;
- Tingkat elektrifikasi provinsi.

5.3.5. Tujuan dan Sasaran Pada Misi 5

Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 5 pembangunan daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, yaitu: **"Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata",** maka ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 8 (delapan) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

1. **Tujuan 1: Meningkatnya perekonomian daerah yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumber daya lokal lintas sektor,** dengan sasaran:
   a. Meningkatnya daya saing investasi daerah; dengan indikator:
      - Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan;
      - Jumlah OAP yang terlibat dalam investasi.
   b. Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja, dengan indikator:
      - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja OAP;
      - Angka partisipasi angkatan kerja;
      - Tingkat Kesempatan Kerja OAP;
      - Tingkat Kesempatan Kerja OAP;
      - Rasio penduduk yang bekerja;
      - Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja;
      - Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja.
   c. Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah, dengan indikator:
      - Persentase UMKM OAP yang berkembang.
   d. Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar daerah, dengan indikator:
      - Nilai ekspor bersih;

- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
- Rasio ekspor dan impor terhadap PDB;
- Jumlah OAP yang terlibat dalam usaha perdagangan.

e. Meningkatnya pengembangan dan daya saing industri pengolahan berbasis potensi daerah, dengan indikator:
   - Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB;
   - Pertumbuhan jumlah IKM.

f. Optimalnya sinergitas pengembangan dan penataan kawasan terpadu di wilayah transmigrasi, dengan indikator:
   - Cakupan pengembangan kawasan transmigrasi OAP.

2. **Tujuan 2: Terwujudnya daya dukung dan daya tarik pariwisata terpadu berskala internasional di Provinsi Papua Barat**, dengan sasaran:

   a. Meningkatnya keterpaduan dan daya saing pariwisata daerah; dengan indikator:
      - Jumlah wisatawan mancanegara;
      - Jumlah OAP yang terlibat dalam sektor kepariwisataan.

   b. Meningkatnya pengembangan seni budaya dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat Provinsi Papua Barat dalam mendukung pariwisata daerah, dengan indikator:
      - Jumlah even skala nasional dan internasional dalam kalender tahunan Provinsi Papua Barat.

5.3.6. Tujuan dan Sasaran Pada Misi 6

Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 6 pembangunan daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, yaitu: **"Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat",** maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran pembangunan daerah, yaitu: **Terwujudnya kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah**, dengan sasaran:

a. Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas; dengan indikator:
   - Nilai Tukar Petani;
   - Pencapaian Skor PPH;

- Penguatan cadangan pangan;
- Penanganan daerah rawan pangan;
- Pertumbuhan PDRB tanaman pangan;
- Pertumbuhan PDRB tanaman hortikultura;
- Pertumbuhaan PDRB tanaman perkebunan;
- Pertumbuhan PDRB perikanan;
- Jumlah kelembagaan petani OAP yang meningkat kapasitasnya.

5.3.7. Tujuan dan Sasaran Pada Misi 7

Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 7 pembangunan daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, yaitu: **"Memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial",** maka ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

1. **Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat berketahanan sosial**, dengan sasaran:
   a. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial; dengan indikator:
      - Cakupan penanganan PMKS;
      - Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1.
   b. Meningkatnya kapasitas masyarakat kampung, dengan indikator:
      - Jumlah kader kesejahteraan sosial OAP di masyarakat;
   c. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak, dengan indikator:
      - Indeks Pembangunan Gender;
      - Persentase kab/kota yang telah memiliki pusat penanganan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
      - Jumlah ruang terbuka ramah anak.

2. **Tujuan 2: Meningkatnya kinerja penataan penduduk dan pelayanan hak kependudukan masyarakat**, dengan sasaran:
   a. Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana; dengan indikator:
      - Cakupan peserta KB aktif;
      - Adanya regulasi pengendalian penduduk;

- Laju pertumbuhan penduduk;
- Rasio ketergantungan.

b. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat, dengan indikator:
   - Rasio cakupan penduduk ber KTP;
   - Persentase kepemilikan KK;
   - Persentase kepemilikan Akte Kelahiran.

5.3.8. Tujuan dan Sasaran Pada Misi 8

Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 8 pembangunan daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, yaitu: **"Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah",** maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu: Meningkatnya stabilitas wilayah di seluruh Provinsi Papua Barat, dengan sasaran:

a. Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum; dengan indikator:
   - Indek Potensi Kerawanan Sosial;
   - Indeks Demokrasi Indonesia;
   - Angka kriminalitas yang tertangani.

b. Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dengan indikator:
   - Kab/kota siaga bencana;
   - Indeks risiko bencana;
   - Kapasitas aparatur penanggulangan bencana.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran beserta Indikator, dan Target Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022

Visi: Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat											
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						
					Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*) serta otonomi khusus yang efektif**										
	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*) serta otonomi khusus yang efektif	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat	Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat:							
				Ketersediaan Perdasus sesuai mandat undang-undang otonomi khusus (%)	n.a	-	30.00	50.00	70.00	80.00	100.00
				Ketersediaan Perdasi sesuai mandat undang-undang otonomi khusus (%)	n.a	-	30.00	50.00	70.00	80.00	100.00
				Kinerja pelaksanaan program dalam regulasi terkait otonomi khusus (%)	n.a	-	50.00	60.00	60.00	90.00	100.00
		Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan, sinergitas kebijakan pembangunan, dan pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (kategori)	n.a	n.a	CC	CC	CC	B	B
				Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	B	B	A
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan daerah (%)	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Optimalnya sistem pengawasan daerah	Persentase penyelesaian TLHP (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur	Cakupan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan (%)	80.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Meningkatnya kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Tingkat implementasi inovasi daerah (%)	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00

Visi: Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat											
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						
					Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini pengelolaan keuangan daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Persentase tingkat pertumbuhan PAD (%)	4.96	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00
				Persentase PAD terhadap pendapatan daerah (%)	2.40	5.50	5.75	6.00	6.50	6.75	7.00
		Terwujudnya pengelolaan data dan informasi layanan publik yang terintegrasi dan berbasis IT	Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi dan pelayanan informasi publik berbasis IT	Cakupan layanan publik berbasis IT (%)	n.a	10.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
			Meningkatnya ketersediaan data sebagai basis kebijakan pembangunan daerah	Persentase data OPD yang dimuat dalam database satu data (%)	n.a	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan persandian daerah	Cakupan layanan persandian daerah (%)	n.a	15.00	38.00	40.00	60.00	75.00	100.00
			Meningkatnya budaya baca masyarakat	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan (%)	5.00	7.00	10.00	10.00	15.00	20.00	20.00
			Meningkatnya tata kelola administrasi kearsipan daerah	Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah (%)	n.a	-	10.00	22.00	35.00	57.00	100.00
2.	**Misi 2: Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**										
	Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang berkeadilan	Terwujudnya pengembangan dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	84.51	84.51	84.51	82.00	81.00	80.00	80.00

Visi: Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat											
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						
					Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	dan berkelanjutan		lingkungan yang berkelanjutan								
			Meningkatnya kelestarian pengelolaan hutan secara terpadu	Cakupan fasilitasi penanganan kasus kehutanan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan wilayah dan penataan wilayah lingkup Provinsi Papua Barat	Cakupan penyepakatan batas wilayah antar kabupaten/kota (%)	n.a	22.22	22.22	16.67	11.11	11.11	11.11
				Cakupan penyepakatan batas wilayah Provinsi Papua Barat (%)	n.a	-	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
				Cakupan penyepakatan batas wilayah Hak Ulayat (%)	n.a	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
				Cakupan penyepakatan batas hak kelola tanah ulayat (%)	n.a	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00
				Cakupan penyediaan lahan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni (%)	n.a	20.00	40.00	90.00	100.00	100.00	100.00
			Meningkatnya konservasi sumber daya alam di Provinsi Papua Barat	Luas tutupan hutan dalam kawasan hutan (Ha)	8,262,961	8,262,961	8,262,961	8,262,961	8,262,961	8,262,961	8,262,961
				Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (Ha)	730.49	234.00	406.00	406.00	500.00	550.00	600.00
				Luas kawasan konservasi perairan (Ha)	350,000.00	350,000.00	710,000.00	710,000.00	923,000.00	923,000.30	1,136,000.30
				Pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan (%)	5.86	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
3.	**Misi 3: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan**										
	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan	Terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	Rerata Lama Sekolah (tahun)	7.06	7.50	7.70	8.00	8.30	8.50	8.50
				Rerata Lama Sekolah Orang Asli Papua (tahun)	-	5.00	5.15	5.20	5.30	5.50	5.75
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.26	12.50	12.60	12.65	12.70	12.75	13.00
				Harapan Lama Sekolah Orang Asli Papua (tahun)	-	10.00	10.20	10.40	10.50	10.60	10.75
				Angka Melek Huruf (%)	94.14	95.00	95.50	96.00	96.50	97.00	97.50
				Angka Melek Huruf OAP (%)	n.a	95.00	95.50	96.00	96.50	97.00	97.50
				Persentase Guru OAP (%)	n.a	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
			Meningkatnya akses dan kualitas	Angka Kematian Ibu OAP (per 100.000 kelahiran hidup)	37	37	34	30	28	25	23
				Angka harapan hidup (tahun)	65.30	65.40	65.50	65.60	65.70	65.80	65.90

Visi: Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat											
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						
					Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			pelayanan kesehatan	Persentase balita gizi buruk (%)	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00	2.50	2.00
				Persentase balita gizi kurang (%)	10.00	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00
				Cakupan kampung siaga aktif (%)	n.a	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00
				Angka Kematian Bayi OAP (per 100.000 kelahiran)	28	26	24	22	20	18	16
				Prevalensi HIV/AIDS (%)	2.30	2.00	1.90	1.80	1.70	1.60	1.50
				Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, Tenaga Medis per satuan penduduk (rasio)	TK : 0,59; D : 0,21; TM : 0,38	TK : 0,76; D : 0,38; TM : 0,38	TK : 1,05; D : 0,52; TM : 0,53	TK : 1,32; D : 0,65; TM : 0,67	TK : 1,57; D : 0,77; TM : 0,80	TK : 1,81; D : 0,89; TM : 0,92	TK : 2; D : 1; TM : 1
				Cakupan Puskesmas terakreditasi di distrik (%)	n.a	10.00	29.00	49.00	68.00	87.00	100.00
				RSUD rujukan provinsi (unit)	-	-	-	1	-	-	2
			Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	Jumlah atlet berprestasi Provinsi Papua Barat di tingkat nasional	n.a	-	10	20	30	40	50
				Jumlah pemuda OAP pelopor (orang)	n.a	20	50	70	80	90	100
4.	**Misi 4: Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar**										
	Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik di wilayah Provinsi Papua Barat	Meningkatnya interkoneksi antar wilayah, ketersediaan layanan dasar infrastruktur daerah dan kualitas pengelolaan tata ruang daerah	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang tehubung sarana transportasi (%)	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase jalan provinsi dengan kualitas baik (%)	55.25	62.71	70.17	77.62	85.08	92.54	100.00
				Persentase jembatan provinsi dengan kualitas baik (%)	40.14	50.07	60.14	70.07	80.00	90.07	100.00
				Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik (%)	76.00	78.00	81.00	83.00	86.00	89.00	92.00
				Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi (%)	n.a	-	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
				Jumlah TPA Regional	1	-	-	-	1	1	1
			Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman wilayah perkotaan dan	Cakupan Rumah Layak Huni bagi OAP yang tepat syarat (unit)	81	135	500	550	605	666	732
				Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh (%)	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
				Cakupan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Ha)	203,11	67,28	73,76	48,37	11,50	2,20	0
				Cakupan rumah tangga dengan air minum layak (%)	63,00	63,00	70,00	80,00	90,00	95,00	100,00

Visi: Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat											
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						
					Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			perdesaan di Provinsi Papua Barat	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi layak (%)	62,00	62,00	70,00	80,00	90,00	95,00	100,00
			Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dan ketersediaan energi baru dan terbarukan	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian (%)	19.49	20.00	20.35	20.50	20.75	21.00	21.50
				Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan (kampung)	109	250	300	300	350	350	400
				Persentase kampung terakses listrik (%)	44.41	51.36	58.31	65.26	72.21	79.16	86.11
				Tingkat fasilitasi pemanfaatan sumberdaya alam (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Tingkat elektrifikasi provinsi (%)	75.44	77.60	79.76	81.92	84.08	86.24	88.40
5.	**Misi 5: Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata**										
	Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata	Meningkatnya perekonomian daerah yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumberdaya lokal lintas sektor	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan (%)	n.a	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				Jumlah OAP yang terlibat dalam investasi (orang)	50	50	50	50	50	50	50
			Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja OAP (%)	n.a	-	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00
				Angka partisipasi angkatan kerja (%)	n.a	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
				Tingkat Kesempatan Kerja OAP (%)	-	92.50	92.75	92.90	93.00	93.25	93.50
				Rasio penduduk yang bekerja (%)	n.a	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
				Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	n.a	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00
				Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	n.a	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
			Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	Persentase UMKM OAP yang berkembang (%)	-	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
			Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan	Nilai ekspor bersih ($ US)	2,706,140,787	2,841,447,826	2,983,520,218	3,132,696,229	3,289,331,040	3,453,797,592	3,626,487,472
				Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	6.14	6.25	6.30	6.50	6.60	6.75	7.00
				Rasio ekspor dan impor terhadap PDB	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Visi: Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat											
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						
					Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			antar wilayah dan antar daerah	Jumlah OAP yang terlibat dalam usaha perdagangan (orang)	n.a	-	10	10	10	10	10
			Meningkatnya pengembangan dan daya saing industri pengolahan berbasis potensi daerah	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	28.72	29.00	29.50	30.00	30.50	31.00	32.00
				Pertumbuhan jumlah IKM (%)	n.a	2	2	2	2	2	2
			Optimalnya sinergitas pengembangan dan penataan kawasan terpadu di wilayah transmigrasi	Cakupan pengembangan kawasan transmigrasi OAP (%)	n.a	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00
		Terwujudnya daya dukung dan daya tarik pariwisata terpadu berskala internasional di Provinsi Papua Barat	Meningkatnya keterpaduan dan daya saing pariwisata daerah	Jumlah wisatawan mancanegara (orang)	n.a	15,000	25,000	35,000	45,000	55,000	70,000
				Jumlah OAP yang terlibat dalam sektor kepariwisataaan (orang)	n.a	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya pengembangan seni budaya dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat Provinsi Papua Barat dalam mendukung pariwisata daerah	Jumlah even skala nasional dan internasional dalam kalender tahunan Provinsi Papua Barat (kali)	4	4	5	6	7	8	9
6.	**Misi 6: Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat**										
	Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat	Terwujudnya kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai	Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	NTP (indeks)	106.65	107.72	108.79	109.88	110.98	112.09	113.21
				Pencapaian Skor PPH	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17
				Penguatan cadangan pangan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Penanganan daerah rawan pangan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Pertumbuhan PDRB tanaman pangan (%)	(1.12)	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00

Visi: Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat												
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target							
					Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah		Pertumbuhan PDRB tanaman hortikultura (%)	11.12	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				Pertumbuhaan PDRB tanaman perkebunan (%)	7.33	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				Pertumbuhan PDRB perikanan (%)	10.37	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				Jumlah kelembagaan petani OAP yang meningkat kapasitasnya (kelompok)	50	50	50	50	50	50	50
7.	**Misi 7: Memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial**											
	Memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial	Terwujudnya masyarakat berketahanan sosial	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Cakupan penanganan PMKS (%)	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	n.a	20.00	18.00	16.00	14.00	12.00	11.00
			Meningkatnya kapasitas masyarakat kampung	Jumlah kader kesejahteraan sosial OAP di masyarakat (orang)	n.a	-	100	100	100	100	100
			Meningkatnya partisipasi perempuan dalam perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak	IPG (indeks)	n.a	92.20	92.35	92.40	92.50	92.65	92.75
				Persentase kab/kota yang telah memiliki pusat penanganan terpadu perlindungan perempuan dan anak (%)	n.a	-	20.00	30.00	50.00	60.00	75.00
				Jumlah ruang terbuka ramah anak (unit)	n.a	-	5	10	15	20	25
		Meningkatnya kinerja penataan penduduk dan pelayanan hak kependudukan masyarakat	Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana	Cakupan peserta KB aktif (%)	n.a	-	30.00	32.00	34.00	35.00	37.00
				Adanya regulasi pengendalian penduduk (Ada/Tidak)	n.a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				Laju pertumbuhan penduduk (%)	n.a	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
				Rasio ketergantungan	n.a	51.13	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
			Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat	Rasio Cakupan Penduduk ber KTP (%)	n.a	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
				Persentase kepemilikan KK (%)	n.a	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
				Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	n.a	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00

Visi: Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat											
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						
					Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.	**Misi 8: Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah**										
	Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah	Meningkatnya stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat Provinsi Papua Barat	Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum	Indek potensi kerawanan sosial (indeks)	n.a	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan
				Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	n.a	60.00	63.00	65.00	66.00	67.00	70.00
				Angka kriminalitas yang tertangani (angka)	n.a	0.20	0.18	0.17	0.15	0.15	0.13
			Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Kab/kota siaga dan tangguh bencana (kabupaten/kota)	n.a	-	6	8	13	13	13
				Indek Risiko Bencana (indeks)	n.a	150	147	143	140	135	130
				Kapasitas aparatur penanggulangan bencana (angka)	n.a	0.50	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60
Formulasi Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022: 8 Misi, 12 Tujuan, dan 38 Sasaran											

5.4. SINKRONISASI SASARAN DAN TARGET KINERJA RPJMD TAHUN 2017-2022 DENGAN RPJPD TAHUN 2012-2025 SERTA RPJMN TAHUN 2014-2019

5.4.1. Sinkronisi Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 Dengan Sasaran RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025

Penetapan sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode tahun 2017-2022 juga telah dipadupadankan dengan sasaran-sasaran yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Papua Barat tahun 2012-2025. Dari sebanyak 32 sasaran pokok RPJPD Tahap 3 (2012-2025), hal tersebut selanjutnya direspon dengan 38 sasaran RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 5.4 Sinkronisasi Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025 dengan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022

Sasaran Pokok RPJPD Tahap 3 (2017-2022)	Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022
Penciptaaan pengokohan sistem politik, keamanan, dan pertanahan	Sasaran 37: Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum
Pemenuhan dan pengelolaan kebutuhan bahan makanan pokok dan kebutuhan bahan makanan sumber protein masyarakat	Sasaran 31: Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas
Pengembangan pola pangan serta peningkatan nilai tambah pertanian untuk kesejahteraan petani	Sasaran 31: Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas
Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi untuk membuka akses mudah dan terjangkau ke seluruh wilayah	Sasaran 20: Meningkatnya interkoneksi antar wilayah, ketersediaan layanan dasar infrastruktur daerah dan kualitas pengelolaan tata ruang daerah
Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana utilitas publik	Sasaran 20: Meningkatnya interkoneksi antar wilayah, ketersediaan layanan dasar infrastruktur daerah dan kualitas pengelolaan tata ruang daerah
Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan publik	Sasaran 20: Meningkatnya interkoneksi antar wilayah, ketersediaan layanan dasar infrastruktur daerah dan kualitas pengelolaan tata ruang daerah
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Sasaran 7: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan penerimaan dana perimbangan	Sasaran 7: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Pembinaan komptensi dan profesionalisme aparat	Sasaran 5: Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur
Penciptaan dan penerapan sistem pemerintahan yang sesuai prinsip-prinsip *good governance*	Sasaran 1: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat
	Sasaran 2: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah
Pemenuhan kebutuhan legal formal pemerintahan	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
	Sasaran 4: Optimalnya sistem pengawasan daerah

Sasaran Pokok RPJPD Tahap 3 (2017-2022)	Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022
	Sasaran 5: Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur
	Sasaran 6: Meningkatnya kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
	Sasaran 7: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
	Sasaran 8: Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi dan pelayanan informasi publik berbasis IT
	Sasaran 9: Meningkatnya ketersediaan data sebagai basis kebijakan pembangunan daerah
	Sasaran 10: Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan persandian daerah
	Sasaran 11: Meningkatnya budaya baca masyarakat
	Sasaran 12: Meningkatnya tata kelola administrasi kearsipan daerah
	Sasaran 36: Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat
Pelengkapan struktur pemerintahan sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah	Sasaran 5: Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur
	Sasaran 34: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak
Peningkatan besaran dan laju pertumbuhan PDRB	Sasaran 23: Meningkatnya daya saing investasi daerah
	Sasaran 29: Meningkatnya keterpaduan dan daya saing pariwisata daerah
Peningkatan ekonomi wilayah berbasis keunggulan komparatif yang bertransformasi bertahap menjadi berbasis keunggulan kompetitif	Sasaran 25: Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah
	Sasaran 27: Meningkatnya pengembangan dan daya saing industri pengolahan berbasis potensi daerah
Peningkatan kerjasama ekonomi	Sasaran 26: Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar daerah
Peningkatan pertumbuhan dan daya saing unit-unit usaha masyarakat	Sasaran 33: Meningkatnya kapasitas masyarakat kampung
Peningkatan derajat pendidikan masyarakat sehingga berkontribusi signifikan dalam upaya peningkatan IPM	Sasaran 17: Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga berkontribusi signifikan dalam upaya peningkatan IPM	Sasaran 18: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Penanggulangan kemiskinan baik di perkotaan maupun perkampungan	Sasaran 32: Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
	Sasaran 33: Meningkatnya kapasitas masyarakat kampung
Pemenuhan prasarana perumahan dan prasarana pendukung lingkungan perumahan	Sasaran 21: Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Papua Barat

Sasaran Pokok RPJPD Tahap 3 (2017-2022)	Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022
	Sasaran 28: Optimalnya sinergitas pengembangan dan penataan kawasan terpadu di wilayah transmigrasi
Pengayoman dan pembinaan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Sasaran 32: Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
	Sasaran 35: Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana
Pembinaan keimanan, ketaqwaan, dan budaya luhur masyarakat berbasis kearifan lokal	Sasaran 19: Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga
	Sasaran 30: Meningkatnya pengembangan seni budaya dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat Provinsi Papua Barat dalam mendukung pariwisata daerah
Penerapan sistem ekonomi dan regulasi ekonomi yang berpihak kepada masyarakat	Sasaran 24: Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja
Perancangan dan penerapan sistem hukum yang berpihak kepada masyarakat	Sasaran 15: Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan wilayah dan penataan wilayah lingkup Provinsi Papua Barat
	Sasaran 37: Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum
Prioritas pembangunan bagi masyarakat miskin serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan daerah terisolir	Sasaran 20: Meningkatnya interkoneksi antar wilayah, ketersediaan layanan dasar infrastruktur daerah dan kualitas pengelolaan tata ruang daerah
Pendayagunaan SDA yang terbarukan	Sasaran 22: Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dan ketersediaan energi baru dan terbarukan
Pengelolaan pemanfaatan SDA yang tidak terbarukan	Sasaran 22: Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dan ketersediaan energi baru dan terbarukan
Pelestarian dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Sasaran 13: Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan
	Sasaran 22: Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dan ketersediaan energi baru dan terbarukan
Peningkatan nilai tambah pemanfaatan SDA	Sasaran 14: Meningkatnya kelestarian pengelolaan hutan secara terpadu
	Sasaran 22: Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dan ketersediaan energi baru dan terbarukan
Pengembangan SDA khas	Sasaran 22: Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dan ketersediaan energi baru dan terbarukan
Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian tata ruang berbasis konservasi	Sasaran 16: Meningkatnya konservasi sumber daya alam di Provinsi Papua Barat
	Sasaran 13: Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan
	Sasaran 38: Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana

Sasaran Pokok RPJPD Tahap 3 (2017-2022)	Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022
Melestarikan keanekaragaman budaya dan memproteksi dari akulturasi budaya negatif	Sasaran 30: Meningkatnya pengembangan seni budaya dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat Provinsi Papua Barat dalam mendukung pariwisata daerah

5.4.2. Sinkronisi Target Kinerja RPJMD Provinsi Papua Barat Dengan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

Pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 tidak dapat dilepaskan dari agenda-agenda pembangunan nasional yang telah dicanangkan oleh kepemimpinan nasional periode tahun 2015-2019. Oleh sebab itu sasaran-sasaran pokok yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 juga menjadi target yang harus dicapai oleh daerah, tentu saja dengan penyesuaian konteks lokal yang menjadi lingkungan strategis pelaksanaan pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, tabel berikut menunjukkan perbandingan sasaran pokok yang akan dicapai dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dengan target yang akan dicapai dalam RPJMD Provinsi Papua Barat pada tahun 2022.

Tabel 5.5 Harmonisasi Target Sasaran RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 Dengan Sasaran Pokok RPJMN Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Pembangunan	Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2022
1.	**SASARAN MAKRO**		
1.1.	**Pembangunan Manusia dan Masyarakat**		
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,3	64,95
	Indeks Gini	0,36	0,35
	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Minimal 95%	100%
1.2.	**Ekonomi Makro**		
	Pertumbuhan ekonomi	8,0%	7,0%
	Inflasi	3,5%	3,71%
	Tingkat Kemiskinan	7,0-8,0%	20,93%
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,0-5,0%	5,69%

No.	Sasaran Pembangunan	Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2022
2.	**SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT**		
2.1.	**Kependudukan dan Keluarga Berencana**		
	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk	1,19%	3%
	Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (*all methods*)	66%	30%
2.2.	**Pendidikan**		
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,8 (tahun)	8,5 tahun
	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	96,1%	97,50%
	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,2%	50,0%
	Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B	81,0%	50,0%
	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	84,6%	45,0%
2.3.	**Kesehatan**		
a.	**Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat**		
	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	306	23
	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	24	16
	Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita	17	4
b.	**Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular**		
	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	245%	100
	Prevalensi HIV	<0,5%	1,50%
c.	**Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan**		
	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas terakreditasi	5.600	100%

No.	Sasaran Pembangunan	Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2022
	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	5.600	20
2.4.	**Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**		
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkat	92,75
3.	**SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN**		
3.1.	**Kedaulatan Pangan**		
a.	**Produksi Dalam Negeri**		
	Padi	820 juta ton	43.321 ton
	Jagung	241 juta ton	6.069 ton
	Produksi Ikan	188 juta ton	287.900 ton
b.	**Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi**		
	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa	989 juta ha	33,70 km
	Rehabililtasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa	301 juta ha	100%
3.2.	**Maritim dan Kelautan**		
a.	**Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar**		
	Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan	87%	100%
b.	**Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan**		
	Pengembangan pelabuhan perikanan	24 unit	12 kawasan
	Peningkatan luas kawasan konservasi laut	20 juta ha	1,14 juta ha
3.3.	**Pariwisata dan Industri Manufaktur**		
a.	**Pariwisata**		
	Wisatawan manca negara	20 juta	70.000
	Wisatawan Nusantara	275 juta	50.000
3.4.	**Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas**		

No.	Sasaran Pembangunan	Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2022
a.	**Ketahanan Air**		
	Ketersedian air irigasi yang bersumber dari waduk	20%	30%
	Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak)	10 Juta Ha	24 km
b.	**Infrastruktur Dasar dan Konektivitas**		
	Rasio elektrifikasi	96,6%	88,40%
	Kawasan permukiman kumuh perkotaan	0 ha	0 ha
	Akses Air Minum Layak	100%	36,10%
	Akses Sanitasi Layak	100%	36,10%
c.	**Lingkungan**		
	Emisi Gas Rumah Kaca	~ 26%	5%
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,5-68,5	80
	Tambahan Rehabilitasi Hutan	750 ribu ha	2.696 ha
4.	**SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN**		
4.1.	**Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi**		
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0% - 8,0%	20,93%
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,0 % - 5,0 %	5,69%
4.2.	**Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu**		
	Perlindungan Sosial bagi Penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% penduduk berpendapatan terendah)		
	Kepesertaan Jaminan Kesehatan	100%	100%
	Akses Pangan Bernutrisi	100%	100%
	Akses Terhadap Layanan Keuangan	25%	30%
4.3.	**Pelayanan Dasar Bagi Penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% penduduk berpendapatan terendah)**		

No.	Sasaran Pembangunan	Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2022
	Kepemilikan akte lahir (2013)	77,4%	100%
	Akses air minum	100%	36,10%
	Akses sanitasi layak	100%	36,10%
	Akses penerangan	100%	88,40%
4.4.	**Peningkatan daya saing tenaga kerja**		
	Penyediaan lapangan kerja (2015-2019)	10 juta (rata-rata 2 juta per tahun)	5.000 per tahun
	Persentase tenaga kerja formal	51,0%	30%
4.5.	**Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan**		
	Pekerja formal	62,4 juta	50.000 orang
	Pekerja Informal	3,5 juta	150.000 orang
4.6.	**Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja**		
	Jumlah pelatihan	2.170.377**)	1.000
	Jumlah sertifikasi	863.819**)	
5.	**SASARAN PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN**		
5.1.	**Politik dan Demokrasi**		
	Tingkat Partisipasi Politik Pemilu	77,5 %	70%
	Indeks Demokrasi Indonesia	75	70
5.2.	**Penegakan Hukum**		
	Indeks Pembangunan Hukum	75%	50%
	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	40	20
	Indeks Penegakan Hukum Tipikor	Naik 20% (skala 5)	Naik 10%
5.3.	**Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi**		
	Kualitas Pelayanan Publik	Meningkat	Meningkat
	Integritas Pelayanan Publik	85	60
5.4.	**Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah**		
a.	**Kinerja Kuangan Daerah**		
	Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota	35%	30,0%
	Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan	11,0 %	1,0%
	Rata-rata belanja modal Kab/Kota	30,0 %	20,0%

No.	Sasaran Pembangunan	Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2022
	Rata-rata nasional WTP Pemda Kabupaten	60%	100%
b.	**Kinerja Kelembagaan**		
	PTSP Kondisi Mantap	55,0 %	100%
	Perda bermasalah	50 perda	Tidak Ada
	Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yg ideal (sesuai PP 41) sampel 299 daerah	70%	100%
	Penerapan SPM di daerah (Prov/Kab/Kota)	90%	100%
c.	**Kinerja Aparatur**		
	Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3	50,0 %	60%

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Foto: Billy, 2017

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi tersebut dituangkan secara lebih rinci ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 8 berdasarkan pendekatan per urusan/bidang sebagai berikut.

6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

6.1.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Pertama

Misi 1 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*) serta otonomi khusus yang efektif. Pada misi 1, terkandung 3 (tiga) tujuan pembangunan yaitu (1) meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua Barat, (2) meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan, sinergitas kebijakan pembangunan, dan pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus, dan (3) terwujudnya pengelolaan data dan informasi layanan publik yang terintegrasi dan berbasis IT.

Pada tujuan pertama, sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat. Rincian mengenai strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut.

a. **Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan Umum. Strategi utamanya adalah** adalah Memperkuat kelembagaan dan instrumen penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua Barat; dengan **arah kebijakan**, (1) Pengembangan dan implementasi Perdasus dan Perdasi penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua Barat, (2) Pengembangan sistem pengalokasian dana otonomi khusus yang berkeadilan, (3) Pengembangan dan implementasi sistem perencanaan, penganggaran dan

monitoring evaluasi penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua Barat, (4) Pengembangan sumber daya manusia penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua Barat, (5) Pengembangan instrumen kebijakan afirmatif bagi OAP dalam penyelenggaraan otonomi khusus, (6) Penguatan kelembagaan otonomi khusus Provinsi Papua Barat, (7) Peningkatan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia OAP, dan (8) Pengembangan dan implementasi *grand design* serta *exit strategy* penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua Barat pasca berakhirnya dana otonomi khusus tahun 2021.

Tujuan kedua pada misi 1 adalah Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan, sinergitas kebijakan pembangunan, dan pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus. Tujuan kedua tersebut memiliki 6 sasaran pembangunan (Tabel 6.1) dan berbagai strategi dan arah kebijakan untuk masing-masing sasaran yang meliputi berbagai urusan, yaitu sebagai berikut:

a. **Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan Umum**. **Strategi pertama**: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan **arah kebijakan**, (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, (2) Peningatan publikasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan (3) Pembangunan kantor distrik/kampung /kelurahan. **Strategi kedua**: Meningkatkan harmonisasi penyelenggaraan demokrasi lokal, dengan arah kebijakan, (1) Peningkatan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif, (2) Pembentukan dan pemberlakuan produk hukum daerah yang antisipatif terhadap dinamika kehidupan daerah, dan (3) Peningkatan penyelenggaraan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRP. **Strategi ketiga**: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar sektor dan wilayah, dengan **arah kebijakan**, (1) Peningkatan forum kordinasi antar sektoral dan (2) Peningkatan forum kordinasi antar tingkatan pemerintahan. **Strategi keempat**: Percepatan penyelesaian konflik batas wilayah antar provinsi dan antar kab/kota, dengan **arah kebijakan**, (1) Pemetaan batas wilayah provinsi, (2) Pemetaan batas kab/kota, dan (3) Forum penyepakatan penyelesaiaan konflik tapal batas antar wilayah. **Strategi kelima**: Peningkatan fasilitasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan **arah**

kebijakan, (1) Peningatan fasilitasi dan kordinasi penyelenggaraan tugas gubernur dan wakil gubernur dan (2) Peningkatan fasilitasi promosi daerah di ibukota.

b. **Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan Perencanaan. Strategi pertama:** Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang terintegratif secara sektoral dan spasial, dengan **arah kebijakan**, (1) Pengembangan perencanaan pembangunan daerah berbasis *e-planning*, (2) Peningkatan konsistensi RPJPD-RPJMD-Renstra OPD-RKPD dan Renja OPD, (3) Peningkatan integrasi dan konsistensi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, (4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, dan (5) Peningkatan kajian-kajian dan penelitian inovasi penyelenggaraan pembangunan daerah di berbagai bidang. **Strategi kedua**: Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pembangunan daerah, dengan **arah kebijakan**, (1) Membangun sistem pengendalian dan pelaporan berbasis *e-planning*, (2) Meningkatkan akses masyarakat dalam pengawasan pembangunan, dan (3) Penguatan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai basis kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

c. **Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan Pengawasan. Strategi utamanya adalah** Meningkatkan penyelenggaran pengawasan pembangunan daerah, dengan **arah kebijakan**, (1) Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia auditor, dan (3) Peningkatan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus di Kabupaten/Kota.

d. **Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan Kepegawaian. Strategi utamanya adalah** Meningkatkan kapasitas SDM aparatur, dengan **arah kebijakan**, (1) Mengembangkan kemampuan kerja aparatur melalui studi lanjut (S2 dan S3), diklat dan bimtek, (2) Pengembangan kemampuan kerja aparatur melalui diklat penjenjangan, dan (3) Peningkatan jabatan fungsional tertentu.

e. **Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan. Strategi utamanya adalah** Meningkakan penciptaan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan **arah kebijakan**, (1) Peningkatan kegiatan penelitian dan kajian inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan (2)

Peningkatan penelitian teknologi tepat guna untuk mendukung perkembangan berbagai sektor perekonomian lokal.

f. **Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan Keuangan. Strategi pertama**: Peningkatan penyelenggaraan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan **arah kebijakan**, (1) Pengembangan instrumen penganggaran daerah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah, (2) Peningkatan disiplin pelaku guna penyusunan APBD yang tepat waktu dan berkualitas, (3) Peningkatan pelayanan penatausahaan keuangan daerah, (4) Pemantapan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual, dan (5) Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. **Strategi kedua**: Peningkatan kapasitas fiskal daerah, dengan **arah kebijakan**, (1) Optimalisasi penggalian pendapatan asli daerah, (2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, (3) Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah, dan (4) Peningkatan daya tawar dengan pemerintah pusat terkait dana perimbangan dan bagi hasil.

Tujuan ketiga pada misi 1 adalah Terwujudnya pengelolaan data dan informasi layanan publik yang terintegrasi dan berbasis IT. Tujuan ketiga tersebut memiliki 5 (lima) sasaran pembangunan (Tabel 6.1) dan berbagai strategi dan arah kebijakan untuk masing-masing sasaran yang meliputi berbagai urusan, yaitu sebagai berikut:

a. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika. Strategi utamanya adalah** Meningkatnya jaringan komunikasi dan informasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, dengan **arah kebijakan**, (1) Pengembangan jaringan komunikasi pemerintah daerah berbasis *e-government*, (2) Penguatan fasiitasi pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi seluler, dan (3) Pengembangan inovasi pelayanan pemerintah daerah berbasis IT.
b. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik. Strategi utamanya adalah:** Pengembangan data statistik dan informasi pembangunan daerah, dengan **arah kebijakan**, (1) Pengembangan data statistik pembangunan daerah dan (2) Penyusunan survei tematik dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.
c. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian. Strategi utamanya adalah** Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan persandian daerah, dengan **arah**

kebijakan, (1) Pengembangan sarana prasarana pengelolaan persandian daerah dan (2) Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di bidang persandian daerah.

d. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan**. **Strategi utamanya adalah** Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat, dengan **arah kebijakan**, (1) Pengembangan koleksi buku perpustakaan daerah, (2) Fasilitasi peningkatan perpustakaan sekolah menengah dan kejuruan, dan (3) Pembangunan perpusatakaan daerah.
e. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan**. **Strategi utamanya adalah** Peningkatan penataan arsip daerah, dengan arah kebijakan, (1) Penataan arsip daerah dan (2) Digitalisasi arsip daerah.

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Pertama

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*) serta otonomi khusus yang efektif										
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat	Memperkuat kelembagaan dan instrumen penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua Barat	Pengembangan dan implementasi Perdasus dan Perdasi penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua Barat	√	√	√			
				Pengembangan sistem pengalokasian dana otonomi khusus yang berkeadilan	√	√	√			
				Pengembangan dan implementasi sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua Barat	√	√				
				Pengembangan sumber daya manusia penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua Barat		√	√			
				Pengembangan instrumen kebijakan afirmatif bagi OAP dalam penyelenggaraan otonomi khusus		√				
				Penguatan kelembagaan otonomi	√	√				

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				khusus Provinsi Papua Barat						
				Peningkatan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia OAP	√	√	√	√	√	√
				Pengembangan dan implementasi *grand design* serta *exit strategy* penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua Barat pasca berakhirnya dana otonomi khusus tahun 2021			√			
2.	Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan, sinergitas kebijakan pembangunan, dan pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan publikasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		√				
				Pembangunan kantor distrik/kampung /kelurahan	√	√	√	√	√	√
			Meningkatkan harmonisasi penyelenggaraan demokrasi lokal	Peningkatan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif	√	√	√	√	√	√
				Pembentukan dan pemberlakuan produk hukum daerah yang	√	√	√	√	√	√

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				antisipatif terhadap dinamika kehidupan daerah						
				Peningkatan penyelenggaraan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRP		√	√	√		
			Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar sektor dan wilayah	Peningkatan forum kordinasi antar sektoral	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan forum kordinasi antar tingkatan pemerintahan	√	√	√	√	√	√
			Percepatan penyelesaian konflik batas wilayah antar provinsi dan antar kab/kota	Pemetaan batas wilayah provinsi	√	√	√	√	√	√
				Pemetaan batas kab/kota	√	√	√	√	√	√
				Forum penyepakatan penyelesaiaan konflik tapal batas antar wilayah	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan fasilitasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Peningatan fasilitasi dan kordinasi penyelenggaraan tugas gubernur dan wakil gubernur	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan fasilitasi promosi daerah di ibukota		√	√	√	√	√
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah	Pengembangan perencanaan pembangunan daerah	√	√	√			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
			yang terintegratif secara sektoral dan spasial	berbasis *e-planning*						
				Peningkatan konsistensi RPJPD-RPJMD-Renstra OPD-RKPD dan Renja OPD	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan integrasi dan konsistensi sistem perencanaan dan penganggaran daerah	√	√				
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan kajian-kajian dan penelitian inovasi penyelenggaraan pembangunan daerah di berbagai bidang		√	√	√	√	
			Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pembangunan daerah	Membangun sistem pengendalian dan pelaporan berbasis *e-planning*		√				
				Meningkatkan akses masyarakat dalam pengawasan pembangunan	√	√	√	√	√	√
				Penguatan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai basis kebijakan perencanaan pembangunan daerah		√	√			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Optimalnya sistem pengawasan daerah	Meningkatkan penyelenggaran pengawasan pembangunan daerah	Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	√	√				
				Peningkatan kapasitas sumber daya manusia auditor	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus di Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√
		Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur	Mengembangkan kemampuan kerja aparatur melalui studi lanjut (S2 dan S3), diklat dan bimtek	√	√	√	√	√	√
				Pengembangan kemampuan kerja aparatur melalui diklat penjenjangan	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan jabatan fungsional tertentu	√	√	√	√	√	√
		Meningkatnya kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Meningkakan penciptaan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Peningkatan kegiatan penelitian dan kajian inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah		√	√	√	√	
				Peningkatan penelitian teknologi tepat guna untuk mendukung perkembangan berbagai sektor	√	√	√	√	√	√

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				perekonomian lokal						
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan penyelenggaraan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pengembangan instrumen penganggaran daerah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah	√	√				
				Peningkatan disiplin pelaku guna penyusunan APBD yang tepat waktu dan berkualitas	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan pelayanan penatausahaan keuangan daerah	√	√	√			
				Pemantapan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual	√	√				
				Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan kapasitas fiskal daerah	Optimalisasi penggalian pendapatan asli daerah	√	√	√			
				Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD			√	√	√	√
				Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah			√			
				Peningkatan daya tawar dengan pemerintah pusat		√	√	√	√	

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				terkait dana perimbangan dan bagi hasil						
3.	Terwujudnya pengelolaan data dan informasi layanan publik yang terintegrasi dan berbasis IT	Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi dan pelayanan informasi publik berbasis IT	Meningkatnya jaringan komunikasi dan informasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah	Pengembangan jaringan komunikasi pemerintah daerah berbasis *e-government*	√	√	√			
				Penguatan fasiitasi pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi seluler	√	√	√	√	√	√
				Pengembangan inovasi pelayanan pemerintah daerah berbasis IT			√			
		Meningkatnya ketersediaan data sebagai basis kebijakan pembangunan daerah	Pengembangan data statistik dan informasi pembangunan daerah	Pengembangan data statistik pembangunan daerah		√				
				Penyusunan survei tematik dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah		√	√			
		Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan persandian daerah	Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan persandian daerah	Pengembangan sarana prasarana pengelolaan persandian daerah		√				
				Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di bidang persandian daerah	√	√	√	√	√	√
		Meningkatnya budaya baca masyarakat	Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat	Pengembangan koleksi buku perpustakaan daerah		√				
				Fasilitasi peningkatan perpustakaan sekolah menengah dan	√	√	√	√	√	√

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				kejuruan						
				Pembangunan perpusatakaan daerah					√	
		Meningkatnya tata kelola administrasi kearsipan daerah	Peningkatan penataan arsip daerah	Penataan arsip daerah		√				
				Digitalisasi arsip daerah		√	√			

6.1.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Kedua

Misi 2 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 adalah Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pada misi 2, terdapat 1 (satu) tujuan pembangunan yaitu Terwujudnya pengembangan dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Pada tujuan tersebut, terdapat 4 sasaran pembangunan yaitu: (1) Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, (2) Meningkatnya kelestarian pengelolaan hutan secara terpadu, (3) Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan wilayah dan penataan wilayah lingkup Provinsi Papua Barat, dan (4) Meningkatnya konservasi sumber daya alam di Provinsi Papua Barat. Keempat sasaran pada misi 2 tersebut memiliki strategi dan arah kebijakan masing-masing sesuai dengan urusan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

a. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup. Strategi pertama:** Peningkatan monitoring kualitas lingkungan, dengan **arah kebijakan,** (1) Pemantauan dan penilaian kualitas air sungai secara rutin, dan (2) Pemantauan dan penilaian kualitas udara secara rutin. **Strategi kedua:** Pengembangan penataan ruang yang berkelanjutan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, dengan **arah kebijakan**, (1) Konservasi dan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan, dan (2) Pengendalian pemanfaatan lahan yang dimanfaatkan secara berlebihan. **Strategi ketiga**: Meningkatkan SDM bidang pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, dengan **arah kebijakan,** (1) Peningkatan ketrampilan dan kapasitas SDM bidang pengendalian pemanfaatan SDA, dan (2) Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok cinta lingkungan.
b. **Urusan Pilihan Kehutanan. Strategi pertama:** Peningkatan pengelolaan kawasan hutan, dengan **arah kebijakan**, (1) Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan kehutanan, (2) Membangun dan mengembangkan informasi spasial kehutanan, dan (3) Melakukan identifikasi terhadap industri hasil kehutanan. **Strategi kedua:** Peningkatan pengawasan kawasan hutan, dengan **arah kebijakan,** (1) Meningkatkan jumlah polisi hutan, (2) Meningkatkan sarana dan prasarana patroli kehutanan, dan (3) Melakukan pembinaan dan pengingkatan ketrampilan bagi

polisi hutan. **Strategi ketiga**: Meningkatkan konservasi sumber daya alam, dengan **arah kebijakan**, (1) Identifikasi potensi sumber daya alam darat, (2) Identifikasi sumber daya alam yang langka atau hampir punah, (3) Identifikasi sumber daya alam yang mengalami kerusakan, (4) Rehabilitasi sumber daya alam yang mengalami kerusakan, dan (5) Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

c. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan**. **Strategi pertama**: Meningkatkan koordinasi bidang pertanahan, dengan **arah kebijakan**, (1) Membangun sistem koordinasi pertanahan. **Strategi kedua**: Meningkatkan dan menertibkan administrasi pertanahan, dengan **arah kebijakan**, (1) Menetapkan SOP administrasi pertanahan, (2) Melakukan identifikasi terhadap tanah-tanah ulayat, (3) Melakukan kajian terhadap batas wilayah antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat, dan (4) Melakukan kajian terhadap batas pengelolaan tanah ulayat. **Strategi ketiga**: Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dengan arah kebijakan, (1) Fasilitasi penyediaan lahan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni.

d. **Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan. Strategi utamanya adalah** Meningkatkan konservasi sumber daya alam, dengan **arah kebijakan**, (1) Identifikasi potensi sumber daya alam perairan, (2) Identifikasi sumber daya alam yang langka atau hampir punah, (3) Identifikasi sumber daya alam yang mengalami kerusakan, (4) Penataan dan pengelolaan kawasan konservasi laut, dan (5) Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kedua

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
Misi 2: Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan										
1.	Terwujudnya pengembangan dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	Peningkatan monitoring kualitas lingkungan	Pemantauan dan penilaian kualitas air sungai secara rutin		√	√	√	√	
				Pemantauan dan penilaian kualitas udara secara rutin		√	√	√	√	
			Pengembangan penataan ruang yang berkelanjutan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam	Konservasi dan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan	√	√	√	√	√	√
				Pengendalian pemanfaatan lahan yang dimanfaatkan secara berlebihan		√	√			
			Meningkatkan SDM bidang pengendalian pemanfaatan sumber daya alam	Peningkatan ketrampilan dan kapasitas SDM bidang pengendalian pemanfaatan SDA	√	√	√	√	√	√
				Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok cinta lingkungan	√	√	√	√	√	√
		Meningkatnya kelestarian pengelolaan hutan secara terpadu	Peningkatan pengelolaan kawasan hutan	Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan kehutanan		√				
				Membangun dan mengembangkan informasi spasial kehutanan		√	√			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Melakukan identifikasi terhadap industri hasil kehutanan		√				
			Peningkatan pengawasan kawasan hutan	Meningkatkan jumlah polisi hutan				√		
				Meningkatkan sarana dan prasarana patroli kehutanan		√	√	√	√	
				Melakukan pembinaan dan pengingkatan ketrampilan bagi polisi hutan	√	√	√	√	√	√
		Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan wilayah dan penataan wilayah lingkup Provinsi Papua Barat	Meningkatkan koordinasi bidang pertanahan	Membangun sistem koordinasi pertanahan		√	√			
			Meningkatkan dan menertibkan administrasi pertanahan	Menetapkan SOP administrasi pertanahan		√				
				Melakukan identifikasi terhadap tanah-tanah ulayat		√	√			
				Melakukan kajian terhadap batas wilayah antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat		√				
				Melakukan kajian terhadap batas pengelolaan tanah ulayat		√				
			Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	Fasilitasi penyediaan lahan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni	√	√	√			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Meningkatnya konservasi sumber daya alam di Provinsi Papua Barat	Meningkatkan konservasi sumber daya alam	Identifikasi potensi sumber daya alam darat dan perairan			√			
				Identifikasi sumber daya alam yang langka atau hampir punah				√		
				Identifikasi sumber daya alam yang mengalami kerusakan		√				
				Penataan dan pengelolaan kawasan konservasi laut		√	√			
				Rehabilitasi sumber daya alam yang mengalami kerusakan	√	√	√	√	√	√
				Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	√	√	√	√	√	√

6.1.3. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Ketiga

Misi 3 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 adalah Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada misi 3, terdapat 1 (satu) tujuan pembangunan yaitu Terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pada tujuan tersebut, terdapat 3 sasaran pembangunan yaitu: (1) Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan, (2) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dan (3) Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga. Ketiga sasaran pada misi 3 tersebut memiliki strategi dan arah kebijakan masing-masing sesuai dengan urusan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

a. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan. Strategi pertama:** Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan pendidikan melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan **arah kebijakan**, (1) Mendorong pencapaian SPM Bidang Pendidikan dan target afirmasi pendidikan khususnya untuk OAP. **Strategi kedua**: Peningkatan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah, dengan **arah kebijakan**, (1) Pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan perangkat pendukung penyelenggaraan pendidikan menengah, (2) Pengembangan pendidikan berpola asrama pendidikan menengah, (3) Peningkatan kuantitas dan kompetensi guru pendidikan menengah dan kejuruan, (4) Peningkatan manajemen pendidikan menengah, (5) Penyediaan bantuan pendidikan bagi siswa miskin, (6) Pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa Provinsi Papua Barat, (7) Penyelenggaraan pendidikan sekolah unggulan pendidikan menengah, (8) Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan spiritual dan budi pekerti yang baik, (9) Pengembangan sekolah kejuruan berbasis potensi sektor ungggulan daerah, dan (10) Pembangunan sekolah menengah dan kejuruan di wilayah pedalaman. **Strategi ketiga**: Peningkatan kualitas tenaga pendidik pada semua jenjang pendidikan, dengan **arah kebijakan**, (1) Peningkatan sertifikasi tenaga pengajar di semua jenjang pendidikan, (2) Pemberian insentif tenaga pengajar, dan (3) Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi pendidik. **Strategi keempat**:

Peningkatan kualitas substansi dan metode pembelajaran pada semua jenjang pendidikan, dengan **arah kebijakan**, (1) Peningkatan cakupan akreditasi sekolah, dan (2) Penerapan metode pembelajaran siswa yang inovatif mendasarkan pada teknologi informasi. **Strategi kelima**: Meningkatkan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal, dengan arah kebijakan, (1) Pemberdayaan tenaga pendidik untuk pendidikan non formal, dan (2) Pengembangan pendidikan keaksaraan.

b. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan. Strategi pertama:** Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan pelayanan kesehatan melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan **arah kebijakan**, (1) Peningkatan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dan Peningkatan Paradigma Sehat, khususnya untuk OAP. **Strategi kedua**: Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan khususnya RSUD rujukan provinsi, dengan **arah kebijakan**, (1) Pembangunan rumah sakit rujukan provinsi, dan (2) Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan provinsi. **Strategi ketiga**: Meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kesehatan provinsi, dengan **arah kebijakan**, (1) Pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas kesehatan masyarakat, dan (2) Pengembangan SDM kesehatan melalui peningkatan kapasitas. **Strategi keempat**: Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, dengan **arah kebijakan**, (1) Fasilitasi pemberian imunisasi bayi dan balita di kabupaten/kota, (2) Peningkatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu, (3) Fasilitasi pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, dan (4) Pengadaan alat permainan edukasi terkini bagi ibu dan anak. **Strategi kelima**: Peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, dengan **arah kebijakan**, (1) Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, (2) Pengadaan sarana dan prasarana promosi kesehatan masyarakat, (3) Peningkatan cakupan rujukan kesehatan bagi OAP. **Strategi keenam:** Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, serta peningkatan kondisi kesehatan lingkungan, dengan **arah kebijakan**, (1) Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, (2) Peningkatan sosialisasi pencegahan penyakit menular, (3) Peningkatan kesehatan lingkungan, (4) Peningkatan

sosialisasi kebijakan lingkungan sehat. **Strategi ketujuh**: Peningkatan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan Puskesmas, dengan **arah kebijakan**, (1) Pengembangan sarana prasarana dan kualitas pelayanan Puskesmas dan Pustu, dan (2) Pelaksanaan sertifikasi Puskesmas di Provinsi Papua Barat. **Strategi kedelapan**: Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan di tingkat Kabupaten/Kota, dengan **arah kebijakan**, (1) Peningkatan koordinasi ketersediaan obat dan perbekalan dengan kabupaten/kota, dan (2) Peningkatan pengawasan peredaran obat dan makanan.

c. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga**. **Strategi pertama**: Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan keloahragaan melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan **arah kebijakan**, (1) Sinkronisasi prestasi atlet cabang olahraga unggulan tiap kabupaten/kota, dan (2) Pengembangan klub olah raga di kabupaten/kota. **Strategi kedua**: Memfasilitasi peningkatan prestasi olah raga dan seni generasi muda, dengan **arah kebijakan**, (1) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, (2) Peningkataan pembinaan prestasi pemuda dan olahraga, dan (3) Pencarian bibit unggul atlet berprestasi daerah. **Strategi ketiga**: Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembagunan daerah, dengan **arah kebijakan**, (1) Memfasilitasi keikutsertaan pemuda dalam event lokal, regional dan nasional, dan (2) Penyuluhan dan sosialisasi tentang partisipasi pemuda dalam pembangunan. **Strategi keempat**: Peningkatan kualitas kebijakan kepemudaan dan olahraga, dengan **arah kebijakan**, (1) Peyediaan data potensi kepemudaaan provinsi, (2) Fasilitasi pembentukan dan pelaksanaaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi, dan (3) Sinkronisasi kebijakan pembangunan kepemudaan dengan pemberdayaan masyarakat kampung.

Tabel 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Ketiga

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
Misi 3: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan										
1.	Terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan pendidikan melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat	Mendorong pencapaian SPM Bidang Pendidikan dan target afirmasi pendidikan khususnya untuk OAP		√	√			
			Peningkatan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah	Pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan perangkat pendukung penyelenggaraan pendidikan menengah		√	√	√	√	
				Pengembangan pendidikan berpola asrama pendidikan menengah			√	√		
				Peningkatan kuantitas dan kompetensi guru pendidikan menengah dan kejuruan	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan manajemen pendidikan menengah		√	√			
				Penyediaan bantuan pendidikan bagi siswa miskin	√	√	√	√	√	√
				Pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa Provinsi Papua Barat	√	√	√	√	√	√

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Penyelenggaraan pendidikan sekolah unggulan pendidikan menengah		√	√	√	√	√
				Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan spiritual dan budi pekerti yang baik		√	√			
				Pengembangan sekolah kejuruan berbasis potensi sektor ungggulan daerah		√	√	√	√	
				Pembangunan sekolah menengah dan kejuruan di wilayah pedalaman		√	√	√	√	√
			Peningkatan kualitas tenaga pendidik pada semua jenjang pendidikan	Peningkatan sertifikasi tenaga pengajar di semua jenjang pendidikan		√	√	√	√	√
				Pemberian insentif tenaga pengajar	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi pendidik	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan kualitas substansi dan metode pembelajaran pada semua jenjang pendidikan	Peningkatan cakupan akreditasi sekolah	√	√	√	√	√	√
				Penerapan metode pembelajaran siswa yang inovatif		√	√			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				mendasarkan pada teknologi informasi						
				Peningkatan kerjasama bagi peningkatan kualitas pemberlajaran siswa		√				
			Meningkatkan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal	Pemberdayaan tenaga pendidik untuk pendidikan non formal		√	√	√	√	√
				Pengembangan pendidikan keaksaraan	√	√	√	√	√	√
		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan pelayanan kesehatan melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat	Peningkatan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dan Peningkatan Paradigma Sehat, khususnya untuk OAP		√				
			Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan khususnya RSUD rujukan provinsi	Pembangunan rumah sakit rujukan provinsi			√			√
				Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan provinsi			√	√	√	√
			Meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kesehatan provinsi	Pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas kesehatan masyarakat	√	√	√	√	√	√
				Pengembangan SDM kesehatan melalui peningkatan kapasitas	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Fasilitasi pemberian imunisasi bayi dan balita di kabupaten/kota	√	√	√	√	√	√

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Peningkatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu		√	√	√		
				Fasilitasi pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita	√	√	√	√	√	√
				Pengadaan alat permainan edukasi terkini bagi ibu dan anak		√	√	√		
			Peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi		√	√			
				Pengadaan sarana dan prasarana promosi kesehatan masyarakat		√	√	√	√	
				Peningkatan cakupan rujukan kesehatan bagi OAP	√	√	√	√	√	√
			Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, serta peningkatan kondisi kesehatan lingkungan	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan sosialisasi pencegahan penyakit menular		√	√			
				Peningkatan kesehatan lingkungan			√	√		
				Peningkatan sosialisasi kebijakan lingkungan		√	√			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				sehat						
			Peningkatan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan Puskesmas	Pengembangan sarana prasarana dan kualitas pelayanan Puskesmas dan Pustu	√	√	√	√	√	√
				Pelaksanaan sertifikasi Puskesmas di Provinsi Papua Barat		√	√	√		
			Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan di tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan koordinasi ketersediaan obat dan perbekalan dengan kabupaten/kota		√				
				Peningkatan pengawasan peredaran obat dan makanan		√	√	√		
		Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan keloahragaan melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat	Sinkronisasi prestasi atlet cabang olahraga unggulan tiap kabupaten/kota		√	√			
				Pengembangan klub olah raga di kabupaten/kota	√	√	√	√	√	√
			Memfasilitasi peningkatan prestasi olah raga dan seni generasi muda	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	√	√	√	√	√	√
				Peningkataan pembinaan prestasi pemuda dan olahraga	√	√	√	√	√	√
				Pencarian bibit unggul atlet berprestasi daerah	√	√	√	√	√	√

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
			Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembagunan daerah	Memfasilitasi keikutsertaan pemuda dalam event lokal, regional dan nasional	√	√	√	√	√	√
				Penyuluhan dan sosialisasi tentang partisipasi pemuda dalam pembangunan		√				
			Peningkatan kualitas kebijakan kepemudaan dan olahraga	Peyediaan data potensi kepemudaaan provinsi		√				
				Fasilitasi pembentukan dan pelaksanaaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi		√	√			
				Sinkronisasi kebijakan pembangunan kepemudaan dengan pemberdayaan masyarakat kampung		√	√			

6.1.4. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Keempat

Misi 4 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 adalah Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar. Pada misi 4, terdapat 1 (satu) tujuan pembangunan yaitu Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik di wilayah Provinsi Papua Barat. Pada tujuan tersebut, terdapat 3 sasaran pembangunan yaitu: (1) Meningkatnya interkoneksi antar wilayah, ketersediaan layanan dasar infrastruktur daerah dan kualitas pengelolaan tata ruang daerah, (2) Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Papua Barat, dan (3) Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dan ketersediaan energi baru dan terbarukan. Ketiga sasaran pada misi 4 tersebut memiliki strategi dan arah kebijakan masing-masing sesuai dengan urusan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

a. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**. **Strategi pertama**: Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah-wilayah ekonomi potensial dan membuka interkonektivitas wilayah terisolir di Provinsi Papua Barat, dengan **arah kebijakan**, (1) Percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan yang menpercepat konektivitas antar wilayah di Provinsi Papua Barat, dan (2) Penguatan kordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penanganan jalan-jalan nasional serta dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penanganan jalan kabupaten/kota. **Strategi kedua**: Dukungan fasilitasi percepatan penyediaan infrastruktur kawasan-kawasan pengembangan ekonomi khusus, dengan **arah kebijakan**, (1) Fasilitasi penyediaan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, dan (2) Fasilitasi penyediaan infrastruktur Kawasan Industri Petrokimia Teluk Bintuni. **Strategi ketiga**: Percepatan pembangunan perkotaan, dengan **arah kebijakan**, (1) Pemantapan Fasilitasi Program KOTAKU, dan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kota-kota. **Strategi keempat**: Percepatan pembangunan sanitasi yang memadai, dengan **arah kebijakan**, (1) Pembangunan dan pemeliharaan TPA Regional. **Strategi kelima**: Percepatan pembangunan infrastruktur pengairan, irigasi dan air bersih guna mendukung terciptanya produktivitas ekonomi wilayah, dengan **arah kebijakan**, (1) Pembangunan dan

pemeliharaan irigasi dalam kewenangan provinsi, (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional, dan (3) Pembangunan dan pemeliharaan drainase pada ruas ruas jalan provinsi. Strategi keenam: Percepatan Penataan wilayah Provinsi Papua Barat, dengan arah kebijakan, (1) Penguatan review perencanaan tata ruang Provinsi Papua Barat, (2) Fasilitasi penyelesaian RDTR kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, dan (3) Melakukan identifikasi dan tindak lanjut kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan ruang.

b. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan**. **Strategi utamanya adalah** Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan transportasi darat, laut dan udara, dengan **arah kebijakan**, (1) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan darat dalam lingkup kewenangan provinsi, (2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan laut dalam lingkup kewenangan provinsi, (3) Pemantapan fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan udara, dan (4) Pemantapan fasilitasi pembangunan transportasi kereta api Trans Papua.
c. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**. **Strategi pertama**: Percepatan penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, dengan **arah kebijakan**, (1) Pembangunan rumah layak huni bagi OAP, (2) Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana air bersih, (3) Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sanitasi, dan (4) Peningkatan sarana dan prasarana persampahan. **Strategi kedua**: Penataan pemukiman kumuh, dengan **arah kebijakan**, (1) Identifikasi permasalahan kawasan permukiman kumuh, dan (2) Penataan kawasan permukiman kumuh.
d. **Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral**. **Strategi pertama**: Meningkatkan elektrifikasi daerah, dengan **arah kebijaka**n, (1) Pembangunan pembangkit listrik, dan (2) Peningkatan penyaluran dan distribusi energi listrik. **Strategi kedua**: Mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi daerah, dengan **arah kebijakan**, (1) Penyusunan *grand design* pemanfaatan sumber daya alam untuk energi baru terbarukan, (2) Pembangunan energi listrik alternatif di kampung-kampung, dan (3) Mengembangkan upaya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan.

Tabel 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Keempat

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
Misi 4: Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar										
1.	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik di wilayah Provinsi Papua Barat	Meningkatnya interkoneksi antar wilayah, ketersediaan layanan dasar infrastruktur daerah dan kualitas pengelolaan tata ruang daerah	Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah-wilayah ekonomi potensial dan membuka interkonektivitas wilayah terisolir di Provinsi Papua Barat	Percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan yang menpercepat konektivitas antar wilayah di Provinsi Papua Barat	√	√	√	√	√	√
				Penguatan kordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penanganan jalan-jalan nasional serta dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penanganan jalan kabupaten/kota		√				
			Dukungan fasilitasi percepatan penyediaan infrastruktur kawasan-kawasan pengembangan ekonomi khusus	Fasilitasi penyediaan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong	√	√	√			
				Fasilitasi penyediaan infrastruktur Kawasan Industri Petrokimia Teluk Bintuni	√	√	√			
			Percepatan pembangunan perkotaan	Pemantapan Fasilitasi Program KOTAKU		√	√			
				Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kota-kota		√				
			Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan transportasi darat, laut dan udara	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan darat dalam lingkup kewenangan provinsi		√	√	√	√	√

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan laut dalam lingkup kewenangan provinsi		√				
				Pemantapan fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan udara		√	√	√		
				Pemantapan fasilitasi pembangunan transportasi kereta api Trans Papua	√	√				
			Percepatan pembangunan sanitasi yang memadai	Pembangunan dan pemeliharaan TPA Regional		√	√		√	√
			Percepatan pembangunan infrastruktur pengairan, irigasi dan air bersih guna mendukung terciptanya produktivitas ekonomi wilayah	Pembangunan dan pemeliharaan irigasi dalam kewenangan provinsi	√	√	√	√	√	√
				Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional		√	√	√	√	√
				Pembangunan dan pemeliharaan drainase pada ruas ruas jalan provinsi	√	√	√	√	√	√
			Percepatan Penataan wilayah Provinsi Papua Barat	Penguatan review perencanaan tata ruang Provinsi Papua Barat		√				
				Fasilitasi penyelesaian RDTR kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat		√	√			
				Melakukan identifikasi dan tindak lanjut kasus-kasus			√			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				pelanggaran pemanfaatan ruang						
		Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Papua Barat	Percepatan penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat	Pembangunan rumah layak huni bagi OAP	√	√	√	√	√	√
				Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana air bersih	√	√	√	√	√	√
				Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sanitasi	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	√	√	√	√	√	√
			Penataan pemukiman kumuh	Identifikasi permasalahan kawasan permukiman kumuh		√				
				Penataan kawasan permukiman kumuh		√	√	√		
		Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dan ketersediaan energi baru dan terbarukan	Meningkatkan elektrifikasi daerah	Pembangunan pembangkit listrik		√			√	
				Peningkatan penyaluran dan distribusi energi listrik	√	√	√	√	√	√
			Mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi daerah	Penyusunan *grand design* pemanfaatan sumber daya alam untuk energi baru terbarukan		√				
				Pembangunan energi listrik alternatif di kampung-kampung	√	√	√	√	√	√
				Mengembangkan upaya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	√	√	√	√	√	√

6.1.5. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Kelima

Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 adalah Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata. Pada misi 5, terkandung 2 (dua) tujuan pembangunan yaitu (1) Meningkatnya perekonomian daerah yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumberdaya lokal lintas sektor dan (2) Terwujudnya daya dukung dan daya tarik pariwisata terpadu berskala internasional di Provinsi Papua Barat. Pada tujuan pertama di misi 5, terdapat 6 sasaran pembangunan yaitu: (1) Meningkatnya daya saing investasi daerah, (2) Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja, (3) Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah, (4) Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar daerah, (5) Meningkatnya pengembangan dan daya saing industri pengolahan berbasis potensi daerah, dan (6) Optimalnya sinergitas pengembangan dan penataan kawasan terpadu di wilayah transmigrasi. Keenam sasaran pada tujuan pertama di misi 5 tersebut memiliki strategi dan arah kebijakan masing-masing sesuai dengan urusan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

a. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal. Strategi utamanya adalah** Peningkatan daya saing idan iklim investasi daerah, dengan **arah kebijakan**, (1) Percepatan fasilitasi penanaman modal, (2) Pengembangan sektor unggulan investasi daerah, (3) Pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi investor, dan (4) Percepatan pengurusan pelayanan perizinan investasi.
b. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja. Strategi utamanya adalah** Peningkatan kapasitas tenaga kerja, dengan **arah kebijakan**, (1) Pembangunan balai latihan kerja provinsi, (2) Fasilitasi prioritas penyerapan tenaga kerja OAP, (3) Percepatan penyelesaian hubungan industrial, dan (4) Peningkatan pengawasan tenaga kerja asing.
c. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Strategi utamanya adalah** Peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah, dengan **arah kebijakan**, (1) Fasilitasi Pemberdayaan UMKM yang bergerak di industri kreatif, (2) Peningkatan promosi produk industri kreatif provinsi, (3) Pengembangan database UMKM OAP, (4) Peningkatan kapasitas

kelembagaan UMKM, dan (5) Pemberian bantuan permodalan bagi UMKM OAP yang strategis.

d. **Urusan Pilihan Perdagangan**. **Strategi utamanya adalah** Peningkatan nilai perdagangan provinsi dan pengawasan distribusi perdagangan, dengan **arah kebijakan**, (1) Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, (2) Peningkatan promosi perdagangan di tingkat provinsi, (3) Pembinaan OAP yang terlibat dalam usaha perdagangan, (4) Peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua Barat, (5) Fasilitasi peningkatan perlindungan konsumen di seluruh kabupaten/kota, (6) Peningkatan pengawasan perdagangan antar provinsi, (7) Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi perdagangan provinsi, dan (8) Peningkatan pemantauan harga barang pokok di tingkat pasar provinsi.
e. **Urusan Pilihan Perindustrian**. **Strategi utamanya adalah** Meningkatkan pengembangan dan daya saing pelaku usaha industri kerakyatan, dengan **arah kebijaka**n, (1) Peningkatan kapasitas SDM OAP pelaku industri rakyat, (2) Penetapan rencana pembangunan industri provinsi, (3) Peningkatan pelaporan informasi industri provinsi, dan (4) Pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi pelaku industri rakyat.
f. **Urusan Pilihan Transmigrasi**. **Strategi utamanya adalah** Pengembangan dan penataaan kawasan terpadu wilayah transmigrasi lokal, dengan arah kebijakan, (1) Fasilitasi peningkatan kapasitas transmigran lokal melalui pelatihan usaha, (2) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung permukiman transmigrasi lokal, dan (3) Fasilitas pemberian bantuan modal usaha bagi transmigran lokal.

Tujuan kedua pada misi 5 adalah Terwujudnya daya dukung dan daya tarik pariwisata terpadu berskala internasional di Provinsi Papua Barat. Pada tujuan kedua di misi 5, terdapat 2 sasaran pembangunan yaitu: (1) Meningkatnya keterpaduan dan daya saing pariwisata daerah, dan (2) Meningkatnya pengembangan seni budaya dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat Provinsi Papua Barat dalam mendukung pariwisata daerah. Kedua sasaran pada tujuan kedua di misi 5 tersebut memiliki strategi dan arah kebijakan masing-masing sesuai dengan urusan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

a. **Urusan Pilihan Pariwisata. Strategi pertama**: Peningkatan daya saing pariwisata provinsi, dengan **arah kebijakan**, (1) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung menuju destinasi wisata, (2) Peningkatan kerjasama pengembangan dengan pelaku usaha pariwisata tingkat provinsi, (3) Fasilitasi peningkatan pengelolaan daya tarik wisata provinsi, (4) Peningkatan promosi pariwisata provinsi, dan (5) Peningkatan kerjasama pariwisata dengan daerah tujuan wisata nasional yang sudah maju. **Strategi kedua**: Peningkatan kapasitas SDM di bidang kepariwisataan, dengan **arah kebijakan**, (1) Peningkatan kapasitas pelaku usaha atau pekerja bidang pariwisata, (2) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat sadar wisata, dan (3) Fasilitasi usaha OAP berbasis ekonomi kreatif di sekitar kawasan wisata.

b. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan. Strategi pertama**: Pengembangan seni budaya daerah menjadi atraksi wisata daerah, dengan **arah kebijakan**, (1) Fasilitasi pengembangan festival di seluruh kabupaten/kota, dan (2) Peningkatan promosi kesenian daerah di tingkat nasional dan internasional. **Strategi kedua**: Pembinaan seni dan budaya tradisional, dengan **arah kebijakan**, (1) Fasilitasi pelestarian tradisi masyarakat di kabupaten/kota, (2) Fasilitasi pembinaan lembaga adat di tingkat provinsi, (3) Fasilitasi pembinaan kesenian yang berbasis budaya lokal di tingkat provinsi, (4) Fasilitas pembinaan sejarah lokal provinsi, (5) Peningkatan pengelolaan cagar budaya provinsi, dan (6) Pemberian penghargaan tokoh seni dan budaya provinsi.

Tabel 6.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kelima

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
Misi 5: Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata										
1.	Meningkatnya perekonomian daerah yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumberdaya lokal lintas sektor	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Peningkatan daya saing idan iklim investasi daerah	Percepatan fasilitasi penanaman modal	√	√	√	√	√	√
				Pengembangan sektor unggulan investasi daerah		√	√			
				Pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi investor	√	√	√	√	√	√
				Percepatan pengurusan pelayanan perizinan investasi		√	√			
				Peningkatan promosi investasi daerah		√	√	√		
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	Peningkatan kapasitas tenaga kerja	Pembangunan balai latihan kerja provinsi					√	
				Fasilitasi prioritas penyerapan tenaga kerja OAP		√	√	√		
				Percepatan penyelesaian hubungan industrial				√	√	
				Peningkatan pengawasan tenaga kerja asing		√	√			
		Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	Peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	Fasilitasi Pemberdayaan UMKM yang bergerak di industri kreatif	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan promosi produk industri kreatif provinsi	√	√	√	√	√	√
				Pengembangan database UMKM OAP		√				
				Peningkatan kapasitas kelembagaan UMKM	√	√	√	√	√	√

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Pemberian bantuan permodalan bagi UMKM OAP yang strategis	√	√	√	√	√	√
		Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar daerah	Peningkatan nilai perdagangan provinsi dan pengawasan distribusi perdagangan	Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan promosi perdagangan di tingkat provinsi			√	√		
				Pembinaan OAP yang terlibat dalam usaha perdagangan	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua Barat				√	√	
				Fasilitasi peningkatan perlindungan konsumen di seluruh kabupaten/kota	√					
				Peningkatan pengawasan perdagangan antar provinsi		√				
				Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi perdagangan provinsi					√	
				Peningkatan pemantauan harga barang pokok di tingkat pasar provinsi			√			
		Meningkatnya pengembangan dan daya saing industri pengolahan berbasis potensi daerah	Meningkatkan pengembangan dan daya saing pelaku usaha industri kerakyatan	Peningkatan kapasitas SDM OAP pelaku industri rakyat	√	√	√	√	√	√
				Penetapan rencana pembangunan industri provinsi		√				
				Peningkatan pelaporan informasi industri provinsi			√			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi pelaku industri rakyat	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan fasilitasi pengolahan industri berbahan baku lokal	√	√	√	√	√	√
		Optimalnya sinergitas pengembangan dan penataan kawasan terpadu di wilayah transmigrasi	Pengembangan dan penataaan kawasan terpadu wilayah transmigrasi lokal	Fasilitasi peningkatan kapasitas transmigran lokal melalui pelatihan usaha	√	√	√			
				Pengembangan sarana dan prasarana pendukung permukiman transmigrasi lokal	√	√	√	√		
				Fasilitas pemberian bantuan modal usaha bagi transmigran lokal	√	√	√			
2.	Terwujudnya daya dukung dan daya tarik pariwisata terpadu berskala internasional di Provinsi Papua Barat	Meningkatnya keterpaduan dan daya saing pariwisata daerah	Peningkatan daya saing pariwisata provinsi	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung menuju destinasi wisata	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan kerjasama pengembangan dengan pelaku usaha pariwisata tingkat provinsi		√				
				Fasilitasi peningkatan pengelolaan daya tarik wisata provinsi		√	√	√		
				Peningkatan promosi pariwisata provinsi		√	√		√	
				Peningkatan kerjasama pariwisata dengan daerah tujuan wisata nasional yang sudah maju	√			√		

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
			Peningkatan kapasitas SDM di bidang kepariwisataan	Peningkatan kapasitas pelaku usaha atau pekerja bidang pariwisata	√	√	√	√	√	√
				Fasilitasi pemberdayaan masyarakat sadar wisata	√	√	√	√	√	√
				Fasilitasi usaha OAP berbasis ekonomi kreatif di sekitar kawasan wisata	√	√	√	√	√	√
		Meningkatnya pengembangan seni budaya dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat Provinsi Papua Barat dalam mendukung pariwisata daerah	Pengembangan seni budaya daerah menjadi atraksi wisata daerah	Fasilitasi pengembangan festival di seluruh kabupaten/kota	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan promosi kesenian daerah di tingkat nasional dan internasional		√	√	√		
			Pembinaan seni dan budaya tradisional	Fasilitasi pelestarian tradisi masyarakat di kabupaten/kota		√	√	√	√	
				Fasilitasi pembinaan lembaga adat di tingkat provinsi		√	√			
				Fasilitasi pembinaan kesenian yang berbasis budaya lokal di tingkat provinsi			√	√	√	
				Fasilitas pembinaan sejarah lokal provinsi		√				
				Peningkatan pengelolaan cagar budaya provinsi		√	√	√	√	√
				Pemberian penghargaan tokoh seni dan budaya provinsi	√	√	√	√	√	√

6.1.6. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Keenam

Misi 6 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 adalah Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat. Pada misi 6, terdapat 1 (satu) tujuan pembangunan yaitu Terwujudnya kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tujuan tersebut, terdapat 1 sasaran pembangunan yaitu: (1) Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas. Sasaran pada misi 6 tersebut memiliki strategi dan arah kebijakan masing-masing sesuai dengan urusan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

a. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan. Strategi utamanya adalah** Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat provinsi yang berbasis penganekaragaman komoditas pangan lokal, dengan **arah kebijakan**, (1) Pengembangan komoditas pangan lokal (diversifikasi pangan) di tingkat provinsi, (2) Peningkatan monitoring dan evaluasi kabupaten/kota berketahanan pangan, dan (3) Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan.
b. **Urusan Pilihan Pertanian. Strategi pertama:** Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, serta fasilitasi pemasaran, dengan **arah kebijakan**, (1) Peningkatan kapasitas petani OAP melalui fasilitasi pelatihan dan pendampingan, (2) Fasilitasi bantuan sarana produksi pertanian, (3) Peningkatan penerapan teknologi pertanian baru di masyarakat, (4) Peningkatan kualitas dan pengawasan bibit tanaman, (5) Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani OAP, (6) Fasilitasi pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura lokal, (7) Fasilitasi peningkatan penyuluhan kepada petani OAP, dan (8) Fasilitasi pengolahan produk pertanian lokal. **Strategi kedua**: Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan dan fasilitasi pemasaran, dengan **arah kebijakan**, (1) Pengembangan produk tanaman perkebunan lokal, (2) Pengembangan luasan lahan perkebunan, (3) Fasilitasi pengolahan produk tanaman perkebunan lokal, (4) Fasilitasi penyediaan bibit unggul tanaman perkebunan, (5) Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani OAP tanaman perkebunan, (6) Fasilitasi penerapan teknologi terbaru produksi tanaman perkebunan, (7) Fasilitasi promosi usaha tanaman perkebunan bagi OAP, dan (8) Fasilitasi bantuan sarana produksi dan pemasaran

produk tanaman perkebunan. **Strategi ketiga:** Meningkatkan produksi hasil ternak dan fasilitasi pemasaran, dengan **arah kebijakan**, (1) Pengembangan peternakan dengan sistem *ranch,* (2) Fasilitasi bantuan bibit ternak unggul bagi OAP, (3) Peningkatan penerapan teknologi peternakan bagi peternak OAP, (4) Peningkatan kapasitas SDM peternakan melalui pelatihan dan pendampingan, (5) Fasilitasi pemasaran produk ternak lokal, (6) Fasilitasi promosi usaha peternakan bagi OAP, dan (7) Faslitasi ketersediaan obat dan vitamin ternak. **Strategi keempat:** Meningkatkan pengawasan dan sertifikasi kesehatan ternak, dengan **arah kebijakan**, (1) Peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak, (2) Fasilitasi penanggulangan penyakit ternak, (3) Fasilitasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, dan (4) Pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner tingkat provinsi.

c. **Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan. Strategi utamanya adalah** Peningkatan pemanfaatan potensi produksi perikanan tangkap dan budidaya, dengan **arah kebijakan**, (1) Sinkronisasi kebijakan kelautan dan perikanan antara pemerintah pusat dan provinsi, (2) Perumusan kebijakan pengembangan sektor kelautan yang terpadu, (3) Pengembangan perikanan secara terpadu dalam sistem bisnis perikanan berkelanjutan, (4) Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya, (5) Pengembangan industri pascapanen dan pengolahan hasil perikanan, (6) Penguatan kapasitas dan kelembagaan usaha perikanan untuk OAP, (7) Pengembangan kawasan perikanan terpadu di wilayah strategis, (8) Fasilitasi pengembangan perikanan budidaya air tawar, (9) Fasilitasi pengembangan perikanan budidaya laut, (10) Fasilitasi peningkatan pemasaran produk perikanan provinsi, dan (11) Peningkatan pengawasan sumber daya perairan kewenangan provinsi.

Tabel 6.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Keenam

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
Misi 6: Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat										
1.	Terwujudnya kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat provinsi yang berbasis penganekaragaman komoditas pangan lokal	Pengembangan komoditas pangan lokal (diversifikasi pangan) di tingkat provinsi		√	√	√		
				Peningkatan monitoring dan evaluasi kabupaten/kota berketahanan pangan		√				
				Pembentukan badan stabilitas pasokan pangan provinsi	√	√	√			
				Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan	√	√	√	√	√	√
			Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, serta fasilitasi pemasaran	Peningkatan kapasitas petani OAP melalui fasilitasi pelatihan dan pendampingan	√	√	√	√	√	√
				Fasilitasi bantuan sarana produksi pertanian		√	√	√		
				Peningkatan penerapan teknologi pertanian baru di masyarakat		√	√			
				Peningkatan kualitas dan pengawasan bibit tanaman	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani OAP			√	√	√	√
				Fasilitasi pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura lokal	√	√	√	√	√	√
				Fasilitasi peningkatan penyuluhan kepada petani OAP					√	√

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Fasilitasi pengolahan produk pertanian lokal	√	√	√	√	√	√
			Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan dan fasilitasi pemasaran	Pengembangan produk tanaman perkebunan lokal	√	√	√	√	√	√
				Pengembangan luasan lahan perkebunan		√	√			
				Fasilitasi pengolahan produk tanaman perkebunan lokal		√	√	√		
				Fasilitasi penyediaan bibit unggul tanaman perkebunan	√	√	√	√	√	√
				Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani OAP tanaman perkebunan		√	√	√		
				Fasilitasi penerapan teknologi terbaru produksi tanaman perkebunan				√	√	
				Fasilitasi promosi usaha tanaman perkebunan bagi OAP	√	√	√	√	√	√
				Fasilitasi bantuan sarana produksi dan pemasaran produk tanaman perkebunan	√	√	√			
			Meningkatkan produksi hasil ternak dan fasilitasi pemasaran	Pengembangan peternakan dengan sistem *ranch*	√	√	√	√	√	√
				Fasilitasi bantuan bibit ternak unggul bagi OAP		√	√			
				Peningkatan penerapan teknologi peternakan bagi peternak OAP	√	√	√	√	√	√

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Peningkatan kapasitas SDM peternakan melalui pelatihan dan pendampingan				√	√	
				Fasilitasi pemasaran produk ternak lokal	√	√	√			
				Fasilitasi promosi usaha peternakan bagi OAP		√	√	√		
				Faslitasi ketersediaan obat dan vitamin ternak		√	√			
			Meningkatkan pengawasan dan sertifikasi kesehatan ternak	Peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak	√	√	√	√	√	√
				Fasilitasi penanggulangan penyakit ternak		√				
				Fasilitasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan				√		
				Pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner tingkat provinsi		√				
			Peningkatan pemanfaatan potensi produksi perikanan tangkap dan budidaya	Sinkronisasi kebijakan kelautan dan perikanan antara pemerintah pusat dan provinsi		√				
				Perumusan kebijakan pengembangan sektor kelautan yang terpadu		√				
				Pengembangan perikanan secara terpadu dalam sistem bisnis perikanan berkelanjutan	√	√	√	√	√	√

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya				√	√	
				Pengembangan industri pascapanen dan pengolahan hasil perikanan	√	√	√	√	√	√
				Penguatan kapasitas dan kelembagaan usaha perikanan untuk OAP		√		√		√
				Pengembangan kawasan perikanan terpadu di wilayah strategis		√	√	√		
				Fasilitasi pengembangan perikanan budidaya air tawar		√	√	√		
				Fasilitasi pengembangan perikanan budidaya laut			√	√		
				Fasilitasi peningkatan pemasaran produk perikanan provinsi	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan pengawasan sumber daya perairan kewenangan provinsi		√	√	√		

6.1.7. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Ketujuh

Misi 7 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 adalah Memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial. Pada misi 7, terkandung 2 (dua) tujuan pembangunan yaitu (1) Terwujudnya masyarakat berketahanan sosial dan (2) Meningkatnya kinerja penataan penduduk dan pelayanan hak kependudukan masyarakat. Pada tujuan pertama di misi 7, terdapat 3 sasaran pembangunan yaitu: (1) Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, (2) Meningkatnya kapasitas masyarakat kampung, dan (3) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak. Ketiga sasaran pada tujuan pertama di misi 7 tersebut memiliki strategi dan arah kebijakan masing-masing sesuai dengan urusan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

a. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial. Strategi pertama**: Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan permasalahan kesejahteraan sosial melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan **arah kebijakan**, (1) Mendorong terwujudnya kabupaten/kota berketahanan sosial melalui peran koordinasi pembinaan dan pengawasan Provinsi Papua Barat dan (2) Peningkatan pengelolaan data fakir miskin di tingkat provinsi. **Strategi kedua**: Menurunkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial provinsi, dengan **arah kebijakan**, (1) Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi, (2) Fasilitasi penanganan terpadu penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, (3) Pengembangan jaminan sosial bagi fakir miskin khususnya OAP, dan (4) Fasilitasi penyediaan sarana sosial seperti panti sosial yang dimiliki oleh provinsi. **Strategi ketiga**: Revitalisasi dan optimalisasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah dan SDM yang menangani kesejahteraan sosial, dengan **arah kebijakan**, (1) Revitalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, (2) Penguatan koordinasi lintas OPD terkait perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan, (3) Penguatan TKPKD tingkat kabupaten/kota, (4) Monitoring evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, (5) Penguatan kelembagaan di tingkat lokal skala kabupaten/kota yang menangani

masalah kesejahteraan sosial, (6) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penananganan masalah kesejahteraan kesejahteraan sosial, (7) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga terdidik dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, dan (8) Pemenuhan sarana prasarana pendukung tenaga yang menangani PMKS. **Strategi keempat**: Perluasan aksesibilitas penanganan kesejahteraan sosial yang terpadu dan konprehensif ke arah pemberdayaan masyarakat berketahanan sosial, dengan **arah kebijakan**, (1) Perumusan desain program bantuan berkesinambungan dan terintegrasi lintas sektoral berbasis wilayah kabupaten/kota, (2) Pemberian bantuan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat, (3) Monitoring evaluasi pelaksanaan program bantuan dan pemberdayaan sosial masyarakat, (4) Inventarisir Komunitas Adat Terpencil di tiap kabupaten/kota, (5) Penguatan dan pemberdayaan KAT dalam pembangunan wilayah, (6) Pembangunan kawasan KAT, (7) Pemberian bantuan dan akses pemenuhan kebutuhan sosial di wilayah KAT, dan (8) Pemberdayaan kelompok dalam KAT sesuai potensi dan sumberdaya lokal wilayah.

b. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Strategi pertama:** Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat kampung, dengan **arah kebijakan**, (1) Fasilitasi pemberdayaan potensi ekonomi kampung, (2) Fasilitasi penumbuhkembangan kelompok usaha bersama di kampung, dan (3) Fasilitasi pemasaran produk-produk potensial di kampung. **Strategi kedua**: Fasilitasi penataan kelembagaan kampung, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, dengan **arah kebijakan**, (1) Penetapan susunan kelembagaan pemerintahan kampung berdasarkan hukum adat, (2) Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat di tingkat provinsi, (3) Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang begerak di bidang pembedayaan kampung tingkat provinsi, dan (4) Fasilitasi pemberian bantuan pembangunan untuk kampung. **Strategi ketiga**: Penguatan dan pendampingan aparatur kampung, dengan **arah kebijakan**, (1) Pembinaan aparatur kampung secara periodik melalui kabupaten/kota dan (2) Fasilitasi penyiapan tenaga pendamping administrasi pemerintahan kampung dari kabupaten/kota. **Strategi keempat**: Sinergitas program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kawasan kampung di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,

dengan **arah kebijakan**, (1) Fasilitasi pembukaan akses informasi dan komunikasi antar wilayah dan (2) Fasilitasi pembangunan kawasan perkampungan terpadu antar wilayah kabupaten/kota. **Strategi kelima**: Optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Desa bagi usaha produktif masyarakat di tingkat kampung, dengan **arah kebijakan**, (1) Fasilitasi perumusan pola kebijakan pembentukan BUMDes di masing-masing kabupaten/kota, (2) Pembinaan pengembangan kelembagaan BUMDes melalui Kabupaten/kota, (3) Pembinaan alokasi Dana Desa di tingkat kabupaten/kota, (4) Fasilitasi penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah, (5) Monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa di masing-masing kabuapten/kota, (6) Pembinaan dan penyiapan Kampung Mandiri melalui penguatan kelembagaan di masing-masing kabupaten/kota, dan (7) Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Orang Asli Papua melalui masing-masing kabupaten/kota.

c. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**. **Strategi pertama**: Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan pemberdaayan perempuan dan pelindungan anak melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan **arah kebijakan**, (1) Mendorong terwujudnya kabupaten/kota responsif gender dan ramah anak. **Strategi kedua**: Meningkatkan pastisipasi perempuan dalam pembangunan daerah, dengan **arah kebijakan**, (1) Peningkatan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat provinsi, (2) Peningkatan pemberdayaan perempuan pada bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi, dan (3) Fasilitasi penguatan dan pengembagan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi. **Strategi ketiga**: Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan peningkatan kualitas keluarga, dengan **arah kebijakan**, (1) Fasilitasi pembinaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, (2) Fasilitasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, (3) Pembentukan Unit Layanan Terpadu di bidang perlindungan perempuan di masing-masing kabupaten/kota, dan (4) Fasilitasi penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan KDRT di kabupaten/kota. **Strategi keempat**: Meningkatkan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak

anak, dengan **arah kebijakan**, (1) Fasilitasi pembinaan pencegahan kekerasan terhadap anak, (2) Fasilitasi layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat provinsi, (3) Pembangunan ruang terbuka terpadu ramah anak, dan (4) Peningkatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha di tingkat provinsi.

Tujuan kedua pada misi 7 adalah Meningkatnya kinerja penataan penduduk dan pelayanan hak kependudukan masyarakat. Pada tujuan kedua di misi 7, terdapat 2 sasaran pembangunan yaitu: (1) Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana dan (2) Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat. Kedua sasaran pada tujuan kedua di misi 7 tersebut memiliki strategi dan arah kebijakan masing-masing sesuai dengan urusan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

a. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**. **Strategi pertama**: Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan pelayanan KB melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan **arah kebijakan**, (1) Mendorong peningkatan peran kabupaten/kota dalam pengendalian penduduk, (2) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, dan (3) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di tingkat provinsi. **Strategi kedua**: Penguatan kebijakan pengendalian penduduk dan KB melalui data base terintegrasi dan pemberdayaan masyarakat, dengan **arah kebijakan**, (1) Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan KB seseuai kearifan budaya lokal, (2) Perumusan definisi kependudukan khususnya berkaitan dengan Orang Asli Papua, (3) Pengembangan data base kependudukan Orang Asli Papua, (4) Integrasi data kependudukan Papua Barat, (5) Fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, (6) Peningkatan pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan (7) Peningkatan sosialisasi gerakan masyarakat menuju sehat sejahtera.

b. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Strategi utamanya adalah** Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis partisipasi masyarakat, dengan **arah kebijakan**, (1) Mendorong terwujudnya kabupaten/kota tertib administrasi kependudukan, (2) Peningkatan sosialisasi gerakan masyarakat peduli administrasi kependudukan, (3) Penyusunan profil kependudukan provinsi, (4) Peningkatan koordinasi pelayanan administrasi kependudukan kabupaten/kota, dan (5) Peningkatan monitoring dan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan kabupaten/kota.

Tabel 6.7 Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Ketujuh

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
Misi 7: Memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial										
1.	Terwujudnya masyarakat berketahanan sosial	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan permasalahan kesejahteraan sosial melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat	Mendorong terwujudnya kabupaten/kota berketahanan sosial melalui peran koordinasi pembinaan dan pengawasan Provinsi Papua Barat		√				
				Peningkatan pengelolaan data fakir miskin di tingkat provinsi		√				
			Menurunkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial provinsi	Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi		√	√	√		
				Fasilitasi penanganan terpadu penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial		√	√			
				Pengembangan jaminan sosial bagi fakir miskin khususnya OAP		√	√	√		
				Fasilitasi penyediaan sarana sosial seperti panti sosial yang dimiliki oleh provinsi		√	√	√	√	
			Revitalisasi dan optimalisasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah dan SDM yang menangani	Revitalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah		√				
				Penguatan koordinasi lintas OPD terkait perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan		√	√			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
			kesejahteraan sosial	Penguatan TKPKD tingkat kabupaten/kota		√	√			
				Monitoring evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi		√	√	√	√	
				Penguatan kelembagaan di tingkat lokal skala kabupaten/kota yang menangani masalah kesejahteraan sosial		√	√			
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penananganan masalah kesejahteraan kesejahteraan sosial		√	√	√	√	√
				Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga terdidik dalam menangani masalah kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√	√
				Pemenuhan sarana prasarana pendukung tenaga yang menangani PMKS		√	√	√	√	
			Perluasan aksesibilitas penanganan kesejahteraan sosial yang terpadu dan konprehensif ke arah pemberdayaan masyarakat	Perumusan desain program bantuan berkesinambungan dan terintegrasi lintas sektoral berbasis wilayah kabupaten/kota	√	√				
				Pemberian bantuan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat		√	√	√	√	√

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
			berketahanan sosial	Monitoring evaluasi pelaksanaan program bantuan dan pemberdayaan sosial masyarakat		√	√			
				Inventarisir Komunitas Adat Terpencil di tiap kabupaten/kota	√	√				
				Penguatan dan pemberdayaan KAT dalam pembangunan wilayah			√	√	√	
				Pembangunan kawasan KAT		√	√	√	√	√
				Pemberian bantuan dan akses pemenuhan kebutuhan sosial di wilayah KAT		√	√	√	√	√
				Pemberdayaan kelompok dalam KAT sesuai potensi dan sumberdaya lokal wilayah		√	√	√	√	
		Meningkatnya kapasitas masyarakat kampung	Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat kampung	Fasilitasi pemberdayaan potensi ekonomi kampung	√	√	√	√	√	√
				Fasilitasi penumbuhkembangan kelompok usaha bersama di kampung	√	√	√	√	√	√
				Fasilitasi pemasaran produk-produk potensial di kampung				√	√	
			Fasilitasi penataan kelembagaan kampung, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Penetapan susunan kelembagaan pemerintahan kampung berdasarkan hukum adat		√	√			
				Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat di tingkat provinsi		√	√	√		

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang begerak di bidang pembedayaan kampung tingkat provinsi			√	√	√	√
				Fasilitasi pemberian bantuan pembangunan untuk kampung	√	√	√	√	√	√
			Penguatan dan pendampingan aparatur kampung	Pembinaan aparatur kampung secara periodik melalui kabupaten/kota	√	√	√	√	√	√
				Fasilitasi penyiapan tenaga pendamping administrasi pemerintahan kampung dari kabupaten/kota			√	√		
			Sinergitas program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kawasan kampung di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Fasilitasi pembukaan akses informasi dan komunikasi antar wilayah	√	√	√			
				Fasilitasi pembangunan kawasan perkampungan terpadu antar wilayah kabupaten/kota			√	√	√	
			Optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Desa bagi usaha produktif masyarakat di tingkat kampung	Fasilitasi perumusan pola kebijakan pembentukan BUMDes di masing-masing kabupaten/kota		√	√			
				Pembinaan pengembangan kelembagaan BUMDes melalui Kabupaten/kota	√	√	√			
				Pembinaan alokasi Dana Desa di tingkat kabupaten/kota		√				

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Fasilitasi penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah		√	√			
				Monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa di masing-masing kabuapten/kota		√	√	√		
				Pembinaan dan penyiapan Kampung Mandiri melalui penguatan kelembagaan di masing-masing kabupaten/kota			√			
				Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Orang Asli Papua melalui masing-masing kabupaten/kota	√	√	√	√	√	√
		Meningkatnya partisipasi perempuan dalam perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan pemberdaayan perempuan dan pelindungan anak melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat	Mendorong terwujudnya kabupaten/kota responsif gender dan ramah anak	√	√				
			Meningkatkan pastisipasi perempuan dalam	Peningkatan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat provinsi	√	√	√			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
			pembangunan daerah	Peningkatan pemberdayaan perempuan pada bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi	√	√	√			
				Fasilitasi penguatan dan pengembagan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi	√	√				
			Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan peningkatan kualitas keluarga	Fasilitasi pembinaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	√	√	√			
				Fasilitasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender				√	√	√
				Pembentukan Unit Layanan Terpadu di bidang perlindungan perempuan di masing-masing kabupaten/kota		√	√	√		
				Fasilitasi penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan KDRT di kabupaten/kota					√	√
			Meningkatkan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak	Fasilitasi pembinaan pencegahan kekerasan terhadap anak				√	√	√
				Fasilitasi layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat provinsi	√	√	√			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Pembangunan ruang terbuka terpadu ramah anak		√	√	√	√	√
				Peningkatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha di tingkat provinsi		√	√			
2.	Meningkatnya kinerja penataan penduduk dan pelayanan hak kependudukan masyarakat	Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana	Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan pelayanan KB melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat	Mendorong peningkatan peran kabupaten/kota dalam pengendalian penduduk	√	√	√	√	√	√
				Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	√	√				
				Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di tingkat provinsi	√	√				
			Penguatan kebijakan pengendalian penduduk dan KB melalui data base terintegrasi dan pemberdayaan masyarakat	Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan KB seseuai kearifan budaya lokal	√	√				
				Perumusan definisi kependudukan khususnya berkaitan dengan Orang Asli Papua	√	√				
				Pengembangan data base kependudukan Orang Asli Papua		√	√	√		

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Integrasi data kependudukan Papua Barat		√				
				Fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	√	√				
				Peningkatan sosialisasi gerakan masyarakat menuju sehat sejahtera		√				
		Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat	Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis partisipasi masyarakat	Mendorong terwujudnya kabupaten/kota tertib administrasi kependudukan	√	√				
				Peningkatan sosialisasi gerakan masyarakat peduli administrasi kependudukan		√				
				Penyusunan profil kependudukan provinsi	√	√				
				Peningkatan koordinasi pelayanan administrasi kependudukan kabupaten/kota	√	√				
				Peningkatan monitoring dan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan kabupaten/kota			√	√		

6.1.8. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Kedelapan

Misi 8 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 adalah Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah. Pada misi 8, terdapat 1 (satu) tujuan pembangunan yaitu Meningkatnya stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat Provinsi Papua Barat. Pada tujuan tersebut, terdapat 2 sasaran pembangunan yaitu: (1) Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dan (2) Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Sasaran pada misi 8 tersebut memiliki strategi dan arah kebijakan masing-masing sesuai dengan urusan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

a. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**. **Strategi pertama**: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban daerah, dengan **arah kebijakan**, (1) Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam meningkatkan ketentraman dan kertiban daerah, (2) Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kesadaran dan toleransi antar suku, ras, dan agama, (3) Optimalisasi peran FKUB dalam menjaga ketentraman dan ketertiban daerah, (4) Peningkatan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pesta demokrasi lokal dan nasional, (5) Fasilitasi pembinaan kesadaran bela negara di masyarakat, (6) Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat, (7) Optimalisasi penegakan peraturan daerah, dan (8) Peningkatan kapasitas SDM aparataur penegakan peraturan daerah. **Strategi kedua**: Meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah, dengan arah kebijakan, (1) Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana di tingkat provinsi, (2) Fasilitasi peningkatan SDM penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota, (3) Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana daerah, (4) Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana daerah, (5) Fasilitasi sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, (6) Penyusunan peta risiko rawan bencana alam di tingkat provinsi, (7) Penyusunan *grand design* penanggulangan bencana daerah, (8) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah, dan (9) Fasilitasi rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi terhadap bencana.

Tabel 6.8 Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kedelapan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
Misi 8: Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah										
1.	Meningkatnya stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat Provinsi Papua Barat	Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban daerah	Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam meningkatkan ketentraman dan kertiban daerah		√	√			√
				Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kesadaran dan toleransi antar suku, ras, dan agama	√	√	√			√
				Optimalisasi peran FKUB dalam menjaga ketentraman dan ketertiban daerah	√	√				
				Peningkatan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pesta demokrasi lokal dan nasional	√	√	√		√	√
				Fasilitasi pembinaan kesadaran bela negara di masyarakat	√	√				
				Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat		√	√			
				Optimalisasi penegakan peraturan daerah			√	√		
				Peningkatan kapasitas SDM aparataur penegakan peraturan daerah	√	√	√	√	√	√
		Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dan	Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana di tingkat provinsi	√	√	√	√	√	√

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
			masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah	Fasilitasi peningkatan SDM penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota	√	√	√			
				Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana daerah	√	√	√	√	√	√
				Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana daerah	√	√	√	√	√	√
				Fasilitasi sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	√	√	√			
				Penyusunan peta risiko rawan bencana alam di tingkat provinsi	√	√				
				Penyusunan *grand design* penanggulangan bencana daerah		√	√			
				Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah	√	√				√
				Fasilitasi rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi terhadap bencana		√			√	

6.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam program merupakan penjabaran dari misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Dengan memperhatikan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka hal tersebut menjadi pedoman bagi penetapan program pembangunan daerah. Melalui rumusan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam pencapaian setiap misi pembangunan.

Program pembangunan daerah merupakan program-program yang secara langsung menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah, sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Program yang dimaksud merupakan penerjemahan program unggulan yang merupakan janji kampanye kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Di dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, diuraikan serangkaian agenda prioritas dan program unggulan yang diselaraskan dengan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Program pembangunan sebagai agenda prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat dalam 5 (lima) tahun ke depan menitikberatkan pada pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Program pembangunan pada masing-masing misi yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dapat dikelompokkan menjadi delapan kelompok program pembangunan sesuai dengan masing-masing misi tersebut yaitu: 1) Reformasi Birokrasi; 2) Pembangunan Berkelanjutan; 3) Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan; 4) Pembangunan Infrastruktur Dasar; 5) Peningkatan Daya Saing Ekonomi; 6) Kedaulatan Pangan; 7) Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Berketahanan Sosial; dan 8) Peningkatan Kondusivitas Daerah. Penjelasan mengenai masing-masing program pembangunan tersebut diuraikan sebagai berikut;

1. Program pembangunan reformasi birokrasi didorong untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pada misi pertama, yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*) serta otonomi khusus yang efektif. Program pembangunan reformasi birokrasi diarahkan untuk: (a) menciptakan hubungan saling percaya

(*trust*) antara aparatur dan masyarakat; (b) menonjolkan keteladanan pemimpin yang bersih dan berwibawa; (c) berorientasi pada hasil kerja dan kinerja aparatur; (d) pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi; (e) pelibatan *civil society* dalam pengawasan; (f) revitalisasi nilai dan budaya kerja yang jujur dan bersih di setiap jenjang birokrasi; (g) pengelolaan dana APBD, dana otonomi khusus, dana bagi hasil dan dana lainnya secara transparan dan akuntabel; (h) Pengelolaan dana otonomi khusus sebesar 90% untuk diserahkan kepada kabupaten/kota secara tepat sasaran; dan (i) mengedepankan pengelolaan data dan informasi publik yang menggunakan kemajuan teknologi.

2. Program pembangunan berkelanjutan didorong untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pada misi kedua, yaitu Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Program pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk: (a) penguatan instrumen konservasi tidak hanya dalam bentuk perlindungan keanekaragaman biota dan habitat serta kekayaan alam, tapi juga melalui penguatan '*law enforcement*' terhadap setiap bentuk pemanfaatan SDA secara ilegal (*illegal logging, illegal mining* dan *illegal fishing*); (b) penciptaan nilai ekonomi dari perlindungan biota dan habitat dengan mendorong investasi rendah karbon (*low carbon investment*); (c) mendorong dilakukannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis di berbagai kawasan industri untuk mengelola dampak kumulatif terhadap daya dukung lingkungan setempat; (d) meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan berbasiskan adat istiadat dan kearifan lokal (sistem sasi); (e) penguatan administrasi tapal batas antar provinsi dan kabupaten/kota; dan (f) penguatan administrasi dan pemanfaatan tanah adat yang menjamin pemenuhan hak adat dalam pembangunan dan investasi.
3. Program pembangunan penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan didorong untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pada misi ketiga, yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. Program pembangunan penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk: (a) peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar untuk semua lapisan masyarakat; melalui peningkatan kuantitas, kualitas dan

persebaran tenaga pendidik serta pemantapan kesejahteraan guru; (b) optimalisasi pemanfaatan dana pendidikan 20% sesuai amanat undang-undang; (c) memperkuat pendidikan menengah yang berfokus kepada pemantapan ilmu eksakta dan bahasa Inggris, untuk menangkap peluang beasiswa pendidikan tinggi di dalam dan di luar negeri; (d) menjadikan Provinsi Papua Barat sebagai pusat pengembangan keahlian bidang teknik dengan memperkuat institusi perguruan tinggi yang sudah ada; (e) menciptakan wilayah Papua Barat sebagai 'Provinsi Bebas Malaria'; (f) meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan sampai ke pelosok kampung lewat pembangunan infrastruktur kesehatan dasar, puskesmas keliling dan program pos obat terpadu; (g) meningkatkan prestasi di bidang kepemudaan dan olahraga, terutama terkait potensi lokal di Provinsi Papua Barat; dan (h) mendorong keterlibatan Orang Asli Papua dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga.

4. Program pembangunan infrastruktur dasar didorong untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pada misi keempat, yaitu Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Dasar. Program pembangunan infrastruktur dasar diarahkan untuk: (a) menggalakkan pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangkit listrik, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain untuk memperkuat akses ekonomi dan pelayanan publik; (b) mengoptimalkan pengembangan wilayah sesuai dengan peruntukan kawasan secara terpadu; (c) memanfaatkan sumberdaya gas alam (LNG) untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal; (d) membangun sentra-sentra industri ikutan (*midstream*) di wilayah Papua Barat terutama di sekitar kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus; (e) menyediakan sarana prasarana lingkungan yang sehat bagi masyarakat khususnya di kawasan strategis; (f) mendorong pengembangan perumahan dan permukiman berbasis lingkungan bagi masyarakat terutama Orang Asli Papua; dan (g) memperkuat aksesibilitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5. Program pembangunan peningkatan daya saing ekonomi didorong untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pada misi kelima, yaitu Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah Berbasis Pariwisata. Program pembangunan peningkatan daya saing ekonomi diarahkan untuk: (a)

menjadikan Papua Barat sebagai provinsi ramah investasi bagi investor dalam dan luar negeri; (b) menjadikan investasi sebagai stimulan pembangunan ekonomi Papua Barat, terutama dalam menyongsong berakhirnya otonomi khusus pada tahun 2021; (c) Penyiapan tenaga kerja produktif khususnya yang berasal dari Orang Asli Papua untuk mampu bersaing di dunia kerja; (d) mendorong industri kreatif di Papua Barat dengan memberikan insentif dan kesempatan pengelolaan usaha berbasis masyarakat dan UMKM; (e) mendorong akses perdagangan dengan membuka jalur pemasaran bagi produk unggulan daerah di tingkat regional, nasional dan internasional; (f) re-orientasi kebijakan yang integratif kepariwisataan di Papua Barat; (g) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kepariwisataan; (h) peningkatan kapasitas insan kepariwisataan; (i) optimalisasi promosi dan ekspose potensi wisata Papua Barat; dan (j) penyediaan tenaga ahli dan terampil dalam bidang manajemen kepariwisataan; membangun jaringan wisata internasional; dan kemudahan investasi dibidang kepariwisataan.

6. Program pembangunan kedaulatan pangan didorong untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pada misi keenam, yaitu Membangun Pertanian yang Mandiri dan Berdaulat. Program pembangunan kedaulatan pangan diarahkan untuk: (a) memperkuat pertanian berbasis komoditas lokal dengan mencegah erosi genetik jenis endemik, serta mempromosikan varietas unggul lokal guna meningkatkan kesejahteraan petani lokal; (b) menempatkan sektor pertanian maju sebagai andalan perekonomian rakyat dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan sehingga mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak bagi petani lokal; (c) meningkatkan keamanan dan kedaulatan pangan lewat pengembangan komoditas pangan lokal sagu dan umbi-umbian; (d) meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya laut; (e) optimalisasi produksi perikanan tangkap dan budidaya; dan (f) penciptaan nilai tambah produksi perikanan.
7. Program pembangunan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat berketahanan sosial didorong untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pada misi ketujuh, yaitu Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Berketahanan Sosial.

Program pembangunan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat berketahanan sosial diarahkan untuk: (a) menekan angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan fasilitasi program bantuan, pemberdayaan, dan pendampingan di tiap kabupaten/kota; (b) meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal khususnya Orang Asli Papua; (c) mendorong pertumbuhan ekonomi kampung berbasis potensi dan sumberdaya lokal melalui BUMDes; (d) memberikan akses dan mendorong peran serta masyarakat melalui kelompok produktif khususnya kelompok produktif yang diperuntukan bagi Orang Asli Papua; (e) meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan (pendidikan, kesehatan, ekonomi); (f) meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan; (g) membentuk Unit Layanan Terpadu di tiap kabupaten/kota berkaitan dengan permasalahan sosial, perlindungan perempuan dan anak; (h) menghapus berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak; (i) meningkatkan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan seksual; (j) memberikan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam upaya penyelesaian permasalahan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak; (k) meningkatkan akses pelayanan KB dan peningkatan peran kaum laki-laki ber KB; (l) pembinaan periodik terhadap sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di kabupaten/kota; dan (m) mendorong peran dan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis masyarakat;

8. Program pembangunan peningkatan kondusivitas daerah didorong untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pada misi kedelapan, yaitu Memperkuat Kerukunan Umat Beragama dan Kondusivitas Daerah. Program pembangunan peningkatan kondusivitas daerah diarahkan untuk: (a) menjaga dan menjamin rasa aman bagi umat beragama dalam menjalankan aktivitas keagamaannya; (b) memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk menyamakan pandangan terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (c) membumikan pemahaman agama keluarga, yang eksis dalam kehidupan masyarakat adat di Papua Barat; (d) meningkatkan peran tokoh-tokoh agama untuk berperan aktif

sebagai agen perubahan dalam membina umat (e) memfasilitasi komunikasi lintas kultur untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling menghormati; (f) fasilitasi pembinaan, pengawasan, dan penguatan kapasitas aparatur untuk menciptakan kondisi tenteram, tertib, dan aman di masing-masing kabupaten/kota; (g) memperkuat sinergitas penanganan bencana dengan fasilitasi koordinasi antar pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di wilayah Papua Barat; (h) menyiapkan bantuan dan fasilitasi penanganan bencana; dan (i) penguatan kapasitas di masing-masing kabupaten/kota dalam rangka menurunkan Indeks Risiko Bencana di Papua Barat.

Selanjutnya berbagai kelompok program pembangunan tersebut akan dirimuuskan untuk pencapaian misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Provinsi Papua Barat dalam periode 2017-2022. Percepatan program pembangunan tersebut dirumuskan melalui agenda program prioritas dari setiap misi, tujuan, dan sasaran yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 6.9 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (good and clean governance) serta otonomi khusus yang efektif																	
			Tujuan 1: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat																	
			Sasaran 1: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat																	
			Program Peraturan Perundang-Undangan Otonomi Khusus	Persentase ketersediaan Perdasus sesuai mandat undang-undang otonomi khusus	n.a	0%	886,190,000	30%	1,772,380,000	50%	1,860,999,000	70%	1,954,048,950	80%	2,051,751,398	100%	2,154,338,967	100%	2,154,338,967	**Biro Adminsitrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus**
				Persentase ketersediaan Perdasi sesuai mandat undang-undang otonomi khusus	n.a	0%		30%		50%		70%		80%		100%		100%		
				Kinerja pelaksanaan program dalam regulasi terkait otonomi khusus	n.a	0%		50%		60%		60%		90%		100%		100%		
				Persentase Kebijakan Otsus yang dilaksanakan	n.a	0%		35%		50%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Penyusunan Bahan Kebijakan Otsus yang diselesaikan	n.a	0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Perencanaan dan Pembangunan Bidang Otonomi Khusus (Otsus)	Cakupan realisasi perencanaan program otonomi khusus	100%	100%	9,002,726,000	100%	11,765,204,401	100%	11,465,518,582	100%	13,121,516,575	100%	12,792,616,746	100%	16,928,490,879	100%	16,928,490,879	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
				Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan terkait otonomi khusus	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Tujuan 2: Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan, sinergitas kebijakan pembangunan, dan pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus																	
			Sasaran 2: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah																	
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Ketersediaan mekanisme penyusunan produk hukum	Ada	Ada	8,542,170,900	Ada	9,027,319,500	Ada	9,619,468,930	Ada	10,258,869,749	Ada	10,745,596,691	Ada	11,368,802,226	Ada	11,368,802,226	**Sekretariat Daerah**
				Persentase Raperda yang disetujui DPRD dalam Prolegda	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Peningkatan Kapasitas Koordinasi Pembangunan Daerah	Persentase Kabupaten/ Kota Tertib Data Pembangunan Daerah yang bersumber APBD/APBN	100%	100%	2,400,000,000	100%	1,450,000,000	100%	1,522,500,000	100%	1,598,625,000	100%	1,678,556,250	100%	1,762,484,063	100%	1,762,484,063	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase aset yang diserahkan	n.a	n.a	1,500,000,000	30%	1,575,000,000	50%	1,653,750,000	60%	1,736,437,500	70%	1,823,259,375	80%	1,914,422,344	80%	1,914,422,344	
				Persentase OPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBN	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase OPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Informasi Pembangunan	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIP)	n.a	-	1,000,000,000	50%	952,560,818	60%	897,137,642	75%	941,994,524	80%	989,094,250	100%	1,038,548,963	100%	1,038,548,963	
			Program Kerjasama Informasi Pembangunan Daerah	Cakupan ketesediaan informasi pembangunan kepada masyarakat	100%	100%	3,141,000,000	100%	2,986,244,616	100%	2,805,792,954	100%	2,946,082,602	100%	3,093,386,732	100%	3,248,056,069	100%	3,248,056,069	
			Program Peningkatan Sarana dan Komunikasi Serta Media Masa	Persentase publikasi kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	100%	2,912,670,000	100%	3,058,303,500	100%	3,211,218,675	100%	3,371,779,609	100%	3,540,368,589	100%	3,717,387,019	100%	3,717,387,019	
				Persentase Sarana Komunikasi/Dokumentasi dan Informasi yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Penataan Ketatalaksanaan	Cakupan pemenuhan dokumen ketatalaksanaan	100%	100%	2,566,270,000	100%	2,694,583,500	100%	2,257,500,000	100%	1,800,000,000	100%	840,000,000	100%	2,010,000,000	100%	2,010,000,000	
			Program Revitalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase pencapaian reformasi birokrasi	n.a	60%	2,354,669,000	80%	2,472,402,450	90%	3,290,000,000	100%	3,400,000,000	100%	3,470,000,000	100%	3,580,000,000	100%	3,580,000,000	
				Persentase kelembagaan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, dan tepat struktur	n.a	60%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Papua Barat	n.a	50%		55%		60%		65%		70%		75%		75%		
			Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	n.a	n.a	5,941,500,000	CC	6,238,575,000	CC	6,550,503,750	CC	6,878,028,938	B	7,221,930,384	B	7,583,026,904	B	7,583,026,904	
				Skor EKPPD terhadap LPPD Provinsi Papua Barat	2.22	2,50-2,90		2,50-2,90		2,50-2,90		2,50-2,90		2,50-2,90		2,50-2,90		2,50-2,90		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Ketepatan waktu penyampaian LKPJ dan LPPD	Tidak Tepat	Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		
			Program Penataan Daerah	Cakupan penyepakatan batas wilayah Provinsi Papua Barat	n.a	-	2,000,000,000	20%	2,100,000,000	20%	2,205,000,000	20%	2,315,250,000	20%	2,431,012,500	20%	2,552,563,125	100%	2,552,563,125	
				Cakupan penyepakatan batas wilayah antar kabupaten/kota	n.a	22.22%		22.22%		16.67%		11.11%		11.11%		11.11%		94.40%		
				Cakupan penyepakatan batas wilayah Hak Ulayat	n.a	5%		10%		15%		20%		25%		30%		30%		
				Persentase konflik penyelenggaraan pemerintahan antar kabupaten dan kota yang diselesaikan	13.46%	13.46%		5.77%		9.61%		15.38%		19.23%		9.61%		73.07%		
			Program Penataan Distrik, Kelurahan, dan Kampung	Persentase calon distrik dan kampung yang memenuhi kriteria pembentukan distrik/kampung baru	10.62	10.62	-	32.42	3,200,000,000	15.17	3,360,000,000	27.01	3,528,000,000	14.22	3,704,400,000	0.57	3,889,620,000	100.00	3,889,620,000	
				Predikat Evaluasi perkembangan distrik dan kampung/kelurahan.	Kurang Berkembang	Kurang Berkembang		Berkembang		Berkembang		Berkembang		Cepat Berkembang		Cepat Berkembang		Cepat Berkembang		
				Persentase kantor distrik/kampung /kelurahan yang dibangun	3.85%	3.85%		11.53%		15.38%		19.23%		19.23%		19.23%		88.46%		
			Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan	Cakupan kebijakan pembangunan ekonomi yang dihasilkan dari kajian	8	5	-	4	4,365,967,986	4	3,927,266,385	4	3,335,229,705	4	3,501,991,190	4	3,677,090,749	25	3,677,090,749	
				Cakupan komoditas strategis yang dikembangkan	2	1		2		2		2		2		2		11		
			Koordinasi Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Kerjasama	Cakupan koordinasi yang dihasilkan dan ditindaklanjuti	n.a	100%	-	100%	1,000,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,440,000,000	100%	1,512,000,000	100%	1,587,600,000	100%	1,587,600,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Kelengkapan Provinsi	n.a	Ada	80,802,601,456	Ada	75,924,263,522	Ada	91,788,721,788	Ada	75,662,576,680	Ada	114,867,296,716	Ada	128,095,638,002	Ada	128,095,638,002	**Sekretariat DPRP**

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam RPJMN maupun RKPD	n.a	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				Terintegrasinya program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	n.a	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				Persentase Perdasus Inisiatif yang disahkan dalam prioritas Prolegda	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Jumlah Perdasus disahkan dalam prioritas Prolegda	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Perda yang ditetapkan sesuasi Prolegda	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase rekomendasi DPRD dari LKPj yang dilaksanakan	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase rekomendasi DPRD dari RDP yang dilaksanakan	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP - PB	Persentase Pertimbangan persetujuan dan aspirasi yang ditindaklanjuti	n.a	100%	27,526,733,600	100%	23,210,515,271	100%	24,066,041,035	100%	24,908,843,087	100%	25,732,735,241	100%	26,530,667,003	100%	26,530,667,003	**Sekretariat MRP**
				Jumlah Pimpinan dan Anggota yang trampil dalam Penyusunan Rekomendasi	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Jumlah Pimpinan dan Anggota yang trampil dalam Analisis Kebijakan Otsus	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Cakupan Media Massa yang menyampaikan Rekomendasi dalam konferensi Pers	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Sasaran 3: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah																	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	9,361,599,750	Ada	15,075,324,958	Ada	15,226,078,207	Ada	15,682,860,553	Ada	15,839,689,159	Ada	16,790,070,508	Ada	16,790,070,508	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
				Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan ekonomi daerah	100%	100%	3,203,563,400	100%	12,077,466,778	100%	12,198,241,445	100%	12,564,188,689	100%	12,689,830,576	100%	13,451,220,410	100%	13,451,220,410	
				Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program perencanaan sosial dan budaya	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan sosial dan budaya	100%	100%	3,675,000,000	100%	12,572,475,208	100%	12,698,199,960	100%	13,079,145,958	100%	13,209,937,418	100%	14,002,533,663	100%	14,002,533,663	
				Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sosial dan budaya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Indeks kinerja TKPKD Provinsi Papua Barat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Indeks kinerja TKPKD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat																
			Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	100%	2,058,200,050	100%	13,874,835,260	100%	14,013,583,613	100%	14,433,991,121	100%	14,578,331,032	100%	15,453,030,894	100%	15,453,030,894	
				Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Sasaran 4: Optimalnya sistem pengawasan pembangunan daerah																	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian TLHP	100%	100%	8,321,100,000	100%	8,321,100,000	100%	8,500,000,000	100%	9,000,000,000	100%	9,500,000,000	100%	10,308,731,905	100%	10,308,731,905	**Inspektorat Daerah**
				Skala capaian kinerja LKjIP provinsi	Cukup	Cukup		Cukup		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		
				Cakupan kualitas SDM aparat pengawas yang profesional	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Kabupaten dan Kota dengan Predikat EKPPD Sangat Tinggi	30.70%	50%		60%		70%		80%		90%		100%		100%		
				Persentase OPD dengan nilai SAKIP C	30.70%	50%		60%		70%		80%		90%		100%		100%		
				Persentase pencapaian RAD-PPK (Rencana aksi daerah pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Tingkat pelayanan OPD sesuai SPM	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase pelanggaran pegawai	n.a	5%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		
			Program Peningkatan Level Maturitas SPIP Inpektorat Prov	Cakupan Sistem dan Prosedur Adminitrasi dan Pengawasan	100%	100%	-	100%	2,259,506,540	100%	2,372,481,867	100%	3,501,614,360	100%	4,788,254,318	100%	6,250,382,198	100%	6,250,382,198	
			Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat	Persentase OPD Provinsi Papua Barat dengan pelayanan pengaduan berbasis IT	40%	100%	607,400,000	100%	607,400,000	100%	669,658,500	100%	703,141,425	100%	738,298,496	100%	775,213,421	100%	775,213,421	
			Sasaran 5: Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur																	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan peningkatan kualitas aparatur	80.00	90.00	6,130,923,932	90.00	15,934,271,717	100.00	21,648,557,373	100.00	22,730,985,242	100.00	23,867,534,504	100.00	26,942,350,034	100.00	26,942,350,034	**Badan Kepegawaian Daerah**
				Penerapan Merit System dalam manajemen kepegawaian	70.00	80.00		80.00		85.00		90.00		90.00		100.00		100.00		
				Persentase peserta ujian dinas yang lulus	97.40	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Persentase pengelola kepegawaian OPD	23.40	50.00		60.00		70.00		80.00		90.00		100.00		100.00		
				Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	80.00	80.00		80.00		85.00		85.00		90.00		90.00		90.00		
				Jumlah jabatan pimpjnan tinggi pada instansi pemerintah	48	48		48		48		48		48		48		48		
				Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	192	192		192		192		192		192		192		192		
				Jumlah jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	n.a	100		100		100		100		100		100		100		
				Cakupan pegawai yang mengikuti tugas belajar	n.a	-		50		50		50		50		50		250		
			Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pejabat struktural yang mengikuti Diklat PIM IV, III, II	85	85	3,052,786,500	85	5,866,984,329	85	6,160,333,546	85	7,931,082,045	85	9,936,641,150	85	12,203,378,712		12,203,378,712	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan Diklat kabupaten/kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan pegawai yang mengikuti diklat teknis	280	280		280		280		280		280		280		1,960		
				Cakupan pegawai yang mengikuti diklat fungsional	280	280		280		280		280		280		280		1,960		
				Persentase aparatur OPD yang meningkat kapasitasnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan pegawai yang mengikuti diklat prajabatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Sasaran 6: Meningkatnya kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah																	
			Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan	Tingkat implementasi inovasi daerah	50%	60%	2,847,221,000	70%	2,989,582,050	80%	3,139,061,153	90%	3,296,014,210	100%	3,460,814,921	100%	3,633,855,667	100%	3,633,855,667	**Badan Penelitian dan Pengembanga**

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pengembangan	Persentase kajian rekomendasi kebijakan daerah	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		**n Daerah**
				Persentase implementasi rencana kelitbangan	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kajian kelitbangan	n.a	30%	961,824,000	100%	2,506,097,182	100%	2,631,402,042	100%	4,321,620,806	100%	6,408,080,241	100%	8,972,938,326	100%	8,972,938,326	
				Persentase kajian yang dipublikasikan dalam jurnal atau bulletin	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Sasaran 7: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah																	
			Program Peningkatan Penerimaan Daerah	Persentase pertumbuhan pendapatan daerah	n.a	5.00	4,700,000,000	5.00	6,195,000,000	5.00	6,762,734,669	5.00	7,100,871,403	5.00	7,293,681,591	5.00	7,658,365,671	5.00	7,658,365,671	**Badan Pendapatan Daerah**
				Persentase pelanggaran wajib pajak	56.00	53.00		51.00		49.00		47.00		45.00		41.00		41.00		
				Persentase pertumbuhan PAD	4.96	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		
				Persentase PAD terhadap pendapatan	2.40	5.50		5.75		6.00		6.50		6.75		7.00		7.00		
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	32,694,206,139	WTP	17,198,600,393	WTP	29,394,517,811	WTP	30,416,681,201	WTP	28,854,008,894	WTP	29,755,158,714	WTP	29,755,158,714	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
				Persentase SILPA terhadap APBD	0%	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		
				Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	n.a	5%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		
				Persentase belanja pendidikan (20%)	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		20%		
				Persentase belanja kesehatan (10%)	10%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		
				Perbandingan antara belanja langsung dengan tidak langsung	1.04	0.67		0.67		0.67		0.67		0.67		0.67		0.67		
				Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	26%	30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		
				Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
				Tertib Administrasi BMD	41%	50%		55%		60%		65%		70%		100%		100%		
				Rasio Pemanfaatan Aset	77.00%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		100%		
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Cakupan evaluasi APBD kabupaten/kota	100%	100%	7,750,000,000	100%	8,137,500,000	100%	8,951,250,000	100%	9,846,375,000	100%	10,831,012,500	100%	11,914,113,750	100%	11,914,113,750	
			Tujuan 3: Terwujudnya pengelolaan data dan informasi layanan publik yang terintegrasi dan berbasis IT																	
			Sasaran 8: Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi dan pelayanan informasi publik berbasis IT																	
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan layanan publik berbasis IT (%)	n.a	10.00	2,348,587,800	30.00	2,466,017,190	40.00	2,589,318,050	50.00	2,718,783,952	60.00	2,854,723,150	70.00	2,997,459,307	70.00	2,997,459,307	**Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik**
				Cakupan pelaksanaan e Government di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat	13.00	25.00		50.00		75.00		90.00		100.00		100.00		100.00		
				Jumlah pengunjung website papuabaratprov.go.id	n.a	1,500		2,500		3,000		3,500		4,000		5,000		5,000		
				Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	n.a	1		2		2		2		3		3		13		
			Program Pengembangan dan Peningkatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	100%	100%	34,563,113,600	100%	42,352,536,652	100%	46,815,435,575	100%	52,471,920,361	100%	58,718,167,437	100%	65,614,271,154	100%	65,614,271,154	
				Cakupan Fasilitas Smart City yang dapat mengakses internet	n.a	1		1		1		1		1		1		6		
				Fasilitasi pembangunan BTS	n.a	5		5		5		5		10		10		40		
				Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	n.a	30		40		50		60		70		80		80		
				Persentase penduduk yang mengakses internet	n.a	20		25		30		35		40		50		50		
				Cakupan layanan telekomunikasi	n.a	30		40		50		60		70		80		80		
			Sasaran 9: Meningkatnya ketersediaan data sebagai basis kebijakan pembangunan daerah																	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data indikator makro daerah tahunan di tingkat kabupaten/kota	100%	100%	1,121,475,000	100%	2,653,376,930	100%	2,786,045,776	100%	2,925,348,065	100.00	3,071,615,468	100%	3,225,196,242	100%	3,225,196,242	**Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik**
				Ketersediaan Buku Provinsi Dalam Angka	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
				Ketersediaan Buku PDRB Provinsi	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
				Ketersediaan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
				Ketersediaan Buku Indeks Pembangunan Manusia	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
				Ketersediaan Buku Statistik Daerah	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
				Persentase data OPD yang dimuat dalam database satu data	n.a	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Ketersediaan data kinerja sektoral	n.a	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			Sasaran 10: Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan persandian daerah																	
			Program Pengawasan dan Pengendalian Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan layanan persandian daerah (%)	n.a	15%	315,796,400	38%	1,326,688,465	40%	1,393,022,888	60%	1,462,674,032	75%	1,535,807,734	100%	1,612,598,121	100%	1,612,598,121	**Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik**
			Sasaran 11: Meningkatnya budaya baca masyarakat																	
			Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Persentase kenaikan minat baca masyarakat per tahun	5%	5%	625,700,000	5%	4,831,846,006	5%	5,083,438,306	5%	5,347,610,222	5%	5,624,990,733	5%	5,916,240,270	5%	5,916,240,270	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
			Sasaran 12: Meningkatnya tata kelola administrasi kearsipan daerah																	
			Program Perencanaan dan Pengembangan Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi	Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah	n.a	n.a	535,150,000	10%	1,979,236,396	22%	2,078,198,216	35%	2,182,108,127	57%	2,291,213,533	100%	2,405,774,210	100%	2,405,774,210	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
				Pengelolaan arsip secara baku di tingkat OPD	n.a	n.a		10%		22%		35%		57%		100%		100%		100%	
				Peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan	n.a	n.a		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase arsip daerah yang telah terdigitalisasi	n.a	n.a		5%		7%		10%		20%		25%		25%		25%	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Misi 2: Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan																	
			Tujuan 4: Terwujudnya pengembangan dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan																	
			Sasaran 13: Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan																	
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks lingkungan hidup	84.51	84.51	1,905,838,750	84.51	2,001,130,688	82.00	2,101,187,222	81.00	2,586,596,098	80.00	3,001,906,310	80.00	3,690,336,214	80.00	3,690,336,214	**Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan**
				Rasio sungai yang dipantau baku mutunya	16.00	18.00		27.00		45.00		63.00		81.00		100.00		100.00		
				Rasio udara yang dipantau	23.00	23.00		38.00		46.00		46.00		84.00		100.00		100.00		
				Rasio tempat pembuangan sampah sementara	10.00	10.00		25.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		
				Persentase penanganan sampah	10.00	10.00		25.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		
				Cakupan penghijauan di wilayah sumber air	-	-		20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase penanganan kasus lingkungan hidup	-	-	1,877,340,000	20.00	2,562,124,500	40.00	2,690,230,725	60.00	2,959,253,798	80.00	3,255,179,177	100.00	3,580,697,095	100.00	3,580,697,095	
				Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya kegiatan perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	-	-		20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		
				Jumlah pengamatan dan pengukuran tingkat kerusakan LH	16.00	16.00		33.00		50.00		66.00		83.00		100.00		100.00		
				Cakupan pengawasan terhadap AMDAL	10.00	10.00		20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		
				Persentase SDM yang mengikuti pelatihan AMDAL	20.00	20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		100.00		
			Sasaran 14: Meningkatnya kelestarian pengelolaan hutan secara terpadu																	
			Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Pertumbuhan subsektor kehutanan (%)	5.86	7.00	2,301,914,000	7.00	6,775,000,000	7.00	8,088,750,000	7.00	8,897,625,000	7.00	15,000,000,000	7.00	17,250,000,000	7.00	17,250,000,000	**Dinas Kehutanan**
				Pembinaan dan pemberdayaaan OAP dalam pengelolaan hutan	-	40		40		40		40		40		40		240		
			Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	730.49	234.00	12,077,150,000	406.00	22,879,017,705	406.00	23,390,468,590	500.00	25,729,515,449	550.00	31,390,008,848	600.00	34,529,009,733	2,696.00	34,529,009,733	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program perencanaan dan pengembangan hutan	Jumlah Perdasus Kehutanan	0	1	300,000,000	-	15,000,000,000	1	15,750,000,000	-	17,325,000,000	1	20,340,191,875	-	21,717,862,931	2	21,717,862,931	
				Jumlah KPH yang terbentuk dan operasional	9	3		5		5		-		-		-		22		
				Jumlah dokumen kajian kehutanan	2	-		3		3		3		-		11				
				Luas kawasan hutan yang dikembangkan	14.500	-		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		50.000		
				Cakupan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Sasaran 15: Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan wilayah dan penataan wilayah lingkup Provinsi Papua Barat																	
			Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Cakupan penyepakatan batas hak kelola tanah ulayat	-	10.00	33,412,000,000	15.00	38,955,975,334	20.00	40,428,520,000	25.00	44,471,372,000	30.00	48,918,509,200	35.00	53,810,360,120	35.00	53,810,360,120	**Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan**
				Cakupan penyediaan lahan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni	-	20.00		40.00		90.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Penyelesaian izin lokasi	25.00	25.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Pemetaan tanah adat di Provinsi Papua Barat	-	-		20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		
				Persentase pengadaan tanah yang diselesaikan	50.00	50.00		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00		
			Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase konflik tanah yang diselesaikan	48.00	48.00	50,118,000,000	54.00	7,776,885,290	60.00	8,640,983,655	66.00	9,505,082,021	68.00	10,455,590,223	78.00	11,501,149,245	78.00	11,501,149,245	
			Sasaran 16: Meningkatnya konservasi sumber daya alam di Provinsi Papua Barat																	
			Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Laut, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Konservasi	Cakupan pengawasan sumberdaya perikanan kewenangan provinsi	3.30%	3.70%	2,300,000,000	3.70%	9,490,701,395	3.81%	9,965,236,465	3.92%	10,662,803,018	4.03%	15,740,933,805	4.14%	16,842,799,171	4.14%	16,842,799,171	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
				Luas kawasan konservasi perairan (ha)	350,000.00	350,000.00		710,000.00		710,000.00		923,000.00		923,000.30		1,136,000.30		1,136,000.30		
				Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Misi 3: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan																	
			Tujuan 5: Terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing																	
			Sasaran 17: Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan																	
			Program Pendidikan Menengah	Fasilitasi Pembangunan Pendidikan Menengah:			42,241,299,000		102,810,245,850		107,336,852,337		123,150,011,139		140,798,459,500		160,478,425,060		160,478,425,060	**Dinas Pendidikan**
				Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	54.00	53.00		50.00		40.00		30.00		30.00		25.00		25.00		
				Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	-	95.00		97.00		99.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Angka Pendidikan yang Ditamatkan	98.00	98.00		99.00		99.00		99.00		100.00		100.00		100.00		
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	-	98.00		99.00		99.00		99.00		100.00		100.00		100.00		
				Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	2.00	2.00		2.00		2.00		1.00		-		-		-		
				Rata-rata nilai UAN SMA	68.85	70.00		72.00		74.00		76.00		78.00		80.00		80.00		
				Angka partisipasi sekolah SMA	79.99	83.11		85.09		86.87		88.48		89.90		91.00		91.00		
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan SMA/SMK berbasis asrama	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Persentase kualitas penyelenggaraan SMA/SMK berbasis asrama	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Angka partisipasi Murni SMA	n.a	64.14		66.10		67.76		69.39		70.89		72.00		72.00		
				Angka partisipasi kasar SMA	n.a	92.93		93.88		94.70		95.42		96.05		97.00		97.00		
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota:	-	-	57,741,250,000	13	98,160,125,000	13	96,817,952,288	13	106,499,747,517	13	117,149,722,269	13	128,864,694,496	13	128,864,694,496	
				Rerata lama sekolah	7.06	7.50		7.70		8.00		8.30		8.50		8.50		8.50		
				Rerata lama sekolah OAP	-	5.00		5.15		5.20		5.30		5.50		5.75		5.75		
				Harapan lama sekolah	12.26	12.50		12.60		12.65		12.70		12.75		13.00		13.00		
				Harapan lama sekolah OAP	-	10.00		10.20		10.40		10.50		10.60		10.75		10.75		
				Angka Melek Huruf	94.14	95.00		95.50		96.0		96.5		97.0		97.50		97.50		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
										0		0		0						
				Angka Melek Huruf OAP	-	95.00		95.50		96.00		96.50		97.00		97.50		97.50		
				Persentase guru OAP	-	30.00		35.00		40.00		45.00		50.00		55.00		55.00		
				Angka partisipasi kasar SD	96.15	109.44		109.20		109.02		108.90		108.82		108.75		108.75		
				Angka Partisipasi Murni SD	67.51	93.57		93.82		94.07		94.30		94.52		96.00		96.00		
				Rata-rata nilai UAN SD	48.59	50.00		55.00		60.00		65.00		70.00		75.00		75.00		
				Rata-rata nilai UAN SMP	68.85	70.92		73.04		75.23		77.49		79.82		82.21		84.68		
				Rasio guru/murid SD	14	32		32		32		32		32		32		32		
				Rasio guru/murid per kelas rata-rata	11	11		11		11		11		11		11		11		
				Angka partisipasi sekolah SD	84.20	97.28		97.56		97.81		98.03		98.24		98.50		98.50		
				Angka partisipasi sekolah SMP	96.58	97.12		97.58		97.97		98.30		98.58		99.00		99.00		
				Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	0.00	0.50		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		
				Angka partisipasi kasar SMP	n.a	92.93		93.88		94.70		95.42		96.05		97.00		97.00		
				Angka Partisipasi Murni SMP	n.a	70.84		72.45		73.91		75.23		76.40		77.00		77.00		
			Program Pengembangan Perguruan Tinggi	Program Afirmasi Pendidikan:			68,200,000,000		88,660,000,000		93,093,000,000		97,747,650,000		102,635,032,500		107,766,784,125		107,766,784,125	
				Jumlah peserta program afirmasi pendidikan OAP (SMP, SMA, PT)	437	599		754		909		1,014		1,119		1,224		5,619		
				Persentase peserta program afirmasi pendidikan yang bermasalah dengan lingkungan sekolah tujuan	0	0		0		0		0		0		0		0		
			Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Kualitas Tenaga Pendidik:			7,750,000,000		12,994,854,289		14,294,339,718		15,723,773,690		17,296,151,059		19,025,766,165		19,025,766,165	
				Persentase guru yang tersertifikasi	-	50.00		60.00		70.00		75.00		80.00		85.00		85.00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
			Sasaran 18: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan																	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 25% fasilitas pelayanan kesehatan dasarnya dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar berkualitas	n.a	25%	4,749,504,000	31%	8,150,226,260	46%	10,595,294,138	62%	13,773,882,379	77%	17,906,047,093	100%	23,277,861,221	100%	23,277,861,221	**Dinas Kesehatan**
				Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat (KIS)				70%		80%		90%		100%		100%		100%		
				Persentase Kemitraan Kesehatan Terhadap Lembaga Agama, Adat dan Lembaga Kemasyarakatan				25%		30%		35%		40%		50%		50%		
				Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat	n.a	-		13		13		13		13		13		13		
				Persensatese Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Hidup Sehat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Menurunkan Angka Kematian Bayi menjadi < 10 per Kelahiran Hidup				< 10		< 10		< 10		< 10		< 10		< 10		
				Persentase Kab/Kota yang Memiliki Profil Kesehatan Setiap Tahunnya				31%		46%		62%		77%		100%		100%		
				Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Menurunkan Angka Kematian Ibu menjadi < 50 Kelahiran Hidup	49	< 50		< 50		< 50		< 50		< 50		< 50		< 50		
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak di Usia Pendidikan Dasar Kabupaten/kota	n.a	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Produktif di Kabupaten/kota	n.a	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Kabupaten/kota	n.a	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Kab/kota yang melaksanakan Keluarga Sehat	n.a	-		25%		30%		35%		40%		50%		50%		
				Persentase Pelayanan Kesehatan Yang dilaksanakan dillingkungan kantor Gubernur Papua Barat	n.a	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan Kab/Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	n.a	-		31%		46%		62%		77%		100%		100%		
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Cakupan Puskesmas Terakreditasi di Distrik	n.a	10%	13,910,000,000	29%	38,465,377,230	49%	56,207,810,197	68%	61,973,864,657	87%	67,122,739,950	100%	71,243,335,741	100%	71,243,335,741	
				Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	n.a	-		70%		80%		90%		100%		100%		100%		
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah Rumah Sakit Rujukan	n.a	-	100,529,450,500		105,555,923,025		110,833,719,176		116,375,405,135		122,194,175,392		128,303,884,161		128,303,884,161	
				Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.0179	-		0.0192		0.0229		0.0229		0.0244		0.0244		0.0244		
				Cakupan Sarana dan Prasarana UTD dan BDRS Tingkat Provinsi	n.a	-		70%		80%		90%		100%		100%		100%		
			Program Rujukan Kesehatan bagi orang Papua	Persentase Pasien Masyarakat OAP Sakit Berat di Rujuk	100%	100%	17,142,884,297	100%	20,571,461,156	100%	24,685,753,388	100%	29,622,904,065	100%	35,547,484,878	100%	42,656,981,854	100%	42,656,981,854	
			Program pengiriman dan pendisiplinan tenaga kesehatan ke distrik, kampung terpencil dan terisolir	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Bidan Desa Yang ditempatkan	n.a	-	1,080,000,000	29	1,296,000,000	29	1,555,200,000	29	1,866,240,000	29	2,239,488,000	29	2,687,385,600	145	2,687,385,600	
				Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, Tenaga Medis per satuan penduduk	TK : 0,59; D : 0,21; TM : 0,38	TK : 0,76; D : 0,38; TM : 0,38		TK : 1,05; D : 0,52; TM : 0,53		TK : 1,32; D : 0,65; TM : 0,67		TK : 1,57; D : 0,77; TM : 0,80		TK : 1,81; D : 0,89; TM : 0,92		TK : 2; D : 1; TM : 1		TK : 2; D : 1; TM : 1		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program Imunisasi	Pencapaian UCI kampung	45.92%	-	1,000,000,000	64.74%	1,650,000,000	73.83%	1,815,000,000	82.73%	1,996,500,000	91.43%	2,196,150,000	100%	2,415,765,000	100%	2,415,765,000	
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 menjadi <1,5% pada tahun 2022			-	1.90%	7,800,522,939	1.80%	8,580,575,233	1.70%	9,438,632,756	1.60%	10,382,496,032	1.50%	11,420,745,635	1.50%	11,420,745,635	
				Cakupan Penanggulangan Diare				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Frambusia				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan Pelayanan Kesehatan ISPA Kabupaten/kota				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Jumlah kabupaten dengan eliminasi kusta				3		5		8		11		13		13		
				Persentase Jumlah Orang Yang Minum Obat Filariasis				85%		90%		95%		97%		100%		100%		
				Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Malaria				65.04%		88.78%		90.50%		95.49%		100%		100%		
				Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA				87.94%		90.51%		92.96%		95.41%		100%		100%		
			Program Bimdal Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi			-	70%	18,736,275,800	80%	20,609,903,380	90%	22,670,893,718	100%	24,937,983,090	100%	27,431,781,399	100%	27,431,781,399	
				Cakupan tenaga kesehatan yang meningkat kapasitas dalam perencanaan pembangunan kesehatan				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan tenaga kesehatan yang meningkat kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan tenaga kesehatan yang meningkat kapasitas dalam pelayanan rujukan				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Sasaran 19: Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga																	**Dinas**

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda OAP pelopor	n.a	500	1,596,600,501	500	7,488,807,133	500	6,773,850,364	500	8,261,995,258	500	7,142,889,346	500	5,797,096,533	3,000	5,797,096,533	**Kepemudaan dan Olah Raga**
				Jumlah organisasi pemuda	n.a	127		127		127		127		127		127		762		
				Jumlah kreativitas pemuda	n.a	260		260		260		260		260		260		1,560		
				Jumlah kegiatan kepemudaan	n.a	23		23		23		23		23		23		138		
				Jumlah kualitas aktivitas kepemudaan dalam budaya	n.a	10		10		10		10		10		10		60		
				Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	n.a	-		-		-		-		-		-		-		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Cakupan ketersediaan lapangan olahraga	n.a	281	23,516,750,000	281	28,220,100,000	281	31,042,110,000	281	34,146,321,000	281	37,560,953,100	281	41,317,048,410	281	41,317,048,410	
				Gedung Cabang Olahraga	n.a	10		10		10		10		10		10		10		
				Lintasan Cabang atletik	n.a	-		-		-		-		-		1		1		
				Stadion olahraga	n.a	4		4		4		4		4		4		4		
				Gelanggang olahraga multiguna	n.a	-		-		-		-		-		-		-		
			Misi 4: Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar																	
			Tujuan 6: Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik di wilayah Provinsi Papua Barat																	
			Sasaran 20: Meningkatnya interkoneksi antar wilayah, ketersediaan layanan dasar infrastruktur daerah dan kualitas pengelolaan tata ruang daerah																	
			Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan provinsi yang dibangun (km)	1,399.87	55.00	165,200,000,000	74.50	118,575,337,314	195.00	122,132,597,433	195.00	134,345,857,177	195.00	147,780,442,894	195.40	162,558,487,184	909.90	162,558,487,184	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
				Panjang jembatan yang dibangun (m)	590.00	736.00		887.00		1,030.00		1,176.00		1,324.00		1,470.00		6,623.00		
			Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase beton/ bronjong /pasangan batu penahan abrasi yang dibangun	30.00%	34.00%	18,500,000,000	38.00%	13,278,715,135	42.00%	13,677,076,589	46.00%	15,044,784,248	50.00%	16,549,262,673	55.00%	18,204,188,940	55.00%	18,204,188,940	
			Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan yang dipelihara	73.39%	73.39%	16,780,000,000	75.97%	12,044,153,512	79.20%	12,405,478,117	83.03%	13,646,025,929	91.51%	15,010,628,522	100%	16,511,691,374	100%	16,511,691,374	
				Persentase jalan provinsi	55.25%	62.71		70.17		77.62		85.0		92.54		100%		100%		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				dengan kualitas baik		%		%		%		8%		%						
				Persentase jembatan provinsi dengan kualitas baik	40.14%	50.07 %		60.14 %		70.07 %		80.00%		90.07%		100%		100%		
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang saluran irigasi provinsi yang dibangun (km)	0.155	5	32,088,900,000	5	23,032,397,951	6	23,723,369,890	6	26,095,706,879	6	28,705,277,567	6	31,575,805,323	34	31,575,805,323	
				Persentase panjang saluran irigasi provinsi yang direhabilitasi	n.a	n.a		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Panjang saluran irigasi provinsi yang ditingkatkan	0.027	3		4		4		4		5		6		24		
			Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku				3,700,000,000		2,655,743,027		2,735,415,318		3,008,956,850		3,309,852,535		3,640,837,788		3,640,837,788	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah distrik yang mendapatkan bantuan air bersih dan sarana jamban sehat	63	65	13,300,000,000	67	9,546,319,530	70	9,832,709,115	80	10,815,980,027	90	11,897,578,030	100	13,087,335,833	472	13,087,335,833	
			Program Pengendalian Banjir	Panjang sungai yang dinormalisasi (km)	2	30	76,437,100,000	30	54,864,133,873	35	56,510,057,889	40	62,161,063,678	40	68,377,170,046	45	75,214,887,050	220	75,214,887,050	
			Program Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan				10,000,000,000		7,177,683,857		7,393,014,372		8,132,315,810		8,945,547,391		9,840,102,130		9,840,102,130	
			Program Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	76.00%	78.00 %	3,500,000,000	81.00 %	2,512,189,350	83.00 %	2,587,555,030	86.00%	2,846,310,533	89.00%	3,130,941,587	92.00 %	3,444,035,745	92.00%	3,444,035,745	
			Program Penataan Bangunan Gedung				49,100,000,000		35,242,427,737		36,299,700,569		39,929,670,626		43,922,637,688		48,314,901,457		48,314,901,457	
			Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	Panjang jalan lingkungan kampung yang terbangun (km)	8.81	9.70	87,228,437,902	1.06	58,954,882,311	11.73	60,492,504,445	12.90	67,148,193,768	14.19	74,499,773,968	15.61	82,618,350,229	65.19	82,618,350,229	
				Panjang jalan poros kampung yang terbangun	26.60	29.26		32.19		35.40		38.94		42.84		47.12		225.76		
				Jumlah TPA Regional	1	-		-		-		1		1		1		3		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Jumlah TPA bantuan provinsi yang dibangun	3	2		2		2		2		1		1		10		
			Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur				5,500,000,000		3,947,726,121		4,066,157,905		4,472,773,695		4,920,051,065		5,412,056,171		5,412,056,171	
			Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Kebijakan tata ruang yang telah disusun	1	1	18,940,800,000	2	13,595,107,439	2	14,002,960,663	2	15,403,256,729	2	16,943,582,402	2	18,637,940,642	11	18,637,940,642	
			Program Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi	n.a	-	1,223,325,000	90.00%	878,064,010	90.00%	904,405,931	90.00%	994,846,524	90.00%	1,094,331,176	90.00%	1,203,764,294	90.00%	1,203,764,294	
			Program Penataan Ruang dan Kawasan	Cakupan kabupaten yang sudah menyusun RDTR	n.a	-	7,509,100,000	50.00%	5,389,794,585	60.00%	5,551,488,422	70.00%	6,106,637,265	80.00%	6,717,300,991	100%	7,389,031,090	100%	7,389,031,090	
				Persentase kesesuaian rencana pembangunan (pola dan struktur ruang) dengan RTRW Provinsi	n.a	-		90.00%		90.00%		90.00%		90.00%		90.00%		90.00%		
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	n.a	20.00	2,000,000,000	25.00	2,100,000,000	30.00	2,205,000,000	35.00	2,315,250,000	40.00	2,431,012,500	45.00	2,552,563,125	45.00	2,552,563,125	**Dinas Perhubungan**
			Program Peningkatan Prasarana Pelayaran	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang tehubung sarana transportasi	n.a	100.00	12,588,720,600	100.00	5,000,000,000	100.00	5,250,000,000	100.00	5,775,000,000	100.00	6,352,500,000	100.00	11,622,088,582	100.00	11,622,088,582	
				Jumlah arus penumpang angkatan laut	466,522	471,187		518,306		570,137		627,150		689,865		758,852		4,102,019		
				Cakupan jumlah pelabuhan laut	70.31	71.88		73.44		75.00		76.56		78.13		79.69		79.69		
				Cakupan jumlah pelayaran perintis	76.38	77.17		77.95		78.74		79.53		80.31		81.10		81.10		
			Program Pembangunan Terminal	Jumlah barang yang melalui dermaga pelabuhn	n.a	3,000,000.00	71,942,370,000	3,300,000.00	50,872,667,598	3,630,000.00	52,532,144,800	3,993,000.00	59,539,529,993	4,392,300.00	67,283,872,890	4,831,530.00	67,283,872,890	4,831,530.00	67,283,872,890	
				Jumlah orang yang melalui terminal	n.a	10.000		20.000		25.000		30.000		35.000		40.000		40.000		
			Program Peningkatan Keselamatan LLAJ	Cakupan pemasangan rambu-rambu di ruas jalan provinsi	10.00	11.00	13,607,775,000	12.00	5,000,000,000	13.00	5,250,000,000	15.00	5,512,500,000	16.00	5,788,125,000	17.00	10,000,000,000	17.00	10,000,000,000	
				Cakupan Peningkatan Keselamatan LLAJ	100	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Sasaran 21: Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Papua Barat																	
			Program Pembangunan Perumahan Formal	Cakupan Rumah Layak Huni bagi OAP yang tepat syarat	81	135	104,526,541,400	500	51,587,830,119	550	53,488,286,097	605	60,013,184,957	666	67,190,573,703	732	75,085,701,323	3,188	75,085,701,323	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
				Persentase Rumah Layak Huni	20.48	22.50		24.68		27.11		29.86		32.86		36.10		36.10		
				Persentase pembangunan rumah bagi OAP	20.48	22.50		24.68		27.11		29.86		32.86		36.10		36.10		
				Cakupan Pendataan dan Verifikasi Kawasan Pemukiman						-		-		100%		100%		100%		
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	17.49	17.49	-	17.49	21,540,304,046	17.49	22,186,513,168	17.49	24,405,164,485	17.49	26,845,680,933	17.49	29,530,249,026	17.49	29,530,249,026	
				Cakupan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh	203,11	67,28		73,76		48,37		11,50		2,20		0		0		
				Cakupan rumah tangga dengan sanitasi layak	62,00	62,00		70,00		80,00		90,00		95,00		100,00		100,00		
				Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	17.49	17.33		17.20		16.79		16.53		16.26		15.99		15.99		
				Cakupan rumah tangga berakses air minum layak	63,00	63,00		70,00		80,00		90,00		95,00		100,00		100,00		
				Persentase Pembangunan Drainase perkotaan	20.48	22.50		24.68		27.11		29.86		32.86		36.10		36.10		
			Program Rumah Susun	Jumlah Rusun yang dibangun	2	1	6,316,835,000	5	3,457,805,874	5	3,561,540,050	5	3,917,694,055	5	4,309,463,461	5	4,740,409,807	26	4,740,409,807	
			Program Pembangunan Perumahan Swadaya	Cakupan Pembangunan Perumahan Swadaya	100%	100%	20,795,200,000	100%	11,383,195,019	100%	11,724,690,869	100%	12,897,159,956	100%	14,186,875,952	100%	15,605,563,547	100%	15,605,563,547	
			Program Pembangunan Perumahan Tradisional	Cakupan Pembangunan Perumahan Tradisional	100%	100%	7,622,271,100	100%	4,172,395,477	100%	4,297,567,341	100%	4,727,324,075	100%	5,200,056,483	100%	5,720,062,131	100%	5,720,062,131	
			Program Rumah Umum dan Komersil	Cakupan Pengembangan Rumah Umum dan Komersil	100%	100%	3,000,000,000	100%	1,642,185,940	100%	1,691,451,518	100%	1,860,596,670	100%	2,046,656,337	100%	2,251,321,971	100%	2,251,321,971	
			Sasaran 22: Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dan ketersediaan energi baru dan terbarukan																	
			Program Pembinaan dan Penatausahaan pertambangan Mineral dan Batubara	Tingkat fasilitasi pemanfaatan sumberdaya alam	n.a	100%	864,445,000	100%	907,667,250	100%	953,050,613	100%	1,000,703,143	100%	1,050,738,300	100%	1,103,275,215	100%	1,103,275,215	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
				Persentase tambang ilegal	-	25.00		50%		60%		70%		80%		90%		90%		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				yang ditertibkan		%														
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan	Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	109	250	19,143,261,000	300	37,975,269,082	300	38,840,486,892	350	42,724,535,581	350	46,996,989,139	400	51,696,688,053	1,950	51,696,688,053	
				Persentase kampung terakses listrik	44.41%	51.36 %		58.31 %		65.26 %		72.21 %		79.16 %		86.11 %		86.11%		
				Jumlah kapasitas pembangkit listrik yang terbangun (MW)	339	330		322		314		306		299		291		1862		
			Program Pengelolaan Potensi Air Bawah Tanah Daerah	Pembangunan dan Inventarisasi air bersih melalui sumur bor (unit)	15	25	8,976,921,733	25	10,738,734,770	25	12,309,217,153	25	14,061,578,220	25	16,015,247,362	25	18,191,658,983	150	18,191,658,983	
			Program Pengembangan Sumber Daya Geologi Daerah	Sistem informasi sumber daya mineral	-	-	425,567,275	-	446,845,639	-	469,187,921	1	492,647,317	1	517,279,683	1	543,143,667	1	543,143,667	
				Cakupan wilayah pendataan potensi sumber daya mineral	69.57%	73.19 %		76.81 %		80.43 %		84.06%		87.68%		91.30 %		91.30%		
				Survei Inventarisasi potensi sumber daya mineral	1	-		3		3		3		3		3		15		
				Pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	-	1		1		1		1		1		1		6		
			Misi 5: Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata																	
			Tujuan 7: Meningkatnya perekonomian daerah yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumberdaya lokal lintas sektor																	
			Sasaran 23: Meningkatnya daya saing investasi daerah																	
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	36	39	1,000,000,000	42	3,500,000,000	45	3,675,000,000	48	4,285,050,000	50	5,642,311,519	57	7,181,737,016	1,031	7,181,737,016	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
				Jumlah investor berskala nasional (PMA)	156	160		164		168		172		178		189		47		
				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	48.15	48.20		48.22		48.24		48.30		48.31		48.32		44.03		
				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) - triliun rupiah	7.28	7.29		7.32		7.33		7.35		7.36		7.38		5.00		
				Persentase pelaku usaha yang taat dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan UU (PMDN)	19.00	25.00		27.00		1.00		35.00		0.40		47.00		47.00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase pelaku usaha yang taat dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan UU (PMA)	80.00	82.00		84.00		86.00		89.00		93.00		95.00		95.00		
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Keikutsertaan Pameran Dalam Negeri	6.58	-	600,000,000	11.11	3,500,000,000	12.00	3,675,000,000	11.82	4,042,500,000	11.67	4,244,625,000	11.54	4,456,856,250	11.54	4,456,856,250	
				Jumlah OAP yang terlibat dalam investasi	50	50		50		50		50		50		50		281		
				Persentase Keikutsertaan Pameran Luar Negeri	40.00	-		28.57		33.33		33.33		40.00		45.45		45.45		
				Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	n.a	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		
			Sasaran 24: Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja																	
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja OAP yang ditempatkan	23,128	22,484		23,159	4,397,286,299	23,853	4,617,150,614	24,569	4,848,008,145	25,306	5,090,408,552	26,065	5,344,928,980	26,065	5,344,928,980	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
				Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan	57,820	56,210		57,896		59,633		61,422		63,265		65,163		65,163		
				Tingkat partisipasi angkatan kerja	70.05	70.55		71.05		71.55		72.05		72.55		73.05		73.05		
				Pencari kerja yang ditempatkan	92.54	93.38		94.19		94.95		95.63		96.29		96.91		96.91		
				Tingkat pengangguran terbuka	7.46	6.62		5.81		5.05		4.37		3.71		3.09		3.09		
				Tingkat partisipasi angkatan kerja OAP	n.a	-		75.00		76.00		77.00		78.00		79.00		79.00		
			Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Fasilitasi Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	30.00	30.00	650,000,000	34.50	991,875,000	39.68	1,165,218,750	45.63	1,359,604,688	52.47	2,827,322,422	60.34	3,195,899,793	60.34	3,195,899,793	
				Fasilitasi Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	56.67	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Penetapan UMR	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	n.a	60.00		60.00		70.00		70.00		75.00		75.00		75.00		
				Angka sengketa perusahaan-pekerja per tahun	n.a	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase kasus yang diselesaikan bersama dengan perjanjian bersama	n.a	90.00		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00		
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi	n.a	-	2,550,000,000	30.00	5,100,000,000	40.00	5,231,250,000	50.00	6,218,824,718	55.00	6,078,379,394	60.00	7,198,273,148	60.00	7,198,273,148	
				Pembangunan balai latihan kerja provinsi	1	-		-		-		-		1		-		2		
				Persentase pekerja yang mendapatkan peletihan berbasis kompetensi	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Persentase pekerja yang mendapatkan peletihan berbasis kewirausahaan	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
			Sasaran 25: Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah																	
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase UMKM OAP yang berkembang	n.a	10	8,162,331,000	20	8,570,447,550	30	9,199,952,928	40	10,119,948,220	50	19,600,645,617	60	21,560,710,179	60	21,560,710,179	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
				Jumlah UMKM	1,452	1,562		1,672		1,772		1,872		1,975		2,010		2,010		
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	88	89	1,000,000,000	90	5,050,000,000	90	5,302,500,000	91	5,832,750,000	92	6,416,025,000	93	7,057,627,500	93	7,057,627,500	
				Jumlah koperasi berprestasi tingkat nasional	n.a	2		7		15		25		35		40		40		
			Pengembangan Pendukung Usaha Bagi KUMKM	Persentase produk-produk unggulan Orang Asli Papua (OAP) di galeri UMKM	71	75	968,825,000	76	6,874,167,706	77	7,217,876,091	78	8,719,190,968	79	12,836,229,632	80	14,662,084,876	80	14,662,084,876	
				Jumlah pameran/promosi yang diselenggarakan	2	3		3		4		4		4		5		23		
			Sasaran 26: Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar daerah																	
			Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah OAP yang terlibat dalam usaha perdagangan	n.a	-	2,381,900,000	10 orang	2,381,900,000	10 orang	2,381,900,000	10 orang	2,381,900,000	10 orang	2,381,900,000	10 orang	2,381,900,000	50 orang	2,381,900,000	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
			Program peningkatan dan pengembangan ekspor Impor	Nilai ekspor bersih	2,706,140,787	2,841,447,826	2,000,000,000	2,983,520,218	2,200,000,000	3,132,696,229	2,420,000,000	3,289,331,040	2,662,000,000	3,453,797,592	2,928,200,000	3,626,487,472	3,221,020,000	3,626,487,472	3,221,020,000	
			Program peningkatan efisiensi perdagangan	Cakupan rekomendasi TPID yang ditindaklanjuti	n.a	100%	3,368,100,00	100%	12,015,087,4	100%	15,899,314,	100%	30,757,906,	100%	49,314,562,5	100%	66,692,294,	100%	66,692,294,	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			dalam negeri				0		57		864		679		49		319		319	
				Fasilitasi Peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua Barat		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Pembangunan Papua Barat Mart	n.a	-		-		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		12 unit		
			Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan di Bidang Perdagangan	Persentase jumlah penyelesaian keluhan konsumen	n.a	100%	1,500,000,000	100%	1,575,000,000	100%	1,653,750,000	100%	1,736,437,500	100%	1,823,259,375	100%	1,914,422,344	100%	1,914,422,344	
				Persentase monitoring ketersediaan stok dan harga barang	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan rekomendasi pengurangan hambatan perdagangan dan pengawasan perdagangan yang ditindaklanjuti	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Fasilitasi peningkatan perlindungan konsumen di seluruh kabupaten/kota	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Sasaran 27: Meningkatnya pengembangan dan daya saing industri pengolahan berbasis potensi daerah																	
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan jumlah IKM	n.a	2%	955,450,000	2%	5,955,450,000	2%	6,253,222,500	2%	6,565,883,625	2%	8,257,200,299	2%	13,257,200,299	2%	13,257,200,299	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
			Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	n.a	-	3,000,000,000	-	3,150,000,000	1	3,304,561,600	2	3,726,748,910	2	4,195,741,509	2	4,716,449,252	7	4,716,449,252	
				Persentase IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	n.a	-		5%		5%		10%		10%		10%		10%		
			Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri rakyat	n.a	-	500,000,000	1	4,216,949,878	1	4,430,735,771	1	5,826,337,370	1	6,117,654,238	1	8,418,005,589	5	8,418,005,589	
				Persentase usaha industri dan kawasan industri yang beroperasi sesuai dengan NSPK	n.a	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Sasaran 28: Optimalnya sinergitas pengembangan dan penataan kawasan terpadu di wilayah transmigrasi																	
			Program Transmigrasi lokal	Cakupan pengembangan kawasan transmigrasi OAP	n.a	40%	2,450,000,0	45%	9,713,512,78	50%	10,199,188,4	55%	11,219,107,27	60%	12,341,017,99	65%	13,575,119,79	65%	13,575,119,79	**Dinas Transmigrasi**

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
							00		8		27		0		7		6		6	dan Tenaga Kerja
				Jumlah pemukiman wilayah transmigrasi lokal baru	n.a	1		1		1		1		1		1		6		
				Jumlah KK transmigran Orang Asli Papua (OAP) yang mandiri	n.a	10		10		10		10		10		10		60		
			Tujuan 8: Terwujudnya daya dukung dan daya tarik pariwisata terpadu berskala internasional di Provinsi Papua Barat																	
			Sasaran 29: Meningkatnya keterpaduan dan daya saing pariwisata daerah																	
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah pengembangan destinasi wisata baru (yang ada dikembangkan/destinasi baru)	3 kawasan	4 kawasan	5,200,000,000	5 kawasan	15,584,368,684	6 kawasan	16,363,587,119	7 kawasan	17,999,945,831	7 kawasan	19,799,940,414	7 kawasan	24,682,165,411	7 kawasan	24,682,165,411	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
				Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang difasilitasi pemerintah daerah	9 lokasi	10 lokasi		11 lokasi		12 lokasi		13 lokasi		15 lokasi		20 lokasi		20 lokasi		
			Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Daerah	Jumlah wisatawan mancanegara (orang)	-	15,000	-	25,000	7,083,803,947	35,000	7,437,994,145	45,000	8,181,793,559	55,000	8,999,972,915	70,000	11,219,166,096	70,000	11,219,166,096	
				Kunjungan wisatawan (orang)	99,382	102,105		104,923		107,808		110,773		113,899		116,949		116,949		
			Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah OAP yang terlibat dalam sektor kepariwisataaan (orang)	-	100	-	100	5,667,043,158	100	5,950,395,316	100	6,545,434,847	100	7,199,978,332	100	8,975,332,877	500	8,975,332,877	
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0.62%	1.00%		1.40%		1.80%		2.20%		2.60%		3.00%		3.00%		
			Sasaran 30: Meningkatnya pengembangan seni budaya dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat Provinsi Papua Barat dalam mendukung pariwisata daerah																	
			Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	20%	-	3,950,000,000	20%	4,147,500,000	20%	4,354,875,000	20%	4,572,618,750	20%	6,400,009,024	20%	9,320,011,732	100%	9,320,011,732	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
				Jumlah keanekaragaman budaya yang dilestarikan/diakui secara nasional maupun internasional	6	5		5		5		5		5		5		30		
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah sanggar yang ikut serta dalam festival budaya	40	45	800,000,000	50	1,824,301,399	55	1,915,516,469	60	2,011,292,292	65	2,111,856,907	70	4,335,854,431	70	4,335,854,431	
				Jumlah gedung kesenian dan taman budaya	-	-		-		1		1		-		-		2		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah even skala nasional dan internasional dalam kalender tahunan Provinsi Papua Barat	4	4	-	5	2,609,591,557	6	2,740,071,134	7	4,267,300,201	8	4,480,665,212	9	6,824,864,775	39	6,824,864,775	
			Misi 6: Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat																	
			Tujuan 9: Terwujudnya kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah																	
			Sasaran 31: Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas																	
			Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Kabupaten/kota berketahanan pangan	-	30%	2,379,620,000	40%	4,611,279,648	50%	4,841,843,630	60%	5,180,772,685	70%	5,698,849,953	80%	6,268,734,948	80%	6,268,734,948	**Dinas Ketahanan Pangan**
				Cakupan Ketersediaan Pangan:																
				- Ketersediaan energi	2.794	2.794		2.794		2.794		2.794		2.794		2.794		2.794		
				- Ketersediaan protein	88.20	88.20		88.20		88.20		88.20		88.20		88.20		88.20		
				- PPH Ketersediaan	82.17	82.17		82.17		82.17		82.17		82.17		82.17		82.17		
				Persentase Daerah Rentan Pangan (%)	31.76	30.76		29.76		28.76		27.76		26.76		25.75		25.75		
			Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Ketersediaan Data Harga Pangan	100%	100%	2,959,580,000	100%	5,179,265,000	100%	5,438,228,250	100%	6,309,814,234	100%	7,132,428,900	100%	8,046,886,694	100%	8,046,886,694	
				Cakupan Kebutuhan Konsumsi Pangan:																
				- Konsumsi Energi	1,941.40	1,976.17		2,010.93		2,045.70		2,080.47		2,115.23		2,150.00		2,150.00		
				- Konsumsi Protein	59.90	59.05		58.64		58.23		57.82		57.41		57.00		57.00		
				- PPH Konsumsi	89.56	91.30		93.04		94.78		96.52		98.26		100.00		100.00		
				Cakupan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan:																
				- Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar (PSAT) yang di Sertifikasi	-	20		25		25		25		25		25		145		
				- Jumlah Produk Pangan Segar dan Olahan Primer Yang di Registrasi	-	20		25		25		25		25		25		145		
				- Pengawasan Keamanan Pangan	10	20		20		20		20		20		20		120		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras	15.40	19.84		23.87		27.55		30.93		34.03		36.89		36.89		
				Terbentuknya lembaga cadangan pangan provinsi (Bulogda)	-	-		-		1		-		-		-		1		
				Dokumen terkait kebijakan pangan daerah	-	-		2		1		1		1		1		6		
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Nilai tukar nelayan	98.21	101.86	11,700,000,000	105.51	28,329,200,000	107.09	29,745,660,000	108.68	31,827,856,200	110.26	35,010,641,820	111.84	37,461,386,747	111.84	37,461,386,747	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
				Produksi perikanan tangkap (ton)	151,585.00	184,640.00		186,486.40		188,332.80		190,179.20		192,025.60		193,872.00		193,872.00		
				Cakupan OAP pelaku usaha perikanan tangkap yang dibina	-	50		100		100		100		100		100		550		
				Jumlah sentra produksi perikanan yang dikembangkan				2 kawasan		2 kawasan		2 kawasan		2 kawasan		2 kawasan		10 kawasan		
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Nilai tukar pembudidaya ikan	91.18	93.00	9,000,000,000	93.00	15,552,800,000	94.40	16,330,440,000	95.79	17,473,570,800	97.19	20,968,284,960	99.01	22,436,064,907	99.01	22,436,064,907	
				Produksi perikanan budidaya (ton)	52,842.61	71,282.00		89,721.39		90,798.05		91,874.70		92,951.36		94,028.02		94,028.02		
				Cakupan OAP pelaku usaha perikanan budidaya yang dibina	n.a	50		100		100		100		100		100		550		
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Pertumbuhan PDRB perikanan	10.37%	7.00%	2,450,000,000	7.00%	2,663,800,000	7.00%	2,796,990,000	7.00%	5,033,554,094	7.00%	10,067,108,188	7.00%	13,529,291,387	7.00%	13,529,291,387	
				Nilai ekspor produk perikanan ($ US)	22,769,455.00	29,374,665.00		35,979,875.00		36,699,472.50		37,419,070.00		38,138,667.50		38,858,265.00		38,858,265.00		
				Konsumsi ikan (kg/kapita/orang)	50.35	52.78		55.21		56.31		57.42		58.52		59.63		59.63		
			Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan:			3,972,000,000		15,000,000,000		18,750,000,000		20,625,000,000		25,187,500,000		30,225,000,000		30,225,000,000	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan**
				- Padi	27,084.00	29,278.00		31,650.00		34,214.00		36,986.0		39,982.0		43,221.00		43,221.00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
												0		0						Perkebunan
				- Jagung	1,907.00	213.00		2,805.00		3,402.00		4,126.00		5,004.00		6,069.00		6,069.00		
				- Kedelai	1,696.00	1,700.00		1,704.00		1,708.00		1,712.00		1,716.00		1,720.00		1,720.00		
				- Kacang Tanah	703.00	705.00		707.00		709.00		711.00		713.00		715.00		715.00		
				- Kacang Hijau	180.00	185.00		190.00		195.00		200.00		206.00		212.00		212.00		
				- Ubi Kayu	9,697.00	11,661.00		14,023.00		16,863.00		20,278.00		24,385.00		29,324.00		29,324.00		
				- Ubi Jalar	12,440.00	16,098.00		20,832.00		26,958.00		34,885.00		45,143.00		58,417.00		58,417.00		
				NTP Tanaman Pangan	96.92	98.86		100.84		102.85		104.91		107.01		109.15		109.15		
				Pertumbuhan PDRB tanaman pangan	(1.12)	2.00		2.00		2.00		2.00		4.00		4.00		4.00		
			Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura	Produksi sayuran utama:			4,000,000,000		15,000,000,000		18,750,000,000		20,625,000,000		25,187,500,000		30,225,000,000		30,225,000,000	
				- Cabai	2,142.30	2,163.72		2,185.36		2,207.21		2,229.29		2,251.58		2,274.09		2,274.09		
				- Bawang merah	168.00	169.68		171.38		173.09		174.82		176.57		178.34		178.34		
				- Petsai	2,734.00	2,761.34		2,788.95		2,816.84		2,845.01		2,873.46		2,902.20		2,902.20		
				- Bayam	1,053.40	1,063.93		1,074.57		1,085.32		1,096.17		1,107.13		1,118.21		1,118.21		
				- Kacang panjang	1,936.80	1,956.17		1,975.73		1,995.49		2,015.44		2,035.60		2,055.95		2,055.95		
				- Tomat	2,501.60	2,526.62		2,551.88		2,577.40		2,603.17		2,629.21		2,655.50		2,655.50		
				- Ketimun	1,395.00	1,408.95		1,423.04		1,437.27		1,451.64		1,466.16		1,480.82		1,480.82		
				- Kubis	1,044.10	1,054.54		1,065.09		1,075.74		1,086.49		1,097.36		1,108.33		1,108.33		
				- Terung	1,177.80	1,189.58		1,201.47		1,213.49		1,225.62		1,237.88		1,250.26		1,250.26		
				- Buncis	578.40	584.18		590.03		595.93		601.89		607.90		613.98		613.98		
				Produksi Buah:																

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				- Pisang	1,532.00	1,547.32		1,562.79		1,578.42		1,594.21		1,610.15		1,626.25		1,626.25		
				- Mangga	143.00	144.43		145.87		147.33		148.81		150.29		151.80		151.80		
				- Nanas	43.00	43.43		43.86		44.30		44.75		45.19		45.65		45.65		
				- Jeruk	40.00	40.40		40.80		41.21		41.62		42.04		42.46		42.46		
				- Rambutan	252.00	254.52		257.07		259.64		262.23		264.85		267.50		267.50		
				- Durian	155.00	156.55		158.12		159.70		161.29		162.91		164.54		164.54		
				- Nangka	121.00	122.21		123.43		124.67		125.91		127.17		128.44		128.44		
				- Pepaya	156.00	157.56		159.14		160.73		162.33		163.96		165.60		165.60		
				- Sukun	154.00	155.54		157.10		158.67		160.25		161.86		163.47		163.47		
				- Duku	225.00	227.25		229.52		231.82		234.14		236.48		238.84		238.84		
				Produksi tanaman obat:																
				- Jahe	22.96	23.19		23.42		23.66		23.89		24.13		24.37		24.37		
				- Laos	41.45	41.86		42.28		42.71		43.13		43.56		44.00		44.00		
				- Kencur	2.78	2.81		2.84		2.86		2.89		2.92		2.95		2.95		
				- Kunyit	14.78	14.93		15.08		15.23		15.38		15.53		15.69		15.69		
				- Temulawak	0.02	0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		
				NTP Hortikultura	101.32	104.36		107.49		110.72		114.04		117.46		120.98		120.98		
				Pertumbuhan PDRB tanaman hortikultura	11.12	7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		
			Program Penguatan Sistem Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Cakupan penyediaan bibit tanaman pangan dan hortikultura		100.00	1,000,000,000	100.00	5,000,000,000	100.00	7,402,464,075	100.00	8,142,710,482	100.00	8,956,981,530	100.00	9,852,679,683	100.00	9,852,679,683	
			Program Peningktan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan	Produksi tanaman perkebunan:			5,000,000,000		14,975,862,798		18,719,828,497		20,591,811,347		25,150,992,481		30,161,871,729		30,161,871,729	
				- Kelapa	19,650.00	20,633.00		21,664.00		22,747.00		23,885.00		25,079.00		26,333.00		26,333.00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				- Kelapa sawit	61,213,071.00	64,273,725.00		67,487,411.00		70,861,782.00		74,404,871.00		78,125.11		82,031,370.00		82,031,370.00		
				- Kopi	245.00	257.00		270.00		283.00		298.00		312.00		328.00		328.00		
				- Cengkeh	60.00	63.00		66.00		69.00		72.00		76.00		80.00		80.00		
				- Kakao	5,692.00	5,976.00		6,275.00		6,589.00		6,918.00		7,264.00		7,627.00		7,627.00		
				- Pala	58,792.00	61,731.00		64,818.00		68,059.00		71,462.00		75,035.00		78,787.00		78,787.00		
				- Sagu	29,396.00	30,866.00		32,409.00		34,029.00		35,371.00		37,517.00		39,393.00		39,393.00		
				NTP Tanaman Perkebunan	101.43	104.47		107.61		110.84		114.16		117.59		121.11		121.11		
				Pertumbuhan PDRB perkebunan	7.33	7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah petani OAP yang meningkat kapasitas melalui pelatihan	11,813	500	-	500	5,000,000,000	500	5,500,000,000	500	6,050,000,000	500	6,655,000,000	500	7,320,500,000	500	7,320,500,000	
				Jumlah kelembagaan petani OAP yang meningkat kapasitasnya	840	50		50		50		50		50		50		50		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Luas kawasan pertanian yang dikembangkan	106,610.00	108,209.15	7,328,000,000	109,808.30	14,656,000,000	111,407.45	18,320,000,000	113,006.60	20,152,000,000	114,605.75	24,667,200,000	116,204.90	29,600,640,000	116,204.90	29,600,640,000	
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah peternak OAP yang meningkat kapasitas melalui pelatihan	50	50	225,000,000	50	1,122,760,000	50	1,500,000,000	50	2,200,000,000	50	2,500,000,000	50	3,000,000,000	50	3,000,000,000	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
				Jumlah kelembagaan peternak yang meningkat kapasitasnya	63	63		63		63		63		63		63		63		
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Cakupan penanganan penyakit ternak yang ditemukan dan tertangani	-	100.00	1,337,000,000	100.00	1,415,462,485	100.00	2,063,821,409	100.00	2,167,012,479	100.00	2,275,363,103	100.00	2,730,435,724	100.00	2,730,435,724	
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi daging			2,032,000,000		15,000,000,000		14,962,255,000		17,149,997,864		27,929,599,358		34,911,999,197		34,911,999,197	
				- Sapi	3,957,984.00	4,076,880.00		4,199,186.40		4,325,161.99		4,454,916.85		4,588,564.36		4,726,221.29		4,726,221.29		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				- Kambing	158,239.00	159,235.00		164,012.05		168,932.41		174,000.38		179,220.40		184,597.01		184,597.01		
				- Babi	1,762,640.00	1,793,000.00		1,846,790.00		1,902,193.70		1,959,259.51		2,018,037.30		2,078,578.42		2,078,578.42		
				Produksi daging unggas																
				- Ayam kampung	1,276,377.00	1,333,015.00		1,373,005.45		1,414,195.61		1,456,621.48		1,500,320.13		1,545,329.73		1,545,329.73		
				- Ayam petelur	56,162.00	57,846.86		59,582.27		61,369.73		63,210.83		65,107.15		67,060.37		67,060.37		
				- Ayam pedaging	1,300,084.00	1,339,086.52		1,379,259.12		1,420,636.89		1,463,256.00		1,507,153.68		1,552,368.29		1,552,368.29		
				- Itik	34,523.00	35,212.00		36,268.36		37,356.41		38,477.10		39,631.42		40,820.36		40,820.36		
				Produksi telur																
				- Ayam kampung	634,399.00	662,549.00		682,425.47		702,898.23		723,985.18		745,704.74		768,075.88		768,075.88		
				- Ayam petelur	955,996.00	987,412.00		1,017,034.36		1,047,545.39		1,078,971.75		1,111,340.91		1,144,681.13		1,144,681.13		
				- Itik	296,853.00	302,768.00		311,851.04		321,206.57		330,842.77		340,768.05		350,991.09		350,991.09		
				NTP Peternakan	99.11	99.64		100.00		100.53		101.06		101.60		102.14		102.14		
				Pertumbuhan PDRB Peternakan	6.75	6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Peternakan	Luas kawasan peternakan yang dikembangkan	135	135	1,130,000,000	135	13,000,000,000	135	13,650,000,000	135	14,332,500,000	135	17,199,000,000	135	24,735,509,901	135	24,735,509,901	
			Misi 7: Memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial																	
			Tujuan 10: Terwujudnya masyarakat berketahanan sosial																	
			Sasaran 32: Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial																	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Kab/Kota Berketahanan Sosial	n.a	-	9,649,072,000	-	4,339,641,273	13	4,349,503,836	13	4,982,158,822	13	5,231,267,208	13	5,492,830,405	13	5,492,830,405	**Dinas Sosial**
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	n.a	-	25,810,816,000	20.00	8,116,568,982	20.00	8,135,015,601	20.00	9,318,290,269	20.00	9,784,204,806	20.00	10,273,415,093	100.00	10,273,415,093	
				Persentase PMKS yang tertangani	n.a	-		10.00		20.00		30.00		40.00		50.00		50.00		
				Tingkat fasilitasi pembangunan KAT	n.a	5.00		10.00		15.00		20.00		25.00		30.00		30.00		
			Program Bantuan dan Jaminan Sosial	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	n.a	-	4,712,148,000	10.00	1,842,953,505	20.00	1,843,278,815	30.00	2,111,392,449	40.00	2,216,961,415	50.00	2,327,808,948	50.00	2,327,808,948	
				Persentase izin pengumpulan dana yang terbit dari permohonan tepat syarat	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Cakupan pemulihan trauma bencana alam dan sosial tepat syarat	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Cakupan fasilitasi sarana prasarana keagamaan	n.a	100.00	8,444,081,000	100.00	4,101,985,059	100.00	4,111,307,537	100.00	4,709,315,859	100.00	4,944,781,746	100.00	5,192,020,084	100.00	5,192,020,084	
			Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	n.a	-	19,334,505,600	10.00	15,606,198,323	20.00	17,440,495,401	30.00	22,131,252,176	40.00	25,608,103,329	50.00	29,494,747,532	50.00	29,494,747,532	
				Jumlah Lembaga KESOS yang Aktif	n.a	2		4		5		6		8		10		10		
				Pembangunan panti	n.a	-		-		-		1		1		1		3		
			Sasaran 33: Meningkatnya kapasitas masyarakat kampung																	
			Program pengembangan lembaga ekonomi Kampung	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	n.a	-	2,600,000,000	200	2,730,000,000	200	2,866,500,000	200	3,009,825,000	200	3,160,316,250	200	3,318,332,063	1,000	3,318,332,063	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung**
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun	Cakupan pembinaan kelompok PKK	n.a	-	16,750,000,000	120	12,500,000,000	120	13,125,000,000	120	13,781,250,000	120	14,470,312,500	120	15,193,828,125	600	15,193,828,125	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Kampung	Persentase Posyandu aktif	n.a	-		30		40		50		60		75		75		
				Persentase LSM aktif	n.a	-		30		40		50		60		75		75		
				Persentase LPM berprestasi	n.a	-		5		10		15		20		25		25		
				Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n.a	-		120		120		120		120		120		600		
				Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan masyarakat	n.a	-		90		90		90		90		90		90		
			Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kampung	Persentase PKK aktif	n.a	-	4,400,000,000	20	4,620,000,000	30	4,851,000,000	40	5,093,550,000	50	5,348,227,500	60	5,615,638,875	60	5,615,638,875	
				Fasilitasi kampung mandiri/membangun	850	-		200		200		200		200		200		1,000		
				Cakupan pembinaan aparatur pemerintahan kampung	n.a	10		15		20		25		30		40		40		
				Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kampung yang baik	n.a	-		10		15		20		25		30		30		
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Papua	Jumlah kelompok usaha OAP yang dibina	n.a	-	33,308,690,000	100	33,696,379,258	100	35,396,198,220	100	53,133,036,721	100	55,804,688,557	100	63,609,922,985	500	63,609,922,985	
				Jumlah kader kesejahteraan sosial OAP di masyarakat	n.a	-		100		100		100		100		100		500		
			Sasaran 34: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak																	
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	IPG	n.a	92.20	3,294,145,000	92.35	6,588,290,000	92.40	6,917,704,500	92.50	7,609,474,950	92.65	8,370,422,445	92.75	9,207,464,690	92.75	9,207,464,690	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
				Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
			Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Persentase kab/kota yang telah memiliki pusat penanganan terpadu perlindungan perempuan dan anak	n.a	-	1,550,000,000	20.00	4,000,000,000	30.00	4,200,000,000	50.00	4,930,939,178	60.00	5,750,519,232	75.00	6,668,381,598	75.00	6,668,381,598	
				Jumlah ruang terbuka ramah anak	n.a	-		5		10		15		20		25		25		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	n.a	-		3		3		3		3		3		3		
				Persentase perlindungan tenaga kerja anak	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
			Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan OAP	n.a	-	2,135,235,000	75.00	5,270,000,000	76.00	5,533,500,000	77.00	6,086,850,000	78.00	6,695,535,000	79.00	7,365,088,500	79.00	7,365,088,500	
				Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SD	n.a	1		1		1		1		1		1		1		
				Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMP	n.a	1		1		1		1		1		1		1		
				Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMA	n.a	1		1		1		1		1		1		1		
				Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan PT	n.a	1		1		1		1		1		1		1		
				Rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada usia 15-24 tahun	n.a	1		1		1		1		1		1		1		
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan kabupaten/kota responsif gender dan perlindungan anak	n.a	-	2,380,000,000	20.00	5,845,360,411	30.00	6,137,628,431	50.00	6,751,391,274	60.00	7,426,530,402	75.00	8,169,183,442	75.00	8,169,183,442	
				Rasio KDRT	n.a	-		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		
			Tujuan 11: Meningkatnya kinerja penataan penduduk dan pelayanan hak kependudukan masyarakat																	
			Sasaran 35: Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana																	
			Program Pengendalian Penduduk	Adanya regulasi pengendalian penduduk	n.a	Ada	3,240,000,000.00	Ada	5,937,709,189	Ada	6,234,594,649	Ada	6,546,324,381	Ada	6,873,640,600	Ada	7,217,322,630	Ada	7,217,322,630	**Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
				Laju pertumbuhan penduduk	n.a	3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		
				Cakupan peserta KB aktif	n.a	-		45.00		50.00		55.00		60.00		65.00		65.00		
				Persentase kampung KB yang difasilitasi	n.a	-		1.00		2.00		3.00		4.00		5.00		5.00		
				Total Fertility Rate	n.a	-		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data parameter dan proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	n.a	-		5.00		6.00		7.00		8.00		10.00		10.00		
				Rata-rata jumlah anak per keluarga	n.a	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		
				Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	n.a	5.00		6.00		7.00		9.00		10.00		15.00		15.00		
			Sasaran 36: Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat																	
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kab/Kota tertib administrasi Kependudukan	n.a	-	2,689,917,000	3	2,924,412,850	6	3,060,633,493	9	3,203,665,167	12	3,353,848,425	13	3,511,540,847	13	3,511,540,847	**Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
				Rasio Cakupan Penduduk ber KTP	n.a	50		60		70		80		90		100		100		
				Persentase kepemilikan KK	n.a	50		60		70		80		90		100		100		
				Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran	n.a	70		80		90		100		100		100		100		
				Rasio pasangan berakte nikah	n.a	100		100		100		100		100		100		100		
				Fasilitasi Pengendalian Jumlah Penduduk	n.a	-		100		100		100		100		100		100		
				Dokumen profil kependudukan provinsi	n.a	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				Cakupan Pelaksanaan Peraturan Bidang Kependudukan	n.a	100		1000%		100		100		100		100		100		
				Tersedianya pelaporan dan data kependudukan	n.a	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				Cakupan ketersediaan Peraturan tentang pendaftaran orang asli papua dan Sosialisasinya	n.a	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				Cakupan Pembinaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan	n.a	100		100		100		100		100		100		100		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Misi 8: Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah																	
			Tujuan 12: Meningkatnya stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat Provinsi Papua Barat																	
			Sasaran 37: Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum																	
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase rekomendasi FKDM yang ditindaklanjuti pihak terkait	8.33	8.33	525,455,659	100.00	2,557,102,788	100.00	2,684,957,927	100.00	2,819,205,823	100.00	2,903,781,998	100.00	2,990,895,458	100.00	2,990,895,458	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
				Cakupan pembinaan pencegahan tindak kriminal bagi remaja	n.a	100		650		700		750		800		850		3,850		
				Indeks potensi kerawanan sosial	n.a	Tidak Rawan		Tidak Rawan		Tidak Rawan		Tidak Rawan		Tidak Rawan		Tidak Rawan		Tidak Rawan		
			Program Kemitraan Bina Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan bagi remaja	60	90	783,500,000	120	2,913,676,565	150	3,059,360,393	150	3,212,328,413	150	3,308,698,266	150	3,407,959,213	810	3,407,959,213	
				Persentase Forum Pembinaan Kebangsaan (FPK) kabupaten	23	31		54		77		100		100		100		100		
			Program Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Cakupan pengawasan orang asing dan lembaga asing kabupaten	100	100	50,000,000	100	568,245,064	100	568,245,064	100	596,657,317	100	614,557,037	100	765,525,318	100	765,525,318	
			Program Peningkatan Nilai - Nilai Toleransi Keagamaan	Cakupan fasilitasi pembinaan FKUB	100	100	650,000,000	100	1,647,910,685	100	1,730,306,220	100	1,816,821,531	100	1,871,326,176	100	1,927,465,962	100	1,927,465,962	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat fasilitasi Forkopimda	100	100	175,000,000	100	1,477,437,166	100	1,477,437,166	100	1,551,309,024	100	2,229,685,394	100	2,296,575,955	100	2,296,575,955	
			Program Penanganan Konflik Sosial	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Provinsi	12.22	25	250,000,000	50	2,021,673,819	75	2,122,757,510	100	2,228,895,386	100	2,295,762,247	100	2,364,635,115	100	2,364,635,115	
			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan peserta yang memahami politik dalam pembangunan daerah	66	80	600,000,000	100	-	125	-	150	-	175	-	200	-	896	-	
			Program Fasilitasi Kelembagaan Politik	Tingkat fasilitasi dan tertib administrasi partai politik	-	50	300,000,000	70	2,187,743,496	85	2,297,130,671	100	2,411,987,204	100	2,484,346,821	100	2,558,877,225	100	2,558,877,225	
				Indeks Demokrasi Indonesia	n.a	60		63	1,591,086,179	65	1,670,640,488	66	2,386,629,268	67	2,458,228,146	70	2,870,719,944		2,870,719,944	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program Peningkatan Pemahaman Tentang Keormasan	Cakupan fasilitasi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	n.a	n.a	-	70	3,068,523,345	85	3,068,523,345	100	3,221,949,512	100	3,318,607,998	100	3,418,166,238	100	3,418,166,238	
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat efektivitas penegakan PERDA	n.a	100.00	-	100.00	800,000,000	100.00	840,000,000	100.00	882,000,000	100.00	926,100,000	100.00	972,405,000	100.00	972,405,000	**Satuan Polisi Pamong Praja**
				Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	n.a	1		1		1		1		2		2		2		
				Angka kriminalitas	n.a	0.20		0.18		0.17		0.15		0.15		0.13		0.13		
				Cakupan patroli petugas Satpol PP	n.a	3		3		3		3		3		3		3		
				Cakupan penanganan penyakit masyarakat	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	n.a	60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		
				Cakupan ketersediaan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada objek strategis pemerintahan	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
			Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio siskamling per jumlah kampung di wilayah prioritas	n.a	70.00	-	70.00	2,500,000,000	70.00	2,625,000,000	70.00	2,756,250,000	70.00	2,894,062,500	70.00	3,038,765,625	70.00	3,038,765,625	
			Sasaran 38: Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana																	
			Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kab/kota siaga dan tangguh bencana	n.a	-	4,331,000,000	6	4,463,145,359	8	4,388,083,369	13	4,398,056,286	13	4,324,088,976	13	4,251,365,661	13	4,251,365,661	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
				Indek Risiko Bencana	n.a	150		147		143		140		135		130		130		
				Kapasitas aparatur penanggulangan bencana	n.a	0.50		0.52		0.54		0.56		0.58		0.60		0.60		
				Cakupan Forum PRB tingkat kabupaten	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Tingkat penanganan bencana	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Fasilitasi pemberdayaan masyarakat pasca bencana	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Persentase ASN siaga dan tangguh bencana	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
			Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	100.00	100.00	6,836,355,000	100.00	10,383,285,603	100.00	11,876,614,109	100.00	13,654,960,729	100.00	15,229,204,061	100.00	16,831,088,331	100.00	16,831,088,331	
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	100.00	100.00	9,591,750,000	100.00	9,884,408,797	100.00	9,718,171,013	100.00	9,740,257,765	100.00	9,576,444,339	100.00	9,415,385,957	100.00	9,415,385,957	

Foto: Sri Riyanti Windesi, 2017

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH,

Perhitungan proyeksi kerangka pendanaan untuk pembangunan Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022 seperti diuraikan pada Bab III didasarkan pada kondisi pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya. Mendasarkan pada perhitungan proyeksi pendapatan, total pendapatan Provinsi Papua Barat dalam periode 2017-2022 terus mengalami peningkatan setiap tahun dari sebesar Rp 6,88 triliun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 10,37 triliun pada tahun 2022. Pendapatan daerah Provinsi Papua Barat berasal dari pos pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah terbesar Provinsi Papua Barat berasal dari pos dana perimbangan terutama dari DAU dan bagi hasil sumber daya alam. Pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, penerimaan berasal dari dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur.

Sementara itu, pada pos PAD, sumbangan terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Kontribusi PAD sebagai sumber pendapatan Provinsi Papua Barat dapat dikatakan masih rendah, sehingga dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk peningkatan ruang fiskal ke depan, perlu adanya intensifikasi maupun ekstensifikasi PAD baik dari pajak maupun retribusi daerah seiring dengan berkembangnya kegiatan perekonomian di Provinsi Papua Barat.

Pada sisi proyeksi belanja, terjadi kenaikan belanja daerah setiap tahun selama periode 2017-2022 seiring dengan proyeksi kenaikan pendapatan yang terus meningkat. Pada tahun 2017, besaran belanja adalah sebesar Rp 7,19 triliun dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp 10,3 triliun. Pada tahun 2017, besaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 4,12 triliun dan selanjutnya terus meningkat menjadi sebesar Rp 6,1 triliun pada tahun 2022. Pada pos belanja tidak langsung, komponen terbesar digunakan untuk belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintahan desa lainnya, disusul belanja hibah, dan belanja gaji dan tunjangan. Untuk pos belanja langsung, ruang fiskal yang tersedia untuk pemerintah daerah dalam pembiayaan program prioritas Gubernur dan

Wakil Gubernur terpilih pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2017. Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk peningkatan alokasi dana otonomi khusus kepada kabupaten/kota dari sebelumnya sebesar 70% menjadi sebesar 90%. Peningkatan alokasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.1 dimana pos belanja keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintahan desa lainnya meningkat signifikan dari sebesar Rp 1,76 triliun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 2,14 triliun pada tahun 2018.

Selanjutnya rincian mengenai kerangka pendanaan pembangunan daerah Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022 Provinsi Papua Barat

No.	Uraian	APBD	Proyeksi				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH**	**6.888.867.177.840**	**7.127.771.975.355**	**7.960.779.419.701**	**8.681.347.745.260**	**9.466.428.428.222**	**10.372.005.780.103**
2	**BELANJA**	**7.198.960.532.711**	**7.072.771.975.355**	**7.905.779.419.701**	**8.626.347.745.260**	**9.411.428.428.222**	**10.317.005.780.103**
02.01	**Belanja Tidak Langsung**	**4.123.221.854.753**	**4.105.633.068.212**	**4.832.967.631.259**	**5.245.051.753.750**	**5.683.780.475.462**	**6.194.578.952.658**
02.01.01	Belanja Pegawai	683.615.528.934	707.796.305.381	753.686.120.650	791.370.426.682	830.938.948.016	872.485.895.417
02.01.04	Belanja Hibah	753.103.059.000	652.553.954.496	740.296.122.548	771.810.928.675	835.401.475.109	861.171.548.864
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	43.660.000.000	45.843.000.000	48.135.150.000	50.541.907.500	70.069.002.875	55.722.453.019
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	864.710.693.675	545.000.000.000	835.000.000.000	926.556.322.808	1.083.121.664.567	1.140.027.747.796
02.01.06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota/PemDes	1.768.132.573.144	2.144.439.808.335	2.445.850.238.061	2.694.772.168.085	2.854.249.384.894	3.255.171.307.562
02.01.07	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
02.02	**Belanja Langsung**	**3.075.738.677.958**	**2.967.138.907.143**	**3.072.811.788.442**	**3.381.295.991.510**	**3.727.647.952.760**	**4.122.426.827.445**
02.02.01	Belanja Pegawai	181.820.947.320	200.003.042.052	220.003.346.257	210.003.680.883	266.204.048.971	292.824.453.868
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	1.853.744.620.165	1.539.119.082.182	1.543.030.990.400	1.607.334.089.440	1.814.067.498.384	1.985.474.248.222
02.02.03	Belanja Modal	1.040.173.110.473	1.228.016.782.910	1.309.777.451.785	1.563.958.221.187	1.647.376.405.405	1.844.128.125.355
3	**SURPLUS/DEFISIT RIIL**	-310.093.354.871	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000

Keterangan:
Tahun 2017 didasarkan pada Data APBD Tahun 2017, defisit didanai dengn SILPA Tahun sebelumnya
Tahun 2018 s/d 2022 didasarakan pada Proyeksi. Surplus dialokasikan untuk penyertaaan modal daerah

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap OPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikasi rencana program dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis OPD.

Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap OPD dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi OPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama lima tahun. Untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap OPD ke dalam kegiatan prioritas. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Provinsi Papua Barat, berisi program-program prioritas yang

merespon isu-isu strategis yang mengemuka. Rencana program prioritas selanjutnya disajikan berdasarkan bidang urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, wajib bukan pelayanan dasar, pilihan, dan fungsi penunjang.

Dari berbagai program prioritas yang telah disebutkan sesuai dengan urusan baik wajib maupun pilihan, hal tersebut sesungguhnya mengacu pada visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Pada tahun 2017, proyeksi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih secara umum belum dilaksanakan mengingat pendanaan pembangunan pada tahun tersebut mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan pada pemerintahan periode sebelumnya (masa transisi). Secara umum, fokus pembangunan Provinsi Papua Barat pada tahun 2017-2022 ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.2 dimana alokasi belanja untuk urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, dan energi dan sumber daya mineral memegang porsi terbesar dibandingkan urusan lainnya. Porsi pendanaan yang besar untuk beberapa urusan tersebut ditujukan untuk pencapaian misi ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan dan misi keempat yaitu meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar.

Peningkatan IPM Provinsi Papua Barat menjadi salah satu agenda utama dalam rencana pembangunan. Dalam rangka peningkatan IPM terait aspek ekonomi, Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan perhatian yang lebih pada urusan pertanian, kelautan dan perikanan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, dan perindustrian. Perhatian yang lebih tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.2 dimana terjadi kenaikan pendanaan yang signifikan pada urusan-urusan tersebut selama periode 2018-2022. Secara khusus, pendanaan untuk program-program pembangunan pada urusan tersebut merupakan wujud keberpihakan Pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap Orang Asli Papua (OAP). Kenaikan pendanaan yang besar untuk beberapa urusan tersebut ditujukan untuk pencapaian misi kelima yaitu meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata dan misi keenam yaitu membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap ditetapkannya Papua Barat sebagai provinsi konservasi, maka pendanaan untuk urusan kehutanan yang terkait dengan program-program konservasi dan rehabilitasi hutan mendapatkan porsi yang terbesar. Selain konservasi pada wilayah daratan, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga memberikan perhatian pada konservasi perairan. Dengan adanya alokasi anggaran yang cukup besar pada program-program yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam, diharapkan kelestarian sumberdaya alam di Provinsi Papua Barat terjaga dan pembangunan yang dilakukan memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya alam. Komitmen pemerintah pada aspek berkaitan dengan lingkungan hidup dilakukan dalam rangka pencapaian misi kedua yaitu mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mensukseskan target pembangunan yang ingin dicapai, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga memberikan perhatian kepada urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan pembangunan sehingga dengan adanya perencanaan pembangunan yang komprehensif diharapkan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD berjalan optimal dan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di Provinsi Papua Barat. Pendanaan untuk masing-masing urusan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 ditampilkan pada Tabel 7.2. Sedangkan program prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat yang disertai dengan indikator dan target kinerja dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 ditampilkan pada Tabel 7.3.

Tabel 7.2 Alokasi Pendanaan Menurut Urusan Pemerintahan dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022

No.	Urusan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1.	Pendidikan	183,639,099,000	310,717,102,639	320,038,615,718	352,042,477,290	387,246,725,019	425,971,397,521
2.	Kesehatan	197,580,000,000	233,664,303,120	240,674,232,214	264,741,655,435	291,215,820,979	320,337,403,077
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	694,121,296,702	498,218,322,598	513,164,872,276	564,481,359,504	620,929,495,454	683,022,445,000
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	174,300,000,000	106,267,363,965	109,455,384,884	120,400,923,372	132,441,015,709	145,685,117,280
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	70,220,455,659	79,119,745,688	82,047,524,249	86,149,900,462	88,734,397,475	91,396,429,400
6.	Sosial	76,020,000,000	37,608,744,395	39,489,181,614	47,387,017,937	52,125,719,731	57,338,291,704
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
1.	Tenaga Kerja	8,850,000,000	16,421,661,299	17,242,744,364	18,967,018,801	20,863,720,681	22,950,092,749
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	15,000,000,000	27,626,301,411	29,007,616,481	31,908,378,129	35,099,215,942	38,609,137,536
3.	Pangan	9,000,000,000	13,266,884,648	13,930,228,880	15,323,251,769	16,855,576,945	18,541,134,640
4.	Pertanahan	83,530,000,000	46,732,860,624	49,069,503,655	53,976,454,021	59,374,099,423	65,311,509,365
5.	Lingkungan Hidup	11,818,350,000	9,896,181,982	10,390,991,082	11,430,090,190	12,573,099,209	13,830,409,130
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7,969,916,000	5,937,709,189	6,234,594,649	6,546,324,381	6,873,640,600	7,217,322,630
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	71,463,090,000	59,783,819,258	62,773,010,220	81,863,689,321	85,956,873,787	95,254,717,476
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,000,000,000	5,937,709,189	6,234,594,649	6,546,324,381	6,873,640,600	7,217,322,630
9.	Perhubungan	245,173,000,000	129,968,322,598	132,567,689,050	145,824,457,955	160,406,903,751	176,447,594,126
10.	Komunikasi dan Informatika	51,030,975,000	58,255,894,392	61,168,689,112	67,285,558,023	74,014,113,826	81,415,525,208
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	21,000,000,000	31,705,918,456	33,291,214,378	36,620,335,816	45,677,885,882	50,245,674,470
12.	Penanaman Modal	7,800,000,000	19,792,363,965	20,781,982,163	22,860,180,379	25,146,198,417	27,660,818,259
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	35,260,000,000	45,894,281,232	48,188,995,293	50,598,445,058	53,128,367,311	55,784,785,676
14.	Statistik	-	2,653,376,930	2,786,045,776	2,925,348,065	3,071,615,468	3,225,196,242
15.	Persandian	-	1,326,688,465	1,393,022,888	1,462,674,032	1,535,807,734	1,612,598,121

No.	Urusan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
16.	Kebudayaan	9,187,000,000	13,240,242,956	13,902,255,103	15,987,593,369	18,385,732,374	26,143,592,230
17.	Perpustakaan	11,464,850,000	12,463,188,506	13,086,347,931	13,740,665,328	14,427,698,594	15,149,083,524
18.	Kearsipan	535,150,000	1,979,236,396	2,078,198,216	2,182,108,127	2,291,213,533	2,405,774,210
Urusan Pilihan							
1.	Kelautan dan Perikanan	93,558,000,000	61,286,501,395	64,350,826,465	70,785,909,112	87,864,500,023	96,650,950,025
2.	Pariwisata	5,200,000,000	28,335,215,790	29,751,976,579	32,727,174,237	35,999,891,661	44,876,664,384
3.	Pertanian	57,300,000,000	123,901,208,282	128,361,651,780	141,197,816,958	175,317,598,654	212,849,358,520
4.	Kehutanan	35,500,000,000	67,704,017,705	71,089,218,590	78,198,140,449	86,017,954,494	94,619,749,944
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	37,935,000,000	58,646,181,982	61,578,491,082	67,736,340,190	74,509,974,209	81,960,971,630
6.	Perdagangan	17,752,740,000	26,649,864,457	31,256,735,714	46,885,103,572	66,262,124,286	84,514,549,143
7.	Perindustrian	4,247,260,000	13,628,800,378	14,310,240,396	16,456,776,456	18,925,292,924	26,764,086,863
8.	Transmigrasi	3,000,000,000	9,713,512,788	10,199,188,427	11,219,107,270	12,341,017,997	13,575,119,796
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							
1.	Penunjang Pemerintahan Umum	581,684,291,825	528,197,256,796	544,778,505,814	588,261,213,555	635,584,698,955	687,108,933,047
2.	Penunjang Pemerintahan Perencanaan	42,500,000,000	75,798,753,194	76,556,740,726	80,384,577,762	81,188,423,539	89,307,265,893
3.	Penunjang Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	8,000,000,000	9,896,181,982	10,390,991,082	12,469,189,298	14,963,027,157	17,955,632,589
4.	Penunjang Pemerintahan Kepegawaian	52,000,000,000	60,366,710,093	63,385,045,597	68,017,029,699	73,026,886,187	80,329,574,806
5.	Penunjang Pemerintahan Keuangan	133,121,238,772	115,288,699,361	117,594,473,348	123,474,197,015	125,943,680,955	132,240,865,003
6.	Penunjang Pemerintahan Pengawasan	16,826,965,000	19,247,779,040	20,210,167,992	22,231,184,792	24,454,303,271	26,899,733,598
Jumlah		**3,075,588,677,958**	**2,967,138,907,143**	**3,072,811,788,442**	**3,381,295,991,510**	**3,727,647,952,760**	**4,122,426,827,445**

Keterangan: Alokasi total pendanaan tidak mengikutsertakan pendanaan yang berasal DAK

Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																				
1	01	Pendidikan																			
1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4,840,360,000	100%	5,082,378,000	100%	5,336,496,900	100%	5,603,321,745	100%	5,883,487,832	100%	6,177,662,224	100%	6,177,662,224	Dinas Pendidikan
1	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,616,210,000	100%	1,697,020,500	100%	1,781,871,525	100%	1,870,965,101	100%	1,964,513,356	100%	2,062,739,024	100%	2,062,739,024	
1	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	66,380,000	100%	69,699,000	100%	73,183,950	100%	76,843,148	100%	80,685,305	100%	84,719,570	100%	84,719,570	
1	01	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	593,600,000	100%	623,280,000	100%	654,444,000	100%	687,166,200	100%	721,524,510	100%	757,600,736	100%	757,600,736	
1	01	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD:			590,000,000		619,500,000		650,475,000		682,998,750		717,148,688		753,006,122		753,006,122	
				5.1	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				5.3	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	01	06	Program Pendidikan Menengah	6	Fasilitasi Pembangunan Pendidikan Menengah:			42,241,299,000		102,810,245,850		107,336,852,337		123,150,011,139		140,798,459,500		160,478,425,060		160,478,425,060	
				6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	54.00	53.00		50.00		40.00		30.00		30.00		25.00		25.00		
				6.2	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	-	95.00		97.00		99.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				6.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	98.00	98.00		99.00		99.00		99.00		100.00		100.00		100.00		
				6.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke	-	98.00		99.00		99.00		99.00		100.00		100.00		100.00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					SMA/SMK/ MA																
				6.5	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/ MA	2.00	2.00		2.00		2.00		1.00		-		-		-		
				6.6	Rata-rata nilai UAN SMA	68.85	70.00		72.00		74.00		76.00		78.00		80.00		80.00		
				6.7	Angka partisipasi sekolah SMA	79.99	83.11		85.09		86.87		88.48		89.90		91.00		91.00		
				6.8	Persentase fasilitasi penyelenggaraan SMA/SMK berbasis asrama	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				6.9	Persentase kualitas penyelenggaraan SMA/SMK berbasis asrama	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				7	Angka partisipasi Murni SMA	n.a	64.14		66.10		67.76		69.39		70.89		72.00		72.00		
				7.1	Angka partisipasi kasar SMA	n.a	92.93		93.88		94.70		95.42		96.05		97.00		97.00		
				7.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	n.a	0.10		0.10		0.15		0.15		0.20		0.25		0.25		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				7.3	Rasio guru/murid pendidikan menengah	n.a	40.00		40.00		38.00		36.00		35.00		32.00		32.00		
1	01	07	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	7	Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pendidikan Dasar Kabupaten/ Kota:	-	-	57,741,250,000	13	98,160,125,000	13	96,817,952,288	13	106,499,747,517	13	117,149,722,269	13	128,864,694,496	13	128,864,694,496	
				7.1	Pendidikan Anak Usia Dini	n.a	5.00		7.00		7.50		8.00		9.00		10.00		10.00		
				7.2	Rerata lama sekolah	7.06	7.50		7.70		8.00		8.30		8.50		8.50		8.50		
				7.3	Rerata lama sekolah OAP	-	5.00		5.15		5.20		5.30		5.50		5.75		5.75		
				7.4	Harapan lama sekolah	12.26	12.50		12.60		12.65		12.70		12.75		13.00		13.00		
				7.5	Harapan lama sekolah OAP	-	10.00		10.20		10.40		10.50		10.60		10.75		10.75		
				7.6	Angka Melek Huruf	94.14	95.00		95.50		96.00		96.50		97.00		97.50		97.50		
				7.7	Angka Melek Huruf OAP	-	95.00		95.50		96.00		96.50		97.00		97.50		97.50		
				7.8	Persentase guru OAP	-	30.00		35.00		40.00		45.00		50.00		55.00		55.00		
				7.9	Angka partisipasi kasar SD	96.15	109.44		109.20		109.02		108.90		108.82		108.75		108.75		
				7.10	Angka Partisipasi Murni SD	67.51	93.57		93.82		94.07		94.30		94.52		96.00		96.00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				7.11	Rata-rata nilai UAN SD	48.59	50.00		55.00		60.00		65.00		70.00		75.00		75.00		
				7.12	Rata-rata nilai UAN SMP	68.85	70.92		73.04		75.23		77.49		79.82		82.21		84.68		
				7.13	Rasio guru/murid pendidikan dasar	14	32		32		32		32		32		32		32		
				7.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	11	11		11		11		11		11		11		11		
				7.15	Angka partisipasi sekolah SD	84.20	97.28		97.56		97.81		98.03		98.24		98.50		98.50		
				7.16	Angka partisipasi sekolah SMP	96.58	97.12		97.58		97.97		98.30		98.58		99.00		99.00		
				7.17	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar	0.00	0.50		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		
				7.18	Angka partisipasi kasar SMP	n.a	92.93		93.88		94.70		95.42		96.05		97.00		97.00		
				7.19	Angka Partisipasi Murni SMP	n.a	70.84		72.45		73.91		75.23		76.40		77.00		77.00		
				7.20	Angka Putus Sekolah SD/MI	-	15.00		14.00		13.00		12.00		11.00		10.00		10.00		
				7.21	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	-	20.00		19.00		17.50		16.00		15.00		13.00		13.00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				7.22	Angka Kelulusan SD/MI	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				7.23	Angka Kelulusan SMP/MTs	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				7.24	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	n.a	50.00		55.00		60.00		65.00		70.00		75.00		75.00		
				7.25	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	30.00	35.00		40.00		45.00		50.00		55.00		60.00		60.00		
				7.26	Sekolah SMP/MTs dan SMA/MA kondisi bangunan baik	20.00	22.00		25.00		27.00		30.00		32.00		35.00		35.00		
				7.27	Cakupan rekomendasi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (korbonwas) dana otonomi khusus bidang pendidikan yang ditindaklanjuti	n.a	-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
1	01	08	Program Pengembangan	8	Program Afirmasi Pendidikan:			68,200,000,000		88,660,000,000		93,093,000,000		97,747,650,000		102,635,032,500		107,766,784,125		107,766,784,125	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Perguruan Tinggi	8.1	Jumlah peserta program afirmasi pendidikan OAP (SMP, SMA, PT)	437	599		754		909		1,014		1,119		1,224		5,619		
				8.2	Persentase peserta program afirmasi pendidikan yang bermasalah dengan lingkungan sekolah tujuan	0	0		0		0		0		0		0		0		
1	01	09	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	9	Kualitas Tenaga Pendidik:			7,750,000,000		12,994,854,289		14,294,339,718		15,723,773,690		17,296,151,059		19,025,766,165		19,025,766,165	
				9.1	Persentase guru yang tersertifikasi	-	50.00		60.00		70.00		75.00		80.00		85.00		85.00		
				9.2	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
1	**02**	**Kesehatan**																			
1	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	6,437,621,192	100%	6,630,749,828	100%	6,829,672,323	100%	7,034,562,492	100%	7,245,599,367	100%	7,462,967,348	100%	7,462,967,348	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan	100%	100%	4,553,600,000	100%	2,553,600,000	100%	2,630,208,000	100%	2,709,114,240	100%	2,790,387,667	100%	2,874,099,297	100%	2,874,099,297	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					prasarana aparatur																
1	02	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	1,234,200,000	100%	500,000,000	100%	515,000,000	100%	530,450,000	100%	546,363,500	100%	562,754,405	100%	562,754,405	
1	02	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	1,140,000,000	100%	500,000,000	100%	515,000,000	100%	530,450,000	100%	546,363,500	100%	562,754,405	100%	562,754,405	
1	02	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			3,946,032,000		4,064,412,960		4,186,345,349		4,311,935,709		4,441,293,781		4,574,532,594		4,574,532,594	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.7.	Cakupan rekomendasi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (korbonwas) dana otonomi khusus bidang kesehatan yang ditindaklanjuti	n.a	-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
1	02	06	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100%	100%	11,903,822,341	100%	14,284,586,809	100%	17,141,504,171	100%	20,569,805,005	100%	24,683,766,006	100%	29,620,519,208	100%	29,620,519,208	
1	02	07	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	7	Persentase Kabupaten/ Kota yang minimal 25% fasilitas pelayanan kesehatan dasarnya dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar berkualitas	n.a	25%	4,749,504,000	31%	8,150,226,260	46%	10,595,294,138	62%	13,773,882,379	77%	17,906,047,093	100%	23,277,861,221	100%	23,277,861,221	
				8	Cakupan Balita Gizi Buruk				100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Mendapat Perawatan																
				9	Persentase Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat (KIS)				70%		80%		90%		100%		100%		100%		
				10	Persentase Kemitraan Kesehatan Terhadap Lembaga Agama, Adat dan Lembaga Kemasyarakatan				25%		30%		35%		40%		50%		50%		
				11	Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat	n.a	-		13		13		13		13		13		13		
				12	Persensatese Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Hidup Sehat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				13	Angka kematian bayi per 1.000	49	45		43		42		42		41		40		40		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					kelahiran hidup																
				14	Persentase Kab/Kota yang Memiliki Profil Kesehatan Setiap Tahunnya				31%		46%		62%		77%		100%		100%		
					Angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran	951	955		957		958		958		959		960		960		
					Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	28	25		22		20		20		18		15		15		
					Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	200	190		180		170		160		150		150		150		
				15	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				16	Menurunkan Angka Kematian Ibu menjadi < 50	49	< 50		< 50		< 50		< 50		< 50		< 50		< 50		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Kelahiran Hidup																
				17	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak di Usia Pendidikan Dasar Kabupaten/ kota	n.a	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				18	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Produktif di Kabupaten/ kota	n.a	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				19	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Kabupaten/ kota	n.a	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				20	Persentase Kab/kota yang melaksanakan Keluarga Sehat	n.a	-		25%		30%		35%		40%		50%		50%		
				21	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang dilaksanakan dillingkungan kantor Gubernur Papua Barat	n.a	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				22	Cakupan Kab/Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	n.a	-		31%		46%		62%		77%		100%		100%		
1	02	08	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	23	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	100%	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	09	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	24	Cakupan Puskesmas Terakreditasi di Distrik	n.a	10%	13,910,000,000	29%	38,465,377,230	49%	56,207,810,197	68%	61,973,864,657	87%	67,122,739,950	100%	71,243,335,741	100%	71,243,335,741	
				25	Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	n.a	-		70%		80%		90%		100%		100%		100%		
1	02	10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	26	Jumlah Rumah Sakit Rujukan	n.a	-	100,529,450,500		105,555,923,025		110,833,719,176		116,375,405,135		122,194,175,392		128,303,884,161		128,303,884,161	
				27	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.0179	-		0.0192		0.0229		0.0229		0.0244		0.0244		0.0244		
				28	Cakupan Sarana dan Prasarana UTD dan BDRS Tingkat Provinsi	n.a	-		70%		80%		90%		100%		100%		100%		
1	02	11	Program Peningkatan Pelayanan	29	Menurunkan Angka Kematian Bayi	28	< 10	500,000,000		-		-		-		-		-		-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			kesehatan anak balita		menjadi < 10 per Kelahiran Hidup																
1	02	12	Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	30	Persentase Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat (KIS)	n.a	70%	491,342,600		-		-		-		-		-		-	
1	02	13	Program Rujukan Kesehatan bagi orang Papua	31	Persentase Pasien Masyarakat OAP Sakit Berat di Rujuk	100%	100%	17,142,884,297	100%	20,571,461,156	100%	24,685,753,388	100%	29,622,904,065	100%	35,547,484,878	100%	42,656,981,854	100%	42,656,981,854	
1	02	14	Program Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan	32	Cakupan tenaga kesehatan yang meningkat kapasitas dalam perencanaan pembangunan kesehatan	n.a	100%	641,514,500		-		-		-		-		-		-	
1	02	15	Program pengiriman dan pendisiplina	33	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Bidan	n.a	-	1,080,000,000	29	1,296,000,000	29	1,555,200,000	29	1,866,240,000	29	2,239,488,000	29	2,687,385,600	145	2,687,385,600	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			n tenaga kesehatan ke distrik, kampung terpencil dan terisolir		Desa Yang ditempatkan																
				34	Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, Tenaga Medis per satuan penduduk	TK : 0,59; D : 0,21; TM : 0,38	TK : 0,76; D : 0,38; TM : 0,38		TK : 1,05; D : 0,52; TM : 0,53		TK : 1,32; D : 0,65; TM : 0,67		TK : 1,57; D : 0,77; TM : 0,80		TK : 1,81; D : 0,89; TM : 0,92		TK : 2; D : 1; TM : 1		TK : 2; D : 1; TM : 1		
1	02	16	Program Bimdal Pendidikan dan Pelatihan	35	Cakupan tenaga kesehatan yang meningkat kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan	n.a	100%	15,448,893,500		-		-		-		-		-		-	
1	02	17	Program Bimdal Registrasi dan Akreditasi	36	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	n.a	-	342,570,000		-		-		-		-		-		-	
1	02	18	Program Bimdal Kesehatan Rujukan	37	Cakupan tenaga kesehatan yang meningkat kapasitas dalam pelayanan rujukan	n.a	100%	600,000,000		-		-		-		-		-		-	
1	02	19	Program Imunisasi	38	Pencapaian UCI kampung	45.92%	-	1,000,000,000	64.74%	1,650,000,000	73.83%	1,815,000,000	82.73%	1,996,500,000	91.43%	2,196,150,000	100%	2,415,765,000	100%	2,415,765,000	
1	02	20	Program Penanggulangan	39	Cakupan Penemuan dan Penanganan	36.49%	48.39%	1,650,000,000		-		-		-		-		-		-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Penyakit Malaria		Penderita Penyakit Malaria																
1	02	21	Program Penanggulangan Penyakit DBD	40	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100%	250,000,000		-		-		-		-		-		-	
1	02	22	Program Penanggulangan Penyakit Kusta	41	Jumlah kabupaten dengan eliminasi kusta	n.a	-	295,234,490		-		-		-		-		-		-	
1	02	23	Program Penanggulangan HIV/AIDS	42	Menurunnya prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 menjadi <1,5% pada tahun 2022	2.70 %	2.00 %	1,892,800,000		-		-		-		-		-		-	
1	02	24	Program kemitraan kesehatan dengan lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga masyarakat	43	Persentase Kemitraan Kesehatan Terhadap Lembaga Agama, Adat dan Lembaga Kemasyarakatan	n.a	-	776,500,000		-		-		-		-		-		-	
1	02	25	Program Peningkatan Jumlah Rumah Sakit PKS Jamkesmas	44	Cakupan jumlah rumah sakit PKS Jamkesmas	n.a	-	608,730,500	3	639,167,025	5	671,125,376	7	704,681,645	10	739,915,727	15	776,911,514	15	776,911,514	
1	02	26	Program Kesehatan Lingkungan	45	Persentase Kab/kota yang	n.a	-	541,950,000		-		-		-		-		-		-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					melaksanakan Keluarga Sehat																
1	02	27	Program Penanggulanagn Bencana Bidang Kesehatan	46	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan	n.a	100%	530,000,000		-		-		-		-		-		-	
1	02	28	Program Pengendalian Penyakit Filariasis	47	Persentase Jumlah Orang Yang Minum Obat Filariasis	n.a	80%	250,000,000		-		-		-		-		-		-	
1	02	29	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	48	Persentase Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Pandu PTM	n.a	80%	760,000,000	85%	836,000,000	90%	919,600,000	94%	1,011,560,000	98%	1,112,716,000	100%	1,223,987,600	100%	1,223,987,600	
				49	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten/kota	n.a	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				50	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM di Kabupaten/kota	n.a	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	02	30	Program Penanggulangan ISPA	51	Cakupan Pelayanan Kesehatan ISPA Kabupaten/kota	n.a	100%	200,000,000		-		-		-		-		-		-	
1	02	31	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	52	Persentase Kab/Kota yang Memiliki Profil Kesehatan Setiap Tahunnya	15%	15%	550,000,000		-		-		-		-		-		-	
1	02	32	Program Penjaringan kasus TB Positif (+) di Layanan Kesehatan	53	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	68.45%	74.31%	498,350,000		-		-		-		-		-		-	
1	02	33	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Frambosia	54	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Frambusia	n.a	-	425,000,000		-		-		-		-		-		-	
1	02	34	Program Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	55	Cakupan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah penyakit menular	n.a	100%	450,000,000		-		-		-		-		-		-	
1	02	35	Program Penanggulangan Diare	56	Cakupan Penanggulangan Diare	n.a	100%	650,000,000		-		-		-		-		-		-	
1	02	36	Program Kesehatan Haji	57	Angka kematian calon	n.a	-	350,000,000	<2	385,000,000	<2	423,500,000	<2	465,850,000	<2	512,435,000	<2	563,678,500	<2	563,678,500	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					jemaah haji < 2 per 1.000 calon jemaah haji pada setiap tahun penyelenggaraan haji sampai tahun 1443H / 2022M																	
1	02	37	Program Kesehatan Tradisioanl, Alternatif dan Komplementer	58	Jumlah Tanaman Obat Asli Papua Yang terdata	n.a	-	200,000,000	20	220,000,000	40	242,000,000	60	266,200,000	80	292,820,000	100	322,102,000	100	322,102,000	
1	02	38	Program Kesehatan Jiwa	59	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten/kota	n.a	-	300,000,080	100%	330,000,088	100%	363,000,097	100%	399,300,106	100%	439,230,117	100%	483,153,129	100%	483,153,129	
1	02	39	Program Kesehatan Indra	60	Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 1 fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan dan mengembangkan yankes indera	1	2	450,000,000	3	495,000,000	5	544,500,000	8	598,950,000	11	658,845,000	13	724,729,500	13	724,729,500	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					sesuai standar																
1	02	40	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	61	Menurunnya prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 menjadi <1,5% pada tahun 2022			-	1.90%	7,800,522,939	1.80%	8,580,575,233	1.70%	9,438,632,756	1.60%	10,382,496,032	1.50%	11,420,745,635	1.50%	11,420,745,635	
				62	Cakupan Penanggulangan Diare				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				63	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Frambusia				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				64	Cakupan Pelayanan Kesehatan ISPA Kabupaten/ kota				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				65	Jumlah kabupaten dengan eliminasi kusta				3		5		8		11		13		13		
				66	Persentase Jumlah Orang Yang Minum Obat Filariasis				85%		90%		95%		97%		100%		100%		
				67	Cakupan Penemuan dan				65.04%		88.78%		90.50 %		95.49 %		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Penanganan Penderita Penyakit Malaria																	
				68	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				69	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA				87.94%		90.51%		92.96%		95.41%		100%		100%		
1	02	41	Program Bimdal Kesehatan	70	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi			-	70%	18,736,275,800	80%	20,609,903,380	90%	22,670,893,718	100%	24,937,983,090	100%	27,431,781,399	100%	27,431,781,399	
				71	Cakupan tenaga kesehatan yang meningkat kapasitas dalam perencanaan pembangunan kesehatan				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				72	Cakupan tenaga kesehatan yang meningkat kapasitas melalui				100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					pendidikan dan pelatihan																	
				73	Cakupan tenaga kesehatan yang meningkat kapasitas dalam pelayanan rujukan				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4,885,608,800	100%	5,129,889,240	100%	5,386,383,702	100%	5,655,702,887	100%	5,938,488,031	100%	6,235,412,433	100%	6,235,412,433	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	891,000,000	100%	935,550,000	100%	982,327,500	100%	1,031,443,875	100%	1,083,016,069	100%	1,137,166,872	100%	1,137,166,872	
1	03	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	191,500,000	100%	201,075,000	100%	211,128,750	100%	221,685,188	100%	232,769,447	100%	244,407,919	100%	244,407,919	
1	03	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	2,921,250,000	100%	3,067,312,500	100%	3,220,678,125	100%	3,381,712,031	100%	3,550,797,633	100%	3,728,337,514	100%	3,728,337,514	
1	03	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilita			2,111,800,000		2,217,390,000		2,328,259,500		2,444,672,475		2,566,906,099		2,695,251,404		2,695,251,404	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		s kinerja OPD																
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.7.	*Cakupan Keikutsertaan OAP Berdasarkan Skill dalam Pembangunan Infrastruktur*	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	03	06	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	6	Persentase terhubungnya antar wilayah	42.14%	62.99%	173,150,000,000	66.21%	124,281,595,980	74.66%	128,010,043,859	83.10%	140,811,048,245	91.54%	154,892,153,070	100%	170,381,368,377	100%	170,381,368,377	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					kabupaten/kota																
				7	Persentase panjang jalan provinsi yang ditingkatnya kualitasnya	66.01%	66.97%		71.16%		78.34%		85.53%		92.72%		100%		100%		
				8	Panjang drainase yang terbangun di tingkat provinsi (km)	25	10		10		10		10		10		10		60		
				9	Rasio panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat provinsi	60.00 %	70.00%		80.00 %		85.00%		90.00 %		95.00 %		100%		100%		
1	03	07	Program pembangunan jalan dan jembatan	10	Panjang jalan provinsi yang dibangun (km)	1,399.87	55.00	165,200,000,000	74.50	118,575,337,314	195.00	122,132,597,433	195.00	134,345,857,177	195.00	147,780,442,894	195.40	162,558,487,184	909.90	162,558,487,184	
				11	Panjang jembatan yang dibangun (m)	590.00	736.00		887.00		1,030.00		1,176.00		1,324.00		1,470.00		6,623.00		
1	03	08	Program pembangunan turap/talud/bronjong	12	Persentase beton/ bronjong /pasangan batu penahan	30.00%	34.00%	18,500,000,000	38.00%	13,278,715,135	42.00%	13,677,076,589	46.00 %	15,044,784,248	50.00 %	16,549,262,673	55.00%	18,204,188,940	55.00%	18,204,188,940	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					abrasi yang dibangun																
1	03	09	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	13	Persentase jalan yang dipelihara	73.39%	73.39%	16,780,000,000	75.97%	12,044,153,512	79.20%	12,405,478,117	83.03%	13,646,025,929	91.51%	15,010,628,522	100%	16,511,691,374	100%	16,511,691,374	
				14	Persentase jalan provinsi dengan kualitas baik	55.25%	62.71%		70.17%		77.62%		85.08 %		92.54%		100%		100%		
				15	Persentase jembatan provinsi dengan kualitas baik	40.14%	50.07%		60.14%		70.07%		80.00 %		90.07 %		100%		100%		
1	03	10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	16	Panjang saluran irigasi provinsi yang dibangun (km)	0.155	5	32,088,900,000	5	23,032,397,951	6	23,723,369,890	6	26,095,706,879	6	28,705,277,567	6	31,575,805,323	34	31,575,805,323	
				17	Persentase panjang saluran irigasi provinsi yang direhabilitasi	n.a	n.a		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				18	Panjang saluran irigasi provinsi yang ditingkatkan	0.027	3		4		4		4		5		6		24		
1	03	11	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku					3,700,000,000		2,655,743,027		2,735,415,318		3,008,956,850		3,309,852,535		3,640,837,788		3,640,837,788	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	03	12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	19	Jumlah distrik yang mendapatkan bantuan air bersih	63	65	13,300,000,000	67	9,546,319,530	70	9,832,709,115	80	10,815,980,027	90	11,897,578,030	100	13,087,335,833	472	13,087,335,833	
1	03	13	Program Pengendalian Banjir	20	Panjang sungai yang dinormalisasi (km)	2	30	76,437,100,000	30	54,864,133,873	35	56,510,057,889	40	62,161,063,678	40	68,377,170,046	45	75,214,887,050	220	75,214,887,050	
1	03	14	Program Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan					10,000,000,000		7,177,683,857		7,393,014,372		8,132,315,810		8,945,547,391		9,840,102,130		9,840,102,130	
1	03	15	Program Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	21	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	76.00%	78.00%	3,500,000,000	81.00%	2,512,189,350	83.00%	2,587,555,030	86.00%	2,846,310,533	89.00%	3,130,941,587	92.00%	3,444,035,745	92.00%	3,444,035,745	
1	03	16	Program Penataan Bangunan Gedung					49,100,000,000		35,242,427,737		36,299,700,569		39,929,670,626		43,922,637,688		48,314,901,457		48,314,901,457	
1	03	17	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	22	Panjang jalan lingkungan kampung yang terbangun (km)	8.81	9.70	87,228,437,902	1.06	58,954,882,311	11.73	60,492,504,445	12.90	67,148,193,768	14.19	74,499,773,968	15.61	82,618,350,229	65.19	82,618,350,229	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				23	Panjang jalan poros kampung yang terbangun	26.60	29.26		32.19		35.40		38.94		42.84		47.12		225.76		
				24	Jumlah TPA Regional	1	-		-		-		1		1		1		3		
				25	Jumlah TPA bantuan provinsi yang dibangun	3	2		2		2		2		1		1		10		
1	03	18	Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur					5,500,000,000		3,947,726,121		4,066,157,905		4,472,773,695		4,920,051,065		5,412,056,171		5,412,056,171	
1	03	19	Program Perencanaan Tata Ruang	26	Jumlah Kebijakan tata ruang yang telah disusun	1	1	18,940,800,000	2	13,595,107,439	2	14,002,960,663	2	15,403,256,729	2	16,943,582,402	2	18,637,940,642	11	18,637,940,642	
1	03	20	Program Pemanfaatan Ruang	27	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi	n.a	-	1,223,325,000	90.00 %	878,064,010	90.00 %	904,405,931	90.00 %	994,846,524	90.00 %	1,094,331,176	90.00%	1,203,764,294	90.00%	1,203,764,294	
1	03	21	Program Penataan Ruang dan Kawasan	28	Cakupan kabupaten yang sudah menyusun RDTR	n.a	-	7,509,100,000	50.00%	5,389,794,585	60.00 %	5,551,488,422	70.00%	6,106,637,265	80.00 %	6,717,300,991	100%	7,389,031,090	100%	7,389,031,090	
				29	Persentase kesesuaian rencana pembangunan (pola dan struktur	n.a	-		90.00 %		90.00 %		90.00 %		90.00 %		90.00%		90.00%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					ruang) dengan RTRW Provinsi																
1	03	22	Program Pengendalian Penataan Ruang	30	Persentase kasus pelanggaran tata ruang yang dilaporkan dan ditangani	n.a	100%	962,475,000	100%	690,834,127	100%	711,559,151	100%	782,715,066	100%	860,986,572	100%	947,085,230	100%	947,085,230	
1	**04**	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**																			
1	04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3,405,429,700	100%	3,405,429,700	100%	3,405,429,700	100%	3,405,429,700	100%	3,405,429,700	100%	3,405,429,700	100%	3,405,429,700	**Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
1	04	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	6,054,772,800	100%	6,054,772,800	100%	6,054,772,800	100%	6,054,772,800	100%	6,054,772,800	100%	6,054,772,800	100%	6,054,772,800	
1	04	03	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	1,200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	
1	04	04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	1,850,500,000	100%	1,850,500,000	100%	1,850,500,000	100%	1,850,500,000	100%	1,850,500,000	100%	1,850,500,000	100%	1,850,500,000	
1	04	05	Program peningkatan pengembangan sistem	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilita			1,250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			pelaporan capaian kinerja dan keuangan		s kinerja OPD																
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	04	06	Program Pengembangan Sistem Perumahan	6	Jumlah Kebijakan Perumahan yang disusun	1	2	9,957,750,000	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	12	-	
1	04	07	Program Pembangunan Perumahan Formal	7	Cakupan Rumah Layak Huni bagi OAP yang tepat syarat	81	135	104,526,541,400	500	51,587,830,119	550	53,488,286,097	605	60,013,184,957	666	67,190,573,703	732	75,085,701,323	3,188	75,085,701,323	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				8	Persentase Rumah Layak Huni	20.48	22.50		24.68		27.11		29.86		32.86		36.10		36.10		
				9	Persentase pembangunan rumah bagi OAP	20.48	22.50		24.68		27.11		29.86		32.86		36.10		36.10		
				10	Cakupan Pendataan dan Verifikasi Kawasan Pemukiman						-		-		100%		100%		100%		
1	04	08	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	11	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	17.49	17.49	-	17.49	21,540,304,046	17.49	22,186,513,168	17.49	24,405,164,485	17.49	26,845,680,933	17.49	29,530,249,026	17.49	29,530,249,026	
				12	Cakupan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh	203,11	67,28		73,76		48,37		11,50		2,20		0		0		
				13	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi layak	62,00	62,00		70,00		80,00		90,00		95,00		100,00		100,00		
				14	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	17.49	17.33		17.20		16.79		16.53		16.26		15.99		15.99		
				15	Cakupan rumah tangga berakses air minum layak	63,00	63,00		70,00		80,00		90,00		95,00		100,00		100,00		
				16	Persentase Pembangun	20.48	22.50		24.68		27.11		29.86		32.86		36.10		36.10		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					an Drainase perkotaan																
1	04	09	Program Rumah Susun	17	Jumlah Rusun yang dibangun	2	1	6,316,835,000	5	3,457,805,874	5	3,561,540,050	5	3,917,694,055	5	4,309,463,461	5	4,740,409,807	26	4,740,409,807	
1	04	10	Program Pembangunan Perumahan Swadaya	18	Cakupan Pembangunan Perumahan Swadaya	100%	100%	20,795,200,000	100%	11,383,195,019	100%	11,724,690,869	100%	12,897,159,956	100%	14,186,875,952	100%	15,605,563,547	100%	15,605,563,547	
1	04	11	Program Pembangunan Perumahan Tradisional	19	Cakupan Pembangunan Perumahan Tradisional	100%	100%	7,622,271,100	100%	4,172,395,477	100%	4,297,567,341	100%	4,727,324,075	100%	5,200,056,483	100%	5,720,062,131	100%	5,720,062,131	
1	04	12	Program Pemanfaatan Lahan dan Pengendalian Ruang	20	Cakupan Pembinaan Pemanfaatan Lahan dan Pengendalian Ruang	100%	100%	3,000,000,000	100%	722,944,990	100%	744,633,340	100%	819,096,674	100%	901,006,341	100%	991,106,975	100%	991,106,975	
1	04	13	Program Peraturan Perundang-Undangan	21	Cakupan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan	100%	100%	2,000,000,000		-		-		-		-		-		-	
1	04	14	Program Pengendalian, Perencanaan dan Standarisasi	22	Cakupan Pengendalian, Perencanaan dan Standarisasi bidang Perumahan	100%	100%	1,000,000,000		-		-		-		-		-		-	
1	04	15	Program Rumah Umum dan Komersil	23	Cakupan Pengembangan Rumah Umum dan Komersil	100%	100%	3,000,000,000	100%	1,642,185,940	100%	1,691,451,518	100%	1,860,596,670	100%	2,046,656,337	100%	2,251,321,971	100%	2,251,321,971	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	04	16	Program Pendataan dan Verifikasi Kawasan Pemukiman	24	Cakupan Pendataan dan Verifikasi Kawasan Pemukiman	100%	100%	3,000,000,000		-		-		-		-		-		-	
1	**05**	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**																			
1	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2,460,105,000	100%	3,392,423,032	100%	3,562,044,183	100%	3,740,146,392	100%	3,852,350,784	100%	3,967,921,308	100%	3,967,921,308	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
1	05	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	4,025,310,000	100%	1,136,490,128	100%	1,136,490,128	100%	1,136,490,128	100%	1,114,842,697	100%	1,093,607,598	100%	1,093,607,598	
1	05	03	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	214,344,000	100%	318,217,236	100%	334,128,098	100%	350,834,502	100%	361,359,538	100%	372,200,324	100%	372,200,324	
1	05	04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	824,881,000	100%	984,342,569	100%	1,033,559,697	100%	1,085,237,682	100%	1,117,794,813	100%	1,151,328,657	100%	1,151,328,657	
1	05	05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			411,860,000		340,947,038		357,994,390		375,894,110		387,170,933		398,786,061		398,786,061	
				5.1	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2	Opini Pemeriksa	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					terhadap Laporan keuangan OPD																
				5.3	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	05	06	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	6	Persentase rekomendasi FKDM yang ditindaklanjuti pihak terkait	8.33	8.33	525,455,659	100.00	2,557,102,788	100.00	2,684,957,927	100.00	2,819,205,823	100.00	2,903,781,998	100.00	2,990,895,458	100.00	2,990,895,458	
				7	Cakupan pembinaan pencegahan tindak kriminal bagi remaja	n.a	100		650		700		750		800		850		3,850		
				8	Indeks potensi kerawanan sosial	n.a	Tidak Rawan		Tidak Rawan		Tidak Rawan		Tidak Rawan		Tidak Rawan		Tidak Rawan		Tidak Rawan		
1	05	07	Program Kemitraan Bina	9	Cakupan pembinaan wawasan	60	90	783,500,000	120	2,913,676,565	150	3,059,360,393	150	3,212,328,413	150	3,308,698,266	150	3,407,959,213	810	3,407,959,213	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan		kebangsaan bagi remaja																
				10	Persentase Forum Pembinaan Kebangsaan (FPK) kabupaten	23	31		54		77		100		100		100		100		
1	05	08	Program Pendidikan Politik Masyarakat					100,000,000		-		-		-		-		-		-	
1	05	09	Program Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	11	Cakupan pengawasan orang asing dan lembaga asing kabupaten	100	100	50,000,000	100	568,245,064	100	568,245,064	100	596,657,317	100	614,557,037	100	765,525,318	100	765,525,318	
1	05	10	Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat (Tanggal 17 Agustus 2017)					1,500,000,000		-		-		-		-		-		-	
1	05	11	Program Peningkatan Nilai - Nilai Toleransi Keagamaan	12	Cakupan fasilitasi pembinaan FKUB	100	100	650,000,000	100	1,647,910,685	100	1,730,306,220	100	1,816,821,531	100	1,871,326,176	100	1,927,465,962	100	1,927,465,962	
1	05	12	Program Penguatan dan Pendayagunaan					10,000,000,000		-		-		-		-		-		-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Lembaga Suprastruktur dan Infranstruktur Politik Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																		
1	05	13	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	13	Tingkat fasilitasi Forkopimda	100	100	175,000,000	100	1,477,437,166	100	1,477,437,166	100	1,551,309,024	100	2,229,685,394	100	2,296,575,955	100	2,296,575,955	
1	05	14	Program Penanganan Konflik Sosial	14	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Provinsi	12.22	25	250,000,000	50	2,021,673,819	75	2,122,757,510	100	2,228,895,386	100	2,295,762,247	100	2,364,635,115	100	2,364,635,115	
1	05	15	Program Pendidikan Politik Masyarakat	15	Cakupan peserta yang memahami politik dalam pembangunan daerah	66	80	600,000,000	100	-	125	-	150	-	175	-	200	-	896	-	
1	05	16	Program Fasilitasi Kelembagaan Politik	16	Tingkat fasilitasi dan tertib administrasi partai politik	-	50	300,000,000	70	2,187,743,496	85	2,297,130,671	100	2,411,987,204	100	2,484,346,821	100	2,558,877,225	100	2,558,877,225	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				17	Indeks Demokrasi Indonesia	n.a	60		63	1,591,086,179	65	1,670,640,488	66	2,386,629,268	67	2,458,228,146	70	2,870,719,944		2,870,719,944	
1	05	17	Program Kemitraan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan dan Pembauran					-		1,591,086,179		1,983,175,273		2,024,041,307		1,586,706,571		1,531,050,637		1,531,050,637	
1	05	18	Program Peningkatan Ketahanan Seni dan Budaya Masyarakat					-		1,912,404,262		2,008,024,475		1,591,086,179		1,560,779,776		1,294,264,156		1,294,264,156	
1	05	19	Program Peningkatan Pemahaman Tentang Keormasan	18	Cakupan fasilitasi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	n.a	n.a	-	70	3,068,523,345	85	3,068,523,345	100	3,221,949,512	100	3,318,607,998	100	3,418,166,238	100	3,418,166,238	
1	05	20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3,689,121,000	100%	2,082,713,820	100%	2,047,686,360	100%	2,052,340,193	100%	2,017,823,562	100%	1,983,887,438	100%	1,983,887,438	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	05	21	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	6,560,950,000	100%	6,761,134,506	100%	6,647,424,517	100%	6,662,532,300	100%	6,550,480,620	100%	6,440,313,446	100%	6,440,313,446	
1	05	22	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	72,000,000	100%	74,196,829	100%	72,948,973	100%	73,114,766	100%	71,885,109	100%	70,676,132	100%	70,676,132	
1	05	23	Program peningkata	4	Cakupan pembinaan	100%	100%	1,673,824,000	100%	1,724,894,901	100%	1,695,885,305	100%	1,699,739,590	100%	1,671,153,061	100%	1,643,047,305	100%	1,643,047,305	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			n kapasitas sumber daya aparatur		kapasitas sumberdaya aparatur																
1	05	24	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			245,000,000		252,475,320		248,229,145		248,793,302		244,609,051		240,495,171		240,495,171	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	05	25	Program pencegahan dini dan penanggula	6	Kab/kota siaga dan tangguh bencana	n.a	-	4,331,000,000	6	4,463,145,359	8	4,388,083,369	13	4,398,056,286	13	4,324,088,976	13	4,251,365,661	13	4,251,365,661	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			ngan korban bencana alam	7	Indek Risiko Bencana	n.a	150		147		143		140		135		130		130		
				8	Kapasitas aparatur penanggulangan bencana	n.a	0.50		0.52		0.54		0.56		0.58		0.60		0.60		
				9	Cakupan Forum PRB tingkat kabupaten	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				10	Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				11	Tingkat penanganan bencana	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				12	Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				13	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat pasca bencana	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				14	Persentase ASN siaga dan tangguh bencana	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
1	05	26	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	15	Cakupan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	100.00	100.00	6,836,355,000	100.00	10,383,285,603	100.00	11,876,614,109	100.00	13,654,960,729	100.00	15,229,204,061	100.00	16,831,088,331	100.00	16,831,088,331	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	05	27	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	16	Cakupan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	100.00	100.00	9,591,750,000	100.00	9,884,408,797	100.00	9,718,171,013	100.00	9,740,257,765	100.00	9,576,444,339	100.00	9,415,385,957	100.00	9,415,385,957	
1	05	28	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	12,256,181,500	100%	3,535,417,300	100%	3,396,504,545	100%	3,566,329,772	100%	3,403,234,426	100%	3,221,741,957	100%	3,221,741,957	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	29	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,351,200,000	100%	1,418,760,000	100%	1,489,698,000	100%	1,564,182,900	100%	1,642,392,045	100%	1,724,511,647	100%	1,724,511,647	
1	05	30	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	-	100%	3,676,854,450	100%	3,860,697,173	100%	4,053,732,031	100%	4,256,418,633	100%	4,469,239,564	100%	4,469,239,564	
1	05	31	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	-	100%	3,440,899,825	100%	3,612,944,816	100%	3,793,592,057	100%	3,983,271,660	100%	4,182,435,243	100%	4,182,435,243	
1	05	32	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			392,618,500		412,249,425		432,861,896		454,504,991		477,230,241		501,091,753		501,091,753	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	05	32	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	6	Tingkat efektivitas penegakan PERDA	n.a	100.00	-	100.00	800,000,000	100.00	840,000,000	100.00	882,000,000	100.00	926,100,000	100.00	972,405,000	100.00	972,405,000	
				7	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	n.a	1		1		1		1		2		2		2		
				8	Angka kriminalitas	n.a	0.20		0.18		0.17		0.15		0.15		0.13		0.13		
				9	Cakupan patroli petugas Satpol PP	n.a	3		3		3		3		3		3		3		
				10	Cakupan penanganan	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					penyakit masyarakat																
				11	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	n.a	60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		
				12	Cakupan ketersediaan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada objek strategis pemerintahan	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
1	05	33	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	13	Rasio siskamling per jumlah kampung di wilayah prioritas	n.a	70.00	-	70.00	2,500,000,000	70.00	2,625,000,000	70.00	2,756,250,000	70.00	2,894,062,500	70.00	3,038,765,625	70.00	3,038,765,625	
1	**06**	**Sosial**																			
1	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2,776,266,000	100%	1,248,617,330	100%	1,251,454,539	100%	1,433,483,868	100%	1,504,221,609	100%	1,579,479,687	100%	1,579,479,687	**Dinas Sosial**
1	06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	4,105,668,000	100%	1,846,511,903	100%	1,850,707,920	100%	2,119,901,565	100%	2,225,896,714	100%	2,337,191,503	100%	2,337,191,503	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	06	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	76,650,000	100%	34,473,108	100%	34,551,242	100%	39,576,830	100%	41,555,531	100%	43,633,518	100%	43,633,518	
1	06	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	122,500,000	100%	55,094,009	100%	55,219,222	100%	63,250,992	100%	66,413,167	100%	69,734,106	100%	69,734,106	
1	06	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD	80%	80%	271,984,600	100%	94,543,163	100%	94,757,688	100%	108,540,062	100%	113,966,152	100%	119,665,279		119,665,279	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					dan DPA OPD																
1	06	06	Program Publikasi dan Promosi Pembangunan Kesejahteraan Sosial	6	Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	n.a	Tersedia	716,308,800	Tersedia	322,157,740	Tersedia	322,889,814	Tersedia	369,855,043	Tersedia	388,348,053	Tersedia	407,765,549	Tersedia	407,765,549	
1	06	07	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	7	Kab/Kota Berketahanan Sosial	n.a	-	9,649,072,000	-	4,339,641,273	13	4,349,503,836	13	4,982,158,822	13	5,231,267,208	13	5,492,830,405	13	5,492,830,405	
1	06	07	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	8	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	n.a	-	25,810,816,000	20.00	8,116,568,982	20.00	8,135,015,601	20.00	9,318,290,269	20.00	9,784,204,806	20.00	10,273,415,093	100.00	10,273,415,093	
				9	Persentase PMKS yang tertangani	n.a	-		10.00		20.00		30.00		40.00		50.00		50.00		
				10	Tingkat fasilitasi pembangunan KAT	n.a	5.00		10.00		15.00		20.00		25.00		30.00		30.00		
1	06	08	Program Bantuan dan Jaminan Sosial	11	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	n.a	-	4,712,148,000	10.00	1,842,953,505	20.00	1,843,278,815	30.00	2,111,392,449	40.00	2,216,961,415	50.00	2,327,808,948	50.00	2,327,808,948	
				12	Persentase izin pengumpul	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					an dana yang terbit dari permohonan tepat syarat																	
				13	Cakupan pemulihan trauma bencana alam dan sosial tepat syarat	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
1	06	09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	14	Cakupan fasilitasi sarana prasarana keagamaan	n.a	100.00	8,444,081,000	100.00	4,101,985,059	100.00	4,111,307,537	100.00	4,709,315,859	100.00	4,944,781,746	100.00	5,192,020,084	100.00	5,192,020,084	
1	06	10	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	15	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	n.a	-	19,334,505,600	10.00	15,606,198,323	20.00	17,440,495,401	30.00	22,131,252,176	40.00	25,608,103,329	50.00	29,494,747,532	50.00	29,494,747,532	
				16	Jumlah Lembaga KESOS yang Aktif	n.a	2		4		5		6		8		10		10		
				17	Pembangunan panti	n.a	-		-		-		1		1		1		3		
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	**01**	**Tenaga Kerja**																			
2	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2,580,450,000	100%	2,709,472,500	100%	2,844,946,125	100%	2,987,193,431	100%	3,136,553,103	100%	3,293,380,758	100%	3,293,380,758	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	01	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,075,000,000	100%	1,128,750,000	100%	1,185,187,500	100%	1,244,446,875	100%	1,306,669,219	100%	1,372,002,680	100%	1,372,002,680	
2	01	03	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	99,500,000	100%	104,475,000	100%	109,698,750	100%	115,183,688	100%	120,942,872	100%	126,990,015	100%	126,990,015	
2	01	04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	1,350,000,000	100%	1,417,500,000	100%	1,488,375,000	100%	1,562,793,750	100%	1,640,933,438	100%	1,722,980,109	100%	1,722,980,109	
2	01	05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			545,050,000		572,302,500		600,917,625		630,963,506		662,511,682		695,637,266		695,637,266	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	01	06	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	6	Jumlah tenaga kerja OAP yang ditempatkan	23,128	22,484	-	23,159	4,397,286,299	23,853	4,617,150,614	24,569	4,848,008,145	25,306	5,090,408,552	26,065	5,344,928,980	26,065	5,344,928,980	
				7	Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan	57,820	56,210		57,896		59,633		61,422		63,265		65,163		65,163		
				8	Tingkat partisipasi angkatan kerja	70.05	70.55		71.05		71.55		72.05		72.55		73.05		73.05		
				9	Pencari kerja yang ditempatkan	92.54	93.38		94.19		94.95		95.63		96.29		96.91		96.91		
				10	Tingkat penganggguran terbuka	7.46	6.62		5.81		5.05		4.37		3.71		3.09		3.09		
				11	Tingkat partisipasi angkatan kerja OAP	n.a	-		75.00		76.00		77.00		78.00		79.00		79.00		
2	01	07	Program Perlindungan	12	Fasilitasi Keselamatan dan	30.00	30.00	650,000,000	34.50	991,875,000	39.68	1,165,218,750	45.63	1,359,604,688	52.47	2,827,322,422	60.34	3,195,899,793	60.34	3,195,899,793	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		perlindungan tenaga kerja																
				13	Fasilitasi Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	56.67	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				14	Penetapan UMR	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				15	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	n.a	60.00		60.00		70.00		70.00		75.00		75.00		75.00		
				16	Angka sengketa perusahaan-pekerja per tahun	n.a	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		
				17	Persentase kasus yang diselesaikan bersama dengan perjanjian bersama	n.a	90.00		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00		
2	01	08	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	18	Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi	n.a	-	2,550,000,000	30.00	5,100,000,000	40.00	5,231,250,000	50.00	6,218,824,718	55.00	6,078,379,394	60.00	7,198,273,148	60.00	7,198,273,148	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				19	Pembangunan balai latihan kerja provinsi	1	-		-		-		-		1		-		2		
				20	Persentase pekerja yang mendapatkan peletihan berbasis kompetensi	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				21	Persentase pekerja yang mendapatkan peletihan berbasis kewirausahaan	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
2	**02**		**Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**																		
2	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1,802,395,000	100%	1,892,514,750	100%	1,987,140,488	100%	2,086,497,512	100%	2,190,822,387	100%	2,300,363,507	100%	2,300,363,507	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	02	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2,703,632,000	100%	2,838,813,600	100%	2,980,754,280	100%	3,129,791,994	100%	3,286,281,594	100%	3,450,595,673	100%	3,450,595,673	
2	02	03	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	90,983,000	100%	95,532,150	100%	100,308,758	100%	105,324,195	100%	110,590,405	100%	116,119,925	100%	116,119,925	
2	02	04	Program peningkatan kapasitas sumber	4	Cakupan pembinaan kapasitas	100%	100%	233,000,000	100%	244,650,000	100%	256,882,500	100%	269,726,625	100%	283,212,956	100%	297,373,604	100%	297,373,604	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			daya aparatur		sumberdaya aparatur																
2	02	05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			159,000,000		166,950,000		175,297,500		184,062,375		193,265,494		202,928,768		202,928,768	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	02	06	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan	6	IPG	n.a	92.20	3,294,145,000	92.35	6,588,290,000	92.40	6,917,704,500	92.50	7,609,474,950	92.65	8,370,422,445	92.75	9,207,464,690	92.75	9,207,464,690	
				7	Penyelesaian pengaduan perlindungan	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Gender dan Anak		perempuan dan anak dari tindakan kekerasan																
2	02	06	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	8	Persentase kab/kota yang telah memiliki pusat penanganan terpadu perlindungan perempuan dan anak	n.a	-	1,550,000,000	20.00	4,000,000,000	30.00	4,200,000,000	50.00	4,930,939,178	60.00	5,750,519,232	75.00	6,668,381,598	75.00	6,668,381,598	
				9	Jumlah ruang terbuka ramah anak	n.a	-		5		10		15		20		25		25		
				10	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	n.a	-		3		3		3		3		3		3		
				11	Persentase perlindungan tenaga kerja anak	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
2	02	06	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	12	Partisipasi angkatan kerja perempuan OAP	n.a	-	2,135,235,000	75.00	5,270,000,000	76.00	5,533,500,000	77.00	6,086,850,000	78.00	6,695,535,000	79.00	7,365,088,500	79.00	7,365,088,500	
				13	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SD	n.a	1		1		1		1		1		1		1		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				14	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMP	n.a	1		1		1		1		1		1		1		
				15	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMA	n.a	1		1		1		1		1		1		1		
				16	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan PT	n.a	1		1		1		1		1		1		1		
				17	Rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada usia 15-24 tahun	n.a	1		1		1		1		1		1		1		
2	02	06	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	18	Cakupan kabupaten/kota responsif gender dan perlindungan anak	n.a	-	2,380,000,000	20.00	5,845,360,411	30.00	6,137,628,431	50.00	6,751,391,274	60.00	7,426,530,402	75.00	8,169,183,442	75.00	8,169,183,442	
				19	Rasio KDRT	n.a	-		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	02	06	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan	20	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif Papua Barat	n.a	20.00	651,610,000	20.00	684,190,500		718,400,025	20.00	754,320,026	20.00	792,036,028	20.00	831,637,829	20.00	831,637,829	
				21	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	n.a	-		30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		
				22	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	n.a	-		30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		
2	**03**	**Pangan**																			
2	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1,678,875,000	100%	1,762,818,750	100%	1,850,959,688	100%	1,943,507,672	100%	2,040,683,055	100%	2,142,717,208	100%	2,142,717,208	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	595,000,000	100%	624,750,000	100%	655,987,500	100%	688,786,875	100%	723,226,219	100%	759,387,530	100%	759,387,530	
2	03	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	80,000,000	100%	84,000,000	100%	88,200,000	100%	92,610,000	100%	97,240,500	100%	102,102,525	100%	102,102,525	
2	03	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	489,850,000	100%	514,342,500	100%	540,059,625	100%	567,062,606	100%	595,415,737	100%	625,186,523	100%	625,186,523	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	03	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			467,075,000		490,428,750		514,950,188		540,697,697		567,732,582		596,119,211		596,119,211	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	03	06	Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	6	Kabupaten/kota berketahanan pangan	-	30%	2,379,620,000	40%	4,611,279,648	50%	4,841,843,630	60%	5,180,772,685	70%	5,698,849,953	80%	6,268,734,948	80%	6,268,734,948	
				7	Cakupan Ketersediaan Pangan:																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				7.1.	- Ketersediaan energi	2.794	2.794		2.794		2.794		2.794		2.794		2.794		2.794		
				7.2.	- Ketersediaan protein	88.20	88.20		88.20		88.20		88.20		88.20		88.20		88.20		
				7.3.	- PPH Ketersediaan	82.17	82.17		82.17		82.17		82.17		82.17		82.17		82.17		
				8	Persentase Daerah Rentan Pangan (%)	31.76	30.76		29.76		28.76		27.76		26.76		25.75		25.75		
2	03	07	Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	9	Ketersediaan Data Harga Pangan	100%	100%	2,959,580,000	100%	5,179,265,000	100%	5,438,228,250	100%	6,309,814,234	100%	7,132,428,900	100%	8,046,886,694	100%	8,046,886,694	
				10	Cakupan Kebutuhan Konsumsi Pangan:																
				10.1.	- Konsumsi Energi	1,941.40	1,976.17		2,010.93		2,045.70		2,080.47		2,115.23		2,150.00		2,150.00		
				10.2.	- Konsumsi Protein	59.90	59.05		58.64		58.23		57.82		57.41		57.00		57.00		
				10.3.	- PPH Konsumsi	89.56	91.30		93.04		94.78		96.52		98.26		100.00		100.00		
				11	Cakupan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan:																
				11.3.	- Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar (PSAT) yang di Sertifikasi	-	20		25		25		25		25		25		145		
				11.4.	- Jumlah Produk Pangan	-	20		25		25		25		25		25		145		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Segar dan Olahan Primer Yang di Registrasi																	
				11.5.	- Pengawasan Keamanan Pangan	10	20		20		20		20		20		20		120		
				12	Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras	15.40	19.84		23.87		27.55		30.93		34.03		36.89		36.89		
				13	Terbentuknya lembaga cadangan pangan provinsi (Bulogda)	-	-		-		1		-		-		-		1		
				14	Dokumen terkait kebijakan pangan daerah	-	-		2		1		1		1		1		6		
2	03	08	Program Pemberdayaan Penyuluhan					350,000,000		-		-		-		-		-		-	
2	**04**		**Pertanahan**																		
2	04	01	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1	Cakupan penyepakatan batas hak kelola tanah ulayat	-	10.00	33,412,000,000	15.00	38,955,975,334	20.00	40,428,520,000	25.00	44,471,372,000	30.00	48,918,509,200	35.00	53,810,360,120	35.00	53,810,360,120	**Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan**
				2	Cakupan penyediaan lahan	-	20.00		40.00		90.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni																
				3	Penyelesaian izin lokasi	25.00	25.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				4	Pemetaan tanah adat di Provinsi Papua Barat	-	-		20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		
				5	Persentase pengadaan tanah yang diselesaikan	50.00	50.00		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00		
2	04	02	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	6	Persentase konflik tanah yang diselesaikan	48.00	48.00	50,118,000,000	54.00	7,776,885,290	60.00	8,640,983,655	66.00	9,505,082,021	68.00	10,455,590,223	78.00	11,501,149,245	78.00	11,501,149,245	
2	**05**	**Lingkungan Hidup**																			
2	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2,952,000,000	100%	1,433,145,545	100%	1,567,241,410	100%	1,645,603,480	100%	1,727,883,654	100%	1,814,277,837	100%	1,814,277,837	**Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan**
2	05	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2,062,009,500	100%	1,000,000,000	100%	1,050,000,000	100%	1,102,500,000	100%	1,157,625,000	100%	1,215,506,250	100%	1,215,506,250	
2	05	03	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	208,500,000	100%	218,925,000	100%	229,871,250	100%	241,364,813	100%	253,433,053	100%	266,104,706	100%	266,104,706	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	05	04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	102,550,000	100%	107,677,500	100%	113,061,375	100%	118,714,444	100%	124,650,166	100%	130,882,674	100%	130,882,674	
2	05	05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			43,615,000		45,795,750		48,085,538		50,489,814		53,014,305		55,665,020		55,665,020	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	05	06	Program Pengendalian	6	Indeks lingkungan hidup	84.51	84.51	1,905,838,750	84.51	2,001,130,688	82.00	2,101,187,222	81.00	2,586,596,098	80.00	3,001,906,310	80.00	3,690,336,214	80.00	3,690,336,214	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7	Rasio sungai yang dipantau baku mutunya	16.00	18.00		27.00		45.00		63.00		81.00		100.00		100.00		
				8	Rasio udara yang dipantau	23.00	23.00		38.00		46.00		46.00		84.00		100.00		100.00		
				9	Rasio tempat pembuangan sampah sementara	10.00	10.00		25.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		
				10	Persentase penanganan sampah	10.00	10.00		25.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		
				11	Cakupan penghijauan di wilayah sumber air	-	-		20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		
2	05	07	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	12	Persentase penanganan kasus lingkungan hidup	-	-	1,877,340,000	20.00	2,562,124,500	40.00	2,690,230,725	60.00	2,959,253,798	80.00	3,255,179,177	100.00	3,580,697,095	100.00	3,580,697,095	
				13	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya kegiatan perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	-	-		20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		
				14	Jumlah pengamatan dan pengukuran tingkat	16.00	16.00		33.00		50.00		66.00		83.00		100.00		100.00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					kerusakan LH																
				15	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL	10.00	10.00		20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		
				16	Persentase SDM yang mengikuti pelatihan AMDAL	20.00	20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		100.00		
2	05	08	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	17	Cakupan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	n.a	n.a	1,217,725,000	100.00	1,278,611,250	100.00	1,342,541,813	100.00	1,476,795,994	100.00	1,550,635,793	100.00	1,628,167,583	100.00	1,628,167,583	
2	05	09	Program Peningkatan SDM Kelembagaan	18	Cakupan Pengembangan SDM Bidang lingkungan hidup	n.a	n.a	648,771,750	100.00	648,771,750	100.00	648,771,750	100.00	648,771,750	100.00	648,771,750	100.00	648,771,750	100.00	648,771,750	
2	05	10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	19	Cakupan pengelolaan TPA milik Provinsi yang optimal	n.a	100.00	800,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	
2	**06**	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**																			
2	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2,169,999,000	100%	1,368,796,339	100%	1,447,236,156	100%	1,529,597,964	100%	1,616,077,862	100%	1,706,881,756	100%	1,706,881,756	**Dinas Administrasi, Kependu**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,680,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,050,000,000	100%	1,102,500,000	100%	1,157,625,000	100%	1,215,506,250	100%	1,215,506,250	dukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	06	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	90,000,000	100%	94,500,000	100%	99,225,000	100%	104,186,250	100%	109,395,563	100%	114,865,341	100%	114,865,341	
2	06	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	1,140,000,000	100%	450,000,000	100%	472,500,000	100%	496,125,000	100%	520,931,250	100%	546,977,813	100%	546,977,813	
2	06	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			200,000,000		100,000,000		105,000,000		110,250,000		115,762,500		121,550,625		121,550,625	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					pelaksanaan SKP)																
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	06	06	Program Penataan Administrasi Kependudukan	6	Kab/Kota tertib administrasi Kependudukan	n.a	-	2,689,917,000	3	2,924,412,850	6	3,060,633,493	9	3,203,665,167	12	3,353,848,425	13	3,511,540,847	13	3,511,540,847	
				7	Rasio Cakupan Penduduk ber KTP	n.a	50		60		70		80		90		100		100		
				8	Persentase kepemilikan KK	n.a	50		60		70		80		90		100		100		
				9	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran	n.a	70		80		90		100		100		100		100		
				10	Rasio pasangan berakte nikah	n.a	100		100		100		100		100		100		100		
				11	Fasilitasi Pengendalian Jumlah Penduduk	n.a	-		100		100		100		100		100		100		
				12	Dokumen profil kependudukan provinsi	n.a	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				13	Cakupan Pelaksanaan Peraturan Bidang	n.a	100		10000%		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Kependudukan																
				14	Tersedianya pelaporan dan data kependudukan	n.a	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				15	Cakupan ketersediaan Peraturan tentang pendaftaran orang asli papua dan Sosialisasinya	n.a	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				16	Cakupan Pembinaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan	n.a	100		100		100		100		100		100		100		
2	**07**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**																		
2	07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4,533,990,000	100%	2,500,000,000	100%	2,625,000,000	100%	2,756,250,000	100%	2,894,062,500	100%	3,038,765,625	100%	3,038,765,625	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung**
2	07	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3,822,860,000	100%	1,000,000,000	100%	1,050,000,000	100%	1,102,500,000	100%	1,157,625,000	100%	1,215,506,250	100%	1,215,506,250	
2	07	03	Program Peningkata	3	Cakupan Pembinaan	100%	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			n Disiplin Aparatur		Disiplin Aparatur																
2	07	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	1,688,500,000	100%	1,000,000,000	100%	1,050,000,000	100%	1,102,500,000	100%	1,157,625,000	100%	1,215,506,250	100%	1,215,506,250	
2	07	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			3,166,250,000		500,000,000		525,000,000		551,250,000		578,812,500		607,753,125		607,753,125	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	07	06	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	6	Cakupan koordinasi teknis pemberdayaan masyarakat dan kampung tingkat provinsi	100%	100%	892,800,000	100%	937,440,000	100%	984,312,000	100%	1,033,527,600	100%	1,085,203,980	100%	1,139,464,179	100%	1,139,464,179	
2	07	07	Program pengembangan lembaga ekonomi Kampung	7	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	n.a	-	2,600,000,000	200	2,730,000,000	200	2,866,500,000	200	3,009,825,000	200	3,160,316,250	200	3,318,332,063	1,000	3,318,332,063	
2	07	08	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kampung	8	Cakupan pembinaan kelompok PKK	n.a	-	16,750,000,000	120	12,500,000,000	120	13,125,000,000	120	13,781,250,000	120	14,470,312,500	120	15,193,828,125	600	15,193,828,125	
				9	Persentase Posyandu aktif	n.a	-		30		40		50		60		75		75		
				10	Persentase LSM aktif	n.a	-		30		40		50		60		75		75		
				11	Persentase LPM berprestasi	n.a	-		5		10		15		20		25		25		
				12	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n.a	-		120		120		120		120		120		600		
				13	Persentase pemeliharaan sarana pasca program	n.a	-		90		90		90		90		90		90		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					pemberdayaan masyarakat																
2	07	09	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kampung	14	Persentase PKK aktif	n.a	-	4,400,000,000	20	4,620,000,000	30	4,851,000,000	40	5,093,550,000	50	5,348,227,500	60	5,615,638,875	60	5,615,638,875	
				15	Fasilitasi kampung mandiri/membangun	850	-		200		200		200		200		200		1,000		
				16	Cakupan pembinaan aparatur pemerintahan kampung	n.a	10		15		20		25		30		40		40		
				17	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kampung yang baik	n.a	-		10		15		20		25		30		30		
2	07	10	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Papua	18	Jumlah kelompok usaha OAP yang dibina	n.a	-	33,308,690,000	100	33,696,379,258	100	35,396,198,220	100	53,133,036,721	100	55,804,688,557	100	63,609,922,985	500	63,609,922,985	
				19	Jumlah kader kesejahteraan sosial OAP di masyarakat	n.a	-		100		100		100		100		100		500		
2	**08**		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**																		
2	08	01	Program Pengendalian Penduduk	1	Adanya regulasi pengendalian penduduk	n.a	Ada	3,240,000,000.00	Ada	5,937,709,189	Ada	6,234,594,649	Ada	6,546,324,381	Ada	6,873,640,600	Ada	7,217,322,630	Ada	7,217,322,630	**Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil,**
				2	Laju pertumbuhan penduduk	n.a	2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				3	Cakupan peserta KB aktif	n.a	-		30.00		32.00		34.00		35.00		37.00		37.00		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
				4	Persentase kampung KB yang difasilitasi	n.a	-		1.00		2.00		3.00		4.00		5.00		5.00		
				5	Total Fertility Rate	n.a	-		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		
				6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data parameter dan proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	n.a	-		5.00		6.00		7.00		8.00		10.00		10.00		
				7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	n.a	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		
				8	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	n.a	5.00		6.00		7.00		9.00		10.00		15.00		15.00		
2	0 9		**Perhubungan**																		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	5,241,640,580	100%	5,241,640,580	100%	5,241,640,580	100%	5,241,640,580	100%	5,241,640,580	100%	5,241,640,580	100%	5,241,640,580	**Dinas Perhubungan**
2	09	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	5,056,229,420	100%	5,056,229,420	100%	5,056,229,420	100%	5,056,229,420	100%	5,056,229,420	100%	5,056,229,420	100%	5,056,229,420	
2	09	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	7,011,620,000	100%	360,350,000	100%	378,367,500	100%	397,285,875	100%	417,150,169	100%	438,007,677	100%	438,007,677	
2	09	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	654,700,000	100%	687,435,000	100%	721,806,750	100%	757,897,088	100%	795,791,942	100%	835,581,539	100%	835,581,539	
2	09	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			4,039,944,400		2,500,000,000		2,625,000,000		2,756,250,000		2,894,062,500		3,038,765,625		3,038,765,625	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)																	
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	09	06	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	6	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	n.a	20.00	2,000,000,000	25.00	2,100,000,000	30.00	2,205,000,000	35.00	2,315,250,000	40.00	2,431,012,500	45.00	2,552,563,125	45.00	2,552,563,125	
2	09	07	Program Peningkatan Prasarana Pelayaran	7	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang tehubung sarana transportasi	n.a	100.00	12,588,720,600	100.00	5,000,000,000	100.00	5,250,000,000	100.00	5,775,000,000	100.00	6,352,500,000	100.00	11,622,088,582	100.00	11,622,088,582	
				8	Jumlah arus penumpang angkatan laut	466,522	471,187		518,306		570,137		627,150		689,865		758,852		4,102,019		
				9	Cakupan jumlah pelabuhan laut	70.31	71.88		73.44		75.00		76.56		78.13		79.69		79.69		
				10	Cakupan jumlah pelayaran perintis	76.38	77.17		77.95		78.74		79.53		80.31		81.10		81.10		
2	09	08	Program Pembangunan Terminal	11	Jumlah barang yang melalui dermaga	n.a	3,000,000.00	71,942,370,000	3,300,000.00	50,872,667,598	3,630,000.00	52,532,144,800	3,993,000.00	59,539,529,993	4,392,300.00	67,283,872,890	4,831,530.00	67,283,872,890	4,831,530.00	67,283,872,890	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					pelabuhan (ton)																
				12	Jumlah orang yang melalui terminal	n.a	10.000		20.000		25.000		30.000		35.000		40.000		40.000		
2	09	09	Program Peningkatan Keselamatan LLAJ	13	Cakupan pemasangan rambu-rambu di ruas jalan provinsi	10.00	11.00	13,607,775,000	12.00	5,000,000,000	13.00	5,250,000,000	15.00	5,512,500,000	16.00	5,788,125,000	17.00	10,000,000,000	17.00	10,000,000,000	
				14	Cakupan Peningkatan Keselamatan LLAJ	100	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
2	09	10	Program Perkeretaapian	15	Cakupan fasilitasi program pembangunan rel KA Trans Papua	n.a	10.00	3,000,000,000	30.00	3,150,000,000	40.00	3,307,500,000	50.00	3,472,875,000	60.00	3,646,518,750	75.00	3,828,844,688	75.00	3,828,844,688	
2	**10**	**Komunikasi dan Informatika**																			
2	10	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3,044,766,200	100%	3,044,766,200	100%	3,044,766,200	100%	3,044,766,200	100%	3,044,766,200	100%	3,044,766,200	100%	3,044,766,200	**Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik**
2	10	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2,948,456,000	100%	3,243,301,600	100%	1,350,000,000	100%	1,417,500,000	100%	1,488,375,000	100%	1,562,793,750	100%	1,562,793,750	
2	10	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	213,750,000	100%	224,437,500	100%	235,659,375	100%	247,442,344	100%	259,814,461	100%	272,805,184	100%	272,805,184	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	10	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	2,219,600,000	100%	1,350,000,000	100%	1,417,500,000	100%	1,488,375,000	100%	1,562,793,750	100%	1,640,933,438	100%	1,640,933,438	
2	10	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			1,753,500,000		1,788,570,000		1,824,341,400		1,860,828,228		1,898,044,793		1,936,005,688		1,936,005,688	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	10	06	Program Pengembangan	6	Cakupan layanan publik	n.a	10.00	2,348,587,800	30.00	2,466,017,190	40.00	2,589,318,050	50.00	2,718,783,952	60.00	2,854,723,150	70.00	2,997,459,307	70.00	2,997,459,307	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Komunikasi, Informasi dan Media Massa		berbasis IT (%)																
				7	Cakupan pelaksanaan e Government di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat	13.00	25.00		50.00		75.00		90.00		100.00		100.00		100.00		
				8	Jumlah pengunjung website papuabaratprov.go.id	n.a	1,500		2,500		3,000		3,500		4,000		5,000		5,000		
				9	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	n.a	1		2		2		2		3		3		13		
2	10	07	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	10	Persentase OPD yang menyelenggarakan SOP Komunikasi dan Informasi	100%	100%	495,655,000	100%	520,437,750	100%	546,459,638	100%	573,782,619	100%	602,471,750	100%	632,595,338	100%	632,595,338	
2	10	08	Program Pengembangan dan Peningkatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	11	Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	100%	100%	34,563,113,600	100%	42,352,536,652	100%	46,815,435,575	100%	52,471,920,361	100%	58,718,167,437	100%	65,614,271,154	100%	65,614,271,154	
				12	Cakupan Fasilitas	n.a	1		1		1		1		1		1		6		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Smart City yang dapat mengakses internet																
				13	Fasilitasi pembangunan BTS	n.a	5		5		5		5		10		10		40		
				14	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	n.a	30		40		50		60		70		80		80		
				15	Persentase penduduk yang mengakses internet	n.a	20		25		30		35		40		50		50		
				16	Cakupan layanan telekomunikasi	n.a	30		40		50		60		70		80		80		
2	10	09	Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Papua Barat	17	Cakupan fasilitasi Komisi Informasi Papua Barat	100%	100%	1,716,550,000	100%	1,802,377,500	100%	1,892,496,375	100%	1,987,121,194	100%	2,086,477,253	100%	2,190,801,116	100%	2,190,801,116	
2	**11**	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**																			
2	11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4,019,660,000	100%	4,019,660,000	100%	4,019,660,000	100%	4,019,660,000	100%	4,019,660,000	100%	4,019,660,000	100%	4,019,660,000	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan	100%	100%	5,651,884,000	100%	5,934,478,200	100%	6,231,202,110	100%	6,542,762,216	100%	1,350,000,000	100%	1,417,500,000	100%	1,417,500,000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					prasarana aparatur																
2	11	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	150,000,000	100%	157,500,000	100%	165,375,000	100%	173,643,750	100%	182,325,938	100%	191,442,234	100%	191,442,234	
2	11	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	461,000,000	100%	484,050,000	100%	508,252,500	100%	533,665,125	100%	560,348,381	100%	588,365,800	100%	588,365,800	
2	11	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			36,300,000		38,115,000		40,020,750		42,021,788		44,122,877		46,329,021		46,329,021	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				5. 6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	11	06	Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif	6	Persentase infrastruktur/sarana ekonomi yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal	100	100	550,000,000	100	577,500,000	100	606,375,000	100	636,693,750	100	668,528,438	100	701,954,859	100	701,954,859	
2	11	07	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	7	Persentase UMKM OAP yang berkembang	n.a	10	8,162,331,000	20	8,570,447,550	30	9,199,952,928	40	10,119,948,220	50	19,600,645,617	60	21,560,710,179	60	21,560,710,179	
				8	Jumlah UMKM	1,452	1,562		1,672		1,772		1,872		1,975		2,010		2,010		
2	11	08	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	9	Persentase koperasi aktif	88	89	1,000,000,000	90	5,050,000,000	90	5,302,500,000	91	5,832,750,000	92	6,416,025,000	93	7,057,627,500	93	7,057,627,500	
				10	Jumlah koperasi berprestasi tingkat nasional	n.a	2		7		15		25		35		40		40		
2	11	09	Pengembangan Pendukung Usaha Bagi KUMKM	11	Persentase produk-produk unggulan Orang Asli Papua (OAP) di galeri UMKM	71	75	968,825,000	76	6,874,167,706	77	7,217,876,091	78	8,719,190,968	79	12,836,229,632	80	14,662,084,876	80	14,662,084,876	
				12	Jumlah pameran/promosi yang	2	3		3		4		4		4		5		23		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					diselenggarakan																
2	**12**		**Penanaman Modal**																		
2	12	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1,456,000,000	100%	1,528,800,000	100%	1,605,240,000	100%	1,685,502,000	100%	1,769,777,100	100%	1,858,265,955	100%	1,858,265,955	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	12	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2,740,000,000	100%	2,807,000,000	100%	2,947,350,000	100%	3,094,717,500	100%	3,249,453,375	100%	3,411,926,044	100%	3,411,926,044	
2	12	03	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	-	100%	70,000,000	100%	73,500,000	100%	77,175,000	100%	81,033,750	100%	85,085,438	100%	85,085,438	
2	12	04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	122,000,000	100%	128,100,000	100%	134,505,000	100%	141,230,250	100%	148,291,763	100%	155,706,351	100%	155,706,351	
2	12	05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			82,000,000		86,100,000		90,405,000		94,925,250		99,671,513		104,655,088		104,655,088	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	12	06	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	6	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	36	39	1,000,000,000	42	3,500,000,000	45	3,675,000,000	48	4,285,050,000	50	5,642,311,519	57	7,181,737,016	1,031	7,181,737,016	
				7	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	156	160		164		168		172		178		189		47		
				9	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	48.15	48.20		48.22		48.24		48.30		48.31		48.32		44.03		
				10	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) - triliun rupiah	7.28	7.29		7.32		7.33		7.35		7.36		7.38		5.00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				11	Persentase pelaku usaha yang taat dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan UU (PMDN)	19.00	25.00		27.00		1.00		35.00		0.40		47.00		47.00		
				12	Persentase pelaku usaha yang taat dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan UU (PMA)	80.00	82.00		84.00		86.00		89.00		93.00		95.00		95.00		
2	12	07	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	13	Persentase Keikutsertaan Pameran Dalam Negeri	6.58	-	600,000,000	11.11	3,500,000,000	12.00	3,675,000,000	11.82	4,042,500,000	11.67	4,244,625,000	11.54	4,456,856,250	11.54	4,456,856,250	
				14.	Jumlah OAP yang terlibat dalam investasi	50	50		50		50		50		50		50		281		
				15	Persentase Keikutsertaan Pameran Luar Negeri	40.00	-		28.57		33.33		33.33		40.00		45.45		45.45		
				16	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	n.a	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		
2	12	08	Program Peningkata	17	Cakupan Kinerja	n.a	100%	900,000,000	100%	4,672,363,965	100%	4,905,982,163	100%	5,396,580,379	100%	5,666,409,398	100%	5,949,729,868	100%	5,949,729,868	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			n Daya Saing Investasi		Peningkatan Daya Saing Investasi																
				18	Jumlah perijinan dan non perijinan investasi	201	1,100		1,150		1,200		1,250		1,270		1,285		7,255		
2	12	09	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	19	Cakupan Kinerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal	n.a	100%	900,000,000	100%	3,500,000,000	100%	3,675,000,000	100%	4,042,500,000	100%	4,244,625,000	100%	4,456,856,250	100%	4,456,856,250	
				21	Persentase UMKMK yang bermitra dengan PMA/ PMDN	5.50	5.50		6.60		7.20		7.70		8.80		11.10		11.10		
				22	Jumlah dokumen regulasi pada sektor penanaman modal	4	-		1		1		1		1		1		135		
2	**13**		**Kepemudaan dan Olah Raga**																		
2	12	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3,502,207,500	100%	3,502,207,500	100%	3,502,207,500	100%	3,502,207,500	100%	3,502,207,500	100%	3,502,207,500	100%	3,502,207,500	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	12	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2,929,950,000	100%	2,929,950,000	100%	2,929,950,000	100%	550,000,000	100%	577,500,000	100%	606,375,000	100%	606,375,000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	12	03	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	40,000,000	100%	42,000,000	100%	44,100,000	100%	46,305,000	100%	48,620,250	100%	51,051,263	100%	51,051,263	
2	12	04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	754,550,000	100%	792,277,500	100%	831,891,375	100%	873,485,944	100%	917,160,241	100%	963,018,253	100%	963,018,253	
2	12	05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			516,542,500		542,369,625		569,488,106		597,962,512		627,860,637		659,253,669		659,253,669	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					dan DPA OPD																
2	1 2	0 6	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	6	Cakupan Kinerja Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	n.a	100.00	403,399,499	100.00	423,569,474	100.00	444,747,948	100.00	466,985,345	100.00	490,334,612	100.00	514,851,343	100.00	514,851,343	
2	1 2	0 7	Program peningkatan peran serta kepemudaan	7	Jumlah pemuda OAP pelopor	n.a	500	1,596,600,501	500	7,488,807,133	500	6,773,850,364	500	8,261,995,258	500	7,142,889,346	500	5,797,096,533	3,000	5,797,096,533	
				8	Jumlah organisasi pemuda	n.a	127		127		127		127		127		127		762		
				9	Jumlah kreativitas pemuda	n.a	260		260		260		260		260		260		1,560		
				10	Jumlah kegiatan kepemudaan	n.a	23		23		23		23		23		23		138		
				11	Jumlah kualitas aktivitas kepemudaan dalam budaya	n.a	10		10		10		10		10		10		60		
				12	Gelanggang /balai remaja (selain milik swasta)	n.a	-		-		-		-		-		-		-		
2	1 2	0 8	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	13	Jumlah atlet berprestasi Provinsi Papua Barat di tingkat nasional	n.a	350	600,000,000	350	630,000,000	350	661,500,000	350	694,575,000	350	729,303,750	35	765,768,938	350	765,768,938	
				14	Jumlah olahraga	n.a	6		6		6		6		6		6		6		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					tradisional tingkat provinsi																
				15	Persentase Rekomendasi Bidang Pora yang dindaklanjuti oleh K/K	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				16	Cakupan Kinerja Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	n.a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
2	12	09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	17	Cakupan ketersediaan lapangan olahraga	n.a	281	23,516,750,000	281	28,220,100,000	281	31,042,110,000	281	34,146,321,000	281	37,560,953,100	281	41,317,048,410	281	41,317,048,410	
				18	Gedung Cabang Olahraga	n.a	10		10		10		10		10		10		10		
				19	Lintasan Cabang atletik	n.a	-		-		-		-		-		1		1		
				20	Stadion olahraga	n.a	4		4		4		4		4		4		4		
				21	Gelanggang olahraga multiguna	n.a	-		-		-		-		-		-		-		
2	12	10	Program Pengembangan Data Base Organisasi Olahraga	22	Cakupan Pengembangan Kinerja Kebijakan dan Manajeman Olahraga	n.a	100.00	1,260,000,000	100.00	1,323,000,000	100.00	1,389,150,000	100.00	1,458,607,500	100.00	1,531,537,875	100.00	1,608,114,769	100.00	1,608,114,769	
				23	Jumlah organisasi olahraga	n.a	35		35		35		35		35		35		35		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				24	Jumlah klub olahraga di Provinsi Papua Barat	n.a	208		208		208		208		208		208		208		
				25	Jumlah kegiatan olahraga tingkat provinsi	n.a	45		45		45		45		45		45		45		
				26	Kejuaraan klub cabang olahraga tingkat provinsi	n.a	20		20		20		20		20		20		20		
2	14		Statistik																		
2	14	01	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1	Persentase ketersediaan data indikator makro daerah tahunan di tingkat kabupaten/kota	100%	100%	1,121,475,000	100%	2,653,376,930	100%	2,786,045,776	100%	2,925,348,065	100.00	3,071,615,468	100%	3,225,196,242	100%	3,225,196,242	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
				2	Ketersediaan Buku Provinsi Dalam Angka	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				3	Ketersediaan Buku PDRB Provinsi	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				4	Ketersediaan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				5	Ketersediaan Buku Indeks Pembangunan Manusia	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				6	Ketersediaan Buku Statistik Daerah	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				7	Persentase data OPD yang dimuat dalam database satu data	n.a	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				8	Ketersediaan data kinerja sektoral	n.a	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	**15**		**Persandian**																		
2	15	01	Program Pengawasan dan Pengendalian Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Cakupan layanan persandian daerah (%)	n.a	15%	315,796,400	38%	1,326,688,465	40%	1,393,022,888	60%	1,462,674,032	75%	1,535,807,734	100%	1,612,598,121	100%	1,612,598,121	**Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik**
2	**16**		**Kebudayaan**																		
2	16	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2,490,000,000	100%	2,614,500,000	100%	2,745,225,000	100%	2,882,486,250	100%	3,026,610,563	100%	3,177,941,091	100%	3,177,941,091	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
2	16	02	Program Peningkatan Sarana	2	Cakupan ketersediaan dan	100%	100%	639,000,000	100%	670,950,000	100%	704,497,500	100%	739,722,375	100%	776,708,494	100%	815,543,918	100%	815,543,918	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			dan Prasarana Aparatur		kelayakan sarana dan prasarana aparatur																
2	16	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	196,000,000	100%	205,800,000	100%	216,090,000	100%	226,894,500	100%	238,239,225	100%	250,151,186	100%	250,151,186	
2	16	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	782,201,000	100%	821,311,050	100%	862,376,603	100%	905,495,433	100%	950,770,204	100%	998,308,714	100%	998,308,714	
2	16	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			329,799,000		346,288,950		363,603,398		381,783,567		400,872,746		420,916,383		420,916,383	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	16	06	Program Pengembangan Nilai Budaya	6	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	20%	-	3,950,000,000	20%	4,147,500,000	20%	4,354,875,000	20%	4,572,618,750	20%	6,400,009,024	20%	9,320,011,732	100%	9,320,011,732	
				7	Jumlah keanekaragaman budaya yang dilestarikan/ diakui secara nasional maupun internasional	6	5		5		5		5		5		5		30		
2	16	07	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	8	Jumlah sanggar yang ikut serta dalam festival budaya	40	45	800,000,000	50	1,824,301,399	55	1,915,516,469	60	2,011,292,292	65	2,111,856,907	70	4,335,854,431	70	4,335,854,431	
				9	Jumlah gedung kesenian dan taman budaya	-	-		-		1		1		-		-		2		
2	16	08	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	10	Jumlah even skala nasional dan internasiona	4	4	-	5	2,609,591,557	6	2,740,071,134	7	4,267,300,201	8	4,480,665,212	9	6,824,864,775	39	6,824,864,775	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					l dalam kalender tahunan Provinsi Papua Barat																	
2	**17**		**Perpustakaan**																		
2	17	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	5,235,850,000	100%	2,274,500,000	100%	2,388,225,000	100%	2,507,636,250	100%	2,633,018,063	100%	2,764,668,966	100%	2,764,668,966	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
2	17	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2,274,500,000	100%	2,388,225,000	100%	2,507,636,250	100%	2,633,018,063	100%	2,764,668,966	100%	2,902,902,414	100%	2,902,902,414	
2	17	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	164,000,000	100%	172,200,000	100%	180,810,000	100%	189,850,500	100%	199,343,025	100%	209,310,176	100%	209,310,176	
2	17	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	1,709,900,000	100%	350,000,000	100%	367,500,000	100%	385,875,000	100%	405,168,750	100%	425,427,188	100%	425,427,188	
2	17	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Laporan keuangan OPD																
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	17	06	Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca	6	Persentase kenaikan minat baca masyarakat per tahun	5%	5%	625,700,000	5%	4,831,846,006	5%	5,083,438,306	5%	5,347,610,222	5%	5,624,990,733	5%	5,916,240,270	5%	5,916,240,270	
2	17	07	Program Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	7	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan	n.a	5%	542,350,000	5%	2,246,417,500	6%	2,358,738,375	6%	2,476,675,294	6%	2,600,509,058	7%	2,730,534,511	7%	2,730,534,511	
				8	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	44,671	50,000		50,000		50,000		55,000		55,000		55,000		55,000		
				9	Persentase penduduk membaca	n.a	5%		10%		15%		20%		25%		30%		30%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					selain buku pelajaran																
2	17	08	Program Peningkatan SDM Bidang Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi	10	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	712,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**18**	**Kearsipan**																			
2	18	01	Program Perencanaan dan Pengembangan Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi	1	Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah	n.a	n.a	535,150,000	10%	1,979,236,396	22%	2,078,198,216	35%	2,182,108,127	57%	2,291,213,533	100%	2,405,774,210	100%	2,405,774,210	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
				2	Pengelolaan arsip secara baku di tingkat OPD	n.a	n.a		10%		22%		35%		57%		100%		100%		
				3	Peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan	n.a	n.a		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				4	Persentase arsip daerah yang telah terdigitalisasi	n.a	n.a		5%		7%		10%		20%		25%		25%		
3	**Urusan Pilihan**																				
3	**01**	**Kelautan dan Perikanan**																			
3	01	01	Program Pelayanan	1	Cakupan Pelayanan	100%	100%	2,763,000,000	100%	2,901,150,000	100%	3,046,207,500	100%	3,198,517,875	100%	3,358,443,769	100%	3,526,365,957	100%	3,526,365,957	**Dinas Kelautan**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Administrasi Perkantoran		Administrasi Perkantoran																dan Perikanan
3	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,065,000,000	100%	1,118,250,000	100%	1,174,162,500	100%	1,232,870,625	100%	1,294,514,156	100%	1,359,239,864	100%	1,359,239,864	
3	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	100,000,000	100%	105,000,000	100%	110,250,000	100%	115,762,500	100%	121,550,625	100%	127,628,156	100%	127,628,156	
3	01	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	672,000,000	100%	705,600,000	100%	740,880,000	100%	777,924,000	100%	816,820,200	100%	857,661,210	100%	857,661,210	
3	01	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			400,000,000		420,000,000		441,000,000		463,050,000		486,202,500		510,512,625		510,512,625	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					dan pelaksanaan SKP)																
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3	01	06	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	6	Nilai tukar nelayan	98.21	101.86	11,700,000,000	105.51	28,329,200,000	107.09	29,745,660,000	108.68	31,827,856,200	110.26	35,010,641,820	111.84	37,461,386,747	111.84	37,461,386,747	
				7	Produksi perikanan tangkap (ton)	151,585.00	184,640.00		186,486.40		188,332.80		190,179.20		192,025.60		193,872.00		193,872.00		
				8	Cakupan OAP pelaku usaha perikanan tangkap yang dibina	-	50		100		100		100		100		100		550		
				9	Jumlah sentra produksi perikanan yang dikembangkan				2 kawasan		2 kawasan		2 kawasan		2 kawasan		2 kawasan		10 kawasan		
3	01	07	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir					200,000,000		-		-		-		-		-		-	
3	01	08	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air					29,350,000,000		-		-		-		-		-		-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Payau dan Air Tawar																		
3	01	09	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	10	Nilai tukar pembudidaya ikan	91.18	93.00	9,000,000,000	93.00	15,552,800,000	94.40	16,330,440,000	95.79	17,473,570,800	97.19	20,968,284,960	99.01	22,436,064,907	99.01	22,436,064,907	
				11	Produksi perikanan budidaya (ton)	52,842.61	71,282.00		89,721.39		90,798.05		91,874.70		92,951.36		94,028.02		94,028.02		
				12	Cakupan OAP pelaku usaha perikanan budidaya yang dibina	n.a	50		100		100		100		100		100		550		
3	01	10	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan					16,840,000,000		-		-		-		-		-		-	
3	01	11	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	13	Jumlah sentra produksi perikanan yang dikembangkan	n.a	2 kawasan	16,118,000,000		-		-		-		-		-		-	
3	01	12	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	14	Pertumbuhan PDRB perikanan	10.37%	7.00%	2,450,000,000	7.00%	2,663,800,000	7.00%	2,796,990,000	7.00%	5,033,554,094	7.00%	10,067,108,188	7.00%	13,529,291,387	7.00%	13,529,291,387	
				15	Nilai ekspor produk perikanan ($ US)	22,769,455.00	29,374,665.00		35,979,875.00		36,699,472.50		37,419,070.00		38,138,667.50		38,858,265.00		38,858,265.00		
				16	Konsumsi ikan (kg/kapita/orang)	50.35	52.78		55.21		56.31		57.42		58.52		59.63		59.63		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	01	13	Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan					200,000,000		-		-		-		-		-		-	
3	01	14	Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Laut, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Konservasi	17	Cakupan pengawasan sumberdaya perikanan kewenangan provinsi	3.30%	3.70%	2,300,000,000	3.70%	9,490,701,395	3.81%	9,965,236,465	3.92%	10,662,803,018	4.03%	15,740,933,805	4.14%	16,842,799,171	4.14%	16,842,799,171	
				18	Luas kawasan konservasi perairan (ha)	350,000.00	350,000.00		710,000.00		710,000.00		923,000.00		923,000.30		1,136,000.30		1,136,000.30		
				19	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3	01	15	Program Peningkatan Manajemen Informasi Kelautan dan Perikanan					200,000,000		-		-		-		-		-		-	
3	01	16	Program Monitoring dan Evaluasi					200,000,000		-		-		-		-		-		-	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	**02**	**Pariwisata**																		
3	02	01	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1	Jumlah pengembangan destinasi wisata baru (yang ada dikembangkan/destinasi baru)	3 kawasan	4 kawasan	5,200,000,000	5 kawasan	15,584,368,684	6 kawasan	16,363,587,119	7 kawasan	17,999,945,831	7 kawasan	19,799,940,414	7 kawasan	24,682,165,411	7 kawasan	24,682,165,411	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
				2	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang difasilitasi pemerintah daerah	9 lokasi	10 lokasi		11 lokasi		12 lokasi		13 lokasi		15 lokasi		20 lokasi		20 lokasi	
3	02	02	Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Daerah	3	Jumlah wisatawan mancanegara (orang)	-	15,000	-	25,000	7,083,803,947	35,000	7,437,994,145	45,000	8,181,793,559	55,000	8,999,972,915	70,000	11,219,166,096	70,000	11,219,166,096	
				4	Kunjungan wisatawan (orang)	99,382	102,105		104,923		107,808		110,773		113,899		116,949		116,949	
3	02	03	Program Pengembangan Kemitraan	5	Jumlah OAP yang terlibat dalam sektor kepariwisataan (orang)	-	100	-	100	5,667,043,158	100	5,950,395,316	100	6,545,434,847	100	7,199,978,332	100	8,975,332,877	500	8,975,332,877	
				6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0.62%	1.00%		1.40%		1.80%		2.20%		2.60%		3.00%		3.00%	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	**03**	**Pertanian**																			
3	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4,191,614,000	100%	4,610,775,400	100%	5,071,852,940	100%	5,579,038,234	100%	6,136,942,057	100%	6,750,636,263	100%	6,750,636,263	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**
3	03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	10,360,870,000	100%	11,396,957,000	100%	1,118,250,000	100%	1,230,075,000	100%	1,353,082,500	100%	1,488,390,750	100%	1,488,390,750	
3	03	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	302,245,000	100%	332,469,500	100%	365,716,450	100%	402,288,095	100%	442,516,905	100%	486,768,595	100%	486,768,595	
3	03	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	478,906,000	100%	526,796,600	100%	579,476,260	100%	637,423,886	100%	701,166,275	100%	771,282,902	100%	771,282,902	
3	03	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD			210,895,000		231,984,500		255,182,950		280,701,245		308,771,370		339,648,506		339,648,506	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalia	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					n Kegiatan OPD																
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3	03	06	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan	6	Produksi tanaman pangan:			3,972,000,000		15,000,000,000		18,750,000,000		20,625,000,000		25,187,500,000		30,225,000,000		30,225,000,000	
				6.1.	- Padi	27,084.00	29,278.00		31,650.00		34,214.00		36,986.00		39,982.00		43,221.00		43,221.00		
				6.2.	- Jagung	1,907.00	213.00		2,805.00		3,402.00		4,126.00		5,004.00		6,069.00		6,069.00		
				6.3.	- Kedelai	1,696.00	1,700.00		1,704.00		1,708.00		1,712.00		1,716.00		1,720.00		1,720.00		
				6.4.	- Kacang Tanah	703.00	705.00		707.00		709.00		711.00		713.00		715.00		715.00		
				6.5.	- Kacang Hijau	180.00	185.00		190.00		195.00		200.00		206.00		212.00		212.00		
				6.6.	- Ubi Kayu	9,697.00	11,661.00		14,023.00		16,863.00		20,278.00		24,385.00		29,324.00		29,324.00		
				6.7.	- Ubi Jalar	12,440.00	16,098.00		20,832.00		26,958.00		34,885.00		45,143.00		58,417.00		58,417.00		
				7	NTP Tanaman Pangan	96.92	98.86		100.84		102.85		104.91		107.01		109.15		109.15		
				8	Pertumbuhan PDRB tanaman pangan	(1.12)	2.00		2.00		2.00		2.00		4.00		4.00		4.00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	03	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pertanian					2,955,470,000		-		-		-		-		-		-	
3	03	08	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura	9	Produksi sayuran utama:			4,000,000,000		15,000,000,000		18,750,000,000		20,625,000,000		25,187,500,000		30,225,000,000		30,225,000,000	
				9.1.	- Cabai	2,142.30	2,163.72		2,185.36		2,207.21		2,229.29		2,251.58		2,274.09		2,274.09		
				9.2.	- Bawang merah	168.00	169.68		171.38		173.09		174.82		176.57		178.34		178.34		
				9.3.	- Petsai	2,734.00	2,761.34		2,788.95		2,816.84		2,845.01		2,873.46		2,902.20		2,902.20		
				9.4.	- Bayam	1,053.40	1,063.93		1,074.57		1,085.32		1,096.17		1,107.13		1,118.21		1,118.21		
				9.5.	- Kacang panjang	1,936.80	1,956.17		1,975.73		1,995.49		2,015.44		2,035.60		2,055.95		2,055.95		
				9.6.	- Tomat	2,501.60	2,526.62		2,551.88		2,577.40		2,603.17		2,629.21		2,655.50		2,655.50		
				9.7.	- Ketimun	1,395.00	1,408.95		1,423.04		1,437.27		1,451.64		1,466.16		1,480.82		1,480.82		
				9.8.	- Kubis	1,044.10	1,054.54		1,065.09		1,075.74		1,086.49		1,097.36		1,108.33		1,108.33		
				9.9.	- Terung	1,177.80	1,189.58		1,201.47		1,213.49		1,225.62		1,237.88		1,250.26		1,250.26		
				9.10.	- Buncis	578.40	584.18		590.03		595.93		601.89		607.90		613.98		613.98		
				10	Produksi Buah:																
				10.1.	- Pisang	1,532.00	1,547.32		1,562.79		1,578.42		1,594.21		1,610.15		1,626.25		1,626.25		
				10.2.	- Mangga	143.00	144.43		145.87		147.33		148.81		150.29		151.80		151.80		
				10.3.	- Nanas	43.00	43.43		43.86		44.30		44.75		45.19		45.65		45.65		
				10.4.	- Jeruk	40.00	40.40		40.80		41.21		41.62		42.04		42.46		42.46		
				10.5.	- Rambutan	252.00	254.52		257.07		259.64		262.23		264.85		267.50		267.50		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				10.6.	- Durian	155.00	156.55		158.12		159.70		161.29		162.91		164.54		164.54		
				10.7.	- Nangka	121.00	122.21		123.43		124.67		125.91		127.17		128.44		128.44		
				10.8.	- Pepaya	156.00	157.56		159.14		160.73		162.33		163.96		165.60		165.60		
				10.9.	- Sukun	154.00	155.54		157.10		158.67		160.25		161.86		163.47		163.47		
				10.10.	- Duku	225.00	227.25		229.52		231.82		234.14		236.48		238.84		238.84		
				11	Produksi tanaman obat:																
				11.1.	- Jahe	22.96	23.19		23.42		23.66		23.89		24.13		24.37		24.37		
				11.2.	- Laos	41.45	41.86		42.28		42.71		43.13		43.56		44.00		44.00		
				11.3.	- Kencur	2.78	2.81		2.84		2.86		2.89		2.92		2.95		2.95		
				11.4.	- Kunyit	14.78	14.93		15.08		15.23		15.38		15.53		15.69		15.69		
				11.5.	- Temulawak	0.02	0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		
				12	NTP Hortikultura	101.32	104.36		107.49		110.72		114.04		117.46		120.98		120.98		
				13	Pertumbuhan PDRB tanaman hortikultura	11.12	7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		
3	03	09	Program Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura dari gangguan OPT dan DFI					1,000,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	03	10	Program Penguatan					1,000,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Sistem Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH																		
3	03	11	Program Penguatan Sistem Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura	14	Cakupan penyediaan bibit tanaman pangan dan hortikultura		100.00	1,000,000,000	100.00	5,000,000,000	100.00	7,402,464,075	100.00	8,142,710,482	100.00	8,956,981,530	100.00	9,852,679,683	100.00	9,852,679,683	
3	03	12	Program Peningktan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan	15	Produksi tanaman perkebunan :			5,000,000,000		14,975,862,798		18,719,828,497		20,591,811,347		25,150,992,481		30,161,871,729		30,161,871,729	
				15.1.	- Kelapa	19,650.00	20,633.00		21,664.00		22,747.00		23,885.00		25,079.00		26,333.00	30,161,871,729	26,333.00		
				15.2.	- Kelapa sawit	61,213,071.00	64,273,725.00		67,487,411.00		70,861,782.00		74,404,871.00		78,125.11		82,031,370.00		82,031,370.00		
				15.3.	- Kopi	245.00	257.00		270.00		283.00		298.00		312.00		328.00		328.00		
				15.4.	- Cengkeh	60.00	63.00		66.00		69.00		72.00		76.00		80.00		80.00		
				15.5.	- Kakao	5,692.00	5,976.00		6,275.00		6,589.00		6,918.00		7,264.00		7,627.00		7,627.00		
				15.6.	- Pala	58,792.00	61,731.00		64,818.00		68,059.00		71,462.00		75,035.00		78,787.00		78,787.00		
				15.7.	- Sagu	29,396.00	30,866.00		32,409.00		34,029.00		35,371.00		37,517.00		39,393.00		39,393.00		
				16	NTP Tanaman Perkebunan	101.43	104.47		107.61		110.84		114.16		117.59		121.11		121.11		
				17	Pertumbuhan PDRB perkebunan	7.33	7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		
3	03	13	Program Perlindunga					1,000,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			n Tanaman Perkebunan																		
3	03	14	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	18	Jumlah petani OAP yang meningkat kapasitas melalui pelatihan	11,813	500	-	500	5,000,000,000	500	5,500,000,000	500	6,050,000,000	500	6,655,000,000	500	7,320,500,000	500	7,320,500,000	
				19	Jumlah kelembagaan petani OAP yang meningkat kapasitasnya	840	50		50		50		50		50		50		50		
3	03	15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	20	Luas kawasan pertanian yang dikembangkan	106,610.00	108,209.15	7,328,000,000	109,808.30	14,656,000,000	111,407.45	18,320,000,000	113,006.60	20,152,000,000	114,605.75	24,667,200,000	116,204.90	29,600,640,000	116,204.90	29,600,640,000	
3	03	16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,873,000,000	100%	2,959,190,000	100%	3,047,965,700	100%	3,139,404,671	100%	3,233,586,811	100%	3,330,594,415	100%	3,330,594,415	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	03	17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3,265,000,000	100%	3,362,950,000	100%	3,463,838,500	100%	3,567,753,655	100%	3,674,786,265	100%	3,785,029,853	100%	3,785,029,853	
3	03	18	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	-	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	121,000,000	100%	133,100,000	100%	146,410,000	100%	146,410,000	
3	03	19	Program Peningkatan Kapasitas	4	Cakupan pembinaan kapasitas	100%	100%	50,000,000	100%	52,500,000	100%	57,750,000	100%	63,525,000	100%	69,877,500	100%	76,865,250	100%	76,865,250	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Sumber Daya Aparatur		sumberdaya aparatur																
3	03	20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD			150,000,000		157,500,000		173,250,000		190,575,000		209,632,500		230,595,750		230,595,750	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3	03	21	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	6	Jumlah peternak OAP yang meningkat kapasitas	50	50	225,000,000	50	1,122,760,000	50	1,500,000,000	50	2,200,000,000	50	2,500,000,000	50	3,000,000,000	50	3,000,000,000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					melalui pelatihan																
				7	Jumlah kelembagaan peternak yang meningkat kapasitasnya	63	63		63		63		63		63		63		63		
3	03	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	8	Cakupan penanganan penyakit ternak yang ditemukan dan tertangani	-	100.00	1,337,000,000	100.00	1,415,462,485	100.00	2,063,821,409	100.00	2,167,012,479	100.00	2,275,363,103	100.00	2,730,435,724	100.00	2,730,435,724	
3	03	23	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	9	Produksi daging			2,032,000,000		15,000,000,000		14,962,255,000		17,149,997,864		27,929,599,358		34,911,999,197		34,911,999,197	
				9.1.	- Sapi	3,957,984.00	4,076,880.00		4,199,186.40		4,325,161.99		4,454,916.85		4,588,564.36		4,726,221.29		4,726,221.29		
				9.2.	- Kambing	158,239.00	159,235.00		164,012.05		168,932.41		174,000.38		179,220.40		184,597.01		184,597.01		
				9.3.	- Babi	1,762,640.00	1,793,000.00		1,846,790.00		1,902,193.70		1,959,259.51		2,018,037.30		2,078,578.42		2,078,578.42		
				10	Produksi daging unggas																
				10.1.	- Ayam kampung	1,276,377.00	1,333,015.00		1,373,005.45		1,414,195.61		1,456,621.48		1,500,320.13		1,545,329.73		1,545,329.73		
				10.2.	- Ayam petelur	56,162.00	57,846.86		59,582.27		61,369.73		63,210.83		65,107.15		67,060.37		67,060.37		
				10.3.	- Ayam pedaging	1,300,084.00	1,339,086.52		1,379,259.12		1,420,636.89		1,463,256.00		1,507,153.68		1,552,368.29		1,552,368.29		
				10.4.	- Itik	34,523.00	35,212.00		36,268.36		37,356.41		38,477.10		39,631.42		40,820.36		40,820.36		
				11	Produksi telur																
				11.1.	- Ayam kampung	634,399.00	662,549.00		682,425.47		702,898.23		723,985.18		745,704.74		768,075.88		768,075.88		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				11.2.	- Ayam petelur	955,996.00	987,412.00		1,017,034.36		1,047,545.39		1,078,971.75		1,111,340.91		1,144,681.13		1,144,681.13		
				11.3.	- Itik	296,853.00	302,768.00		311,851.04		321,206.57		330,842.77		340,768.05		350,991.09		350,991.09		
				12	NTP Peternakan	99.11	99.64		100.00		100.53		101.06		101.60		102.14		102.14		
				13	Pertumbuhan PDRB Peternakan	6.75	6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		
3	03	24	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Peternakan					2,650,000,000		-		-		-		-		-		-	
3	03	25	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan					438,000,000		-		-		-		-		-		-	
3	03	26	Program Promosi atas hasil Produksi peternakan unggulan daerah					250,000,000		-		-		-		-		-		-	
3	03	27	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Peternakan	14	Luas kawasan peternakan yang dikembangkan	135	135	1,130,000,000	135	13,000,000,000	135	13,650,000,000	135	14,332,500,000	135	17,199,000,000	135	24,735,509,901	135	24,735,509,901	
3	03	28	Program Peningkatan Pembibitan Ternak Dan Kesehatan Hewan					100,000,000		-		-		-		-		-		-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	**04**	**Kehutanan**																			
3	04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	12,649,301,000	100%	6,500,000,000	100%	7,150,000,000	100%	7,865,000,000	100%	8,651,500,000	100%	9,516,650,000	100%	9,516,650,000	**Dinas Kehutanan**
3	04	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2,788,660,000	100%	10,000,000,000	100%	11,000,000,000	100%	12,100,000,000	100%	2,788,660,000	100%	2,788,660,000	100%	2,788,660,000	
3	04	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	1,181,600,000	100%	200,000,000	100%	210,000,000	100%	220,500,000	100%	231,525,000	100%	243,101,250	100%	243,101,250	
3	04	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	2,447,650,000	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	605,000,000	100%	665,500,000	100%	732,050,000	100%	732,050,000	
3	04	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD			84,875,000		89,118,750		93,574,688		98,253,422		103,166,093		108,324,398		108,324,398	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalia	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					n Kegiatan OPD																
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3	04	06	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	6	Pertumbuhan subsektor kehutanan (%)	5.86	7.00	2,301,914,000	7.00	6,775,000,000	7.00	8,088,750,000	7.00	8,897,625,000	7.00	15,000,000,000	7.00	17,250,000,000	7.00	17,250,000,000	
				7	Pembinaan dan pemberdayaan OAP dalam pengelolaan hutan	-	40		40		40		40		40		40		240		
3	04	07	Program rehabilitasi hutan dan lahan	8	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	730.49	234.00	12,077,150,000	406.00	22,879,017,705	406.00	23,390,468,590	500.00	25,729,515,449	550.00	31,390,008,848	600.00	34,529,009,733	2,696.00	34,529,009,733	
3	04	08	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	9	Persentase pendataan kegiatan, pembinaan, dan penertiban hasil produksi hasil hutan	100%	100%	600,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,050,000,000	100%	1,170,178,734	100%	1,404,214,481	100%	1,474,425,205	100%	1,474,425,205	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					kayu (IUPHHK, IIPHHK, IPK)																	
3	04	09	Program perencanaan dan pengembangan hutan	10	Jumlah Perdasus Kehutanan	0	1	300,000,000	-	15,000,000,000	1	15,750,000,000	-	17,325,000,000	1	20,340,191,875	-	21,717,862,931	2	21,717,862,931	
				11	Jumlah KPH yang terbentuk dan operasional	9	3		5		5		-		-		-		22		
				12	Jumlah dokumen kajian kehutanan	2	-		3		3		3		-		11				
				13	Luas kawasan hutan yang dikembangkan	14.500	-		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		50.000		
				14	Cakupan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3	04	10	Program Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan	15	Persentase target dan realisasi PNBP sektor kehutanan	95%	100%	246,000,000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	
3	04	11	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	16	Cakupan fasilitasi penanganan kasus kehutanan	100%	100%	822,850,000	100%	4,760,881,250	100%	3,806,425,313	100%	4,187,067,844	100%	5,443,188,197	100%	6,259,666,426	100%	6,259,666,426	
				17	Rasio junlah polisi kehutanan	1:119,753 ha	-		1:64,238 ha		-		-		1:48,500 ha		-		1:48,500 ha		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				18	Persentase pembinaan polisi kehutanan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				19	Rasio jumlah penyuluh hutan	1:149,231 ha	-		-		1:114,118 ha		-		1:92:381 ha		-		1:92:381 ha		
				20	Cakupan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan	70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				21	Luas tutupan hutan dalam kawasan hutan	8.262.961	8.262.961		8.262.961		8.262.961		8.262.961		8.262.961		8.262.961		8.262.961		
3	**05**		**Energi dan Sumber Daya Mineral**																		
3	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,719,751,492	100%	2,855,739,067	100%	2,998,526,020	100%	3,148,452,321	100%	3,305,874,937	100%	3,471,168,684	100%	3,471,168,684	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	987,100,000	100%	1,036,455,000	100%	1,088,277,750	100%	1,142,691,638	100%	1,199,826,219	100%	1,259,817,530	100%	1,259,817,530	
3	05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	165,950,000	100%	174,247,500	100%	182,959,875	100%	192,107,869	100%	201,713,262	100%	211,798,925	100%	211,798,925	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	05	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	1,501,600,000	100%	1,576,680,000	100%	1,655,514,000	100%	1,738,289,700	100%	1,825,204,185	100%	1,916,464,394	100%	1,916,464,394	
3	05	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD			1,277,945,500		1,341,842,775		1,408,934,914		1,479,381,659		1,553,350,742		1,631,018,280		1,631,018,280	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	05	06	Program Pembinaan dan Penatausahaan pertambangan Mineral dan Batubara	6	Tingkat fasilitasi pemanfaatan sumberdaya alam	n.a	100%	864,445,000	100%	907,667,250	100%	953,050,613	100%	1,000,703,143	100%	1,050,738,300	100%	1,103,275,215	100%	1,103,275,215	
				7	Persentase tambang ilegal yang ditertibkan	-	25.00%		50%		60%		70%		80%		90%		90%		
3	05	07	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	8	Tingkat elektrifikasi provinsi	75.44%	77.60%	253,570,000	79.76%	266,248,500	81.92%	279,560,925	84.08%	293,538,971	86.24%	308,215,920	88.40%	323,626,716	88.40%	323,626,716	
				9	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan energi listrik baru terbarukan	11	3		5		7		9		11		13		48		
				10	Jumlah SDM yang dibina dan dilatih	75	100		100		100		100		100		100		600		
3	05	08	Program Kerja Antar Pemerintah Daerah					355,600,000		-		-		-		-		-		-	
3	05	09	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan	11	Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	109	250	19,143,261,000	300	37,975,269,082	300	38,840,486,892	350	42,724,535,581	350	46,996,989,139	400	51,696,688,053	1,950	51,696,688,053	
				12	Persentase kampung terakses listrik	44.41%	51.36%		58.31%		65.26%		72.21%		79.16%		86.11%		86.11%		
				13	Jumlah kapasitas pembangkit	339	330		322		314		306		299		291		1862		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					listrik yang terbangun (MW)																
3	05	10	Program Pengelolaan Potensi Air Bawah Tanah Daerah	14	Pembangunan dan Inventarisasi air bersih melalui sumur bor (unit)	15	25	8,976,921,733	25	10,738,734,770	25	12,309,217,153	25	14,061,578,220	25	16,015,247,362	25	18,191,658,983	150	18,191,658,983	
3	05	11	Program Dukungan Teknis Penyelenggaraan Pertambangan MINERBA	14	Cakupan pengawasan kegiatan pemanfaatan sumber daya mineral	0%	10%	1,263,288,000	25%	1,326,452,400	40%	1,392,775,020	55%	1,462,413,771	70%	1,535,534,460	85%	1,612,311,183	85%	1,612,311,183	
3	05	12	Program Pengembangan Sumber Daya Geologi Daerah	15	Sistem informasi sumber daya mineral	-	-	425,567,275	-	446,845,639	-	469,187,921	1	492,647,317	1	517,279,683	1	543,143,667	1	543,143,667	
				17	Cakupan wilayah pendataan potensi sumber daya mineral	69.57%	73.19%		76.81%		80.43%		84.06%		87.68%		91.30%		91.30%		
				18	Survei Inventarisasi potensi sumber daya mineral	1	-		3		3		3		3		3		15		
				19	Pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	-	1		1		1		1		1		1		6		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	**06**	**Perdagangan**																			
3	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,853,025,000	100%	2,995,676,250	100%	3,145,460,063	100%	3,302,733,066	100%	3,467,869,719	100%	3,641,263,205	100%	3,641,263,205	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,388,800,000	100%	1,458,240,000	100%	1,531,152,000	100%	1,607,709,600	100%	1,688,095,080	100%	1,772,499,834	100%	1,772,499,834	
3	06	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	-	100%	75,000,000	100%	78,750,000	100%	82,687,500	100%	86,821,875	100%	91,162,969	100%	91,162,969	
3	06	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	1,104,396,000	100%	1,159,615,800	100%	1,217,596,590	100%	1,278,476,420	100%	1,342,400,240	100%	1,409,520,252	100%	1,409,520,252	
3	06	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD			156,519,000		164,344,950		172,562,198		181,190,307		190,249,823		199,762,314		199,762,314	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalia	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					n Kegiatan OPD																
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3	06	06	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	6	Jumlah OAP yang terlibat dalam usaha perdagangan	n.a	-	2,381,900,000	10 orang	2,381,900,000	10 orang	2,381,900,000	10 orang	2,381,900,000	10 orang	2,381,900,000	10 orang	2,381,900,000	50 orang	2,381,900,000	
3	06	07	Program peningkatan dan pengembangan ekspor Impor	7	Nilai ekspor bersih	2,706,140,787	2,841,447,826	2,000,000,000	2,983,520,218	2,200,000,000	3,132,696,229	2,420,000,000	3,289,331,040	2,662,000,000	3,453,797,592	2,928,200,000	3,626,487,472	3,221,020,000	3,626,487,472	3,221,020,000	
3	06	08	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	8	Cakupan rekomendasi TPID yang ditindaklanjuti	n.a	100%	3,368,100,000	100%	12,015,087,457	100%	15,899,314,864	100%	30,757,906,679	100%	49,314,562,549	100%	66,692,294,319	100%	66,692,294,319	
				9	Fasilitasi Peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua Barat		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				10	Pembangunan Papua Barat Mart	n.a	-		-		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		12 unit		
3	06	09	Program Standarisasi Barang dan Jasa Daerah di Bidang Perdagangan	11	Cakupan standarisasi barang dan jasa daerah	100%	100%	347,555,000	100%	364,932,750	100%	383,179,388	100%	402,338,357	100%	422,455,275	100%	443,578,038	100%	443,578,038	
3	06	10	Program Pengembangan BPPMB	12	Cakupan pengembangan BPPMB	100%	100%	750,000,000	100%	787,500,000	100%	826,875,000	100%	868,218,750	100%	911,629,688	100%	957,211,172	100%	957,211,172	
3	06	11	Program Pengawasan Barang Ber-SNI wajib dan Jasa Daerah	13	Cakupan pengawasan barang Ber-SNI wajib dan Jasa Daerah	100%	100%	311,875,000	100%	327,468,750	100%	343,842,188	100%	361,034,297	100%	379,086,012	100%	398,040,312	100%	398,040,312	
3	06	12	Peningkatan Kemetrologian Daerah	14	Cakupan pelayanan kemetrologian daerah	100%	100%	750,000,000	100%	787,500,000	100%	826,875,000	100%	868,218,750	100%	911,629,688	100%	957,211,172	100%	957,211,172	
3	06	13	Standarisasi UTTP di Bidang Perdagangan	15	Cakupan standarisasi UTTP bidang perdagangan	100%	100%	340,570,000	100%	357,598,500	100%	375,478,425	100%	394,252,346	100%	413,964,964	100%	434,663,212	100%	434,663,212	
3	06	14	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan di Bidang Perdagangan	16	Persentase jumlah penyelesaian keluhan konsumen	n.a	100%	1,500,000,000	100%	1,575,000,000	100%	1,653,750,000	100%	1,736,437,500	100%	1,823,259,375	100%	1,914,422,344	100%	1,914,422,344	
				17	Persentase monitoring ketersediaan stok dan harga barang	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				18	Cakupan rekomendasi pengurangan hambatan perdagangan dan pengawasan perdagangan yang ditindaklanjuti	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				19	Fasilitasi peningkatan perlindungan konsumen di seluruh kabupaten/kota	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3	**07**		**Perindustrian**																		
3	07	01	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1	Pertumbuhan jumlah IKM	n.a	2%	955,450,000	2%	5,955,450,000	2%	6,253,222,500	2%	6,565,883,625	2%	8,257,200,299	2%	13,257,200,299	2%	13,257,200,299	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	07	02	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	2	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	n.a	-	3,000,000,000	-	3,150,000,000	1	3,304,561,600	2	3,726,748,910	2	4,195,741,509	2	4,716,449,252	7	4,716,449,252	
				3	Persentase IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	n.a	-		5%		5%		10%		10%		10%		10%		
3	07	03	Program pengemban	4	Jumlah sentra	n.a	-	500,000,000	1	4,216,949,878	1	4,430,735,771	1	5,826,337,370	1	6,117,654,238	1	8,418,005,589	5	8,418,005,589	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			gan sentra-sentra industri potensial		industri rakyat																
				5	Persentase usaha industri dan kawasan industri yang beroperasi sesuai dengan NSPK	n.a	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3	07	04	Program Peningkatan SDM Industri yang Kompeten dan disiplin	6	Jumlah IKM OAP	n.a	-	291,810,000	25	306,400,500	40	321,720,525	50	337,806,551	60	354,696,879	75	372,431,723	75	372,431,723	
3	**08**	**Transmigrasi**																			
3	08	01	Program Transmigrasi lokal	1	Cakupan pengembangan kawasan transmigrasi OAP	n.a	40%	2,450,000,000	45%	9,713,512,788	50%	10,199,188,427	55%	11,219,107,270	60%	12,341,017,997	65%	13,575,119,796	65%	13,575,119,796	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
				2	Jumlah pemukiman wilayah transmigrasi lokal baru	n.a	1		1		1		1		1		1		6		
				3	Jumlah KK transmigran Orang Asli Papua (OAP) yang mandiri	n.a	10		10		10		10		10		10		60		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																				
4	01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan																			
4	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	89,510,658,169	100%	94,270,521,977	100%	98,974,048,076	100%	104,025,356,563	100%	109,216,624,391	100%	114,667,455,611	100%	114,667,455,611	Sekretariat Daerah
4	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	110,800,719,325	100%	95,190,401,178	100%	103,772,859,474	100%	111,571,241,142	100%	119,951,765,763	100%	128,851,344,025	100%	128,851,344,025	
				3	Persentase fasilitasi kegiatan Tim penertiban	100%	83.33%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				4	Persentase Sarana Prasarana Rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang memadai	100%	92.86%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	1,466,750,000	100%	1,935,500,000	100%	1,661,825,000	100%	1,617,316,250	100%	1,919,682,063	100%	1,927,966,166	100%	1,927,966,166	
4	01	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	21,703,282,500	100%	19,527,591,708	100%	18,943,440,089	100%	20,896,936,393	100%	20,790,607,513	100%	22,976,462,189	100%	22,976,462,189	
4	01	05	Program peningkata	7	Cakupan penyelengg			9,316,992,931		8,461,794,248		8,514,843,043		8,905,477,440		9,315,643,557		9,926,432,110		9,926,432,110	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			n pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		araan Sistem akuntabilitas kinerja OPD																
				7.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				7.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				7.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				7.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				7.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				7.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	06	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	8	Persentase fasilitasi kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	100%	37,796,285,000	100%	63,261,812,483	100%	61,983,257,975	100%	73,168,717,598	100%	85,722,079,875	100%	99,867,265,377	100%	99,867,265,377	
				9	Persentase fasilitasi kegiatan protokoler Gubernur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					dan Wakil Gubernur																
4	01	07	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	10	Ketersediaan mekanisme penyusunan produk hukum	Ada	Ada	8,542,170,900	Ada	9,027,319,500	Ada	9,619,468,930	Ada	10,258,869,749	Ada	10,745,596,691	Ada	11,368,802,226	Ada	11,368,802,226	
				11	Persentase gugatan yang diselesaikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				12	Persentase Raperda yang disetujui DPRD dalam Prolegda	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				13	Persentase produk hukum daerah yang disosialisasikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				14	Persentase produk hukum pusat yang disosialisasikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	**01**	08	Program Peraturan Perundang-Undangan Otonomi Khusus	15	Persentase ketersediaan Perdasus sesuai mandat undang-undang otonomi khusus	n.a	0%	886,190,000	30%	1,772,380,000	50%	1,860,999,000	70%	1,954,048,950	80%	2,051,751,398	100%	2,154,338,967	100%	2,154,338,967	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				16	Persentase ketersediaan Perdasi sesuai mandat undang-undang otonomi khusus	n.a	0%		30%		50%		70%		80%		100%		100%		
				17	Kinerja pelaksanaan program dalam regulasi terkait otonomi khusus	n.a	0%		50%		60%		60%		90%		100%		100%		
				18	Persentase Kebijakan Otsus yang dilaksanakan	n.a	0%		35%		50%		100%		100%		100%		100%		
				19	Persentase Penyusunan Bahan Kebijakan Otsus yang diselesaikan	n.a	0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	09	Program Masyarakat dan Desa	20	Persentase Desa Adat Otsus yang terbentuk	n.a	0%	2,613,580,000	50%	2,624,098,976	50%	2,681,177,101	85%	2,822,985,956	90%	2,887,635,253	100%	3,117,467,016	100%	3,117,467,016	
				21	Persentase Badan Musyawarah Kampung Adat Otsus yang terbentuk	n.a	0%		45%		60%		60%		85%		100%		100%		
4	01	10	Program Pembinaan dan	22	Cakupan pembinaan peningkatan	n.a	80%	1,405,755,000	90%	2,833,157,000	100%	3,966,322,795	100%	3,363,042,777	100%	3,622,365,108	100%	3,105,339,054	100%	3,105,339,054	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pengembangan Aparatur		pelayanan publik																
4	01	11	Program Peningkatan Kapasitas Koordinasi Pembangunan Daerah	23	Persentase Kabupaten/ Kota Tertib Data Pembangunan Daerah yang bersumber APBD/ APBN	100%	100%	2,400,000,000	100%	1,450,000,000	100%	1,522,500,000	100%	1,598,625,000	100%	1,678,556,250	100%	1,762,484,063	100%	1,762,484,063	
4	01	12	Program Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah	24	Persentase aset yang diserahkan	n.a	n.a	1,500,000,000	30%	1,575,000,000	50%	1,653,750,000	60%	1,736,437,500	70%	1,823,259,375	80%	1,914,422,344	80%	1,914,422,344	
				25	Persentase OPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBN	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				26	Persentase OPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	13	Program Peningkatan Sarana Prasarana Lembaga Pembangunan	27	Cakupan fasilitasi sarana prasarana lembaga pembangunan daerah	100%	100%	1,200,000,000	100%	1,260,000,000	100%	1,323,000,000	100%	1,389,150,000	100%	1,458,607,500	100%	1,531,537,875	100%	1,531,537,875	
4	01	14	Program Peningkatan Sarana	28	Sistem Informasi Pembangun	n.a	-	1,000,000,000	50%	952,560,818	60%	897,137,642	75%	941,994,524	80%	989,094,250	100%	1,038,548,963	100%	1,038,548,963	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Prasarana Informasi Pembangunan		an Daerah (SIP)																
4	01	15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan					11,850,000,000		-		-		-		-		-		-	
4	01	16	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah	29	Cakupan peningkatan kapasitas aparatur perencana pembangunan daerah	100%	100%	1,250,000,000	100%	315,000,000	100%	330,750,000	100%	347,287,500	100%	364,651,875	100%	382,884,469	100%	382,884,469	
4	01	17	Program Peningkatan Sarana Prasarana Lembaga Sosial Keagamaan di Provinsi Papua Barat	30	Cakupan fasilitasi Prasarana Peribadatan, Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Keagamaan yang memadai	100%	100%	13,450,000,000	100%	2,220,698,409	100%	2,331,733,329	100%	2,331,733,329	100%	2,570,735,996	100%	2,699,272,795	100%	2,699,272,795	
4	01	18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah pada Peringatan Hari-Hari Besar	31	Persentase fasilitasi kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	100%	100%	500,000,000	100%	1,649,182,943	100%	1,731,642,090	100%	2,299,306,722	100%	1,909,135,404	100%	2,004,592,175	100%	2,004,592,175	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Keagamaan di Provinsi Papua Barat																		
4	01	19	Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Kepemudaan Provinsi Papua Barat	32	Cakupan fasilitasi prasarana kepemudaan yang memadai	100%	100%	21,000,000,000	100%	3,467,261,456	100%	3,640,624,529	100%	3,640,624,529	100%	4,013,788,543	100%	4,214,477,970	100%	4,214,477,970	
4	01	20	Program Peningkatan Sarana Prasarana Lembaga Sosial Kemasyarakat dan Lembaga Keagamaan Provinsi Papua Barat	33	Cakupan Fasilitasi kegiatan Syarah Keagamaan	100%	100%	34,500,000,000	100%	1,702,532,243	100%	1,787,658,855	100%	1,733,583,855	100%	1,970,893,888	100%	2,069,438,582	100%	2,069,438,582	
4	01	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan	34	Cakupan fasilitasi perbaikan sarana dan prasarana peribadatan	100%	100%	8,500,000,000	100%	2,403,415,351	100%	2,523,586,119	100%	2,649,765,425	100%	2,782,253,696	100%	2,921,366,381	100%	2,921,366,381	
4	01	22	Program Peningatan Sarana Prasarana Olahraga	35	Cakupan fasilitasi Prasarana Olah Raga yang memadai	100%	100%	700,000,000	100%	2,434,078,573	100%	2,237,529,430	100%	2,021,605,238	100%	1,785,050,816	100%	1,526,539,633	100%	1,526,539,633	
4	01	23	Program Pembinaan Mental dan spritual di Provinsi Papua Barat	36	Cakupan pembinaan mental dan spiritual aparatur di Provinsi Papua Barat	100%	100%	4,500,000,000	100%	742,984,598	100%	780,133,828	100%	780,133,828	100%	860,097,545	100%	903,102,422	100%	903,102,422	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	01	24	Program Kerjasama Informasi Pembangunan Daerah	37	Cakupan ketesediaan informasi pembangunan kepada masyarakat	100%	100%	3,141,000,000	100%	2,986,244,616	100%	2,805,792,954	100%	2,946,082,602	100%	3,093,386,732	100%	3,248,056,069	100%	3,248,056,069	
4	01	25	Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana Masyarakat					400,000,000		-		-		-		-		-		-	
4	01	26	Program Peningkatan Sarana dan Komunikasi Serta Media Masa	38	Persentase publikasi kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	100%	2,912,670,000	100%	3,058,303,500	100%	3,211,218,675	100%	3,371,779,609	100%	3,540,368,589	100%	3,717,387,019	100%	3,717,387,019	
				39	Persentase Sarana Komunikasi/ Dokumentasi dan Informasi yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	27	Program Penataan Ketatalaksanaan	40	Cakupan pemenuhan dokumen ketatalaksanaan	100%	100%	2,566,270,000	100%	2,694,583,500	100%	2,257,500,000	100%	1,800,000,000	100%	840,000,000	100%	2,010,000,000	100%	2,010,000,000	
4	01	28	Program Revitalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah	41	Persentase pencapaian reformasi birokrasi	n.a	60%	2,354,669,000	80%	2,472,402,450	90%	3,290,000,000	100%	3,400,000,000	100%	3,470,000,000	100%	3,580,000,000	100%	3,580,000,000	
				42	Persentase kelembagaan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, dan	n.a	60%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					tepat struktur																
				43	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Papua Barat	n.a	50%		55%		60%		65%		70%		75%		75%		
4	01	29	Program Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan	44	Cakupan OPD Provinsi Papua Barat yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan	n.a	60%	1,672,719,000	100%	1,756,354,950	100%	1,640,000,000	100%	1,680,000,000	100%	3,561,079,516	100%	1,760,000,000	100%	1,760,000,000	
				45	Persentase Rekomendasi dari ABK yang ditindaklanjuti	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	30	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					83,530,000,000		-		-		-		-		-			
4	01	31	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	46	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	n.a	n.a	5,941,500,000	CC	6,238,575,000	CC	6,550,503,750	CC	6,878,028,938	B	7,221,930,384	B	7,583,026,904	B	7,583,026,904	
				47	Skor EKPPD terhadap LPPD	2.22	2,50-2,90		2,50-2,90		2,50-2,90		2,50-2,90		2,50-2,90		2,50-2,90		2,50-2,90		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Provinsi Papua Barat																
				48	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ dan LPPD	Tidak Tepat	Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		
4	01	32	Program Penataan Daerah	49	Cakupan penyepakatan batas wilayah Provinsi Papua Barat	n.a	-	2,000,000,000	20%	2,100,000,000	20%	2,205,000,000	20%	2,315,250,000	20%	2,431,012,500	20%	2,552,563,125	100%	2,552,563,125	
				50	Cakupan penyepakatan batas wilayah antar kabupaten/kota	n.a	22.22%		22.22%		16.67%		11.11%		11.11%		11.11%		94.40%		
				51	Cakupan penyepakatan batas wilayah Hak Ulayat	n.a	5%		10%		15%		20%		25%		30%		30%		
				52	Persentase konflik penyelenggaraan pemerintahan antar kabupaten dan kota yang diselesaikan	13.46%	13.46%		5.77%		9.61%		15.38%		19.23%		9.61%		73.07%		
4	01	33	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah					500,000,000		-		-		-		-		-		-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	01	34	Program Penataan Distrik, Kelurahan, dan Kampung	53	Persentase calon distrik dan kampung yang memenuhi kriteria pembentukan distrik/kampung baru	10.62	10.62	-	32.42	3,200,000,000	15.17	3,360,000,000	27.01	3,528,000,000	14.22	3,704,400,000	0.57	3,889,620,000	100.00	3,889,620,000	
				54	Predikat Evaluasi perkembangan distrik dan kampung/kelurahan.	Kurang Berkembang	Kurang Berkembang		Berkembang		Berkembang		Berkembang		Cepat Berkembang		Cepat Berkembang		Cepat Berkembang		
				55	Persentase kantor distrik/kampung /kelurahan yang dibangun	3.85%	3.85%		11.53%		15.38%		19.23%		19.23%		19.23%		88.46%		
4	01	35	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Prasarana dan Sarana Daerah					1,937,675,000		-		-		-		-		-		-	
4	01	36	Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan	56	Cakupan kebijakan pembangunan ekonomi yang dihasilkan dari kajian	8	5	-	4	4,365,967,986	4	3,927,266,385	4	3,335,229,705	4	3,501,991,190	4	3,677,090,749	25	3,677,090,749	
				57	Jumlah komoditas strategis	2	1		2		2		2		2		2		11		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					yang dikembangkan																
4	01	37	Program Peningkatan Kemitraan Perekonomian Daerah	58	Jumlah kemitrausahaan yang dijamin	2	3	450,000,000	4	1,250,000,000	4	1,312,500,000	4	1,378,125,000	4	1,447,031,250	4	1,519,382,813	23	1,519,382,813	
4	01	38	Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan					950,000,000		-		-		-		-		-		-	
4	01	39	Program Pemantauan Tingkat Perkembangan Harga Komoditas Strategis	59	Tingkat inflasi komoditas strategis (sembako)	3.63%	4.42%	850,000,000	5.21%	1,000,000,000	4.22%	1,200,000,000	5.06%	1,440,000,000	4.42%	1,512,000,000	4.24%	1,587,600,000	4.24%	1,587,600,000	
4	01	40	Program Kordinasi Kebijakan di Bidang Perekonomian					2,600,000,000													
4	01	41	Koordinasi Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Kerjasama	60	Cakupan koordinasi yang dihasilkan dan ditindaklanjuti	n.a	100%	-	100%	1,000,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,440,000,000	100%	1,512,000,000	100%	1,587,600,000	100%	1,587,600,000	
4	01	42	Program Komoditas Strategis	61	Cakupan komoditas strategis yang dikembangkan	-	-	-	2	2,200,000,000	2	2,640,000,000	2	3,168,000,000	2	3,326,400,000	2	3,492,720,000	10	3,492,720,000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	01	43	Koordinasi di Bidang Kerja Sama					449,675,000		-		-		-		-		-		-	
4	01	44	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					850,000,000		-		-		-		-		-		-	
4	01	45	Peningkatan Koordinasi					699,900,000		-		-		-		-		-		-	
4	01	46	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	62	Tingkat kapasitas SDM pengelola barang milik daerah	100%	100%	2,265,000,000	100%	2,010,750,000	100%	2,111,287,500	100%	2,216,851,875	100%	2,327,694,469	100%	2,444,079,192	100%	2,444,079,192	
				63	Persentase OPD yang mengimplementasikan buku pedoman pelaksanaan APBD dan standar barang	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				64	Tingkat pelanggaran pengadaan barang dan jasa	n.a	1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		
				65	Cakupan BMD yang telah diappraisal	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				66	Tersedianya Dokumen Inventaris Barang Milik Daerah	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Pemerintah Provinsi Papua Barat																
				67	Tersedianya Kodefikasi Barang Milik Daerah se-Provinsi Papua Barat	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				68	Tersusunnya Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				69	Tersusunnya laporan pengadaan barang dan jasa	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
4	01	47	Program Optimasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					4,448,330,000		4,670,746,500		-		-		-		-	-		
4	01	46	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	10,062,330,800	100%	13,263,838,800	100%	13,529,115,576	100%	13,799,697,888	100%	14,075,691,845	100%	14,357,205,682	100%	14,357,205,682	**Sekretariat DPRP**
4	01	47	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2,365,941,800	100%	14,698,870,500	100%	5,932,053,630	100%	33,046,494,703	100%	5,953,224,597	100%	6,072,289,089	100%	6,072,289,089	
4	01	48	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	900,931,200	100%	3,430,300,000	100%	3,498,906,000	100%	3,568,884,120	100%	3,640,261,802	100%	3,713,067,038	100%	3,713,067,038	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	01	49	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	4,360,976,000	100%	7,213,103,012	100%	8,782,815,072	100%	8,958,471,374	100%	9,137,640,801	100%	9,320,393,617	100%	9,320,393,617	
				5	ASN Setwan yang kompeten dalam pelayanan fungsi Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	50	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			783,203,544		710,973,000		725,192,460		739,696,309		754,490,235		769,580,040		769,580,040	
				6.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				6.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				6.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				6.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				6.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				6.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	51	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	7	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Kelengkapan Provinsi	n.a	Ada	80,802,601,456	Ada	75,924,263,522	Ada	91,788,721,788	Ada	75,662,576,680	Ada	114,867,296,716	Ada	128,095,638,002	Ada	128,095,638,002	
				8	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam RPJMN maupun RKPD	n.a	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				9	Terintegrasinya program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan,	n.a	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					pembentukan Perda, dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD																	
				10	Persentase Perdasus Inisiatif yang disahkan dalam prioritas Prolegda	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				11	Jumlah Perdasus disahkan dalam prioritas Prolegda	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				12	Persentase Perda yang ditetapkan sesuasi Prolegda	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				13	Persentase rekomendasi DPRD dari LKPj yang dilaksanakan	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				14	Persentase rekomendasi DPRD dari RDP yang	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					dilaksanakan																
4	01	52	Program Layanan Sarana dan Prasarana Informasi					2,276,515,200		-		-		-		-		-		-	
4	01	53	Program Pelayanan dokumentasi dan publikasi kegiatan DPR Papua Barat	15	Cakupan Informasi parlemen yang terdokumentasi dan dipublikasikan kepada Masyarakat	100%	100%	-	100%	7,656,961,520	100%	2,195,816,750	100%	2,239,733,085	100%	2,284,527,747	100%	2,330,218,302	100%	2,330,218,302	
4	01	54	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	9,019,204,400	100%	5,000,000,000	100%	5,000,000,000	100%	5,000,000,000	100%	5,000,000,000	100%	5,000,000,000	100%	5,000,000,000	**Sekretariat MRP**
4	01	55	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3,038,545,000	100%	11,100,000,000	100%	12,210,000,000	100%	13,431,000,000	100%	14,774,100,000	100%	16,251,510,000	100%	16,251,510,000	
4	01	56	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	733,760,000	100%	770,448,000	100%	808,970,400	100%	849,418,920	100%	891,889,866	100%	936,484,359	100%	936,484,359	
4	01	57	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	4,247,375,000	100%	2,580,000,000	100%	2,709,000,000	100%	2,844,450,000	100%	2,986,672,500	100%	3,136,006,125	100%	3,136,006,125	
4	01	58	Program peningkatan	5	Cakupan penyelenggaraan			764,382,000		802,601,100		842,731,155		884,867,713		929,111,098		975,566,653		975,566,653	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Sistem akuntabilitas kinerja OPD																
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	59	Program Musyawarah Peraturan dan Risalah	6	Persentase masyarakat yang memahami penataan tanah ulayat	n.a	100%	-	100%	3,249,552,000	100%	3,412,029,600	100%	3,582,631,080	100%	3,761,762,634	100%	3,949,850,766	100%	3,949,850,766	
4	01	60	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP - PB	7	Persentase Pertimbangan persetujuan dan aspirasi yang	n.a	100%	27,526,733,600	100%	23,210,515,271	100%	24,066,041,035	100%	24,908,843,087	100%	25,732,735,241	100%	26,530,667,003	100%	26,530,667,003	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					ditindaklanjuti																
				8	Jumlah Pimpinan dan Anggota yang trampil dalam Penyusunan Rekomendasi	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				9	Jumlah Pimpinan dan Anggota yang trampil dalam Analisis Kebijakan Otsus	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				10	Cakupan Media Massa yang menyampaikan Rekomendasi dalam konferensi Pers	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	61	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	5,215,200,000	100%	5,287,000,000	100%	5,539,250,000	100%	5,914,012,500	100%	5,618,311,875	100%	5,982,074,031	100%	5,982,074,031	Badan Penghubung Daerah
4	01	62	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan	100%	100%	5,218,830,000	100%	2,480,000,000	100%	1,963,050,000	100%	2,405,202,500	100%	1,958,142,375	100%	2,756,049,494	100%	2,756,049,494	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					prasarana aparatur																
4	01	63	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	291,950,000	100%	185,000,000	100%	212,750,000	100%	223,387,500	100%	212,218,125	100%	222,829,031	100%	222,829,031	
4	01	64	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	532,400,000	100%	958,000,000	100%	1,040,700,000	100%	1,133,735,000	100%	1,077,048,250	100%	1,130,900,663	100%	1,130,900,663	
4	01	65	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			161,620,000		187,000,000		215,050,000		225,802,500		214,512,375		225,237,994		225,237,994	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	66	Program Peningkatan partisipasi dan Kemitraan antar sektor dan Pemerintah Daerah	6	Persentase Fasilitas Kegiatan Kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur dan pejabat di Jakarta	70%	100%	-	100%	2,671,448,907	100%	3,386,071,353	100%	3,690,418,488	100%	5,871,581,337	100%	6,129,904,558	100%	6,129,904,558	
				7	Persentase fasilitasi kegiatan Provinsi Papua Barat di Jakarta	70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				8	Persentase Sarana Prasarana Kantor Badan Penghubung Daerah yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				9	Persentase fasilitasi kegiatan Promosi dan Informasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota Papua Barat di Jakarta	95%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				10	Cakupan Pembinaan Kelompok Masyarakat	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Papua Barat di Jakarta dan sekitarnya.																	
				11	Cakupan Pembinaan Hubungan dengan Kelompok *Stake Holder* (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) di Jakarta	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
4	**02**		**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah**																		
4	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4,212,165,600	100%	4,422,773,880	100%	4,643,912,574	100%	4,876,108,203	100%	5,119,913,613	100%	5,375,909,293	100%	5,375,909,293	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
4	02	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	937,450,000	100%	984,322,500	100%	1,033,538,625	100%	1,085,215,556	100%	1,139,476,334	100%	1,196,450,151	100%	1,196,450,151	
4	02	03	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	184,000,000	100%	193,200,000	100%	202,860,000	100%	213,003,000	100%	223,653,150	100%	234,835,808	100%	234,835,808	
4	02	04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	2,840,210,400	100%	2,982,220,920	100%	3,131,331,966	100%	3,287,898,564	100%	3,452,293,493	100%	3,624,908,167	100%	3,624,908,167	
4	02	05	Program peningkata	5	Cakupan penyelengg			956,418,800		1,004,239,740		1,054,451,727		1,107,174,313		1,162,533,029		1,220,659,680		1,220,659,680	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			n pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		araan Sistem akuntabilitas kinerja OPD																
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	02	06	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah					1,121,475,000		-		-		-		-					
4	02	07	Program peningkatan kapasitas kelembagaan	6	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana	100%	100%	806,371,000	100%	846,689,550	100%	889,024,028	100%	933,475,229	100%	980,148,990	100%	1,029,156,440	100%	1,029,156,440	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			perencanaan pembangunan daerah		pembangunan																
4	02	08	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	9,361,599,750	Ada	15,075,324,958	Ada	15,226,078,207	Ada	15,682,860,553	Ada	15,839,689,159	Ada	16,790,070,508	Ada	16,790,070,508	
				8	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				9	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				10	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				11	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				12	Partisipasi masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					dalam perencanaan pembangunan																
4	02	09	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	13	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan ekonomi daerah	100%	100%	3,203,563,400	100%	12,077,466,778	100%	12,198,241,445	100%	12,564,188,689	100%	12,689,830,576	100%	13,451,220,410	100%	13,451,220,410	
				14	Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	02	10	Program perencanaan sosial dan budaya	15	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan sosial dan budaya	100%	100%	3,675,000,000	100%	12,572,475,208	100%	12,698,199,960	100%	13,079,145,958	100%	13,209,937,418	100%	14,002,533,663	100%	14,002,533,663	
				16	Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sosial dan budaya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				17	Indeks kinerja TKPKD Provinsi Papua Barat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				18	Indeks kinerja	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					TKPKD Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat																
4	02	11	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	19	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	100%	2,058,200,050	100%	13,874,835,260	100%	14,013,583,613	100%	14,433,991,121	100%	14,578,331,032	100%	15,453,030,894	100%	15,453,030,894	
				20	Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	02	12	Perencanaan Tata Ruang	21	Cakupan realiasi perencanaan penataang ruang Provinsi Papua Barat	100%	100%	4,140,820,000		-		-		-		-		-		-	
4	02	13	Program Perencanaan Pengembang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	22	Cakupan realisasi perencaanan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	-		100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				23	Cakupan bahan kebijakan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	02	14	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	24	Cakupan realisasi perencaanan pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	-	-	-	100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%		
				25	Cakupan bahan kebijakan perencanaan pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	-	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	02	15	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagan Perencanaan Pembangunan Daerah	26	Cakupan peningkatan kapasitas aparatur perencana pembangunan daerah	-	-	-	100%	750.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	
4	02	16	Program Perencanaan dan Pembangun	27	Cakupan realisasi perencanaan program	100%	100%	9,002,726,000	100%	11,765,204,401	100%	11,465,518,582	100%	13,121,516,575	100%	12,792,616,746	100%	16,928,490,879	100%	16,928,490,879	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			an Bidang Otonomi Khusus (Otsus)		otonomi khusus																
				28	Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan terkait otonomi khusus	100%	100%	100.00	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	**03**	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan**																			
4	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2,347,747,000	100%	2,465,134,350	100%	2,588,391,068	100%	2,717,810,621	100%	2,853,701,152	100%	2,996,386,210	100%	2,996,386,210	**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
4	03	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	913,950,000	100%	959,647,500	100%	1,007,629,875	100%	1,058,011,369	100%	1,110,911,937	100%	1,166,457,534	100%	1,166,457,534	
4	03	03	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	139,000,000	100%	145,950,000	100%	153,247,500	100%	160,909,875	100%	168,955,369	100%	177,403,137	100%	177,403,137	
4	03	04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	514,050,000	100%	539,752,500	100%	566,740,125	100%	595,077,131	100%	624,830,988	100%	656,072,537	100%	656,072,537	
4	03	05	Program peningkatan pengembangan sistem	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilita			276,208,000		290,018,400		304,519,320		319,745,286		335,732,550		352,519,178		352,519,178	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			pelaporan capaian kinerja dan keuangan		s kinerja OPD																
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	03	06	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	6	Tingkat implementasi inovasi daerah	50%	60%	2,847,221,000	70%	2,989,582,050	80%	3,139,061,153	90%	3,296,014,210	100%	3,460,814,921	100%	3,633,855,667	100%	3,633,855,667	
				7	Persentase kajian rekomendasi kebijakan daerah	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				8	Persentase implementasi rencana kelitbangan	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	03	07	Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah	9	Persentase pemanfaatan hasil kajian kelitbangan	n.a	30%	961,824,000	100%	2,506,097,182	100%	2,631,402,042	100%	4,321,620,806	100%	6,408,080,241	100%	8,972,938,326	100%	8,972,938,326	
				10	Persentase kajian yang dipublikasikan dalam jurnal atau bulletin	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	**04**	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan**																			
4	04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2,736,680,000	100%	2,873,514,000	100%	3,017,189,700	100%	3,168,049,185	100%	3,326,451,644	100%	3,492,774,226	100%	3,492,774,226	**Badan Kepegawaian Daerah**
4	04	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	8,750,665,000	100%	5,445,306,733	100%	800,000,000	100%	840,000,000	100%	882,000,000	100%	926,100,000	100%	926,100,000	
4	04	03	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	700,000,000	100%	735,000,000	100%	771,750,000	100%	810,337,500	100%	850,854,375	100%	893,397,094	100%	893,397,094	
4	04	04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	6,950,519,668	100%	6,950,519,668	100%	7,298,045,651	100%	7,662,947,934	100%	8,046,095,331	100%	8,448,400,097	100%	8,448,400,097	
4	04	05	Program peningkatan pengembangan sistem	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilita			165,000,000		173,250,000		181,912,500		191,008,125		200,558,531		210,586,458		210,586,458	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			pelaporan capaian kinerja dan keuangan		s kinerja OPD																
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	04	06	Program Pengembangan Data dan Informasi					2,191,650,000		-		-		-		-		-		-	
4	04	07	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	6	Cakupan peningkatan kualitas aparatur	100.00	100.00	6,130,923,932	100.00	15,934,271,717	100.00	21,648,557,373	100.00	22,730,985,242	100.00	23,867,534,504	100.00	26,942,350,034	100.00	26,942,350,034	
				7	Penerapan Merit System dalam manajemen	70.00	80.00		80.00		85.00		90.00		90.00		100.00		100.00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					kepegawaian																
				8	Persentase peserta ujian dinas yang lulus	97.40	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				9	Persentase pengelola kepegawaian OPD	23.40	50.00		60.00		70.00		80.00		90.00		100.00		100.00		
				10	Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	80.00	80.00		80.00		85.00		85.00		90.00		90.00		90.00		
				11	Jumlah jabatan pimpjnan tinggi pada instansi pemerintah	48	48		48		48		48		48		48		48		
				12	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	192	192		192		192		192		192		192		192		
				13	Jumlah jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	n.a	100		100		100		100		100		100		100		
				14	Cakupan pegawai yang mengikuti tugas belajar	n.a	-		50		50		50		50		50		250		
4	04	08	Program Pengelolaan	15	Cakupan pelayanan	93.80	100%	374,561,400	100%	393,289,470	100%	412,953,944	100%	433,601,641	100%	455,281,723	100%	478,045,809	100%	478,045,809	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Administrasi Kepegawaian		pindah pegawai dan purna tugas																
4	04	09	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3,540,840,000	100%	3,717,882,000	100%	3,903,776,100	100%	4,098,964,905	100%	4,303,913,150	100%	4,519,108,808	100%	4,519,108,808	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi**
4	04	10	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	9,139,250,000	100%	9,596,212,500	100%	10,076,023,125	100%	10,579,824,281	100%	11,108,815,495	100%	11,664,256,270	100%	11,664,256,270	
4	04	11	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	154,000,000	100%	161,700,000	100%	169,785,000	100%	178,274,250	100%	187,187,963	100%	196,547,361	100%	196,547,361	
4	04	12	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	7,752,308,500	100%	8,139,923,925	100%	8,546,920,121	100%	8,974,266,127	100%	9,422,979,434	100%	9,894,128,405	100%	9,894,128,405	
4	04	13	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			360,815,000		378,855,750		397,798,538		417,688,464		438,572,888		460,501,532		460,501,532	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	04	14	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	6	Cakupan pejabat struktural yang mengikuti Diklat PIM IV, III, II	85	85	3,052,786,500	85	5,866,984,329	85	6,160,333,546	85	7,931,082,045	85	9,936,641,150	85	12,203,378,712		12,203,378,712	
				7	Persentase fasilitasi penyelenggaraan Diklat kabupaten/kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				8	Cakupan pegawai yang mengikuti diklat teknis	280	280		280		280		280		280		280		1,960		
				9	Cakupan pegawai yang mengikuti diklat fungsional	280	280		280		280		280		280		280		1,960		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				10	Persentase aparatur OPD yang meningkat kapasitasnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				11	Cakupan pegawai yang mengikuti diklat prajabatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	**05**	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan**																			
4	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	12,261,115,000	100%	8,000,000,000	100%	8,000,000,000	100%	8,400,000,000	100%	8,652,000,000	100%	9,084,600,000	100%	9,084,600,000	**Badan Pendapatan Daerah**
4	05	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	12,971,925,000	100%	11,136,406,703	100%	11,136,406,703	100%	11,693,227,038	100%	11,693,227,038	100%	12,277,888,390	100%	12,277,888,390	
4	05	03	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	252,000,000	100%	264,600,000	100%	277,830,000	100%	291,721,500	100%	300,473,145	100%	315,496,802	100%	315,496,802	
4	05	04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	2,130,850,000	100%	2,237,392,500	100%	2,349,262,125	100%	2,466,725,231	100%	2,540,726,988	100%	2,667,763,338	100%	2,667,763,338	
4	05	05	Program peningkatan pengembangan sistem	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilita			6,484,110,000		6,808,315,500		6,808,315,500		7,148,731,275		7,363,193,213		7,731,352,874		7,731,352,874	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			pelaporan capaian kinerja dan keuangan		s kinerja OPD																
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	05	07	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					400,000,000		-		-		-		-		-		-	
4	05	08	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					800,000,000		-		-		-		-		-		-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	05	09	Program Peningkatan Penerimaan Daerah	6	Persentase pertumbuhan pendapatan daerah	n.a	5.00	4,700,000,000	5.00	6,195,000,000	5.00	6,762,734,669	5.00	7,100,871,403	5.00	7,293,681,591	5.00	7,658,365,671	5.00	7,658,365,671	
				7	Persentase pelanggaran wajib pajak	56.00	53.00		51.00		49.00		47.00		45.00		41.00		41.00		
				8	Persentase pertumbuhan PAD	4.96	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		
				9	Persentase PAD terhadap pendapatan	2.40	5.50		5.75		6.00		6.50		6.75		7.00		7.00		
4	05	10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	19,724,580,755	100%	20,710,809,793	100%	21,746,350,282	100%	22,833,667,797	100%	23,975,351,186	100%	25,174,118,746	100%	25,174,118,746	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	05	11	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	18,287,775,000	100%	19,202,163,750	100%	6,000,000,000	100%	6,300,000,000	100%	6,615,000,000	100%	6,945,750,000	100%	6,945,750,000	
4	05	12	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	240,000,000	100%	252,000,000	100%	264,600,000	100%	277,830,000	100%	291,721,500	100%	306,307,575	100%	306,307,575	
4	05	13	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	12,965,575,000	100%	13,613,853,750	100%	14,294,546,438	100%	15,009,273,759	100%	15,759,737,447	100%	16,547,724,320	100%	16,547,724,320	
4	05	14	Program peningkatan pengemban	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem			1,459,101,878		1,532,056,972		1,608,659,820		1,689,092,812		1,773,547,452		1,862,224,825		1,862,224,825	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		akuntabilitas kinerja OPD																
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	05	15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	32,694,206,139	WTP	17,198,600,393	WTP	29,394,517,811	WTP	30,416,681,201	WTP	28,854,008,894	WTP	29,755,158,714	WTP	29,755,158,714	
				7	Persentase SILPA terhadap APBD	0%	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		
				8	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	n.a	5%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				9	Persentase belanja pendidikan (20%)	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		20%		
				10	Persentase belanja kesehatan (10%)	10%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		
				11	Perbandingan antara belanja langsung dengan tidak langsung	1.04	0.67		0.67		0.67		0.67		0.67		0.67		0.67		
				12	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	26%	30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		
				13	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
				14	Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
				15	Tertib Administrasi BMD	41%	50%		55%		60%		65%		70%		100%		100%		
				16	Rasio Pemanfaatan Aset	77.00%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		100%		
4	05	16	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	17	Cakupan evaluasi APBD kabupaten/kota	100%	100%	7,750,000,000	100%	8,137,500,000	100%	8,951,250,000	100%	9,846,375,000	100%	10,831,012,500	100%	11,914,113,750	100%	11,914,113,750	
4	06	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan**																			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3,374,855,000	100%	3,374,855,000	100%	3,720,777,638	100%	3,906,816,519	100%	4,102,157,345	100%	4,307,265,213	100%	4,307,265,213	Inspektorat Daerah
4	06	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	638,025,000	100%	701,827,500	100%	703,422,563	100%	738,593,691	100%	775,523,375	100%	814,299,544	100%	814,299,544	
4	06	03	Program peningkatan disiplin aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	94,500,000	100%	160,000,000	100%	104,186,250	100%	109,395,563	100%	114,865,341	100%	120,608,608	100%	120,608,608	
4	06	04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	310,000,000	100%	325,500,000	100%	341,775,000	100%	358,863,750	100%	376,806,938	100%	395,647,284	100%	395,647,284	
4	06	05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			330,100,000		346,605,000		363,935,250		382,132,013		401,238,613		421,300,544		421,300,544	
				5.1.	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	B	B		B		B		B		B		A		A		
				5.2.	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.3.	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.4.	Profesionalisme	70%	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)																	
				5.5.	Kualitas Renstra OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				5.6.	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	06	06	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	6	Persentase penyelesaian TLHP	100%	100%	8,321,100,000	100%	8,321,100,000	100%	8,500,000,000	100%	9,000,000,000	100%	9,500,000,000	100%	10,308,731,905	100%	10,308,731,905	
				7	Skala capaian kinerja LKjIP provinsi	Cukup	Cukup		Cukup		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		
				8	Cakupan kualitas SDM aparat pengawas yang profesional	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				9	Persentase Kabupaten dan Kota dengan Predikat EKPPD Sangat Tinggi	30.70%	50%		60%		70%		80%		90%		100%		100%		
				10	Persentase OPD dengan nilai SAKIP C	30.70%	50%		60%		70%		80%		90%		100%		100%		
				11	Persentase pecapaian RAD-PPK (Rencana aksi daerah pencegahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					pemberantasan tindak pidana korupsi)																
				12	Tingkat pelayanan OPD sesuai SPM	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	06	07	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	13	Tingkat kualitas SDM aparat pengawas yang profesional	100%	100%	1,332,520,000	100%	1,332,520,000	100%	1,469,103,300	100%	1,542,558,465	100%	1,619,686,388	100%	1,700,670,708	100%	1,700,670,708	
4	06	08	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	14	Jumlah tenaga Auditor dan P2UPD yang terlatih	100%	100%	1,661,465,000	100%	1,661,465,000	100%	1,799,977,625	100%	1,814,976,506	100%	1,855,725,332	100%	1,614,779,693	100%	1,614,779,693	
				15	Tingkat kapabilitas APIP	Level 2	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		
4	06	09	Program Peningkatan Level Maturitas SPIP Inpektorat Prov	16	Cakupan Sistem dan Prosedur Adminitrasi dan Pengawasan	100%	100%	-	100%	2,259,506,540	100%	2,372,481,867	100%	3,501,614,360	100%	4,788,254,318	100%	6,250,382,198	100%	6,250,382,198	
4	06	10	Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat	17	Persentase OPD Provinsi Papua Barat dengan pelayanan pengaduan berbasis IT	40%	100%	607,400,000	100%	607,400,000	100%	669,658,500	100%	703,141,425	100%	738,298,496	100%	775,213,421	100%	775,213,421	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	06	11	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	18	Ketersediaan Kebijakan Pengawasan Terkini	Ada	Ada	157,000,000	Ada	157,000,000	Ada	164,850,000	Ada	173,092,500	Ada	181,747,125	Ada	190,834,481	Ada	190,834,481	
Jumlah								**3,075,588,677,958**		**2,967,138,907,143**		**3,072,811,788,442**		**3,381,295,991,510**		**3,727,647,952,760**		**4,122,426,827,445**		**4,122,426,827,445**	

Foto: Billy, 2017

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjukan dari indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 ditampilkan pada Tabel 8.1 dan 8.2;

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022

No.	Indikator	Target Tahun Ke						
		Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat:	n.a	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.	Ketersediaan Perdasus sesuai mandat undang-undang otonomi khusus (%)	n.a	-	30.00	50.00	70.00	80.00	100.00
3.	Ketersediaan Perdasi sesuai mandat undang-undang otonomi khusus (%)	n.a	-	30.00	50.00	70.00	80.00	100.00
4.	Kinerja pelaksanaan program dalam regulasi terkait otonomi khusus (%)	n.a	-	50.00	60.00	60.00	90.00	100.00
5.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (kategori)	n.a	n.a	CC	CC	CC	B	B
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	B	B	A
7.	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan daerah (%)	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8.	Persentase penyelesaian TLHP (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9.	Cakupan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan (%)	80.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10.	Tingkat implementasi inovasi daerah (%)	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00
11.	Opini pengelolaan keuangan daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	Persentase tingkat pertumbuhan PAD (%)	4.96	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
13.	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah (%)	5.03	5.50	5.75	6.00	6.50	6.75	7.00
14.	Cakupan layanan publik berbasis IT (%)	n.a	10.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
15.	Persentase data OPD yang dimuat dalam database satu data (%)	n.a	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
16.	Cakupan layanan persandian daerah (%)	n.a	15.00	38.00	40.00	60.00	75.00	100.00
17.	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan (%)	5.00	7.00	10.00	10.00	15.00	20.00	20.00

No.	Indikator	Target Tahun Ke						
		Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
18.	Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah (%)	n.a	-	10.00	22.00	35.00	57.00	100.00
19.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	84.51	84.51	84.51	82.00	81.00	80.00	80.00
20.	Cakupan fasilitasi penanganan kasus kehutanan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21.	Cakupan penyepakatan batas wilayah antar kabupaten/kota (%)	n.a	22.22	22.22	16.67	11.11	11.11	11.11
22.	Cakupan penyepakatan batas wilayah Provinsi Papua Barat (%)	n.a	-	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
23.	Cakupan penyepakatan batas wilayah Hak Ulayat (%)	n.a	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
24.	Cakupan penyepakatan batas hak kelola tanah ulayat (%)	n.a	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00
25.	Cakupan penyediaan lahan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni (%)	n.a	20.00	40.00	90.00	100.00	100.00	100.00
26.	Luas tutupan hutan dalam kawasan hutan (Ha)	8,262,961.00	8,262,961.00	8,262,961.00	8,262,961.00	8,262,961.00	8,262,961.00	8,262,961.00
27.	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (Ha)	730.49	234.00	406.00	406.00	500.00	550.00	600.00
28.	Luas kawasan konservasi perairan (Ha)	350,000.00	350,000.00	710,000.00	710,000.00	923,000.00	923,000.30	1,136,000.30
29.	Pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan (%)	5.86	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
30.	Rerata Lama Sekolah (tahun)	7.06	7.50	7.70	8.00	8.30	8.50	8.50
31.	Rerata Lama Sekolah Orang Asli Papua (tahun)	-	5.00	5.15	5.20	5.30	5.50	5.75
32.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.26	12.50	12.60	12.65	12.70	12.75	13.00
33.	Harapan Lama Sekolah Orang Asli Papua (tahun)	-	10.00	10.20	10.40	10.50	10.60	10.75
34.	Angka Melek Huruf (%)	94.14	95.00	95.50	96.00	96.50	97.00	97.50

No.	Indikator	Target Tahun Ke						
		Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
35.	Angka Melek Huruf OAP (%)	n.a	95.00	95.50	96.00	96.50	97.00	97.50
36.	Persentase Guru OAP (%)	n.a	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
37.	Angka Kematian Ibu OAP (per 100.000 kelahiran hidup)	37	37	34	30	28	25	23
38.	Angka harapan hidup (tahun)	65.30	65.40	65.50	65.60	65.70	65.80	65.90
39.	Persentase balita gizi buruk (%)	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00	2.50	2.00
40.	Persentase balita gizi kurang (%)	10.00	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00
41.	Cakupan kampung siaga aktif (%)	n.a	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00
42.	Angka Kematian Bayi OAP (per 100.000 kelahiran)	28	26	24	22	20	18	16
43.	Prevalensi HIV/AIDS (%)	2.30	2.00	1.90	1.80	1.70	1.60	1.50
44.	Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, Tenaga Medis per satuan penduduk (rasio)	TK : 0,59; D : 0,21; TM : 0,38	TK : 0,76; D : 0,38; TM : 0,38	TK : 1,05; D : 0,52; TM : 0,53	TK : 1,32; D : 0,65; TM : 0,67	TK : 1,57; D : 0,77; TM : 0,80	TK : 1,81; D : 0,89; TM : 0,92	TK : 2; D : 1; TM : 1
45.	Cakupan Puskesmas terakreditasi di distrik (%)	n.a	10.00	29.00	49.00	68.00	87.00	100.00
46.	RSUD rujukan provinsi (unit)	-	-	-	1	-	-	2
47.	Jumlah atlet berprestasi Provinsi Papua Barat di tingkat nasional	n.a	-	10	20	30	40	50
48.	Jumlah pemuda OAP pelopor (orang)	n.a	20	50	70	80	90	100
49.	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang tehubung sarana transportasi (%)	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
50.	Persentase jalan provinsi dengan kualitas baik (%)	55.25	62.71	70.17	77.62	85.08	92.54	100.00
51.	Persentase jembatan provinsi dengan kualitas baik (%)	40.14	50.07	60.14	70.07	80.00	90.07	100.00
52.	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik (%)	76.00	78.00	81.00	83.00	86.00	89.00	92.00

No.	Indikator	Target Tahun Ke						
		Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
53.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi (%)	n.a	-	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
54.	Jumlah TPA Regional	1	-	-	-	1	1	1
55.	Cakupan Rumah Layak Huni bagi OAP yang tepat syarat (unit)	81	135	500	550	605	666	732
56.	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh (%)	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
57.	Cakupan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Ha)	203,11	67,28	73,76	48,37	11,50	2,20	0
58.	Cakupan rumah tangga dengan air minum layak (%)	63,00	63,00	70,00	80,00	90,00	95,00	100,00
59.	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi layak (%)	62,00	62,00	70,00	80,00	90,00	95,00	100,00
60.	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian (%)	19.49	20.00	20.35	20.50	20.75	21.00	21.50
61.	Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan (kampung)	109	250	300	300	350	350	400
62.	Persentase kampung terakses listrik (%)	44.41	51.36	58.31	65.26	72.21	79.16	86.11
63.	Tingkat fasilitasi pemanfaatan sumberdaya alam (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
64.	Tingkat elektrifikasi provinsi (%)	75.44	77.60	79.76	81.92	84.08	86.24	88.40
65.	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan (%)	n.a	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
66.	Jumlah OAP yang terlibat dalam investasi (orang)	50	50	50	50	50	50	50
67.	Tingkat partisipasi angkatan kerja OAP (%)	n.a	-	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00
68.	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	n.a	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
69.	Tingkat Kesempatan Kerja OAP (%)	-	92.50	92.75	92.90	93.00	93.25	93.50
70.	Rasio penduduk yang bekerja (%)	n.a	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00

No.	Indikator	Target Tahun Ke						
		Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
71.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	n.a	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00
72.	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	n.a	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
73.	Persentase UMKM OAP yang berkembang (%)	-	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
74.	Nilai ekspor bersih ($ US)	2,706,140,787	2,841,447,826	2,983,520,218	3,132,696,229	3,289,331,040	3,453,797,592	3,626,487,472
75.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	6.14	6.25	6.30	6.50	6.60	6.75	7.00
76.	Rasio ekspor dan impor terhadap PDB	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
77.	Jumlah OAP yang terlibat dalam usaha perdagangan (orang)	n.a	-	10	10	10	10	10
78.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	28.72	29.00	29.50	30.00	30.50	31.00	32.00
79.	Pertumbuhan jumlah IKM (%)	n.a	2	2	2	2	2	2
80.	Cakupan pengembangan kawasan transmigrasi OAP (%)	n.a	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00
81.	Jumlah wisatawan mancanegara (orang)	n.a	15,000	25,000	35,000	45,000	55,000	70,000
82.	Jumlah OAP yang terlibat dalam sektor kepariwisataaan (orang)	n.a	100	100	100	100	100	100
83.	Jumlah even skala nasional dan internasional dalam kalender tahunan Provinsi Papua Barat (kali)	4	4	5	6	7	8	9
84.	NTP (indeks)	106.65	107.72	108.79	109.88	110.98	112.09	113.21
85.	Pencapaian Skor PPH	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17
86.	Penguatan cadangan pangan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
87.	Penanganan daerah rawan pangan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
88.	Pertumbuhan PDRB tanaman pangan (%)	(1.12)	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00

No.	Indikator	Target Tahun Ke						
		Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
89.	Pertumbuhan PDRB tanaman hortikultura (%)	11.12	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
90.	Pertumbuhaan PDRB tanaman perkebunan (%)	7.33	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
91.	Pertumbuhan PDRB perikanan (%)	10.37	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
92.	Jumlah kelembagaan petani OAP yang meningkat kapasitasnya (kelompok)	50	50	50	50	50	50	50
93.	Cakupan penanganan PMKS (%)	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
94.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	n.a	20.00	18.00	16.00	14.00	12.00	11.00
95.	Jumlah kader kesejahteraan sosial OAP di masyarakat (orang)	n.a	-	100	100	100	100	100
96.	IPG (indeks)	n.a	92.20	92.35	92.40	92.50	92.65	92.75
97.	Persentase kab/kota yang telah memiliki pusat penanganan terpadu perlindungan perempuan dan anak (%)	n.a	-	20.00	30.00	50.00	60.00	75.00
98.	Jumlah ruang terbuka ramah anak (unit)	n.a	-	5	10	15	20	25
99.	Cakupan peserta KB aktif (%)	n.a	-	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00
100.	Adanya regulasi pengendalian penduduk (Ada/Tidak)	n.a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
101.	Laju pertumbuhan penduduk (%)	n.a	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
102.	Rasio ketergantungan	n.a	51.13	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
103.	Rasio Cakupan Penduduk ber KTP (%)	n.a	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
104.	Persentase kepemilikan KK (%)	n.a	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
105.	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	n.a	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00
106.	Indek potensi kerawanan sosial (indeks)	n.a	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan
107.	Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	n.a	60.00	63.00	65.00	66.00	67.00	70.00
108.	Angka kriminalitas yang tertangani (angka)	n.a	0.20	0.18	0.17	0.15	0.15	0.13

No.	Indikator	Target Tahun Ke						
		Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
109.	Kab/kota siaga dan tangguh bencana (kabupaten/kota)	n.a	-	6	8	13	13	13
110.	Indek Risiko Bencana (indeks)	n.a	150	147	143	140	135	130
111.	Kapasitas aparatur penanggulangan bencana (angka)	n.a	0.50	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1.1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**									
1.1.1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**									
1.1.1.1	Laju pertumbuhan ekonomi									
	Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas	%	4.15	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas	%	6.68	6.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
1.1.1.2	Laju inflasi	%	3.62	3.28	4.08	3.66	3.67	3.80	3.71	3.71
1.1.1.3	PDRB per kapita	Rp Juta	n.a	72.50	75.00	77.50	80.00	82.50	85.00	85.00
1.1.1.4	Rasio Gini	Rasio	0.37	0.37	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35
1.1.1.5	Indeks Williamson	Rasio	0.46	0.45	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39
1.1.1.6	Tingkat kemiskinan									
	Penduduk miskin	Jiwa	225,810	220,000	215,000	210,000	205,000	200,000	195,000	195,000
	Persentase penduduk miskin	%	25.43	25.10	24.27	23.29	22.42	21.67	20.93	20.93
1.1.1.7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	n.a	62.32	63.21	63.64	64.09	64.54	64.95	64.95
1.2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**									
1.2.1	Pendidikan									
	Angka melek huruf	%	94.14	95.00	95.50	96.00	96.50	97.00	97.50	97.50
	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7.06	7.50	7.70	8.00	8.30	8.50	8.50	8.50
	Harapan lama sekolah	%	12.26	12.50	12.60	12.65	12.70	12.75	13.00	13.00
	Angka partisipasi kasar	%	96.15	103.65	110.80	113.07	115.10	116.15	116.25	116.25
	Angka partisipasi murni	%	67.51	68.70	87.06	89.21	90.30	93.46	96.68	96.68
1.2.2	Kesehatan									
	Angka harapan hidup	Tahun	65.30	65.40	65.50	65.60	65.70	65.80	65.90	65.90
	Persentase balita gizi buruk	%	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00	2.50	2.00	2.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Persentase balita gizi kurang	%	10.00	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00	4.00
	Cakupan kampung siaga aktif	%	n.a	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	35.00
1.2.3	Ketenagakerjaan									
	Tingkat partisipasi angkatan kerja OAP	%	n.a	-	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00	79.00
	Angka partisipasi angkatan kerja	%	n.a	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	95.00
	Rasio penduduk yang bekerja	%	n.a	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	95.00
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	n.a	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00
	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	n.a	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	10.00
1.2.4	Sosial									
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	%	n.a	20.00	18.00	16.00	14.00	12.00	11.00	11.00
1.2.5	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B	B	B	B	B	B	A	A
1.2.6	Fungsi Penunjang Keuangan									
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	5.03	5.50	5.75	6.00	6.50	6.75	7.00	7.00
	Opini pengelolaan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.2.7	Pangan									
	Pencapaian Skor PPH	%	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17
	Penguatan cadangan pangan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Penanganan daerah rawan pangan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.2.8	Pertanian									
	Pertumbuhan PDRB tanaman pangan	%	(1.12)	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00
	Pertumbuhan PDRB tanaman hortikultura	%	11.12	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	Pertumbuhaan PDRB tanaman perkebunan	%	7.33	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	Pertumbuhaan PDRB tanaman peternakan	%	6.75	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
1.2.9	Kehutanan									

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan	%	5.86	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
1.2.10	Energi dan Sumber Daya Mineral									
	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian	%	19.49	20.00	20.35	20.50	20.75	21.00	21.50	21.50
1.2.11	Kelautan dan Perikanan									
	Pertumbuhan PDRB perikanan	%	10.37	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
1.2.12	Perdagangan									
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	%	6.14	6.25	6.30	6.50	6.60	6.75	7.00	7.00
1.2.13	Perindustrian									
	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	%	28.72	29.00	29.50	30.00	30.50	31.00	32.00	32.00
1.3	**Fokus Seni Budaya dan Olah Raga**									
1.3.1	Kebudayaan									
	Jumlah grup kesenian	Jumlah	n.a	13	15	20	25	30	35	35
	Jumlah gedung kesenian	Rasio	n.a	-	-	-	1	-	-	1
1.3.2	Pemuda dan Olahraga									
	Jumlah gedung olahraga	Rasio	n.a	3	4	5	6	7	8	8
2	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
2.1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**									
2.1.1	**Pendidikan**									
2.1.1.1	**Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota**	Kabupaten	n.a	-	13	13	13	13	13	13
2.1.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini	%	n.a	5.00	7.00	7.50	8.00	9.00	10.00	10.00
2.1.1.1.2	Rerata lama sekolah	Tahun	7.06	7.50	7.70	8.00	8.30	8.50	8.50	8.50
2.1.1.1.3	Rerata lama sekolah OAP	Tahun	-	5.00	5.15	5.20	5.30	5.50	5.75	5.75

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.1.1.4	Harapan lama sekolah	%	12.26	12.50	12.60	12.65	12.70	12.75	13.00	13.00
2.1.1.1.5	Harapan lama sekolah OAP	%	-	10.00	10.20	10.40	10.50	10.60	10.75	10.75
2.1.1.1.6	Angka Melek Huruf	%	94.14	95.00	95.50	96.00	96.50	97.00	97.50	97.50
2.1.1.1.7	Angka Melek Huruf OAP	Nilai	-	95.00	95.50	96.00	96.50	97.00	97.50	97.50
2.1.1.1.8	Persentase guru OAP	Nilai	-	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	55.00
2.1.1.1.9	Angka partisipasi kasar SD	Rasio	96.15	109.44	109.20	109.02	108.90	108.82	108.75	108.75
2.1.1.1.10	Angka Partisipasi Murni SD	Rasio	67.51	93.57	93.82	94.07	94.30	94.52	96.00	96.00
2.1.1.1.11	Rata-rata nilai UAN SD	%	48.59	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	75.00
2.1.1.1.12	Rata-rata nilai UAN SMP	%	68.85	70.92	73.04	75.23	77.49	79.82	82.21	82.21
2.1.1.1.13	Rasio guru/murid pendidikan dasar	Rasio	14.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
2.1.1.1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	%	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
2.1.1.1.15	Angka partisipasi sekolah SD	%	84.20	97.28	97.56	97.81	98.03	98.24	98.50	98.50
2.1.1.1.16	Angka partisipasi sekolah SMP	%	96.58	97.12	97.58	97.97	98.30	98.58	99.00	99.00
2.1.1.1.17	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	0.00	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.1.1.1.18	Angka partisipasi kasar SMP	%	n.a	92.93	93.88	94.70	95.42	96.05	97.00	97.00
2.1.1.1.19	Angka Partisipasi Murni SMP	%	n.a	70.84	72.45	73.91	75.23	76.40	77.00	77.00
2.1.1.1.20	Angka pendidikan yang ditamatkan SD	%	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00	87.00	87.00
2.1.1.1.21	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP	%	60.00	62.00	64.00	66.00	68.00	69.00	70.00	70.00
2.1.1.1.22	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	-	15.00	14.00	13.00	12.00	11.00	10.00	10.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.1.1.23	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	%	-	20.00	19.00	17.50	16.00	15.00	13.00	13.00
2.1.1.1.24	Angka Kelulusan SD/MI	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.1.1.25	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.1.1.26	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	n.a	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	75.00
2.1.1.1.27	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	%	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00
2.1.1.1.28	Sekolah SMP/MTs dan SMA/MA kondisi bangunan baik	%	20.00	22.00	25.00	27.00	30.00	32.00	35.00	35.00
2.1.1.2	**Fasilitasi Pembangunan Pendidikan Menengah**									
2.1.1.2.1	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	54.00	53.00	50.00	40.00	30.00	30.00	25.00	25.00
2.1.1.2.2	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	-	95.00	97.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.1.2.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA	%	98.00	98.00	99.00	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00
2.1.1.2.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	-	98.00	99.00	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00
2.1.1.2.5	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	-	-	-
2.1.1.2.6	Rata-rata nilai UAN SMA	Nilai	68.85	70.00	72.00	74.00	76.00	78.00	80.00	80.00
2.1.1.2.7	Angka partisipasi sekolah SMA	%	79.99	83.11	85.09	86.87	88.48	89.90	91.00	91.00
2.1.1.2.8	Persentase fasilitasi penyelenggaraan SMA/SMK berbasis asrama	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.1.2.9	Persentase kualitas penyelenggaraan SMA/SMK berbasis asrama	%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.1.2.10	Angka partisipasi Murni SMA	%	n.a	64.14	66.10	67.76	69.39	70.89	72.00	72.00
2.1.1.2.11	Angka partisipasi kasar SMA	%	n.a	92.93	93.88	94.70	95.42	96.05	97.00	97.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.1.2.12	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	n.a	0.10	0.10	0.15	0.15	0.20	0.25	0.25
2.1.1.2.13	Rasio guru/murid pendidikan menengah	Rasio	n.a	40.00	40.00	38.00	36.00	35.00	32.00	32.00
2.1.1.3	**Kualitas Tenaga Pendidik**									
2.1.1.3.1	Persentase guru yang tersertifikasi	%	n.a	50.00	60.00	70.00	75.00	80.00	85.00	85.00
2.1.1.3.2	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.1.3.3	Persentase fasilitasi penyelenggaraan SMA/SMK berbasis asrama	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.1.3.4	Persentase kualitas penyelenggaraan SMA/SMK berbasis asrama	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.1.4	*Cakupan Korbinwas Kinerja Pengelolaan Dana Otsus Bidang Pendidikan*									
2.1.1.4.1	*Angka Melek Huruf OAP*	*%*	*n.a*	*95.00*	*95.50*	*96.00*	*96.50*	*97.00*	*97.50*	*97.50*
2.1.1.4.2	*Persentase guru OAP*	*%*	*n.a*	*30.00*	*35.00*	*40.00*	*45.00*	*50.00*	*55.00*	*55.00*
2.1.1.4.3	*Harapan lama sekolah OAP*	*Tahun*	*n.a*	*15.00*	*15.00*	*15.00*	*15.00*	*18.00*	*18.00*	*18.00*
2.1.1.4.4	*Rerata lama sekolah OAP*	*Tahun*	*n.a*	*15.00*	*15.00*	*15.00*	*15.00*	*15.00*	*15.00*	*15.00*
2.1.1.4.5	*Cakupan Guru OAP di Daerah Pinggiran dan Terpencil bersertifikat (kompeten) dari seluruh Guru OAP yang memenuhi syarat*	%	*n.a.*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
2.1.1.4.6	*Gerakan Cerdas cermat OAP , SD,SMP,SMA*	*Frekwensi tiap Kab/Kota*	*n.a.*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
2.1.1.4.7	*Jumlah peserta program afirmasi pendidikan OAP (SMP, SMA, PT)*	*Siswa*	*437*	*599*	*754*	*909*	*1,014*	*1,119*	*1,224*	*5,619*
2.1.1.4.8	*Persentase peserta program afirmasi pendidikan yang bermasalah dengan lingkungan sekolah tujuan*	*%*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1.1.4.9	*Cakupan Peserta Didik OAP yang ikut dalam sekolah swasta berpola Asrama dari seluruh calon tepat syarat*	*%*	*n.a*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.1.4.10	*Cakupan Fasilitasi Sekolah Berbasis Asrama dari seluruh sekolah yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.11	*Indeks Keterpenuhan Kualitas Layanan Diksar Formal dan Non Formal di Wilayah Pinggiran dan Terpencil*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.12	*Cakupan Fasilitasi Penguatan SMK sesuai Potensi Lokal dari seluruh sekolah yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.13	*Cakupan Peserta Didik OAP Terfasilitasi pada Pendidikan Khusus dari seluruh Calon Peserta Didik yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.14	*Cakupan Peserta Didik OAP Terfasilitasi pada Pendidikan Medical Record dari seluruh Calon Peserta Didik yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.15	*Cakupan Peserta Didik OAP Terfasilitasi pada Pendidikan Gizi dari seluruh Calon Peserta Didik yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.16	*Cakupan Peserta Didik OAP Terfasilitasi pada Pendidikan Apoteker OAP di Fasilitas Kesehatan dari seluruh Calon Peserta Didik yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.17	*Cakupan Peserta Didik OAP Terfasilitasi pada Pendidikan Kesehatan Lingkungan dari seluruh Calon Peserta Didik yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.18	*Cakupan Peserta Didik OAP Terfasilitasi pada Pendidikan Perawat Mahir dari seluruh Calon Peserta Didik yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.19	*Cakupan Peserta Didik OAP Terfasilitasi pada Pendidikan Spesialis Preklinik dari seluruh Calon Peserta Didik yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.20	*Cakupan Peserta Didik OAP Terfasilitasi pada Pendidikan Analis Kesehatan di Fasilitas Kesehatan dari seluruh Calon Peserta Didik yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.21	*Cakupan Failitasi Bantuan Biaya Pendidikan SD OAP dari seluruh calon yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.22	*Cakupan Failitasi Bantuan Biaya Pendidikan SMP OAP dari seluruh calon yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.23	*Cakupan Failitasi Bantuan Biaya Pendidikan SMK OAP dari seluruh calon yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.1.4.24	*Cakupan Failitasi Bantuan Biaya Pendidikan SMA OAP dari seluruh calon yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.25	*Cakupan Failitasi Bantuan Biaya Pendidikan bagi OAP pada Perguruan Tinggi Negeri dari seluruh calon yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.26	*Cakupan Failitasi Bantuan Biaya Pendidikan bagi OAP pada Perguruan Tinggi Swasta dari seluruh calon yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.27	*Cakupan Failitasi Bantuan Biaya Pendidikan Kedinasan yang diselenggarakan Kementrian / Lembaga bagi OAP pada Perguruan Tinggi Swasta dari seluruh calon yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.28	*Cakupan Failitasi Bantuan Biaya Pendidikan Kedinasan Non Kementrian / Lembaga bagi OAP pada Perguruan Tinggi Swasta dari seluruh calon yang tepat syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.29	*Cakupan Pendidikan Guru OAP Produktif dari seluruh calon yang memenuhi syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.30	*Cakupan Pendidikan Politeknik OAP Produktif dari seluruh calon yang memenuhi syarat*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4.31	*Cakupan Tenaga Pendidik Berkulitas dari seluruh keahlian yang dibutuhkan di Daerah*	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.2	**Kesehatan**									
2.1.2.1	Persentase Kab/Kota yang Memiliki Profil Kesehatan Setiap Tahunnya	%	15.38	15.38	30.76	46.15	61.53	76.92	100.00	100.00
2.1.2.2	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	49	45	43	42	42	41	40	40
2.1.2.3	Angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran	Angka	951	955	957	958	958	959	960	960
2.1.2.4	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	Angka	28	25	22	20	20	18	15	15
2.1.2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka	200	190	180	170	160	150	150	150
2.1.2.6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak di Usia Pendidikan Dasar Kabupaten/kota	%	n.a	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Produktif di Kabupaten/kota	%	n.a	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.2.9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Kabupaten/kota	%	n.a	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.10	Persentase Kab/kota yang melaksanakan Keluarga Sehat	%	n.a	-	25.00	30.00	35.00	40.00	50.00	50.00
2.1.2.11	Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat	kabupaten	n.a	-	13	13	13	13	13	13
2.1.2.12	Persentase Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Hidup Sehat	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.13	Persentase Kemitraan Kesehatan Terhadap Lembaga Agama, Adat dan Lembaga Kemasyarakatan	%	n.a	-	25.00	30.00	35.00	40.00	50.00	50.00
2.1.2.14	Persentase Pasien Masyarakat Miskin Sakit Berat di Rujuk	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.15	Persentase Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat (KIS)	%	n.a	70.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.16	Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 25% fasilitas pelayanan kesehatan dasarnya dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar berkualitas	%	n.a	25.00	31.00	46.00	62.00	77.00	100.00	100.00
2.1.2.17	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang dilaksanakan dillingkungan kantor Gubernur Papua Barat	%	n.a	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.18	Cakupan Kab/Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	%	n.a	-	31.00	46.00	62.00	77.00	100.00	100.00
2.1.2.19	Angka kematian calon jemaah haji < 2 per 1.000 calon jemaah haji pada setiap tahun penyelenggaraan haji sampai tahun 1443H / 2022M	Angka	n.a	-	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2.1.2.20	Cakupan Puskesmas Terakreditasi di Distrik	%	n.a	10.00	29.00	49.00	68.00	87.00	100.00	100.00
2.1.2.21	Jumlah Rumah Sakit Rujukan	Rumah Sakit	n.a	-	2	3	4	4	5	5
2.1.2.22	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0.0179	-	0.0192	0.0229	0.0229	0.0244	0.0244	0.0244
2.1.2.23	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.24	Jumlah Tanaman Obat Asli Papua Yang terdata	Tanaman	n.a	-	20	40	60	80	100	100

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.2.25	Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	%	n.a	-	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.26	Cakupan Sarana dan Prasarana UTD dan BDRS Tingkat Provinsi	%	n.a	-	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.27	Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, Tenaga Medis per satuan penduduk	Rasio	TK : 0,59; D : 0,21; TM : 0,38	TK : 0,76; D : 0,38; TM : 0,38	TK : 1,05; D : 0,52; TM : 0,53	TK : 1,32; D : 0,65; TM : 0,67	TK : 1,57; D : 0,77; TM : 0,80	TK : 1,81; D : 0,89; TM : 0,92	TK : 2; D : 1; TM : 1	TK : 2; D : 1; TM : 1
2.1.2.28	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Bidan Desa Yang ditempatkan	orang	n.a	-	29	29	29	29	29	29
2.1.2.29	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Bidan Desa Yang ditempatkan	orang	n.a	-	29	29	29	29	29	29
2.1.2.30	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	%	n.a	-	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.31	Menurunnya prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 menjadi <1,5% pada tahun 2022	%	2.70	2.00	1.90	1.80	1.70	1.60	1.50	< 1.5
2.1.2.32	Pencapaian UCI desa	%	45.92	-	64.74	73.83	82.73	91.43	100.00	100.00
2.1.2.33	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Malaria	%	36.49	48.39	65.04	88.78	90.50	95.49	100.00	100.00
2.1.2.34	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.35	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	68.45	74.31	87.94	90.51	92.96	95.41	100.00	100.00
2.1.2.36	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.37	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten/kota	%	n.a	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.38	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM di Kabupaten/kota	%	n.a	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.39	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten/kota	%	n.a	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.40	Jumlah kabupaten dengan eliminasi kusta	kabupaten	n.a	-	3	5	8	11	13	13
2.1.2.41	Persentase Jumlah Orang Yang Minum Obat Filariasis	%	n.a	80.00	85.00	90.00	95.00	97.00	100.00	100.00
2.1.2.42	Persentase Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Pandu PTM	%	n.a	80.00	85.00	90.00	95.00	97.00	100.00	100.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.2.43	Cakupan Pelayanan Kesehatan ISPA Kabupaten/kota	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.44	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Frambusia	%	n.a	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.45	Cakupan Penanggulangan Diare	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.46	Kabupaten/Kota dengan minimal 1 fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan dan mengembangkan yankes indera sesuai standar	kabupaten	1	2	3	5	8	11	13	13
2.1.2.47	*Cakupan Korbinwas Kinerja Pengelolaan Dana Otsus Bidang Kesehatan*									
2.1.2.47.1	*Angka Kematian Ibu OAP*	*Absolute*	*37*	*37*	*34*	*30*	*28*	*25*	*23*	*23*
2.1.2.47.2	*Angka Harapan Hidup OAP*	*Absolute*	*62*	*63*	*64*	*65*	*66*	*67*	*23*	*23*
2.1.2.47.3	*Bumil OAP Dapat Asupan Makanan Tambahan*	*%*	*60*	*69*	*79.35*	*91.2525*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
2.1.2.47.4	*Balita OAP dapat Asupan makan Tambahan*		*60*	*69*	*79.35*	*91.2525*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
2.1.2.47.5	*Cakupan Penempatan Apoteker OAP di Fasilitas Kesehatan*	*%*	*60%*	*60*	*65%*	*70%*	*75%*	*80%*	*85%*	*100%*
2.1.2.47.6	*Angka Kematian Bayi OAP*	*Absolute*	*28*	*26*	*24*	*22*	*20*	*18*	*16*	*16*
2.1.2.47.7	*Jumlah Kasus Baru HIV Positif*	*Kasus*	*100*	*90*	*80*	*70*	*60*	*50*	*40*	*40*
2.1.2.47.8	*Penempatan Apoteker OAP di Fasilitas Kesehatan*	*%*	*25*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
2.1.2.47.9	*Jumlah RSUD Kelas C yang Terakreditasi*	*unit*	*3*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10*
2.1.2.47.10	*RSUD Rujukan provinsi*	*unit*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*2*	*3*
2.1.2.47.11	*Dokter Spesialis dari OAP*		*10*		*6*	*6*	*6*	*6*	*36*	*46*
2.1.2.47.12	*Persentase Pasien Masyarakat OAP Sakit Berat di Rujuk dari seluruh yang memenuhi persyaratan*	*%*	*n.a.*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
2.1.3.1	Persentase terhubungnya antar wilayah kabupaten/kota	%	42.15	62.99	66.21	74.66	83.10	91.54	100.00	100.00
2.1.3.2	Panjang jalan provinsi yang dibangun	km	1,399.87	55.00	74.50	195.00	195.00	195.00	195.40	909.90
2.1.3.3	Panjang jalan lingkungan kampung yang terbangun	km	8.81	9.70	1.06	11.73	12.90	14.19	15.61	65.19
2.1.3.4	Panjang jalan poros kampung yang terbangun	km	26.60	29.26	32.19	35.40	38.94	42.84	47.12	225.76
2.1.3.5	Persentase panjang jalan provinsi yang ditingkatnya kualitasnya	%	66.01	66.97	71.16	78.34	85.53	92.72	100.00	100.00
2.1.3.6	Persentase jalan yang dipelihara	%	73.39	73.39	75.97	79.20	83.03	91.51	100.00	100.00
2.1.3.7	Persentase kasus pelanggaran tata ruang yang dilaporkan dan ditangani	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.3.8	Jumlah Kebijakan tata ruang yang telah disusun	Kebijakan	1	1	2	2	2	2	2	11
2.1.3.9	Cakupan kabupaten yang sudah menyusun RDTR	%	n.a	-	50.00	60.00	70.00	80.00	100.00	100.00
2.1.3.10	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi	%	n.a	-	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2.1.3.11	Persentase kesesuaian rencana pembangunan (pola dan struktur ruang) dengan RTRW Provinsi	%	n.a	-	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2.1.3.12	Persentase jalan provinsi dengan kualitas baik	%	55.25	62.71	70.17	77.62	85.08	92.54	100.00	100.00
2.1.3.13	Panjang jembatan yang dibangun	m	590.00	736.00	887.00	1,030.00	1,176.00	1,324.00	1,470.00	6,623.00
2.1.3.14	Persentase jembatan provinsi dengan kualitas baik	%	40.14	50.07	60.14	70.07	80.00	90.07	100.00	100.00
2.1.3.15	Panjang saluran irigasi provinsi yang dibangun	km	0.16	5.00	5.20	5.50	5.80	6.00	6.20	33.70
2.1.3.16	Persentase panjang saluran irigasi provinsi yang direhabilitasi	%	n.a	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.3.17	Panjang saluran irigasi provinsi yang ditingkatkan	km	0.03	3.00	3.50	3.50	4.00	4.50	5.50	24.00
2.1.3.18	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	%	76.00	78.00	81.00	83.00	86.00	89.00	92.00	92.00
2.1.3.19	Persentase beton/ bronjong /pasangan batu penahan abrasi yang dibangun	%	30.00	34.00	38.00	42.00	46.00	50.00	55.00	55.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.3.20	Panjang sungai yang dinormalisasi	km	2.00	30.00	30.00	35.00	40.00	40.00	45.00	220.00
2.1.3.21	Jumlah distrik yang mendapatkan bantuan air bersih	Distrik	63	65	67	70	80	90	100	472
2.1.3.22	Jumlah TPA Regional	TPA	1	-	-	-	1	1	1	3
2.1.3.23	Jumlah TPA bantuan provinsi yang dibangun	TPA	3	2	2	2	2	1	1	10
2.1.3.24	Panjang drainase yang terbangun di tingkat provinsi	km	25	10	10	10	10	10	10	60
2.1.3.25	Rasio panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat provinsi	%	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00
2.1.3.26	*Cakupan Keikutsertaan OAP Berdasarkan Skill dalam Pembangunan Infrastruktur*	*%*	*n.a*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
2.1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**									
2.1.4.1	*Cakupan Rumah Layak Huni bagi OAP yang tepat syarat*	*Unit*	*81*	*135*	*500*	*550*	*605*	*666*	*732*	*3.188*
2.1.4.2	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	%	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
2.1.4.3	Cakupan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh	Ha	203,11	67,28	73,76	48,37	11,50	2,20	0	0
2.1.4.4	*Cakupan rumah tangga dengan sanitasi layak*	*%*	62,00	62,00	70,00	80,00	90,00	95,00	100,00	100,00
2.1.4.5	*Persentase Rumah Layak Huni*	*%*	*20.48*	*22.50*	*24.68*	*27.11*	*29.86*	*32.86*	*36.10*	*36.10*
2.1.4.6	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	17.49	17.33	17.20	16.79	16.53	16.26	15.99	15.99
2.1.4.7	*Cakupan penduduk berakses air minum layak*	*%*	63,00	63,00	70,00	80,00	90,00	95,00	100,00	100,00
2.1.4.8	Persentase Pembangunan Drainase perkotaan	%	20.48	22.50	24.68	27.11	29.86	32.86	36.10	36.10
2.1.4.9	*Persentase pembangunan rumah bagi OAP*	*%*	*20.48*	*22.50*	*24.68*	*27.11*	*29.86*	*32.86*	*36.10*	*36.10*
2.1.4.10	Jumlah Rusun yang dibangun	Unit	2	1	5	5	5	5	5	26
2.1.4.11	Jumlah Kebijakan Perumahan yang disusun	Kebijakan	1	2	2	2	2	2	2	12
2.1.4.12	Cakupan Pembangunan Perumahan Swadaya	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.4.13	Cakupan Pembangunan Perumahan Tradisional	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.4.14	Cakupan Pembinaan Pemanfaatan Lahan dan Pengendalian Ruang	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.4.15	Cakupan Pengembangan Rumah Umum dan Komersil	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**									
2.1.5.1	Kab/kota siaga dan tangguh bencana	kabupaten	n.a	-	6	8	13	13	13	13
2.1.5.2	Indek Risiko Bencana	Skor	n.a	150	147	143	140	135	130	130
2.1.5.3	Kapasitas aparatur penanggulangan bencana	Skor	n.a	0.50	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60	0.60
2.1.5.4	Cakupan Forum PRB tingkat kabupaten	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5.5	Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5.6	Tingkat penanganan bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5.7	Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5.8	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat pasca bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5.9	Persentase ASN siaga dan tangguh bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5.10	Cakupan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5.11	Cakupan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5.12	Persentase Forum Pembinaan Kebangsaan (FPK) kabupaten	%	23.08	30.77	53.80	76.90	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5.13	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan bagi remaja	Orang	60	90	120	150	150	150	150	810
2.1.5.14	Tingkat fasilitasi dan tertib administrasi partai politik	%	n.a	50.00	70.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5.15	Cakupan fasilitasi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	%	45.00	56.00	70.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5.16	Cakupan pengawasan orang asing dan lembaga asing kabupaten	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.5.17	Cakupan fasilitasi pembinaan FKUB	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5.18	Persentase rekomendasi FKDM yang ditindaklanjuti pihak terkait	%	8.33	8.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5.19	Tingkat fasilitasi Forkopimda	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5.20	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Provinsi	%	12.22	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5.21	Cakupan pembinaan pencegahan tindak kriminal bagi remaja	Orang	n.a	100	650	700	750	800	850	3,850
2.1.5.22	Indeks potensi kerawanan sosial	Indeks	n.a	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan
2.1.5.23	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	n.a	60.00	63.00	65.00	66.00	67.00	70.00	70.00
2.1.5.24	Cakupan peserta yang memahami politik dalam pembangunan daerah	Orang	66	80	100	125	150	175	200	896
2.1.5.25	Angka kriminalitas	Rasio	n.a	0.20	0.18	0.17	0.15	0.15	0.13	0.13
2.1.5.26	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Rasio	n.a	1	1	1	1	2	2	2
2.1.5.27	Tingkat efektivitas penegakan PERDA	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5.28	Cakupan patroli petugas Satpol PP	per hari	n.a	3	3	3	3	3	3	3
2.1.5.29	Cakupan penanganan penyakit masyarakat	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.5.30	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	Rasio	n.a	60	60	60	60	60	60	60
2.1.5.31	Rasio siskamling per jumlah kampung di wilayah prioritas	Rasio	n.a	70	70	70	70	70	70	70
2.1.5.32	Cakupan ketersediaan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada objek strategis pemerintahan	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.6	**Sosial**									

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.6.1	Cakupan Pemenuhan Indeks Kab/Kota Berketahanan Sosial	kabupaten	n.a	-	-	13	13	13	13	13
2.1.6.2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	n.a	-	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
2.1.6.3	Persentase PMKS yang tertangani	%	n.a	-	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	50.00
2.1.6.4	*Cakupan Penanganan PMKS dari Kelompok OAP dari seluruh poksar yang memenuhi syarat Pembinaannya*	*%*	*n.a*	-	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
2.1.6.5	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya		n.a	-	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	50.00
2.1.6.6	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	n.a	-	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	50.00
2.1.6.7	Tingkat fasilitasi pembangunan KAT	%	n.a	5	10	15	20	25	30	30
2.1.6.8	Pembangunan panti	Unit	n.a	-	-	-	1	1	1	3
2.1.6.9	Jumlah Lembaga KESOS yang Aktif	Lembaga	n.a	2	4	5	6	8	10	10
2.1.6.10	Persentase izin pengumpulan dana yang terbit dari permohonan tepat syarat	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.6.11	Cakupan pemulihan trauma bencana alam dan sosial tepat syarat	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.6.12	Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	Ada	n.a	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2.1.6.13	Cakupan fasilitasi sarana prasarana keagamaan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**									
2.2.1	**Tenaga Kerja**									
2.2.1.1	Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi	%	n.a	-	30.00	40.00	50.00	55.00	60.00	60.00
2.2.1.2	Pembangunan balai latihan kerja provinsi	unit	1	-	-	-	-	1	-	2
2.2.1.3	*Tingkat partisipasi angkatan kerja OAP*	*%*	*n.a*	-	*75.00*	*76.00*	*77.00*	*78.00*	*79.00*	*79.00*
2.2.1.4	*Jumlah tenaga kerja OAP yang ditempatkan*	*orang*	*23,128*	*22,484*	*23,159*	*23,853*	*24,569*	*25,306*	*26,065*	*26,065*
2.2.1.5	*Cakupan Jumlah Naker OAP Kompeten dan berwirausaha dari seluruh yang memenuhi syarat*	*%*	*n.a*	*n.a.*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.2.1.6	Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan	orang	57,820	56,210	57,896	59,633	61,422	63,265	65,163	65,163
2.2.1.7	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	70.05	70.55	71.05	71.55	72.05	72.55	73.05	73.05
2.2.1.8	Pencari kerja yang ditempatkan	%	92.54	93.38	94.19	94.95	95.63	96.29	96.91	96.91
2.2.1.9	Tingkat pengangguran terbuka	%	7.46	6.62	5.81	5.05	4.37	3.71	3.09	3.09
2.2.1.10	Fasilitasi Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	30	30.00	34.50	39.68	45.63	52.47	60.34	60.34
2.2.1.11	Fasilitasi Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	56.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.1.12	Penetapan UMR	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.1.13	Persentase pekerja yang mendapatkan peletihan berbasis kompetensi	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.1.14	Angka sengketa perusahaan-pekerja per tahun	%	n.a	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.2.1.15	Persentase kasus yang diselesaikan bersama dengan perjanjian bersama	%	n.a	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2.2.1.16	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	%	n.a	60.00	60.00	70.00	70.00	75.00	75.00	75.00
2.2.1.17	Persentase pekerja yang mendapatkan peletihan berbasis kewirausahaan	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**									
2.2.2.1	IPG	Angka	n.a	92.20	92.35	92.40	92.50	92.65	92.75	92.75
2.2.2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif Papua Barat	%	n.a	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
2.2.2.3	Persentase kab/kota yang telah memiliki pusat penanganan terpadu perlindungan perempuan dan anak	%	n.a	-	20.00	30.00	50.00	60.00	75.00	75.00
2.2.2.4	Jumlah ruang terbuka ramah anak	unit	n.a	-	5	10	15	20	25	25
2.2.2.5	Cakupan kabupaten/kota responsif gender dan perlindungan anak	%	n.a	-	20.00	30.00	50.00	60.00	75.00	75.00
2.2.2.6	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	n.a	-	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.2.2.7	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	n.a	-	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.2.2.8	Rasio KDRT	%	n.a	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.2.2.9	*Partisipasi angkatan kerja perempuan OAP*	*%*	*n.a*	*-*	*75.00*	*76.00*	*77.00*	*78.00*	*79.00*	*79.00*
2.2.2.10	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	n.a	-	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2.2.2.11	Persentase perlindungan tenaga kerja anak	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.2.12	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.2.13	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SD	Rasio	n.a	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.2.2.14	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMP	Rasio	n.a	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.2.2.15	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMA	Rasio	n.a	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.2.2.16	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan PT	Rasio	n.a	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.2.2.17	Rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada usia 15-24 tahun	Rasio	n.a	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.2.3	**Pangan**									
2.2.3.1	*Kabupaten/kota berketahanan pangan*	*%*	*-*	*30.00*	*40.00*	*50.00*	*60.00*	*70.00*	*80.00*	*80.00*
2.2.3.2	*Cakupan Ketersediaan Pangan:*									
	- Ketersediaan energi	*Kkal*	*2,794*	*2,794*	*2,794*	*2,794*	*2,794*	*2,794*	*2,794*	*2,794*
	- Ketersediaan protein	*Gram*	*88.20*	*88.20*	*88.20*	*88.20*	*88.20*	*88.20*	*88.20*	*88.20*
	- PPH Ketersediaan	*%*	*82.17*	*82.17*	*82.17*	*82.17*	*82.17*	*82.17*	*82.17*	*82.17*
2.2.3.3	Ketersediaan Data Harga Pangan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.3.4	Cakupan Kebutuhan Konsumsi Pangan:									
	- Konsumsi Energi	Kkal	1,941.40	1,976.17	2,010.93	2,045.70	2,080.47	2,115.23	2,150.00	2,150.00
	- Konsumsi Protein	Gram	59.90	59.05	58.64	58.23	57.82	57.41	57.00	57.00
	- PPH Konsumsi	%	89.56	91.30	93.04	94.78	96.52	98.26	100.00	100.00
2.2.3.5	Cakupan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan:									

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	- Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar (PSAT) yang di Sertifikasi	Unit	n.a	20	25	25	25	25	25	145
	- Jumlah Produk Pangan Segar dan Olahan Primer Yang di Registrasi	Produk	n.a	20	25	25	25	25	25	145
	- Pengawasan Keamanan Pangan	Lokasi	10	20	20	20	20	20	20	120
2.2.3.6	*Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras*	*%*	*19.43*	*19.73*	*19.79*	*19.86*	*19.92*	*19.98*	*20.04*	*20.04*
2.2.3.7	Terbentuknya lembaga cadangan pangan provinsi (Bulogda)	Lembaga	n.a	-	-	1	-	-	-	1
2.2.3.8	Persentase Daerah Rentan Pangan	%	31.76	30.76	29.76	28.76	27.76	26.76	25.75	25.75
2.2.3.9	Dokumen terkait kebijakan pangan daerah	Dokumen	n.a	-	2	1	1	1	1	6
2.2.4	**Pertanahan**									
2.2.4.1	Cakupan penyediaan lahan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni	%	n.a	20.00	40.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.4.2	Penyelesaian izin lokasi	%	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.4.3	Persentase pengadaan tanah yang diselesaikan	%	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.2.4.4	*Cakupan Korbinwas Kinerja Pengelolaan Dana Otsus Bidang Pertanahan*									
2.2.4.4.1	*Persentase konflik tanah yang diselesaikan*	*%*	*48.00*	*48.00*	*6.00*	*6.00*	*6.00*	*6.00*	*6.00*	*78.00*
2.2.4.4.2	*Cakupan penyepakatan batas hak kelola tanah ulayat*	*%*	*-*	*10.00*	*15.00*	*20.00*	*25.00*	*30.00*	*35.00*	*35.00*
2.2.4.4.3	*Pemetaan tanah adat di Provinsi Papua Barat*	*%*	*-*	*-*	*20.00*	*40.00*	*60.00*	*80.00*	*100.00*	*100.00*
2.2.4.4.4	*Persentase tanah ulayat yang bersertifikat*	*%*	*14.29*	*14.29*	*8.57*	*14.29*	*14.29*	*5.71*	*5.71*	*62.86*
2.2.5	**Lingkungan Hidup**									
2.2.5.1	Indeks lingkungan hidup	Rasio	84.51	84.51	84.51	82.00	81.00	80.00	80.00	80.00
2.2.5.2	Rasio sungai yang dipantau baku mutunya	%	16.00	18.00	27.00	45.00	63.00	81.00	100.00	100.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.2.5.3	Rasio udara yang dipantau	%	23.00	23.00	38.00	46.00	46.00	84.00	100.00	100.00
2.2.5.4	Rasio tempat pembuangan sampah sementara	%	10.00	10.00	25.00	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00
2.2.5.5	Persentase penanganan sampah	%	10.00	10.00	25.00	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00
2.2.5.6	Cakupan penghijauan di wilayah sumber air	%	n.a	-	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00
2.2.5.7	Persentase penanganan kasus lingkungan hidup	%	n.a	-	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00
2.2.5.8	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya kegiatan perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	%	n.a	-	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00
2.2.5.9	Jumlah pengamatan dan pengukuran tingkat kerusakan LH	%	16.00	16.00	33.00	50.00	66.00	83.00	100.00	100.00
2.2.5.10	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL	%	10.00	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00
2.2.5.11	Persentase SDM yang mengikuti pelatihan AMDAL	%	20.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00	100.00
2.2.5.12	Cakupan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	n.a	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.5.13	Cakupan Pengembangan SDM Bidang LH	n.a	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.5.1.4	Cakupan pengelolaan TPA milik Provinsi yang optimal	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
2.2.6.1	Kab/Kota tertib administrasi Kependudukan	Kabupaten	n.a	-	3	6	9	12	13	13
2.2.6.2	Rasio Cakupan Penduduk ber KTP	%	n.a	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00
2.2.6.3	Persentase kepemilikan KK	%	n.a	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00
2.2.6.4	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran	%	n.a	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.6.5	Rasio pasangan berakte nikah	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.6.6	Fasilitasi Pengendalian Jumlah Penduduk	%	n.a	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.6.7	Dokumen profil kependudukan provinsi	Ada/Tidak	n.a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.6.8	Cakupan Pelaksanaan Peraturan Bidang Kependudukan	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.6.9	Tersedianya pelaporan dan data kependudukan	Ada/Tidak	n.a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.2.6.10	Cakupan ketersediaan Peraturan tentang pendaftaran orang asli papua dan Sosialisasinya	Ada/Tidak	n.a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.6.11	Cakupan Pembinaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
2.2.7.1	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok	n.a	-	200	200	200	200	200	1,000
2.2.7.2	Cakupan pembinaan kelompok PKK	kelompok	n.a	-	120	120	120	120	120	600
2.2.7.3	Persentase PKK aktif	%	n.a	-	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	60.00
2.2.7.4	Persentase Posyandu aktif	%	n.a	-	30.00	40.00	50.00	60.00	75.00	75.00
2.2.7.5	Persentase LSM aktif	%	n.a	-	30.00	40.00	50.00	60.00	75.00	75.00
2.2.7.6	Persentase LPM berprestasi	%	n.a	-	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	25.00
2.2.7.7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	n.a	-	120	120	120	120	120	600
2.2.7.8	Fasilitasi kampung mandiri/membangun	kampung	850	-	200	200	200	200	200	1,000
2.2.7.9	Cakupan pembinaan aparatur pemerintahan kampung	%	n.a	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	40.00	40.00
2.2.7.10	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kampung yang baik	%	n.a	-	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	30.00
2.2.7.11	Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan masyarakat	%	n.a	-	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2.2.7.12	*Cakupan Korbinwas Gerakan Kampung / Desa Membangun*	*%*	*n.a*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
2.2.7.12.1	*Jumlah kelompok usaha OAP yang dibina*	*kelompok*	*n.a*	*-*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*500*
2.2.7.12.2	*Cakupan Pencapaian Indeks Kampung (Desa) Membangun pada Lokasi Pilot Project*	*%*	*n.a.*	*-*	*60%*	*70%*	*80%*	*90%*	*95%*	*100%*
2.2.7.12.3	*Jumlah kader kesejahteraan sosial OAP di masyarakat*	*orang*	*n.a*	*-*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*500*
2.2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.2.8.1	Adanya regulasi pengendalian penduduk	Ada/Tidak	n.a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.8.2	Laju pertumbuhan penduduk	%	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
2.2.8.3	Cakupan peserta KB aktif	%	n.a	-	30.00	32.00	34.00	35.00	37.00	37.00
2.2.8.4	Persentase kampung KB yang difasilitasi	%	n.a	-	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00
2.2.8.5	Total Fertility Rate	Angka	n.a	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2.2.8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data parameter dan proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	n.a	-	5	6	7	8	10	10
2.2.8.7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	n.a	2	2	2	2	2	2	2
2.2.8.8	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	%	n.a	5.00	6.00	7.00	9.00	10.00	15.00	15.00
2.2.9	**Perhubungan**									
2.2.9.1	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang tehubung sarana transportasi	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.9.2	Jumlah arus penumpang angkutan udara	Penumpang	n.a	1,500,000	1,605,000	1,717,350	1,837,565	1,966,194	2,103,828	2,251,096
2.2.9.3	Jumlah arus penumpang angkatan laut	Penumpang	466,522	471,187	518,306	570,137	627,150	689,865	758,852	4,102,019
2.2.9.4	Cakupan pemasangan rambu-rambu di ruas jalan provinsi	%	10.00	11.00	12.00	13.00	15.00	16.00	17.00	17.00
2.2.9.5	Cakupan jumlah pelabuhan laut	%	70.31	71.88	73.44	75.00	76.56	78.13	79.69	79.69
2.2.9.6	Cakupan jumlah bandara	%	71.43	71.43	71.43	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71
2.2.9.7	Cakupan jumlah penerbangan perintis	%	166.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00
2.2.9.8	Cakupan jumlah pelayaran perintis	%	76.38	77.17	77.95	78.74	79.53	80.31	81.10	81.10
2.2.9.9	Cakupan fasilitasi program pembangunan rel KA Trans Papua	%	n.a	10.00	30.00	40.00	50.00	60.00	75.00	75.00
2.2.9.10	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	n.a	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	45.00
2.2.9.11	Jumlah barang yang melalui dermaga pelabuhan	ton	n.a	3,000,000	3,300,000	3,630,000	3,993,000	4,392,300	4,831,530	4,831,530

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.2.9.12	Jumlah orang yang melalui terminal	n.a	10.000	10.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000
2.2.9.13	Jumlah barang yang terangkut transportasi udara	Kg	n.a	17,000,000	17,300,000	17,500,000	17,750,000	18,000,000	18,500,000	18,500,000
2.2.9.14	Cakupan Peningkatan Keselamatan LLAJ	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.10	**Komunikasi dan Informatika**									
2.2.10.1	Cakupan layanan publik berbasis IT (%)	%	n.a	10.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	70.00
2.2.10.2	Cakupan pelaksanaan e Government di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat	%	13.00	25.00	50.00	75.00	90.00	100.00	100.00	100.00
2.2.10.3	Jumlah pengunjung website papuabaratprov.go.id	Pengunjung	n.a	1,500	2,500	3,000	3,500	4,000	5,000	5,000
2.2.10.4	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	Media	n.a	1	2	2	2	3	3	13
2.2.10.5	Cakupan Fasilitas Smart City yang dapat mengakses internet	Distrik	n.a	1	1	1	1	1	1	6
2.2.10.6	Fasilitasi pembangunan BTS	Unit	n.a	5	5	5	5	10	10	40
2.2.10.7	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	n.a	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	80.00
2.2.10.8	Persentase penduduk yang mengakses internet	%	n.a	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	50.00	50.00
2.2.10.9	Cakupan layanan telekomunikasi	%	n.a	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	80.00
2.2.10.10	Cakupan fasilitasi Komisi Informasi Papua Barat	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.10.11	Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.10.12	Persentase OPD yang menyelenggarakan SOP Komunikasi dan Informasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.10.13	*Cakupan Fasilitas Smart City yang dapat mengakses internet*	*Distrik*	-	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*6*

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.2.11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**									
2.2.11.1	*Persentase UMKM OAP yang berkembang*	%	-	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	60.00
2.2.11.2	*Persentase produk-produk unggulan Orang Asli Papua (OAP) di galeri UMKM*	%	71.00	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	80.00
2.2.11.3	Jumlah UMKM	Unit	1,452	1,562	1,672	1,772	1,872	1,975	2,010	2,010
2.2.11.4	Persentase koperasi aktif	%	88.00	89.00	90.00	90.00	91.00	92.00	93.00	93.00
2.2.11.5	Jumlah pameran/promosi yang diselenggarakan	Kali	2	3	3	4	4	4	5	23
2.2.11.6	Jumlah koperasi berprestasi tingkat nasional	Unit	n.a	2	7	15	25	35	40	40
2.2.11.7	Persentase infrastruktur/sarana ekonomi yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.12	**Penanaman Modal**									
2.2.12.1	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	%	n.a	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2.2.12.2	*Jumlah OAP yang terlibat dalam investasi*	*Orang*	50	50	50	50	50	50	50	300
2.2.12.3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Investor	36	39	42	45	48	50	57	281
2.2.12.4	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	Investor	156	160	164	168	172	178	189	1,031
2.2.12.5	Persentase UMKMK yang bermitra dengan PMA/ PMDN	%	5.50	5.50	6.60	7.20	7.70	8.80	11.10	11.10
2.2.12.6	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Rp miliar	48.15	48.20	48.22	48.24	48.30	48.31	48.32	289.59
2.2.12.7	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) - triliun rupiah	Rp triliun	7.28	7.29	7.32	7.33	7.35	7.36	7.38	44.03
2.2.12.8	Jumlah dokumen regulasi pada sektor penanaman modal	Dokumen	4	-	1	1	1	1	1	5
2.2.12.9	Persentase pelaku usaha yang taat dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan UU (PMDN)	%	19.00	25.00	27.00	1.00	35.00	0.40	47.00	47.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.2.12.10	Persentase pelaku usaha yang taat dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan UU (PMA)	%	80.00	82.00	84.00	86.00	89.00	93.00	95.00	95.00
2.2.12.11	Jumlah perijinan dan non perijinan investasi	Dokumen	201	1,100	1,150	1,200	1,250	1,270	1,285	7,255
2.2.12.12	Persentase Keikutsertaan Pameran Dalam Negeri	%	6.58	-	11.11	12.00	11.82	11.67	11.54	11.54
2.2.12.13	Persentase Keikutsertaan Pameran Luar Negeri	%	40.00	-	28.57	33.33	33.33	40.00	45.45	45.45
2.2.12.14	Cakupan Kinerja Peningkatan Daya Saing Investasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.12.15	Cakupan Kinerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**									
2.2.13.1	*Jumlah pemuda OAP pelopor*	*Orang*	*n.a*	*20*	*50*	*70*	*80*	*90*	*100*	*410*
2.2.13.2	Jumlah organisasi pemuda	OKP	n.a	127	127	127	127	127	127	762
2.2.13.3	Jumlah kreativitas pemuda	Jumlah	n.a	260	260	260	260	260	260	1,560
2.2.13.4	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	n.a	23	23	23	23	23	23	138
2.2.13.5	Jumlah kualitas aktivitas kepemudaan dalam budaya	Aktivitas	n.a	10	10	10	10	10	10	60
2.2.13.6	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	n.a	35	35	35	35	35	35	35
2.2.13.7	Jumlah klub olahraga di Provinsi Papua Barat	Klub	n.a	208	208	208	208	208	208	208
2.2.13.8	Jumlah kegiatan olahraga tingkat provinsi	Kegiatan	n.a	45	45	45	45	45	45	270
2.2.13.9	Kejuaraan klub cabang olahraga tingkat provinsi	cabang olahraga	n.a	20	20	20	20	20	20	20
2.2.13.10	Cakupan ketersediaan lapangan olahraga	Lapangan	n.a	281	281	281	281	281	281	281
2.2.13.11	Gedung Cabang Olahraga	Gedung	n.a	10	10	10	10	10	10	10

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.2.13.12	Lintasan Cabang atletik	Lintasan	n.a	-	-	-	-	-	1	1
2.2.13.13	Stadion olahraga	Stadion	n.a	4	4	4	4	4	4	4
2.2.13.14	Gelanggang olahraga multiguna	Gedung	n.a	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13.15	Jumlah atlet berprestasi Provinsi Papua Barat di tingkat nasional	Orang	n.a	-	10	20	30	40	50	50
2.2.13.16	Persentase Rekomendasi Bidang Pora yang dindaklanjuti oleh K/K	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.13.17	Jumlah olahraga tradisional tingkat provinsi	cabang olahraga	n.a	6	6	6	6	6	6	6
2.2.13.18	Cakupan Kinerja Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.13.19	Cakupan Kinerja Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.13.20	Cakupan Pengembangan Kinerja Kebijakan dan Manajeman Olahraga	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.14	**Statistik**									
2.2.14.1	Persentase ketersediaan data indikator makro daerah tahunan di tingkat kabupaten/kota	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.14.2	Ketersediaan Buku Provinsi Dalam Angka	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.3	Ketersediaan Buku PDRB Provinsi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.4	Ketersediaan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.5	Ketersediaan Buku Indeks Pembangunan Manusia	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.6	Ketersediaan Buku Statistik Daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.7	*Persentase data OPD yang dimuat dalam database satu data*	*%*	*n.a*	-	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*
2.2.14.8	Ketersediaan data kinerja sektoral	%	n.a	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.2.15	**Persandian**									
2.2.15.1	Cakupan layanan persandian daerah (%)	%	n.a	15.00	38.00	40.00	60.00	75.00	100.00	100.00
2.2.16	**Kebudayaan**									
2.2.16.1	Jumlah even skala nasional dan internasional dalam kalender tahunan Provinsi Papua Barat	Kali	4	4	5	6	7	8	9	39
2.2.16.2	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	20.00	-	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
2.2.16.3	Jumlah keanekaragaman budaya yang dilestarikan/diakui secara nasional maupun internasional	Jumlah	6	5	5	5	5	5	5	30
2.2.16.4	Jumlah sanggar yang ikut serta dalam festival budaya	Sanggar	40	45	50	55	60	65	70	70
2.2.16.5	Jumlah gedung kesenian dan taman budaya	Gedung	-	-	-	1	1	-	-	2
2.2.17	**Perpustakaan**									
2.2.17.1	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan	%	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00
2.2.17.2	Persentase kenaikan minat baca masyarakat per tahun	%	n.a	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.2.17.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	44,671	50,000	50,000	50,000	55,000	55,000	55,000	55,000
2.2.17.4	Persentase penduduk membaca selain buku pelajaran	%	n.a	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	30.00
2.2.18	**Kearsipan**									
2.2.18.1	Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah	%	n.a	-	10.00	22.00	35.00	57.00	100.00	100.00
2.2.18.2	Pengelolaan arsip secara baku di tingkat OPD	%	n.a	-	10.00	22.00	35.00	57.00	100.00	100.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.2.18.3	Peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan	%	n.a	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.18.4	Persentase arsip daerah yang telah terdigitalisasi	%	n.a	-	5.00	7.00	10.00	20.00	25.00	25.00
2.3	**Urusan Pilihan**									
2.3.1	**Kelautan dan Perikanan**									
2.3.1.1	*Nilai tukar nelayan*	*Rasio*	*98.21*	*101.86*	*105.51*	*107.09*	*108.68*	*110.26*	*111.84*	*111.84*
2.3.1.2	*Nilai tukar pembudidaya ikan*	*Rasio*	*91.18*	*93.00*	*93.00*	*94.40*	*95.79*	*97.19*	*99.01*	*99.01*
2.3.1.3	Pertumbuhan PDRB perikanan	%	10.37	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
2.3.1.4	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.5	*Produksi perikanan tangkap*	*ton*	*151,585.00*	*184,640.00*	*186,486.40*	*188,332.80*	*190,179.20*	*192,025.60*	*193,872.00*	*193,872.00*
2.3.1.6	*Produksi perikanan budidaya*	*ton*	*52,842.61*	*71,282.00*	*89,721.39*	*90,798.05*	*91,874.70*	*92,951.36*	*94,028.02*	*94,028.02*
2.3.1.7	Nilai ekspor produk perikanan	$ US	22,769,455.00	29,374,665.00	35,979,875.00	36,699,472.50	37,419,070.00	38,138,667.50	38,858,265.00	38,858,265.00
2.3.1.8	Konsumsi ikan	kg/kapita/orang	50.35	52.78	55.21	56.31	57.42	58.52	59.63	59.63
2.3.1.9	Cakupan pengawasan sumberdaya perikanan kewenangan provinsi	%	3.30	3.70	3.70	3.81	3.92	4.03	4.14	4.14
2.3.1.10	*Cakupan OAP pelaku usaha perikanan tangkap yang dibina*	*orang*	*n.a*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*550*
2.3.1.11	*Cakupan OAP pelaku usaha perikanan budidaya yang dibina*	*orang*	*n.a*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*550*
2.3.1.12	Luas kawasan konservasi perairan	Ha	350,000.00	350,000.00	710,000.00	710,000.00	923,000.00	923,000.30	1,136,000.30	1,136,000.30
2.3.1.13	Jumlah sentra produksi perikanan yang dikembangkan	kawasan	2	2	2	2	2	2	2	12
2.3.2	**Pariwisata**									
2.3.2.1	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	n.a	15,000	25,000	35,000	45,000	55,000	70,000	70,000

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.3.2.2	*Jumlah OAP yang terlibat dalam sektor kepariwisataaan*	*Orang*	-	100	100	100	100	100	100	600
2.3.2.3	Kunjungan wisatawan	Orang	99,382	102,105	104,923	107,808	110,773	113,899	116,949	116,949
2.3.2.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0.62	1.00	1.40	1.80	2.20	2.60	3.00	3.00
2.3.2.5	*Jumlah pengembangan destinasi wisata baru (yang ada dikembangkan/destinasi baru)*	*Destinasi*	3	4	5	6	7	7	7	7
2.3.2.6	*Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang difasilitasi pemerintah daerah*	*Unit*	9	10	11	12	13	13	13	13
2.3.3	**Pertanian**									
2.3.3.1	Produksi tanaman pangan:									
	- Jagung	*Ton*	1,907.00	213.00	2,805.00	3,402.00	4,126.00	5,004.00	6,069.00	6,069.00
	- Kacang Tanah	*Ton*	703.00	705.00	707.00	709.00	711.00	713.00	715.00	715.00
	- Ubi Kayu	*Ton*	9,697.00	11,661.00	14,023.00	16,863.00	20,278.00	24,385.00	29,324.00	29,324.00
	- Ubi Jalar	*Ton*	12,440.00	16,098.00	20,832.00	26,958.00	34,885.00	45,143.00	58,417.00	58,417.00
	- Bayam	*Ton*	1,053.40	1,063.93	1,074.57	1,085.32	1,096.17	1,107.13	1,118.21	1,118.21
	- Kacang panjang	*Ton*	1,936.80	1,956.17	1,975.73	1,995.49	2,015.44	2,035.60	2,055.95	2,055.95
	- Tomat	*Ton*	2,501.60	2,526.62	2,551.88	2,577.40	2,603.17	2,629.21	2,655.50	2,655.50
	- Ketimun	*Ton*	1,395.00	1,408.95	1,423.04	1,437.27	1,451.64	1,466.16	1,480.82	1,480.82
	- Kubis	*Ton*	1,044.10	1,054.54	1,065.09	1,075.74	1,086.49	1,097.36	1,108.33	1,108.33
	- Terung	*Ton*	1,177.80	1,189.58	1,201.47	1,213.49	1,225.62	1,237.88	1,250.26	1,250.26
	- Buncis	*Ton*	578.40	584.18	590.03	595.93	601.89	607.90	613.98	613.98
2.3.3.2	Produksi sayuran utama:									
	- Cabai	Ton	2,142.30	2,163.72	2,185.36	2,207.21	2,229.29	2,251.58	2,274.09	2,274.09
	- Bawang merah	Ton	168.00	169.68	171.38	173.09	174.82	176.57	178.34	178.34
	- Petsai	Ton	2,734.00	2,761.34	2,788.95	2,816.84	2,845.01	2,873.46	2,902.20	2,902.20
	- Bayam	Ton	1,053.40	1,063.93	1,074.57	1,085.32	1,096.17	1,107.13	1,118.21	1,118.21

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	- Kacang panjang	Ton	1,936.80	1,956.17	1,975.73	1,995.49	2,015.44	2,035.60	2,055.95	2,055.95
	- Tomat	Ton	2,501.60	2,526.62	2,551.88	2,577.40	2,603.17	2,629.21	2,655.50	2,655.50
	- Ketimun	Ton	1,395.00	1,408.95	1,423.04	1,437.27	1,451.64	1,466.16	1,480.82	1,480.82
	- Kubis	Ton	1,044.10	1,054.54	1,065.09	1,075.74	1,086.49	1,097.36	1,108.33	1,108.33
	- Terung	Ton	1,177.80	1,189.58	1,201.47	1,213.49	1,225.62	1,237.88	1,250.26	1,250.26
	- Buncis	Ton	578.40	584.18	590.03	595.93	601.89	607.90	613.98	613.98
2.3.3.3	Produksi Buah:									
	- Pisang	Ton	1,532.00	1,547.32	1,562.79	1,578.42	1,594.21	1,610.15	1,626.25	1,626.25
	- Mangga	Ton	143.00	144.43	145.87	147.33	148.81	150.29	151.80	151.80
	- Nanas	Ton	43.00	43.43	43.86	44.30	44.75	45.19	45.65	45.65
	- Jeruk	Ton	40.00	40.40	40.80	41.21	41.62	42.04	42.46	42.46
	- Rambutan	Ton	252.00	254.52	257.07	259.64	262.23	264.85	267.50	267.50
	- Durian	Ton	155.00	156.55	158.12	159.70	161.29	162.91	164.54	164.54
	- Nangka	Ton	121.00	122.21	123.43	124.67	125.91	127.17	128.44	128.44
	- Pepaya	Ton	156.00	157.56	159.14	160.73	162.33	163.96	165.60	165.60
	- Sukun	Ton	154.00	155.54	157.10	158.67	160.25	161.86	163.47	163.47
	- Duku	Ton	225.00	227.25	229.52	231.82	234.14	236.48	238.84	238.84
2.3.3.4	Produksi tanaman obat:									
	- Jahe	Ton	22.96	23.19	23.42	23.66	23.89	24.13	24.37	24.37
	- Laos	Ton	41.45	41.86	42.28	42.71	43.13	43.56	44.00	44.00
	- Kencur	Ton	2.78	2.81	2.84	2.86	2.89	2.92	2.95	2.95
	- Kunyit	Ton	14.78	14.93	15.08	15.23	15.38	15.53	15.69	15.69
	- Temulawak	Ton	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
2.3.3.5	Produksi tanaman perkebunan:									
	- Kelapa	Ton	19,650.00	20,633.00	21,664.00	22,747.00	23,885.00	25,079.00	26,333.00	26,333.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	- Kelapa sawit	Ton	61,213,071.00	64,273,725.00	67,487,411.00	70,861,782.00	74,404,871.00	78,125.11	82,031,370.00	82,031,370.00
	- Kopi	Ton	245.00	257.00	270.00	283.00	298.00	312.00	328.00	328.00
	- Cengkeh	Ton	60.00	63.00	66.00	69.00	72.00	76.00	80.00	80.00
	- Kakao	Ton	5,692.00	5,976.00	6,275.00	6,589.00	6,918.00	7,264.00	7,627.00	7,627.00
	- Pala	Ton	58,792.00	61,731.00	64,818.00	68,059.00	71,462.00	75,035.00	78,787.00	78,787.00
	- Sagu	Ton	29,396.00	30,866.00	32,409.00	34,029.00	35,371.00	37,517.00	39,393.00	39,393.00
2.3.3.6	*Jumlah petani OAP yang meningkat kapasitas melalui pelatihan*	*Orang*	*11.813*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*3*
2.3.3.7	*Jumlah kelembagaan petani OAP yang meningkat kapasitasnya*	*Kelompok*	*840*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*300*
2.3.3.8	*NTP Tanaman Pangan*	*Rasio*	*96.92*	*98.86*	*100.84*	*102.85*	*104.91*	*107.01*	*109.15*	*109.15*
2.3.3.9	*NTP Hortikultura*	*Rasio*	*101.32*	*104.36*	*107.49*	*110.72*	*114.04*	*117.46*	*120.98*	*120.98*
2.3.3.10	*NTP Tanaman Perkebunan*	*Rasio*	*104.24*	*104.47*	*107.61*	*110.84*	*114.16*	*117.59*	*121.11*	*121.11*
2.3.3.11	*Pertumbuhan PDRB tanaman pangan*	*%*	*(1.12)*	*2.00*	*2.00*	*2.00*	*2.00*	*4.00*	*4.00*	*4.00*
2.3.3.12	*Pertumbuhan PDRB tanaman hortikultura*	*%*	*11.12*	*7.00*	*7.00*	*7.00*	*7.00*	*7.00*	*7.00*	*7.00*
2.3.3.13	*Pertumbuhaan PDRB perkebunan*	*%*	*7.33*	*7.00*	*7.00*	*7.00*	*7.00*	*7.00*	*7.00*	*7.00*
2.3.3.14	Luas kawasan pertanian yang dikembangkan	Ha	106,610.00	108,209.15	109,808.30	111,407.45	113,006.60	114,605.75	116,204.90	673,242.15
2.3.3.15	Produksi daging									
	- Sapi	*Kg*	*3,957,984.00*	*4,076,880.00*	*4,199,186.40*	*4,325,161.99*	*4,454,916.85*	*4,588,564.36*	*4,726,221.29*	*4,726,221.29*
	- Kambing	Kg	158,239.00	159,235.00	164,012.05	168,932.41	174,000.38	179,220.40	184,597.01	184,597.01
	- Babi	*Kg*	*1,762,640.00*	*1,793,000.00*	*1,846,790.00*	*1,902,193.70*	*1,959,259.51*	*2,018,037.30*	*2,078,578.42*	*2,078,578.42*

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.3.3.16	Produksi daging unggas									
	- Ayam kampung	Kg	1,276,377.00	1,333,015.00	1,373,005.45	1,414,195.61	1,456,621.48	1,500,320.13	1,545,329.73	1,545,329.73
	- Ayam petelur	Kg	56,162.00	57,846.86	59,582.27	61,369.73	63,210.83	65,107.15	67,060.37	67,060.37
	- Ayam pedaging	Kg	1,300,084.00	1,339,086.52	1,379,259.12	1,420,636.89	1,463,256.00	1,507,153.68	1,552,368.29	1,552,368.29
	- Itik	Kg	34,523.00	35,212.00	36,268.36	37,356.41	38,477.10	39,631.42	40,820.36	40,820.36
2.3.3.17	Produksi telur									
	- Ayam kampung	*Kg*	*634,399.00*	*662,549.00*	*682,425.47*	*702,898.23*	*723,985.18*	*745,704.74*	*768,075.88*	*768,075.88*
	- Ayam petelur	Kg	955,996.00	987,412.00	1,017,034.36	1,047,545.39	1,078,971.75	1,111,340.91	1,144,681.13	1,144,681.13
	- Itik	Kg	296,853.00	302,768.00	311,851.04	321,206.57	330,842.77	340,768.05	350,991.09	350,991.09
2.3.3.18	*Jumlah peternak OAP yang meningkat kapasitas melalui pelatihan*	*Orang*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*300*
2.3.3.19	*Jumlah kelembagaan peternak yang meningkat kapasitasnya*	*Kelompok*	*63*	*63*	*63*	*63*	*63*	*63*	*63*	*378*
2.3.3.20	NTP Peternakan	Rasio	99.11	99.64	100.00	100.53	101.06	101.60	102.14	102.14
2.3.3.21	*Pertumbuhan PDRB Peternakan*	*%*	*6.75*	*6.00*	*6.00*	*6.00*	*6.00*	*6.00*	*6.00*	*6.00*
2.3.3.22	Luas kawasan peternakan yang dikembangkan	Ha	135	135	135	135	135	135	135	810
2.3.4	**Kehutanan**									
2.3.4.1	Pertumbuhan subsektor kehutanan	%	5.86 %	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
2.3.4.2	Pembinaan dan Pemberdayaan OAP dalam Pengelolaan Hutan	Ha	730 org	232 org	433 org	433 org	433 org	433 org	433 org	3,129 org
2.3.4.3	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Ha	730.49 ha	232 ha	406 ha	406 ha	500 ha	550 ha	600 ha	3,424 ha
2.3.4.4	Persentase kegiatan pendataan, pembinaan dan penertiban produksi hasil hutan kayu (IUPHHK, IIPHHK, IPK, dan IPHHK)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.3.4.5	Jumlah KPH yang terbentuk dan operasional	unit	9	-	3	5	4	-	-	21
2.3.4.6	Jumlah dokumen kajian kehutanan	dokumen	2	-	3	3	3	-	-	11
2.3.4.7	Luas kawasan hutan yang dikembangkan	Ha	14,500 ha	-	10,000 ha	10,000 ha	10,000 ha	10,000 ha	10,000 ha	64,500 ha
2.3.4.8	Jumlah Perdasus Kehutanan	Perdasus	-	1	1	1	1	1	1	5
2.3.4.9	Cakupan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3.4.10	Persentase realisasi PNBP sektor kehutanan	%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3.4.11	Cakupan fasilitasi penanganan kasus kehutanan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3.4.12	Luas Tutupan hutan dalam kawasan hutan	Ha	8,262,961	8,262,961	8,262,961	8,262,961	8,262,961	8,262,961	8,262,961	8,262,961
2.3.4.13	Rasio Jumlah Polisi Kehutanan	Rasio	1:119,753 ha	-	1:64,238 ha	-	-	1:48,500 ha	-	1:48,500 ha
2.3.4.14	Persentase pembinaan polisi kehutanan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3.4.15	Rasio Jumlah Penyuluh Kehutanan	Rasio	1:149,231 ha	-	-	1:114,118 ha	-	1:92:381 ha	-	1:92:381 ha
2.3.4.16	Cakupan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan	%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3.5	**Energi dan Sumber Daya Mineral**									
2.3.5.1	Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	Kampung	109	250	300	300	350	350	400	1.95
2.3.5.2	Persentase kampung terakses listrik	%	44.41	51.36	58.31	65.26	72.21	79.16	86.11	86.11
2.3.5.3	Tingkat fasilitasi pemanfaatan sumberdaya alam	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	86.11	86.11
2.3.5.4	Tingkat elektrifikasi provinsi	%	75.44	77.60	79.76	81.92	84.08	86.24	88.40	88.40
2.3.5.5	Sistem informasi sumber daya mineral	Unit	n.a	-	-	1	1	1	1	1
2.3.5.6	Cakupan wilayah pendataan potensi sumber daya mineral	%	69.57	73.19	76.81	80.43	84.06	87.68	91.30	91.30

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.3.5.7	Persentase tambang illegal yang ditertibkan	%	n.a	25.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	90.00
2.3.5.8	Cakupan pengawasan kegiatan pemanfaatan sumber daya mineral	%	n.a	10.00	25.00	40.00	55.00	70.00	85.00	85.00
2.3.5.9	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan energi listrik baru terbarukan	Dokumen	11	3	5	7	9	11	13	48
2.3.5.10	Jumlah SDM yang dibina dan dilatih	Orang	75	100	100	100	100	100	100	600
2.3.5.11	Jumlah kapasitas pembangkit listrik yang terbangun	MW	339	330	322	314	306	299	291	1,862
2.3.5.12	Pembangunan dan Inventarisasi air bersih melalui sumur bor	Unit	15	25	25	25	25	25	25	150
2.3.5.13	Survei Inventarisasi potensi sumber daya mineral	Dokumen	1	-	3	3	3	3	3	15
2.3.5.14	Pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	6
2.3.6	**Perdagangan**									
2.3.6.1	Nilai ekspor bersih	$ US	2,706,140,787	2,841,447,826	2,983,520,218	3,132,696,229	3,289,331,040	3,453,797,592	3,626,487,472	3,626,487,472
2.3.6.2	*Jumlah OAP yang terlibat dalam usaha perdagangan*	*orang*	*n.a*	-	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*50*
2.3.6.3	Cakupan rekomendasi TPID yang ditindaklanjuti	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.6.4	Persentase jumlah penyelesaian keluhan konsumen	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.6.5	Persentase monitoring ketersediaan stok dan harga barang	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.6.6	Cakupan rekomendasi pengurangan hambatan perdagangan dan pengawasan perdagangan yang ditindaklanjuti	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.6.7	Fasilitasi Peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua Barat	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.6.8	Fasilitasi peningkatan perlindungan konsumen di seluruh kabupaten/kota	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.6.9	Pembangunan Papua Barat Mart	Unit	n.a	-	-	3	3	3	3	12
2.3.6.10	Cakupan standarisasi barang dan jasa daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.3.6.11	Cakupan pengembangan BPPMB	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.6.12	Cakupan pengawasan barang Ber-SNI wajib dan Jasa Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.6.13	Cakupan pelayanan kemetrologian daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.6.14	Cakupan standarisasi UTTP bidang perdagangan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.7	**Perindustrian**									
2.3.7.1	Pertumbuhan jumlah IKM	%	n.a	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2.3.7.2	*Jumlah IKM OAP*	*IKM*	*n.a*	-	*25*	*40*	*50*	*60*	*75*	*75*
2.3.7.3	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	n.a	-	-	1	2	2	2	7
2.3.7.4	Jumlah sentra industri rakyat	Sentra	n.a	-	1	1	1	1	1	5
2.3.7.5	Persentase IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	%	n.a	-	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
2.3.7.6	Persentase usaha industri dan kawasan industri yang beroperasi sesuai dengan NSPK	%	n.a	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.8	**Transmigrasi**									
2.3.8.1	*Cakupan pengembangan kawasan transmigrasi OAP*	*%*	*n.a*	*40.00*	*45.00*	*50.00*	*55.00*	*60.00*	*65.00*	*65.00*
2.3.8.2	Jumlah pemukiman wilayah transmigrasi lokal baru	kawasan	n.a	1	1	1	1	1	1	6
2.3.8.3	*Jumlah KK transmigran Orang Asli Papua (OAP) yang mandiri*	*KK*	*n.a*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*60*
2.4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**									
2.4.1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**									
2.4.1.1	Persentase ketersediaan Perdasus sesuai mandat undang-undang otonomi khusus	%	n.a	-	30.00	50.00	70.00	80.00	100.00	100.00
2.4.1.2	Persentase ketersediaan Perdasi sesuai mandat undang-undang otonomi khusus	%	n.a	-	30.00	50.00	70.00	80.00	100.00	100.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.4.1.3	Kinerja pelaksanaan program dalam regulasi terkait otonomi khusus	%	n.a	-	50.00	60.00	60.00	90.00	100.00	100.00
2.4.1.4	Persentase Kebijakan Otsus yang dilaksanakan	%	n.a	-	35.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.5	Persentase Penyusunan Bahan Kebijakan Otsus yang diselesaikan	%	n.a	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.6	Persentase Desa Adat Otsus yang terbentuk	%	n.a	-	50.00	50.00	85.00	90.00	100.00	100.00
2.4.1.7	Persentase Badan Musyawarah Kampung Adat Otsus yang terbentuk	%	n.a	-	45.00	60.00	60.00	85.00	100.00	100.00
2.4.1.8	Persentase aset yang diserahkan	%	n.a	-	30.00	50.00	60.00	70.00	80.00	80.00
2.4.1.9	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIP)	%	n.a	-	50.00	60.00	75.00	80.00	100.00	100.00
2.4.1.10	Persentase Kabupaten/ Kota Tertib Data Pembangunan Daerah yang bersumber APBD/ APBN	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.11	Persentase OPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBN	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.12	Persentase OPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.13	Cakupan fasilitasi Prasarana Peribadatan, Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Keagamaan yang memadai	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.14	Persentase fasilitasi kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.15	Cakupan fasilitasi prasarana kepemudaan yang memadai	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.16	Cakupan fasilitasi Prasarana Olah Raga yang memadai	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.17	Cakupan Fasilitasi kegiatan Syarah Keagamaan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.18	Ketersediaan mekanisme penyusunan produk hukum	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.19	Persentase gugatan yang diselesaikan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.4.1.20	Persentase Raperda yang disetujui DPRD dalam Prolegda	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.21	Persentase produk hukum daerah yang disosialisasikan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.22	Persentase produk hukum pusat yang disosialisasikan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.23	Persentase fasilitasi kegiatan protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.24	Persentase publikasi kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.25	Persentase Sarana Komunikasi/Dokumentasi dan Informasi yang memadai	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.26	Cakupan ketesediaan informasi pembangunan kepada masyarakat									
2.4.1.27	Cakupan pembinaan peningkatan pelayanan publik	%	n.a	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.28	Cakupan pemenuhan dokumen ketatalaksanaan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.29	Persentase pencapaian reformasi birokrasi	%	n.a	60.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.30	Persentase kelembagaan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, dan tepat struktur	%	n.a	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.31	Cakupan OPD Provinsi Papua Barat yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan	%	n.a	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.32	Persentase Rekomendasi dari ABK yang ditindaklanjuti	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.33	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Papua Barat	%	n.a	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	75.00
2.4.1.34	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	n.a	n.a	CC	CC	CC	B	B	B
2.4.1.35	Skor EKPPD terhadap LPPD Provinsi Papua Barat	Skor	2.22	2,50-2,90	2,50-2,90	2,50-2,90	2,50-2,90	2,50-2,90	2,50-2,90	2,50-2,90

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.4.1.36	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ dan LPPD	Predikat	Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2.4.1.37	Cakupan penyepakatan batas wilayah Provinsi Papua Barat	%	n.a	-	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
2.4.1.38	Cakupan penyepakatan batas wilayah antar kabupaten/kota	%	n.a	22.22	22.22	16.67	11.11	11.11	11.11	94.44
2.4.1.39	*Cakupan penyepakatan batas hak kelola tanah ulayat*	%	-	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	35.00
2.4.1.40	Persentase konflik penyelenggaraan pemerintahan antar kabupaten dan kota yang diselesaikan	%	13.46	13.46	5.77	9.62	15.38	19.23	9.62	73.08
2.4.1.41	Persentase calon distrik dan kampung yang memenuhi kriteria pembentukan distrik/kampung baru	%	10.62	10.62	32.42	15.17	27.01	14.22	0.57	100.00
2.4.1.42	Predikat Evaluasi perkembangan distrik dan kampung/kelurahan.	Predikat	Kurang Berkembang	Kurang Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Cepat Berkembang	Cepat Berkembang	Cepat Berkembang
2.4.1.43	Persentase kantor distrik/kampung /kelurahan yang dibangun	%	3.85	3.85	11.54	15.38	19.23	19.23	19.23	88.46
2.4.1.44	Cakupan kebijakan pembangunan ekonomi yang dihasilkan dari kajian	Kebijakan	8	5	4	4	4	4	4	25
2.4.1.45	Jumlah kemitrausahaan yang dijamin	Kerjasama	2	3	4	4	4	4	4	23
2.4.1.46	Tingkat inflasi komoditas strategis (sembako)	%	3.63	4.42	5.21	4.22	5.06	4.42	4.24	4.24
2.4.1.47	Cakupan komoditas strategis yang dikembangkan	Komoditas	2	1	2	2	2	2	2	11
2.4.1.48	Cakupan koordinasi yang dihasilkan dan ditindaklanjuti	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.49	Tingkat kapasitas SDM pengelola barang milik daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.50	Persentase OPD yang mengimplementasikan buku pedoman pelaksanaan APBD dan standar barang	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.51	Tingkat pelanggaran pengadaan barang dan jasa	%	n.a	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.4.1.52	Cakupan BMD yang telah diappraisal	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.53	Tersedianya Dokumen Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.54	Tersedianya Kodefikasi Barang Milik Daerah se-Provinsi Papua Barat	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.55	Tersusunnya Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.56	Tersusunnya laporan pengadaan barang dan jasa	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.57	Persentase fasilitasi kegiatan Tim penertiban	%	100.00	83.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.58	Persentase Sarana Prasarana Rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang memadai	%	100.00	92.86	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.59	Persentase Fasilitasi kegiatan Gubernur dan Wakil gubernur	%	80.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.60	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Kelengkapan Provinsi	Ada/Tidak	n.a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.61	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam RPJMN maupun RKPD	Ada/Tidak	n.a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.62	Terintegrasinya program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	n.a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.63	Persentase Perdasus Inisiatif yang disahkan dalam prioritas Prolegda	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.64	Jumlah Perdasus disahkan dalam prioritas Prolegda	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.65	Persentase Perda yang ditetapkan sesuasi Prolegda	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.66	Persentase rekomendasi DPRD dari LKPj yang dilaksanakan	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.4.1.67	Persentase rekomendasi DPRD dari RDP yang dilaksanakan	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.68	ASN Setwan yang kompeten dalam pelayanan fungsi Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.69	Cakupan Informasi parlemen yang terdokumentasi dan dipublikasikan kepada Masyarakat	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.70	Persentase masyarakat yang memahami penataan tanah ulayat	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.71	Persentase Pertimbangan persetujuan dan aspirasi yang ditindaklanjuti	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.72	Jumlah Pimpinan dan Anggota yang trampil dalam Penyusunan Rekomendasi	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.73	Jumlah Pimpinan dan Anggota yang trampil dalam Analisis Kebijakan Otsus	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.74	Cakupan Media Massa yang menyampaikan Rekomendasi dalam konferensi Pers	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.75	Persentase Fasilitas Kegiatan Kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur dan pejabat di Jakarta	%	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.76	Persentase fasilitasi kegiatan Provinsi Papua Barat di Jakarta	%	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.77	Persentase Sarana Prasarana Kantor Badan Penghubung Daerah yang memadai	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.78	Persentase fasilitasi kegiatan Promosi dan Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Papua Barat di Jakarta	%	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.79	Cakupan Pembinaan Kelompok Masyarakat Papua Barat di Jakarta dan sekitarnya.	%	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.1.80	Cakupan Pembinaan Hubungan dengan Kelompok *Stake Holder* (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) di Jakarta	%	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.2	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan**									
2.4.2.1	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan ekonomi daerah	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.4.2.2	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan sosial dan budaya	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.2.3	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.2.4	Cakupan realisasi perencanaan program otonomi khusus	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.2.5	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.2.6	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.2.7	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.2.8	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.2.9	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.2.10	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.2.11	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.2.12	Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.2.13	Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sosial dan budaya	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.2.14	Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.2.15	Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan terkait otonomi khusus	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.2.16	Indeks kinerja TKPKD Provinsi Papua Barat	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.2.17	Indeks kinerja TKPKD Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan**									

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.4.3.1	Tingkat implementasi inovasi daerah	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.3.2	Persentase kajian rekomendasi kebijakan daerah	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.3.3	Persentase kajian yang dipublikasikan dalam jurnal atau bulletin	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase pemanfaatan hasil kajian kelitbangan	%	n.a	30.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan**									
2.4.4.1	Cakupan peningkatan kualitas aparatur	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.4.2	Penerapan Merit System dalam manajemen kepegawaian	%	70.00	80.00	80.00	85.00	90.00	90.00	100.00	100.00
2.4.4.3	Persentase peserta ujian dinas yang lulus	%	97.40	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.4.4	Persentase pengelola kepegawaian OPD	%	23.40	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00
2.4.4.5	Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	%	80.00	80.00	80.00	85.00	85.00	90.00	90.00	90.00
2.4.4.6	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	%	93.80	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.4.7	Jumlah jabatan pimpjnan tinggi pada instansi pemerintah	orang	48	48	48	48	48	48	48	48
2.4.4.8	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	192	192	192	192	192	192	192	192
2.4.4.9	Jumlah jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	n.a	100	100	100	100	100	100	100
2.4.4.10	Cakupan pegawai yang mengikuti tugas belajar	orang	n.a	-	50	50	50	50	50	250
2.4.4.11	Cakupan pejabat struktural yang mengikuti Diklat PIM IV, III, II	Peserta	85	85	85	85	85	85	85	595
2.4.4.12	Persentase fasilitasi penyelenggaraan Diklat kabupaten/kota	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.4.13	Cakupan pegawai yang mengikuti diklat teknis	Peserta	280	280	280	280	280	280	280	1,960
2.4.4.14	Cakupan pegawai yang mengikuti diklat fungsional	Peserta	280	280	280	280	280	280	280	1,960
2.4.4.15	Persentase aparatur OPD yang meningkat kapasitasnya	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.4.4.16	Cakupan pegawai yang mengikuti diklat prajabatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.5	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan**									
2.4.5.1	Persentase pertumbuhan pendapatan daerah	%	n.a	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.4.5.2	Persentase pelanggaran wajib pajak	%	56.00	53.00	51.00	49.00	47.00	45.00	41.00	41.00
2.4.5.3	Persentase pertumbuhan PAD	%	4.96	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00
2.4.5.4	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	2.40	5.50	5.75	6.00	6.50	6.75	7.00	7.00
2.4.5.5	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.4.5.6	Persentase SILPA terhadap APBD	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.7	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	n.a	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.4.5.8	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.4.5.9	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2.4.5.10	Perbandingan antara belanja langsung dengan tidak langsung	%	1.04	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
2.4.5.11	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	26.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.4.5.12	Penetapan APBD	Tepat/Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.4.5.13	Penyampaian LKPD	Tepat/Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.4.5.14	Tertib Administrasi BMD	%	41.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	100.00	100.00
2.4.5.15	Rasio Pemanfaatan Aset	%	77.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	100.00
2.4.5.16	Cakupan evaluasi APBD kabupaten/kota	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.6	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan**									

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.4.6.1	Persentase penyelesaian TLHP	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.6.2	Skala capaian kinerja LKjIP provinsi	Skala	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.4.6.3	Cakupan kualitas SDM aparat pengawas yang profesional	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.6.4	Persentase Kabupaten dan Kota dengan Predikat EKPPD Sangat Tinggi	%	30.70	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00
2.4.6.5	Persentase OPD dengan nilai SAKIP C	%	30.70	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00
2.4.6.6	Persentase pecapaian RAD-PPK (Rencana aksi daerah pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.6.7	Tingkat pelayanan OPD sesuai SPM	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.6.8	Tingkat kualitas SDM aparat pengawas yang profesional	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.6.9	Persentase tenaga Auditor dan P2UPD yang terlatih	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.6.10	Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.4.6.11	Cakupan Sistem dan Prosedur Adminitrasi dan Pengawasan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.6.12	Persentase OPD Provinsi Papua Barat dengan pelayanan pengaduan berbasis IT	%	40.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4.6.13	Ketersediaan Kebijakan Pengawasan Terkini	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	**ASPEK DAYA SAING**									
3.1	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**									
3.1.1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**									
3.1.1.1	Pengeluaran per kapita per bulan	Rp Juta	n.a	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.60
3.1.1.2	Persentase pengeluaran konsumsi makanan	%	n.a	50.00	49.75	49.60	49.50	49.40	49.30	49.30
3.1.1.3	Produktivitas total daerah	Rp Juta	n.a	167.00	167.50	170.00	172.50	175.00	180.00	180.00
3.2	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**									
3.2.1	**Pertanian**									

No	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3.2.1.1	NTP Tanaman Pangan	Rasio	96.92	98.86	100.84	102.85	104.91	107.01	109.15	109.15
3.2.1.2	NTP Hortikultura	Rasio	101.32	104.36	107.49	110.72	114.04	117.46	120.98	120.98
3.2.1.3	NTP Tanaman Perkebunan	Rasio	104.24	104.47	107.61	110.84	114.16	117.59	121.11	121.11
3.2.2	**Perhubungan**									
3.2.2.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Unit/km	n.a	5	7	9	10	12	15	15
3.2.3	**Penataan Ruang**									
3.2.3.1	Ketaatan terhadap RTRW provinsi	%	n.a	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
3.2.4	**Perindustrian**									
3.2.4.1	Luas kawasan industri	Ha	n.a	150.00	200.00	250.00	300.00	400.00	500.00	500.00
3.2.5	**Pariwisata**									
3.2.5.1	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel	Unit	n.a	130	135	150	160	170	180	180
3.2.6	**Komunikasi dan Informatika**									
3.2.6.1	Persentase penduduk menggunakan HP	%	n.a	57.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00
3.3	**Fokus Iklim Berinvestasi**									
3.3.1	Angka kriminalitas yang tertangani	Rasio	n.a	0.20	0.18	0.17	0.15	0.15	0.13	0.13
3.3.2	Jumlah demo	kali	n.a	10	10	10	10	10	10	10
3.3.3	Lama proses perizinan	hari	n.a	7	7	7	7	3	3	3
3.3.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	jenis	n.a	10	15	20	25	30	30	30
3.3.5	Cakupan Perda yang mendukung iklim usaha	%	n.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3.4	**Fokus Sumber Daya Manusia**									
3.4.1	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	n.a	13.00	14.00	15.00	17.50	20.00	25.00	25.00
3.4.2	Rasio ketergantungan	Angka	n.a	51.13	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Foto: Billy, 201

Foto: Ed Marthin, 2017

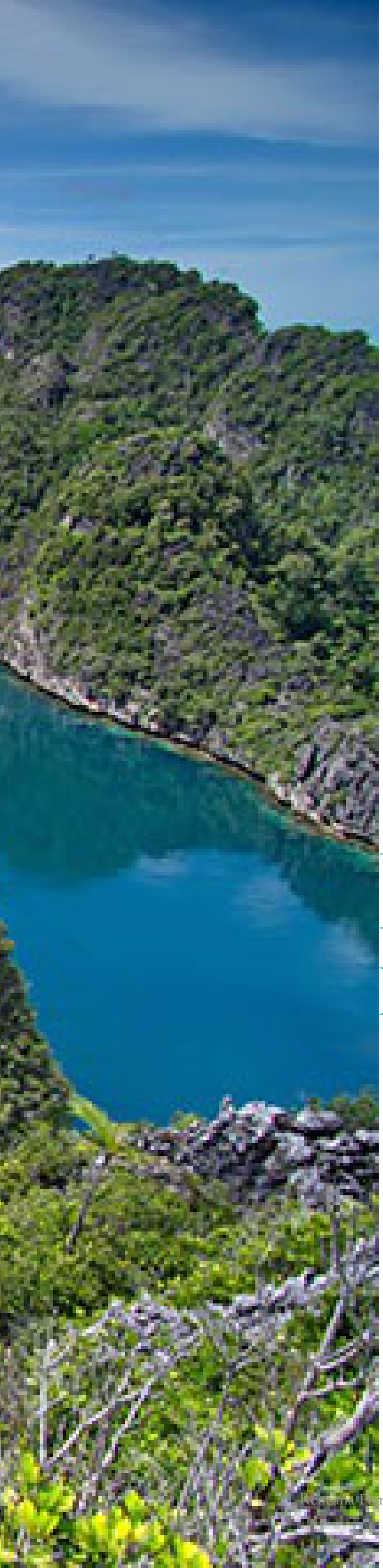

BAB IX
PENUTUP

BAB IX PENUTUP

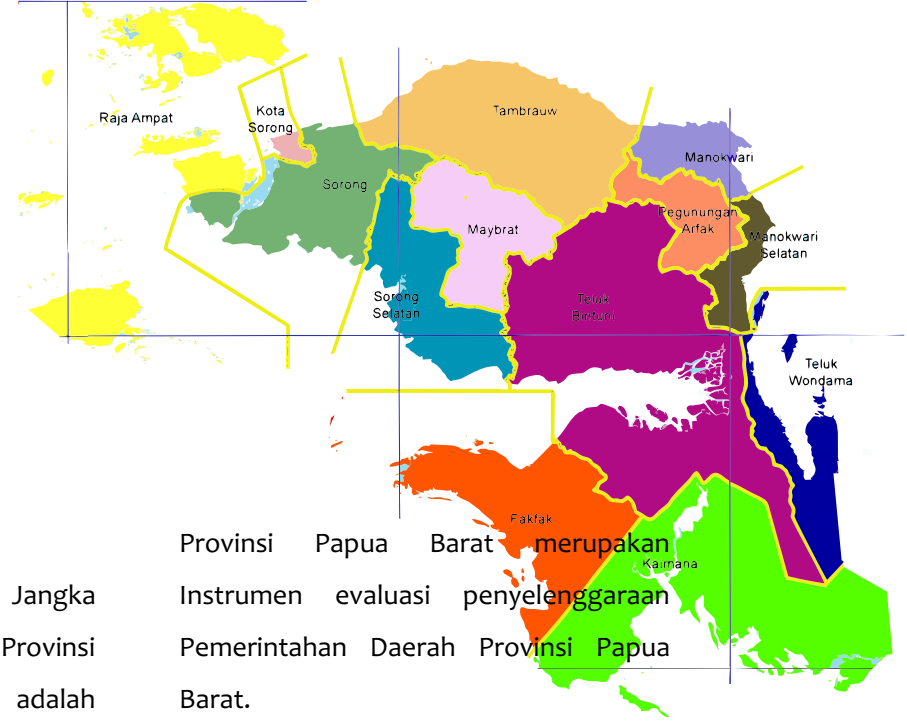

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Papua Barat periode 2017-2022. RPJMD Provinsi Papua Barat ini disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

RPJMD Provinsi Papua Barat ini disusun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat melalui pencapaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Karena itu, RPJMD Provinsi Papua Barat harus dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra OPD dan RKPD Provinsi Papua Barat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Daerah Provinsi Papua Barat. RPJMD dan RKPD Provinsi Papua Barat merupakan Instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat.

Falsafah *"Membangun dengan Hati, Mempersatukan dengan Kasih"* merupakan landasan pokok untuk semakin berkinerja mencapai target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat ini. Penguatan pengendalian dan evaluasi di tiap OPD harus lebih dioptimalkan dan diinstitusionalisasi untuk memastikan pencapaian target indikator kinerja daerah. Pengendalian dan Evaluasi itu harus menjadi instrumen untuk (*prove*) kinerja serta untuk perbaikan (im-prove) pencapaian kinerja di masa yang akan datang. Selain itu, pencapaian target indikator kinerja pembangunan daerah pada RPJMD sangat ditentukan kualitas sinergitas kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (korbinwas) untuk peningkatan sinergitas antar sektor (urusan) dan antar wilayah pun harus diperkuat dan diinstitusionalisasi.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Provinsi Papua Barat ini berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur merupakan pedoman bagi setiap kepala OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD, pedoman untuk menyusun RKPD dan perencanaan penganggaran Provinsi Papua Barat setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: ?

1. Gubernur Provinsi Papua Barat dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022;
3. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Oleh karena itu seluruh OPD di dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja OPD setiap tahun, dengan berpedoman pada RPJMD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan dan ditetapkan oleh kepala OPD serta disahkan oleh Gubernur;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Renstra OPD Provinsi Papua Barat;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Provinsi Papua Barat;
6. Dalam hal pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 menunjukkan adanya hal-hal yang perlu disesuaikan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berada diluar kendali Pemerintah Provinsi Papua Barat dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, maka strategi, arah kebijakan dan program yang telah dirumuskan dapat ditinjau kembali. Kemudian, hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dukungan dari Pemerintah Pusat, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat, serta kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha. Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Provinsi Papua Barat akan menjadi provinsi yang aman, sejahtera, dan bermartabat.

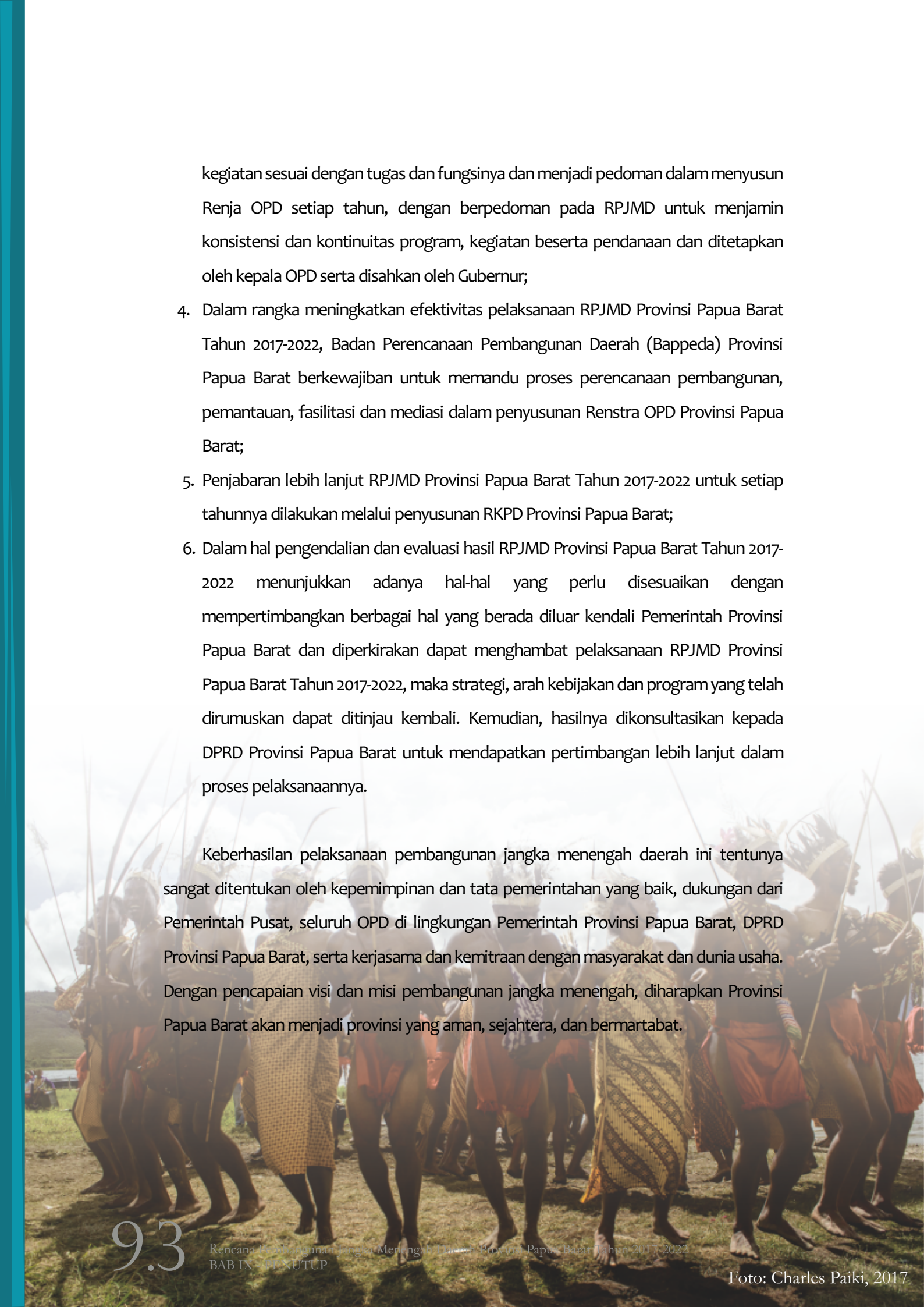

Foto: Charles Paiki, 2017

PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH